KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ASEAN
INDONESIA
2023

2023

Laporan Kinerja

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

www.kemlu.go.id

“

Diplomasi Indonesia akan terus memperjuangan kepentingan nasional, memperkokoh fondasi Visi Indonesia Emas 2045, dan terus berkontribusi bagi dunia

Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI, 8 Januari 2024

Retno L.P. Marsudi
Menteri Luar Negeri RI

Kata Pengantar

Tahun 2023 merupakan tahun yang istimewa dimana Indonesia dipercaya untuk memimpin ASEAN. Ini merupakan tahun kedua secara berturut-turut Indonesia memegang kepemimpinan di tatanan intemasional, setelah sebelumnya memegang Presidensi G20. Di tengah lanskap geopolitik yang menantang, Indonesia terus meningkatkan relevansi dan mengedepankan sentralitas ASEAN untuk menciptakan kawasan yang resilien terhadap berbagai perubahan. Indonesia terus berperan sebagai penjaga stabilitas dan perdamaian sekaligus pelopor dalam mendorong ASEAN sebagai pusat pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berakhirnya pandemi COVID-19 membuka peluang bagi Indonesia untuk kembali melanjutkan program pembangunan nasional yang sempat terhenti. Indonesia juga terus mengambil berbagai langkah yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian yang didominasi oleh isu konflik geopolitik dan krisis kemanusiaan. Melalui prioritas Polugri 4+1, Indonesia telah berhasil menavigasikan diri di tengah dinamika ini dengan tetap konsisten mengedepankan prinsip bebas aktif, mengutamakan kepentingan nasional, dan memajukan perdamaian dunia.

Diplomasi ekonomi masih menjadi fokus untuk terus dorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kunjungan Presiden RI Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan yang telah menghasilkan 33 kesepakatan senilai lebih dari USD 4 miliar, merupakan wujud konkret penetrasi ke pasar non tradisional. Melalui Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, Indonesia berhasil gagas *ASEAN-Indo-Pacific Forum* (AIPF) yang telah menghasilkan 93 proyek kerja sama senilai lebih dari USD 38,2 miliar. Diplomasi juga terus bekerja untuk perkuat *strategic presence* Indonesia di luar negeri, salah satunya dengan memperkuat keterlibatan BUMN di berbagai proyek kerja sama di berbagai kawasan.

Pelindungan bagi WNI senantiasa menjadi program prioritas Kemenlu. Diplomasi pelindungan dilaksanakan di level bilateral, regional, hingga multilateral untuk memastikan kehadiran negara bagi WNI dimanapun berada. Diplomasi pelindungan juga fokus pada penyelesaian kasus WNI di luar negeri, dimana pada tahun 2023 terdapat kurang lebih 50.349 kasus WNI yang telah berhasil diselesaikan.

Kemenlu terus menjunjung kedaulatan dan keutuhan NKRI secara absolut. Diplomasi kedaulatan dikedepankan untuk menjaga integritas wilayah Indonesia baik melalui perundingan pada forum intemasional maupun negosiasi penetapan perbatasan. Diplomat-diplomat Indonesia terus berupaya menghimpun dan memperkokoh dukungan intemasional terhadap kesatuan wilayah NKRI pada berbagai forum. Berbagai kesepakatan penetapan perbatasan telah berhasil diselesaikan dengan negara tetangga, yang mencakup batas maritim dan darat, perjanjian delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif, serta batas landas kontinen di berbagai segmen wilayah.

Indonesia juga senantiasa berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas dunia utamanya melalui *track* regional dan multilateral. Pada keketuaan Indonesia di tahun 2023, ASEAN telah berhasil menjadi organisasi kawasan yang inklusif dan kolaboratif ditengah dinamika rivalitas di kawasan Indo-Pasifik. Diplomasi Indonesia terus bekerja sehingga ASEAN bukan hanya berkontribusi dalam menjaga stabilitas keamanan, tapi juga mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di kawasan.

Di level multilateral, Indonesia terus dorong adopsi berbagai Resolusi PBB dan pengiriman personel *peacekeepers* untuk memperkuat arsitektur perdamaian dunia. Indonesia telah menjadi kontributor pengirim *peacekeepers* terbesar ke-6 di dunia dengan jumlah personel sebanyak 2.835 orang, dimana 131 orang diantaranya merupakan personel perempuan. Indonesia juga terus menyuarakan penguatan sistem multilateral guna menjamin tatanan dunia yang lebih inklusif dan representatif terhadap kepentingan semua negara, khususnya negara-negara *global-south*.

Tahun 2023 menjadi sebuah pengingat bahwa diplomasi Indonesia untuk perjuangan bangsa Palestina masih dan akan terus berlanjut. Sepanjang tahun 2023, baik melalui berbagai pertemuan bilateral, regional dan multilateral, Indonesia terus suarakan dan perjuangkan hak hak bangsa Palestina. Diplomasi Indonesia secara khusus difokuskan untuk menyerukan penghentian pelanggaran kemanusiaan terhadap bangsa Palestina, serta menggalang dukungan untuk mencapai *two-state solution*.

Performa diplomasi Indonesia yang optimal sepanjang tahun 2023 tidak dapat terlaksana tanpa dukungan infrastruktur diplomasi yang andal. Di tengah tuntutan dan ekspektasi yang tinggi terhadap diplomasi Indonesia, Kemenlu terus melakukan pembenahan, antara lain dengan pembangunan dan renovasi fasilitas fisik, perbaikan sistem manajemen, dan penataan kelembagaan diplomat. Hal ini demi menguatkan prinsip *good governance* dan mempercepat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kemenlu. Telah terdapat 21 Unit Organisasi di Pusat maupun Perwakilan RI yang telah meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

> Tahun 2023 menjadi sebuah pengingat bahwa diplomasi Indonesia untuk perjuangan bangsa Palestina masih dan akan terus berlanjut

> Performa diplomasi Indonesia yang optimal sepanjang tahun 2023 tidak dapat terlaksana tanpa dukungan infrastruktur diplomasi yang andal

Capaian diplomasi Indonesia pada tahun 2023 merupakan cerminan atas etos kerja dan kolaborasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan nasional. Apresiasi sebesar-besamya kami berikan kepada para aparatur yang terlibat, diplomat Indonesia, mitra K/L, rekan Komisi I DPR RI, awak media, serta seluruh pihak yang telah turut berkontribusi pada pemajuan politik luar negeri RI. Kami juga berterima kasih kepada segenap jajaran Pejabat dan Pegawai di Kemenlu, baik di Pusat maupun di Perwakilan RI. Sinergi dan kolaborasi yang baik ini diharapkan dapat terus dijaga demi peningkatan kualitas kinerja yang lebih baik lagi.

Sebagai bentuk akuntabilitas atas penggunaan anggaran negara, capaian kinerja diplomasi ini dituangkan secara lengkap di dalam Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Luar Negeri TA 2023. LKj ini menjadi perwujudan akuntabilitas kinerja dan anggaran berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) yang mengukur performa kinerja Kemenlu secara komprehensif.

Harapannya, dokumen ini dapat terus memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, serta menjadi tolok ukur dalam menyempurnakan manajemen kinerja dan anggaran Kemenlu kedepannya.

Jakarta, Februari 2024
Menteri Luar Negeri

ttd.

Retno L.P Marsudi

ASEAN Matters: Epicentrum of Growth

Daftar Isi

Kata Pengantar ii

Daftar Isi viii

Daftar Tabel x

Daftar Gambar xvi

Daftar Singkatan xxx

Pernyataan Telah Direviu xl

Ringkasan Eksekutif xlii

Kaleidoskop Diplomasi 2023 lx

Bab I Pendahuluan

I.1. Aspek Strategis Kementerian Luar Negeri dalam Pemerintahan 2

I.2. Tantangan dan Isu Strategis Tahun 2023 13

Bab II Perencanaan Kinerja

II.1. Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 24

II.2. Prioritas Nasional dan Penyusunan Rencana Kerja 2023 27

II.3. Perjanjian Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2023 38

Bab III Akuntabilitas Kinerja

III.1. Capaian Kinerja 52

III.SS S1 Nilai Manfaat Diplomasi yang Optimal 64

III.SS S2 Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh di Tingkat Regional dan Global 130

III.SS S3 Integritas Kedaulatan NKRI dan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional yang Meningkat 169

III.SS C1 Pelindungan WNI di Luar Negeri dan Pelayanan Publik yang Prima 217

III.SS C2 Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi 281

III.SS B1 Diplomasi Bilateral yang Kuat 332

III.SS B2 Diplomasi Multilateral yang Kuat 360

III.SS L Infrastruktur Diplomasi yang Kuat 390

Realisasi Anggaran

III.2. Realisasi Anggaran Tahun 2023 531

III.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya 536

Bab IV Penutup

IV.1. Simpulan Umum Capaian Kinerja 547

IV.2. Kendala dan Tantangan yang Dihadapi 548

IV.3. Proyeksi Ke Depan 551

Daftar Tabel

Tabel II.1 Prioritas Nasional dalam Rencana Kinerja Pemerintah Tahun 2023 29

Tabel II.2 *Output* Prioritas Nasional dalam Rencana Kinerja Pemerintah Tahun 2023 33

Tabel II.3 Program Strategis Kemenlu 34

Tabel II.4 Pemetaan *Output* ProPN Kemenlu 36

Tabel II.5 Perbandingan Target Perjanjian Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2023 dengan Tahun 2022 38

Tabel II.6 Perubahan Target Kinerja pada PK Menlu dan Wamenlu Tahun 2023 41

Tabel II.7 Pagu Anggaran Awal Kemenlu per Program Tahun 2023 44

Tabel II.8 Pagu Anggaran Akhir Kemenlu per Program Tahun 2023 45

Tabel II.9 Pagu Anggaran *Output* Prioritas Nasional Kemenlu Tahun 2023 45

Tabel II.10 Rencana Aksi Nasional Tematik Kemenlu Tahun 2023 46

Tabel III.11 Nilai Capaian Kinerja Organisasi Kemenlu 2020-2023 53

Tabel III.12 Capaian Kinerja Perspektif Kemenlu 2023 53

Tabel III.13 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kemenlu Tahun 2022 dan 2023 54

Tabel III.14 *Output* Proyek Prioritas Nasional 58

Tabel III.15 Kontribusi Kemenlu terhadap Rencana Aksi Nasional Tahun 2023 59

Tabel III.16 Capaian IKU S1.1 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan 68

Tabel III.17 Target, Realisasi, dan Capaian IKU Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan 71

Tabel III.18 Capaian IKU S1.2 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi 91

Tabel III.19 Target, Realisasi, dan Capaian IKU Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi 94

Tabel III.20 Capaian IKU S1.3 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata 111

Tabel III.21 Target, Realisasi, dan Capaian IKU Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata 114

Tabel III.22 Rentang Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional 133

Tabel III.23 Capaian IKU S2.1 Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional 134

Tabel III.24 Target, Realisasi dan Capaian IKU Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional 137

Tabel III.25 Capaian IKU S3.1 Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim 173

Tabel III.26 Target, Realisasi, dan Capaian IKU Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim 174

Tabel III.27 Rincian Capaian Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim 175

Tabel III.28 Interval dan Kategori Indeks IKU S3.2 188

Tabel III.29 Capaian IKU S3.2 Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional 189

Tabel III.30 Target, Realisasi, dan Capaian IKU Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional 191

Tabel III.31	Perbandingan Total Indeks Rata-Rata Seluruh Responden, Total Responden, Kenaikan Responden, dan Indeks Citra per Triwulan	194
Tabel III.32	Target, Realisasi, dan Capaian IKU Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan	221
Tabel III.33	Realisasi Komponen Pendukung IKU C1.1 Persentase Kasus WNI di Luar Negeri yang Diselesaikan	223
Tabel III.34	Target, Realisasi dan Capaian IKU Persentase Kasus WNI di Luar Negeri yang Diselesaikan	223
Tabel III.35	Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik	247
Tabel III.36	Capaian IKU C1.2 Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik	248
Tabel III.37	Jumlah Responden Survei Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	250
Tabel III.38	Target, Realisasi dan Capaian IKU Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik	252
Tabel III.39	Capaian IKU C2.1 Persentase Tindak Lanjut/Implementasi Kesepakatan Internasional oleh Pemangku Kepentingan di Dalam Negeri	285
Tabel III.40	Target, Realisasi dan Capaian IKU C2.1 Persentase Tindak Lanjut/ Implementasi Kesepakatan Internasional oleh Pemangku Kepentingan di Dalam Negeri	287
Tabel III.41	Capaian IKU C2.2 Indeks Pengaruh Rekomendasi Strategi Kebijakan Luar Negeri Terhadap Kebijakan Pemangku Kepentingan	313
Tabel III.42	Target, Realisasi, dan Capaian IKU C2.2 Indeks Pengaruh Rekomendasi Strategi Kebijakan Luar Negeri Terhadap Kebijakan Pemangku Kepentingan	321
Tabel III.43	Capaian IKU B1.1 Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	334
Tabel III.44	Target, Realisasi, dan Capaian IKU Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	336
Tabel III.45	Capaian IKU B1.2 Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim	348
Tabel III.46	Target, Realisasi, dan Capaian IKU Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim	350
Tabel III.47	Capaian IKU B2.1: Persentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	363
Tabel III.48	Target, Realisasi, dan Capaian IKU Persentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	365
Tabel III.49	Capaian IKU B2.2: Persentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim	365
Tabel III.50	Target, Realisasi, dan Capaian IKU Persentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim	379
Tabel III.51	Kategori Nilai Sistem Merit	393
Tabel III.52	Capaian IKU L1.1.1 Nilai Sistem Merit Kemenlu	395
Tabel III.53	Target, Realisasi, dan Capaian IKU Nilai Sistem Merit Kemenlu	396
Tabel III.54	Perbandingan IKU L1.1.1 Nilai Sistem Merit Kemenlu dengan Rata-Rata Nasional	397
Tabel III.55	Risiko dan Mitigasi Risiko Manajemen ASN Berbasis Merit Kemenlu	405
Tabel III.56	Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi	422
Tabel III.57	Capaian IKU L1.2.1 Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenlu	423
Tabel III.58	Capaian Komponen RB Kemenlu Tahun 2019-2023	424
Tabel III.59	Penilaian Hasil Antara RB Kemenlu	425
Tabel III.60	Penilaian Komponen Hasil RB Kemenlu	426

Tabel III.61 Target, Realisasi, dan Capaian IKU Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenlu 428

Tabel III.62 Perolehan Predikat WBK/WBBM Tahun 2019-2023 442

Tabel III.63 Komponen Nilai Evaluasi AKIP 455

Tabel III.64 Klasifikasi Nilai Evaluasi AKIP 455

Tabel III.65 Capaian IKU Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu 456

Tabel III.66 Rincian Hasil Evaluasi Nilai AKIP Kemenlu Tahun 2022-2023 457

Tabel III.67 Target, Realisasi, dan Capaian Perbandingan Capaian Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu 457

Tabel III.68 Perbandingan IKU L1.2.2 Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu dengan Rata-Rata Nasional 459

Tabel III.69 Capaian Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu 479

Tabel III.70 Capaian IKU L1.3.1 Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu Tahun 2023 per Parameter 480

Tabel III.71 Target, Realisasi, dan Capaian IKU Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu 482

Tabel III.72 Perbandingan Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu dengan Rata-rata Nasional 483

Tabel III.73 Capaian IKU L1.4.1 Nilai Kinerja Anggaran Kemenlu 497

Tabel III.74 Target, Realisasi, dan Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran Kemenlu 499

Tabel III.75 Indeks opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu 515

Tabel III.76 Target, Realisasi dan Capaian IKU B2.2 Indeks opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu 517

Tabel III.77 Perbandingan Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 517

Tabel III.78 Pagu dan Realisasi Anggaran Kemenlu TA 2023 per Jenis Belanja 534

Tabel III.79 Pagu dan Realisasi Anggaran Kemenlu TA 2023 per Eselon I 534

Tabel III.80 Pagu dan Realisasi Anggaran Pro PN Kemenlu TA 2023 535

Tabel III.81 Rincian Anggaran per Program dan Sasaran Strategis TA 2023 536

Tabel III.82 Jumlah Pegawai per Jabatan Fungsional 541

Tabel III.83 Laporan Pengadaan Barang Milik Negara Menurut Nilai Perolehan Tahun Anggaran TA 2023 545

Tabel III.84 Nilai Capaian Kinerja Organisasi per Perspektif 547

Tabel III.85 Perbandingan Nilai Capaian Kinerja Kemenlu 2020-2023 547

Daftar Gambar

Gambar I.1	Penyelenggaraan Fungsi Kemenlu	3
Gambar I.2	Struktur Jabatan Eselon I Kementerian Luar Negeri	4
Gambar I.3	Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kemenlu	7
Gambar II.1	Penyelenggaraan Fungsi Kemenlu	27
Gambar II.2	Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023	28
Gambar II.3	Kegiatan Prioritas yang Diampu Kemenlu Tahun 2023	28
Gambar II.4	Peta Strategi Kemenlu	37
Gambar III.1	Trade Expo Indonesia ke-38 (Tangerang Selatan, 18-22 Oktober 2023)	88
Gambar III.2	Kunjungan Resmi Presiden RI ke Amerika Serikat (Washington DC, 13 November 2023)	88
Gambar III.3	INA-LAC Business Forum (Jakarta, 16-17 Oktober 2023)	88
Gambar III.4	The 14th Indonesia Trade & Tourism Promotion (Phnom Penh, 4 Agustus 2023)	88
Gambar III.5	Presiden RI dan Kanselir Jerman secara resmi membuka Paviliun Indonesia pada pameran Hannover Messe (Hannover, 17 April 2023)	107
Gambar III.6	Indonesia-Europe Business Forum 2023 (Jakarta, 17-18 Oktober 2023)	107
Gambar III.7	Penandatanganan Komitmen Investasi Pembangunan Pabrik EV VinFast di Indonesia (Batang, 15 September 2023)	107
Gambar III.8	Road to Indonesia - Latin America and the Carribean (INA-LAC) 2023 (Mandalika, 21-23 Juni 2023)	129
Gambar III.9	Paviliun Bangga Buatan Indonesia dan Indonesia Spice up the World pada pameran Warsaw Food Expo (Polandia, 16-18 Mei 2023)	129
Gambar III.10	Wonderful Indonesia Tourism Update: Exploring New Destinations of Wonder (Vientiane, 27 Juli 2023)	129
Gambar III.11	Sales Mission - Table Top Exploring New Destination of Wonder (Kuala Lumpur, 20 Maret 2023)	129
Gambar III.12	High-Level Strategic Dialogue on IORA's 25-Years - Reflection, Review & Renewal (Mauritius, 20-22 Juni 2023)	163
Gambar III.13	The Third Meeting of IORA Core Group on Fisheries Management (CGFM) (Karawaci, 12 September 2023)	163
Gambar III.14	APEC Workshop on Promoting Creative Industries in the Aftermath of COVID-19 (Bali, 16-17 Oktober 2023)	163
Gambar III.15	Perundingan Putaran ke-15 I-EU CEPA untuk Working Group on Economic Cooperation and Capacity Building (ECCB) (Yogyakarta, 11 Juli 2023)	164
Gambar III.16	Rangkaian Pertemuan ASEF Finance & Audit Committee (FAC), Executive Committee (ExCo), dan 44th ASEF Board of Governors' Meeting (ASEFBoG44) (Barcelona dan Madrid, 3-10 Juli 2023)	164
Gambar III.17	7th Indonesia-EU Joint Committee (Brussel, 29 September 2023)	164
Gambar III.18	Penyelenggaraan Seminar Regional Pasifik Komite Dekolonisasi (C-24) Tahun 2023 (Indonesia, 24-26 Mei 2023)	165
Gambar III.19	Penyelenggaraan the 4th Meeting of the Parties to the Port State Measures Agreement (MOP4 PSMA) FAO (Bali, Indonesia, 8-12 Mei 2023)	165
Gambar III.20	MIKTA Leaders Gathering (India, 9 September 2023)	165
Gambar III.21	ASEAN Foreign Ministers' Retreat (Jakarta, 4 Februari 2023)	166

Gambar III.22 Bali Process Ministerial Conference (BPMC) ke-8 (Adelaide, Australia, 8-10 Februari 2023) 166

Gambar III.23 ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council ke-29 (Bali, 8 Mei 2023) 166

Gambar III.24 Rangkaian KTT ASEAN ke-42 (Labuan Bajo, NTT, 10-11 Mei 2023) 167

Gambar III.25 Council of Palm Oil Producing Countries (CPOC) Ministerial Meeting ke-11 (Kuala Lumpur, Malaysia, 16-17 Mei 2023) 167

Gambar III.26 Pertemuan Luar Biasa Tingkat Menteri Luar Negeri (KTM LB) ke-18 OKI (Virtual, 31 Juli 2023) 168

Gambar III.27 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 dan KTT Terkait Lainnya (Jakarta, 5-7 September 2023) 168

Gambar III.28 Rapat Interkementerian Pembahasan Implementing Arrangement Area Tumpang Tindih Yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen (LK) RI dan Negara Tetangga (Bandung, 14-17 Juni 2023) 184

Gambar III.29 Rakor Persiapan Pertemuan Tim Teknis Batas Maritim untuk Membahas *Implementing Arrangement* (IA) Area Tumpang Tindih Yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen (LK) RI-Vietnam (Jakarta, 9 November 2023) 184

Gambar III.30 ASEAN United Nations Training Workshop on the Law of the Sea Including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (Bali, 11-16 Desember 2023) 184

Gambar III.31 Preliminary Informal Meeting Ketua Tim Teknis Penetapan Batas Maritim RI-Palau (Filipina, 7 Maret 2023) 185

Gambar III.32 Penandatanganan Perjanjian Batas Laut Wilayah di Segmen Selat Malaka bagian Selatan dan Laut Sulawsi RI-Malaysia (Malaysia, 8 Juni 2023) 185

Gambar III.33 Pelaksanaan Pertemuan Teknis ke-40 Penetapan Batas Maritim RI-Malaysia (Malaysia, 20-22 Juli 2023) 185

Gambar III.34 Pelaksanaan Pertemuan Teknis ke-8 Penetapan Batas Maritim RI-Palau (Palau, 1-3 November 2023) 186

Gambar III.35 Rapat Koordinasi Tim Teknis Penetapan Batas Maritim dengan Tim Penasehat dan Tim Pakar PBM-RI (Serpong, 23 Agustus 2023) 186

Gambar III.36 Responden Survei Daring dan Luring pada Survei Citra Indonesia di Dunia Internasional 189

Gambar III.37 Aplikasi Database Citra Indonesia di Luar Negeri 190

Gambar III.38 Indeks Citra per Kawasan Tahun 2021-2023 192

Gambar III.39 Rata-Rata Indeks per Dimensi di Perwakilan RI 193

Gambar III.40 Total Indeks Rata-Rata Seluruh Responden Dibandingkan dengan Total Responden 194

Gambar III.41 Perbandingan Responden Survei Tahun 2017-2023 195

Gambar III.42 Rata-Rata Indeks Citra Berdasarkan Profesi Responden 195

Gambar III.43 Rata-Rata Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional Berdasarkan Riwayat Perjalanan ke Indonesia dan Tingkat Pengenalan Responden Mengenai Indonesia 196

Gambar III.44 Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional berdasarkan Pengenalan Responden tentang Indonesia 196

Gambar III.45 Rata-Rata Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional Berdasarkan Usia Responden 197

Gambar III.46 Rata-Rata Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional Berdasarkan Jenis Kelamin Responden 197

Gambar III.47 Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) (*Hybrid*, 11 Januari 2023) 211

Gambar III.48 Beasiswa Seni Budaya Indonesia (BSBI) - Indonesia Channel (Jakarta, 5 Juni - 5 Agustus 2023) 211

Gambar III.49 Development Leaders Conference 2023 (Oslo, 24-25 Oktober 2023) 211

Gambar III.50 Spice Up The World: Indonesia Fair (KBRI Tokyo, 4 April 2023) 212

Gambar III.51 Indonesia-Ethiopia Business Meeting (Arba Minch, Januari 2023) 212

Gambar III.52 Indonesian Culinary and Cultural Bazaar 2023 (Malaysia, 20-22 Juli 2023) 212

Gambar III.53 Kunjungan ke Sekolah di Pedalaman dalam rangka Pemberian Bantuan Alat Tulis dan Kegiatan Promosi Indonesia (KBRI Tokyo, 4 April 2023) 213

Gambar III.54 Indonesia Hajj Expo (KJRI Jeddah, Februari 2023) 213

Gambar III.55 Promosi Kopi Indonesia (KJRI Jeddah, November 2023) 213

Gambar III.56 Indonesia Week Festival 2023 (KJRI Jeddah, Juli-Agustus 2023) 214

Gambar III.57 Tresor of Indonesie: Cuisine Magnifique (KBRI Brussel, 18 Maret 2023) 214

Gambar III.58 Tresor d'Indonesie: Nuit de Ombre et de Lumiere (KBRI Brussel, Mei 2023) 214

Gambar III.59 Asian Heritage Month (KBRI Ottawa, 7 Mei 2023) 215

Gambar III.60 YMCA Embassy Chef Showcase (KJRI Jeddah, Februari 2023) 215

Gambar III.61 Bantuan Pemerintah Indonesia kepada WNI Korban Gempa Turki, Maret 2023 (Turki, Maret 2023) 241

Gambar III.62 Penanganan evakuasi WNI dari Sudan (Sudan, April 2023) 242

Gambar III.63 Pemulangan 7 Anak WNI terlantar dari Taiwan (Taiwan, Juli 2023) 243

Gambar III.64 Fasilitasi Pemulangan Jenazah JPC, Korban Pembunuhan di Jepang (Sumatera Barat, 19 Oktober 2023) 243

Gambar III.65 Penyambutan WNI *Evacuee* dari Palestina di Bandara Soekarno-Hatta (Tangerang, November 2023) 243

Gambar III.66 *Update* Daftar Negara-negara Sahabat yang menjalin Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas (PBVDD) dengan Republik Indonesia 268

Gambar III.67 The 11th Joint Diplomatic Facility and Consular Consultation Indonesia (Australia, Bali, 30 Oktober – 2 November 2023) 276

Gambar III.68 Bilateral Consultation Indonesia (Amerika, Washington D.C., 2-9 Juni 2023) 277

Gambar III.69 Pendampingan Pemeriksaan Senjata Api saat KTT ASEAN ke 43 (Jakarta, 4–7 September 2023) 277

Gambar III.70 Rapat Koordinasi Pemberian Fasilitas Diplomatik 278

Gambar III.71 Penerimaan penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Bali, 6 Desember 2023) 278

Gambar III.72 Peluncuran E-Paspor Diplomatik dan Dinas (Jakarta, 7 Desember 2023) 278

Gambar III.73 Pelayanan Kekonsuleran 279

Gambar III.74 Penganugerahaan Predikat Penilaian Kepatuhan Tinggi untuk Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023 oleh Ombudsman RI (Jakarta, 14 Desember 2023) 279

Gambar III.75 Consular and Diplomatic Facilities Management Dialogue RI-AS (Washington DC, Amerika Serikat, 2–9 Juni 2023) 279

Gambar III.76 Pertemuan dengan Imigrasi UAE terkait implementasi e-paspor diplomatik dan dinas (Abu Dhabi, 15 November 2023) 280

Gambar III.77	Kegiatan *Soft Launching* Sistem Aplikasi Izin Terbang (Flight Clearance Application System) 5.0 dan Sistem Pelayanan Legalisasi Kementerian Luar Negeri Secara Elektronik (STEMPEL ASLI) Berbasis *Web* (Jakarta, 14 Desember 2023)	280
Gambar III.78	Definisi, Cakupan dan Pemangku Kepentingan SUB IKU Pendukung	283
Gambar III.79	KUAI RI Phnom Penh dan Perwakilan Pemerintah Kamboja serta Air Asia dalam acara peluncuran jalur penerbangan langsung CGK-PNH (Phnom Penh, 10 April 2023)	307
Gambar III.80	Delegasi RI (kiri) dan delegasi Phnom Penh (kanan), pada pertemuan bilateral menindaklanjuti kesepakatan kerja sama pertanian RI-Kamboja (Phnom Penh, 15-16 Agustus 2023)	307
Gambar III.81	Pelaksanaan Konsultasi Bilateral ke-7 RI-Mesir membahas tindak lanjut kesepakatan kerja sama penanggulangan terorisme dan pertahanan (Jakarta, 20 juli 2023)	307
Gambar III.82	Pertemuan Kemenlu RI dengan Kemenlu Republik Kamerun menindaklanjuti persiapan operasionalisasi Perwakilan RI yang baru berkedudukan di Yaounde, Kamerun (Kamerun, 10-15 Juni 2023)	308
Gambar III.83	Leaders' Retreat RI-Singapura Tahun 2023 sebagai implementasi kesepakatan untuk menyelenggarakan Pertemuan Konsultatif Tahunan sejak tahun 2010 (Singapura, 16 Maret 2023)	308
Gambar III.84	Pelaksanaan Dialog HAM RI-Norwegia sebagai tindak lanjut kesepakatan Dialog HAM tahun sebelumnya (Jakarta, 6 Desember 2023)	309
Gambar III.85	Suasana Diskusi Panel pada APEC Workshop on Promoting Creative Industries in the aftermath COVID-19 sebagai tindak lanjut Aoteaora Plan of Actions (Bali, 16-17 Oktober 2023)	309
Gambar III.86	Tim Kemenlu bersama dengan Perwakilan Timor Leste di Jakarta pada kegiatan ASEAN Goes to School menindaklanjuti saran kebijakan ASEAN tentang Narrative of ASEAN Identity (Jakarta, 8 Agustus 2023)	309

Gambar III.87	Partisipasi Jurnalis negara anggota FEALAC pada program RRI Voice of Indonesia dan TVRI Live Focus Today, dalam rangka kegiatan FEALAC Journalists' Visit Program (JVP) 2023 (Jakarta, 28-31 Oktober 2023)	310
Gambar III.88	Menlu RI bersama dengan Anggota Komisi I DPR RI pada rapat dengar pendapat di Komisi I DPR membahas rancangan undang-undang ratifikasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW) (Jakarta, 2 Oktober 2023)	310
Gambar III.89	Rapat koordinasi Kemenlu dengan Kemenko Marves, Kementerian LHK, Kemebperin, BRIN dan Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN-PSL), membahas tindak lanjut INC-3 on Plastic Pollution (Bogor, 28 November - 3 Desember 2023)	310
Gambar III.90	Pelaksanaan FPDT dan Stadium General untuk penguatan diplomasi ekonomi di Universitas Mulawarman (Kalimantan Timur, 14 September 2023)	329
Gambar III.91	Delegasi Kemenlu yang dipimpin oleh Kepala BSKLN menyampaikan paparan tentang rivalitas Indo-Pasifik di Clingendael Institute (Belanda, 19-23 September 2023)	329
Gambar III.92	FGD Pembahasan Interim Report RKK Pemanfaatan RCEP	329
Gambar III.93	Sosialisasi Reviu Kebijakan "Strategi Pengembangan KEK untuk Lebih *Attractive* dan Mendukung Diplomasi Ekonomi" (Bandung, 9 Juni 2023)	330
Gambar III.94	Rangkaian Kunjungan Presiden RI, Joko Widodo, ke Afrika, menghasilkan kesepakatan, antara lain: Letter of Intent (LoI) between the Government of Indonesia and the Government of Kenya on Investment Promotion and Facilitation dan MoU antara PLN dan Tanesco tentang Kerja Sama di Bidang Kelistrikan (Afrika, 20-24 Agustus 2023)	345
Gambar III.95	Kunjungan Presiden Bangladesh dan Menteri Luar Negeri Bangladesh ke Jakarta, menghasilkan MoU kerja sama Energi RI-Bangladesh; MoU Kerja Sama Kesehatan RI – Bangladesh dan MoU Kerja Sama Pertanian RI – Bangladesh (Jakarta, 4-5 September 2023)	345
Gambar III.96	Kunjungan Presiden Korea Selatan ke Jakarta, menghasilkan sejumlah kesepakatan: Technical Partnership Arrangement on Cooperation in the field of Agriculture Mechanization and Infrastructure dan MoU on Industrial Cooperation (Jakarta, 8 September 2023)	345

Gambar III.97 Kegiatan Hannover Messe, menghasilkan Joint Declaration of Intent Pembentukan Joint Economic and Investment Committee (JEIC) RI-Jerman (Hannover, 11 April 2023) 346

Gambar III.98 Pertemuan Bilateral Presiden Jokowi dan PM Kanada menghasilkan Statement on Advancing Negotiations toward a Canada-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (Jakarta, 5 September 2023) 346

Gambar III.99 Kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat, menghasilkan *Head of Agreement* (Perjanjian Induk) Divestasi PT. Vale Indonesia Tbk (San Francisco, 17 November 2023) 346

Gambar III.100 Pertemuan bilateral RI-RRT, menghasilkan MoU tentang Dialog Bersama Tingkat Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan serta MoU tentang Kerja Sama dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Beijing, 17-18 Oktober 2023) 358

Gambar III.101 Penyelenggaraan Sidang Komisi Bersama (SKB) RI-UEA, menghasilkan *Agreed Minutes* SKB Pertama RI-UEA (Abu Dhabi, 9 November 2023) 358

Gambar III.102 Special Senior Officials' Consultation Perbatasan Darat RI-RDTL, menghasilkan Record of Discussion Special Meeting of the Senior Officials' Consultation mengenai Penetapan Perbatasan Darat RI-Timor-Leste (Jakarta, 8 September 2023) 358

Gambar III.103 Dialog Politik RI-Swiss, menghasilkan *record of the meeting* (Balikpapan, 7-8 Februari 2023) 359

Gambar III.104 Pertemuan Bilateral RI-AS, menyepakati Peningkatan kemitraan Indonesia-AS menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif (CSP) (Washington, D.C., 13 November 2023) 359

Gambar III.105 Pertemuan Economic Committee di Palm Springs (California, AS, 23-24 Februari 2023) 374

Gambar III.106 Pertemuan Concluding Senior Officials Meeting (CSOM) dalam Rangkaian Pertemuan pada APEC Economic Leaders Week (San Fransisco, 11-17 November 2023) 374

Gambar III.107 Pertemuan the 35th ASEAN-US Dialogue (Jakarta, 7 Maret 2023) 374

Gambar III.108 Pertemuan ASEAN Conference on Strengthening Food Security Integration (Jakarta, 17 April 2023) 375

Gambar III.109 Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 (Paris, Prancis, 10-24 Mei 2023) 375

Gambar III.110 Perundingan Putaran ke-15 Indonesia-EU CEPA (Yogyakarta, 9-15 Juli 2023) 375

Gambar III.111 Pertemuan the 13th Bi-Annual Meeting of the IORA Committee of Senior Officials (CSO) (Sylhet, Bangladesh, 13 – 14 Juni 2023) 387

Gambar III.112 Pertemuan 13th Asian Parliamentary Assembly (APA-13) (Antalya, Turki, 8-10 Januari 2023) 387

Gambar III.113 Rangkaian the 13th FEALAC Cyber Secretariat Workshop dan FEALAC Troika SOM and Interim Coordination Meeting (Seoul, Korea Selatan, 15-16 Juni 2023) 387

Gambar III.114 Pertemuan the 7th Indonesia – European Union Security Policy Dialogue (SPD) (Brussel, Belgia, 10 Mei 2023) 387

Gambar III.115 Pertemuan ASEAN Senior Officials' Meeting (SOM) (Jakarta, 6 Maret 2023) 388

Gambar III.116 Pertemuan ke-8 High Level Task Force (HLTF) on ASEAN Community's Post-2025 Vision (Jakarta, 26-27 Juni 2023) 388

Gambar III.117 Sidang IMO Forty-seventh Session of the Facilitation Committee (FAL) (London, 13-17 Maret 2023) 388

Gambar III.118 Sidang Sesi ke-66 Commission of Narcotic Drugs (Wina, 13-17 Maret 2023) 388

Gambar III.119 Aspek Sistem Merit (Sumber: Peraturan Komisi ASN) 394

Gambar III.120 Aspek Penilaian Nilai Sistem Merit 402

Gambar III.121 Diagram fishbone Sub-Aspek Capaian Kinerja Nilai Sistem Merit Kemenlu Tahun 2023 402

Gambar III.122 Pendampingan Komisi ASN Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Merit Kemenlu Semester I Tahun 2023 (Jakarta, 31 Juli 2023) 413

Gambar III.123 Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian BKN Tahun 2023 (Bandung, 30 Mei 2023) 413

Gambar III.124 Penerimaan Penghargaan BKN Awards (Jakarta, 4 September 2023) 414

Gambar III.125 Piagam Penghargaan atas Penerapan Sistem Merit Kemenlu Tahun 2023 415

Gambar III.126 Pemberian Piagam Penghargaan atas Penerapan Sistem Merit Kemenlu Tahun 2023 (Yogyakarta, 7 Desember 2023) 415

Gambar III.127 Sesdilu Internasional sebagai bagian Program MIKTA Youth Diplomats (Jakarta, 4-11 November 2023) 415

Gambar III.128 Magang peserta Diklat Sekdilu 43 pada pertemuan dengan murid Sekolah Indonesia (Kinabalu, 9 Mei 2023) 416

Gambar III.129 Sertifikat Akreditasi dari LAN sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi 416

Gambar III.130 Sertifikat Akreditasi dari LAN sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi Penyelenggara Latsar CPNS 416

Gambar III.131 Sertifikat ISO 9001:2015 Rekrutmen dan Seleksi ASN Kemenlu 417

Gambar III.132 Sertifikat ISO 9001:2005 417

Gambar III.133 Perubahan Road Map RB 2020-2024 420

Gambar III.134 Sembilan Kebijakan Birokrasi Digital 421

Gambar III.135 Nilai RB Kemenlu dibandingkan dengan Rata-rata Nasional Tahun 2020-2022 428

Gambar III.136 Penerimaan Penghargaan BKN Awards, 4 September 2023 439

Gambar III.137 Data Pengaduan yang Terselesaikan Tahun 2022-2023 443

Gambar III.138 Penilaian Monev Gratifikasi Tahun 2023 444

Gambar III.139 Hasil Survei Penilaian Integritas Kemenlu Tahun 2023 447

Gambar III.140 Kunjungan Menteri PANRB pada fasilitas pelayanan publik Kemenlu, Doha 447

Gambar III.141 Daftar 97 Negara Mitra dengan Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas 447

Gambar III.142 *Daycare* Kemenlu Memenuhi Standaridisasi *Daycare* Ramah Anak/Taman Asuh Ceria (TARA) dengan Predikat TARA Nindya 449

Gambar III.143 Kolaborasi Kemenlu dengan K/L terkait pada Presidensi G20 450

Gambar III.144 *Focus Group Discussion* RB Tematik dan Perubahan Road Map RB 2020-2024 (13 Maret 2023) 453

Gambar III.145 Pemberian Penghargaan WBK dan WBBM (Bali, 6 Desember 2023) 453

Gambar III.146 ASEAN Foreign Ministers' Retreat (Jakarta, 4 Februari 2023) 453

Gambar III.147 Perkembangan Nilai AKIP Kemenlu 2017-2023 458

Gambar III.148 Progress Peningkatan Nilai AKIP Unit Organisasi Kemenlu 460

Gambar III.149 Dialog Kinerja Organisasi Menlu dan Eselon I (Januari 2023) 473

Gambar III.150 Penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja Dialog Kinerja Organisasi - Rapat Pimpinan Menteri Luar Negeri (Januari 2023) 473

Gambar III.151 Dialog Kinerja Organisasi Ditjen Aspasaf (13 Januari 2023) 473

Gambar III.152 Dialog Kinerja Organisasi Ditjen Protokol dan Konsuler (23 Januari 2023) 474

Gambar III.153 Dialog Kinerja Organisasi Ditjen KSM (13 Maret 2023) 474

Gambar III.154 Dialog Kinerja Organisasi Inspektorat Jenderal (1 Desember 2023) 474

Gambar III.155 Dialog Kinerja Organisasi Sekretariat Jenderal (16 September 2023) 475

Gambar III.156 Dialog Kinerja Organisasi Ditjen IDP (10 Desember 2023) 475

Gambar III.157 *Sharing Knowledge* Penyusunan Lkj Kemenlu kepada LKPP 475

Gambar III.158 Parameter Indeks Pengelolaan Aset 477

Gambar III.159 Kategori Indeks Pengelolaan Aset 478

Gambar III.160 Menlu Resmikan Gedung KBRI Abu Dhabi Bersama Menteri Energi dan Infrastruktur (PEA, Abu Dhabi, 9 November 2023) 491

Gambar III.161 Menlu Resmikan Gedung KBRI Tokyo Bersama Menteri Menlu Jepang (Tokyo, 15 Desember 2023) 491

Gambar III.162 Rapat dengan DJKN terkait IPA (Jakarta, 8 Agustus 2023) 491

Gambar III.163 Bimtek RKBMN (Jakarta, 2 November 2023) 492

Gambar III.164 Variabel yang Diukur dalam EKA SMART 495

Gambar III.165 Formulasi Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran SMART 496

Gambar III.166 Nilai Kinerja Anggaran Eselon I 498

Gambar III.167 Pengarahan Sekretaris Jenderal pada Bimtek Renja-RKAKL 2023 (Tangerang, 13–27 Juni 2023) 510

Gambar III.168 Kegiatan Monev Kinerja Pusat dan Perwakilan RI TW I TA 2023 (Jakarta, 9–12 Mei 2023) 510

Gambar III.169 *One-on-One Meeting* dan Asistensi dalam rangka Bimbingan Pengisian IKPA Satker Perwakilan RI di Luar Negeri (Jakarta, 8 Agustus 2023) 510

Gambar III.170 Kegiatan Monev Kinerja Pusat dan Perwakilan RI TW II TA 2023 (Jakarta, 12–24 Juli 2023) 511

Gambar III.171 Kegiatan pra Monev TW IV TA 2023 (Jakarta, 12–15 Desember 2023) 511

Gambar III.172 Opini BPK atas Laporan Keuangan 513

Gambar III.173 Kriteria Opini BPK 516

Gambar III.174 *Timeline* Kegiatan Reviu LK Kemenlu 525

Gambar III.175 Penyerahan LHP BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu TA 2022 (Jakarta, 3 Agustus 2023) 527

Gambar III.176 Penyusunan Laporan Keuangan Kemenlu TA 2022 *Unaudited* (Hotel Hermitage, Jakarta, 31 Januari 2023) 527

Gambar III.177 Penyusunan Laporan Keuangan Kemenlu TA 2022 *Audited* (Gedung Arsip, Jakarta, 13 April 2023) 528

Gambar III.178 Evaluasi Kartu Pengawas Satker Perwakilan Semester I TA 2023 (Gedung Arsip, Jakarta, 10 Juli 2023) 528

Gambar III.179 Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 (Gedung Arsip, Jakarta, 15 Juli 2023) 529

Gambar III.180 Evaluasi Kartu Pengawas Satker Perwakilan Triwulan III TA 2023 (Gedung Communication Center Puskom Portal, Jakarta, 9 Oktober 2023) 529

Gambar III.181 *Entry Briefing* Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan dan *Exit Briefing* Pemeriksaan atas Laporan BMN pada Kemenlu Tahun 2023 (Jakarta, 9 Oktober 2023) 529

Gambar III.182 Penyusunan Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) (Gedung Museum KAA, Bandung 5-7 Desember 2023) 530

Gambar III.183 *Entry Briefing* Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan 2023 dan *Exit Briefing* Pemeriksaan atas Laporan BMN pada Kemenlu Tahun 2023 (Ruang Nusantara, Jakarta, 15 Januari 2024) 530

Gambar III.184 Penyusunan Kertas Kerja Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan TA 2023 (Ruang Nusantara, Jakarta, 15 Januari 2024) 530

Gambar III.185 Data Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Kemenlu Periode TA 2014-2024 533

Gambar III.186 Kuadran Panduan Monev Kinerja dan Anggaran 539

Gambar III.187 Kategori Tinggi Rendahnya Capaian Kinerja dan Anggaran Per Triwulan 540

Gambar III.188 Penerimaan P3K Kemenlu Tahun 2023 542

Daftar Singkatan

A

AANZFTA	: ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement
ACWG	: G20 Anti-Corruption Working Group
ADFM	: Asia Dialogue on Forced Migration
AEM	: ASEAN Economic Ministers
AHKFTA	: ASEAN Hongkong Free Trade Agreement
AIPF	: ASEAN Indo-Pacific Forum
AIS	: Archipelagic and Island State
AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat
AKSI	: Aplikasi Kinerja Organisasi
AMCA	: ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts
AMEROP	: Amerika dan Eropa
AOIP	: ASEAN Outlook on the Indo-Pacific
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
APT	: KTT ASEAN Plus Three
ARF	: ASEAN Regional Forum
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
ASPASAF	: Asia Pasifik dan Afrika
ATT	: Anak Tidak Terdokumentasi dan Terlantar

B

BAPANAS	: Badan Pangan Nasional
Bareskrim Polri	: Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia
BCA	: Border Crossing Agreement
BIPA	: Bagi Penutur Asing
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal

BMN	: Barang Milik Negara
BP2MI	: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BSC	: Balanced Scorecard
BTA	: Border Trade Agreement
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BVK	: Bebas Visa Kedatangan

C

CALK	: Catatan atas Laporan Keuangan
CAV	: Continuing Assessment Visit
CBD	: Convention on Biodiversity
CBDR-RC	: Common but Differentiated Responsbilities and Respective Capabilities
CCB	: Cooperation and Capacity Building
CEPA	: Comprehensive Economic Partnership Agreement
COVID-19	: Corona Virus Disease 2019
CRF	: Cambodia Rice Federation
CSO	: Committee of Senior Officials

D

DELRI	: Delegasi RI
DISTAS	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
CBD	: Convention on Biodiversity

E

EA	: Enterprise Architecture
EKA	: Evaluasi Kinerja Anggaran
EPO	: Exit Permit Only
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
EV	: Electric Vehicle Ecosystem

F

FAL	: Facilitation Committee
FCAS	: Flight Clearance Application System
FGD	: Focus Group Discussion
FKB	: Forum Konsultasi Bilateral
FKP	: Forum Kebijakan Publik
FOC	: Foreign Office Consultation
FDPT	: Foreign Data Policy Talk
FRKLN	: Forum Reviu Kebijakan Luar Negeri
FTA	: Free Trade Agreement
FTF	: Foreign Terrorist Fighter

G

G20	: Group of 20
GCTF	: Global Counter Terrorism Forum
GDC	: Geothermal Development Company

H

HCDP	: Human Capital Development Plan
HCSS	: The Hague Centre for Strategic Studies
HoA	: Heads of Agreements

I

IBP	: Internal Business Process
ICAO	: International Civil Aviation Organization
ICAWE	: International Conference on Afghan Women's Education
IDF	: Israel Defense Forces
IGE	: Intergovernmental Group of Expert
IJEPA	: Indonesia-Japan Economic Partnership
IKI	: Indikator Kinerja Individu
IKM	: Indeks Kepuasan Masyarakat
IKN	: Ibu Kota Negara di Nusantara
IKPA	: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
IKU	: Indikator Kinerja Utama
IMBTA	: Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement
INASCA	: Indonesia – South and Central Asia
IOM	: International Organization for Migration
IORA	: Indian Ocean Rim Association
IPA	: Indeks Pengelolaan Aset
IPAK	: Indeks Persepsi Anti Korupsi
IPFD	: Indonesia-Pacific Forum for Development
IPPD	: Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

IT	: Informasi dan Teknologi
ITAPS FEM IPB	: International Trade Analysis and Policy Studies, serta Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor
ITKP	: Indeks Tata Kelola Pengadaan
IUPK	: Izin Usaha Pertambangan Khusus
IUU FISHING	: Ilegal, Unreported and Unregulated Fishing

J

JBC	: Joint Border Committee
JEIC	: Joint Economic and Investment Committee
JVP	: Journalists' Visit Program

K

K/L	: Kementerian / Lembaga
KBKSB	: Komisi Bersama Kerja Sama Bilateral
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus
Kemenko PMK	: Kementerian Koordinator Bidang Pembanguan Manusia dan Kebudayaan
Kemenko Polhukam	: Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kemenlu	: Kementerian Luar Negeri
KEPIRJEN	: Keputusan Inspektur Jenderal
KKB	: Komite Konsultasi Bilateral
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi

L

LAC	: Leiden Asia Centre
LBKP	: Laporan Barang Kuasa Pengguna
LHE	: Laporan Hasil Evaluasi
LHK	: Linkungan Hidup dan Kehutanan
LHKASN	: Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
LHKPN	: Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	: Laporan Keuangan
LKE	: Laporan Kerja Evaluasi
LKj	: Laporan Kinerja
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LMS	: Learning Management System
LO	: Liaison Officer
LoI	: Letter of Intent

M

MCN	: Mandatory Consular Notification
MHPSS	: Mental Health Psychosocial Support
MIKTA	: Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia
MKOP	: Manajemen Kinerja Organisasi dan Perwakilan
MP	: Maksimum Pencairan
MPP	: Misi Pemeliharaan Perdamaian
MSW	: Maritime Single Window

N

NAI	: Narrative of ASEAN Identity
NCKO	: Nilai Capaian Kerja Organisasi
NHRIS	: National Human Rights Institutions
NIK	: Nilai Interval Konversi
NIT	: Nomor Induk Tunggal
NKA	: Nilai Kinerja Anggaran
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia

O

OBP	: Outstanding Boundary Problems
OECD	: Organisation for Economic Co-operation and Development
OKI	: Organisasi Kerja Sama Islam

P

PBVDD	: Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas
PD	: Political Dialogue
PEA	: Persatuan Emirat Arab
PERPRES	: Peraturan Presiden
PIF	: Pacific Island Forum
PITE	: Pengendalian Intern Tingkat Entitas
PKA	: Pertemuan Kelompok Ahli
PKS	: Perjanjian Kerja Sama
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
PNA/OI	: Perwakilan Negara Asing / Organisasi Internasional
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak

POLUGRI	: Politik Luar Negeri
PP	: Peraturan Pemerintah
PPD	: Policy Planning Dialogue
PRK	: Pembangunan Rendah Karbon
PTA	: Preferential Trade Agreement
PUTIK	: Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi

R

RAN	: Rencana Aksi Nasional
RB	: Reformasi Birokrasi
RCEP	: Regional Comprehensive Economic Partnership
RI	: Republik Indonesia
RKBMN	: Rencana Kebutuhan Barang Milik Negera
RKM	: Reviu Kebijakan Mandiri
RNI	: PT Rajawali Nusantara Indonesia
RSPP	: Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

S

SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintah
SATKER	: Satuan Kerja
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIJ	: Sekolah Indonesia Jeddah
SIM	: Sekolah Indonesia Mekkah
SIJ	: Sistem Informasi Pengawasan Intern Kementerian Luar Negeri
SIPINTER	: Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit

SITPROTKONS : Sistem Informasi Terpadu Protokol dan Konsuler

SKB : Sidang Komisi Bersama

SKJ : Standar Kompetensi Jabatan

SLA : Service Level Agreement

SOMCA : ASEAN Senior Officials' Meeting for Culture and Arts

SOMTC : ASEAN Senior Officials' Meeting on Transnational Crime

SOP : Standar Operasional Prosedur

SPBE : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SPD : Security Policy Dialogue

SPI : Sistem Pengendalian Intern

SPI : Survei Penilaian Integritas

SPLP : Surat Perjalanan Laksana Paspor

SS : Sasaran Strategis

SSCA : State Secretariat of Civil Aviation

T

TIK : Teknologi Informasi dan Komunikasi

ToT : Training of Trainers

TPB : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPI : Tempat Pemeriksaan Imigrasi

TPNW : Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons

TPPO : Tindak Pidana Perdagangan Orang

U

UI : User Interface

UIII : Universitas Islam Internasional Indonesia

ULE : Unit Lokus Evaluasi

UMKT : Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

UNMUL : Universitas Mulawarman

UNU-KT : Universitas Nadhlatul Ulama Kalimantan Timur

UNCLOS : United Nations Convention on the Law of the Sea

UP : Uang Persediaan

UPG : Unit Pengendalian Gratifikasi

UPP : Unit Pelayanan Publik

USD : United States Dollar

V

VIP : Very Important Person

VOA : Visa on Arrival

VTD : Vaccines, Therapeutics, and Diagnostics

VVIP : Very Very Important Person

W

WASDAL : Pengawasan dan Pengendalian

WBBM : Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

WBK : Wilayah Bebas Korupsi

WBS : Whistle Blowing System

WGBE : Working Group on the Blue Economy

WNA : Warga Negara Asing

WNI : Warga Negara Indonesia

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WWF : World Water Forum

Z

ZI : Zona Integritas

ZEE : Zona Ekonomi Eksklusif

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Luar Negeri.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2024
Inspektur Jenderal

ttd.

Ibnu Wahyutomo
NIP. 19660315 199103 1 001

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Capaian Kinerja 2023

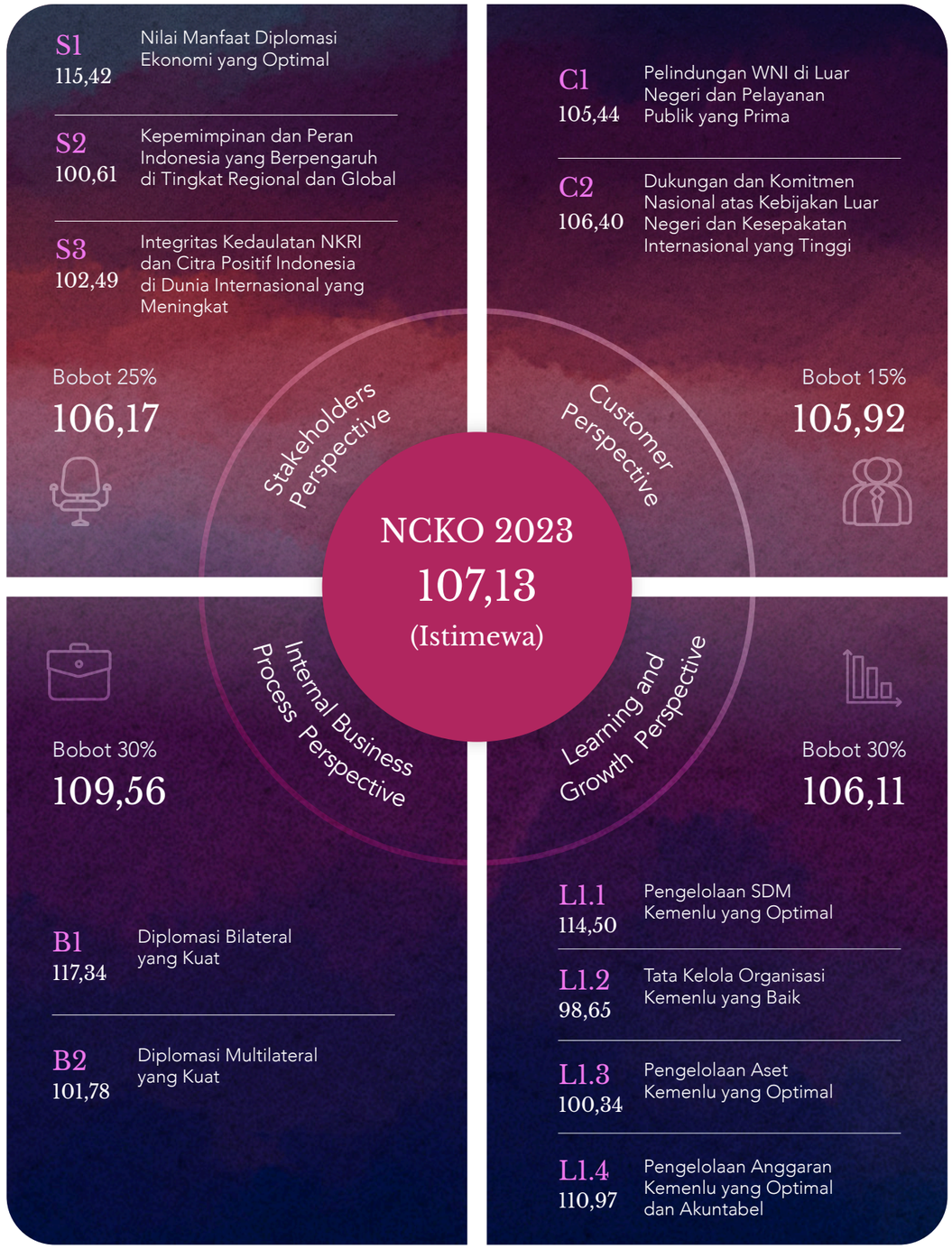

Dari total 20 IKU

14 IKU
Tercapai Melebihi Target (Nilai ≥100)

4 IKU
Tercapai Sesuai Target (Nilai =100)

2 IKU
Tercapai Kurang Dari Target (Nilai <100)

Capaian Indikator Kinerja Kemenlu dari tahun ke tahun

Stakeholders Perspective

● Target ● Realisasi ● Capaian

2020 2021 2022 2023

S1.1
Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan

N/A N/A

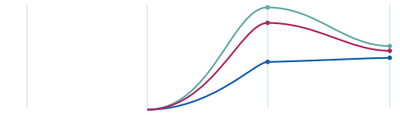

S1.2
Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi

N/A N/A

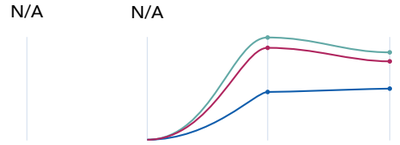

S1.3
Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata

N/A N/A

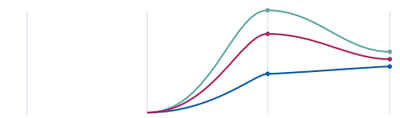

S2.1
Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional

*) Tahun 2022 terdapat penyesuaian cara pengukuran kinerja, dari persen menjadi indeks.

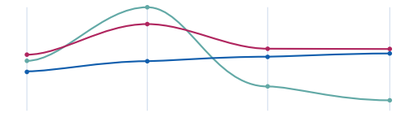

S3.1
Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional

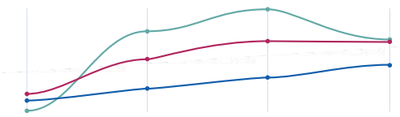

S3.2
Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim

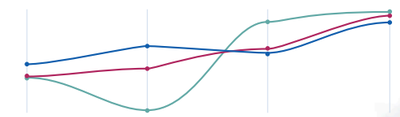

Customer Perspective

● Target ● Realisasi ● Capaian

2020 2021 2022 2023

C1.1
Perentase Kasus WNI di Luar Negeri yang Diselesaikan

C1.2
Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik

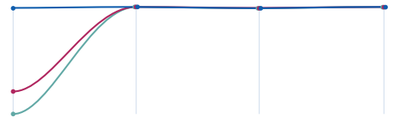

C2.1
Persentase Tindak Lanjut/ Implementasi Kesepakatan Internasional oleh Pemangku Kepentingan di Dalam Negeri

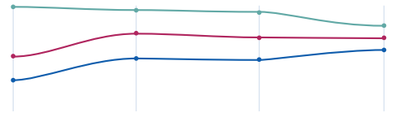

C2.2
IndeksPengaruh Rekomendasi Strategi Kebijakan Luar Negeri Terhadap Kebijakan Pemangku Kepentingan

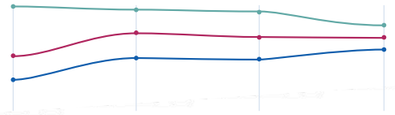

Internal Business Process Perspective

● Target ● Realisasi ● Capaian

2020 2021 2022 2023

B1.1
Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

N/A N/A

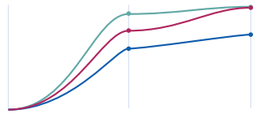

B1.2
Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamananan, dan Maritim

N/A N/A

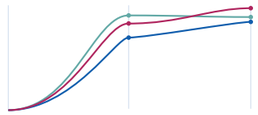

B2.1
Persentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia Yang Diterima Pada Forum Multilateral di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

N/A N/A

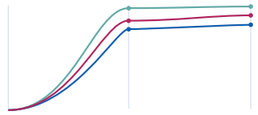

B2.2
Persentase Prakarsa/ Rekomendasi Indonesia Yang Diterima Pada Forum Multilateral di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim

N/A N/A

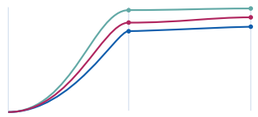

Learning and Growth Perspective

● Target ● Realisasi ● Capaian

2020 2021 2022 2023

L1.1.1
Nilai Sistem Merit Kementerian Luar Negeri

N/A

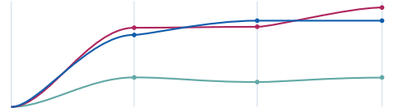

L.1.2.1
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri

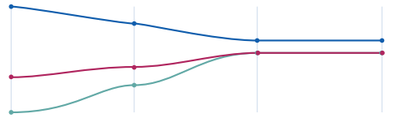

L.1.2.2
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri

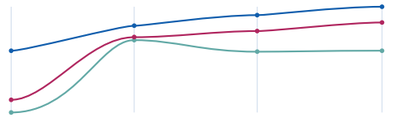

L1.3.1
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri

N/A N/A

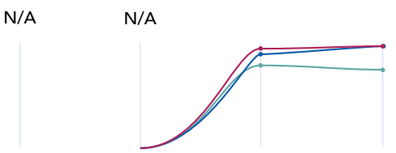

L.1.4.1
Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Luar Negeri

N/A

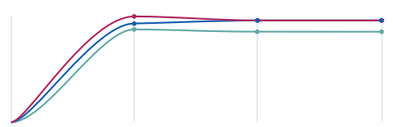

L.1.4.2
Indeks Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kemenlu

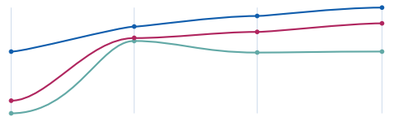

Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO)

NCKO Kemenlu diperoleh dari perhitungan capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan bobot IKU dan bobot perspektif. Tahun 2023 Kemenlu mengadopsi 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) IKU serta berkontribusi kepada pencapaian 2 (dua) Program Prioritas Nasional (ProPN).

Mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, Kemenlu berperan penting dalam mendukung pencapaian 2 Prioritas Nasional (PN) yang tercermin ke dalam 5 (lima) Kegiatan Prioritas (KP) dan menjadi acuan penetapan IKU Kemenlu.

PN 1

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

KP 7	Peningkatan Efektivitas *Prefrential Trade Agreement* (PTA)/*Free Trade Agreement* (FTA)/*Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi

PN 7

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

KP 1	Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri
KP 2	Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional
KP 3	Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional
KP 4	Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global

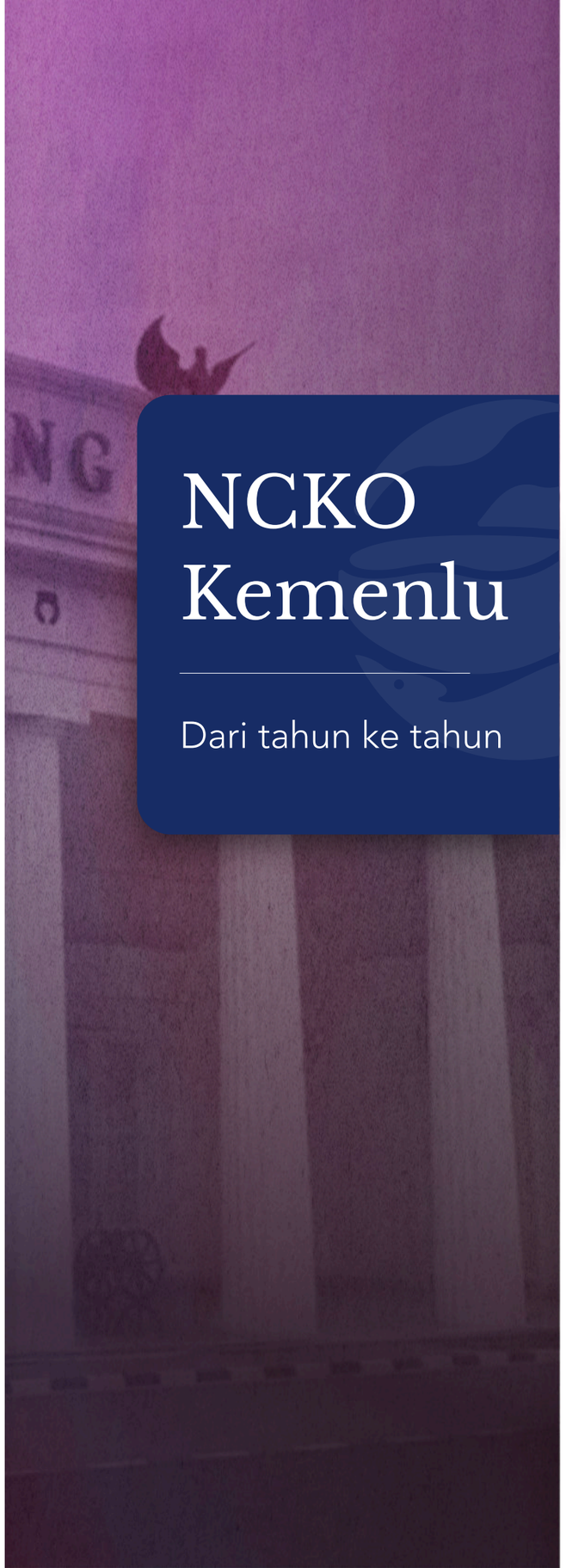

NCKO Kemenlu

Dari tahun ke tahun

2020	101,50	Predikat Memenuhi Ekspektasi
2021	107,66	Predikat Memenuhi Ekspektasi
2022	107,16	Predikat Istimewa
2023	107,13	Predikat Istimewa

Dalam 4 tahun terakhir, Kemenlu terus berupaya untuk memenuhi ekspektasi dari keseluruhan target IKU dengan nilai capaian di atas 100 (predikat Istimewa). Peningkatan capaian rata-rata secara signifikan terlihat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, terdapat peningkatan target dan realisasi IKU Kemenlu yang berkontribusi pada kenaikan nilai capaian jika dibandingkan dengan 3 tahun terakhir.

Capaian kinerja tersebut didukung dengan metode penganggaran berbasis kinerja. Sepanjang tahun anggaran 2023, Kemenlu mendapatkan alokasi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Alokasi Anggaran 2023

Rp8,83 Triliun

Alokasi anggaran ProPN sekitar 3,17%
(Rp280 Miliar)

Total Realisasi Anggaran 2023

Rp8,68 Triliun

Realisasi anggaran ProPN sekitar 97,28%
(Rp272,8 Miliar)

Sisa Anggaran (SIAR) 2023

Rp156 Miliar

Sekitar 1,77% dari Pagu

↓ Rp65 Miliar

Dibandingkan tahun 2022
(Rp221Miliar)

Total Anggaran Terserap 2023

98,23%

Meningkat 1,05% dari tahun 2022 (97,18%)

> "Dari total serapan anggaran dan capaian output, terdapat efisiensi belanja Kemenlu pada tahun 2023
>
> - Dit. Polhukhankam BA BUN Kemenkeu

Pelaksanaan anggaran Kemenlu dipantau secara berkala melalui aplikasi berbasis web yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, yang menghasilkan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Kedua komponen ini berkontribusi pada capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kemenlu.

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) 2023	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kemenlu 2023
96,40	93,19	94,80
Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

(Data per tanggal 24 Januari 2024)
Sumber; Aplikasi SMART dan OMSPAN

Highlights Capaian Pelaksanaan Politik Luar Negeri (Polugri)

Isu-isu Strategis

Prioritas Polugri RI Tahun 2020-2024

Prioritas 1
Penguatan Diplomasi Ekonomi

Prioritas 2
Diplomasi Pelindungan

Prioritas 3
Diplomasi Kedaulatan dan Kebangsaan

Prioritas 4
Meningkatkan Kontribusi dan Kepemimpinan Indonesia di Kawasan dan Dunia

Plus 1
Infrastruktur Diplomasi

Strategi Kemenlu untuk mendukung pembangunan nasional melalui optimalisasi kebijakan luar negeri bertumpu pada 5 (lima) Program Kerja yang mengacu pada Prioritas Polugri 4+1 dan ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja setiap tahun. Berikut *highlights* capaian atas pelaksanaan tiap program di sepanjang tahun 2023.

Diplomasi dan Kerja Sama Internasional

Di tengah krisis ekonomi dan pemulihan pasca pandemi, peningkatan kerja sama ekonomi telah menghasilkan berbagai capaian konkret di tahun 2023, diantaranya:

- Lebih dari 300 komitmen perdagangan dihasilkan dengan total nilai komitmen sekitar USD 15,23 Miliar. Selain itu, kerja sama investasi mencapai 190 komitmen sekitar USD 60,72 Miliar. Dalam mendukung peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, Perwakilan RI di luar negeri telah memfasilitasi 54 kunjungan jurnalistik/ *familiarization trip* ke Indonesia, serta menyelenggarakan lebih dari 1.200 kegiatan promosi budaya dan pariwisata di sepanjang tahun 2023.

- Penyelesaian 6 (enam) perjanjian dagang untuk meningkatkan akses pasar dan mengurangi hambatan perdagangan melalui:

  a. *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dengan PEA & Kanada.
  b. *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dengan Korea Selatan.
  c. *Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement* (BTA).
  d. Perubahan Protokol *Indonesia-Japan Economic Partnership* (IJEPA).
  e. Perubahan *ASEAN-Hongkong Free Trade Agreement* (AHKFTA).
  f. Protokol Kedua Perubahan *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement* (AANZFTA).

- Penetrasi pasar produk industri strategis Indonesia untuk memperkuat bisnis BUMN Indonesia pada tahun 2023, diantaranya kerja sama:

  a. Ekspor produk perkeretaapian PT. INKA ke Bangladesh, Selandia Baru, Filipina.
  b. Ekspor 6 pesawat produksi PT. DI ke Thailand, Filipina, dan Senegal.
  c. Investasi Pembangunan infrastruktur ekonomi digital Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab.
  d. Eksplorasi sumber daya mineral dan gas oleh Pertamina di Aljazair dan Mnazi Bay-Tanzania.

- Diplomasi kebangsaan melalui promosi aset budaya dan pariwisata, diantaranya:

  a. Diplomasi Bahasa Indonesia untuk menjangkau *Friends of Indonesia* melalui program Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA).
  b. Penguatan diaspora Indonesia melalui penyusunan *Grand* Strategi Peningkatan Peran Strategis Masyarakat Indonesia di Luar Negeri.
  c. Pelaksanaan pameran budaya dan pariwisata serta *familirization trip* yang berkontribusi pada citra positif Indonesia dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia yang mencatat jumlah total kunjungan pada periode Januari-Oktober 2023 sebesar 9,1 juta kunjungan, meningkat lebih dari 100% dari tahun 2022 (3,9 juta kunjungan).

Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja Sama Regional dan Multilateral

Keketuaan Indonesia di ASEAN

- Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 berhasil mengadopsi ASEAN Concord IV dan ASEAN Leaders' Declaration as an Epicentrum of Growth, sebagai fondasi untuk penyusunan Visi Komunitas ASEAN 2045.

- Penyelenggaraan ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) pada tahun 2023 menjadi inisiatif baru yang digagas untuk memperluas kolaborasi sektor publik dan swasta di Kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik, menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan damai sejahtera melalui pendekatan kerja sama konkret yang inklusif (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific).

Keketuaan Indonesia pada MIKTA 2023

- Di bawah Keketuaan Indonesia tahun 2023, KTT MIKTA juga diselenggarakan untuk pertama kalinya, yang menegaskan MIKTA sebagai *positive force* di tengah polarisasi dunia. MIKTA menyepakati 14 *joint statements* yang merefleksikan posisi bersama negara anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) di berbagai bidang.

Kawasan Pasifik

- *Engagement* dengan Kawasan Pasifik juga terus ditingkatkan di tahun 2023. Indonesia kembali mengundang wakil dari Pacific Islands Forum (PIF) untuk mengikuti rangkaian pertemuan strategis selama keketuaan Indonesia di ASEAN.

- Untuk pertama kalinya, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) 2023 diselenggarakan yang mendorong kerja sama di sektor perubahan iklim, kemaritiman, dan manajemen bencana.

Kawasan Afrika

- Komitmen dengan Afrika dikuatkan kembali dengan kunjungan Presiden Joko Widodo pada tahun 2023 ke Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan, yang menghasilkan 33 kesepakatan senilai lebih dari USD 4 miliar. Selain itu, peningkatan hubungan diplomatik dengan Afrika juga diwujudkan melalui pembukaan 1 (satu) KBRI baru di Republik Kamerun berkedudukan di, Yaounde, serta 4 negara Afrika telah membuka Kedutaan Besarnya di Indonesia yaitu Kenya, Tanzania, Angola, dan Rwanda serta pembukaan kembali Kedutaan Besar Ethiopia di Jakarta.

Tingkatan Multilateral

- Upaya menjaga perdamaian dunia terus ditingkatkan melalui pengiriman *peacekeepers* Indonesia. Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-6 negara kontributor terbesar di MPP dengan 2.835 personil aktif termasuk 131 personil *peacekeepers* perempuan.

- Ratifikasi traktat mengenai pelarangan senjata nuklir melalui penandatanganan Undang-Undang No. 22 Tahun 2023 tentang pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW).

- Indonesia terus menyerukan hak setiap negara atas kedaulatan teritorial dan penghormatan terhadap hukum internasional. Menyikapi eskalasi konflik di Gaza, Indonesia melalui OKI melakukan *shuttle diplomacy* untuk mendorong terciptanya gencatan senjata permanen serta pemberian bantuan kemanusian tanpa hambatan.

> ...bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
>
> - Pembukaan UUD 1945

Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik

- Paradigma pelayanan dan pelindungan WNI diubah ke strategi yang antisipatif dan komprehensif di semua tingkatan, mulai dari penandatangan kesepakatan bilateral, pembentukan mekanisme penanganan kasus di Kawasan ASEAN, hingga partisipasi aktif untuk membentuk *Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration*.

- Sistem pelindungan serta inovasi pelayanan dan pelindungan digital juga terus diperkuat melalui SMS *Blast*, Lapor Diri melalui Portal Peduli WNI, dan Aplikasi Safe Travel di Yaounde yang dapat memantau keberadaan WNI dan pemberian bantuan pada situasi darurat.

53.598
Kasus WNI yang ditangani

47.482	6.166
Kasus umum	Kasus khusus

50.349
Kasus WNI telah selesai

44.842	5.507
Kasus umum	Kasus khusus

50.349
Kasus telah diselesaikan dari 53.598 kasus yang ditangani

Rp94 M
Fasilitasi pengembalian hak-hak finansial WNI di luar negeri (diyat, asuransi, gaji tidak dibayar, dll) senilai Rp 94.615.092.844

8.872 WNI
Pemulangan 8.872 WNI/ PMI (termasuk Kelompok Rentan) dari Malaysia

408 WNI/ABK
Kasus dari 97 kapal (perikanan & niaga) telah ditangani

1.119 WNI
Dievakuasi dari berbagai keadaan darurat (Sudan, Turki, Palestina, Tepi Barat)

760
Kasus TPO

3.837
Kasus *online scam*

Rp2,5 M
Anggaran penanganan

169 ibu & anak ATT
(Anak Tidak Terdokumentasi)

Telah dipulangkan dari Taiwan dan Persatuan Emirat Arab

19 WNI
Dibebaskan dari ancaman hukuman mati

3 WNI
Melakukan repatriasi korban perampokan bersenjata di perairan Yaman

Penegakkan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional

Di tahun 2023, negosiasi/perundingan penetapan batas maritim telah dilaksanakan sebanyak 16 perundingan dengan 4 (empat) negara tetangga yang berbatasan dengan laut Indonesia, yaitu Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Palau.

Malaysia

8 Perundingan

Penandatangan 2 Perjanjian Batas Maritim, yaitu:

- Perjanjian Batas Laut Wilayah di segmen Laut Sulawesi.
- Perjanjian Batas Laut Wilayah di segmen Selat Malaka bagian Selatan.

Vietnam

4 Perundingan

Untuk mengatur implementasi hak dan kewajiban masing-masing negara sesuai dengan UNCLOS 1982 dan mandat Perjanjian Batas ZEE 2022.

Filipina

1 Perundingan

Perundingan lanjutan batas landas kontinen. Tindak lanjut Pasal 3 Perjanjian Batas ZEE RI-Filipina (2014) untuk melakukan *joint co-production of nautical chart*.

Palau

3 Perundingan

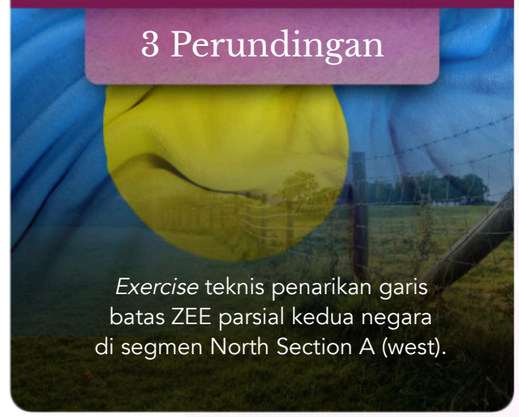

Exercise teknis penarikan garis batas ZEE parsial kedua negara di segmen North Section A (west).

Selain penetapan batas maritim, diplomasi Indonesia juga diperkuat melalui perundingan batas darat, peningkatan kerja sama perbatasan, dan kerja sama kelautan.

Malaysia

6 Perundingan

- Penandatangan 2 revisi Perjanjian Batas Darat, yaitu:
  - *Border Crossing Agreement (BCA)*
  - *Border Trade Agreement (BTA)*
- Perundingan untuk menyelesaikan demarkasi di Pulau Sebatik.

Timor Leste

2 Perundingan

- Intensifikasi perundingan untuk menyelesaiakn demarkasi *Outstanding Boundary Problems* (OBP) sektor timur.
- Peningkatan kerja sama perbatasan dengan dimulai kembalinya *Joint Border Committee* (JBC) (terakhir dilaksanakan tahun 2013).

Peningkatan Kerja Sama Kelautan

Drafting dokumen kerja sama kelautan Indonesia dengan Thailand, Filipina, RRT, Singapura, Tanzania, dan Amerika Serikat.

Dukungan Manajemen

Dukungan manajemen dikelola untuk memperkuat infrastruktur diplomasi Kemenlu, untuk memastikan berjalannya dukungan seluruh sumber daya dalam menunjang pelaksanaan diplomasi dan hubungan luar negeri.

79,46
(BB) / Sangat Baik
Nilai Evaluasi RB Kemenlu Tahun 2022

79,15
(BB) / Sangat Baik
Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu

2,91 Skala 4
Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu

4
Wajar Tanpa Pengecualian
Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu

94,80
(BB) / Sangat Baik
Nilai Kinerja Anggaran Kemenlu

343,50
Nilai Sistem Merit Kemenlu

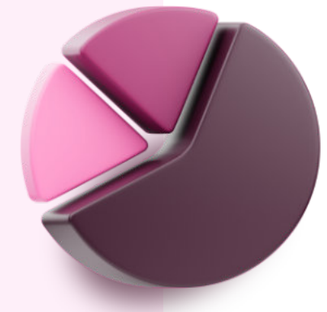

Pada tahun 2023, Kemenlu berhasil meningkatkan jumlah unit organisasi pusat dan perwakilan peraih predikat Zona Integritas.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver
(1 unit organisasi Perwakilan)
Penghargaan
ZI Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia
(1 unit organisasi Eselon II)
Penghargaan
ZI Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Pencapaian 4 Tahun Terakhir

12 unit organisasi	5 unit organisasi Pusat dan Perwakilan
ZI WBK	ZI WBBM

Capaian ini menunjukkan komtimen yang tinggi untuk mendukung program Reformasi Birokrasi di Kemenlu.

Kaleidoskop Diplomasi 2023

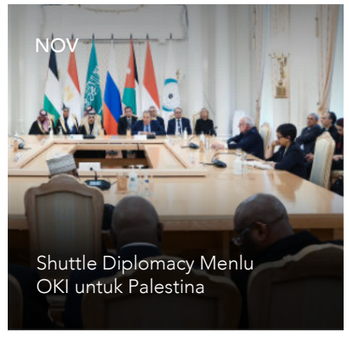

Bab I

Pendahuluan

I.1. Aspek Strategis Kementerian Luar Negeri dalam Pemerintahan

I.2. Tantangan dan Isu Strategis Tahun 2023

I.1

Aspek Strategis Kementerian Luar Negeri dalam Pemerintahan

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebagai perwujudan pemerintah Indonesia di dunia internasional menjalankan peran pada pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas dan kemakmuran dunia, Peran strategis Kemenlu tertuang pada Pasal 8 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, sebagai salah satu kementerian *triumvirat*, bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan.

> *Foreign Policy Begins at Home*

Kemenlu membantu Presiden dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksana politik luar negeri. Hal ini dilakukan melalui perumusan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan dan sasarannya dengan meletakkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Hal ini merupakan mandat dari Pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Kedudukan, tugas dan fungsi Kemenlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri. Perpres menegaskan peran kunci dan strategis Kemenlu selaku koordinator penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada Kementerian/Lembaga.

Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Luar Negeri berdasarkan Perpres 116/2020

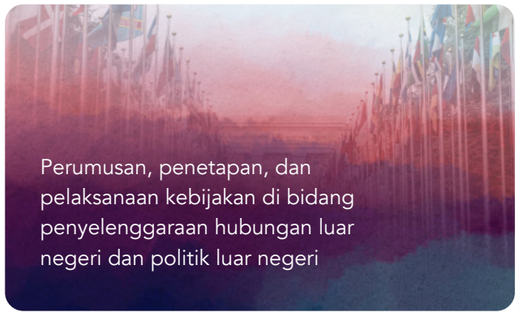

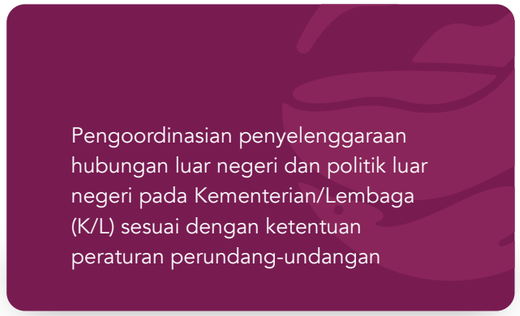

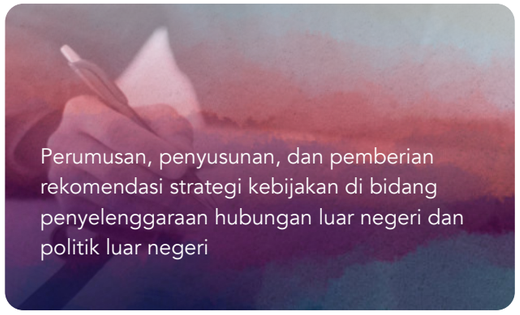

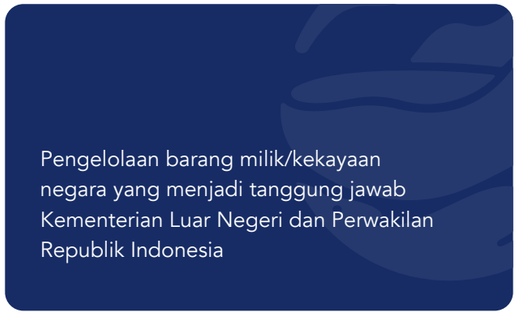

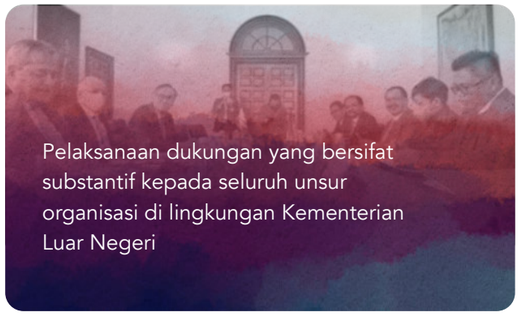

Gambar I.1
Penyelenggaraan Fungsi Kemenlu (Sumber: Perpres)

Mandat pengoordinasian hubungan luar negeri tersebut telah selaras dengan amanat Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, bahwa "koordinasi dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri diselenggarakan oleh Menteri [Luar Negeri]." Pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa pejabat selain Menteri Luar Negeri yang ditunjuk oleh Presiden untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri.

Kedudukan, tugas dan fungsi Kemenlu kemudian dijabarkan secara rinci ke dalam Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kemenlu. Penyusunan OTK Kemenlu dilakukan berdasarkan penataan organisasi dan analisis terhadap unit organisasi Kemenlu serta sesuai arahan Presiden untuk menyederhanakan birokrasi dan transformasi ke jabatan fungsional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Menteri Luar Negeri (Menlu) dibantu oleh Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) dan 10 (sepuluh) pejabat Eselon Ia yang terdiri dari: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan, serta 5 (lima) Staf Ahli Menteri setingkat Eselon Ib, serta 1 (satu) Staf Khusus.

Sesuai Permenlu Nomor 6 Tahun 2021 tentang OTK Kemenlu, struktur organisasi Kemenlu terdrii dari 10 unit kerja Eselon I, 5 Staf Ahli, 3 Staf Khusus, dan 59 unit kerja Eselon II. Sementara, struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) 132 Perwakilan RI masih merujuk pada Kepmenlu Nomor 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri (yang terakhir diubah melalui Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Kepmenlu 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri).

Gambar I.2
Struktur Jabatan Eselon I Kementerian Luar Negeri (Sumber: Kemenlu)

Menteri Luar Negeri

Retno L.P. Marsudi

Wakil Menteri Luar Negeri

Pahala Nugraha Mansury

Bagan Struktur Jabatan Eselon I Kementerian Luar Negeri

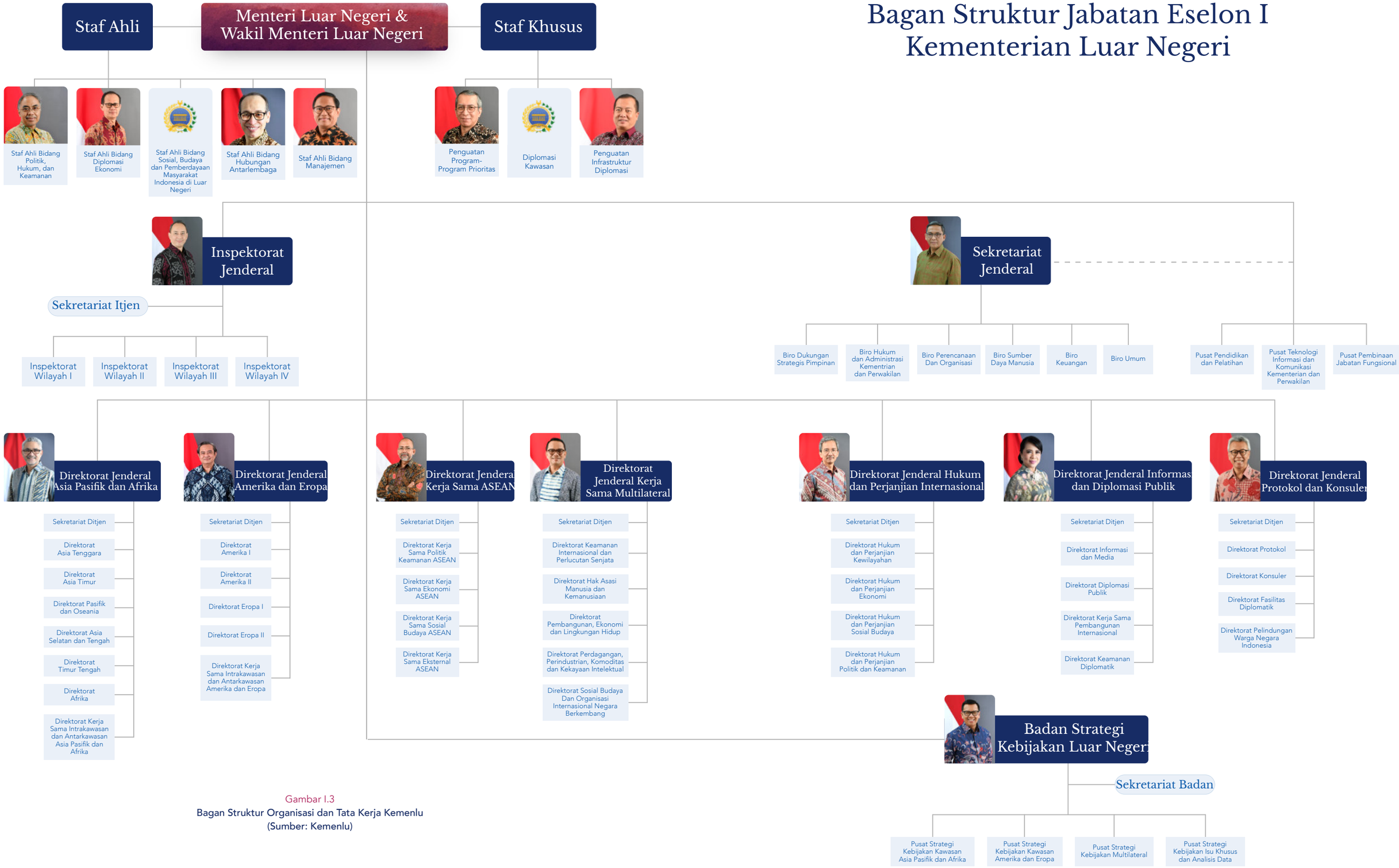

Gambar I.3
Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kemenlu
(Sumber: Kemenlu)

Kelembagaan Kemenlu dan Perwakilan akan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Sebagai bagian dari pembenahan infrastruktur diplomasi, organisasi Kemenlu dan Perwakilan RI akan diatur menjadi lebih efisien dengan struktur yang sederhana namun fokus pada pencapaian target-target pembangunan yang ditetapkan dalam prioritas kebijakan luar negeri RI.

Visi kelembagaan Kemenlu diimplementasikan dengan menajamkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenlu serta Perwakilan RI, terutama pada isu-isu prioritas, melalui penguatan mekanisme kerja berbasis fungsional.

Kemenlu terus melakukan upaya penguatan organisasi dengan melakukan tata kelola kelembagaan kementerian dengan menerbitkan Permenlu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri. Permenlu ini melengkapi rangkaian proses penataan kelembagaan yang telah dimulai sejak 2020 dengan Perpres Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri. Selain itu, sepanjang tahun 2023 Kemenlu mulai menyusun Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Jabatan, Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri yang bertujuan untuk:

1. Menyesuaikan nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Luar Negeri sesuai dengan ketentuan pada Permenpan 45/2022 dan Kepmenpan 1103/2022 sekaligus memberikan landasan hukum bagi jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

2. Menyesuaikan kelas jabatan sekaligus memberikan landasan hukum bagi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk bisa mendapatkan hak-hak keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Memberikan landasan hukum bagi penetapan jabatan, kelas jabatan dan peta jabatan bagi Pejabat Fungsional Diplomat, Penata Kanselerai dan Pranata Informasi Diplomatik yang ditugaskan pada PTRI ASEAN yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja bagi para pejabat dimaksud.

Proses penataan kelembagaan pada lingkup Perwakilan RI masih terus dilakukan, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024. Mengikuti pola penataan kelembagaan di Pusat, penataan kelembagaan pada Perwakilan RI dimulai dengan melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi Perwakilan RI (R-Perpres OPRI) sebagai revisi atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI dan Kepmenlu SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Penataan kelembagaan pada Perwakilan RI diarahkan untuk:

1. Penguatan kelembagaan Perwakilan RI di luar negeri maupun yang berkedudukan di Jakarta, yaitu PTRI ASEAN.
2. Penguatan proses bisnis.
3. Penyederhanaan jabatan.
4. Pelindungan dan pelayanan bagi pegawai.
5. Antisipasi terhadap tantangan di masa mendatang.

Sebagai upaya peningkatan pelindungan dan pelayanan bagi pegawai, Kemenlu telah menerbitkan Permenlu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peningkatan Manfaat Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Beserta Keluarga dan Permenlu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Fasilitas Sewa Rumah bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Dalam mendukung program perpindahan Ibukota ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kemenlu berperan dalam mempersiapkan perpindahan Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional (PNA/OI) ke IKN. Pada tahun 2023, tim Kemenlu utamanya fokus pada pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenlu dan pemindahan PNA/OI, menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang terkait dengan perpindahan Kemenlu maupun Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional (PNA/OI), mendorong investasi untuk pembangunan IKN, dan transisi pelayanan publik Kemenlu.

Dalam konteks tersebut, Kemenlu telah mengoordinasikan serangkaian pembahasan bersama dengan melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), guna membahas aspek-aspek dalam perpindahan Kemenlu dan PNA/OI ke IKN.

Organisasi Kemenlu maupun Perwakilan yang berbasis fungsional akan terus disempurnakan guna terus mendukung upaya pencapaian sasaran strategis Kemenlu yang tertuang dalam rencana strategis Kemenlu 2020-2024.

> “Kemenlu berperan dalam mempersiapkan perpindahan Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional (PNA/OI) ke IKN

Peran Strategis Kementerian Luar Negeri dalam Mendukung Pencapaian Agenda Pembangunan Nasional.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) IV tahun 2020-2024, telah diidentifikasi arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional. Kemenlu dalam hal ini mempunyai mandat terhadap pelaksanaan arah kebijakan dan strategi untuk Agenda Pembangunan "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik" dan "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas", khususnya dalam rangka optimalisasi kebijakan luar negeri yang meliputi:

i. Memperkuat integritas wilayah NKRI dan pelindungan WNI di luar negeri.
ii. Meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional.
iii. Memperkuat kerja sama pembangunan internasional.
iv. Meningkatkan peran Indonesia di tingkat regional dan global.

Strategi Kemenlu dalam pencapaian target RPJMN dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri tahun 2020-2024, dimana Prioritas Politik Luar Negeri Kemenlu bertumpu pada Prioritas 4+1 yakni Penguatan Diplomasi Ekonomi; Diplomasi Perlindungan; Diplomasi Kedaulatan dan Kebangsaan; Peningkatan Kontribusi dan Kepemimpinan Indonesia di Kawasan dan Dunia; plus Penguatan Infrastruktur Diplomasi.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat RPJMN, Kemenlu terus berupaya agar target kinerja tahun berjalan terpenuhi sehingga dapat mencapai pula target RPJMN sampai dengan tahun 2024. Rencana Kerja Kemenlu Tahun 2023 disusun untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang mengusung tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Secara khusus, Kemenlu memiliki 8 Proyek Prioritas Nasional (ProPN) yang mendukung program pada Rencana Kerja Kemenlu TA 2023. Selain itu, Kemenlu juga berkolaborasi bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait lain dalam mendukung capaian atas beberapa rencana aksi nasional tematik yang dilaksanakan pada tahun 2023.

> "Rencana Kerja Kemenlu Tahun 2023 disusun untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang mengusung tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"

Sebagai inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian RKP Tahun 2023, khususnya prioritas Pemerintah mengenai pemulihan ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan serta mempertimbangkan penguatan ekonomi, Kemenlu memberdayakan perangkat diplomatik baik di Pusat maupun Perwakilan RI untuk memfasilitasi para pelaku usaha, salah satunya melalui Tim Penguatan Pemulihan Ekonomi (TPPE).

Tim serupa telah diinisiasi sejak tahun 2020, guna mengawal komitmen-komitmen potensial untuk dapat segera ditindaklanjuti. Tim dibentuk sebagai upaya peningkatan produktivitas untuk peningkatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai dasar bagi kementerian/lembaga dalam menyusun rencana kerja dan anggaran dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.

> "TPPE bersama direktorat bidang bilateral bertugas menjembatani seluruh *stakeholders* baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk merealisasikan berbagai peluang kerja sama di berbagai sektor

TPPE bersama direktorat bidang bilateral bertugas menjembatani seluruh *stakeholders* baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk merealisasikan berbagai peluang kerja sama di berbagai sektor khususnya di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, TPPE mengedepankan asas koordinasi dan kolaborasi serta fokus pada isu-isu strategis guna menghasilkan *quick wins* yang dapat dirasakan manfaatnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional memasuki masa endemi Covid-19. TPPE mempunyai ruang lingkup tugas yang meliputi antara lain:

a. Diplomasi untuk mendukung pencapaian kerja sama konkrit pada Keketuaan ASEAN 2023 dan penyelenggaraan ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) sebagai program prioritasnya.
b. Diplomasi dalam mendukung kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional.
c. Diplomasi untuk mendukung peningkatan kapasitas usaha BUMN dan/atau anak perusahaannya.
d. Diplomasi untuk mendukung penguatan perdagangan dan fasilitasi penanaman modal/investasi *inbound* dan *outbound*.
e. Diplomasi untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata dan memfasilitasi perjalanan lintas batas yang terdampak pandemi.
f. Diplomasi terkait lainnya yang mendukung penguatan pemulihan dan ketahanan ekonomi nasional, seperti pengembangan Ekonomi Digital dan Kreatif, Ketahanan Pangan dan Alternatif Sumber Daya, Industri Strategis, Ekonomi Hijau, dan ekspor komoditas unggulan.

I.2

Tantangan dan Isu Strategis Tahun 2023

Dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan semangat "Terus Bertumbuh dan Melaju", Kemenlu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia di bidang politik luar negeri melalui peningkatan kerja sama secara bilateral, regional maupun multilateral.

Upaya percepatan pemulihan ekonomi dilakukan agar terhindar dari resesi ekonomi yang telah melanda negara-negara di dunia. Kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia empat tahun terakhir telah menempatkan Indonesia sebagai negara *Middle Power in Asia* dengan *diplomatic influence* dan *comprehensive power* yang terus meningkat. Kapasitas diplomasi Indonesia diakui dan memiliki pengaruh yang tinggi di Asia Tenggara (Lowy Institute, 2023)

Dalam konteks kerjasama bilateral, meskipun juga penuh tantangan, Indonesia dengan semangat optimisme tetap mengupayakan peningkatan kerja sama melalui perolehan berbagai kesepakatan antarnegara.

Pada konteks kerja sama kawasan regional, Indonesia mengemban mandat Keketuaan ASEAN untuk membangun pertumbuhan regional, memacu ekonomi digital, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Pada konteks kerja sama Multilateral, Indonesia selalu berperan sebagai *bridge builder* dalam forum-forum global di tengah ketegangan geopolitik akibat perang Palestina, resesi ekonomi global, krisis pangan dan energi sebagai dampak konflik Rusia-Ukraina, serta isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Strategi Kemenlu dalam mewujudkan peran dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional dilaksanakan melalui Prioritas Polugri 4+1, yaitu:

Prioritas 1

Penguatan Diplomasi Ekonomi

Keberlangsungan Tindak Lanjut KTT G20 Tahun 2022

Indonesia telah menginisiasi *Concrete Deliverables G-to-G* dengan 361 proyek senilai lebih dari USD 71 miliar pada momen Presidensi Indonesia pada KTT G20 tahun 2022, hal ini merupakan inisiatif pertama yang terjadi di G20. Sementara proyek swasta tercatat senilai lebih dari USD 29 miliar, diantaranya di bidang energi, kesehatan, otomotif, sumber daya alam, dan *e-commerce*. Selama Keketuaan Indonesia di G20 juga dibentuk Kelompok Kerja untuk ekonomi digital. Upaya pemantauan dan tindak lanjut atas *Concrete Deliverables G-to-G* dilakukan sepanjang tahun 2023.

Diplomasi Indonesia melalui Forum G7

Kemenlu mendukung Indonesia sebagai mitra yang dapat diandalkan oleh Group of Seven, kelompok negara-negara paling maju di dunia yang menguasai 45 persen perekonomian global. Negara anggota G7 menaruh perhatian untuk berkolaborasi dengan Indonesia demi mencapai tujuan bersama. Indonesia sebagai negara berkembang dilibatkan untuk memberikan masukan terhadap isu krusial dunia, terutama soal keamanan kawasan Eropa dan Indo-Pasifik, transformasi energi dan aksi menangani perubahan iklim dari sudut pandang kepentingan negara berkembang. Hai ini merupakan bentuk pengakuan negara-negara maju atas pencapaian Indonesia.

Penyelenggaraan AIS Forum 2023

KTT Negara-Negara Pulau dan Kepulauan atau Archipelagic and Island States (AIS). Forum yang diselenggarakan di Bali, 9-11 September 2023 diikuti delegasi dari 32 negara partisipan dengan mengusung tema "*Fostering Collaboration, Enabling Innovation, for our Ocean and Our Future*". Forum bertujuan untuk menjadi wadah kerja sama antarnegara pulau dan kepulauan untuk memperkuat kolaborasi dalam mengatasi masalah global terkait kelautan, setiap delegasi akan menyampaikan pernyataan sikap negara atau organisasi masing-masing.

KTT AIS Forum menghasilkan Leaders' Declaration of The Archipelagic and Island States Forum 2023. Deklarasi ini menyatakan komitmen negara pulau dan kepulauan untuk bekerja sama mengatasi masalah-masalah bersama seperti perubahan iklim, pembangunan ekonomi biru, polusi laut, dan tata kelola laut untuk mencapai kesejahteraan dan keberlanjutan demi generasi mendatang. Berbagai program kerja sama yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pengaruh Indonesia di Kawasan Pasifik dan meningkatkan solidaritas serta dukungan negara-negara Pasifik terhadap Indonesia di berbagai forum internasional.

Diplomasi Ekonomi Global

Penguatan Diplomasi Ekonomi Indonesia dilakukan melalui dialog Trade, Tourism, Investment (TTI) dan Indonesia Go-Global untuk mendiskusikan strategi kebijakan dan promosi TTI Indonesia di luar negeri yang efektif, merumuskan Rencana Aksi Diplomasi Ekonomi Indonesia untuk diimplementasikan tahun 2024, memperkuat *Investolink*, sebagai sistem terpadu *online* yang dikembangkan Kemenlu untuk pencatatan data *inbound* dan *outbound investment* secara global, serta Epistemic Forum of Investment Research yang bertujuan untuk menjaring masukan akademisi, lembaga *think-tank*, BUMN dan praktisi ekonomi.

Prioritas 2

Diplomasi Pelindungan

Diplomasi Pelindungan WNI yang Responsif terhadap Tantangan

Prioritas strategis yang terbagi menjadi beberapa segmen yaitu bantuan pelindungan dan pemulangan terlantar serta penanganan WNI yang terdampak Covid-19 di luar negeri, percepatan pendataan WNI di 130 Perwakilan RI khususnya dalam rangka persiapan Pemilu 2024, bantuan/pendampingan hukum WNI bermasalah, bantuan logistik/penampungan bagi WNI bermasalah dan sosialisasi ketentuan dan peraturan ketenagakerjaan dan kewarganegaraan.

Pencegahan terhadap semakin meningkatnya kasus yang menimpa WNI di luar negeri dilakukan melalui penguatan kesepakatan bilateral dengan dua negara dengan jumlah WNI terbanyak, yaitu Malaysia dan Arab Saudi. Di level multilateral, Indonesia terus mendorong pembentukan norma internasional yang mengatur penempatan dan pelindungan pekerja migran.

Diplomasi pelindungan WNI di lakukan di semua lini, yaitu pada tingkat bilateral, MOU dengan negara lain guna memaksimalkan pelindungan antara lain sistem penempatan one channel dengan Malaysia dan Arab Saudi. Pada tingkat kawasan, pembentukan kerja sama ASEAN untuk penanganan kejahatan *online scam*. Serta tingkat global, berkontribusi aktif dalam pembentukan *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration* sebagai instrumen internasional pertama yang mengatur mengenai isu migrasi secara komprehensif; dan menjadi salah satu *co-sponsor* dalam penyusunan *Guidelines* IMO-ILO untuk penanganan kasus penelantaran pelaut.

Sementara, selaras dengan kebijakan Satu Data Indonesia, Kemenlu terus menyempurnakan sistem informasi *online* melalui integrasi dan interoperabilitas Portal Peduli WNI Kemenlu dengan sistem informasi Kementerian/Lembaga terkait yang menyangkut *sharing* basis data kewarganegaraan, adminduk, keimigrasian, perkawinan dan perceraian untuk mendukung kinerja pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri. Berbagai kesepakatan antara Kemenlu dan Kementerian/Lembaga terkait terus didorong untuk melancarkan integrasi sistem informasi bagi pelayanan dan pelindungan WNI.

Inovasi digital terus diperkuat untuk mewujudkan pelindungan WNI *reaching out* melalui sms *blast* hadir sejak bulan pertama Kabinet Kerja, Portal Peduli WNI menjadikan pelayanan pelindungan WNI satu pintu dan Aplikasi bergerak Safe Travel untuk menghadirkan pelindungan melalui *handphone*.

Prioritas 3

Diplomasi Kedaulatan dan Kebangsaan

Diplomasi Kedaulatan Untuk Penyelesaian Perundingan Batas Wilayah Indonesia

Menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain adalah prinsip yang harus dihormati oleh semua negara, tanpa kecuali. Merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas diplomasi untuk melindungi keutuhan NKRI termasuk di forum-forum internasional.

Melalui PBB, diplomasi yang dijalankan, pemahaman dan dukungan dunia internasional terhadap keutuhan wilayah Indonesia semakin baik dan semakin solid. Salah satunya terlihat dalam Sidang Majelis Umum PBB.

Kemenlu berkomitmen tinggi untuk menyelesaikan perundingan batas negara melalui negosiasi batas negara baik batas darat maupun batas maritim. Penyelesaian juga harus dilakukan berdasarkan hukum internasional yang berlaku, misalnya UNCLOS 1982 jika menyangkut batas laut. Penyelesaian Perundingan Batas Maritim Indonesia dengan Prioritas Filipina, Vietnam dan Timor Leste; Verifikasi dan *Updating* Batas Maritim dalam rangka mendukung Kebijakan.

Kemenlu telah diberikan mandat untuk mewujudkan agenda RPJMN melalui penguatan integritas NKRI dalam aspek kewilayahan. Terkait hal tersebut, sejak tahun 2018 diselenggarakan Pro-PN perundingan batas wilayah yang terbagi atas 3 (tiga) kegiatan, yaitu

i. perundingan batas maritim dengan negara prioritas tertentu.
ii. Konsultasi dalam rangka memfasilitasi proses negosiasi *realignment* FIR dengan Singapura serta tindak lanjut konsultasi dengan ICAO dan Malaysia,
iii. Verifikasi dan *updating* batas maritim RI dengan negara tetangga dalam rangka mendukung Kebijakan Satu Peta.

Pada Juni 2023, Indonesia berhasil menyelesaikan kesepakatan dengan Malaysia pada 2 segmen batas maritim yaitu Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian Selatan, selesai setelah perundingan panjang selama 18 tahun.

Prioritas 4

Peningkatan Kontribusi dan Kepemimpinan Indonesia di Kawasan dan Global

Dunia mengapresiasi Kepemimpinan Indonesia yang selalu menjembatani perbedaan, selalu menghormati prinsip dan selalu menjadi bagian dari solusi permasalahan dunia. Indonesia dipercaya memegang peran kepemimpinan dalam berbagai forum regional maupun multilateral.

Pencalonan Anggota Dewan *International Maritime Organization* (IMO) periode 2024-2025

Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO kelima untuk periode 2024-2025 yaitu Anggota Dewan IMO Kategori C dan pada saat yang bersamaan Indonesia melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dicalonkan sebagai Auditor Eksternal IMO periode 2024-2027. Indonesia berkomitmen untuk memperkuat peran IMO sebagai organisasi maritim dunia dan mewujudkan keselamatan dan keamanan dalam sektor maritim dunia yang berkelanjutan. Komitmen tersebut dirangkum dalam moto "*Our Commitment to Safety, Security, and Sustainability at Sea*".

Keketuaan Indonesia di MIKTA 2023

Keketuaan Indonesia pada MIKTA tahun 2023 merupakan bagian dari implementasi prioritas 4+1 polugri Indonesia terutama untuk penguatan peran Indonesia di kawasan dan global. MIKTA bertujuan mendukung upaya penguatan multilateralisme dan tata kelola pemerintahan global. MIKTA berperan sebagai *consensus maker* dan *bridge builder* antara negara-negara berkembang dan maju. Dalam keketuaannya, Indonesia mendorong kerjasama antar negara MIKTA baik di tingkat pusat maupun perwakilan seperti dalam penyelenggaraan kegiatan kerjasama terkait isu kesehatan, digital, akademik, dan pemulihan ekonomi. Keketuaan MIKTA digunakan untuk mendukung pesan keketuaan ASEAN kedalam forum multilateral.

Pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota pada Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) 2024-2026, telah dilakukan permintaan dukungan sepanjang tahun 2023. Atas upaya tersebut, Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota Dewan HAM yang keenam kalinya. Indonesia mendapatkan perolehan suara terbanyak, yaitu 186 dari 192 negara. Dalam menjalankan keanggotaan di Dewan HAM, tema yang diusung Indonesia yaitu "*Inclusive Partnership for Humanity*" dengan tiga prioritas utama yaitu meningkatkan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan melindungi HAM melalui kerja sama teknis dan pembangunan kapasitas, mendorong dialog intensif antar negara dan kelompok di kawasan, serta mendorong implementasi nilai-nilai *Universal Declaration of Human Rights*, mendorong penguatan multilateralisme dengan prinsip solidaritas, inklusivitas dan kesetaraan.

Sedangkan di level nasional, terdapat 4 (empat) komitmen Indonesia untuk pemajuan HAM, yaitu:

1. Komitmen untuk memperkuat solidaritas politik dan dukungan kemanusiaan terhadap Palestina, termasuk dengan meningkatkan kontribusi ke United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) sebesar tiga kali lipat.
2. Komitmen untuk melanjutkan proses ratifikasi Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Jika konvensi tersebut telah diratifikasi, berarti Indonesia telah meratifikasi semua instrumen inti HAM internasional.
3. Komitmen melindungi dan menghormati hak penyandang disabilitas, termasuk dengan memperkuat peran Komisi Nasional Disabilitas.
4. Komitmen mengimplementasikan Strategi Nasional Bisnis dan HAM.

Di bidang *peacekeeping*, Indonesia terus meningkatkan jumlah *peacekeepers*-nya, menjadi kontributor terbesar nomor 6 pada akhir November 2023, dari kontributor terbesar ke-16 pada akhir 2014. Sejak 2014, lebih 20.000 personel telah dikirim ke 13 misi pemeliharaan perdamaian PBB. Sejalan dengan peran aktif Indonesia di isu *Women, Peace and Security*, jumlah personel *peacekeepers* perempuan naik dari 27 orang pada akhir 2014 ke 131 orang pada akhir 2023.

Dukungan Palestina

Indonesia secara konsisten berdiri bersama bangsa Palestina memperjuangkan hak-haknya serta melawan kekejaman dan penjajahan Israel. Indonesia memilih berada di sisi sejarah yang benar untuk membela kemanusiaan dan keadilan bagi bangsa Palestina.

Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023

Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 sangat menonjol, karena mampu menavigasi ASEAN melewati lanskap geopolitik yang penuh tantangan. Kepemimpinan Indonesia di kawasan sangat berperan dalam mencegah Balkanisasi ASEAN sebagai sebuah organisasi kawasan.

Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 di Labuan Bajo pada tanggal 9 - 11 Mei 2023, dan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta, tanggal 5 - 7 September 2023 merupakan perhelatan yang sangat penting, mengingat peran ASEAN yang kian strategis dalam dinamika geopolitik dan ekonomi internasional. Kerjasama ASEAN dan negara-negara di sekitarnya memiliki potensi besar untuk menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi dunia.

Indonesia melalui forum ASEAN, menginisiasi ASEAN-Indo-Pacific Forum yang menghasilkan proyek kerja sama diantaranya di bidang kesehatan, pengolahan mineral, dan keuangan milik swasta Indonesia.

ASEAN Summit di Labuan Bajo turut berdampak menambah pertumbuhan ekonomi kabupaten Manggarai Barat yang menjadi Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) "Bali Baru" sebagai magnet baru perekonomian masyarakat.

Adanya krisis politik dan permasalahan pengungsi Rohingnya di Myanmar menjadi perhatian khusus negara-negara ASEAN. Dalam memegang Keketuaan ASEAN pada tahun 2023, Indonesia tertantang untuk dapat memberikan pengaruh positif penyelesaian masalah Myanmar agar situasi politik di kawasan tetap stabil. Indonesia melalui Keketuannya di ASEAN mendorong kerja sama yang kuat antara negara kawasan dan badan-badan PBB untuk menyelesaikan pengungsi Rohingya. Isu Rohingya secara khusus telah dibahas dengan Komisioner Tinggi UNHCR di Jenewa pada Desember 2023.

Kepemimpinan Indonesia di Kawasan

Indonesia mendorong ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik (AOIP) menjadi rujukan utama kerja sama di kawasan Indo-Pasifik, yang menjadi kendaraan bagi kolaborasi inklusif dan konkret yang berkontribusi pada stabilitas dan perdamaian di kawasan.

Indonesia telah melihat kawasan Samudera Hindia sebagai bagian strategis yang tidak terpisahkan di kawasan Indo-Pasifik ke depan. Saat keketuaan di ASEAN, Indonesia juga berhasil mendorong kerja sama Sekretariat ASEAN dengan Sekretariat IORA.

Kepemimpinan Indonesia terkait kawasan Indo-Pasifik telah dimulai sejak Indonesia menjadi Ketua pada IORA Summit 2017.

Prioritas Plus 1

Penguatan Infrastruktur Diplomasi

Pengelolaan SDM Kemenlu

Agar capaian diplomasi Indonesia di tahun mendatang terus meningkat, diplomasi yang dilakukan oleh Kemenlu perlu diperkuat infrastruktur diplomasi yang semakin mumpuni, dengan terus menerus meningkatkan kompetensi pegawai untuk mendukung diplomasi melalui perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *Human Capital Development Plan* (HCDP). Serta pembuatan aturan Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual (PPTPS).

Tata Kelola Organisasi Kemenlu

Guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, pemanfaatan teknologi dan komunikasi berdasarkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terus dikembangkan sesuai kebutuhan terkini dan komitmen memperkuat Reformasi Birokrasi untuk meraih predikat WBK/WBBM, peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi sampai individu, kesetaraan dan pengarusutamaan gender, penguatan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

Penguatan organisasi Perwakilan RI dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan politik di negara akreditasi, meningkatkan jangkauan dan kinerja diplomasi dan kerja sama luar negeri dengan negara-negara sahabat. Khusus pada kawasan Afrika, ditetapkan pembukaan kantor perwakilan diplomatik untuk Negara Republik Kamerun. Pembukaan KBRI Yaonde ditetapkan oleh Presiden RI melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pembukaan Kedutaan Besar RI untuk Negara Kamerun. Pada Desember 2023, Tim Esensial KBRI Yaounde telah ditugaskan untuk mulai melakukan operasionalisasi KBRI Yaounde.

Pengelolaan Aset Kemenlu yang Optimal

Pelaksanaan tusi Kemenlu didukung oleh aset yang memadai berupa gedung, bangunan, kendaraan maupun peralatan perkantoran. Kemenlu melakukan peremajaan, pemeliharaan serta pembangunan fasilitas fisik untuk mendukung kinerja diplomasi RI, diantaranya seperti peremajaan gedung Perwakilan RI, pemugaran Gedung Pancasila sebagai cagar budaya, *daycare* Kemenlu, turut mempertimbangkan penganggaran yang berorientasi pada *gender responsive*. Pengelolaan aset Kemenlu yang optimal tercermin dari penilaian indeks pengelolaan aset sebesar 2,91.

Pengelolaan Anggaran Kemenlu yang Optimal dan Akuntabel

Kemenlu senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang baik, dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program yang telah disusun sebagai bentuk dukungan terhadap layanan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Kemenlu. Komitmen dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang baik dan transparan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan diukur melalui indikator kinerja Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Serta guna peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Kemenlu diukur melalui indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Kemenlu memperoleh Predikat "Sangat Baik".

Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Capaian-capaian atas upaya diplomasi Indonesia sepanjang tahun 2023 disajikan secara lebih komprehensif dalam narasi Laporan Kinerja (LKj) Kemenlu ini sebagai bentuk akuntabilitas atas amanat pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Kemenlu Tahun 2023 dan sebagai bentuk kontribusi Kemenlu dalam pencapaian target RPJMN Tahun 2020 – 2024.

LKj ini juga merupakan dokumen pertanggungjawaban kepada pimpinan tertinggi, masyarakat Indonesia dan pemangku kepentingan terkait atas pelaksanaan kinerja dan anggaran Kemenlu Tahun 2023.

Bab II

Perencanaan Kinerja

II.1. Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri

II.2. Prioritas Nasional dan Penyusunan Rencana Kerja 2023

II.3. Perjanjian Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2023

II.1

Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan K/L, serta memperhatikan kesesuaian dengan visi dan misi Presiden Terpilih. Renstra Kemenlu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 28/B/RO/XI/2020/01 Tahun 2020 yang telah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang ditetapkan untuk periode Tahun 2020-2024 adalah **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".**

Visi
Presiden RI
2020-2024

Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong

Dalam menjalankan mandat dari Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2020-2024, Kemenlu menetapkan Visi "**Memimpin Diplomasi yang Aktif dan Efektif untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"** yang dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi.

Misi Presiden RI 2020-2024

01
Peningkatan kualitas manusia Indonesia

02
Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing

03
Pembangunan yang merata dan berkeadilan

04
Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan

05
Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa

06
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya

07
Perlindungan bagi segenap bangsa yang memberikan rasa aman pada seluruh warga

08
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya

09
Sinergi Pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Visi Kementerian Luar Negeri

Memimpin Diplomasi yang Aktif dan Efektif untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Misi Kementerian Luar Negeri

01
Memberikan nilai manfaat ekonomi yang optimal melalui hubungan luar negeri untuk mendukung struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing

02
Memberikan pelindungan Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia (WNI/BHI) di luar negeri yang prima sebagai upaya pelindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

03
Menjaga integritas NKRI yang bersinergi bersama dengan Pemerintah Pusat serta Daerah dan meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional

04
Memajukan kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di dunia internasional

05
Meningkatkan infrastruktur diplomasi Kemenlu dan Perwakilan RI untuk mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia

II.2

Prioritas Nasional dan Penyusunan Rencana Kerja 2023

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kemenlu turut berkontribusi pada realisasi Agenda Pembangunan (AP) prioritas yang dimuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Agenda Pembangunan tersebut kemudian ditetapkan menjadi 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Gambar II.1
Tujuh Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

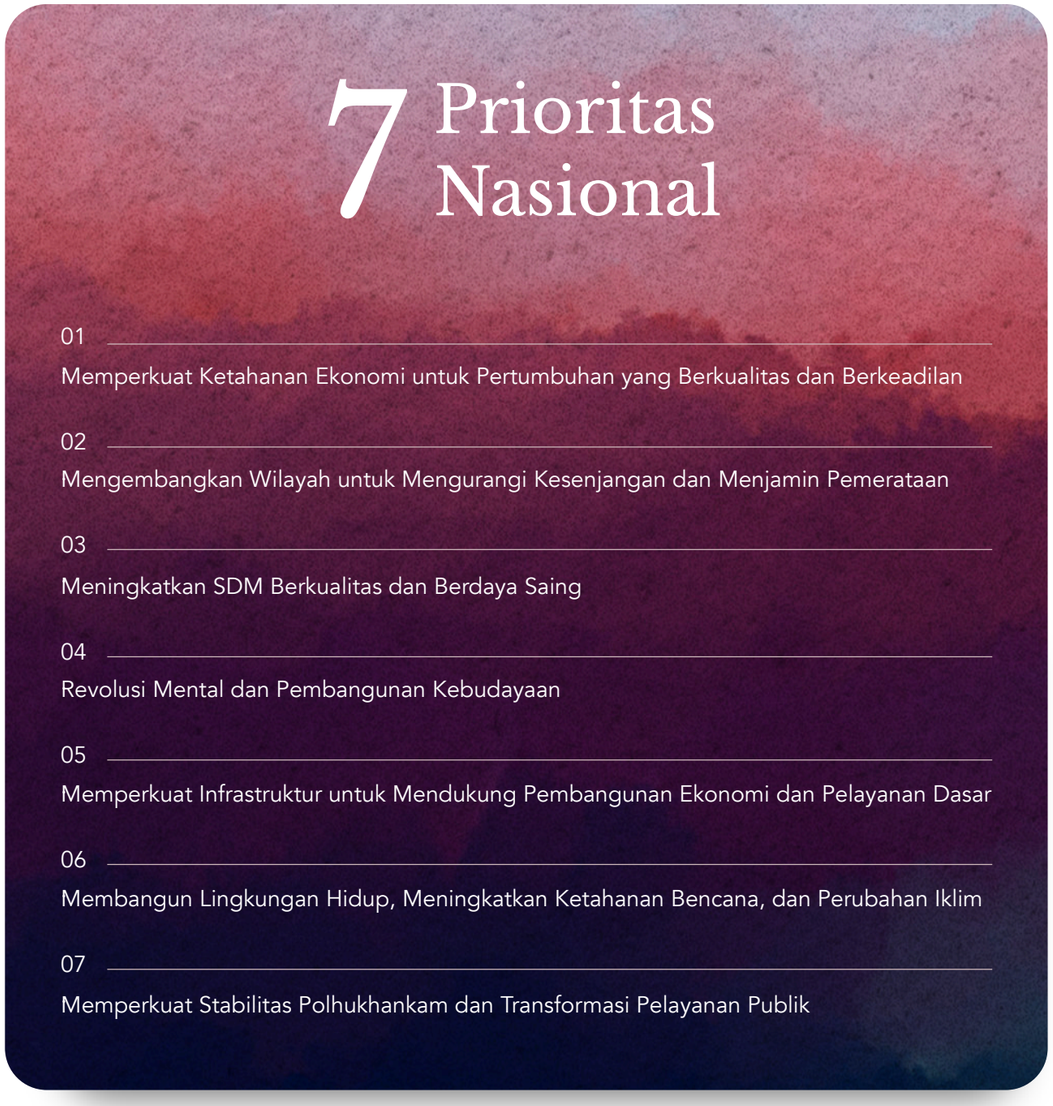

Kemenlu memiliki peranan penting dalam melaksanakan PN 7, yaitu "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik" serta turut berkontribusi untuk pencapaian PN 1, yaitu "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan".

Dalam mewujudkan Prioritas Nasional tersebut, Pemerintah menyusun rencana kerja tahunan berupa RKP. Pada tahun 2023, RKP ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang dimutakhirkan melalui Perpres Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. RKP 2023 memuat 45 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP) yang mendukung pencapaian sasaran 7 (tujuh) PN, dengan 14 (empat belas) MP yang menjadi *highlight*.

Tema RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan 8 (delapan) arah kebijakan sebagai berikut:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Gambar II.2
Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

Dalam mewujudkan peran Kemenlu dalam pencapaian PN 1, Kemenlu melaksanakan 1 (satu) Kegiatan Prioritas (KP) pada RKP 2023, yaitu KP Nomor 7. KP ini berfokus pada Peningkatan Efektivitas *Prefrential Trade Agreement* (PTA)/*Free Trade Agreement* (FTA)/*Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi.

Sedangkan untuk memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, serta keamanan dan transformasi pelayanan publik (PN 7), Kemenlu akan mewujudkan 4 (empat) Kegiatan Prioritas (KP) pada RKP 2023 yang mendukung Program Prioritas Nasional berupa Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP 2). Kegiatan Prioritas tersebut terdiri dari:

Gambar II.3
Kegiatan Prioritas yang Diampu Kemenlu Tahun 2023

Dukungan Kemenlu dalam pencapaian program prioritas nasional, rencana kerja tahunan pemerintah, dan proyek prioritas (ProP) pada tahun 2023 secara rinci disajikan berdasarkan indikator kinerja pada Tabel II.1 sebagai berikut:

Tabel II.1
Prioritas Nasional dalam Rencana Kinerja Pemerintah Tahun 2023

PN/PP/KP	Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023	Target 2023	Satuan
PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		
KP 7	Peningkatan Efektivitas *Prefrential Trade Agreement* (PTA)/*Free Trade Agreement* (FTA)/*Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi		
	Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan	89,90 (92,54)*	Persen
	Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi	- (94,40)*	Persen
	Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata	79,34 (90,23)*	Persen
PN 7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		
2	Optimalnya Kebijakan Luar Negeri		
2.1	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional	4,88 (4,94)*	Nilai
PP 2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri		
	Meningkatnya Efektivitas Diplomasi dan Pemanfaatan Kerja Sama Pembangunan Internasional		
2.1	Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral**	14 (72)*	Forum
2.2	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	3,95	Nilai
2.2	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI	91,00	Nilai

PN/PP/KP	Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023	Target 2023	Satuan
KP 1	Penguatan Integritas NKRI dan Pelindungan WNI di Luar Negeri		
1	Terwujudnya penguatan integritas NKRI dan perlindungan		
	Persentase Penyelesaian Kasus WNI di Luar Negeri	81,00 (83,00)*	Persen
	Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim	47,99 (49,99)*	Nilai
ProP 1	Peningkatan dan Intensifikasi Efektifitas Penyelesaian Perbatasan dan Percepatan Pemetaan Batas Negara		
1	Terlaksananya Penyelesaian Perbatasan dan Percepatan Pemetaan Batas Negara		
	Persentase kemajuan hukum dan perjanjian internasional di bidang perundingan penegasan batas darat, peningkatan kerja sama perbatasan dan kerja sama kelautan yang diselesaikan	100	Persen
ProP 2	Penguatan Perlindungan WNI dan BHI di Tingkat Bilateral, Regional, Multilateral		
1	Terlaksananya Penguatan Perlindungan WNI dan BHI di Tingkat Bilateral, Regional, Multilateral		
	Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri	97,50 (98,40)*	Indeks
	Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	97,49 (97,00)*	Indeks
	Indeks Diplomasi Perlindungan WNI di Luar Negeri	98,00 (96,00)*	Indeks

PN/PP/KP	Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023	Target 2023	Satuan
KP 2	Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional		
1	Terlaksananya Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional		
	Jumlah Program/Kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular**	133 (-)*	Program/ Kegiatan
ProP 1	Peningkatan Penggunaan Sumber-Sumber dan Mekanisme Pendanaan Baru Kerja Sama Pembangunan Internasional		
1	Terlaksananya Peningkatan Penggunaan Sumber-Sumber dan Mekanisme Pendanaan Baru Kerja Sama Pembangunan Internasional		
	Jumlah Pendanaan Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Internasional termasuk KSST	171	Rp Miliar
ProP 2	Penciptaan Lingkungan yang Mendukung (*Enabling Environment)* Peningkatan Keterlibatan Swasta dalam Kerjasama Pembangunan Internasional		
1	Terciptanya Lingkungan yang Mendukung (*Enabling Environment*) Peningkatan Keterlibatan Swasta dalam Kerja Sama Pembangunan Internasiona		
	Tingkat Partisipasi Aktor Nonpemerintah dalam Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Internasional**	2,82-2,96	Persen
KP 3	Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional		
1	Meningkatnya Citra Positif di Dunia Internasional		
	Persentase Pemberitaan Positif Media Massa Internasional terhadap Kebijakan Hubungan Luar Negeri RI	86	Persen

PN/PP/KP	Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023	Target 2023	Satuan
ProP 1	Penyusunan Kebijakan Diplomasi Publik dan Turunannya		
1	Tersusunnya Kebijakan Diplomasi Publik dan Turunannya		
	Persentase Dukungan Konstituen Internasional terhadap Promosi Aset-Aset Diplomasi Publik Indonesia	99	Persen
KP 4	Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global		
1	Meningkatnya Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global		
	Presentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri multilateral	98	Persen
	Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri ASEAN	98	Persen
	Persentase Kesepakatan Kerjasama Bilateral di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang ditindak lanjuti oleh *Stakeholder* dalam Negeri	91,11	Persen
	Persentase Kesepakatan Kerjasama Bilateral di Kawasan Amerika dan Eropa yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* Dalam Negeri	95	Persen
ProP 1	Peningkatan Inisiatif/Posisi Indonesia yang Diterima		
1	Meningkatnya Inisiatif/Posisi Indonesia yang Diterima		
	Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan dalam forum kerja sama multilateral	290	Rekomendasi/ Prakarsa
	Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan dalam pertemuan ASEAN	247	Rekomendasi/ Prakarsa

PN/PP/KP	Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023	Target 2023	Satuan
ProP 2	Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB		
1	Terlaksananya Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB		
	Peringkat jumlah pasukan perdamaian (PKO) yang dikirim Pemerintah Indonesia	10	Peringkat

* *Indikator dan target baru pasca perubahan di tahun berjalan*

** *Indikator yang perhitungannya dilakukan oleh Kementerian PPN/ Bappenas namun capaiannya masih merujuk pada capaian Kemenlu*

Dalam upaya mencapai KP 1 dan KP 4 pada PP 2 yang termuat dalam PN 7, Kemenlu merumuskan 7 rincian output pada tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel II.2
Output Prioritas Nasional dalam Rencana Kinerja Pemerintah Tahun 2023

PN	*Output* Proyek Prioritas Nasional	Target
7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PP2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	
	KP 2 Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional	
	Perundingan Penetapan Batas Maritim (Malaysia, Filipina, Palau, Vietnam), Konsultasi Pemberlakuan Persetujuan *Realignment* FIR, dan Pemutakhiran Data Batas Darat dan Maritim dalam Mendukung Kebijakan Satu Peta	8
	Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (Pusat)	22.430
	Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (Perwakilan RI)	146.388
	KP 4 Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global	
	Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023	40
	Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB	15
	Diplomasi Komoditas Berkelanjutan	6
	Keketuaan Indonesia pada MIKTA 2023	13

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Luar Negeri Tahun 2023

Renja Kemenlu Tahun 2023 mulai disusun sejak tahun sebelumnya dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi target Indikator Kinerja Utama (IKU) Satker Pusat dan Perwakilan RI sebelum menetapkan target pada tingkat Kemenlu. Dalam upaya mendorong realisasi target nasional, Kemenlu melakukan identifikasi atas program, sasaran, dan kegiatan strategis yang mendukung pencapaian RKP. Renja Kemenlu kemudian disepakati dalam pertemuan Tiga Pihak (*Trilateral Meeting*) antara Kemenlu, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kemenkeu.

Perumusan IKU pada Peta Strategi mengacu pada penetapan Renja untuk menjaga keselarasan perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kinerja di lingkungan Kemenlu baik di Pusat maupun Perwakilan RI. Kemenlu juga merujuk pada metode model logis (pohon kinerja) dalam melakukan penjenjangan kinerja (*cascading*) organisasi untuk mendapatkan proses/aktivitas yang tepat dan berdampak bagi kinerja organisasi.

Pada tahun 2023, Kemenlu memiliki 5 (lima) program strategis yang terdiri dari Diplomasi dan Kerja Sama Internasional, Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral, Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional, Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik Berkualitas, serta Dukungan Manajemen. Berikut penyusunan Sasaran Strategis (SS) dan IKU berdasarkan program strategis tersebut:

Tabel II.3
Program Strategis Kemenlu

No.	Program	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)
01	Program Diplomasi dan Kerjasama Internasional	Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal	Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan
			Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi
			Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata
		Integritas Kedaulatan NKRI dan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional yang Meningkat	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional
		Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi	Persentase Tindak Lanjut/ Implementasi Kesepakatan Internasional oleh *Stakeholders* Dalam Negeri
			Indeks Pengaruh Rekomendasi Strategi Kebijakan Luar Negeri terhadap Kebijakan Pemangku Kepentingan
		Diplomasi Bilateral yang Kuat	Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
			Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan, dan Maritim

No.	Program	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)
02	Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral	Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh di Tingkat Regional dan Global	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional
		Diplomasi Multilateral yang Kuat	Persentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
			Persentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di Bidang Politik, Keamanan, dan Maritim
03	Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	Integritas Kedaulatan NKRI dan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional yang Meningkat	Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim
04	Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik Berkualitas	Pelindungan WNI di Luar Negeri dan Pelayanan Publik yang Prima	Persentase Kasus WNI di Luar Negeri yang Diselesaikan
			Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik
05	Program Dukungan Manajemen	Infrastruktur Diplomasi yang Kuat	Nilai Sistem Merit
			Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenlu
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemenlu
			Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri
			Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Luar Negeri
			Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu

Sejalan dengan dukungan Kemenlu pada PN 7, berikut pemetaan *output* ProPN terhadap program strategis Kemenlu tahun 2023:

Tabel II.4
Pemetaan *Output* ProPN Kemenlu

Program	ProPN/*Output* Strategis
Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral	Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023
	Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB
	Diplomasi Komoditas Berkelanjutan
	Keketuaan Indonesia pada MIKTA 2023
Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	Perundingan Penetapan Batas Maritim (Malaysia, Filipina, Palau, Vietnam), Konsultasi Pemberlakuan Persetujuan *Realignment* FIR, dan Pemutakhiran Data Batas Darat dan Maritim dalam Mendukung Kebijakan Satu Peta
Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (Perwakilan RI)
	Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (Pusat)

Peta Strategi Kementerian Luar Negeri

Dalam menyusun Peta Strategi, Kementerian Luar Negeri menggunakan metode kerangka kerja *Balanced Scorecard* (BSC) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kemenlu dan Perwakilan RI. Peta Strategi Kemenlu menerjemahkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan strategi yang terdapat pada Renstra dan Renja ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu *Stakeholders, Customer, Internal Business Process*, serta *Learning and Growth*.

Pada tahun 2023, Kemenlu menetapkan 8 SS dan 20 IKU yang digambarkan dalam setiap perspektif, sebagai berikut:

- *Stakeholders Perspective* yang terdiri atas 3 (tiga) SS.
- *Customer Perspective* yang terdiri atas 2 (dua) SS.
- *Internal Business Process Perspective* yang terdiri atas 2 (dua) SS.
- *Learning and Growth Perspective* memiliki 1 (satu) SS yang terdiri dari

Gambar II.4
Peta Strategi Kemenlu

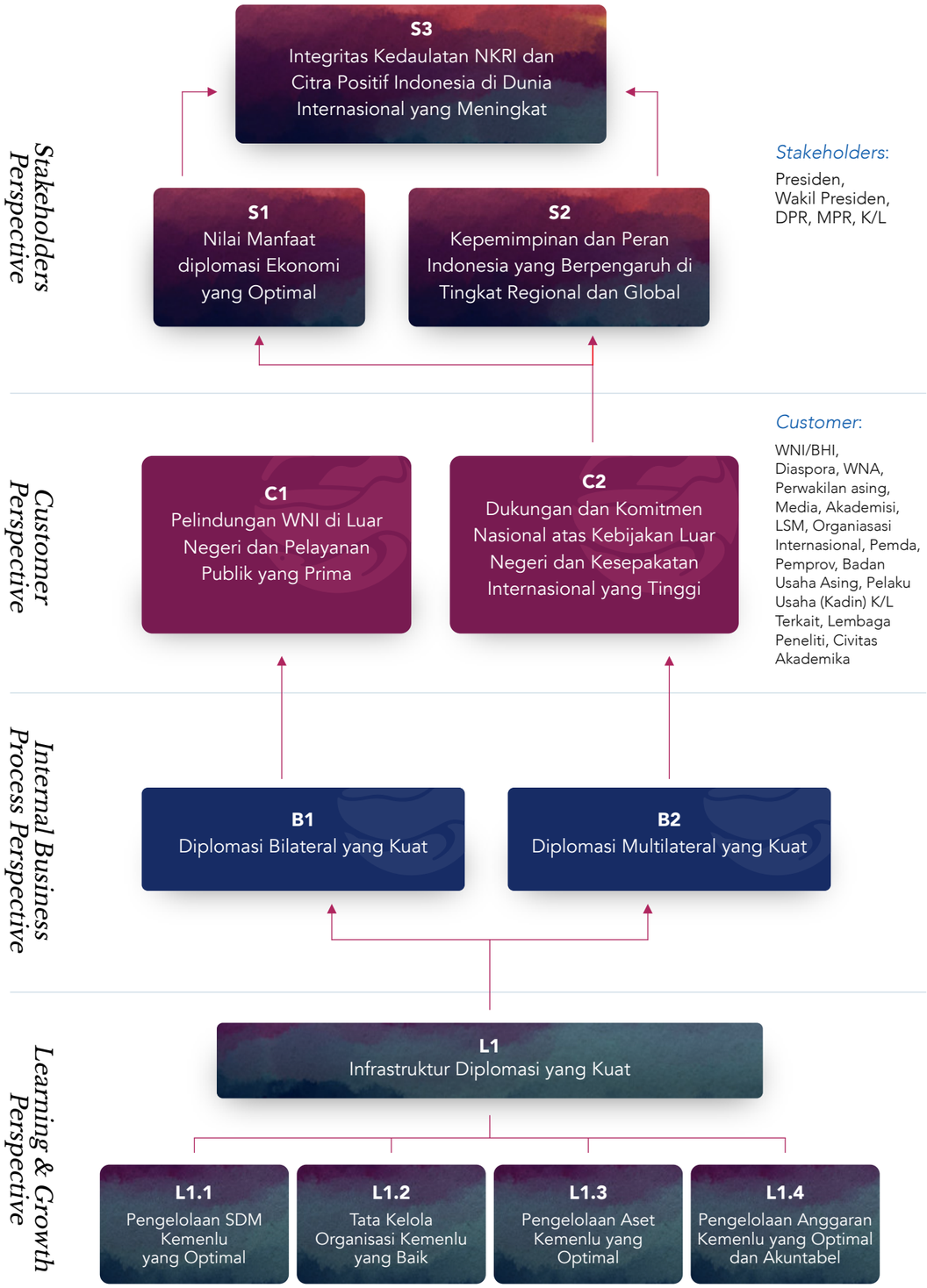

II.3

Perjanjian Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung yang berisi pernyataan kesanggupan, sasaran, IKU, dan target yang harus dicapai dalam suatu periode. Kemenlu telah menetapkan PK 2023 pada awal tahun sebagai bentuk implementasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Dalam merumuskan target IKU, Kemenlu mempertimbangkan target RPJMN dan capaian pada tahun sebelumnya. IKU yang mencapai target pada tahun sebelumya, akan ditingkatkan targetnya dengan penetapan angka yang menantang namun dapat dicapai (*achievable*). Pada tahun 2023, hampir seluruh IKU Kemenlu mengalami peningkatan target, kecuali untuk IKU yang targetnya sudah maksimal atau realisasinya belum mencapai target tahun 2022.

Berikut Perjanjian Kinerja Kemenlu Tahun 2023 dibandingkan dengan target Tahun 2022:

Tabel II.5
Perbandingan Target Perjanjian Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2022	Target 2023	Keterangan
Stakeholders Perspective						
S1	Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal	IKU S1.1	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan	85,52%	92,54%	Meningkat 8%
		SUB IKU 1	Jumlah komitmen perdagangan	219	343	Meningkat 56,62%
		SUB IKU 2	Nilai perdagangan dengan negara mitra	USD 190,86 Miliar	USD 260,65 Miliar	Meningkat 36,57%
		IKU S1.2	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi	93,35%	94,40%	Meningkat 1,12%
		SUB IKU 1	Jumlah komitmen investasi	118	154	Meningkat 30,51%
		SUB IKU 2	Nilai investasi dengan negara mitra	USD 21,90 Miliar	USD 33,97 Miliar	Meningkat 55,11%
		IKU S1.3	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata	77,88%	90,23%	Meningkat 15,86%
		SUB IKU 1	Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia	75,54%	89,17%	Meningkat 18,04%
		SUB IKU 2	Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	1,78 Juta Kunjungan	8,38 Juta Kunjungan	Meningkat 182,02%

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2022	Target 2023	Keterangan
S2	Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di tingkat regional dan global	IKU S2.1	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	4,85	4,94	Meningkat 1,86%
		SUB IKU 1	Indeks kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral	4,84	4,93	Meningkat 1,86%
		SUB IKU 2	Indeks prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri ASEAN dan multilateral	4,88	4,94	Meningkat 1,23%
S3	Integritas kedaulatan NKRI dan citra positif Indonesia di dunia internasional yang meningkat	IKU S3.1	Indeks kemajuan perundingan penyelesaian perbatasan maritim	46,32	47,99	Meningkat 3,61%
		IKU S3.1	Indeks kemajuan perundingan penyelesaian perbatasan maritim	3,90 (skala 5)	3,95 (skala 5)	Meningkat 1,28%
Customer Perspective						
C1	Pelindungan WNI di luar negeri dan pelayanan publik yang prima	IKU C1.1	Persentase kasus WNI di luar negeri yang diselesaikan	80%	83%	Meningkat 6,25%
		IKU C1.2	Nilai persepsi kepuasan pelayanan publik	4 (skala 4)	4 (skala 4)	Tetap
		SUB IKU 1	Nilai persepsi kepuasan pelayanan keprotokolan	4 (skala 4)	4 (skala 4)	Tetap
		SUB IKU 2	Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran	4 (skala 4)	4 (skala 4)	Tetap
		SUB IKU 3	Nilai persepsi kepuasan pelayanan fasilitas diplomatik	4 (skala 4)	4 (skala 4)	Tetap
		SUB IKU 4	Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI	4 (skala 4)	4 (skala 4)	Tetap
C2	Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi	IKU C2.1	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh pemangku kepentingan dalam negeri	87,84%	93,49%	Meningkat 6,43%
		SUB IKU 1	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri	82,35%	93,74%	Meningkat 13,83%
		SUB IKU 2	Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri	100%	100%	Tetap
		SUB IKU 3	Persentase saran kebijakan atas kesepakatan ASEAN yang ditindaklanjuti di dalam negeri	82%	85%	Meningkat 3,66%
		SUB IKU 4	Persentase rekomendasi dari forum multilateral yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan nasional	92,50%	95%	Meningkat 2,70%
		IKU C2.2	Indeks pengaruh rekomendasi strategi kebijakan luar negeri terhadap kebijakan pemangku kepentingan	3 (skala 4)	3,20 (skala 4)	Meningkat 6,67%

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2022	Target 2023	Keterangan
Stakeholders Perspective						
B1	Diplomasi Bilateral yang Kuat	IKU B1.1	Persentase kasus WNI di luar negeri yang diselesaikan	75	90	Meningkat 20,00%
		IKU B1.2	Jumlah kesepakatan di bidang politik, keamanan, dan maritim	62	75	Meningkat 20,97%
B2	Diplomasi Multilateral yang Kuat	IKU B2.1	Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral di bidang ekonomi, sosial, dan budaya	97,25%	98,25%	Meningkat 1,03%
		IKU B2.2	Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral di bidang politik, keamanan, dan maritim	97,25%	98,25%	Meningkat 1,03%
Learning and Growth Perspective						
L1	Infrastruktur diplomasi yang kuat					
L1.1	Pengelolaan SDM Kemenlu berbasis Merit yang Optimal	IKU L1.1.1	Nilai Sistem Merit Kemenlu	300	300	Tetap
L1.2	Tata Kelola Organisasi Kemenlu yang Baik	IKU L1.2.1	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenlu	81	81	Tetap
		IKU L1.2.2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemenlu	79,50 (BB)	79,80 (BB)	Meningkat 0,38%
L1.3	Pengelolaan Aset Kemenlu yang Optimal	IKU L1.3.1	Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu	2,70 (skala 4)	2,90 (skala 4)	Meningkat 7,41%
L1.4	Pengelolaan Anggaran Kemenlu yang Optimal dan Akuntabel	IKU L1.4.1	Nilai Kinerja Anggaran Kemenlu	92	93	Meningkat 1,09%
		IKU L1.4.2	Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu	4 (WTP)	4 (WTP)	Tetap

Penyesuaian Target IKU

Pada tahun 2023, kondisi pariwisata nasional yang sempat lumpuh karena adanya pandemi Covid-19 mulai pulih kembali. Hal ini menyebabkan peningkatan yang cukup signifikan atas kunjungan wisatawan asing ke Indonesia pada pada periode Januari hingga September 2023 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. Peningkatan ini berdampak pada capaian IKU Tingkat Efektifitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata, sehingga target IKU perlu dilakukan penyesuaian.

Penyesuaian target IKU juga dilakukan untuk IKU Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim (Indeks PBM) yang melakukan penyesuaian formulasi perhitungan indeks.

Penyesuaian target IKU tersebut dituangkan dalam dokumen Revisi ke-1 atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Aksi (Renaksi) Tahun 2023 pada bulan Oktober 2023. Rincian penyesuaian target kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel II.6
Perubahan Target Kinerja pada PK Menlu dan Wamenlu Tahun 2023

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023 (Semula)	Target 2023 (Menjadi)	Keterangan
S1	Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal	IKU S1.1	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan	92,54%	92,54%	Tetap
		SUB IKU 1	Jumlah komitmen perdagangan	343	343	Tetap
		SUB IKU 2	Nilai perdagangan dengan negara mitra	USD 260,65 Miliar	USD 260,65 Miliar	Tetap
		IKU S1.2	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi	94,40%	94,40%	Tetap
		SUB IKU 1	Jumlah komitmen investasi	154	154	Tetap
		SUB IKU 2	Nilai investasi dengan negara mitra	USD 33,97 Miliar	USD 33,97 Miliar	Tetap
		IKU S1.3	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata	90,23%	90,23%	Tetap
		SUB IKU 1	Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia	89,17%	89,17%	Tetap
		SUB IKU 2	Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	5,02 Juta Kunjungan	8,38 Juta Kunjungan	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan sehingga diperlukan penyesuaian target.
S2	Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di tingkat regional dan global	IKU S2.1	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	4,94	4,94	Tetap
		SUB IKU 1	Indeks kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral	4,93	4,93	Tetap
		SUB IKU 2	Indeks prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri ASEAN dan multilateral	4,94	4,94	Tetap
S3	Integritas kedaulatan NKRI dan citra positif Indonesia di dunia internasional yang meningkat	IKU S3.1	Indeks kemajuan perundingan penyelesaian perbatasan maritim	47,99	49,99	Meningkat
		IKU S3.1	Indeks kemajuan perundingan penyelesaian perbatasan maritim	3,95 (skala 5)	3,95 (skala 5)	Tetap
Customer Perspective						
C1	Pelindungan WNI di luar negeri dan pelayanan publik yang prima	IKU C1.1	Persentase kasus WNI di luar negeri yang diselesaikan	83%	83%	Tetap
		IKU C1.2	Nilai persepsi kepuasan pelayanan publik	4 (skala 4)	4 (skala 4)	Tetap
		SUB IKU 1	Nilai persepsi kepuasan pelayanan keprotokolan	4 (skala 4)	4 (skala 4)	Tetap
		SUB IKU 2	Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran	4 (skala 4)	4 (skala 4)	Tetap
		SUB IKU 3	Nilai persepsi kepuasan pelayanan fasilitas diplomatik	4 (skala 4)	4 (skala 4)	Tetap
		SUB IKU 4	Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI	4 (skala 4)	4 (skala 4)	Tetap
C2	Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi	IKU C2.1	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh pemangku kepentingan dalam negeri	93,49%	93,49%	Adanya kondisi strategis yang berimplikasi terhadap kemajuan perundingan batas maritim yang membutuhkan penyesuaian penghitungan indeks PBM.
		SUB IKU 1	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri	93,74%	93,74%	Tetap
		SUB IKU 2	Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri	100%	100%	Tetap

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2022	Target 2023	Keterangan
		SUB IKU 3	Persentase saran kebijakan atas kesepakatan ASEAN yang ditindaklanjuti di dalam negeri	85%	85%	Tetap
		SUB IKU 4	Persentase rekomendasi dari forum multilateral yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan nasional	95%	95%	Tetap
		IKU C2.2	Indeks pengaruh rekomendasi strategi kebijakan luar negeri terhadap kebijakan pemangku kepentingan	3,20 (skala 4)	3,20 (skala 4)	Tetap
Stakeholders Perspective						
B1	Diplomasi Bilateral yang Kuat	IKU B1.1	Persentase kasus WNI di luar negeri yang diselesaikan	90	90	Tetap
		IKU B1.2	Jumlah kesepakatan di bidang politik, keamanan, dan maritim	75	75	Tetap
B2	Diplomasi Multilateral yang Kuat	IKU B2.1	Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral di bidang ekonomi, sosial, dan budaya	98,25%	98,25%	Tetap
		IKU B2.2	Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral di bidang politik, keamanan, dan maritim	98,25%	98,25%	Tetap
Learning and Growth Perspective						
L1	Infrastruktur diplomasi yang kuat					
L1.1	Pengelolaan SDM Kemenlu berbasis Merit yang Optimal	IKU L1.1.1	Nilai Sistem Merit Kemenlu	300	300	Tetap
L1.2	Tata Kelola Organisasi Kemenlu yang Baik	IKU L1.2.1	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenlu	81	81	Tetap
		IKU L1.2.2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemenlu	79,80 (BB)	79,80 (BB)	Tetap
L1.3	Pengelolaan Aset Kemenlu yang Optimal	IKU L1.3.1	Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu	2,90 (skala 4)	2,90 (skala 4)	Tetap
L1.4	Pengelolaan Anggaran Kemenlu yang Optimal dan Akuntabel	IKU L1.4.1	Nilai Kinerja Anggaran Kemenlu	93	93	Tetap
		IKU L1.4.2	Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu	4 (WTP)	4 (WTP)	Tetap

Program dan Anggaran Kegiatan Kemenlu Tahun 2023

Alokasi anggaran awal Kemenlu pada tahun 2023 adalah sebesar Rp8.689.044.504.000,00 (Delapan Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah) yang didistribusikan ke dalam 5 (lima) program.

Tabel II.7
Pagu Anggaran Awal Kemenlu per Program Tahun 2023

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)
01	Diplomasi dan Kerja Sama Internasional	377.387.070.000
02	Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja sama Multilateral	1.094.285.514.000
03	Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik	248.868.535.000
04	Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	9.255.566.000
05	Dukungan Manajemen	6.959.247.819.000
	Pagu Anggaran	Rp 8.689.044.504.000

Dengan adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang diperoleh Kemenlu untuk kegiatan Keketuaan ASEAN pada bulan Juni, penarikan blokir anggaran pada bulan Oktober, serta penambahan anggaran Belanja Pegawai pada bulan Desember, pagu Kemenlu berubah menjadi Rp8.838.358.325.000,00 (Delapan Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Rincian pagu setelah adanya perubahan, sebagai berikut:

Tabel II.8
Pagu Anggaran Akhir Kemenlu per Program Tahun 2023

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)	
		Semula	Menjadi
01	Diplomasi dan Kerja Sama Internasional	377.387.070.000	386.666.637.000
02	Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja sama Multilateral	1.094.285.514.000	987.942.789.000
03	Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik	248.868.535.000	236.645.415.000
04	Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	9.255.566.000	9.255.566.000
05	Dukungan Manajemen	6.959.247.819.000	7.217.847.918.000
	Pagu Anggaran	Rp 8.689.044.504.000	Rp 8.838.358.325.000

Dari pagu anggaran tersebut di atas, jumlah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk pencapaian ProPN TA 2023 sebesar Rp280.479.667.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dengan rincian per *output* sebagai berikut:

Tabel II.9
Pagu Anggaran *Output* Prioritas Nasional Kemenlu Tahun 2023

No.	*Output* Prioritas Nasional	Pagu Anggaran (Rp)
01	Perundingan Penetapan Batas Maritim (Malaysia, Filipina, Palau, Vietnam), Konsultasi Pemberlakuan Persetujuan *Realignment* FIR, dan Pemutakhiran Data Batas Darat dan Maritim dalam Mendukung Kebijakan Satu Peta	2.775.000.000
02	Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (Pusat)	42.413.735.000
03	Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (Perwakilan RI)	139.024.766.000
04	Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023	87.610.935.000
05	Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB	2.683.782.000
06	Diplomasi Komoditas Berkelanjutan	1.925.825.000
07	Keketuaan Indonesia pada MIKTA 2023	4.045.624.000
	Total Anggaran	Rp 280.479.667.000

Rencana Aksi Nasional Tematik Kementerian Luar Negeri Tahun 2023

Pada tahun 2023, Kemenlu kembali menjadi salah satu K/L yang mengampu indikator Rencana Aksi Nasional (RAN) dan secara konsisten melaporkan pencapaian atas RAN tersebut kepada K/L koordinator. RAN merupakan sebuah dokumen yang berisikan komitmen dan indikator keberhasilan atas pelaksanaan target aksi nasional untuk isu-isu tematik tertentu. Beberapa RAN yang diampu oleh Kemenlu, yaitu:

Tabel II.10
Rencana Aksi Nasional Tematik Kemenlu Tahun 2023

No.	Rencana Aksi Nasional (RAN)	Uraian Singkat
01	Renaksi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek)	Renaksi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditetapkan dalam rangka mendukung Program Jamsostek sesuai mandat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jamsostek. Kemenlu berperan dalam 4 renaksi yaitu: i. Pendataan Pegawai. ii. Integrasi Sistem. iii. Pemasangan Konten Jamsostek. iv. Kepesertaan Pegawai.
02	Renaksi Jaminan Sosial Kesehatan (JKN)	Renaksi Jaminan Sosial Kesehatan merupakan renaksi yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan ditetapkan sesuai mandat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam kapasitasnya, Kemenlu melaksanakan Renaksi ini dengan tujuan diseminsasi program JKN kepada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia dan mendorong seluruh pegawai pemerintah WNI dengan status non-ASN di Perwakilan RI menjadi peserta aktif dalam program JKN. Renaksi yang diampu Kemenlu, diantaranya: i. Pemasangan konten JKN. ii. Pelaksanaan Sosialisasi Kepesertaan JKN.

No.	Rencana Aksi Nasional (RAN)	Uraian Singkat
03	Renaksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dikoordinir oleh Badan Narkotika Nasional. Dalam kapasitasnya, Kemenlu melaksanakan beberapa aksi diantaranya: i. Penyediaan dan penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya narkotika dan prekursor narkotika. ii. Pembentukan regulasi tentang P4GN. iii. Tes urin ASN. iv. Pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika. v. Pengembangan topik anti narkotika dan prekursor narkotika dalam diklat. vi. Penyusunan data dan informasi P4GN.
04	Renaksi Hak Asasi Manusia (HAM)	Renaksi Hak Asasi Manusia (HAM) dilaksanakan sesuai mandat Perpres tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025 yang dikoordinir oleh Kemenkumham. Dalam kapasitasnya, Kemenlu mengampu 4 aksi, yaitu: i. Meningkatkan jangkauan layanan dokumen kependudukan. ii. Pemberian layanan khusus hak pendidikan anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI). iii. Pemberian layanan khusus hak kesehatan anak-anak PMI. iv. Meningkatkan upaya pelindungan anak dari perdagangan manusia.
05	Renaksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP)	Renaksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) dilaksanakan sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 dikoordinir oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Renaksi yang diampu Kemenlu adalah terkait penyelesaian dan penegasan batas wilayah negara (darat) dengan kegiatan Perundingan Batas Wilayah Negara RI-RDTL (SOC)

No.	Rencana Aksi Nasional (RAN)	Uraian Singkat
06	Renaksi Kelapa Sawit Berkelanjutan (KSB)	Renaksi Kelapa Sawit Berkelanjutan (KSB) dikoordinir oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Renaksi ini dilaksanakan di lingkungan Kemenlu melalui penyelenggaraan diplomasi, promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO oleh pasar internasional dengan 4 keluaran, sebagai berikut: i. Tersedianya strategi diplomasi. ii. Terlaksananya koordinasi diplomasi. iii. Terwujudnya kerja sama. iv. Tercapainya kesepahaman.
07	Renaksi Kesepakatan Global untuk Migrasi yang Aman, Tertib dan Teratur (KGM)/*Global Compact for Safe, Orderly & Regular Migration* (GCM)	Rencana Aksi Nasional Implementasi Kesepakatan Global terkait Migrasi Aman, Tertib, dan Teratur (RAN KGM) disusun sebagai acuan bagi kementerian dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah guna mencapai tata kelola migrasi yang lebih baik. Kemenlu merupakan koordinator dari renaksi ini dan saat ini masih dalam tahap penyusunan Rancangan Peraturan Presiden.
08	Renaksi Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK)	Renaksi Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang strategi kebudayaan dan dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Renaksi ini dilaksanakan Kemenlu untuk meningkatkan pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) guna memperkuat pengaruh Indonesia di dunia internasional. Fokus yang akan menjadi perhatian selama 4 tahapan pelaksanaan, yaitu: i. Peningkatan program pemberian insentif dan fasilitas. ii. Peningkatan jumlah OPK. iii. Peningkatan progam kerja sama.

No.	Rencana Aksi Nasional (RAN)	Uraian Singkat
09	Renaksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI)	Renaksi ini dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Indikator keberhasilan yang diampu Kemenlu yaitu: i. Keikutsertaan Indonesia dalam sidang State Parties on the Law of the Sea (SPLOS). ii. Keikutsertaan Indonesia dalam sidang International Seabed Authority (ISA). iii. Keikutsertaan Indonesia dalam kerangka Indian Ocean Rim Association (IORA). iv. Keikutsertaan Indonesia dalam ASEAN Maritime Forum. v. Keikutsertaan Indonesia dalam kerangka ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP). vi. Keikutsertaan Indonesia dalam ASEAN Regional Forum (ARF) Inter-Sessional Meeting on Maritime Security. vii. Perundingan Batas Maritim RI dengan Malaysia, Vietnam, Singapura, Thailand, Filipina, Palau, Timor Leste, Australia, dan India. viii. Diterimanya Dokumen Submisi Perluasan Landas Kontinen oleh PBB (CLCS).
10	Renaksi Program Prioritas Nasional Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Renaksi ini dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden serta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI. Dalam kapasitasnya, Kemenlu bertanggungjawab dalam Penguatan Integritas NKRI dan Pelindungan WNI di Luar Negeri yang diukur melaui indikator keberhasilan persentase penyelesaian kasus WNI di luar negeri.
11	Renaksi Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025	Renaksi ini dilaksanakan sesuai mandat Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 15 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi Indonesia tahun 2021-2025 dan dikoordinasikan oleh Bappenas. Kemenlu memiliki peran dalam pelaksanaan 2 kelompok aksi, yaitu: 1. Peningkatan kapasitas pengelola, professional, dan masyarakat dalam pengembangan *Geopark*. 2. Penguatan kerja sama dalam pegembangan *Geopark*.

No.	Rencana Aksi Nasional (RAN)	Uraian Singkat
12	Renaksi Nasional Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)	Renaksi ini dikoordinir oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM). Kemenlu mengampu 3 renaksi dengan kriteria keberhasilan "Tersedianya Katalog Digital/*Online* Produk UKM", yaitu: i. Pengembangan dan sosialisasi *website* Smesta dan Asean Access. ii. Pendampingan UKM masuk dalam ekosistem digital. iii. Penyusunan katalog digital/*Online* Produk UMKM.
13	Renaksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (PE)	Renaksi ini dikoordinir oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kemenlu mengampu 21 aksi yang tersebar dalam 3 pilar, yaitu: 1. Pilar 1 Pencegahan (Kesiapsiagaan, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi). 2. Pilar 2 Penegakan Hukum, Pelindungan Saksi dan Korban, serta Penguatan Kerangka Legislasi Nasional. 3. Pilar 3 Kemitraan dan Kerja Sama Internasional.
14	Renaksi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP)	Renaksi dikoordinir oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan masih dalam tahap penyusunan. Dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan pada Desember 2023, Kemenlu telah menyampaikan pemetaan Rincian *Output* yang kiranya terkait dengan PIP dan akan tetap digunakan pada tahun 2025-2029.

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

III.1. Capaian Kinerja

SS S1 Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal

SS S2 Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh di Tingkat Regional dan Global

SS S3 Integritas Kedaulatan NKRI dan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional yang Meningkat

SS C1 Pelindungan WNI di Luar Negeri dan Pelayanan Publik yang Prima

SS C2 Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi

SS B1 Diplomasi Bilateral yang Kuat

SS B2 Diplomasi Multilateral yang Kuat

SS L Infrastruktur Diplomasi yang Kuat

III.2. Realisasi Anggaran

III.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya

III.1

Capaian Kinerja

Sebagai institusi publik, Kemenlu bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. LKj Kemenlu merupakan perwujudan akuntabilitas dan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Menlu beserta jajarannya kepada Presiden Republik Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan dengan menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, evaluasi atas capaian kinerja tahun ini terhadap target yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja Menlu Tahun 2023. Evaluasi capaian kinerja tahun 2023 membandingkan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada periode Renstra 2020-2024.

Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) Kemenlu pada tahun 2023 adalah sebesar 107,63% dengan predikat "Istimewa". Nilai tersebut merupakan hasil kinerja secara kolektif dari seluruh unit organisasi/ unit kerja di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI dengan membandingkan realisasi capaian IKU dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Dalam menghitung NCKO, Kemenlu menggunakan *tools* berupa aplikasi AKSI yang merujuk perhitungan dalam Permenlu Nomor 4 tahun 2018 Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Pada TA 2023, Kemenlu memiliki 4 Perspektif yaitu:

1. *Stakeholders Perspective*	2. *Customer Perspective*
3. *Internal Business Process Perspective*	4. *Learning and Growth Perspective*

Keempat perspektif diterjemahkan ke dalam 8 Sasaran Strategis yang diukur dengan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagai realisasi, dari 20 IKU, terdapat 4 IKU dengan capaian kinerja di atas 120% atau melebihi batas toleransi, 14 IKU dengan capaian kinerja 100 – 120% dan 2 IKU nilai capaian kinerjanya diantara 75 - 99%.

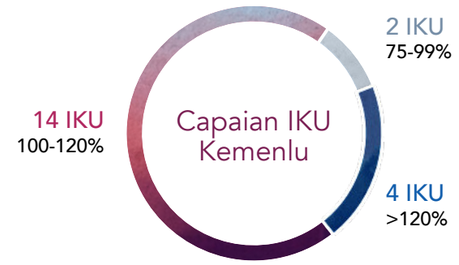

NCKO Kemenlu tahun 2023 sebesar 107,63 mengalami kenaikan sebesar 0,47 poin dari 107,16 pada tahun 2022. NCKO Kemenlu pada beberapa tahun terakhir dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel III.11
Nilai Capaian Kinerja Organisasi Kemenlu 2020-2023

Sumber: Kemenlu

Tahun	Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO)
2020	101,50
2021	107,66 ↑
2022	107,16 ↓
2023	107,63 ↑

Tabel III.12
Capaian Kinerja Perspektif Kemenlu 2023

Sumber: Kemenlu

Perspektif	Tahun 2023	
	Bobot SS	Skor SS
Stakeholders Perspective	25%	106,15
Customer Perspective	15%	109,44
Internal Business Process Perspective	30%	109,56
Learning and Growth Perspective	30%	106,03
Total NCKO		107,63

Secara keseluruhan capaian SS dan IKU yang telah dilaksanakan Kemenlu pada TA 2023 telah mencapai target dari yang telah ditetapkan. Namun terdapat sejumlah IKU yang capaiannya lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Tabel III.13
Perbandingan Target (T), Realisasi (R), dan Capaian (C) Kinerja Kemenlu Tahun 2022 dan 2023

No.	Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Informasi Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023
01	Program Diplomasi dan Kerja Sama Internasional	Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal	Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan	T	85,52%	92,54%
				R	149,24%	102,5%
				C	120%	110,67%
			Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi	T	93,35%	94,40%
				R	131,33%	118,99%
				C	120%	126,05%
			Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata	T	77,88%	90,23%
				R	147,4%	104,14%
				C	120%	115,42%
		Integritas Kedaulatan NKRI dan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional yang Meningkat	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	T	3,90 (skala 5)	3,95 (skala 5)
				R	4,06	4,07
				C	104,1%	103,04%
		Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi	Persentase Tindak Lanjut/ Implementasi Kesepakatan Internasional oleh *Stakeholders* Dalam Negeri	T	87,84%	93,49%
				R	100%	99,43%
				C	113,84%	138,56%
			Indeks Pengaruh Rekomendasi Strategi Kebijakan Luar Negeri terhadap Kebijakan Pemangku Kepentingan	T	3 (skala 4)	3,20 (skala 4)
				R	3,26	3,42
				C	108,67%	106,88%
		Diplomasi Bilateral yang Kuat	Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	T	75	90
				R	96	123
				C	120%	136,67%
			Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan, dan Maritim	T	62	75
				R	73	86
				C	117,74%	114,67%

No.	Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Informasi Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023
02	Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral	Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh di Tingkat Regional dan Global	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional	T	4,85	4,94
				R	4,98	4,97
				C	102,68%	100,61%
		Diplomasi Multilateral yang Kuat	Persentase Prakarsa/ Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	T	97,25%	98,25%
				R	99,18%	100,5%
				C	101,98%	101,78%
			Persentase Prakarsa/ Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di Bidang Politik, Keamanan, dan Maritim	T	97,25%	98,25%
				R	99,13%	100,45%
				C	101,93%	101,78%
03	Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	Integritas Kedaulatan NKRI dan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional yang Meningkat	Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim	T	46,32	47,99
				R	46,84	50,96
				C	101,12%	101.94%
04	Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik Berkualitas	Pelindungan WNI di Luar Negeri dan Pelayanan Publik yang Prima	Persentase Kasus WNI di Luar Negeri yang Diselesaikan	T	80%	83%
				R	91,5%	92,02%
				C	114,38%	110,87%
			Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik	T	4 (skala 4)	4 (skala 4)
				R	4	4
				C	100%	100%

No.	Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Informasi Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023
05	Program Dukungan Manajemen	Infrastruktur Diplomasi yang Kuat	Nilai Sistem Merit	T	300	300
				R	277	343,50
				C	92,33%	114,50%
			Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenlu	T	81	81
				R	79,46	79,46
				C	98,09%	98,09%
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemenlu	T	79,5 (BB)	79,80 (BB
				R	78,81	79,15
				C	98,86%	99,19%
			Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri	T	2,7 (skala 4)	2,90 (skala 4)
				R	2,86	2,91
				C	105,93%	100,34%
			Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Luar Negeri	T	92	93
				R	93,72	94,20
				C	101,87%	101,29%
			Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu	T	4 (WTP)	4 (WTP)
				R	4	4
				C	120%	120%

Sumber: Aplikasi AKSI Kemenlu

Dalam mendukung tercapainya Rencana Kerja Pemerintah pada Tahun Anggaran 2023, Kemenlu memiliki 7 (tujuh) Output Proyek Prioritas Nasional (ProPN)/*Output* Strategis yang mendukung pencapaian PN 7 yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. *Output* ProPN tersebut mendukung 3 Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kemenlu Tahun 2023, sebagaimana dipetakan pada infografis di bawah ini:

Tabel III.14
Output Proyek Prioritas Nasional

Sumber: Kemenlu

Program	ProPN/*Output* Strategis	Target	Realisasi
Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral	Rekomendasi Kebijakan Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023	40	40
	Kegiatan Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB	15	15
	Kegiatan Diplomasi Komoditas Berkelanjutan	6	6
	Rekomendasi Kebijakan Keketuaan Indonesia pada MIKTA 2023	13	13
Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	Kesepakatan Perundingan Penetapan Batas Maritim (Malaysia, Filipina, Palau, Vietnam), Konsultasi Pemberlakuan Persetujuan *Realignment* FIR, dan Pemutakhiran Data Batas Darat dan Maritim dalam Mendukung Kebijakan Satu Peta	8	8
Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik Berkualitas	Orang Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (Perwakilan RI)	163.967	160.892
	Orang Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (Pusat)	22.430	26.439

Pada tahun 2023, Kemenlu secara aktif bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait berkolaborasi dalam mewujudkan capaian rencana aksi nasional tematik, Kontribusi Kemenlu terhadap Rencana Aksi Nasional Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.15
Kontribusi Kemenlu terhadap Rencana Aksi Nasional Tahun 2023 Sumber: Kemenlu

No.	Rencana Aksi Nasional (RAN)	Capaian
01	Renaksi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Renaksi Jaminan Sosial Kesehatan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	• Pendataan 1035 pegawai pada kantor Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia; penerbitan Nota Edaran (*Circular Note*) tentang kepesertaan JKN. • Pemberian informasi perpanjangan kontrak PMI pada Perwakilan RI di Luar Negeri. • Integrasi sistem, pengunggahan konten manfaat jamsostek naker di sosial media Biro SDM. • Pembekalan pegawai Non-ASN yang akan bekerja di kantor Perwakilan RI di Kantor Perwakilan RI di luar negeri pada BPJS Ketenagakerjaan.
02	Renaksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dikoordinasikan oleh Badan Narkotika Nasional	• Penyebaran informasi mengenai P4GN untuk pegawai Kemenlu melalui *email blast*, unggahan konten di media sosial, serta pemasangan *banner* P4GN di lingkungan Kemenlu. • Sosialisasi informasi bahaya narkotika dan prekursor narkotika pada kegiatan *capacity building* bagi pegawai kemenlu; Penyelenggaraan tes urin mencapai lebih dari 9% dari total seluruh ASN Kemenlu. • Penyampaian materi P4GN dalam pendidikan dan pelatihan kepada pejabat fungsional di lingkungan Kemenlu. • Penyusunan data dan informasi P4GN sebagai bahan laporan dan pertukaran informasi luar negeri.
03	Renaksi Hak Asasi Manusia (HAM) dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	• Memberikan pelayanan kepada anak-anak dari kelompok Pekerja Migran Indonesia melalui penerbitan dokumen pencatatan kelahiran sebanyak 10.404 dokumen, pemberian layanan pendidikan kepada 890 anak, dan pemberian layanan kesehatan kepada 373 anak. • Meningkatkan upaya pelindungan anak dari perdagangan manusia melalui respon cepat dan penanganan efektif atas kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang di tingkat pusat dan daerah serta pelaksanaan bimbingan teknis kepada 75 peserta dari perwakilan unit terkait di Kemenlu dan K/L terkait.

No.	Rencana Aksi Nasional (RAN)	Capaian
04	Renaksi Kelapa Sawit Berkelanjutan (KSB) dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian	• Kemenlu juga berusaha menjalin kerja sama dengan negara eksportir dan importir sawit dalam berbagai program. • Kemenlu telah membantu menyediakan advokasi dan litigasi sawit di forum atau sidang internasional. • Kemenlu membantu peningkatan pemahaman dan keterlibatan publik terhadap isu sawit, kerja sama sawit, serta advokasi terhadap produk sawit Indonesia.
05	Renaksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investas	Kemenlu telah mengikuti berbagai forum terkait kebijakan kelautan Indonesia, yaitu: • Keikutsertaan Indonesia dalam sidang State Parties on the Law of the Sea (SPLOS), Indian Ocean Rim Association (IORA), ASEAN Maritime Forum (AMF), dan ASEAN Regional Forum (ARF). • Keikutsertaan Indonesia. • Perundingan Batas Maritim RI dengan Vietnam dan Palau. • Penyelesaian Submisi Perluasan Landas Kontinen di segmen Selatan Jawa dan Selatan Nusa Tenggara. • Penyelenggaraan ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) yang berhasil menjaring sejumlah proyek strategis Indonesia dan kawasan.
06	Program Prioritas Nasional Politik, Hukum dan Keamanan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI	• Kemenlu bertanggung jawab dalam Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri yang diukur melaui indikator keberhasilan persentase penyelesaian kasus WNI di luar negeri dengan target 2023 sebesar 83% dan realisasi sebesar 92,02% atau tercapai 110,87%. • Kemenlu juga telah menghasilkan konsep MoU 5 K/L tentang Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri untuk selanjutnya akan difinalisasi dan ditandatangani pada Triwulan I Tahun 2024.

No.	Rencana Aksi Nasional (RAN)	Capaian
07	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Kementerian/Lembaga Tahun 2022 dikoordinasikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Kemenlu telah melakukan pelaporan penyelenggaraan dan pemenuhan hak anak di lingkungan Kemenlu melalui pengisian kuesioner *self assessment* yang disampaikan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Aplikasi SIMEP PA meliputi 3 (tiga) instrumen : Pemenuhan Hak Anak (PHA), Perlindungan Khusus Anak (PKA) dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
08	Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme	Dukungan bagi K/L pengampu isu dalam membentuk mekanisme persiapan pengesahan/pembentukan pokja/ pengkajian dan penyusunan naskah akademik dalam 5 (lima) konvensi internasional, yaitu: i. Konvensi Penerbangan Sipil. ii. Konvensi Penyanderaan. iii. Konvensi IPP. iv. Konvensi Navigasi Maritim. v. Konvensi *Marking of Plastic Explosives*.
09	Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*)	• Kemenlu memberi dukungan pada Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 yang berhasil menetapkan 4 *Geopark* nasional Indonesia sebagai UNESCO *Global Geopark* (UGGp). • Kemenlu memberikan dukungan dalam proses nominasi dua *geopark* nasional, yaitu (i) Kebumen National Geopark dan (ii) Meratus National Geopark, untuk menjadi UNESCO Global Geopark (UGGp) pada November 2023. • Kemenlu memfasilitasi penandatanganan MoU Kerjasama 2 (dua) *Geopark* yaitu Gunung Sewu UNESCO Global Geopark (GSUGG) dan Langkawi UNESCO Global Geopark (LUGG) serta *Plan of Action* (PoA) implementasi kerja sama pada 1 November 2023. MoU ini mendorong kerja sama yang lebih intensif antara Pemda Provinsi dan Kabupaten yang menjadi lokasi GSUGG yaitu: DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Gunung Kidul, Wonogiri dan Pacitan dengan *Langkawi Development Authority* (LADA), Malaysia.

Terdapat dua renaksi yang masih dalam tahap pembahasan yaitu:

RAN Pembinaan Ideologi Pancasila (RAN PIP)

Masih dalam proses penyusunan sehingga masih perlu masukan dari K/L terkait. Kemenlu saat ini sedang memetakan kegiatan terkait yang mendukung RAN PIP.

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK)

Saat ini dilaksanakan pembahasan atas definisi operasional dan penentuan dukungan Kemenlu terhadap 13 strategi RIPK.

Sementara renaksi yang dikoordinir oleh Kemenlu adalah Renaksi *Global Compact for Safe, Orderly & Regular Migration* (GCM)/Kesepakatan Global terkait Migrasi Aman, Tertib, dan Teratur (RAN KGM) yang disusun sebagai acuan bagi Kementerian dan Lembaga, Pemerintah di tingkat pusat dan daerah guna mencapai tata kelola migrasi yang lebih baik. Renaksi ini masih dalam tahap penyusunan Rancangan Peraturan Presiden.

> “RAN KGM disusun sebagai acuan bagi Kementerian dan Lembaga, Pemerintah di tingkat pusat dan daerah guna mencapai tata kelola migrasi yang lebih baik

Stakeholders Perspective S

Stakeholders Perspective (S) mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *stakeholder* sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder*. *Stakeholder* adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

Stakeholders Perspective (S) terdiri dari sejumlah Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut:

S1
Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal

S2
Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh di Tingkat Regional dan Global

S3
Integritas Kedaulatan NKRI dan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional yang Meningkat

Sasaran Strategis (SS) S1 :

Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal

Untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 dan Visi Indonesia 2045, Kemenlu telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 - 2024. Salah satu tujuan/Sasaran Strategis yang ditetapkan adalah "Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal" yang mengukur jumlah nominal manfaat secara ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang paling menguntungkan dan dihasilkan dari berbagai kerja sama perdagangan, investasi, dan pariwisata dengan negara mitra.

Indonesia memiliki aspirasi untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 (Visi Indonesia 2045), untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 yang ditindaklanjuti melalui RKP Tahun 2023. RKP 2023 mengusung tema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dituangkan ke dalam 7 (tujuh) PN, salah satu diantaranya adalah PN 1 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Demi mendukung arah kebijakan dan strategi tersebut, Kemenlu telah menetapkan Diplomasi Ekonomi sebagai salah satu prioritas diplomasi 4+1 yang terkandung dalam Renstra tahun 2020-2024.

Pada 2023, Kondisi perekonomian global semakin kondusif seiring transisi pandemi COVID-19 menuju fase endemik. Hal tersebut menjadi faktor yang mendorong akselerasi aktivitas ekonomi internasional serta tingkat likuiditas global menjadi relatif lebih kondusif. Diplomasi ekonomi diharapkan dapat mendukung kemandirian dan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus sebagai salah satu strategi dalam percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kemenlu melaksanakan diplomasi ekonomi melalui penerapan kebijakan hubungan luar negeri utamanya pada tiga sektor ekonomi utama yakni perdagangan, investasi, serta pariwisata yang diejawantahkan melalui Sasaran Strategis "Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal." Sasaran Strategis dimaksud untuk mengukur jumlah nominal manfaat secara ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang paling menguntungkan yang dihasilkan oleh berbagai kerja sama dan hubungan di ketiga sektor tersebut.

Keberhasilan Sasaran Strategis ini diukur berdasarkan capaian tiga IKU di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata yang telah digunakan untuk mengukur *output* kinerja diplomasi ekonomi Kemenlu sejak tahun 2015. Pada akhir tahun 2021, telah dilakukan perubahan atas nomenklatur dan formulasi perhitungan IKU perdagangan, investasi, dan pariwisata guna lebih mengoptimalkan pengukuran *outcome* kinerja dan kontribusi riil Kemenlu pada pelaksanaan diplomasi ekonomi. IKU tersebut adalah sebagai berikut:

01 **IKU S1.1**
Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan, yang realisasinya merupakan agregat capaian SUB IKU:

a. Jumlah Komitmen Perdagangan.
b. Nilai Perdagangan dengan Negara Mitra.

02 **IKU S1.2**
Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi, yang realisasinya merupakan agregat capaian SUB IKU:

a. Jumlah Komitmen Investasi.
b. Nilai Investasi dengan Negara Mitra.

03 **IKU S1.3**
Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor pariwisata, yang realisasinya merupakan agregat capaian SUB IKU:

a. Tingkat Potensi Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia.
b. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia.

Analisis IKU S1.1

Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan

Deskripsi IKU

Seiring pulihnya dunia dari pandemi COVID-19, kondisi perekonomian global juga semakin membaik dengan ditandai meningkatnya intensitas perdagangan internasional antar negara. Di Indonesia, menguatnya sektor perdagangan tidak terlepas dari usaha Pemerintah dalam mengelola perekonomian. Kemenlu dalam hal ini berkontribusi melalui pelaksanaan diplomasi ekonomi untuk menjaga agar aktivitas perdagangan dapat terus bergerak dan tumbuh di tengah dinamika dunia yang menantang. Pada tahun 2023, Kemenlu melakukan penguatan diplomasi ekonomi secara berkesinambungan guna mendukung performa ekspor nasional, agar momentum pertumbuhan ekonomi dapat dioptimalkan untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan kebijakan luar negeri dalam mendorong ekspor nasional menjadi tolok ukur Kemenlu dalam mengukur kinerja diplomasi ekonomi di sektor perdagangan.

IKU S1.1 secara spesifik mengukur *value* dengan satuan persentase yang diperoleh Indonesia dari upaya diplomasi ekonomi untuk perdagangan. Target dan realisasi pada level Kemenlu adalah agregat dari target dan realisasi Satker Regional, sementara target dan realisasi pada Satker Regional merupakan agregat dari target dan realisasi Perwakilan RI yang dinaungi Satker Regional.

> “Pada tahun 2023, Kemenlu terus memperkuat diplomasi ekonomi untuk mendukung kinerja ekspor nasional serta mengoptimalkan momentum pertumbuhan ekonomi demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat

IKU ini memiliki 2 SUB IKU, yakni:

SUB IKU 1

Jumlah Komitmen Perdagangan

Bobot 70%

SUB IKU ini mengukur jumlah komitmen tertulis antara Indonesia dengan negara mitra yang memuat nilai perdagangan. Komitmen diperoleh dari kegiatan diplomasi ekonomi yang menyangkut perdagangan, seperti *business matching*, pembukaan pasar potensial dan unggulan, promosi dagang, dan forum kerja sama. Jumlah komitmen perdagangan dihitung dari perolehan komitmen baru yang difasilitasi oleh Kemenlu dari Januari-Desember tahun berjalan.

SUB IKU 1 di bobotkan sebesar 70% karena pelaksanaan promosi dan fasilitasi proses pembentukan komitmen perdagangan merupakan bagian dari tugas dalam diplomasi yang dilaksanakan Kemenlu sehingga tingkat kendali Kemenlu terhadap SUB IKU 1 cukup tinggi.

SUB IKU 2

Nilai Perdagangan dengan Negara Mitra

Bobot 30%

SUB IKU ini mengukur nilai perdagangan berupa ekspor yang terealisasi (dalam mata uang USD) dengan suatu negara akreditasi. Realisasi dari nilai perdagangan bersifat tahunan. Nilai yang diperoleh di suatu tahun dapat terealisasi secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Realisasi SUB IKU 2 adalah perolehan nilai perdagangan dari Januari-Oktober tahun berjalan.

Sub IKU 2 mendapatkan alokasi bobot 30% karena capaian SUB IKU dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenlu namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak (K/L terkait, dunia usaha, dll).

Perhitungan realisasi dan capaian IKU S1.1 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU} = (70\% \times \text{Capaian Sub IKU 1}) + (30\% \times \text{Capaian Sub IKU 2})$$

Informasi Kinerja

Tabel III.16
Capaian IKU S1.1 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan

Sumber: AKSI Kemenlu

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Nilai Realisasi SUB IKU	Nilai Bobot
Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan yang Optimal	Capaian SUB IKU 1 Jumlah komitmen perdagangan (70%)	**111,08%**	**77,76%**
	Capaian SUB IKU 2 Nilai perdagangan dengan negara mitra (30%)	**82,17%**	**24,65%**

Target	Realisasi	Capaian
92,54%	102,41%	110,67%

Pada tahun 2023, realisasi IKU S1.1 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan adalah sebesar 102,41% dari target sebesar 92,54%, sehingga capaian IKU sebesar 110,67%.

Realisasi IKU S1.1 diperoleh dari penjumlahan bobot atas capaian SUB IKU 1 dan SUB IKU 2. Pada tahun 2023, realisasi SUB IKU 1 Jumlah komitmen perdagangan adalah sebesar 381 dari target sebesar 343, sehingga capaian SUB IKU sebesar 111,08%.

Perolehan komitmen perdagangan didominasi oleh sektor Komoditas Unggulan Indonesia Lainnya seperti otomotif, bumbu, kopi, dan bahan mentah dengan jumlah sebesar 153 komitmen dari total 381 komitmen yang berhasil disepakati dengan negara akreditasi.

Realisasi SUB IKU 2 Nilai perdagangan dengan negara akreditasi adalah sebesar USD214,186,705,192.86 dari target sebesar USD260,647,134,702.00, sehingga capaian SUB IKU sebesar 82,17%.

Kontribusi Kawasan Terhadap Pencapaian Target Jumlah Komitmen Perdagangan Indonesia dengan Negara Mitra Periode Januari-Desember 2023

Timur Tengah
23 komitmen

Asia Timur
23 komitmen

Afrika
12 komitmen

Asia Selatan & Tengah
66 komitmen

Pasifik & Oseania
20 komitmen

Asia Tenggara
65 komitmen

Top 3
negara mitra dengan jumlah komitmen terbanyak

01	02	03
Australia	India	RRT
20 komitmen	17 komitmen	15 komitmen
USD4,30 M	USD4,30 M	USD9,94 Juta

Amerika Utara & Tengah
25 komitmen

Eropa Barat, Tengah & selatan
66 komitmen

Amerika Selatan & Karibia
23 komitmen

Eropa Utara, Tengah & Timur
48 komitmen

Top 3
negara mitra dengan jumlah komitmen terbanyak

01	02	03
Amerika Serikat	Jerman	Inggris
16 komitmen	15 komitmen	12 komitmen
USD171,57 Juta	USD148,24 Juta	USD881.98 Juta

Top 10 Negara Tujuan Ekspor

- RRT — USD53,22 M
- Amerika Serikat — USD19,24 M
- Jepang — USD17,48 M
- India — USD16,45 M
- Malaysia — USD10,50 M
- Singapura — USD10,46 M
- Filipina — USD9,28 M
- Korea Selatan — USD8,25 M
- Vietnam — USD6,22 M
- Thailand — USD6,13 M

Kontribusi Kawasan Terhadap Nilai Perdagangan Indonesia dengan Negara Mitra Tahun 2023

(Sumber data: BPS)

Asia Timur
USD86,93 M

Asia Tenggara
USD44,45 M

Asia Selatan & Tengah
USD22,60 M

Timur Tengah
USD7,96 M

Afrika
USD4,04 M

Pasifik & Oseania
USD3,39 M

Amerika Utara & Tengah
USD22,56 M

Eropa Barat & Selatan
USD13,69 M

Eropa Utara, Tengah & Timur
USD6,03 M

Amerika Selatan dan Karibia
USD2,54 M

Perbandingan Kinerja

Tabel III.17
Target, Realisasi, dan Capaian IKU Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan

Kode IKU/ SUB IKU		2022	2023	
S1.1	Target	85,52%	**92,54%**	↑
	Realisasi	149,24%	**102,41%**	↓
	Capaian	120%	**110,67%**	↓
SUB IKU 1	Target	219	**343**	↑
	Realisasi	347	**381**	↑
	Capaian	158,45%	**111,08%**	↓
SUB IKU 2	Target	USD190,861,928,526.00	**USD260,647,134,702.00**	↑
	Realisasi	USD243,843,727,840.45	**USD214,186,705,192.86**	↓
	Capaian	127,76%	**82,17%**	↓

IKU S1.1 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan diadopsi pada tahun 2022 setelah dilakukan penajaman formulasi dan perubahan nomenklatur untuk mengukur capaian diplomasi ekonomi dengan lebih optimal. Oleh karenanya, capaian IKU periode tahun 2023 hanya dapat dibandingkan dengan capaian IKU di tahun 2022.

Target IKU tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 92,54% dari yang sebelumnya 85,52% pada tahun 2022. Target tahun 2023 ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan realisasi dan capaian IKU Tahun 2022 yang melampaui target, serta mempertimbangkan kondisi perekonomian global yang membaik pasca pandemi.

Peningkatan target IKU pada tahun 2023 merupakan upaya Kemenlu untuk memacu performa kinerja diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan penetapan target yang menantang namun tetap *achievable*. Walaupun target IKU telah tercapai, namun realisasi IKU tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 102,41% yang sebelumnya 149,24% pada tahun 2022. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan angka target yang cukup signifikan dibanding tahun lalu dan tidak tercapainya SUB IKU 2 akibat anjloknya harga beberapa komoditas dunia.

Target SUB IKU 1 mengalami peningkatan target pada tahun 2023 menjadi 343 dari yang sebelumnya 219 komitmen pada tahun 2022. Keputusan peningkatan target mempertimbangkan realisasi tahun 2022 yang melampaui target dan kondisi perekonomian nasional yang diprediksi akan terus mengalami pertumbuhan sepanjang tahun 2023. Prediksi ini didukung oleh meningkatnya jumlah kerja sama yang terjalin antara Indonesia dengan sejumlah mitra dagang tradisional di Amerika, Eropa, serta Asia pada dua tahun terakhir.

Realisasi SUB IKU 1 juga mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 381 dari 347 komitmen pada tahun 2022. Peningkatan realisasi antara lain disebabkan oleh meningkatnya pelaksanaan forum bisnis yang melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan mencakup sektor swasta dan negara mitra potensial, baik yang telah menjadi *established market* maupun dari negara pasar non-tradisional. Selain itu, terselenggaranya berbagai kunjungan tingkat kepala negara maupun menteri pada *event* internasional tahun 2023 juga ikut berkontribusi mendorong peningkatan jumlah komitmen perdagangan yang disepakati. Komitmen-komitmen tersebut dihasilkan baik dalam bentuk *deliverables* pertemuan maupun dalam bentuk kesepakatan pada *side event* kegiatan kunjungan.

SUB IKU 2 mengalami peningkatan target yang cukup signifikan pada tahun 2023 menjadi USD260,647,134,702.00 dari USD190,861,928,526.00 pada tahun 2022. Keputusan untuk meningkatkan target mempertimbangkan realisasi nilai perdagangan di tahun 2022, dimana nilai perdagangan Indonesia secara umum tercatat naik dibandingkan tahun 2021. Kenaikan nilai perdagangan pada tahun 2022 antara lain disebabkan oleh pengalihan *global demand* ke Indonesia akibat konflik geopolitik dan *commodity supercycle* pasca pandemi.

Namun demikian, realisasi SUB IKU 2 pada tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022 menjadi USD214,186,705,192.86 dari USD243,843,727,840.45. Penurunan realisasi bukan disebabkan oleh penurunan volume ekspor nasional, melainkan lebih dipengaruhi oleh instabilitas harga komoditas dunia sepanjang tahun 2023. Volatilitas harga komoditas tersebut antara lain disebabkan oleh inflasi, konflik geopolitik, serta restriksi dagang yang terus berlanjut di berbagai belahan dunia. Walaupun terjadi penurunan realisasi nilai perdagangan, performa ekspor Indonesia pada tahun 2023 masih terbilang baik dengan total surplus neraca perdagangan sebesar USD31,2 Miliar hingga Bulan Oktober 2023 yang menunjukan keberhasilan Pemerintah dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.

> Keputusan peningkatan target mempertimbangkan realisasi tahun 2022 yang melampaui target dan kondisi perekonomian nasional yang diprediksi akan terus mengalami pertumbuhan sepanjang tahun 2023

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Capaian Kemenlu di sektor perdagangan membuktikan bahwa diplomasi ekonomi berjalan dengan efektif dan berkontribusi dalam memberikan manfaat yang *tangible* bagi perekonomian nasional, yakni dengan menstimulasi aktivitas perdagangan antara pemangku kepentingan domestik dan internasional.

Selain faktor kondisi ekonomi yang membaik pasca pandemi COVID-19, pencapaian target efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan didukung oleh realisasi komitmen perdagangan yang tinggi, dengan valuasi komitmen yang teridentifikasi mencapai USD15,235,632,227.00 dari 381 komitmen yang berhasil disepakati. Perangkat diplomasi Indonesia berperan penting dalam menjaring peluang dagang antara para pelaku usaha nasional dan negara mitra potensial sehingga dapat menghasilkan suatu komitmen perdagangan. Kemenlu baik Pusat dan Perwakilan RI telah dan terus memberikan fasilitasi dan pengawalan komitmen perdagangan mulai dari tahap penjajakan, kesepakatan, hingga tindak lanjut. Beberapa komitmen perdagangan yang berhasil diraih pada tahun 2023 melalui dukungan fasilitasi Kemenlu yakni:

1. Penandatanganan MoU Pembelian Produk Kayu dan Kertas antara Perusahaan Inggris Callington Ltd dengan Asia Pulp and Paper Senilai USD112,000,000.00.

2. Komitmen transaksi yang berhasil didapat dari partisipasi Pavilion Indonesia dan 9 *exhibitor* Indonesia pada Pameran Natural Product Expo West 2023 senilai USD44,85 juta.

3. Komitmen sejumlah perusahaan tambang Indonesia pada Trade Expo Indonesia (TEI) ke-38 yang menghasilkan komitmen kurang lebih sebesar USD6,375,000,000.00.

Tingginya angka komitmen perdagangan pada tahun 2023 tidak terlepas dari strategi diplomasi ekonomi Kemenlu di sektor perdagangan yang meliputi upaya perluasan akses pasar dan kerja sama strategis, sinergi promosi bisnis Pusat dan Perwakilan RI, serta fasilitasi dan pengawalan komitmen perdagangan potensial.

01

Perluasan Akses Pasar dan Kerja Sama Strategis

Untuk mendorong perluasan akses pasar, Kemenlu terus mengupayakan penyelesaian perundingan serta tindak lanjut kerja sama perdagangan strategis melalui skema *Preferential Trade Agreement* (PTA), *Free Trade Agreement* (FTA), serta C*omprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA).

Skema kesepakatan tersebut membantu pelaku usaha nasional melakukan ekspor ke negara mitra tradisional dan non-tradisional dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan perdagangan. Beberapa kesepakatan yang diimplementasikan dan tengah dipercepat penyelesaiannya pada tahun 2023 antara lain Indonesia-Australia CEPA, Regional Comprehensive Economic Partnership, Indonesia-European Trade Association CEPA, dan Indonesia-Korea CEPA.

02

Sinergi Promosi Bisnis Pusat dan Perwakilan RI

Sinergi kegiatan promosi pada sektor perdagangan juga dilakukan. Kemenlu, K/L terkait, Pemda, asosiasi bisnis, serta pihak-pihak terkait lainnya telah bersinergi melaksanakan promosi dagang yang lebih efektif, berkelanjutan, dan terarah. Sinergi promosi dagang antara lain dilaksanakan melalui penyelenggaraan forum-forum bisnis berorientasi kawasan, seperti *I*ndonesia-Europe Business Forum (IEBF) dan Indonesia-Latin America and the Caribbean Business Forum (INA-LAC BF). Forum-forum ini memberi wadah bagi para pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk bertemu, *business matching*, *business pitching*, *networking*, serta *showcasing* produk komoditas unggulan.

Kolaborasi promosi antar pemangku kepentingan nasional juga didukung dengan inovasi digital yang dilakukan Kemenlu. Melalui *website* www.ina-access.com, Kemenlu memfasilitasi kerja sama para pelaku usaha dengan lebih terarah. Kedepan *website* ini diproyeksikan menjadi portal perdagangan Indonesia dengan seluruh negara mitra dari berbagai kawasan.

03

Fasilitasi dan Pengawalan Komitmen Perdagangan Potensial

Dalam rangka mengawal tindak lanjut komitmen perdagangan potensial, Kemenlu memberdayakan perangkat diplomatik baik di Pusat maupun Perwakilan RI untuk memfasilitasi para pelaku usaha, salah satunya melalui TPPE. Bersama direktorat bidang bilateral, TPPE bertugas menjembatani seluruh *stakeholders* baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk merealisasikan berbagai peluang kerja sama di berbagai sektor khususnya di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. TPPE turut mengawal komitmen perdagangan mulai dari tahap penjajakan hingga tahap implementasi sehingga dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, Kemenlu juga menggunakan momentum keketuaan ASEAN dan berbagai *international event* yang terselenggara pada tahun 2023 untuk mengoptimalkan penjajakan kerja sama perdagangan. Sepanjang tahun 2023, Kemenlu telah memfasilitasi kunjungan tingkat Kepala Negara dan Menteri pada berbagai event, dimana pada kunjungan dan pertemuan tersebut telah berhasil menghasilkan sejumlah komitmen perdagangan antara Indonesia dengan mitra potensial.

Kendala dan Tantangan

Walaupun Kemenlu berhasil mencapai target IKU S1.1 pada tahun 2023, tercatat total nilai perdagangan Indonesia dengan negara mitra menurun dibandingkan tahun 2022. Hal ini antara lain disebabkan oleh sejumlah faktor eksternal yang menjadi kendala dan tantangan Kemenlu dalam menjalankan diplomasi ekonomi. Kendala dan tantangan tersebut yakni:

01

Hambatan Perdagangan dan Regulasi

Dinamika global pada tahun 2023 menyebabkan berbagai negara berupaya melindungi kondisi ekonomi domestiknya, salah satunya melalui kebijakan dagang proteksionis. Kecenderungan pendekatan proteksionisme menimbulkan hambatan bagi pelaku usaha Indonesia dalam menembus pasar ekspor. Penerapan kebijakan hambatan non-tarif seperti standarisasi produk impor kerap menyulitkan para pelaku usaha Indonesia untuk dapat memenuhi syarat kualitas, prosedur, dan administrasi dari negara importir, sehingga berdampak pada penurunan minat para pelaku usaha untuk menjajaki komitmen perdagangan dengan negara mitra tertentu.

02

Skema Pembiayaan yang Belum Optimal

Beberapa kendala yang dihadapi oleh pemangku kepentingan dalam negeri antara lain terkait skema pembiayaan yang belum dapat mengakomodir kebutuhan pelaku usaha. Tanpa adanya akses pembiayaan luar negeri yang jelas, para pelaku usaha dalam negeri akan mengalami keterbatasan modal untuk dapat menembus pasar ekspor sehingga tidak dapat bersaing dengan produk pesaing yang mendapatkan akses pembiayaan. Beberapa kendala dalam pembiayaan yakni:

a. Belum tersedianya skema pembiayaan ekspor/impor yang mumpuni bagi para pelaku usaha kedua negara.

b. Belum efektifnya penggunaan mekanisme *local currency settlement* (LCS) oleh pelaku impor dan ekspor di kawasan.

c. Belum terbentuknya kerja sama yang komprehensif antara perbankan nasional dengan perbankan negara lain.

03

Keterbatasan Konektivitas

Biaya logistik yang tinggi dapat menghambat daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Masih tingginya biaya logistik berimbas pada tingginya harga barang dan komoditas yang diperjualbelikan. Kurangnya jaringan konektivitas langsung akibat letak geografis yang cukup jauh antara Indonesia dengan negara mitra potensial, khususnya di negara non-tradisional, menjadi faktor utama penyebab *extra cost* baik dari segi waktu, logistik, maupun administratif.

04

Rendahnya Pemahaman Pemangku Kepentingan Dalam Negeri dan *Exposure* Luar Negeri

Masih rendahnya pemahaman para pelaku usaha dalam negeri terkait isu ekspor/impor dan investasi menyebabkan *loss opportunity* dalam menggaet potensi dagang dan investasi. Informasi yang lengkap dan aksesibel terkait skema pembiayaan, prosedur ekspor/impor, *market intelligence*, potensi investasi, dan ketentuan impor dari negara tujuan amat dibutuhkan oleh para pelaku usaha Indonesia dalam menjajaki pasar internasional.

Lebih lanjut, kurangnya penetrasi produk Indonesia di luar negeri mengakibatkan rendahnya *awareness* pemangku kepentingan luar negeri terhadap produk Indonesia, sehingga menyebabkan sulitnya perluasan akses pasar akibat rendahnya paparan (*exposure*) potensi ekonomi Indonesia di luar negeri.

05

Situasi Geopolitik dan Kondisi Ekonomi Global yang Tidak Menentu

Ekspor Indonesia sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi global. Jika ekonomi global mengalami perlambatan, permintaan dan harga produk komoditas ekspor Indonesia juga dapat menurun secara signifikan sehingga mempengaruhi nilai ekspor Indonesia secara keseluruhan. Perkembangan situasi geopolitik dan kebijakan ekonomi di berbagai negara telah mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi. Situasi geopolitik yang tidak stabil akibat perang dan konflik di berbagai belahan dunia menyebabkan terganggunya rantai pasok global atas berbagai komoditas khususnya pangan dan energi. Selain itu, terjadinya resesi dan masih belum pulihnya kondisi ekonomi berbagai negara juga berkontribusi pada pelemahan harga komoditas nasional sehingga secara langsung mempengaruhi penurunan nilai perdagangan Indonesia di tahun 2023.

Upaya Perbaikan

Kemenlu telah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam mengurangi dampak kendala dan tantangan yang ada sehingga IKU dapat tetap tercapai, upaya tersebut antara lain:

01

Mendorong Pembentukan Kerja Sama Komprehensif dan Transformasi Ekonomi Keberlanjutan

Pada tatanan internasional, Kemenlu mendorong disepakatinya perjanjian FTA, PTA, dan CEPA dengan negara-negara mitra potensial sebagai upaya mengantisipasi regulasi protektif serta untuk meminimalisir hambatan perdagangan. Pada level domestik Kemenlu terus mendukung program pemerintah untuk mempercepat industrialisasi pada sektor ekonomi berkelanjutan, mencakup ekonomi digital dan ekonomi hijau, yang diprediksi akan menjadi sektor yang akan terus tumbuh dan *resilient* terhadap berbagai pergolakan kondisi global. Langkah ini juga untuk mengatasi kebijakan proteksi lingkungan yang dilakukan oleh sejumlah mitra dagang Indonesia, khususnya di kawasan Amerika dan Eropa.

02

Penjajakan Kolaborasi dengan Perusahaan dan/atau Lembaga Pembiayaan Luar Negeri

Kemenlu melalui Perwakilan RI berkomitmen untuk terus mendukung upaya pengembangan bisnis nasional yakni salah satunya dengan memfasilitasi BUMN dan UMKM untuk mendapatkan pembiayaan luar negeri. Kemenlu melakukan penjajakan kerja sama dengan sektor perbankan nasional serta lembaga pembiayaan untuk menyediakan skema pendanaan kepada pelaku usaha dalam negeri melalui pemberian kredit secara *prudent* dan selektif. Kemenlu berkolaborasi dengan pihak pembiaya untuk menyaring pelaku usaha nasional yang berpotensi dapat mengakselerasi pertumbuhan ekspor nasional.

03

Kurasi Potensi Ekspor dan Penjajakan Kerja Sama dengan Agregator Ekspor

Selain mendorong kerja sama transportasi logistik dan perbankan untuk mengatasi tingginya biaya logistik, Kemenlu juga berupaya melakukan kurasi terhadap potensi pasar yang potensial namun dengan biaya logistik yang moderat. Dengan jaring masukan pelaku usaha, Kemenlu Pusat dan Perwakilan RI bersinergi untuk mendeteksi secara selektif potensi ekspor apa dan dimana saja yang menguntungkan serta tidak terkendala secara logistik bagi para pelaku usaha nasional. Penjajakan kemungkinan kerja sama dengan agregator ekspor juga dilakukan. Hal ini untuk membantu para pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, untuk memasarkan produknya ke pasar luar negeri dengan memangkas biaya logistik dan prosedur birokrasi ekspor melalui pengiriman secara kolektif oleh satu perusahaan agregator.

04

Mengintensifkan Diseminasi Informasi, Promosi, dan Temu Bisnis Perdagangan

Guna meningkatkan pemahaman kepada pengusaha nasional, Kemenlu mendiseminasikan hasil penyusunan data *economic intelligence* melalui berbagai kegiatan lokakarya dan sosialisasi yang menargetkan para pelaku usaha potensial, termasuk dari UMKM. Informasi yang disampaikan meliputi informasi terkait peluang ekspor produk Indonesia, peraturan dan regulasi, serta berbagai informasi lainnya yang kiranya perlu diketahui dalam rangka penjajakan pasar ekspor oleh pengusaha dalam negeri.

Sementara dalam rangka peningkatan *exposure* pasar domestik dan komoditas Indonesia di luar negeri, Kemenlu telah mengembangkan *digital platform* INA-ACCESS untuk pengoptimalan upaya promosi sekaligus memperluas jangkauan target pasar komoditas Indonesia ke negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa. Di samping itu, promosi potensi ekonomi Indonesia juga dilaksanakan melalui rangkaian forum bisnis, misi bisnis, dan pameran. Institusionalisasi sejumlah forum bisnis yang dicetus Indonesia juga dilakukan untuk meningkatkan momentum kerja sama pelaku usaha di Indonesia dengan pelaku usaha di negara-negara mitra dagang strategis, seperti pada IEBF dan INA-LAC BF yang ditetapkan sebagai annual flagship programs Kemenlu.

05

Diversifikasi Ekonomi

Untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional terhadap dinamika kondisi dunia, diperlukan upaya kolektif seluruh pemangku kepentingan nasional. Diversifikasi ekonomi merupakan salah satu langkah yang tengah diperjuangkan oleh Pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor sehingga tidak rentan terhadap pergolakan situasi geopolitik dan ekonomi global.

Diversifikasi ekonomi merupakan langkah strategis negara dalam menciptakan ketahanan ekonomi jangka panjang dengan membangun fondasi ekonomi yang lebih stabil, beragam, dan tangguh. Apabila terdapat gangguan dalam pasokan global, negara tidak akan terpengaruh secara signifikan karena telah memiliki sumber pendapatan lain yang tidak terdampak. Kemenlu dalam hal ini terus mendorong upaya diversifikasi dengan fokus pada hilirisasi industri nasional dan peningkatan investasi pada sektor-sektor strategis yang resilien terhadap perubahan serta disrupsi globa seperti industri digital, industri kreatif, dan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

> Institusionalisasi sejumlah forum bisnis yang dicetus Indonesia juga dilakukan untuk meningkatkan momentum kerja sama pelaku usaha di Indonesia dengan pelaku usaha di negara-negara mitra dagang strategis

Analisis Program Pendukung Capaian

Sejumlah program strategis telah dilaksanakan oleh Kemenlu sepanjang tahun 2023 untuk mendukung pelaksanaan diplomasi ekonomi khususnya dalam menjaring komitmen perdagangan. Dalam rangka merealisasikan IKU tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan, berikut beberapa program strategis yang telah dilaksanakan oleh Kemenlu pada tahun 2023:

01 Fasilitasi Pengusaha dan Partisipasi Aktif pada Kegiatan Forum Dagang oleh Perwakilan RI

Sebagai ujung tombak diplomasi, Perwakilan RI berperan penting dalam pencapaian kinerja Kemenlu pada aspek diplomasi ekonomi. Salah satu fungsi utama Perwakilan RI adalah promosi dagang baik melalui berbagai kegiatan pameran dan forum bisnis yang diselenggarakan oleh Perwakilan RI maupun partisipasi aktif pada *trade expo* di kawasan, terutama untuk pasar non-tradisional. Beberapa kegiatan pameran dan forum bisnis dimaksud antara lain:

1. Partisipasi Perwakilan kawasan Asia Pasifik dan Afrika pada kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-38 yang menghasilkan komitmen kurang lebih senilai USD6,375,000,000.00 meliputi komoditas batu bara dan tembaga.
2. Promosi Indonesia pada forum bisnis dan pameran International Meeting of Businessman Network EmprendeXco, 22-24 Maret 2023 di Barranquilla, Kolombia.
3. Partisipasi Perwakilan RI dalam Coffee Summit 2023 di Istanbul, tanggal 16-17 September 2023, yang menghasilkan a.l. rencana pembelian 1 Kontainer Kopi dari Marmara dan Tanamera kepada Sivas Coffee, Numerice Coffee, dan Cihan Kurt Turki.
4. Partisipasi Pavilion Indonesia dan 9 *exhibitor* lainnya dari Indonesia pada Pameran Natural Product Expo West, Maret 2023 di Anaheim Convention Center. Kegiatan tersebut berhasil mengumpulkan potensi transaksi sebesar USD44,85 juta.

02 Memfasilitasi Kunjungan Resmi Presiden RI ke Washington DC, Amerika Serikat

13 November 2023

Pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Joe Biden di White House, Washington DC, telah terlaksana pada 13 November 2023. Indonesia adalah satu-satunya negara yang diundang AS untuk melakukan kunjungan bilateral di Washington DC, menjelang KTT APEC di San Francisco.

Beberapa hasil penting pertemuan, antara lain Indonesia dan AS sepakat untuk meningkatkan status hubungan bilateral dari *strategic partnership* menjadi *Comprehensive Strategic Partnership* (CSP); implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP); dan mengenai pentingnya penguatan kerja sama mineral kritis.

Dari kunjungan ini, telah disepakati 6 dokumen kerjasama *G-to-G* termasuk Kesepakatan Pembentukan CSP, Kerja sama Kesehatan, ESDM, Maritim dan Kebudayaan. Dari sisi bisnis, telah disepakati kerja sama bisnis senilai USD25,85 miliar, antara lain Investasi Pembangunan *carbon capture storage* dan Kilang Petrokimia, Pengolahan Nikel Baterai EV dan Pembangunan Modul dan Panel Surya.

03 Menyelenggarakan INA-LAC BF

Jakarta,16-8 Oktober 2023

Kemenlu telah menyelenggarakan INA-LAC BF 2023 di Jakarta, Indonesia pada 16-17 Oktober 2023. Sebagaimana telah diketahui, INA-LAC telah menjadi *flagship* program Kemenlu yang bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi dalam sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi dengan negara-negara mitra di kawasan Amerika Selatan, Tengah, dan Karibia.

INA-LAC 2023 mengusung tema Forging An Effective Partnership dan terdiri dari *opening ceremony*, *business meeting*, *matching*, dan *pitching*; 2nd Assembly of the INA-LAC Business Network; *press briefing*; dan diskusi panel. Kegiatan dibuka oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri KADIN, dan Sekretaris Pertanian dan Pengembangan Pedesaan Meksiko.

Diskusi panel mengangkat 2 (dua) topik yaitu Fostering Food Security and Long-Term Sustainability dan Post-Pandemic Logistic Solutions. INA-LAC 2023 berhasil mencapai kesepakatan bisnis sebesar USD407,345,737.95 (potensi sebesar USD388,594,300.00 dan transaksi konkret sebesar USD18,751,437.95 di sektor otomotif dan suku cadang, minyak kelapa sawit dan turunannya, briket arang, makanan dan minuman, mebel dan dekorasi rumah, bahan konstruksi, kesehatan, farmasi, busana, dan kecantikan.

Di samping itu, berhasil ditandatangani 9 (sembilan) kesepakatan kerja sama dan pengumuman 1 (satu) kesepakatan kerja sama.

04 Menyelenggarakan The 14th Indonesian Trade and Tourism Promotion (ITTP)

Phnom Penh,
4-6 Agustus 2023

Kegiatan dihadiri oleh 19 peserta pameran dari Indonesia dan 25 peserta dari distributor dan importir produk-produk Indonesia serta para pemilik usaha kuliner Indonesia di Kamboja. ITTP ke-14 ini menghasilkan beberapa komitmen perdagangan seperti:

1. Kesepakatan dagang ekspor minyak goreng kelapa sawit dan mengimpor beras premium antara PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dengan Ung Kheang Group
2. Kesepakatan Kerja Sama Antara PT. Wahyu Bunga Nuswantara dengan TrueHome Co.Ltd. Untuk pengiriman produk *furniture* Indonesia untuk digunakan dalam proyek pembangunan hotel dan resort di Kamboja
3. Kesepakatan Kerja Sama Distribusi 10 produk herbal Kimia Farma di Kamboja antara PT. Kimia Farma dengan K-1000 Trading, Co. Ltd.

Melalui program-program pendukung capaian yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023, Kemenlu berhasil memfasilitasi sejumlah komitmen dagang dengan valuasi yang signifikan pada berbagai sektor, antara lain sektor komoditas unggulan Indonesia, ekonomi hijau dan rantai pasok, ekonomi kreatif, serta sektor makanan dan minuman.

Komitmen Dagang yang Mendukung Komoditas Unggulan Indonesia Lainnya

01.
Komitmen dagang antara PT Trishakthi Sejahtera dan Incredible Works.

Nilai komitmen
USD 2,92 Miliar

Batu bara Indonesia merupakan produk komoditas ekspor unggulan Indonesia yang krusial bagi aktivitas perekonomian global, karena merupakan salah satu sumber energi utama pembangkit listrik di berbagai negara.

02.
Komitmen dagang produk *Refined, Bleached, Deodorized* (RBD) palm oil antara APICAL Group dengan United Oils Processing and Packaging.

Nilai komitmen
USD 165 Juta

Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya merupakan salah satu komoditas ekspor terpenting Indonesia karena merupakan bahan baku vital pada berbagai olahan pangan dan kebutuhan industri dunia.

Komitmen Dagang Ekonomi Hijau dan Rantai Pasok

01.
Komitmen dagang antara PT Jawa Lumbung Mas dengan Bio Advance berupa limbah cair kelapa sawit.

Nilai komitmen
USD 60 Juta

02.
Komitmen dagang antara PT Jawa Lumbung Mas dengan Resiway berupa limbah cair kelapa sawit.

Nilai komitmen
USD 4 Juta

Selain sebagai bahan baku pangan dan industri, CPO juga bermanfaat sebagai bahan bakar terbarukan. Indonesia memproduksi limbah cair/ *Palm Oil Mill Effluent* (POME) menjadi Biodiesel untuk diekspor sebagai alternatif yang lebih hijau dibandingkan bahan bakar fosil.

Komitmen Dagang yang Mendukung Sektor Ekonomi Kreatif

01.
Komitmen dagang ekonomi kreatif dari 11 pengembang *game* Indonesia.

Nilai komitmen
USD 115 Juta

Industri dan ekosistem permainan (*game*) lokal memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam ekonomi kreatif Tanah Air. Majunya industri *game* lokal dapat mendukung upaya diplomasi publik dan *national branding* Indonesia.

02.
Kesepakatan dagang dalam bidang *Meeting Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) dari 15 *co-exhibitors*.

Nilai komitmen
USD 747 Ribu

Industri MICE dapat menggeliatkan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia, sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Komitmen Dagang yang Mendukung Sektor Makanan dan Minuman

01.
MoU transaksi dagang untuk produk *dried beans* antara Koas Food B.V dan PT Bafain Haridra Indonesia.

Nilai komitmen ekspor
USD 30 Juta

02.
MoU kesepakatan dagang untuk produk Teh Kotak antara Grand Eastern Group dengan PT Ultrajaya Milk Industry.

Nilai komitmen ekspor
USD 15 Juta

03.
MoU kerja sama untuk penyediaan bahan baku rendang antara Bella Group Bulgaria dengan PT Garuda Mitra Unggul.

Nilai komitmen ekspor
USD 34 Juta

Subsektor industri makanan dan minuman (mamin) merupakan kontributor terbesar pada sektor inudustri manufaktur dengan total kontribusi sebesar 6,59% meningkat 3,28% secara tahunan (yoy).

Industri makanan dan minuman (mamin) Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi untuk menjadi pemain kunci dalam rantai suplai global. Mamin bukan hanya dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat, namun juga dapat mengakselerasi gaya hidup masyarakat dengan mobilitas yang semakin tinggi.

Proyeksi Ke Depan

Harga komoditas dunia diprediksi akan mulai melandai pada tahun 2024 karena pulihnya rantai pasok komoditas global dan kuatnya produksi dari industri sektor terkait, dimulai dari penurunan harga komoditas sektor energi seperti minyak sawit, batu bara, minyak mentah, dan mineral krusial. Namun demikian, rantai pasok komoditas sektor pangan masih tidak dapat diprediksi. Beberapa faktor seperti instabilitas dalam hubungan internasional, maraknya restriksi perdagangan, dan cuaca ekstrim akibat perubahan iklim masih terus membayangi kondisi ketahanan pangan global yang akan secara langsung berdampak pada harga komoditas dunia.

Walau diproyeksikan masih akan menantang, prospek sektor perdagangan pada tahun 2024 tergolong cenderung membaik dibandingkan tahun 2023. Kemenlu akan memaksimalkan upaya diplomasi untuk dapat berkontribusi menjaga pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global, antara lain melalui upaya sebagai berikut:

01. Perluasan Akses Pasar

Kemenlu antara lain akan terus mendukung perluasan pasar melalui percepatan penyelesaian perundingan bilateral dan perundingan kerja sama ekonomi kawasan. Hal ini untuk menjangkau *untapped market* yang lebih luas dan mendukung penetrasi produk Indonesia ke pasar yang potensial. Kerja sama yang akan ditindaklanjuti mencakup:

a. Menyiapkan penandatanganan Protokol Perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

b. Mempercepat implementasi proyek Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA).

c. Finalisasi Perundingan bilateral CEPA antara Indonesia-Kanada dan Indonesia-Turkiye.

d. Perundingan bilateral PTA dengan Bangladesh, Djibouti, Fiji, Iran, dan Mauritius.

e. Mendorong keberlanjutan perundingan pembentukan dan/atau percepatan penyelesaian perundingan perjanjian ekonomi dengan Chile, Peru, EAEU, MERCOSUR, dan UE.

02. Penyelenggaraan Forum dan Misi Bisnis

Penyelenggaraan forum dan misi bisnis juga akan terus diselenggarakan. Kemenlu akan berkolaborasi bersama K/L terkait, media massa, bank, dan *think tanks* untuk meningkatkan pertemuan langsung antara para pelaku bisnis nasional dengan negara mitra. Salah satu contoh forum dan misi bisnis yang akan dilaksanakan yakni:

a. **Indonesia Contigo (Indonesia With You) Roadshow Industri Indonesia**
Amerika Tengah, Oktober 2024

Pelaksanaan Contigo Roadshow dimaksudkan menindaklanjuti pelaksanaan INA-LAC tahun 2023. Kegiatan Indonesia Contigo akan dilaksanakan dalam bentuk *roadshow* (misi bisnis) perusahaan-perusahaan Indonesia dari satu industri ke beberapa negara di kawasan Amerika Tengah yang potensial untuk digarap lebih lanjut. Dalam misi bisnis ini, perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi akan difasilitasi untuk melakukan *one-on-one business meeting* dengan mitra-mitra potensial yang telah diidentifikasi oleh Perwakilan RI di kawasan Amerika Tengah.

b. **INA-LAC BF, September/Oktober 2024**
Peru, November 2024

INA-LAC BF kembali diadakan untuk yang ke-6 kalinya sejak 2019 dan pertama kali diselenggarakan di luar negeri yaitu di Lima, Peru, *back-to-back* dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2024 dan APEC CEO Summit. Untuk tahun 2024, INA-LAC tidak hanya menjadi wadah untuk melakukan promosi ekonomi dan perdagangan, namun juga memfasilitasi promosi budaya dan kuliner Indonesia serta penguatan p*eople-to-people contact* melalui forum dialog masyarakat madani.

03. Partisipasi Aktif pada berbagai Forum dan Pameran Dagang

Selain menyelenggarakan, keterlibatan aktif Indonesia pada berbagai forum dan pameran dagang juga akan terus didorong, antara lain dengan memfasilitasi keikutsertaan wakil Indonesia dalam promosi perdagangan di RRT-ASEAN Expo, Hannover Messe, dan *trade expo l*ainnya.

Dokumentasi Program Pendukung Capaian IKU S1.1 : Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan

Gambar III.1
Trade Expo Indonesia ke-38
(Tangerang Selatan, 18-22 Oktober 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.2
Kunjungan Resmi Presiden RI ke Amerika Serikat
(Washington DC, 13 November 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.3
INA-LAC Business Forum
(Jakarta, 16-17 Oktober 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.4
The 14th Indonesia Trade & Tourism Promotion
(Phnom Penh, 4 Agustus 2023)
Sumber: Kemenlu

Analisis IKU S1.2

Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi

Deskripsi IKU

Bersamaan dengan menguatnya perekonomian nasional, arus investasi ke Indonesia juga turut meningkat. Sektor investasi yang sebelumnya pernah lesu akibat pandemi telah kembali pulih dan menunjukan pertumbuhan yang positif sepanjang tahun 2023. Meningkatnya arus modal asing ke dalam negeri merupakan hasil upaya kolektif Pemerintah dalam menciptakan peluang yang menarik bagi investor. Selain berbagai kebijakan domestik yang mendukung lingkungan investasi yang kondusif, Pemerintah melalui Kemenlu juga melaksanakan sejumlah program promosi dan fasilitasi untuk menjaring investor potensial dari luar negeri.

Kemenlu mengedepankan pelaksanaan diplomasi ekonomi untuk menarik investasi *in-bound* hingga ke daerah, sehingga dapat berkontribusi bukan hanya pada perekonomian secara makro, namun juga pada kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan kebijakan luar negeri dalam menarik investasi *in-bound* menjadi tolok ukur Kemenlu dalam mengukur kinerja diplomasi ekonomi di sektor investasi.

IKU S1.2 secara spesifik mengukur value dengan satuan persentase yang diperoleh Indonesia dari upaya diplomasi ekonomi untuk investasi. Target dan realisasi pada level Kemenlu adalah agregat dari target dan realisasi Satker Regional, sementara target dan realisasi pada Satker Regional merupakan agregat dari target dan realisasi Perwakilan RI yang dinaungi Satker Regional.

> Meningkatnya arus modal asing ke dalam negeri merupakan hasil upaya kolektif Pemerintah dalam menciptakan peluang yang menarik bagi investor

IKU ini memiliki 2 SUB IKU, yakni:

SUB IKU 1

Jumlah Komitmen Investasi

Bobot 70%

SUB IKU ini mengukur jumlah komitmen tertulis antara Indonesia dengan negara mitra yang memuat nilai investasi *in-bound*. Komitmen diperoleh dari kegiatan diplomasi ekonomi yang menyangkut investasi, seperti *business matching*, pembukaan pasar potensial dan unggulan, promosi investasi, dan forum kerja sama. Jumlah komitmen investasi dihitung dari perolehan komitmen baru yang difasilitasi oleh Kemenlu. dari Januari-Desember tahun berjalan.

SUB IKU 1 mendapatkan alokasi bobot 70% karena pelaksanaan promosi dan fasilitasi proses pembentukan komitmen investasi merupakan bagian dari tugas dalam diplomasi yang dilaksanakan Kemenlu sehingga tingkat kendali Kemenlu terhadap SUB IKU 1 cukup tinggi.

SUB IKU 2

Nilai Investasi dengan Negara Mitra

Bobot 30%

SUB IKU ini mengukur nilai investasi in-bound yang terealisasi (dalam mata uang USD) untuk suatu negara akreditasi di suatu tahun. Pencapaian target IKU ini membutuhkan kolaborasi yang kuat dan intensif antara Perwakilan RI dengan entitas yang bernaung dalam *Indonesia Incorporated* (ITPC, IIPC) di negara tersebut. Realisasi SUB IKU 2 adalah perolehan nilai investasi dari Januari-September tahun berjalan.

Sub IKU 2 mendapatkan alokasi bobot 30% karena capaian SUB IKU dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenlu namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak (K/L terkait, dunia usaha, dll).

Perhitungan realisasi dan capaian IKU S1.2 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU} = (70\% \times \text{Capaian Sub IKU 1}) + (30\% \times \text{Capaian Sub IKU 2})$$

Informasi Kinerja

Tabel III.18
Capaian IKU S1.2 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi

Sumber: AKSI Kemenlu

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Nilai Realisasi SUB IKU	Nilai Bobot
Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi	Capaian SUB IKU 1 Jumlah komitmen investasi (70%)	**123,38%**	**86,37%**
	Capaian SUB IKU 2 Nilai investasi dengan negara mitra (30%)	**108,75%**	**32,62%**

Target	Realisasi	Capaian	Batas Toleransi
94,40%	118,99%	126,05%	120%

Pada tahun 2023, realisasi IKU S1.2 Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi adalah sebesar 118,99% dari target sebesar 94,40%, sehingga capaian IKU sebesar 126,05% dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Realisasi IKU S1.2 diperoleh dari penjumlahan bobot atas capaian SUB IKU 1 dan SUB IKU 2. Pada tahun 2023, realisasi SUB IKU 1 Jumlah komitmen investasi adalah sebesar 190 dari target sebesar 154, sehingga capaian SUB IKU 1 sebesar 123,38% dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Realisasi SUB IKU 2 Nilai investasi adalah sebesar USD36,940,989,200.00 dari target sebesar USD33,967,340,279.00, sehingga capaian SUB IKU 2 sebesar 108,75%.

Perolehan komitmen investasi didominasi oleh sektor Infrastruktur Hijau dan Rantai Pasok dengan 108 komitmen dari total 190 komitmen yang berhasil disepakati dengan negara akreditasi.

> Perolehan komitmen investasi didominasi oleh sektor Infrastruktur Hijau dan Rantai Pasok

Kontribusi Kawasan Terhadap Pencapaian Target Jumlah Komitmen Investasi Indonesia dengan Negara Mitra Periode Januari-Desember 2023

Top 3

	01	02	03
negara mitra dengan jumlah komitmen terbanyak	Singapura 24 komitmen	RRT 14 komitmen	Australia 7 komitmen
negara mitra dengan valuasi komitmen terbanyak	UAE USD27.5 M	Kuwait USD1 M	RRT USD300 Juta

Top 3

	01	02	03
negara mitra dengan jumlah komitmen terbanyak	Jerman 23 komitmen	Amerika Serikat 14 komitmen	Inggris 8 komitmen
negara mitra dengan valuasi komitmen terbanyak	Amerika Serikat USD25.9 M	Belgia USD3.7 M	Jerman USD2.5 M

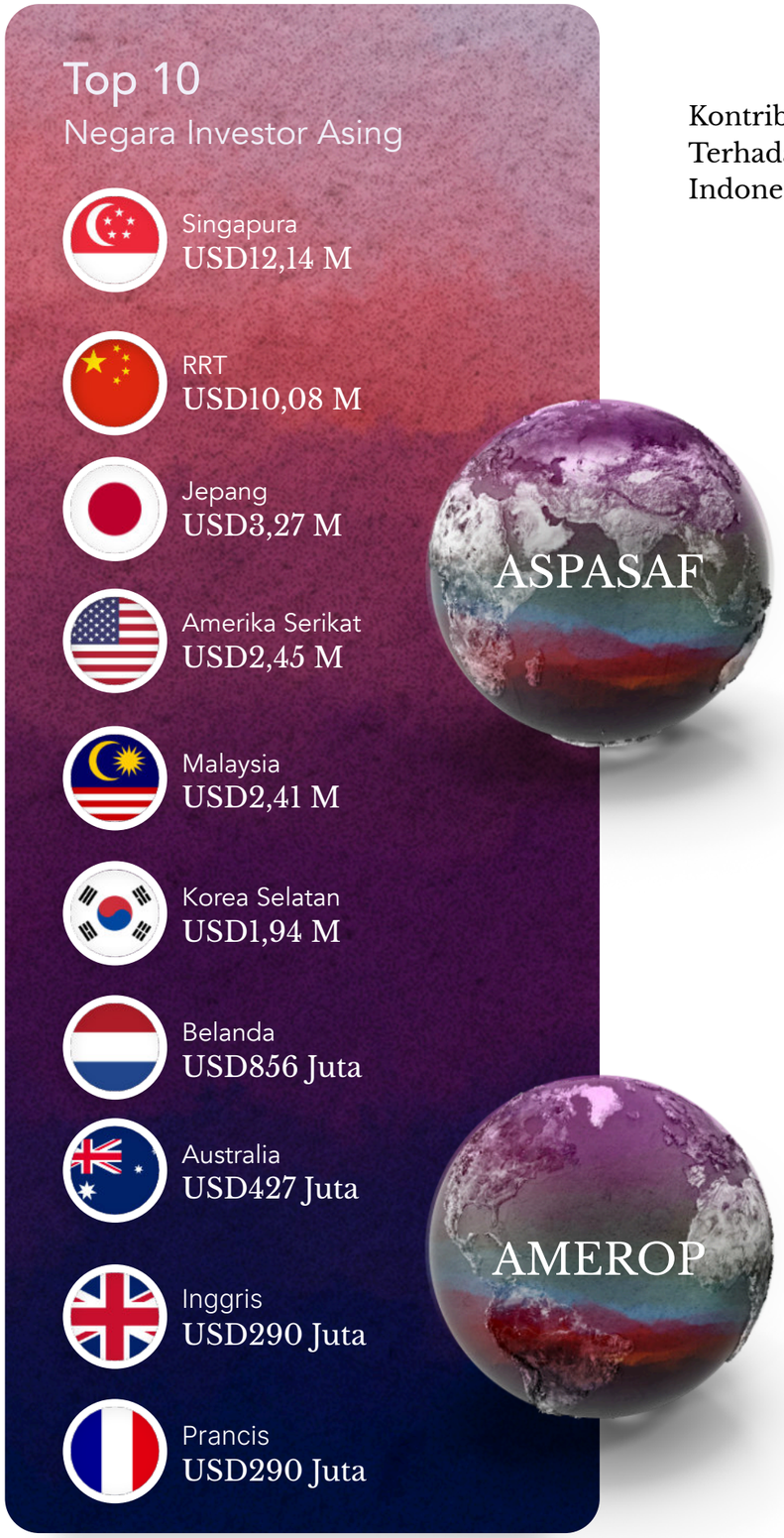

Kontribusi Kawasan Terhadap Nilai Investasi Indonesia Tahun 2023

Asia Timur
USD16,19 M

Asia Tenggara
USD14,72 M

Pasifik & Oseania
USD475 Juta

Afrika
USD447 Juta

Asia Selatan & Tengah
USD298 Juta

Timur Tengah
USD96 Juta

Amerika Utara & Tengah
USD2,65 M

Eropa Barat & Selatan
USD1,76 M

Eropa Utara, Tengah & Timur
USD399 Juta

Amerika Selatan dan Karibia
USD15 Juta

Perbandingan Kinerja

Tabel III.19
Target, Realisasi, dan Capaian IKU Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi

Kode IKU/ SUB IKU		2022	2023	
S1.2	Target	93,34%	**94,40%**	↑
	Realisasi	131,14%	**118,99%**	↓
	Capaian	140,50%	**126,05%**	↓
SUB IKU 1	Target	118	**154**	↑
	Realisasi	147	**190**	↑
	Capaian	124,58%	**123,38%**	↓
SUB IKU 2	Target	USD21,901,021,629.00	**USD33,967,340,279.00**	↑
	Realisasi	USD32,067,331,100.00	**USD36,940,989,200.00**	↑
	Capaian	146,42%	**108,75%**	↓

IKU S1.2 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi baru diadopsi pada tahun 2022 setelah dilakukan penajaman formulasi dan perubahan nomenklatur untuk mengukur capaian diplomasi ekonomi secara lebih optimal. Dengan demikian, capaian IKU di tahun 2023 hanya dapat dibandingkan dengan capaian IKU di tahun 2022.

Target IKU tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 94,40% dari yang sebelumnya 93,34% pada tahun 2022. Target tahun 2023 ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan realisasi dan capaian IKU Tahun 2022 yang melampaui target, serta mempertimbangkan membaiknya iklim investasi nasional pasca pandemi.

Peningkatan target IKU pada tahun 2023 merupakan upaya Kemenlu untuk memacu performa kinerja diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan penetapan target yang menantang namun tetap *achievable*.

Walaupun target IKU tetap tercapai, terpantau realisasi IKU tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 118,99% yang sebelumnya 131,14% pada tahun 2022. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh kenaikan angka target SUB IKU yang cukup signifikan dibanding tahun lalu sehingga disparitas perhitungan antara target dengan realisasinya menurun. Namun secara keseluruhan, realisasi kedua SUB IKU pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022.

Target SUB IKU 1 mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 154 dari 118 pada tahun 2022. Peningkatan didasari oleh realisasi dan capaian tahun 2022 yang jauh lebih tinggi dari target pada tahun tersebut, sehingga angka target yang ditetapkan pada tahun 2023 dinaikkan untuk memacu performa kinerja menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan target juga berdasarkan hasil pemetaan potensi komitmen investasi *in-bound* yang diproyeksikan meningkat pada tahun 2023, seiring dengan membaiknya daya saing Indonesia sebagai destinasi investasi.

Realisasi SUB IKU 1 juga mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 190 dari 147 pada tahun 2022. Selain karena kondisi perekonomian yang membaik dan meningkatnya daya saing investasi Indonesia, tingginya angka komitmen investasi yang berhasil diraih pada tahun 2023 juga dikarenakan intensnya kegiatan diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Kemenlu pasca pandemi. Peningkatan kegiatan diplomasi seperti pameran, *business matching*, promosi investasi, dan forum kerja sama dilaksanakan secara sinergis dengan program pemerintah lainnya sehingga menciptakan peluang bisnis yang atraktif bagi investor. Selain itu, banyak terselenggaranya berbagai kunjungan pejabat tinggi dan *event* internasional yang terselenggara pada tahun 2023 telah mendorong peningkatan jumlah komitmen investasi yang disepakati.

Pada tahun 2023, target SUB IKU 2 mengalami peningkatan target menjadi USD33,967,340,279.00 dari USD21,901,021,629.00 pada tahun 2022. Keputusan untuk meningkatkan target mempertimbangkan realisasi nilai investasi di tahun 2022 yang tercatat jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan dan mempertimbangkan proyeksi *in-bound* investment yang positif.

Realisasi SUB IKU 2 juga mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi USD36,940,989,200.00 dari USD32,067,331,100.00 pada tahun 2022. Peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia sepanjang tahun 2023 utamanya disebabkan oleh kinerja perekonomian domestik yang terus terjaga baik, walaupun di tengah ketidakpastian dan fragmentasi global. Dalam hal ini, Kemenlu turut berkontribusi menjaga pertumbuhan perekonomian nasional yakni dengan menjaring lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Selain itu, efisiensi pengelolaan urusan pemerintahan seperti kebijakan pajak, ketenagakerjaan, dan pembangunan infrastruktur juga turut mendukung kepercayaan investor luar negeri terhadap potensi investasi Indonesia.

> Tingginya angka komitmen investasi yang berhasil diraih pada tahun 2023 juga dikarenakan intensnya kegiatan diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Kemenlu pasca pandemi

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Selain karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya tarik investasi Indonesia, capaian menunjukkan bahwa pelaksanaan diplomasi ekonomi oleh Kemenlu juga telah efektif menarik investasi asing ke Indonesia. Meningkatnya arus investasi pada tahun 2023 telah memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi yakni dengan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan negara, dan mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Capaian diplomasi ekonomi di sektor investasi juga berkontribusi bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi nasional, namun juga dalam menjaga stabilitas dengan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang inklusif di kawasan.

Keberhasilan Kemenlu dalam mencapai target tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi utamanya disokong oleh realisasi jumlah komitmen investasi *in-bound* yang tinggi, dengan valuasi komitmen yang berhasil diidentifikasi mencapai USD60,728,032,000.00 dari 190 komitmen yang berhasil disepakati. Perangkat diplomasi Indonesia berperan penting dalam menjaring peluang investasi luar negeri, khususnya di sektor-sektor strategis yang menjadi fokus pembangunan nasional. Kemenlu baik Pusat dan Perwakilan RI telah dan terus melaksanakan promosi investasi dan memberikan fasilitasi terhadap calon investor potensial sejak tahap penjajakan, kesepakatan, hingga tindak lanjut di dalam negeri. Sejumlah komitmen investasi dengan valuasi tinggi yang berhasil diraih melalui dukungan fasilitasi Kemenlu yakni:

1. LoI Pembangunan Energi Tenaga Surya di IKN antara OIKN dan Masdar dari UEA senilai USD27,5 miliar.

2. MoU Investasi Pembangunan *Petrochemical Plant* antara Pemerintah Indonesia dan EssonMobil Major Growth Ventures senilai USD13 miliar.

Tingginya angka komitmen yang berhasil diraih tidak terlepas dari strategi diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh Kemenlu sepanjang tahun 2023. Kemenlu fokus menjaring potensi investasi pada proyek prioritas nasional guna mendorong *trickle down effect* pertumbuhan ekonomi dari Pusat ke daerah, sehingga manfaat investasi dapat dirasakan oleh seluruh level masyarakat. Strategi diplomasi yang dijalankan oleh Kemenlu dalam mendukung hal tersebut yakni melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan promosi investasi secara kolaboratif dan penjaringan komitmen investasi pada sektor prioritas.

01

Penyelenggaraan Promosi Investasi secara Kolaboratif

Kegiatan promosi investasi diselenggarakan secara terpadu dan kolaboratif guna meningkatkan familiarisasi antara pelaku usaha internasional dan domestik sekaligus membuka potensi penjajakan investasi yang lebih luas dengan negara mitra. Sebagai contoh, kegiatan forum bisnis dan pameran investasi oleh Kemenlu biasanya diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan promosi dagang, mengingat sektor perdagangan dan investasi merupakan sektor yang saling berkaitan dan kerap melibatkan pihak yang sama. Salah satu forum bisnis yang telah diselenggarakan oleh Kemenlu mengkolaborasikan promosi investasi dan dagang yakni IEBF dan INA-LAC BF pada tahun 2023. Adanya forum bilateral rutin antar kepala negara/pemerintahan juga dimanfaatkan sebagai momentum dalam mempromosikan potensi investasi Indonesia, khususnya di proyek - proyek prioritas nasional.

Sinergi juga dilaksanakan melalui media digital untuk menjembatani para investor dengan pelaku usaha nasional. Promosi investasi melalui *platform* berbasis *online*, seperti INA-ACCESS, memudahkan diseminasi informasi dengan para calon investor tanpa perlu melakukan pertemuan langsung.

02

Penjaringan Komitmen Investasi pada Sektor Prioritas

Peningkatan upaya menarik investor juga dilakukan dengan memprioritaskan investasi pada sektor *targeted* pendukung transformasi ekonomi sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Sektor *targeted* dimaksud antara lain mencakup industri manufaktur, infrastruktur, pangan dan pertanian, serta energi terbarukan. Kemenlu telah dan terus berupaya menjembatani penjajakan kerja sama investasi proyek strategis serta mendukung *financial closing* melalui fasilitasi di level Pusat maupun Perwakilan RI. Sama dengan sektor perdagangan, dukungan fasilitasi dilakukan oleh perangkat diplomatik baik di Pusat maupun Perwakilan RI, dimana pada level Pusat dilakukan utamanya oleh direktorat fungsi bilateral dan TPPE. Selain memfasilitasi investor potensial, Kemenlu juga melakukan pemantauan atas tindak lanjut komitmen yang telah terjalin pada tahun sebelumnya dengan merujuk pada data *economic intelligence* dan arahan diversifikasi pasar utama serta pasar potensial.

Kemenlu juga menggunakan momentum keketuaan ASEAN, kunjungan pejabat tinggi negara, dan berbagai *international event* pada tahun 2023 untuk mengoptimalkan penjajakan kerja sama di sektor investasi. Sepanjang tahun 2023, Kemenlu telah memfasilitasi kunjungan tingkat Kepala Negara dan Menteri pada berbagai *event*, dimana pada kunjungan dan pertemuan tersebut telah berhasil menghasilkan sejumlah komitmen investasi strategis antara Indonesia dengan negara-negara mitra di berbagai kawasan.

> Kemenlu telah dan terus berupaya menjembatani penjajakan kerja sama investasi proyek strategis

Kendala dan Tantangan

Walaupun investasi *in-bound* pada tahun 2023 mengalami peningkatan, masih terdapat sejumlah kendala dan tantangan eksternal yang menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Kendala dan tantangan pada pelaksanaan diplomasi ekonomi di sektor investasi masih berkaitan erat dengan kendala dan tantangan yang juga dihadapi pada pelaksanaan diplomasi ekonomi di sektor perdagangan, yakni sebagai berikut:

01

Masih Rendahnya Pemahaman Investor Luar Negeri terhadap Proses Investasi di Indonesia

Ketidakpahaman investor asing terhadap aspek hukum, regulasi, dan perizinan untuk penanaman modal asing ke Indonesia kerap menghambat peluang masuknya investasi ke dalam negeri. Ketidakpahaman akan menimbulkan kekhawatiran bagi investor terkait kepastian hukum investasi di Indonesia.

Hal ini juga berisiko terhadap kepatuhan investor terhadap regulasi nasional. Ketidaktahuan investor atas ketentuan hukum yang berlaku akan meningkatkan resiko pelanggaran hukum dan pemberian sanksi, sehingga secara umum dapat mengurangi daya tarik investasi Indonesia.

02

Situasi Geopolitik dan Kondisi Ekonomi Global yang Tidak Menentu

Disrupsi akibat konflik geopolitik di negara produsen komoditas esensial dan jalur perdagangan internasional menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sentimen investor untuk menanamkan modalnya.

Walaupun situasi di Indonesia tergolong aman, dampak disrupsi di suatu kawasan tertentu dapat mempengaruhi kondisi perekonomian global seperti resesi dan inflasi, sehingga negara-negara yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi akan menerapkan kebijakan yang lebih restriktif. Hal ini membuat investor cenderung lebih konservatif dan menunggu momen yang kondusif untuk berinvestasi (*wait and see*),

03

Keragaman Kepentingan dan Kesiapan *Stakeholders* Domestik

Tingkat kesiapan dan kepentingan para pemangku kepentingan dalam negeri merupakan salah satu faktor yang menghambat implementasi komitmen investasi ke dalam negeri. Dari segi kesiapan, masih banyak regulasi nasional terkait investasi yang tumpang tindih sehingga Indonesia menjadi kurang menarik sebagai destinasi investasi dibanding negara lainnya.

Selain itu, perbedaan kepentingan juga mempengaruhi kendali Kemenlu dalam mengawal komitmen investasi. Sebagai contoh, tidak semua perusahaan mitra bersedia menyepakati/ membuka dokumen komitmen investasi pada tahap awal penjajakan sehingga menyulitkan Perwakilan RI untuk melakukan pendampingan dan pengawalan tindak lanjut komitmen.

Upaya Perbaikan

Kemenlu telah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam mengurangi dampak kendala dan tantangan yang ada sehingga IKU dapat tetap tercapai, upaya tersebut antara lain:

01

Diseminasi Informasi melalui Kegiatan Promosi Investasi

Apabila ditelaah, dua kendala pertama memiliki karakteristik yang sama, yakni adanya rasa kekhawatiran dari investor untuk berinvestasi di Indonesia sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan rasa percaya investor akan iklim investasi Indonesia yang prospektif dan kondusif. Dalam hal ini, Kemenlu fokus untuk mengoptimalkan kegiatan promosi investasi untuk mendiseminasikan informasi mengenai peluang investasi Indonesia, termasuk sosialisasi mengenai regulasi dan prosedur investasi di Indonesia.

Selain itu, Kemenlu juga memanfaatkan forum-forum bisnis untuk mengundang berbagai pemangku kepentingan domestik untuk mempromosikan mengenai potensi ekonomi dan peluang investasi yang dimiliki Indonesia, baik dengan mengundang Pemda, K/L, atau *think tank*. Keterlibatan langsung para pelaku bisnis dapat memberikan keyakinan dan persepsi positif bagi investor akan iklim investasi nasional yang kuat.

02

Peningkatan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan Nasional

Guna memitigasi ketidaksiapan pemangku kepentingan nasional, Kemenlu berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan sektor swasta untuk melaksanakan kegiatan promosi investasi dan *outreach* secara terpadu. Melalui kegiatan tersebut, para pemangku kepentingan bukan hanya mendapatkan wadah untuk mempromosikan potensi investasi lokal, namun juga diajak untuk lebih menyadari tantangan yang dihadapi oleh investor asing ke Indonesia sehingga dapat mengakselerasi pembentukan solusi secara kolektif.

Selain itu, Kemenlu juga mendorong para pemangku kepentingan untuk secara rutin melaksanakan rapat koordinasi dan dialog dengan Kemenlu Pusat serta Perwakilan RI guna menyelaraskan persepsi dan kepentingan terkait investasi.

Analisis Program Pendukung Capaian

Sejumlah program strategis telah dilaksanakan oleh Kemenlu sepanjang tahun 2023 untuk mendukung pelaksanaan diplomasi ekonomi. Dalam rangka merealisasi IKU tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi, berikut beberapa program strategis yang telah dilaksanakan oleh Kemenlu pada tahun 2023:

01

Partisipasi Indonesia sebagai *partner country* Hannover Messe 2023

Hannover, 16 April 2023

Indonesia memanfaatkan perannya sebagai *partner country* Hannover Messe 2023 untuk menyampaikan kepada dunia internasional, khususnya pelaku bisnis dan industri terkait kebijakan kemudahan investasi di Indonesia, serta mempersembahkan kemajuan teknologi terkini dan potensi investasi teknologi industri.

Pameran Hannover Messe dibuka oleh Kanselir Jerman bersama dengan Presiden RI pada tanggal 16 April 2023 dan dilanjutkan dengan pembukaan Paviliun Indonesia oleh kedua pejabat pada tanggal 17 April 2023. Paviliun Indonesia menampilkan 157 *co-exhibitor* yang berasal dari perusahaan, K/L dan instansi terkait yang telah dikurasi sesuai tema "Making Indonesia 4.0". Selama pelaksanaan Hannover Messe 2023, telah ditandatangani 25 kesepakatan *B-to-B* dengan total nilai USD2,5 miliar atau sekitar Rp37 triliun.

02

Menyelenggarakan Indonesia-Europe Business Forum (IEBF)

Jakarta, 17-18 Oktober 2023

Penyelenggaraan IEBF turut mendukung pencapaian nilai dan komitmen investasi yang tinggi. IEBF turut memfasilitasi sesi *one-on-one business matching* dengan lebih dari 60 pertemuan bisnis antar perusahaan Indonesia-Eropa, yang menghasilkan 19 komitmen bisnis dengan potensi nilai transaksi sebesar USD2,002,961,252.00, termasuk komitmen investasi perusahaan Ecoener (Spanyol) senilai USD2,000,000,000.00 di bidang energi baru terbarukan.

Selanjutnya, IEBF 2023 turut menghasilkan penandatanganan 8 (delapan) naskah MoU/LoI kerja sama antar perusahaan Indonesia-Eropa yang menghasilkan nilai transaksi sebesar USD72,368,000.00. Nilai transaksi tersebut telah menyumbang nilai perdagangan dan investasi antara Indonesia dan negara-negara di kawasan Eropa sebesar USD14,877,544,156.00 selama periode Januari-Oktober 2023 berdasarkan hasil laporan Perwakilan RI di Eropa.

Dalam IEBF, turut dilakukan kegiatan *business pitching* menghadirkan 9 (sembilan) perusahaan swasta dan BUMN Indonesia yang mempromosikan profil perusahaan masing-masing dan peluang kerja sama, yaitu: Agate (g*ame development company*), Dexa Medica, Melchor Group, Indonesia Battery Corporation (IBC), KEK Singhasari, PT Astra Otoparts Tbk, PT Gajah Tunggal, PT PLN Nusantara Power, dan Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI).

03

Penandatanganan Komitmen Investasi Pembangunan Pabrik Mobil Listrik VinFast di Indonesia

September 2023

Pada awal September 2023, Kemenlu telah memfasilitasi pertemuan antara perusahaan manufaktur EV asal Vietnam, VinFast dengan K/L terkait berkenaan dengan rencana investasi di Indonesia. Tertanggal 15 September 2023, VinFast sudah mendaftarkan entitasnya di Indonesia dan mengajukan kebutuhan lahan seluas 150 ha di Batang, Jawa Tengah. VinFast berkomitmen untuk investasi di Indonesia sebesar USD1,2 miliar dan sedang melakukan negosiasi untuk lokasi pembangunan pabrik.

Selain program/kegiatan yang secara terukur telah berkontribusi pada pencapaian diplomasi ekonomi di sektor investasi, kerangka kerja sama regional juga telah memberikan sumbangsih pada peningkatan investasi di Indonesia maupun kawasan Indo-Pasifik. Kemenlu bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait telah menyelenggarakan ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF), di Jakarta pada 5-6 September 2023. AIPF merupakan *flagship event* pada keketuaan Indonesia di ASEAN sebagai wujud implementasi konkret dari ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP). AOIP mengutamakan pendekatan dialog serta kerja sama terbuka dan inklusif di kawasan Indo-Pasifik di bidang maritim, ekonomi, konektivitas, dan pemenuhan SDGs. AIPF bertujuan sebagai *platform* yang menghubungkan sektor swasta dan publik di kawasan Indo-Pasifik guna mendorong kolaborasi serta menghasilkan proyek nyata yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan di kawasan.

AIPF menampilkan proyek unggulan di Indonesia dan di seluruh negara-negara Indo-Pasifik sebagai bagian dari promosi investasi pada tiga subtema utama yakni infrastruktur hijau dan rantai pasok, pembayaran berkelanjutan yang inovatif, serta transformasi digital inklusif dan ekonomi kreatif. AIPF telah menghasilkan 93 proyek kerja sama investasi senilai lebih dari USD38,2 miliar, dimana USD13,5 miliar diantaranya di bidang kesehatan, pengolahan mineral, dan keuangan.

Melalui program-program pendukung capaian yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023, Kemenlu berhasil memfasilitasi sejumlah komitmen investasi dengan valuasi yang signifikan pada berbagai sektor, antara lain sektor infrastruktur hijau dan rantai pasok, transformasi digital, ekonomi kreatif, serta sektor makanan dan minuman.

Komitmen Investasi yang Mendukung Infrastruktur Hijau dan Rantai Pasok

01.
MoU pra-kerja antara KITB dengan SEG Solar Inc. untuk pembangunan fasilitas manufaktur panel surya dan modul surya berkapasitas 5 Giga Watt (5 GW).

Nilai komitmen
USD 500 Juta

02.
Komitmen investasi perusahaan manufaktur kendaraan AS, Ford, untuk pengolahan nikel sebagai baterai EV di Indonesia.

Nilai komitmen
USD 4,2 Miliar

Percepatan pembangunan berkelanjutan menjadi upaya Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Salah satunya melalui transisi energi terbarukan dengan pembangunan panel surya dan pengembangan EV, yang bukan hanya menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi namun juga sebagai upaya memelihara sumber daya alam dan sistem ekologi.

Komitmen Investasi yang Mendukung Transformasi Digital

01.
Komitmen investasi antara PT Technologi Digital Nusantara (Techbros) dengan Uplink Network GmBh untuk Digital Transformation and Industry 4.0 Cooperation

Nilai komitmen
USD 1 Miliar

02.
MoU antara PT Inamas Sintesis Teknologi dan PT Panasonic Manufacturing Indonesia dengan PT Atmi IGI Center untuk pengembangan produk elektronika pertanian rumah (*home farming appliances*)

Nilai komitmen
USD 335 Ribu

Inovasi teknologi dan industri berbasis 4.0 telah menjadi isu global dan strategis bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah mengupayakan transformasi digital melalui penjaringan investasi infrastruktur digital, pengembangan *artificial intelligence* dan produksi *home farming appliances.*

Komitmen Investasi yang Mendukung Sektor Ekonomi Kreatif

01.
Kesepakatan dagang ekonomi kreatif dari 11 pengembang *game* Indonesia.

Nilai komitmen
USD 115 Juta

Industri dan ekosistem permainan (*game*) lokal memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam ekonomi kreatif Tanah Air. Majunya industri *game* lokal dapat mendukung upaya diplomasi publik dan *national branding* Indonesia.

02.
Kesepakatan dagang dalam bidang Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) dari 15 *co-exhibitors*.

Nilai komitmen
USD 747 Ribu

Industri MICE dapat menggeliatkan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia, sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Proyeksi Ke Depan

Arus Investasi luar negeri diprediksi akan semakin meningkat di tahun 2024. Hal ini menimbang tingginya investasi Penanam Modal Asing (PMA) sepanjang tahun 2023 yang mencapai porsi 50% dari total investasi yang masuk ke dalam negeri. Sepanjang tahun 2023 lima sektor yang menjadi tujuan utama investasi yakni industri logam dasar, pertambangan, transportasi dan telekomunikasi, industria kimia dan farmasi, serta perumahan dan perkantoran. Ke depan, diproyeksikan investasi di sektor-sektor tersebut akan terus berkembang seiring meningkatnya pembenahan infrastruktur, pengelolaan kebijakan, dan upaya promosi yang dilakukan Pemerintah. Namun demikian, melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat ketegangan geopolitik berpotensi mempengaruhi sentimen investor pada tahun 2024.

Investor juga akan lebih berhati-hati memasuki tahun politik Indonesia di tahun 2024 dan akan lebih memilih untuk memantau perkembangan perhelatan pemilu terlebih dahulu.

Walau diproyeksikan masih akan menantang, tren investasi PMA ke Indonesia cenderung optimis pada tahun 2024. Dalam hal ini, Kemenlu akan memaksimalkan upaya diplomasi untuk dapat berkontribusi meningkatkan investasi *in-bound* ke Indonesia utamanya pada pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi hijau, antara lain di bidang energi terbarukan, pangan, transportasi, infrastruktur, dan manufaktur. Beberapa kegiatan pada tahun 2024 yang mendukung upaya tersebut antara lain:

01. Indonesia-Brazil Food Security Initiative, Brasil, Juni/Juli 2024

Inisiatif ini bertujuan untuk mempromosikan peluang investasi dalam ketahanan pangan di Indonesia, yang difasilitasi melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk kementerian, lembaga, Perwakilan RI di Brasilia-DF, ITPC di Sao Paulo, BUMN yang bergerak di bidang pangan, dan entitas swasta. Diharapkan inisiatif ini dapat menggagas para pemangku kepentingan untuk memperkuat praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan, menawarkan prospek yang menjanjikan bagi investor potensial yang ingin berkontribusi pada tujuan ketahanan pangan Indonesia.

02. Energy Transition Investment in Indonesia's Future Capital, Nusantara di Sao Paulo, Brasil, Juni/Juli 2024

Dialog antara akademisi, ahli, dan *think tank* Indonesia dengan Kementerian Pertambangan dan Energi Brasil, Kementerian Lingkungan Brasil, Petrobras, CEPEA, ESALQ, dan investor potensial di Brasil. Tujuan kegiatan yaitu untuk mendukung promosi investasi dan kolaborasi dalam pengembangan IKN, khususnya dalam sektor energi terbarukan termasuk bioetanol. Diskusi akan membahas potensi pengembangan energi terbarukan di IKN dengan memperhatikan aspek *reliability, affordability,* dan *accessibility*, serta kebersihan, kelanjutan, dan efisiensi.

03. Indonesia-Europe Semiconductor for Sustainability Summit: Powering the Green Future di Jakarta dan Belgia, Maret-Mei 2024

Kegiatan meliputi pengembangan kapasitas, promosi, dan *business meeting* yang melibatkan pemerintah dan perusahaan semikonduktor serta industri terkait dari Indonesia dan Eropa. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong investasi Eropa di bidang semikonduktor dan energi/ekonomi hijau, kolaborasi produksi semikonduktor dan industri terkait dengan mitra Eropa, serta mengembangkan ekosistem semikonduktor untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun *global supply chain* dalam rangka mengakselerasi transisi energi dan dekarbonisasi di Indonesia.

Dokumentasi Program Pendukung Capaian IKU S1.2 : Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi

Gambar III.5
Presiden RI dan Kanselir Jerman secara resmi membuka Paviliun Indonesia pada pameran Hannover Messe (Hannover, 17 April 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.6
Indonesia-Europe Business Forum 2023 (Jakarta, 17-18 Oktober 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.7
Penandatanganan Komitmen Investasi Pembangunan Pabrik EV VinFast di Indonesia (Batang, 15 September 2023)

Sumber: Kemenlu

Analisis IKU S1.3

Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata

Deskripsi IKU

Pariwisata menjadi salah satu sektor fokus dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi karena dirasa mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi hingga ke level daerah dan secara langsung berkontribusi pada penerimaan devisa negara. Kemajuan sektor pariwisata suatu negara juga dapat menggambarkan kondisi keamanan dan citra yang ditampilkan negara tersebut kepada dunia, sehingga secara tidak langsung dapat menjadi modal promosi sektor ekonomi lainnya. Keberhasilan pelaksanaan diplomasi dalam mendorong tingkat kunjungan wisatawan ke Indonesia menjadi tolok ukur Kemenlu dalam mengukur kinerja diplomasi ekonomi di sektor pariwisata.

IKU S1.3 mengukur capaian diplomasi ekonomi di bidang pariwisata berdasarkan minat responden mancanegara untuk berkunjung dan berlibur ke Indonesia setelah terpapar kegiatan promosi Kemenlu. Target dan realisasi pada level Kemenlu adalah agregat dari target dan realisasi satker regional, sementara target dan realisasi pada satker regional merupakan agregat dari target dan realisasi Perwakilan RI yang dinaungi satker regional.

> Kemajuan sektor pariwisata suatu negara juga dapat menggambarkan kondisi keamanan dan citra yang ditampilkan negara tersebut kepada dunia

IKU ini memiliki 2 SUB IKU, yakni:

SUB IKU 1

Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia

Bobot 70%

Salah satu *output* diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Kemenlu adalah promosi pariwisata. IKU ini mengukur efektivitas penyelenggaraan promosi tersebut dengan mengukur seberapa tinggi minat wisatawan mancanegara potensial yang merupakan WNA yang memiliki ekspektasi untuk melakukan kunjungan wisata ke Indonesia setelah melihat/menghadiri/berpartisipasi pada promosi pariwisata dan budaya yang diselenggarakan oleh Kemenlu atau *event* promosi yang diselenggarakan pihak lain di mana Kemenlu turut menjadi peserta *event*.

SUB IKU ini mengukur wisatawan mancanegara yang memiliki ekspektasi tinggi untuk melakukan kunjungan wisata ke Indonesia. Level ekspektasi diukur dengan suatu angka antara 1-5, dimana 5 adalah level yang menunjukkan responden sangat setuju bahwa promosi Indonesia telah berhasil meningkatkan minat untuk berkunjung ke Indonesia, dan level 1 adalah level yang menunjukkan responden sangat tidak setuju bahwa promosi Indonesia meningkatkan minat untuk berkunjung ke Indonesia. Ekspektasi tinggi ditunjukkan pada level 4-5.

SUB IKU 1 mendapatkan alokasi bobot 70% karena pelaksanaan promosi pariwisata dan budaya untuk mendorong kunjungan wisatawan mancanegara merupakan bagian dari tugas dalam diplomasi yang dilaksanakan Kemenlu sehingga tingkat kendali Kemenlu terhadap SUB IKU 1 cukup tinggi.

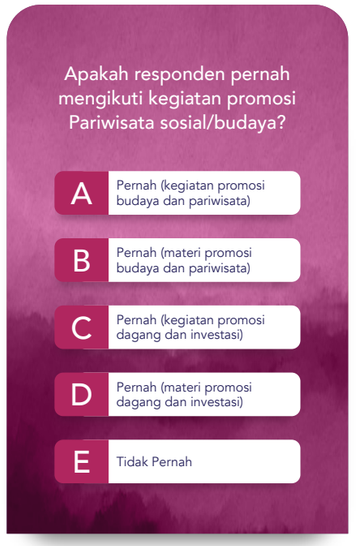

Jawaban atas pertanyaan berikut diklaim sebagai

Total responden yang mengisi survei

Jawaban atas pertanyaan berikut diklaim sebagai

Responden yang menyatakan ingin berkunjung ke Indonesia

SUB IKU 2

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia

Bobot 70%

SUB IKU 2 menunjukkan jumlah total warga dari negara asing yang mengadakan perjalanan wisata ke Indonesia.
SUB IKU 2 mendapatkan alokasi bobot 30% karena capaian sub IKU dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenlu namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak (K/L terkait, Pemda, masyarakat dll) dan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya.

Perhitungan realisasi dan capaian IKU S1.3 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU} = (70\% \times \text{Capaian Sub IKU 1}) + (30\% \times \text{Capaian Sub IKU 2})$$

Informasi Kinerja

Tabel III.20
Capaian IKU S1.3 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata

Sumber: AKSI Kemenlu

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Nilai Realisasi SUB IKU	Nilai Bobot
Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi	Capaian SUB IKU 1 Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia (70%)	**102,26%**	**71,58%**
	Capaian SUB IKU 2 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia (30%)	**109,15%**	**32,75%**

Target	Realisasi	Capaian
90,23%	104,33%	115,63%

Pada tahun 2023, realisasi IKU S1.3 Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata adalah sebesar 104,33% dari target sebesar 90,23%, sehingga capaian IKU sebesar 115,63%.

Realisasi IKU S1.3 diperoleh dari penjumlahan bobot atas capaian SUB IKU 1 dan SUB IKU 2. Pada tahun 2023, realisasi SUB IKU 1 Tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia adalah sebesar 91,18% dari target sebesar 89,17%, sehingga capaian IKU sebesar 102,26%.

Realisasi SUB IKU 2 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia adalah sebesar 9.149.616 dari target sebesar 8.382.415, sehingga capaian IKU sebesar 109,15%.

Sebaran Tingkat Potensi Kunjungan Wisatawan Mancanegara Perkawasan Tahun 2023

(Sumber: Kemenlu Data Per Jan-Des 2023)

Total Responden (T)	Responden Potensial (P)	Tingkat Potensi (TP)
8.110	7.395	91,18%

Timur Tengah
96,30%
T: 649 | P: 625

Asia Tenggara
92,59%
T: 1.741 | P: 1.612

Afrika
94,93%
T: 217 | P: 206

Asia Timur
95,49%
T: 887 | P: 847

Pasifik & Oseania
78,30%
T: 507 | P: 397

Asia Selatan & Tengah
94,70%
T: 509 | P: 482

Amerika Utara & Tengah
93,51%
T: 632 | P: 591

Eropa Barat, Tengah & selatan
84,68%
T: 953 | P: 807

Amerika Selatan & Karibia
94,56%
T: 643 | P: 608

Eropa Utara, Tengah & Timur
89,00%
T: 867 | P: 771

9 Juta

Wisman Kunjungi Indonesia

Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) dari negara akreditasi pada Januari hingga Oktober 2023 mencapai 9.149.616 kunjungan, meningkat 133,50% dibandingkan periode yang sama tahun 2022.

Negara Asal Wisman Terbanyak 2023

(Berdasarkan data BPS, 28 Januari 2023)

Kawasan Asia dan Pasifik

- Malaysia 1.497.508
- Australia 1.177.602
- Singapura 1.087.802
- RRT 631.861
- Timor Leste 600.976

Kawasan Amerika dan Eropa

- Amerika Serikat 329.111
- Inggris 285.757
- Prancis 243.774
- Jerman 230.947
- Belanda 208.429

Perbandingan Kinerja

Tabel III.21
Target, Realisasi, dan Capaian IKU Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata

Kode IKU/ SUB IKU		2022	2023	
S1.3	Target	77,88%	**90,23%**	↑
	Realisasi	147,47%	**104,33%**	↓
	Capaian	189,35%	**115,63%**	↓
SUB IKU 1	Target	75,54%	**89,17%**	↑
	Realisasi	90,74%	**91,18%**	↑
	Capaian	120,21%	**102,26%**	↓
SUB IKU 2	Target	1.784.196	**8.382.415**	↑
	Realisasi	3.766.619	**9.149.616**	↑
	Capaian	211,11%	**109,15%**	↓

IKU S1.3 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata baru diadopsi pada tahun 2022 setelah dilakukan penajaman formulasi dan perubahan nomenklatur untuk mengukur capaian diplomasi ekonomi secara lebih optimal. Dengan demikian, capaian IKU di tahun 2023 hanya dapat dibandingkan dengan capaian IKU di tahun 2022.

Target IKU tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 90,23% dari yang sebelumnya 77,88% pada tahun 2022. Target tahun 2023 ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan realisasi dan capaian IKU Tahun 2022 yang melampaui target, serta mempertimbangkan arus perjalanan internasional dan kunjungan wisatawan ke Indonesia yang telah kembali pulih pasca pandemi.

Peningkatan target IKU pada tahun 2023 merupakan upaya Kemenlu untuk memacu performa kinerja diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan penetapan target yang menantang namun tetap *achievable*.

Walaupun target IKU tetap tercapai, terpantau realisasi IKU tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 104,33% yang sebelumnya 147,47% pada tahun 2022. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh kenaikan angka target yang signifikan baik di level IKU maupun di SUB IKU 2 pada tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, target SUB IKU 1 mengalami peningkatan menjadi 89,17% pada tahun 2023 dari yang sebelumnya 75,54%. Peningkatan target tersebut didorong angka realisasi yang tinggi di tahun 2022 akibat mulai diterapkannya relaksasi restriksi mobilitas lintas batas negara pasca pandemi COVID-19. Dengan perubahan kebijakan tersebut, minat wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Indonesia diproyeksikan akan meningkat.

Terbukti pada tahun 2023, realisasi SUB IKU 1 mengalami peningkatan menjadi 91,18% dari 90,74% pada tahun 2022. Sesuai dengan proyeksi, peningkatan realisasi minat wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Indonesia disebabkan oleh pelonggaran kebijakan pembatasan perjalanan, khususnya terkait peniadaan protokol kesehatan dan penyederhanaan proses imigrasi. Selain itu, *exposure* destinasi wisata Indonesia di berbagai media juga menumbuhkan rasa minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung. Kegiatan promosi pariwisata yang semula dilakukan secara terbatas dapat kembali dilaksanakan dengan normal pada tahun 2023, sehingga upaya diplomasi untuk menjaring minat wisatawan dapat dilakukan dengan lebih optimal termasuk kampanye promosi Kemenlu melalui berbagai media.

> “Kemenlu bersama K/L terkait telah berupaya maksimal untuk menunjukan bahwa destinasi wisata Indonesia layak dan aman untuk dikunjungi

SUB IKU 2 mengalami peningkatan target menjadi 8.382.415 pada tahun 2023 dari 1.784.196 kunjungan pada tahun 2022. Target tersebut merupakan perubahan dari target awal tahun 2023 yakni 5,02 Juta kunjungan. Sama halnya dengan SUB IKU 1, peningkatan target ini utamanya karena mempertimbangkan realisasi tahun 2022 yang tinggi akibat relaksasi restriksi mobilitas lintas negara dan peningkatan jumlah penerbangan internasional ke Indonesia. Diproyeksikan, aktivitas pariwisata akan terus tumbuh seiring membaiknya kondisi ekonomi dan meningkatnya minat wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Walaupun pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan pada tahun 2023, realisasi SUB IKU 2 mengalami peningkatan menjadi 9.149.616 dari 3.766.619 kunjungan pada tahun 2022. Peningkatan realisasi disebabkan oleh tingginya minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia sehingga arus perjalanan masuk ke Indonesia tetap naik. Hal ini tidak terlepas dari pulihnya kepercayaan wisatawan pada sektor pariwisata nasional dan citra Indonesia yang baik di mata dunia. Kemenlu bersama K/L terkait telah berupaya maksimal untuk menunjukan bahwa destinasi wisata Indonesia layak dan aman untuk dikunjungi, antara lain melalui kegiatan *travel fair*, *sales mission*, *familiarization trip*, dan program kampanye melalui media sosial. Selain itu, fenomena *revenge tourism* dan tingginya *exposure* destinasi wisata Indonesia di media sosial juga turut mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Capaian pada masing-masing indikator menunjukkan bahwa pelaksanaan diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh Kemenlu Pusat dan Perwakilan RI telah berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Selain meningkatkan produktivitas di sektor-sektor terkait seperti pada industri penerbangan dan agensi travel, diplomasi ekonomi di sektor pariwisata juga secara tidak langsung telah mendukung perluasan peluang yang lebih inklusif bagi usaha wisata berbasis masyarakat di daerah. Aktivitas pariwisata dapat menjadi *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi lokal dengan menstimulasi aktivitas ekonomi dan menjaring investasi.

Keberhasilan Kemenlu dalam mencapai target tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata utamanya disokong oleh realisasi tingkat potensi kunjungan wisatawan mancanegara yang tinggi, dengan jumlah responden yang berminat untuk berkunjung ke Indonesia mencapai 7.395 dari 8.110 responden yang mengisi survei. Peningkatan jumlah responden tersebut merupakan hasil upaya Pusat dan Perwakilan RI dalam memperluas jangkauan survei kepada WNA. Metode pengumpulan data survei yang dilakukan Kemenlu mengoptimalkan teknologi digital maupun pengumpulan secara manual yang dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan promosi yang strategis dengan tingkat partisipasi WNA yang tinggi. Kemenlu memanfaatkan momen penyelenggaraan kegiatan-kegiatan promosi, khususnya di bidang sosial budaya, untuk mendistribusikan survei kepada WNA yang hadir dan berpartisipasi pada kegiatan tersebut. Pengolahan data hasil survei juga diperkuat dengan meningkatkan koordinasi antar unit pengampu dan membentuk tim kerja pengolahan data di Kemenlu guna menghasilkan analisis data yang lebih tajam dan akurat.

Tingginya minat kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2023 juga tidak terlepas dari meningkatnya citra positif Indonesia di dunia internasional yang merupakan indikasi keberhasilan kegiatan promosi Indonesia. Perangkat diplomasi Indonesia berperan penting dalam menarik minat responden mancanegara untuk berwisata ke Indonesia yakni melalui promosi yang intensif di luar negeri dan kerja sama kemitraan. Seiring dengan pulihnya iklim industri wisata dan meningkatnya arus perjalanan akibat fenomena *revenge tourism*, Kemenlu berupaya mengoptimalkan momentum dengan menjalankan berbagai program diplomasi. Strategi diplomasi ekonomi di sektor pariwisata yang dilaksanakan oleh Kemenlu antara lain yakni sinergi promosi pariwisata dengan *stakeholders* nasional, intensifikasi kampanye dan promosi pariwisata Indonesia di luar negeri, serta penguatan kerja sama kemitraan terkait turisme.

01

Sinergi Promosi Pariwisata Indonesia dengan *Stakeholders* Nasional

Dalam penyelenggaraan diplomasi ekonomi, Kemenlu senantiasa terus bersinergi dengan para pemangku kepentingan nasional agar program-program yang dijalankan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan domestik, termasuk pada sektor pariwisata. Sinergi tersebut dapat berupa pelaksanaan program kolaborasi antara Kemenlu dengan K/L terkait, seperti kolaborasi dengan Kemenparekraf dan lembaga terkait lainnya dalam penyelenggaraan *familiarization trip* (*famtrip*) bagi peserta program Friends of Indonesia (FOI).

Kegiatan *famtrip* FOI yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 merupakan salah satu upaya strategis dalam memperkuat promosi pariwisata, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia melalui fasilitasi kunjungan jurnalis, *influencer* media sosial, serta *content creator* ke lokasi wisata dan *point of interest* di Indonesia.

02

Intensifikasi Kampanye dan Promosi Pariwisata Indonesia di Luar Negeri

Perwakilan RI terus berpartisipasi aktif pada berbagai acara *travel fair* dan *expo* untuk mempromosikan destinasi wisata sekaligus peluang investasi di sektor pariwisata Indonesia.

Perwakilan RI juga menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan promosi untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke masyarakat internasional seperti penyelenggaraan festival dan konser seni budaya, resepsi diplomatik, pameran seni dan dagang, serta kampanye promosi budaya dan pariwisata melalui media sosial. Selain itu, kampanye promosi pariwisata Indonesia secara *online* juga terus digalakkan di berbagai kanal media seperti Instagram dan Youtube.

03

Penguatan Kerja Sama Turisme dengan Negara Mitra

Kemenlu juga menjajaki kerja sama kemitraan untuk mendukung pertumbuhan industri pariwisata nasional, salah satunya melalui fasilitasi kesepakatan *B-to-B* terkait pembukaan rute penerbangan langsung, kerja sama paket wisata, dan perjanjian bebas visa. Salah satu contohnya yakni keterlibatan Kemenlu dalam proses perumusan penerapan *Visa on Arrival* (VoA) bagi negara-negara potensial.

Lebih lanjut, Perwakilan RI di luar negeri juga secara aktif melakukan promosi pariwisata Indonesia berkolaborasi dengan Visit Indonesia Tourism Officer (VITO) untuk mengoptimalkan promosi produk pariwisata ke negara-negara fokus pasar wisatawan.

Kendala dan Tantangan

Walaupun dengan tingkat kunjungan wisatawan yang meningkat, masih terdapat sejumlah kendala dan tantangan eksternal yang menghambat pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, antara lain sebagai berikut:

01

Keterbatasan Jangkauan Survei kepada Responden WNA

Pengumpulan hasil survei indeks citra pada kegiatan-kegiatan promosi kerap kurang maksimal dilaksanakan. Distribusi survei kerap tidak menjangkau seluruh responden yang hadir dikarenakan isu teknis dan terkendala bahasa yang digunakan oleh survei.

02

Kurangnya Rute Penerbangan Internasional Khususnya *Direct Flight* dari Sejumlah Negara di Berbagai Kawasan

Kurangnya rute penerbangan internasional langsung ke Indonesia dapat berdampak pada minat kunjungan wisatawan mancanegara, sehingga secara langsung akan mempengaruhi industri pariwisata nasional. Tidak adanya *direct flight* akan meningkatkan waktu perjalanan dan membuat proses perjalanan lebih rumit karena harus melibatkan tempat persinggahan (transit) terlebih dahulu sebelum tiba ke Indonesia.

Hal ini tentu akan berakibat pada biaya perjalanan yang semakin tinggi, baik karena tiket pesawat maupun akomodasi sehingga wisatawan akan memilih destinasi lain yang lebih mudah diakses secara langsung.

03

Infrastruktur Pariwisata yang Belum Memadai dan Merata di Indonesia

Infrastruktur dasar penunjang pariwisata yang kurang memadai seperti jalan yang rusak, transportasi umum yang terbatas, tidak adanya listrik dan sanitasi, serta akses internet yang lambat dapat mengurangi daya tarik lokasi wisata Indonesia. Selain itu, ketimpangan fasilitas publik di berbagai kawasan wisata Indonesia juga menyebabkan sulitnya meningkatkan daya tarik destinasi wisata lainnya yang belum banyak dikenal wisatawan mancanegara.

04

Kurangnya *Exposure* Potensi Wisata Indonesia Khususnya untuk Destinasi Wisata selain Pulau Bali

Kurang terpaparnya destinasi wisata lain selain Pulau Bali dapat menyebabkan hambatan bagi pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia secara jangka panjang. Terbatasnya pilihan yang disediakan kepada wisatawan membuat Indonesia menjadi kurang menarik apabila dibandingkan negara lain yang memiliki destinasi lebih beragam.

Hal ini tentu juga akan berdampak pada ekonomi lokal di kawasan wisata tersebut, seperti kehilangan potensi investasi, tidak berkembangnya usaha lokal, dan pembangunan wilayah yang tidak merata.

Upaya Perbaikan

Kemenlu telah mengambil langkah solusi untuk tetap mendukung ketercapaian IKU dari dampak kendala dan tantangan yang ada. Dengan penerapan strategi diplomasi ekonomi, Kemenlu telah melakukan upaya perbaikan yang optimal sehingga jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia dapat tetap meningkat di tahun 2023. Upaya perbaikan dimaksud adalah sebagai berikut:

01

Memanfaatkan Survei Digital dan Pengembangan Pilihan Bahasa pada Survei

Guna meningkatkan keterjangkauan distribusi survei kepada seluruh responden, Kemenlu baik Pusat dan Perwakilan RI memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah penyebaran survei kuesioner dengan lebih efisien dan efektif. Pengisian survei secara digital bukan hanya mempermudah responden namun juga mempercepat proses pengumpulan dan pengolahan data secara *real time*.

Selain itu, Kemenlu juga terus mengembangkan pilihan bahasa asing yang digunakan pada survei sehingga dapat dipahami oleh berbagai responden yang hadir tanpa perlu terbatas pada bahasa Inggris.

02

Mendorong Kesepakatan Penunjang Konektivitas Wisatawan

Isu konektivitas kerap menjadi persoalan yang mempengaruhi minat kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Jarak yang jauh, waktu penerbangan yang cukup lama, dan harga tiket penerbangan yang mahal membuat Indonesia kalah bersaing dibanding destinasi wisata rival di kawasan. Guna mengantisipasi hal ini, Kemenlu bekerja sama dengan K/L dan BUMN mendorong terbentuknya kesepakatan *B-to-B* dengan negara potensial yang antara lain mencakup kerja sama akses penerbangan langsung ke Indonesia, kerja sama antar maskapai penerbangan (*code sharing*), dan kerja sama penerbangan *charter*.

03

Bersinergi dengan Instansi terkait dan Melaksanakan Promosi untuk Menarik Investor

Untuk mengatasi tidak memadainya infrastruktur penunjang pariwisata, Kemenlu fokus mempromosikan potensi investasi pada pengembangan infrastruktur guna meningkatkan aksesibilitas dan fasilitas di berbagai lokasi wisata prioritas. Dengan menggandeng K/L dan Pemda terkait, promosi destinasi wisata prioritas bukan hanya untuk menarik wisatawan berkunjung, namun juga investor yang berminat untuk berinvestasi pada pembangunan infrastruktur pariwisata.

04

Meningkatkan Kegiatan Promosi Destinasi Wisata Prioritas Indonesia

Promosi wisata yang lebih aktif dan terarah diperlukan untuk meningkatkan *exposure* destinasi wisata lokal. Sehubungan itu, Kemenlu melalui Perwakilan RI telah melaksanakan peningkatan promosi pariwisata melalui berbagai upaya, antara lain berpartisipasi aktif pada pameran turisme, melaksanakan rangkaian kegiatan promosi wisata termasuk *sales mission* dan kampanye media sosial, serta penyelenggaraan f*amiliarization trip* bekerja sama dengan sektor swasta dan s*ocial media influencer*.

Selain itu, Kemenlu juga melibatkan operator perjalanan wisata nasional untuk menawarkan paket promosi "*tailor made*" yang mengintegrasikan fasilitas akomodasi, transportasi, serta kegiatan wisata dalam satu paket. Dibuatnya paket wisata yang lebih akomodatif terhadap preferensi wisatawan akan meningkatkan minat wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia, termasuk ke destinasi luar Bali yang belum dikenal. Paket promo wisata tersebut disesuaikan dengan hasil riset dan pengumpulan data *market intelligence* yang aplikatif oleh Perwakilan RI guna mengetahui pergerakan tren kebutuhan wisata dari wisatawan potensial di negara terkait. Contoh: tema "Escape the Winter" untuk memanfaatkan peningkatan tren liburan masyarakat Norwegia ke negara tropis selama liburan musim dingin).

> "Paket promo wisata tersebut disesuaikan dengan hasil riset dan pengumpulan data *market intelligence* yang aplikatif oleh Perwakilan RI guna mengetahui pergerakan tren kebutuhan wisata dari wisatawan potensial di negara terkait

Analisis Program Pendukung Capaian

Sejumlah program strategis telah dilaksanakan oleh Kemenlu sepanjang tahun 2023 untuk mendukung pelaksanaan diplomasi ekonomi. Dalam rangka merealisasi IKU tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata, berikut beberapa program strategis yang telah dilaksanakan oleh Kemenlu pada tahun 2023:

01 Menyelenggarakan Road to INA-LAC BF 2023: Promosi Potensi Ekonomi, Pariwisata, dan Produk UMKM

Mandalika, Nusa Tenggara Barat, 21-23 Juni 2023

Kemenlu dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah sukses menyelenggarakan Road to Indonesia-Latin America and the Caribbean (INA-LAC) 2023. Acara tersebut bertujuan untuk mempromosikan potensi perdagangan, pariwisata, dan investasi NTB kepada negara-negara Amerika Latin dan Karibia. NTB dipilih karena potensi sektor pariwisata di NTB yang luar biasa, khususnya di *eco sport tourism*.

Dalam rangka mendukung promosi pariwisata, Road to INA-LAC melibatkan kunjungan ke destinasi pariwisata menarik seperti Desa Sade, proyek investasi yang clean and clear melalui pertemuan dengan ITDC, dan diakhiri dengan kunjungan ke Sirkuit Mandalika. Di samping itu, Seminar promosi Provinsi NTB melibatkan pemangku kepentingan di sektor pariwisata, antara lain Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia serta Asosiasi Tur dan Agensi Perjalanan Indonesia.

02 Menyelenggarakan Kampanye Indonesia Spice Up The World Berkolaborasi dengan K/L Terkait

Mandalika, Nusa Tenggara Barat, 21-23 Juni 2023

Indonesia Spice Up The World (ISUTW) merupakan program prioritas Pemerintah sebagai upaya penguatan gastrodiplomasi dengan memperkenalkan bumbu dan rempah Indonesia ke kancah internasional. Program ISUTW dilakukan melalui 4 (empat) pilar utama, 2 (dua) diantaranya adalah promosi kuliner Indonesia dan Indonesia sebagai destinasi gastronom.

Sepanjang 2023, Kemenlu menjalankan ISUTW diantaranya melalui kampanye yang diselenggarakan oleh Perwakilan RI dan promosi kuliner melalui Indonesia Gastrodiplomacy Series: Cooking with Ambassadors yang telah dipublikasikan sebanyak 4 episode di kanal Youtube. Kampanye tersebut ditujukan untuk menggugah rasa ingin tahu masyarakat Internasional tentang asal muasal rempah Indonesia sehingga dapat menginspirasi untuk melakukan penelusuran "*spice trail*" ke berbagai pelosok Nusantara sehingga meningkatkan niat kunjungan pariwisata.

03 Menyelenggarakan Bali and Beyond Travel Fair 2023

Bali, 14-17 Juni 2023

Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) adalah pameran produk pariwisata dengan format *B-to-B* yang diselenggarakan secara tahunan oleh Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia/ Association of Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Bali. Selain promosi berbagai produk wisata Indonesia, BBTF bertujuan menjadi sarana *business matching* antar pelaku industri pariwisata Indonesia dan global, dan sebagai forum yang mempertemukan *seller* dari kalangan industri pariwisata Indonesia dengan *buyer* dari kalangan tour operator atau *travel agent*, baik dari Indonesia maupun negara lain.

Kemenlu turut terlibat aktif dalam koordinasi dengan panitia penyelenggara dan pemangku kepentingan terkait seperti Kemenparekraf dan Perwakilan RI di luar negeri untuk penyebarluasan informasi, menjembatani pertemuan bisnis antara ASITA dan asosiasi pariwisata di negara mitra, serta rencana pendampingan misi bisnis pelaku usaha pariwisata Indonesia melalui keikutsertaan Indonesia pada pameran wisata negara mitra.

> Nilai potensi transaksi tercatat Rp 8,5 triliun, atau naik 63% dari BBTF ke-8 tahun 2022

Penyelenggaraan BBTF 2023 telah berhasil menarik partisipasi sebanyak 350 *buyers* dari 51 negara, 223 seller dari 5 negara, dan exhibitor dari 11 provinsi di Indonesia. Nilai potensi transaksi tercatat Rp 8,5 triliun, atau naik 63% dari BBTF ke-8 tahun 2022. Penyelenggaraan BBTF selanjutnya diharapkan dapat disinergikan dengan upaya Kemenlu dalam mempromosikan pariwisata Indonesia

04 Menyelenggarakan Wonderful Indonesia Tourism Update: Exploring New Destinations of Wonder”

Vientiane, 27 Juli 2023

Kemenlu bekerja sama dengan Kemenparekraf RI dan Ministry of Information, Culture, and Tourism (MICT) Lao PDR, menyelenggarakan kegiatan Promosi Pariwisata Indonesia melalui seminar secara *hybrid*, dengan mengambil tema: “Wonderful Indonesia Tourism Update: Exploring new Destinations of Wonder", bertempat di Lao Plaza Hotel, Vientiane.

Kegiatan dihadiri oleh Direktur Pemasaran Wilayah 1 Kemenparekraf dan Indonesian In-bound Travel Operators Association (IINTOA) beserta sejumlah anggotanya secara daring. Serta mengundang para pelaku usaha di bidang pariwisata, seperti *travel operators* yang tergabung dalam Lao Association of Travel Agents (LATA) dan perhotelan.

05 Keikutsertaan Indonesia dalam Bursa Pariwisata B-to-B di Berlin, Kuala Lumpur, dan New Delhi

Kemenlu bersama Kemenparekraf dan sejumlah industri pariwisata tanah air berkolaborasi untuk menyelenggarakan misi penjualan (*sales mission*) ke sejumlah negara yang menjadi pasar wisata utama Indonesia, yakni Malaysia, India, dan Jerman. Sampai dengan Oktober 2023, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia dari Malaysia dan India secara berturut-turut sebanyak 1.497.508 dan 493.900 kunjungan. Sementara jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia dari Jerman menempati posisi ke 4 tertinggi di kawasan Amerika dan Eropa dengan total kunjungan 230.947.

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
(Sampai Oktober 2023)

1.497.508
Asal Malaysia

493.900
Asal India

Kegiatan *sales mission* menjadi salah satu upaya Pemerintah untuk mendorong promosi wisata nasional melalui penawaran paket-paket wisata kepada Agency dan Tour Operator (TA/TO) potensial. *Sales mission* yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. **Partisipasi Indonesia pada Pacific Asia Travel Association (PATA) Travel Mart 2023 di New Delhi pada 4-6 Oktober 2023, bekerja sama dengan Indonesia Inbound Tour Operators Association (IINTOA).**

b. **Penyelenggaraan kegiatan *business matching* “Sales Mission-Table Top” telah pada 20 Maret 2023 di Kuala Lumpur, yang melibatkan lebih dari 20 TA/TO.**

c. **Partisipasi Indonesia pada pameran pariwisata terbesar dunia "Internationale Tourismus-Börse (ITB) 2023” pada 7-9 Maret 2023 di Berlin, yang telah berhasil memfasilitasi 64 industri pariwisata untuk promosi dan menjual berbagai paket wisata Indonesia di pasar Eropa.**

> “Kegiatan *sales mission* menjadi salah satu upaya Pemerintah untuk mendorong promosi wisata nasional

Proyeksi Ke Depan

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia diproyeksikan akan terus meningkat sepanjang tahun 2024. Walaupun pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan, sektor pariwisata diprediksi akan tetap tumbuh dengan tren positif disebabkan oleh relaksasi kebijakan pembatasan, *exposure* media sosial, dan kembali aktifnya rute penerbangan internasional.

Prospek pertumbuhan perjalanan wisatawan internasional tersebut dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkenalkan destinasi pariwisata prioritas di luar Bali, guna memperluas ragam tujuan wisata Indonesia dan pangsa pasar wisatawan mancanegara. Strategi diplomasi ekonomi di sektor pariwisata yang akan dilaksanakan oleh Kemenlu pada tahun 2024 antara sebagai berikut :

01. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Indonesia melalui Misi Bisnis, Roadshow, Familiarization Trip, serta Partisipasi pada Berbagai Event Internasional

Kemenlu Pusat dan Perwakilan RI berkolaborasi dengan pemangku kepentingan nasional akan terus berupaya memfasilitasi pelaku usaha Indonesia untuk mendorong tercapainya kesepakatan bisnis dan penjualan paket pariwisata, sekaligus mempromosikan destinasi wisata dan warisan budaya Indonesia, melalui keikutsertaan dalam pameran yang bersifat strategis, misi bisnis, *familiarization trip*, *roadshow*, dan *table top meeting* di berbagai negara potensial. Kegiatan terkait yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Misi Bisnis serta *Roadshow* Pariwisata dan Komoditas Strategis pada International Tourism Fair (Fitur) di Madrid pada Januari 2024.
2. *Table Top Meeting* Warsaw (Polandia) pada Januari-Maret 2024.
3. *Roadshow* Pariwisata dan Investasi ke Kawasan Nordik. Negara - negara yang rencananya akan dilaksanakan *roadshow* yakni Denmark dan Swedia, dimana Denmark pada tahun 2024 diproyeksikan menempati posisi pertama (20,761 wisatawan) disusul dengan Swedia (16,549 wisatawan).
4. HungExpo di Budapest, Hungaria pada Februari 2024.

02. Tindak Lanjut *Data Economic Intelligence* atas Potensi Pariwisata, Ekspor, dan Investasi.

Kegiatan menganalisa DEI merupakan bagian dari pemanfaatan DEI terhadap potensi pariwisata, ekspor, dan investasi di negara potensial. DEI yang telah diolah dan ditelaah akan digunakan sebagai basis penyusunan kebijakan termasuk program *nation branding* seperti Indonesia Spice Up the World dan Indonesia Opens to Business yang pelaksanaannya didukung oleh program promosi Perwakilan RI.

03. Mengintensifkan dan Memperluas Pengumpulan Survei Potensi Kunjungan Pariwisata di Perwakilan RI

Guna mengoptimalkan hasil survei, Kemenlu melalui Perwakilan RI akan memfokuskan distribusi kuis survei kepada pihak-pihak yang menjadi sasaran, seperti diaspora non-WNI lagi, pelajar/mahasiswa asing, pejabat pemerintah negara asing, dan WNA pemohon visa/dokumen kekonsuleran di Perwakilan. Selain itu pengumpulan data survei juga dilakukan pada kegiatan-kegiatan Perwakilan RI yang mengundang WNA dan counterpart asing, seperti Indonesian week, Indonesian night, resepsi diplomatik, maupun misi bisnis.

Dokumentasi Program Pendukung Capaian IKU S1.3 : Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata

Gambar III.8
Road to Indonesia - Latin America and the Carribean (INA-LAC) 2023
(Mandalika, 21-23 Juni 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.9
Paviliun Bangga Buatan Indonesia dan Indonesia Spice up the World pada pameran Warsaw Food Expo
(Polandia, 16-18 Mei 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.10
Wonderful Indonesia Tourism Update: Exploring New Destinations of Wonder
(Vientiane, 27 Juli 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.11
Sales Mission - Table Top Exploring New Destination of Wonder
(Kuala Lumpur, 20 Maret 2023)
Sumber: Antara

Sasaran Strategis (SS) S2 :

Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh di Tingkat Regional dan Global

Salah satu tujuan/Sasaran Strategis yang ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 adalah kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di tingkat regional dan global yang dihitung melalui indeks pengaruh dan peran Indonesia. Capaian kinerja diplomasi perlu diukur relevansinya dengan hasil dari peran/ kontribusi diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di fora Internasional.

Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan pendekatan diplomasi untuk rakyat. Pada prinsipnya, tujuan pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri Indonesia meliputi dua aspek yang saling berkaitan, yaitu: mencapai kepentingan nasional dan berkontribusi terhadap ketertiban dunia sesuai amanat UUD 1945. Dalam mencapai kepentingan nasional, Indonesia berfokus pada Peran Indonesia di Kawasan dan Global dalam prioritas diplomasinya. Sesuai komitmen diplomasi untuk rakyat, pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri diarahkan untuk mendukung upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, salah satunya peningkatan penjalinan hubungan baik dengan negara-negara di kawasan sehingga negara dan seluruh rakyat Indonesia dapat beraktivitas dalam situasi damai.

Sasaran "Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh di Tingkat Regional dan Global" ditetapkan sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Kemenlu dan Perwakilan RI serta melaksanakan amanat Presiden RI dalam RPJMN 2020-2024. Visi RPJMN 2020-2024 adalah Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dicapai melalui 7 Agenda Pembangunan. Di antara 7 Agenda Pembangunan dimaksud, Kemenlu berperan dalam Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Khusus bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam), agenda pembangunan 2020 – 2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Dari lima arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam, Kemenlu memberikan kontribusi kepada Program Prioritas Kedua, yaitu Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri. Adapun isu-isu strategis dalam rangka optimalisasi kebijakan luar negeri, salah satunya mencakup aspek tata kelola meliputi pemanfaatan keanggotaan Indonesia pada organisasi/forum internasional dan penataan peran, serta fungsi K/L dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri. Salah satu arah kebijakan Kemenlu adalah Peningkatan Pengaruh Kepemimpinan dan Peran Indonesia dalam Kerja Sama Internasional.

Analisis IKU S2.1

Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional

Deskripsi IKU

IKU ini sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Kemenlu dan Perwakilan RI serta melaksanakan amanat Presiden RI dalam RPJMN 2020-2024 yakni capaian kinerja diplomasi perlu diukur relevansinya dengan hasil dari peran/ kontribusi diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di forum regional dan multilateral.

IKU ini menghitung indeks pengaruh dan peran Indonesia yakni indeks yang mengukur pengaruh terhadap pengambilan kebijakan isu-isu di tingkat regional dan global serta partisipasi dan keikutsertaan secara aktif Indonesia pada forum regional dan multilateral.

IKU ini memiliki 2 SUB IKU, yakni:

SUB IKU 1

Indeks kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral

Bobot 70%

SUB IKU ini mengukur pengaruh Indonesia pada forum regional dan multilateral. Kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral merupakan kedudukan atau peran Indonesia yang memimpin atau mengarahkan pada forum regional dan multilateral, misalnya sebagai *chair, co-chair, host, co-host, member of bureau*, dan keberhasilan pencalonan Indonesia pada Organisasi Internasional (OI). Lingkup Regional meliputi wilayah kawasan Aspasaf (Asia, Pasifik, dan Afrika) dan wilayah Amerop (Amerika dan Eropa). Sedangkan untuk lingkup global meliputi banyak negara secara luas yang tidak dibatasi oleh kawasan tertentu.

SUB IKU-1 di bobotkan lebih tinggi (70%) karena mengukur nilai kewibawaan Indonesia yang menjadi pertimbangan dan kepercayaan dunia internasional terhadap kedudukan Indonesia, sehingga memiliki nilai pengaruh terhadap kebijakan di forum regional dan multilateral.

SUB IKU 2

Indeks prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri ASEAN dan Multilateral

Bobot 30%

SUB IKU ini mengukur pengaruh Indonesia pada forum Kerja Sama ASEAN dan Multilateral utamanya dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri ASEAN dan Multilateral. Diterimanya rekomendasi dan prakarsa Indonesia juga menunjukkan bahwa wakil-wakil Indonesia dapat menyuarakan kepentingan nasional pada forum/ pertemuan internasional. Peran Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN dan Jakarta sebagai *capital city* ASEAN tentunya merupakan nilai lebih dalam mendorong peningkatan peran Indonesia dalam kerja sama ASEAN.

SUB IKU-2 mendapatkan alokasi bobot 30% karena gagasan dan usulan suatu isu tertentu yang dibahas dalam kerangka kerja sama ASEAN dan multilateral yang disampaikan dan diterima bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenlu namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak (K/L terkait, dunia usaha, dll).

Perhitungan realisasi IKU Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU} = (70\% \times \text{Capaian Sub IKU 1}) + (30\% \times \text{Capaian Sub IKU 2})$$

Perhitungan realisasi untuk IKU S2.1 Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional dilakukan dengan mengonversikan persentase realisasi SUB IKU ke dalam indeks dengan formula:

$$I = (4*P) + 1$$

P = Realisasi dalam Persentase (%)

I = Konversi Persentase ke Indeks

Rumus perhitungan realisasi SUB IKU 1 yaitu:

$$P = \frac{\text{(Jumlah pertemuan yang dipimpin Indonesia + Jumlah pencalonan yang berhasil)}}{\text{(Jumlah pertemuan yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia + jumlah pencalonan yang diusulkan)}} \times 100\%$$

Rumus perhitungan realisasi SUB IKU 2 yaitu:

$$P = \frac{\text{Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang diterima}}{\text{Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan}} \times 100\%$$

Indeks yang diperoleh dari hasil konversi tersebut dibagi dalam rentang skala 1–5 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel pencapaian indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional berikut:

Tabel III.22
Rentang Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional
Sumber: Manual IKU Kemenlu

Indeks	Keterangan
4,01 – 5	Tingkat pengaruh dan peran Indonesia pada forum regional, multilateral, dan dunia internasional yang tinggi (*high*)
3,01 – 4	Tingkat pengaruh dan peran Indonesia pada forum regional, multilateral, dan dunia internasional yang cukup tinggi (*medium-high*)
2,01 – 3	Tingkat pengaruh dan peran Indonesia pada forum regional, multilateral, dan dunia internasional yang cukup rendah (*medium-low*)
1 – 2	Tingkat pengaruh dan peran Indonesia pada forum regional, multilateral, dan dunia internasional yang rendah (*low*)

Informasi Kinerja

Tabel III.23
Capaian IKU S2.1 Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional
Sumber: AKSI Kemenlu

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Nilai Realisasi SUB IKU	Nilai Bobot
Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional	Realisasi SUB IKU 1 Indeks kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral (70%)	**4,96**	**3,47**
	Realisasi SUB IKU 2 Indeks prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri ASEAN dan Multilateral (30%)	**5**	**1,50**

Target	Realisasi	Capaian
4,94	4,97	100,61%

Pada tahun 2023, realisasi IKU S2.1 Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional adalah sebesar 4,97 dari target sebesar 4,94. Realisasi tersebut telah mencapai target dengan capaian IKU sebesar 100,61%. Realisasi IKU S2.1 diperoleh dari penjumlahan bobot atas realisasi SUB IKU 1 dan SUB IKU 2.

Jika dibandingkan dengan target pada tiap SUB IKU, realisasi seluruh SUB IKU telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan IKU ini menggambarkan capaian kinerja diplomasi dari peran/kontribusi diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di forum regional dan multilateral.

Sedangkan SUB IKU-2 Indeks prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri ASEAN dan Multilateral memperoleh realisasi sebesar 5 dari target sebesar 4,94. Hasil kalibrasi penyesuaian perhitungan indikator diperoleh dari perbandingan jumlah rekomendasi dan prakarsa yang diterima sebanyak 265 dengan jumlah rekomendasi dan prakarasa yang disampaikan sebanyak 265, sehingga capaian SUB IKU-2 sebesar 101,21%.

Prakarsa dan Rekomendasi yang Disampaikan dan Diterima pada Pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri ASEAN

Perbandingan Kinerja

Tabel III.24
Target, Realisasi dan Capaian IKU Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional

Sumber: AKSI Kemenlu

Kode IKU/ SUB IKU		2020	2021		2022		2023	
S2.1	Target	88,7%	93,67%	↑	4,85		**4,94**	↑
	Realisasi	96,58%	112,06%	↑	4,98		**4,97**	↓
	Capaian	108,89%	119,63%	↑	102,68%	↓	**100,61%**	↓
SUB IKU 1	Target	86%	92,67%	↑	4,84		**4,93**	↑
	Realisasi	95,38%	117,2%	↑	4,97		**4,96**	↓
	Capaian	110,9%	120%	↑	102,69%	↓	**100,65%**	↓
SUB IKU 2	Target	95 %	96%	↑	4,88		**4,94**	↑
	Realisasi	98,9%	100%	↑	5		**5**	↔
	Capaian	104,11%	104,17%	↑	102,46%	↓	**101,21%**	↓

Sejak tahun 2022, terdapat penajaman atas perhitungan capaian IKU berdasarkan hasil revisit IKU, dimana penghitungan realisasi IKU S2.1 dilakukan dengan mengonversikan persentase realisasi SUB IKU ke dalam indeks. Capaian IKU Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional pada tahun 2023 mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya peningkatan target. Target IKU S2.1 pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari 4,85 menjadi 4,94 dengan realisasi yang telah mencapai target sebesar 4,97. Namun, jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tiap SUB IKU, realisasi seluruh SUB IKU telah mencapai target yang ditetapkan.

> Sejak tahun 2022, terdapat penajaman atas perhitungan capaian IKU berdasarkan hasil revisit IKU

Target SUB IKU-1 tahun 2023, mengalami peningkatan menjadi 4,93 dari 4,84 pada tahun sebelumnya. Peningkatan target ini mempertimbangkan keberhasilan proyeksi Kemenlu dalam konsolidasi ragam kepentingan nasional yang diperjuangkan melalui berbagai forum regional dan multilateral. Walaupun terdapat 1 (satu) kegagalan dalam pencalonan, hal ini tidak menunjukkan bahwa Indonesia tidak memiliki potensi namun disebabkan oleh minimnya persiapan pencalonan tersebut. Terbukti dengan realisasi SUB IKU-1 yang mencapai target sebesar 4,96 dari target sebesar 4,93. Kesuksesan Indonesia dalam memimpin pertemuan internasional didukung oleh konsensus nasional, sumber daya manusia yang berkualitas, dan kemampuan diplomasi yang kuat dalam berinteraksi dengan mitra internasional. Ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam isu-isu global dan menjadi pemimpin yang signifikan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, target SUB-IKU 2 pada tahun 2023 mengalami peningkatan target menjadi 4,94 dari 4,88. Peningkatan target ini mempertimbangkan semakin menguatnya koordinasi Kemenlu bertindak sebagai pemrakarsa dalam menyusun posisi nasional yang akan disampaikan oleh Indonesia pada forum internasional melalui sinergi dan konsultasi bersama dengan K/L teknis pemangku kepentingan. Realisasi SUB IKU-2 tidak mengalami perubahan antara tahun 2022 dan 2023 yaitu 5. Hal ini disebabkan oleh diterimanya prakarsa dan rekomendasi Indonesia di Pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri ASEAN dan Multilateral sesuai target yang telah ditentukan. Prakarsa dan rekomendasi diterima berkat peran kepemimpinan Indonesia dan adanya kesamaan pandangan negara anggota dan *observer* yang selama ini dibangun berdasarkan kesamaan kepentingan, serta dialog yang kondusif dan konstruktif.

Capaian kinerja IKU S2.1 dapat dikategorikan baik mengingat dinamika global yang menantang serta adanya peningkatan target di tahun 2023. Kemenlu terus berupaya untuk mempertahankan terpenuhinya target kinerja sehingga tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dalam Renstra dapat mendukung target pada RPJMN 2020-2024. Meskipun capaian pada IKU Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah rencana maupun realisasi pertemuan yang dipimpin Indonesia serta total prakarsa dan rekomendasi Indonesia di Pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri ASEAN dan Multilateral mengalami kenaikan. Penurunan capaian utamanya dipengaruhi oleh peningkatan target di tahun 2023.

> Kesuksesan Indonesia dalam memimpin pertemuan internasional didukung oleh konsensus nasional, sumber daya manusia yang berkualitas, dan kemampuan diplomasi yang kuat dalam berinteraksi dengan mitra internasional

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Dalam hal peningkatan pengaruh kepemimpinan dan peran Indonesia dalam Kerja Sama Internasional selama tahun 2023, beberapa peran yang telah dilaksanakan antara lain Indonesia menjadi *chair* dalam Rangkaian Pertemuan ASEF Finance & Audit Committee (FAC), Executive Committee (ExCo), dan 44th ASEF Board of Governors' Meeting (ASEFBoG44) di Barcelona dan Madrid; Indonesia memprakarsai ASEAN Leaders' Declaration on ASEAN as an Epicentrum of Growth, ASEAN Leaders' Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crises, ASEAN Blue Economy Framework pada Rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 dan KTT terkait lainnya di Jakarta; serta terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026.

Secara umum, keberhasilan pencapaian IKU S2.1 dikarenakan adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah Indonesia telah memperoleh dukungan kuat dari berbagai elemen di dalam negeri, termasuk partai politik, organisasi masyarakat, dan tokoh-tokoh kunci. Ini menciptakan konsensus nasional yang memungkinkan Indonesia untuk mengambil peran pemimpin dalam pertemuan internasional. Keterwakilan Pemri dalam forum regional dan forum multilateral sangat mempengaruhi posisi dan postur kepemimpinan RI. Pemerintah Indonesia telah membangun hubungan yang kuat dengan mitra internasional dan organisasi multilateral. Melalui diplomasi yang efektif, Indonesia mampu menunjukkan *leadership role* untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai pertemuan.

“ Melalui diplomasi yang efektif, Indonesia mampu menunjukkan *leadership role* untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai pertemuan

Dalam hal lain, menguatnya *coordinatorship* Kemenlu dalam merumuskan posisi-posisi penting Pemri melalui sinergi dan konsultasi bersama dengan Kementerian/ Lembaga yang menjadi pemangku kepentingan. Sejalan dengan hal tersebut, koordinasi dan sinergitas antara Setnas ASEAN dengan Kementerian/ Lembaga teknis dalam mempersiapkan Delegasi RI untuk memformulasikan dan mengajukan prakarsa dan rekomendasi dalam berbagai pertemuan ASEAN.

Keberhasilan Kemenlu dalam pencapaian target Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional juga didukung oleh keberhasilan pencalonan Indonesia dalam berbagai pertemuan regional dan multilateral serta diterimanya berbagai prakarasa dan rekomendasi yang disampaikan oleh Indonesia dalam forum Pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri ASEAN dan Multilateral.

Sepanjang tahun 2023, keberhasilan Indonesia dalam memimpin pertemuan internasional didukung oleh hal-hal berikut:

01

Kecermatan proyeksi Kemenlu dalam mengkonsolidasikan ragam kepentingan nasional yang diperjuangkan melalui berbagai forum regional dan multilateral.

02

Konsolidasi yang efektif di internal Kemenlu dengan para pemangku kepentingan yaitu Kementerian dan Lembaga terkait, serta *counterpart* asing dalam berbagai forum kerjasama.

03

Dukungan dan pengakuan negara-negara atas peran dan kepemimpinan Indonesia di forum regional dan multilateral sehingga dipercaya untuk menjadi *host/chair/co-host* pada forum kerja sama internasional.

04

Kemenlu sebagai koordinator pencalonan dalam OI telah melakukan pemetaan, meningkatkan sinergi dan koordinasi guna menyiapkan strategi pemenangan pencalonan secara sistematis dan terkoordinasi.

05

Peran Indonesia sebagai *bridge builder* dan *trusted partner* telah membuat kapasitas diplomasi Indonesia diakui dunia sehingga Indonesia terus dipercaya untuk memimpin dan menjadi tuan rumah dari berbagai forum regional dan multilateral yang strategis.

Keberhasilan lainnya dalam penyampaian prakarsa dan rekomendasi didukung beberapa faktor, antara lain:

01

Reputasi Indonesia sebagai *bridge builder* pun mendukung usulan prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang disampaikan Indonesia dapat diterima oleh negara-negara anggota.

02

Terdapat kesamaan pandangan dan komitmen dari negara anggota ASEAN dalam menjaga relevansi ASEAN, serta bersama-sama ingin berupaya mendorong kawasan ASEAN sebagai *epicentrum of growth* sesuai dengan tema keketuaan Indonesia. Selain itu, juga terdapat kesamaan pandangan antara negara anggota ASEAN dan *observer* yang selama ini dibangun berdasarkan kesamaan kepentingan, serta dialog yang kondusif dan konstruktif.

03

Peran besar Kemenlu dan Setnas ASEAN dalam mengkoordinasikan dan meningkatkan sinergitas didukung dengan antusiasme tinggi kementerian/lembaga teknis sebagai *focal point* di berbagai badan sektor kerja sama ASEAN dalam memformulasikan dan mengajukan prakarsa dan rekomendasi, serta menghasilkan capaian *outcome documents* yang bermanfaat bagi kawasan dalam berbagai pertemuan ASEAN.

04

Indonesia juga aktif dalam menyampaikan inisiatif dalam proses penyusunan ASEAN Community Post-2025 Vision, termasuk salah satunya adalah Concept Paper on Strengthening ASEAN's Capacity and Institutional Effectiveness mengingat akan berakhirnya rencana strategis ASEAN Community Vision 2025.

Terdapat 1 (satu) pencalonan yang telah disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia tahun 2023 namun belum berhasil dimenangkan pada forum multilateral, yaitu pencalonan Indonesia sebagai Presiden the World Meteorological Organization (WMO) periode 2023-2027. Meskipun jumlah suara yang diraih meningkat melalui intensifikasi penggalangan terutama menjelang pemilihan, namun pencalonan tersebut gagal terpilih. Hal ini disebabkan karena pencalonan disampaikan menjelang waktu pemilihan, sehingga penggalangan dukungan sulit dilakukan secara optimal.

Kendala dan Tantangan

Kemenlu secara kontinu melakukan pendekatan strategis kepada negara anggota forum baik melalui korespondensi langsung maupun melalui Perwakilan RI agar Indonesia dapat memperoleh dukungan untuk menjalankan peran kepemimpinan pada forum-forum Internasional. Namun, dalam mencapai keberhasilan memimpin pertemuan internasional Kemenlu dihadapkan dengan beberapa kendala dan tantangan sebagai berikut:

01

Kendala dan Tantangan dalam Kepemimpinan pada Forum Internasional

1. Penyesuaian jadwal pertemuan efek kondisi pemulihan Pandemi COVID-19 terutama diawal tahun sehingga menjadikan pertemuan-pertemuan yang telah dijadwalkan terkendala pelaksanaanya
2. Kebijakan dan prioritas negara anggota atau organisasi mitra bisa berubah seiring waktu. Serta perbedaan dalam pendekatan atau pandangan terhadap isu-isu tertentu antara Indonesia dan mitra internasional dapat mempersulit koordinasi dan pemahaman bersama.
3. Mempersatukan suara seluruh pihak yang diverse dan memastikan bentuk kompromi dengan negara lain tidak kontradiktif terhadap kepentingan Indonesia dalam pertemuan/ forum.
4. Dinamika politik dunia membuat berbagai isu pada forum multilateral semakin bersifat multidimensional sehingga membuat pembahasan semakin rumit. Salah satu contohnya yaitu terlalu dipolitisasinya isu HAM di berbagai forum multilateral.

4. Untuk pencalonan, keputusan pengajuan pencalonan Indonesia yang kurang dari satu tahun menimbulkan tantangan yang besar dalam perencanaan dan penganggaran untuk mendapatkan hasil optimal. Pemetaan pengajuan saling dukung pencalonan menjadi sulit dilakukan karena adanya kemungkinan pembagian atau pengurangan dukungan bagi pencalonan Indonesia lain yang pemilihannya akan dilakukan di tahun yang sama dan sudah terlebih dahulu dijadwalkan.
5. Pemahaman berbagai pemangku kepentingan nasional mengenai rules dan regulations, termasuk Rules of Procedure (ROP) yang berkaitan dengan pencalonan perlu untuk terus ditingkatkan. Pemahaman mengenai mekanisme pemilhan krusial dalam konteks pemetaan strategis Indonesia untuk penentuan posisi pencalonan dan juga dalam kampanye pemenangan.

02

Kendala dan Tantangan dalam Penyampaian Prakarsa dan Rekomendasi

1. Internal proses panjang birokrasi dalam endorsement dokumen pada beberapa negara anggota ASEAN tertentu, yang berisiko terhadap tidak terpenuhinya target disepakatinya dokumen Deklarasi/*Roadmap* untuk diadopsi/dinotasi pada KTT dan pertemuan tingkat menteri.
2. Proses dari kementerian *focal point* memerlukan waktu yang cukup lama dalam menindaklanjuti masukan terhadap *draft document outcomes* sehingga dapat memunculkan risiko terhambatnya finalisasi dokumen, yang kerap kali masih diproses secara *ad-referendum*.
3. Persaingan antar "*major powers*" juga semakin menajam di kawasan, yang mengakibatkan semakin sulitnya pencapaian kesepakatan proposal baru yang memiliki implikasi harmonisasi peraturan nasional, anggaran/komitmen pendanaan bersama ataupun terdapat kepentingan yang bertolak belakang.
4. Terdapat perbedaan kapasitas antar negara anggota termasuk Indonesia dalam menangani sejumlah isu yang dibahas, sehingga mempengaruhi posisi negara dalam forum.

Upaya Perbaikan

Untuk mengatasi kendala dan tantangan dalam hal menjalankan peran kepemimpinan pada forum-forum Internasional, dapat diambil langkah-langkah solutif sebagai berikut:

01

Meningkatkan Jalur Komunikasi yang Efektif

Meningkatkan jalur komunikasi yang efektif dalam meminimalisir kendala pelaksanaan yang dapat menyebabkan penundaan atau pembatalan pertemuan. Serta menindaklanjuti prakarsa/inisiatif dimana Indonesia akan berperan menjadi *host/chair.* Hal ini akan dan menjamin peran kepemimpinan Indonesia terus berlangsung.

02

Meningkatkan dan Memperkuat Hubungan Diplomatik dan *Engagement* serta Dialog yang Konstruktif

Meningkatkan dan memperkuat hubungan diplomatik dan *engagement* serta dialog yang konstruktif dengan negara anggota/mitra internasional untuk memahami perubahan dalam kebijakan dan prioritas mereka secara lebih baik. Hal lain yang dapat dilakukan dengan mempromosikan dialog terbuka dan berkelanjutan dengan negara anggota/mitra internasional untuk meminimalkan perbedaan pandangan dan mencapai konsensus dalam pertemuan internasional.

03

Berperan Sebagai *Bridge Builder* dan *Trusted Partner*

Senantiasa berperan sebagai *bridge builder* dan *trusted partner* melalui engagement dan dialog yang konstruktif dengan negara pihak pada forum internasional guna menyamakan pandangan dan menghasilkan suatu *outcome* yang diharapkan yang dapat diterima oleh semua pihak. Serta berkoordinasi erat dengan pemangku kepentingan dan menjalin pendekatan secara bilateral kepada negara-negara mitra agar tercapai dukungan bagi posisi Indonesia di forum internasional, sekaligus menyiapkan posisi alternatif dan identifikasi kompromi yang dapat dilakukan atas berbagai usulan prakarsa dan rekomendasi Indonesia.

04

Peningkatan Koordinasi Lintas Satker

Meningkatkan koordinasi lintas Satker di Kemenlu, Perwakilan RI, maupun K/L pengampu isu-isu multilateral guna menyusun posisi Indonesia dan strategi untuk memastikan kepentingan Indonesia pada berbagai isu terjaga pada setiap forum multilateral.

05

Koordinasi dengan Perwakilan RI di Negara Anggota Organisasi Internasional (OI)

Melakukan koordinasi erat dengan Perwakilan RI di negara anggota organisasi internasional (OI) untuk membantu penggalangan pemenangan pencalonan RI secara intensif menjelang pemilihan. Selain itu, penguatan *database* pencalonan yang lebih *real time* dan *reliable* terus dilakukan.

06

Diseminasi Prosedur Pencalonan

Mendiseminasikan prosedur pencalonan pada saat kegiatan pemanfaatan keanggotaan Indonesia pada OI yang dilakukan oleh berbagai K/L. Serta memberikan masukan atas rencana pencalonan sehingga penggalangan pemenangan pencalonan dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, dilakukan pula koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memetakan penjadwalan pencalonan

Sementara dalam menghadapi kendala dan tantangan penyampaian prakarsa dan rekomendasi, Kemenlu melakukan melakukan hal-hal sebagai berikut:

01

Koordinasi Pertemuan

Kemenlu terus berkoordinasi erat dengan pengampu masing-masing pilar untuk mengkoordinasikan beberapa pertemuan dengan K/L terkait untuk percepatan proses dan mendorong penyelesaian dokumen.

02

Melakukan Serangkaian Pendekatan

Telah dilakukan serangkaian pendekatan, baik secara bilateral dengan negara tertentu yang memiliki kendala, maupun melalui ASEC, dengan membuka beberapa opsi seperti agreement-in-principal dan menyusulkan endorsement resmi sesuai prosedur, sehingga target tetap tercapai.

03

Terus Mendorong Sentralitas ASEAN

Indonesia terus mendorong sentralitas ASEAN dalam berbagai ASEAN *Led Mechanism* sekaligus mendorong implementasi kerjasama praktis dari AOIP. Dengan adanya sentralitas dan persatuan ASEAN, ASEAN akan mampu mengambil peran aktif dalam membentuk atau menghadapi dinamika di kawasan.

04

Mendorong Dibangunnya Kerja Sama serta Jejaring

Dalam menangani perbedaan kapasitas, Indonesia senantiasa mendorong dibangunnya kerja sama serta jejaring untuk meningkatkan kapasitas setiap negara pihak dalam forum.

Analisis Program Pendukung Capaian

Sejumlah program strategis telah dilaksanakan oleh Kemenlu sepanjang tahun 2023 untuk mendukung pelaksanaan diplomasi ekonomi. Dalam rangka merealisasi IKU tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi, berikut beberapa program strategis yang telah dilaksanakan oleh Kemenlu pada tahun 2023:

01 **High-Level Strategic Dialogue on IORA's 25-Years–Reflection, Review & Renewal**

Mauritius, 20–22 Juni 2023

Pertemuan ini meninjau ulang upaya IORA selama 25 tahun terakhir berdiri, terutama dalam mengimplementasikan kesepakatan pada IORA Charter. Pada pertemuan ini, Indonesia berperan sebagai *Chair* pada sesi Engagement with Dialogue Partners.

02 The Third Meeting of IORA Core Group on Fisheries Management (CGFM)

Karawaci, 12 September 2023

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kelanjutan implementasi *Work Plan* CGFM dalam kerangka kerjasama IORA serta mendorong partisipasi aktif dari Negara Anggota pada masing-masing sasaran strategis dalam *Work Plan* dimaksud. Adapun Indonesia berperan sebagai h*ost* pada pertemuan ini

03 APEC Workshop on Promoting Creative Industries in the Aftermath of COVID-19

Bali, 16-17 Oktober 2023

Workshop ini merupakan tindak lanjut dari upaya Indonesia yang berusaha memasukan referensi industri kreatif pada salah satu dokumen tingkat *Leaders* APEC yaitu Aotearoa Plan of Action. Indonesia berperan sebagai *host* pada pertemuan ini.

Kawasan Amerop

01 Peran Indonesia sebagai *Chair* dalam Rangkaian Pertemuan ASEF Finance & Audit Committee (FAC), Executive Committee (ExCo), dan 44th ASEF Board of Governors' Meeting (ASEFBoG44)

Barcelona dan Madrid, 3-10 Juli 2023

Gubernur ASEF Indonesia, Duta Besar Soemadi Brotodiningrat, selaku Ketua FAC, memimpin pertemuan FAC dan berpartisipasi aktif dalam pertemuan ExCo. Disamping itu, bersama *Executive Director* (ED) ASEF, Indonesia telah berhasil memimpin Asian Caucus dan aktif dalam pertemuan ASEFBoG44.

Pertemuan telah membahas aspek operasional, finansial, manajerial, dan strategi ASEF, antara lain aspek anggaran, kontribusi, pengeluaran, dan audit ASEF, strategi jangka menengah ASEF, serta sumber daya manusia ASEF. Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Indonesia telah diminta untuk menyelesaikan beberapa persoalan dan menyampaikan berbagai rekomendasi, baik dari aspek finansial, manajerial, dan strategi, dan telah diterima para pemangku kepentingan di FAC, ExCo, maupun BoG.

02 Peran Indonesia sebagai *Chair* dalam Kegiatan Perundingan Putaran ke-15 I-EU CEPA untuk Working Group on Economic Cooperation and Capacity Building (ECCB)

Yogyakarta, 11 Juli 2023

Indonesia memainkan peran penting dalam tercapainya strategis terkait bab ECCB dari I-EU CEPA. Sebagai tindak lanjut setelah Bab ECCB selesai, Indonesia terus aktif memantau perkembangan perundingan I-EU CEPA terkait *overarching issues* yang terdapat dalam bab ECCB. Tindak lanjut ini menjadi langkah penting untuk memastikan implementasi kesepakatan yang telah dicapai dan untuk memastikan bahwa bab ECCB bukan hanya menjadi bagian formal dari kesepakatan, namun juga menjadi panduan bagi berbagai program kerja sama peningkatan kapasitas SDM Indonesia di berbagai sektor I-EU CEPA.

03 Peran Indonesia sebagai *Co-Host* Penyelenggaraan 7th Indonesia-EU Joint Committee

Brussel, 29 September 2023

Joint Committee (JC) menjadi kegiatan tahunan yang sangat penting di dalam dinamika hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa. JC dimandatkan oleh Partnership and Cooperation Agreement (PCA), sebagai dialog komprehensif yang mereviu dan mengevaluasi mekanisme dialog bilateral RI-UE dalam beberapa isu seperti politik, HAM, dan lingkungan.

Pada pelaksanaan JC, dilakukan reviu kerja sama serta menyepakati program kolaborasi Indonesia dan UE pada tahun 2024. JC mencerminkan upaya Indonesia dalam menghadirkan kolaborasi yang substansial dan berkelanjutan antara Indonesia dan UE di berbagai sektor strategis. Dengan keterlibatan proaktif Indonesia, hasil JC diharapkan dapat menciptakan landasan yang kokoh untuk hubungan yang lebih erat dan produktif antara Indonesia dan UE.

Forum Kerja Sama ASEAN

01 Penyampaian Rekomendasi pada ASEAN Foreign Ministers' Retreat

Jakarta, 4 Februari 2023

Indonesia menyampaikan rekomendasi agar Special Envoy of the ASEAN Chair to Myanmar melakukan *briefing* kepada Dewan Keamanan PBB dalam pertemuan ASEAN Foreign Ministers' Retreat, Jakarta pada 4 Februari 2023.

02 Pertemuan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council ke-29

Bali, 8 Mei 2023

Pertemuan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council ke-29 di Bali, 8 Mei 2023, berhasil mendapatkan dukungan atas usulan *deliverables* Indonesia di pilar sosial budaya untuk menjadi *outcome documents* KTT ASEAN ke-42 yaitu:

- ASEAN Declaration on the Protection of Migrant Workers and Family Members in Crisis Situations.
- ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant.
- ASEAN Leaders' Joint Statement on the Establishment of ASEAN Village Network.
- ASEAN Leaders' Declaration on One Health Initiative.

Selain itu, pertemuan juga mencatat dan mendukung inisiatif Indonesia untuk menyelenggarakan beberapa kegiatan di pilar sosial budaya yaitu:

i. High-Level Forum on Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025.
ii. High-Level Dialogue on Women, Peace and Security.
iii. ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference.

03 Penyampaian Rekomendasi dalam Pertemuan KTT ke-42 ASEAN

Labuan Bajo, 10-11 Mei 2023

Indonesia menyampaikan rekomendasi paragraf yang menyambut adopsi Concept Paper on the Development of an ASEAN Maritime Outlook (AMO) dan menantikan publikasi edisi pertama dari *Outlook* dimaksud dalam Chairman's Statement KTT ke-42 ASEAN dalam pertemuan KTT ke-42 ASEAN, Labuan Bajo pada 10-11 Mei 2023.

Selain itu, pada KTT ke-42 ASEAN tersebut telah disahkan beberapa *deliverables*, antara lain: ASEAN Leaders' Declaration on Developing Regional Electric Vehicle Ecosystem dan ASEAN Leaders' Declaration on Advancing Regional Payment Connectivity and Promoting Local Currency Transaction.

04 Peluncuran IMT-GT Visit Year 2023-2025

Labuan Bajo, 11 Mei 2023

Presiden RI sebagai *Chair* pertemuan telah meluncurkan IMT-GT Visit Year 2023-2025 yang bertujuan untuk mendorong pemulihan pariwisata melalui pembukaan akses destinasi wisata SUB-kawasan, *sharing of best practices*, dan *joint tourism promotion* pada pertemuan KTT ke-15 IMT-GT, Labuan Bajo, 11 Mei 2023.

05 Prakarsa-prakarsa pada Rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 dan KTT Terkait Lainnya

Jakarta, 5-7 September 2023

Indonesia memprakarsai ASEAN Leaders' Declaration on ASEAN as an Epicentrum of Growth, ASEAN Leaders' Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crises, ASEAN Blue Economy Framework pada Rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 dan KTT terkait lainnya di Jakarta, 5 - 7 September 2023.

06 Mendapatkan Dukungan Mitra Wicara atas prakarsa Indonesia untuk mendukung Keketuaan di ASEAN 2023

Indonesia berhasil mendapatkan dukungan Mitra Wicara atas prakarsa Indonesia untuk mendukung Keketuaan di ASEAN 2023, sebagaimana direfleksikan dalam:

i. East Asia Summit Leaders' Statement on Maintaining and Promoting the Region as an Epicentrum of Growth.

ii. ASEAN Plus Three (APT) Leaders' Statement on Developing of Electric Vehicle Ecosystem.

iii. ASEAN-US Leaders' Statement on Cooperation on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.

iv. ASEAN-China Joint Statement on Mutually Beneficial Cooperation on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

v. ASEAN-Republic of Korea Joint Statement of the 24th ASEAN Republic of Korea Summit on Cooperation on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

vi. ASEAN-India Joint Leaders' Statement on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crises.

vii. ASEAN-Canada Joint Leaders' Statement on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crises.

viii. ASEAN-Australia Joint Leaders' Statement on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crises.

ix. Joint Statement of ASEAN and Russia Foreign Ministers on the Occasion of the 5th Anniversary of ASEAN-Russia Strategic Partnership.

x. ASEAN-RRT berhasil mengadopsi Guidelines for Accelerating the Early Conclusion of the Coc.

Forum Multilateral

01 Bali Process Ministerial Conference (BPMC) ke-8

Adelaide, Australia,
8-10 Februari 2023

Ketua Bersama Bali Process yaitu Menlu RI dan Menlu Australia telah memimpin pertemuan Bali Process Ministerial Conference (BPMC) ke-8, di Adelaide, Australia. Dalam kesempatan intervensi, sejumlah rekomendasi yang disuarakan Indonesia diantaranya yaitu perlunya skema konsultasi terbuka dalam mencapai solusi TPPO lebih komprehensif, strategi komunikasi yang lebih meluas, serta dorong aturan legislasi di tingkat domestik.

02 Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Ministerial Meeting ke-11

Kuala Lumpur, Malaysia,
16-17 Mei 2023

Indonesia sampaikan rekomendasi agar CPOPC dapat senantiasa meningkatkan *engagement* dengan negara-negara produsen sawit lainnya yang belum menjadi anggota, memperhitungkan kontribusi negara anggota baru pada tahun anggaran selanjutnya, serta mendorong pengembangan biodiesel untuk negara produsen minyak sawit.

03 Penyelenggaraan Seminar Regional Pasifik Komite Khusus Dekolonisasi (C-24) Tahun 2023

Indonesia, 24-26 Mei 2023

Indonesia telah selenggarakan Seminar Regional Pasifik Komite Khusus Dekolonisasi (C-24) di Bali, pada 24-26 Mei 2023. Seminar dihadiri negara anggota C-24 maupun negara *observer*, n*onself-governing territories* (NSGTs), organisasi regional dan para *experts*. Seminar bertemakan "Innovative steps to ensure Sustainable Development Goals attainment in the NSGTs", dan dipimpin oleh Wakil Tetap St Lucia di New York selaku *Chair* Komite C-24. Seminar dibuka dengan *video message* dari Sekretaris Jenderal PBB dan Menteri Luar Negeri RI.

04 Pertemuan ke-12 COVAX Advance Market Commitment Engagement Group (AMC EG)

Virtual, 30 Mei 2023

Pertemuan ke-12 COVAX AMC EG dipimpin oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral selaku *Alternate Co-Chair*. Indonesia menyampaikan bahwa meskipun WHO sudah mencabut status *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC), ancaman pandemi di masa depan akan tetap ada. Penguatan arsitektur kesehatan global, peningkatan solidaritas dan kolaborasi global, serta ketersediaan vaksin yang merata tetap menjadi prioritas.

05 Pertemuan Luar Biasa Tingkat Menteri Luar Negeri (KTM LB) ke-18 OKI

Virtual, 31 Juli 2023

Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri (KTM) Luar Biasa ke-18 OKI diselenggarakan pada 31 Juli 2023 secara virtual. Pertemuan merupakan respon dari tindakan pembakaran Al-Quran di Denmark dan Swedia. Dalam *national statement*, Menlu RI sampaikan rekomendasi terkait penekanan untuk cegah berulangnya aksi pembakaran Al-Qur'an, kesatuan Dunia Islam hadapi Islamofobia melalui optimalisasi fora multilateral, kewajiban OKI untuk tetap berikan perhatian pada isu Palestina untuk lindungi Al-Quds Al-Sharif serta capai proses perdamaian.

06 Penyelenggaraan Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD)

Jakarta, 29-31 Agustus 2023

Indonesia telah menyelenggarakan Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) di Jakarta, 29–31 Agustus 2023. Kegiatan merupakan inisiatif Indonesia dalam mengimplementasikan Resolusi DHAM PBB 16/18 tentang "Combating intolerance, negative stereotyping and stigmatisation of, and discrimination, incitement to violence, and violence against persons based on religion or belief". Kegiatan dibuka oleh Menko Bidang PMK, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Agama, serta ditutup oleh Kepala Staf Kepresidenan.

Kegiatan Menghadirkan Wakil Presiden Dewan HAM PBB (dijabat oleh Watap Gambia di Jenewa) sebagai pembicara utama dan 12 Kepala PNA sebagai narasumber Sesi Panel. Kegiatan telah menghasilkan dokumen *Convenor's Note* sebagai kesimpulan dan rekomendasi aksi ke depan.

07 Penyelenggaraan MIKTA Leaders Gathering

9 September 2023

Disela-sela KTT G20, Presiden RI Memimpin Pertemuan Negara Meksiko, Korea Selatan, Turki, dan Australia (MIKTA) Leaders Gathering pada 9 September 2023.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden RI menekankan bahwa tantangan global yang sangat rumit pada saat ini harus dihadapi dengan kolaborasi dan kerja sama antarnegara. Pertemuan berhasil menghasilkan *Joint Press Statement* yang menunjukkan komitmen MIKTA untuk berperan aktif membangun rasa saling percaya, memajukan demokrasi dan dialog, serta mempertahankan sistem multilateral.

08 SDG Summit

New York,
18–19 September 2023

Dalam national statement, Indonesia mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi negara berkembang untuk tumbuh dan membuat lompatan pembangunan serta mendorong dihentikannya diskriminasi perdagangan dan agar negara berkembang diberikan kesempatan untuk melakukan hilirisasi industri. Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia mendorong agar ASEAN dapat menjadi *hub* kawasan untuk *electric vehicles*, berperan besar dalam rantai pasok global, mendorong pembangunan hijau, dan menjadikan kawasan sebagai pusat.

09 MIKTA Foreign Ministers' Meeting

New York,
23 September 2023

Indonesia menyampaikan MIKTA perlu menjadi yang terdepan dalam menyuarakan reformasi multilateralisme yang lebih inklusif dan setara, mendorong hak membangun bagi semua negara dan menciptakan ekonomi global yang lebih tangguh dan kuat. Menyikapi dunia yang semakin terpolarisasi, MIKTA perlu berperan sebagai *positive force* dan *bridge builder*. Kesepakatan para Menlu telah dirangkumkan dalam dokumen *Key Takeaways* yang menjadi hasil dari pertemuan dimaksud.

10 **Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026**

New York, 10 Oktober 2023

Indonesia terpilih sebagai Anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026. Indonesia memperoleh 186 suara, tertinggi dari seluruh kandidat Dewan HAM periode 2024-2026 lainnya.

11 **Sesi ke-31 Committee on Development and Intellectual Property (CDIP-31) WIPO dan Side Event MIKTA "IP & Climate Change: Opportunities & Challenges"**

Jenewa, 27 November – 1 Desember 2023

Indonesia telah berpartisipasi aktif pada pertemuan CDIP-31 yang membahas mengenai implementasi Agenda Pembangunan WIPO. Sebagai Ketua MIKTA, Indonesia menginisiasi dan mengkoordinasikan perumusan *Joint Statement* MIKTA pada Mata Agenda 6: Intellectual Property and Development. Indonesia juga bekerja sama dengan negara-negara MIKTA dan Sekretariat WIPO mengadakan *Side Event* "IP & Climate Change: Opportunities & Challenges" yang membahas sejumlah topik, diantaranya, solusi teknologi hijau, transportasi hijau, pertanian dan sektor pariwisata.

Proyeksi Ke Depan

Mempertimbangkan kondisi saat ini, kedepannya akan dilakukan sejumlah langkah guna mencapai target kinerja dengan mengembangkan kemitraan ekonomi dan meningkatkan peran Indonesia dalam forum-forum internasional. Seiring dengan berbagai proyeksi mengenai krisis ekonomi pada tahun-tahun ke depan, Kemenlu optimis bahwa pelaksanaan diplomasi Indonesia terutama pada kepemimpinan Indonesia yang efektif dapat terus dilaksanakan.

Kemenlu terus berupaya untuk meningkatkan peran kepemimpinan Indonesia di berbagai di berbagai forum kerja sama dan berperan aktif dalam membentuk isu-isu global dan regional yang semakin kompleks.

Kawasan Aspasaf

01. Menyelenggarakan High Level Strategic Dialogue Bandung Spirit Reborn

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai kegiatan awal menuju perayaan 70 Tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di tahun 2025, di mana Indonesia berperan sebagai tuan rumah. Tujuan dari kegiatan ini yakni untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi di antara negara Asia dan Afrika dalam menjaga resiliensi di tengah-tengah berbagai tantangan global dengan mengkaji ulang capaian, tantangan, dan rencana ke depan dari Dasasila Bandung. Pertemuan ini juga akan membahas tindak lanjut kerja sama New Asian African Strategic Partnership (NAASP) di antara negara-negara Asia dan Afrika.

02. Menyelenggarakan IORA Working Group on the Blue Economy (WGBE) di Indonesia

Pertemuan ini merupakan komitmen Indonesia selaku *Coordinating Country* area kerja sama lintas sektoral *Blue Economy* sesuai mandat Jakarta Concord dan IORA Action Plan, untuk mengajak negara-negara anggota IORA dalam melakukan *sharing of best practices*.

03. Menyelenggarakan IORA International Conference on IUU Fishing di Indonesia

Penyelenggaraan IORA International Conference on IUU Fishing pada tahun 2024 di Bali merupakan komitmen Indonesia pada PTM IORA ke-22 di Bangladesh, pada bulan November 2022. Pertemuan bertujuan untuk mengimplementasi IORA Guideline on the IUU Fishing yang telah disusun bersama melalui peran aktif Indonesia dan Prancis sebagai promotor utama, dengan *potential deliverables* disepakatinya *draft joint action plan/work plan* tindak lanjut IORA Guideline on IUU Fishing oleh negara-negara IORA.

04. Menyelenggarakan Jaring Masukan Kepentingan Nasional Indonesia di IORA

Dalam rangka memaksimalkan peran, kontribusi, dan kepemimpinan Indonesia dalam IORA, serta menjalankan IORA Action Plan 2022-2026 yang merupakan peluang bagi Indonesia untuk mengarahkan kerja sama IORA ke depannya sesuai dengan kepentingan nasional. Kegiatan sarasehan akan dilaksanakan untuk mengidentifikasi kepentingan tantangan dan peluang Indonesia terkait dengan kerja sama regional IORA merumuskan strategi Indonesia guna meraih *impact* yang maksimal di IORA, serta mengidentifikasi program konkret yang dapat Indonesia usulkan pada IORA. Pada pertemuan juga akan posisi Indonesia pada Bi-Annual CSO dan Rangkaian COM IORA.

> Kemenlu optimis bahwa pelaksanaan diplomasi Indonesia terutama pada kepemimpinan Indonesia yang efektif dapat terus dilaksanakan

Kawasan Amerop

01. Menyelenggarakan 8th Political Dialogue (PD), Bali, September 2024

Seiring dengan semakin meningkatnya profil Indonesia dalam upaya perdamaian dunia dan peningkatan hubungan kerja sama Indonesia-UE di bidang politik dan keamanan, diperlukan suatu forum dialog reguler yang khusus membahas mengenai isu-isu politis pada tingkat pejabat tinggi. Political Dialogue ini merupakan kelanjutan dari dialog sebelumnya yang telah diselenggarakan secara bergantian di Brussel, Belgia, dan Indonesia. Indonesia akan bertindak selaku Co-Chair dan bersama-sama membahas mengenai tantangan serta potensi dan peluang kerja sama kedua pihak baik di tingkat bilateral, regional, maupun internasional. Pertemuan akan membahas hal-hal yang meliputi kontra terorisme, non-proliferasi, peacekeeping operation, serta isu politik dan keamanan lain yang menjadi kepentingan bersama.

02. Menyelenggarakan Security Policy Dialogue (SPD) RI – UE, Bali, September 2024

Indonesia-EU Security Policy Dialogue merupakan dialog reguler Indonesia-UE yang bertujuan untuk berdialog dan berkonsultasi membahas isu-isu strategis di kawasan serta kerja sama strategis konkret yang berkaitan dengan terorisme, keamanan maritim dan *transnational organised crime* yang meliputi perdagangan narkotika, kejahatan keuangan dan kejahatan lainnya. Program kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan peran dan kontribusi Indonesia bagi upaya menjaga perdamaian dan stabilitas dunia utamanya melalui peningkatan kepemimpinan Indonesia sebagai mitra strategis bagi Kawasan Uni Eropa.

03. Menyelenggarakan Pertemuan Ke-2 SUB Committee Meeting on Cooperation and Capacity Building (CCB) & Joint Committee I-EFTA CEPA, Swiss, Desember 2024

Pertemuan *SUB Committee* dan *Joint Committee* merupakan mandat dari I-EFTA CEPA yang mulai berlaku pada 1 November 2021. Pertemuan *SUB Committee* antara lain bertujuan untuk membahas implementasi Bab CCB, mengidentifikasi proposal implementasi program, serta bertukar informasi terkait progress CCB program. Di sisi lain, pertemuan *Joint Committee* antara lain bertujuan untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi implementasi Perjanjian I-EFTA CEPA. Pada pertemuan tersebut, Indonesia akan bertindak selaku *Co-Chair.*

Forum Kerja Sama ASEAN

01. Menyusun rencana anggaran yang *prudent* serta perancangan *output* dan *outcome*

Menyusun rencana anggaran yang *prudent* serta perancangan *output* dan *outcome* yang mempunyai dampak positif bagi pembangunan Komunitas ASEAN yang lebih sejahtera dan terintegrasi, sebagai upaya untuk mengoptimalkan peran Indonesia di 2024.

02. Memperkuat Kepemimpinan Indonesia Melalui Berbagai Prakarsa dan Rekomendasi

Memperkuat kepemimpinan Indonesia melalui berbagai Prakarsa dan rekomendasi yang konstruktif, sehingga ASEAN dapat lebih berkontribusi bagi terwujudnya perdamaian dan kemakmuran di kawasan dan dunia.

03. Mendorong Tindak Lanjut dan Implementasi dari Capaian Keketuaan ASEAN 2023 di Masing-Masing Pilar ASEAN

Mendorong tindak lanjut dan implementasi dari capaian keketuaan ASEAN 2023 di masing-masing pilar ASEAN, serta secara aktif berkontribusi pada tiap pertemuan pada isu-isu prioritas Indonesia. Kemenlu juga akan mendorong kontribusi aktif kementerian teknis/*focal point* badan sektor nasional dan mitra lainnya dalam penyusunan dokumen terkait ASEAN Vision 2045, melalui forum koordinasi yang lebih intensif dan kerja sama yang lebih erat.

04. Mendorong dan Menyampaikan Pandangan yang Fokus pada Kerja Sama dan Dialog

Mendorong dan menyampaikan pandangan yang fokus pada kerja sama dan dialog serta mengedepankan AOIP untuk meredakan ketegangan di kawasan.

05. Peningkatan Sinergi Ketiga Pilar Masyarakat ASEAN di Lingkungan K/L Indonesia

Memastikan capaian Indonesia yang maksimal melalui peningkatan sinergi ketiga Pilar Masyarakat ASEAN di lingkungan K/L Indonesia perlu ditingkatkan, utama aspek koordinasi lintas pilar dan lintas sektor.

06. Tindaklanjut Keputusan yang Telah Disepakati Sebagai Jalan Tengah dari Berbagai Isu

Keputusan yang telah disepakati sebagai jalan tengah dari berbagai isu yang masih berseberangan akan ditindaklanjuti oleh Indonesia di Tahun 2024. Indonesia akan membuat berbagai modalitas dan *paper* yang akan menjadi dasar pembahasan kemajuan isu-isu penting dan memastikan keberlanjutan komitmen yang telah dicapai di Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Dalam mencapai kesinambungan tersebut, Indonesia juga akan mendukung dan berkoordinasi erat dengan Laos selaku Ketua ASEAN 2024 dalam mendorong keberlanjutan prioritas dan deliverables Indonesia pada berbagai isu kerja sama ASEAN di masing-masing pilar, yaitu politik-keamanan, ekonomi, sosial budaya, dan kerja sama dengan negara mitra.

Forum Multilateral

01. Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM 2023-2024

Kemenlu akan mengoptimalkan keanggotaan di Dewan HAM untuk melanjutkan peran kepemimpinan Indonesia dalam diplomasi HAM, melindungi kepentingan nasional, dan partisipasi dalam *norm-making* di Dewan HAM.

02. Partisipasi dalam Isu Kesehatan pada Pandemic Treaty dan Amendments to the International Health Regulations serta pemanfaatan Pandemic Fund

Di bawah kerangka WHO, pada tahun 2024, Indonesia akan mewujudkan komitmen ini melalui partisipasi pada pertemuan ke-8 Intergovernmental Negotiating Body (INB) pada 19 Februari-1 Maret 2024 dan Pertemuan ke-9 INB pada 18-29 Maret 2024 di Jenewa, Swiss yang membahas draft WHO Pandemic Agreement; serta pada Working Group on the Amendments to the 2005 International Health Regulations (WGIHR) ke-7 pada 5-9 Februari 2024 dan WGIHR ke-8 pada 2-26 April 2024 untuk tingkatkan relevansi IHR terhadap ancaman kesehatan di masa depan. Hasil dari kedua proses ini ditargetkan untuk dapat dilaporkan dan diterima oleh seluruh Negara Anggota WHO pada World Health Assembly ke-77 pada 27 Mei-1 Juni 2024.

03. Partisipasi dalam Isu Palestina pada KTT GNB dan KTT Global South di Kampala, Uganda 15-23 Januari 2024, KTT OKI di Banjul, Gambia 30 April – 5 Mei 2024

Di tahun 2024, Indonesia berkomitmen untuk terus melanjutkan diplomasi untuk mendukung kemerdekaan Palestina melalui fora multilateral, termasuk di antaranya dalam Rangkaian KTT ke-19 GNB pada 15-20 Januari 2024 di Kampala, Uganda; G77 3rd South Summit pada 21-22 Januari 2024 di Kampala, Uganda; dan KTT ke-15 OKI, di Banjul, Gambia, pada 30 April-5 Mei 2024. Ketiga forum di atas menggarisbawahi perjuangan kolektif negara-negara berkembang untuk mencapai kemerdekaan, keadilan, kesetaraan, dan pembangunan, yang selaras dengan prinsip Indonesia dalam mengedepankan usaha-usaha untuk kemerdekaan dan pengakuan bagi Palestina.

04. Misi Perdamaian PBB, New York, 19 Februari – 15 Maret 2024

Mempertahankan posisi Indonesia sebagai 10 besar negara pengirim pasukan terbesar salah satunya melalui Partisipasi aktif di Sidang C-34, salah satunya pada sesi SUBstantif.

05. Partisipasi dalam Isu Perdagangan pada KTM WTO Ke-13, Uni Emirat Arab, 26-29 Februari 2024

Peran aktif dalam berbagai isu perdagangan yang menjadi kepentingan nasional melalui KTM WTO ke-13 di tahun 2024.

06. Menjadi Tuan Rumah World Water Forum, Bali, 18-24 Mei 2024

Kemenlu akan mendukung kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah World Water Forum ke 10, termasuk dalam memastikan dihasilkannya *outcome document* dan *concrete deliverables*.

07. Partisipasi pada Penyelenggaraan KTT Kemitraan Multi-Pihak Jawa Tengah, Juli 2024

Peran aktif dalam mendorong upaya global untuk pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), salah satunya adalah melalui penyelenggaraan KTT Kemitraan Multi-Pihak yang akan diselenggarakan di Jawa Tengah, Juli 2024.

08. Mengikuti Summit of the Future, New York, September 2024

Peran aktif Indonesia dalam negosiasi Pact for the Future dan pelaksanaan Summit of the Future.

09. Partisipasi dalam Isu Kemanusiaan pada Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction, 14-17 Oktober 2024, Manila, Filipina

Penguatan peran kepemimpinan Indonesia dalam berbagai agenda Pengurangan Risiko Bencana (DRR) salah satunya melalui Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction.

Dokumentasi Kepemimpinan Indonesia pada Forum Regional Wilayah Aspasaf

Gambar III.12
High-Level Strategic Dialogue on IORA's 25-Years - Reflection, Review & Renewal
(Mauritius, 20-22 Juni 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.13
The Third Meeting of IORA Core Group on Fisheries Management (CGFM)
(Karawaci, 12 September 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.14
APEC Workshop on Promoting Creative Industries in the Aftermath of COVID-19
(Bali, 16-17 Oktober 2023)
Sumber: Kemenlu

Dokumentasi Kepemimpinan Indonesia pada Forum Regional Wilayah Amerop

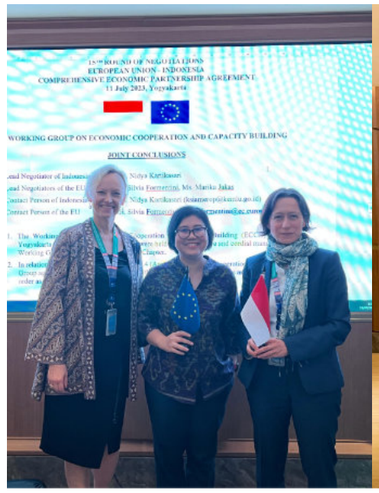

Gambar III.15
Perundingan Putaran ke-15 I-EU CEPA untuk Working Group on Economic Cooperation and Capacity Building (ECCB)
(Yogyakarta, 11 Juli 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.16
Rangkaian Pertemuan ASEF Finance & Audit Committee (FAC), Executive Committee (ExCo), dan 44th ASEF Board of Governors' Meeting (ASEFBoG44)
(Barcelona dan Madrid, 3-10 Juli 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.17
7th Indonesia-EU Joint Committee
(Brussel, 29 September 2023)
Sumber: Kemenlu

Dokumentasi Kepemimpinan Indonesia pada Forum Multilateral

Gambar III.18
Penyelenggaraan Seminar Regional Pasifik Komite Dekolonisasi (C-24) Tahun 2023
(Indonesia, 24-26 Mei 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.19
Penyelenggaraan the 4th Meeting of the Parties to the Port State Measures Agreement (MOP4 PSMA) FAO
(Bali, Indonesia, 8-12 Mei 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.20
MIKTA Leaders Gathering
(India, 9 September 2023)
Sumber: BPMI Sekretariat Presiden/Laily Rachev

Dokumentasi Prakarsa dan Rekomendasi Indonesia yang Diterima dalam Pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri Asean dan Multilateral

Gambar III.21
ASEAN Foreign Ministers' Retreat
(Jakarta, 4 Februari 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.22
Bali Process Ministerial Conference (BPMC) ke-8
(Adelaide, Australia, 8-10 Februari 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.23
ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council ke-29
(Bali, 8 Mei 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.24
Rangkaian KTT ASEAN ke-42
(Labuan Bajo, NTT, 10-11 Mei 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.25
Council of Palm Oil Producing Countries (CPOC)
Ministerial Meeting ke-11
(Kuala Lumpur, Malaysia, 16-17 Mei 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.26
Pertemuan Luar Biasa Tingkat Menteri Luar Negeri (KTM LB) ke-18 OKI
(Virtual, 31 Juli 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.27
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43
dan KTT Terkait Lainnya
(Jakarta, 5-7 September 2023)
Sumber: Kemenlu

Sasaran Strategis (SS) S3 :

Integritas Kedaulatan NKRI dan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional yang Meningkat

Dalam upaya menjaga integritas kedaulatan NKRI, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia melaksanakan perundingan penetapan batas maritim, penegasan batas darat, serta penanganan isu kelautan, darat, udara dan antariksa sebagai manifestasi politik luar negeri bebas aktif. Integritas kedaulatan NKRI merupakan kondisi kesatuan dan keteguhan NKRI yang tidak tergoyahkan dan menjadi salah satu isu prioritas yang menjadi tanggung jawab Kemenlu.

Penetapan batas maritim merupakan bagian penting dalam menjaga integritas NKRI, termasuk penegakan kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di laut. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki laut yang berbatasan dengan 10 negara tetangga, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor-Leste.

Penetapan batas maritim menjadi penting untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Indonesia dalam menjalankan hak-hak dan kewajibannya di laut yang meliputi aspek pertahanan dan keamanan, serta ekonomi dan sosial budaya. Dengan diperolehnya kepastian hukum tersebut, maka Indonesia dapat melakukan penegakkan hukum, pemanfaatan potensi perikanan, wisata bahari, eksplorasi lepas pantai (*offshore*), serta transportasi laut. Batas maritim Republik Indonesia dengan negara tetangga mencakup batas laut wilayah (*Territorial Sea*), batas perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan batas Landas Kontinen.

Sementara itu, citra positif Indonesia berkaitan dengan identitas nasional yang digunakan sebagai aset yang dapat dikelola dan digunakan dalam hal strategis sehingga tidak dapat dipisahkan dari konsep kedaulatan.

Citra adalah persepsi yang dipercaya/diyakini masyarakat Internasional terhadap Indonesia yang didasarkan kepada pola perilaku yang ditunjukkan Indonesia dan merupakan salah satu dampak akhir yang terbentuk dari suatu usaha diplomasi ataupun kebijakan luar negeri yang diambil. Peningkatan citra positif merupakan salah satu tujuan utama dari kegiatan diplomasi yang diselenggarakan oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap citra diantaranya isu-isu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itulah isu-isu tersebut harus dapat dikelola dengan baik oleh Indonesia. Pemanfaatan aset-aset Indonesia dapat meningkatkan daya tarik Indonesia di mata masyarakat internasional sehingga masyarakat internasional mendukung perwujudan kepentingan-kepentingan nasional Indonesia.

Indikator Kinerja Utama Kemenlu yang termasuk ke dalam Sasaran Strategis (SS) S3 Integritas Kedaulatan NKRI dan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional yang Meningkat, juga turut mendukung pencapaian nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Kemenlu berkontribusi atas pencapaian PN 7, yaitu "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik".

Selain itu, indikator SS S3 tersebut juga tertuang dalam Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia yang disusun untuk menyinergikan program dan kegiatan pembangunan kelautan K/L supaya dapat mewujudkan Poros Maritim Dunia. Renaksi tersebut secara rutin dilaporkan dan dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

SS "Integritas Kedaulatan NKRI dan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional yang Meningkat" diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut:

IKU 1
Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim

IKU 2
Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional

> "Citra positif Indonesia berkaitan dengan identitas nasional yang digunakan sebagai aset yang dapat dikelola dan digunakan dalam hal strategis sehingga tidak dapat dipisahkan dari konsep kedaulatan

Analisis IKU S3.1

Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim

Deskripsi IKU

Indeks adalah satuan hasil dari penghitungan proses perundingan penyelesaian perbatasan maritim berdasarkan Titik Realisasi mistar perbandingan internasional, dan angka bobot kesulitan per segmen untuk setiap negara. Kemudian, untuk memperoleh Indeks Target digunakan Titik Target mistar Perjanjian Internasional, dan angka bobot kesulitan per segmen untuk setiap negara.

Kemajuan Perundingan Batas Maritim digambarkan melalui perkembangan tahapan perundingan yang telah dilalui berdasarkan mistar Perjanjian Internasional dengan rentang nilai dari 0 s.d. 300. Tahapan yang diukur yaitu tahap penjajakan, tahap perundingan, tahap perumusan naskah, tahap penerimaan naskah, tahap penandatanganan perjanjian, tahap ratifikasi, dan tahap pemberlakuan perjanjian.

Masing-masing segmen batas maritim yang perlu ditetapkan memiliki skala kesulitan atau bobot yang berbeda. Bobot per segmen dihitung berdasarkan skala kesulitan dari 1–10 untuk masing-masing segmen perundingan batas maritim dari tiap negara mitra dimana semakin kecil skala maka segmen tersebut semakin sulit dan kompleks.

Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim (PBM) pertama kali digunakan pada tahun 2020 menggantikan pengukuran melalui persentase kemajuan PBM. Formulasi ini digunakan untuk merefleksikan secara riil kemajuan proses PBM yang dinamis.

Mistar Perjanjian Internasional

Titik Target
Adalah proyeksi titik akhir yang hendak dicapai dalam proses perundingan batas maritim di tahun anggaran berjalan.

Titik Realisasi
Adalah capaian riil yang diperoleh oleh Indonesia di akhir tahun anggaran berjalan dan menjadi referensi untuk tahun anggaran kedepannya.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dalam kaitan ini, pelaksanaan perundingan penetapan batas maritim, penegasan batas darat serta penanganan isu kelautan, darat, udara dan antariksa merupakan manifestasi politik luar negeri bebas aktif dalam upaya mengamankan kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim khususnya terkait dengan batas negara, kedaulatan dan sumber daya alam. Sebagai bagian dari Nawa Cita Presiden Joko Widodo, isu maritim dan perbatasan menjadi salah satu isu prioritas yang menjadi tanggung jawab Kemenlu, sehingga Indonesia akan menonjolkan karakter sebagai negara maritim dalam diplomasi dan kebijakan politik luar negerinya.

IKU ini bertujuan untuk mengukur kinerja Kemenlu terkait perundingan batas maritim yang merupakan Proyek Prioritas Nasional (ProPN) dalam mendukung capaian Kegiatan Prioritas 1 "Penguatan Integritas NKRI dan Pelindungan WNI di Luar Negeri" pada Prioritas Nasional Ke-7 (PN 7) "Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik". Dalam mengukur kemajuan PBM, Kemenlu menggunakan mistar perjanjian internasional yang kemudian dikonversi menjadi Indeks PBM.

Untuk menghitung kemajuan penyelesaian batas maritim pada tahun berjalan, Kemenlu menggunakan perhitungan terukur secara internal. Kemenlu menjumlahkan seluruh perhitungan formulasi dengan melihat perkembangan perundingan setiap negara. Perhitungan formulasi setiap negara dilakukan berdasarkan capaian perundingan pada tahun berjalan.

Perhitungan IKU Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim menggunakan formula sebagai berikut:

Penjumlahan seluruh indeks yang diperoleh pada masing-masing negara mitra

> "Penanganan isu kelautan, darat, udara dan antariksa merupakan manifestasi politik luar negeri bebas aktif

Informasi Kinerja

Tabel III.25
Capaian IKU S3.1 Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim

Sumber: AKSI Kemenlu

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Nilai Realisasi SUB IKU	Nilai Bobot
Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim	Penjumlahan seluruh indeks yang diperoleh pada masing-masing negara mitra	**4,96**	**3,47**

Target	Realisasi	Capaian
49,99	50,96	101,94%

Sesuai dengan kinerja Kemenlu pada IKU S3.1 TA 2023, capaian Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim dihitung menggunakan perhitungan terukur secara internal terhadap kemajuan perundingan dengan masing-masing negara tetangga. Kemenlu kemudian akan menjumlahkan seluruh angka kemajuan perundingan untuk memperoleh angka akhir Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim.

Pada tanggal 25 Januari 2023, Kemenlu menambahkan mistar perjanjian internasional yang dikhususkan untuk menghitung kemajuan perundingan *Implementing Arrangement* RI-Vietnam, yang merupakan bagian dari kelanjutan perundingan batas maritim RI-Vietnam yang telah disepakati tanggal 23 Desember 2022. Penambahan penghitungan kemajuan perundingan IA RI-Vietnam berdampak pada kenaikan target Indeks PBM untuk TA 2023, yang sebelumnya ditetapkan sebesar 47,99 menjadi 49,99.

Berdasarkan hasil perundingan dengan negara-negara mitra di tahun 2023, diperoleh realisasi sebesar 50,96 atau tercapai 101,94%.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.26
Target, Realisasi, dan Capaian IKU Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim

Kode IKU/ SUB IKU		2020	2021	2022	2023
S3.1	Target	45,03	47,17 ↑	46,32 ↓	**49,99** ↑
	Realisasi	43,70	44,58 ↑	46,84 ↑	**50,96** ↑
	Capaian	97,04%	94,50% ↓	101,12% ↑	**101,94%** ↑

Pada periode awal Renstra, ditetapkan bahwa target Indeks di tahun 2020-2023 secara berurutan adalah 45,03; 49,64; 55,93; dan 56,87. Namun, adanya pandemi COVID-19 tidak memungkinkan pelaksanaan perundingan secara tatap muka dan akhirnya menghambat kelanjutan perundingan. Karenanya, Kemenlu mengkaji ulang IKU sehingga sejak tahun 2021 target disesuaikan menjadi 47,17; 46,32; dan 47,99. Target pada tahun 2023 pun kembali disesuaikan menjadi 49,99 dengan pertimbangan terdapat kemajuan perundingan.

Berdasarkan realisasi Indeks PBM pada tahun 2023, terdapat peningkatan sebesar 4,12 poin yang berhasil melampaui kenaikan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2023, Kemenlu, sebagai Tim Teknis Penetapan Batas maritim berhasil menyepakati 2 (dua) perjanjian batas laut wilayah di Laut Sulawesi dan di Selat Malaka bagian Selatan dengan Malaysia. Keberhasilan ini didukung oleh kondusifnya kondisi internal dan eksternal dalam proses perundingan, kerja sama yang solid di Tim Teknis Batas Maritim Indonesia dan dukungan dari pimpinan kedua negara.

8 **Pertemuan dengan Malaysia**
(Laut Wilayah, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen)

4 **Pertemuan dengan Vietnam**
(*Implementing Arrangement* Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen)

3 **Pertemuan dengan Palau**
(Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen)

1 **Pertemuan dengan Filipina**
(Landas Kontinen)

Capaian Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim berhasil meningkat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, Kemenlu memperoleh capaian sebesar 101,94% melalui 16 perundingan dan 2 penandatanganan perjanjian internasional dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.27
Rincian Capaian Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim

Negara	Rincian
Malaysia	Dengan Malaysia, pada tanggal 8 Juni 2023, Menlu kedua negara telah menandatangani 2 (dua) Perjanjian, yaitu Perjanjian Batas Laut Wilayah di segmen Laut Sulawesi, dan Perjanjian Batas Laut Wilayah di segmen Selat Malaka bagian Selatan setelah 18 tahun perundingan. Penandatanganan tersebut diumumkan melalui *Joint Statement* Presiden RI dan Perdana Menteri Malaysia, dan saat ini sedang ditindaklanjuti sesuai prosedur internal/ domestik masing-masing negara. Sementara pertemuan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Rangkaian Pertemuan Tim Teknis PBM RI dan Malaysia, Virtual (26 Mei, 29 Mei, 1 Juni 2023), Kuala Lumpur (5 Juni 2023), dan Putrajaya (6 Juni 2023). b. Pertemuan Teknis ke-40 Penetapan Batas Maritim RI-Malaysia, Melaka, Malaysia, 20-22 Juli 2023. c. Special Technical Meeting (STM) ke-1 Penyelesaian Area *Intertidal* dan *Gap* di Laut Sulawesi RI-Malaysia, Bandung, Indonesia, 1 September 2023. d. Pertemuan Special Intersessional Technical Working Group (ITWG) mengenai Transformasi Koordinat/Datum, Bandung, Indonesia, 5-6 September 2023. e. Pertemuan Special Technical Working Group (STWG) ke-1 Penyelesaian Area *Intertidal* dan *Gap* di Laut Sulawesi RI-Malaysia, Bandung, Indonesia, 7 September 2023. f. STM ke-2 Penyelesaian Area *Intertidal* dan *Gap* di Laut Sulawesi RI-Malaysia, Negeri Sembilan, Malaysia, 28-29 September 2023. g. Pertemuan Teknis ke-41 Penetapan Batas Maritim, Tangerang, Indonesia, 14-15 November 2023. h. STM ke-3 Penyelesaian Area Intertidal dan Gap di Laut Sulawesi RI-Malaysia, Tangerang, Indonesia, 16-17 November 2023.

Negara	Rincian
Vietnam	Setelah ditandatanganinya Perjanjian Batas ZEE pada 23 Desember 2022, kedua negara tengah melanjutkan perundingan *Implementing Arrangement* untuk mengatur implementasi hak dan kewajiban masing-masing negara sesuai dengan UNCLOS 1982 dan mandat Perjanjian Batas ZEE. Pertemuan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Pertemuan Teknis ke-18 Penetapan Batas ZEE RI-Vietnam, Bali, Indonesia, 29-31 Maret 2023. b. Pertemuan Teknis ke-1 *Implementing Arrangement* (Pengaturan Pelaksana) Area Tumpang Tindih Yurisdiksi RI-Vietnam, Da Nang, Vietnam, 10-13 Juli 2023. c. Pertemuan Konsultasi Virtual Kelompok Kerja Teknis (Technical Working Group/TWG) Pengaturan Pelaksanaan Area Tumpang Tindih Yurisdiksi ZEE dan Landas Kontinen RI-Vietnam, Virtual, 30 Agustus 2023. d. Pertemuan Teknis ke-2 *Implementing Arrangement* (Pengaturan Pelaksana) Area Tumpang Tindih Yurisdiksi RI-Vietnam, Bogor, Indonesia, 22-24 November 2023.
Palau	Dengan Palau, Tim Teknis kedua negara masih terus melakukan diskusi dan *exercise* teknis penarikan garis batas ZEE parsial kedua negara di segmen North Section A (West). Pertemuan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Preliminary Informal Meeting antara Ketua Tim Teknis PBM RI-Palau, Manila, 7 Maret 2023. b. Technical Working Group Meeting Penetapan Batas Maritim RI-Palau, Bali, Indonesia, 10-11 Mei 2023. c. Pertemuan Teknis ke-8 Penetapan Batas Maritim RI-Palau, Koror, Palau, 1-3 November 2023.
Filipina	Indonesia dan Filipina masih melanjutkan perundingan batas Landas Kontinen. Selain itu, untuk menindaklanjuti Pasal 3 Perjanjian Batas ZEE RI-Filipina yang ditandatangani pada 2014, kedua negara perlu secara bersama-sama memproduksi peta yang akan digunakan (*joint co-production of nautical chart*). Pertemuan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Informal Meeting antara TWG RI dan National Mapping and Resource Information Authority (NAMRIA) Filipina, Taguig City, Filipina, 8 Maret 2023.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Dengan intensitas perundingan yang berjalan dan adanya dukungan politis dari pimpinan tertinggi kedua negara, pada tahun 2023 Menlu Indonesia dan Malaysia telah menandatangani perjanjian batas laut wilayah di segmen Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian Selatan setelah 18 (delapan belas) tahun perundingan. Hal ini merupakan momentum penting berhasilnya diplomasi Indonesia yang dipimpin oleh Kemenlu dalam perundingan batas maritim. Selain hal tersebut, beberapa hal lainnya yang menjadi penyebab keberhasilan pencapaian IKU, diantaranya:

01

Menyelenggarakan dan Menghadiri Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim dengan Negara Tetangga Secara Efektif

Kemenlu telah menyelenggarakan dan menghadiri secara efektif perundingan penyelesaian perbatasan maritim dengan negara tetangga. Dalam proses perundingan tersebut, Kemenlu, diwakili oleh Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan sebagai Ketua Tim Teknis Batas Maritim (Tim Teknis) Indonesia, secara maksimal memberikan kontribusi baik dari segi politis/hukum maupun substansi.

Dalam proses perundingan, selalu ditekankan pentingnya para pihak yang berunding untuk melakukan *exercise*, yang dapat membangun kepercayaan kedua Tim Teknis (*confidence-building*), dan membahas *creative options* yang dapat diterima kedua pihak. Dengan berorientasi pada solusi, Tim Teknis selalu berupaya untuk memiliki opsi-opsi atau tawaran alternatif yang dapat ditawarkan kepada negara mitra.

02

Menyelenggarakan dan Menghadiri Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim dengan Negara Tetangga Secara Efektif

Perundingan batas maritim yang dapat dilaksanakan secara luring/tatap muka juga berkontribusi dalam mengurangi kendala teknis yang umumnya mengemuka kalau dilaksanakan secara daring/online.

Aspek-aspek perundingan batas maritim memerlukan pembahasan teknis secara langsung, seperti aspek kartografi dan pemetaan, lebih mudah dan efektif dilakukan secara luring.

03

Upaya Kemenlu yang Telah Dilaksanakan Secara Berkesinambungan

Secara khusus, keberhasilan dalam mencapai target perundingan penetapan batas maritim merupakan hasil dari upaya Kemenlu yang telah dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun-tahun sebelumnya. Keberhasilan ini tidak luput dari kerja sama Tim Teknis Indonesia dan upaya diplomasi yang dilaksanakan baik secara formal maupun informal.

04

Upaya Pemeliharaan *Institutional Memory*

Kemenlu telah mengupayakan pemeliharaan *institutional memory* antara Tim Teknis Penetapan Batas Maritim yang diwujudkan dalam pelaksanaan rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga teknis terkait.

05

Melaksanakan Koordinasi Aktif Secara Berkala

Selain itu, Kemenlu secara berkala melaksanakan koordinasi aktif antara staf agar memiliki distribusi pekerjaan yang merata dan kerja sama serta koordinasi yang baik, termasuk dalam melakukan riset dan penyusunan posisi untuk mendukung Indonesia dalam perundingan/pertemuan.

Kendala dan Tantangan

Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim menghasilkan progress yang sangat baik di tahun 2023, namun demikian keberhasilan perundingan tidak terlepas dari kendala dan tantangan, diantaranya:

01

Dinamika Politik Dalam Negeri Indonesia Memengaruhi Jalannya Perundingan

Dari sisi internal, dinamika politik dalam negeri Indonesia memengaruhi jalannya perundingan, seperti halnya mandat pimpinan dan prioritas untuk segera menyelesaikan perundingan penetapan batas maritim dengan negara tertentu. Menyikapi hal ini, Kemenlu dan K/L terkait perlu melakukan identifikasi untuk memprioritaskan negara-negara tertentu, menyusun strategi dan memperoleh arahan/mandat perundingan di saat yang tepat, untuk memenuhi mandat pimpinan tersebut.

02

Tantangan Eksternal

Secara eksternal, beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu:

a. Komitmen Kemenlu dalam mempercepat perundingan batas maritim perlu memperhatikan dinamika kebijakan politik dan situasi politik domestik negara mitra yang akan memengaruhi seberapa prioritas perundingan batas maritim bagi negara tersebut. Kondisi ini membuat beberapa negara mitra memiliki perbedaan pendekatan dalam mencari solusi penyelesaian perundingan batas maritimnya. Prioritas pemerintah negara mitra dalam menyelesaikan batas maritim menjadi faktor penting dari percepatan perundingan penetapan batas maritim.

b. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi dalam perundingan batas maritim tahun 2023 adalah adanya pergantian pejabat atau Ketua Tim Teknis negara mitra berpengaruh terhadap pelaksanaan pertemuan, pemahaman dalam perundingan penetapan batas maritim, serta memengaruhi komunikasi mengenai penjadwalan/pelaksanaan pertemuan.

Upaya Perbaikan

Berbagai upaya perbaikan secara internal maupun eksternal telah dilakukan untuk meningkatkan capaian pada tahun 2023, antara lain:

01

Perbaikan Internal

Secara internal, hal-hal yang telah dilaksanakan, diantaranya:

a. Meningkatkan intensitas pertemuan persiapan dengan Kementerian/ Lembaga yang menjadi anggota Tim Teknis, untuk menyusun posisi dan strategi perundingan, serta untuk tercapainya kesamaan pandangan di antara Tim Teknis Batas Maritim Indonesia.

b. Secara berkala melaporkan kepada pimpinan/Tim Penasihat/Tim Pakar mengenai perkembangan negosiasi, guna memperoleh mandat dan instruksi untuk perundingan putaran selanjutnya.

c. Mempertahankan *institutional memory* melalui pembuatan matriks posisi Indonesia dan hasil *exercise* yang diperbarui secara berkala dan pembuatan laporan pertemuan komprehensif.

02

Perbaikan Eksternal

Untuk menghadapi tantangan eksternal, hal yang dilakukan oleh Kemenlu, yaitu:

a. Menjaga komunikasi dengan Tim Teknis negara mitra. Dalam hal ini, Kemenlu menyelenggarakan sejumlah pertemuan informal dengan negara mitra sebelum perundingan guna menjaga momentum perundingan.

b. Menggunakan forum-forum bilateral untuk mendorong di tingkat politis yang lebih tinggi komitmen untuk melanjutkan perundingan, dan mempercepat proses internal negara mitra.

Analisis Program Pendukung Capaian

Dalam rangka mendukung capaian, Kemenlu melaksanakan beberapa program, diantaranya:

Rapat Koordinasi Persiapan Perundingan Batas Maritim

Menghadiri atau melaksanakan rapat koordinasi persiapan perundingan batas maritim bersama dengan Tim Teknis untuk mencapai kesamaan pemahaman posisi Indonesia pada proses perundingan. Rapat Koordinasi yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

01 Rapat Interkementerian Pembahasan *Implementing Arrangement Area* Tumpang Tindih Yurisdiksi ZEE dan Landas Kontinen (LK) RI dan Negara Tetangga

Bandung, 14-17 Juni 2023

Rapat ditujukan untuk membahas mengenai posisi Pemri pada Pertemuan Teknis ke-1 *Implementing Arrangement* (Pengaturan Pelaksana) Area Tumpang Tindih Yurisdiksi RI-Vietnam, Da Nang, Vietnam, 10-13 Juli 2023, yang merupakan bagian dari proses perundingan batas maritim ZEE.

02 Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pertemuan Tim Teknis Batas Maritim untuk Membahas IA Area Tumpang Tindih Yurisdiksi ZEE dan Landas Kontinen RI-Vietnam

Jakarta, 9 November 2023

Rapat membahas mengenai posisi Pemri pada Pertemuan Teknis ke-2 IA (Pengaturan Pelaksana) Area Tumpang Tindih Yurisdiksi RI-Vietnam, Bogor, Indonesia, 22-24 November 2023.

Partisipasi Aktif dalam Berbagai Pelatihan Hukum Internasional

Partisipasi aktif dalam berbagai pelatihan hukum internasional mengenai batas maritim, salah satunya melalui partisipasi berbagai pelatihan hukum laut internasional seperti:

01 ASEAN United Nations Training Workshop on the Law of the Sea including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang diselenggarakan oleh UN-DOALOS (United Nation Division of Ocean Affairs and the Law of the Sea) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi

Bali, 11-16 Desember 2023

Partisipasi ini penting untuk meningkatkan pengetahuan Tim Teknis, terutama terkait dengan pendalaman pemahaman seputar UNCLOS 1982 dan isu-isu kewilayahan yang berkembang, agar dapat diterapkan dalam proses perundingan. Selain itu, program yang mendukung keberhasilan adalah regenerasi Tim Teknis. Regenerasi tersebut penting untuk menjaga konsistensi posisi Indonesia selama proses perundingan batas maritim. Mengingat proses perundingan tersebut membutuhkan waktu yang lama (*long haul process*).

Proyeksi Ke Depan

Tahun 2024 diproyeksikan akan memiliki agenda pertemuan yang secara umum sama dengan tahun 2023, dengan kemungkinan penambahan intensitas perundingan, terutama antara RI-Malaysia dan dimulainya perundingan batas maritim antara Indonesia dan Timor-Leste.

Melihat kondisi dan hasil perundingan PBM di tahun 2023, Kemenlu menetapkan bahwa di Tahun Anggaran 2024 fokus kepada negara-negara prioritas yang terbagi atas 4 (empat) negara secara *interchangeable*, yaitu:

01. Vietnam

Vietnam, untuk Pelaksanaan *Technical Meeting* selanjutnya (untuk *Implementing Arrangement*).

02. Filipina

Filipina, untuk Pelaksanaan Special Meeting on the Continental Shelf Boundary Delimitation dalam kerangka Joint Permanent Working Group Meeting on Maritime Concerns (JPWG-MOC).

03. Palau

Palau untuk Pelaksanaan Pertemuan Teknis

04. Malaysia

Malaysia untuk pelaksanaan Pertemuan *Technical Working Group* dan *Technical Meeting*.

Dokumentasi Program Pendukung Capaian IKU S3.1 : Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim

Gambar III.28
Rapat Interkementerian Pembahasan *Implementing Arrangement* Area Tumpang Tindih Yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen (LK) RI dan Negara Tetangga
(Bandung, 14-17 Juni 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.29
Rakor Persiapan Pertemuan Tim Teknis Batas Maritim untuk Membahas *Implementing Arrangement* (IA) Area Tumpang Tindih Yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen (LK) RI-Vietnam
(Jakarta, 9 November 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.30
ASEAN United Nations Training Workshop on the Law of the Sea Including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea
(Bali, 11-16 Desember 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.31
Preliminary Informal Meeting Ketua Tim Teknis Penetapan Batas Maritim RI-Palau (Filipina, 7 Maret 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.32
Penandatanganan Perjanjian Batas Laut Wilayah di Segmen Selat Malaka bagian Selatan dan Laut Sulawsi RI-Malaysia (Malaysia, 8 Juni 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.33
Pelaksanaan Pertemuan Teknis ke-40 Penetapan Batas Maritim RI-Malaysia (Malaysia, 20-22 Juli 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.34
Pelaksanaan Pertemuan Teknis ke-8 Penetapan Batas Maritim RI-Palau (Palau, 1-3 November 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.35
Rapat Koordinasi Tim Teknis Penetapan Batas Maritim dengan Tim Penasehat dan Tim Pakar PBM-RI (Serpong, 23 Agustus 2023)

Sumber: Kemenlu

Analisis IKU S3.2

Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional

Deskripsi IKU

Peningkatan citra positif merupakan salah satu tujuan utama dari kegiatan diplomasi yang diselenggarakan oleh negara-negara di dunia. Terbentuknya citra positif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia dan dapat berkontribusi dalam pencapaian kepentingan nasional Indonesia dalam percaturan dunia. Dalam kaitan ini, Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional telah ditetapkan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur kinerja Kemenlu, termasuk seluruh Perwakilan RI, sejak tahun 2017.

Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional diperoleh melalui survei menggunakan kuesioner dengan Skala Likert 5 Poin yang diselenggarakan setiap tahun oleh seluruh Perwakilan RI (tidak termasuk Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Organisasi Internasional). Survei tersebut ditujukan kepada Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di negara wilayah kerja masing-masing Perwakilan RI dan dapat dilakukan secara daring maupun luring. Untuk konsolidasi data, hasil survei luring diinput oleh operator Perwakilan RI ke dalam aplikasi pengelolaan data https://citraindonesia.kemlu.go.id, yang juga terhubung dengan aplikasi survei daring.

Survei terdiri dari 3 dimensi, yaitu Dimensi Pariwisata dan Sosial-Budaya, Dimensi Ekonomi, serta Dimensi Pemerintahan dan Penegakan Hukum, di mana masing-masing dimensi memuat 3 pertanyaan. Indeks citra positif Indonesia di dunia internasional (skala 5) didapatkan dengan formula "Jumlah keseluruhan hasil survei citra positif Indonesia di dunia internasional (skala 5) dibagi 9 (sembilan) jumlah pertanyaan dan dibagi jumlah total responden".

Dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif Perwakilan RI dan efektivitas pemantauan hasil survei, periode pelaporan capaian IKU Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional pada tahun 2023 disesuaikan dari yang sebelumnya tahunan menjadi triwulanan. Adapun target jumlah minimal responden masing-masing Perwakilan RI pada tahun 2023 adalah 75 responden, lebih banyak dibandingkan target tahun-tahun sebelumnya sebanyak 50 responden.

Hasil survei tersebut akan mendukung pengukuran kinerja Kemenlu dan Perwakilan RI, serta dapat digunakan sebagai referensi dalam perbaikan program dan kegiatan di masa mendatang, khususnya terkait promosi yang berkontribusi kepada pandangan masyarakat di luar negeri terhadap Indonesia dalam berbagai aspek. Pada tahun 2023, target IKU Indeks Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional ditetapkan 3,95 pada setiap Triwulan, dengan rentang indeks 1 – 5. Kategori rentang indeks yang digunakan sebagai berikut:

Tabel III.28
Interval dan Kategori Indeks IKU S3.2

Interval	Kategori Indeks
4,21 - 5,00	Sangat Baik
3,41 - 4,20	Baik
2,61 - 3,40	Cukup
1,81 - 2,60	Kurang
1,00 - 1,80	Tidak Baik

Perhitungan IKU Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks Citra di Dunia Internasional} = \frac{\text{Total Indeks Rata-Rata Seluruh Responden}}{\text{Jumlah Total Responden}}$$

Informasi Kinerja

Tabel III.29
Capaian IKU S3.2 Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional

Sumber: AKSI Kemenlu

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	Total Indeks Rata-Rata Seluruh Responden	**79.253,44**
	Jumlah Total Responden	**19.481**

Target	Realisasi	Capaian
3,95	4,07	103,04%

Berdasarkan *database* citra, selama tahun 2023 sebanyak 19.481 responden telah mengisi Survei Citra Indonesia di Dunia Internasional, yang terdiri dari 13.233 responden survei daring dan 6.248 responden survei luring. Jumlah Perwakilan RI yang turut berpartisipasi pada tahun 2023 sebanyak 127, tidak termasuk dua kantor perwakilan yang ditutup sementara, yaitu KBRI Pyongyang dan KBRI Sana'a.

127 Total Perwakilan RI

Gambar III.36
Responden Survei Daring dan Luring pada Survei Citra Indonesia di Dunia Internasional

Target nilai Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah 3,95 (kategori "Baik"), dan terealisasi sebesar 4,07 (kategori "Baik) dengan capaian IKU 103,04%. Adapun rincian nilai indeks per dimensi sebagai berikut:

Dimensi Pariwisata dan Sosial-Budaya
4,43

Dimensi Ekonomi
3,82

Dimensi Pemerintahan dan Penegakan Hukum
3,95

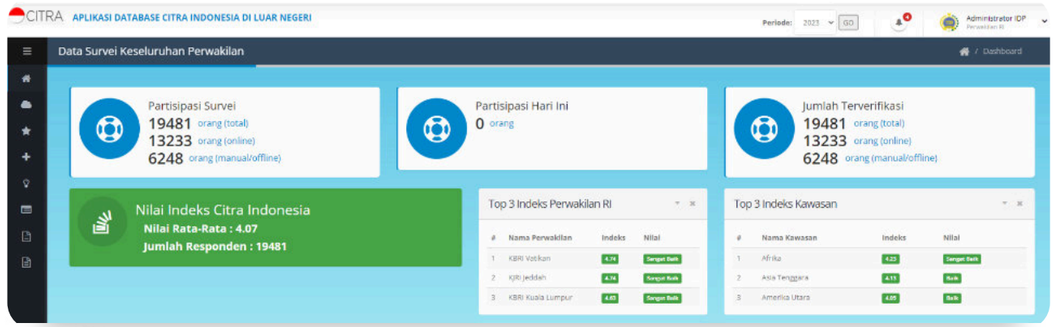

Gambar III.37
Aplikasi *Database* Citra Indonesia di Luar Negeri

> "Terbentuknya citra positif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia dan dapat berkontribusi dalam pencapaian kepentingan nasional Indonesia dalam percaturan dunia

Perbandingan Kinerja

Tabel III.30
Target, Realisasi, dan Capaian IKU Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional

Kode IKU/ SUB IKU		2020	2021	2022	2023
S3.2	Target	3,80	3,85 ↑	3,90 ↑	**3,95** ↑
	Realisasi	3,82	3,98 ↑	4,06 ↑	**4,07** ↑
	Capaian	100,53%	103,37% ↑	104,10% ↑	**103,04%** ↓

Selama periode 2020-2023, realisasi IKU Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional terus mengalami peningkatan. Realisasi selama periode 2020-2022, yaitu masing-masing: 3,82; 3,98; dan 4,06. Sedangkan realisasi pada tahun 2023 adalah 4,07, yang merupakan raihan nilai indeks tertinggi selama penyelenggaraan survei citra sejak tahun 2017.

Capaian IKU juga mengalami peningkatan selama tahun 2020-2022. Capaian tahun 2020 adalah sebesar 100,53%, meningkat menjadi 103,37% pada tahun 2021, bertambah kembali menjadi 104,10% pada tahun 2022, hingga akhirnya turun 1,06 poin menjadi 103,04% pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan adanya peningkatan target sebanyak 0,05 poin menjadi 3,95 sedangkan peningkatan realisasi dari tahun 2022 hanya sebesar 0,01 poin dari 4,06 menjadi 4,07.

Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah responden survei secara signifikan pada tahun 2023. Semakin tinggi jumlah responden maka validitas data akan semakin meningkat, namun demikian jawaban responden akan semakin beragam sehingga dapat memengaruhi perolehan nilai indeks citra.

Apabila hasil indeks citra dilihat per kawasan, maka tiga kawasan dengan hasil rata-rata capaian indeks citra paling tinggi pada periode 2023 adalah Afrika (4,23), Asia Tenggara (4,13), dan Amerika Utara (4,05).

> Realisasi IKU Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional terus mengalami peningkatan

Indeks Citra per Kawasan Tahun 2021 - 2023

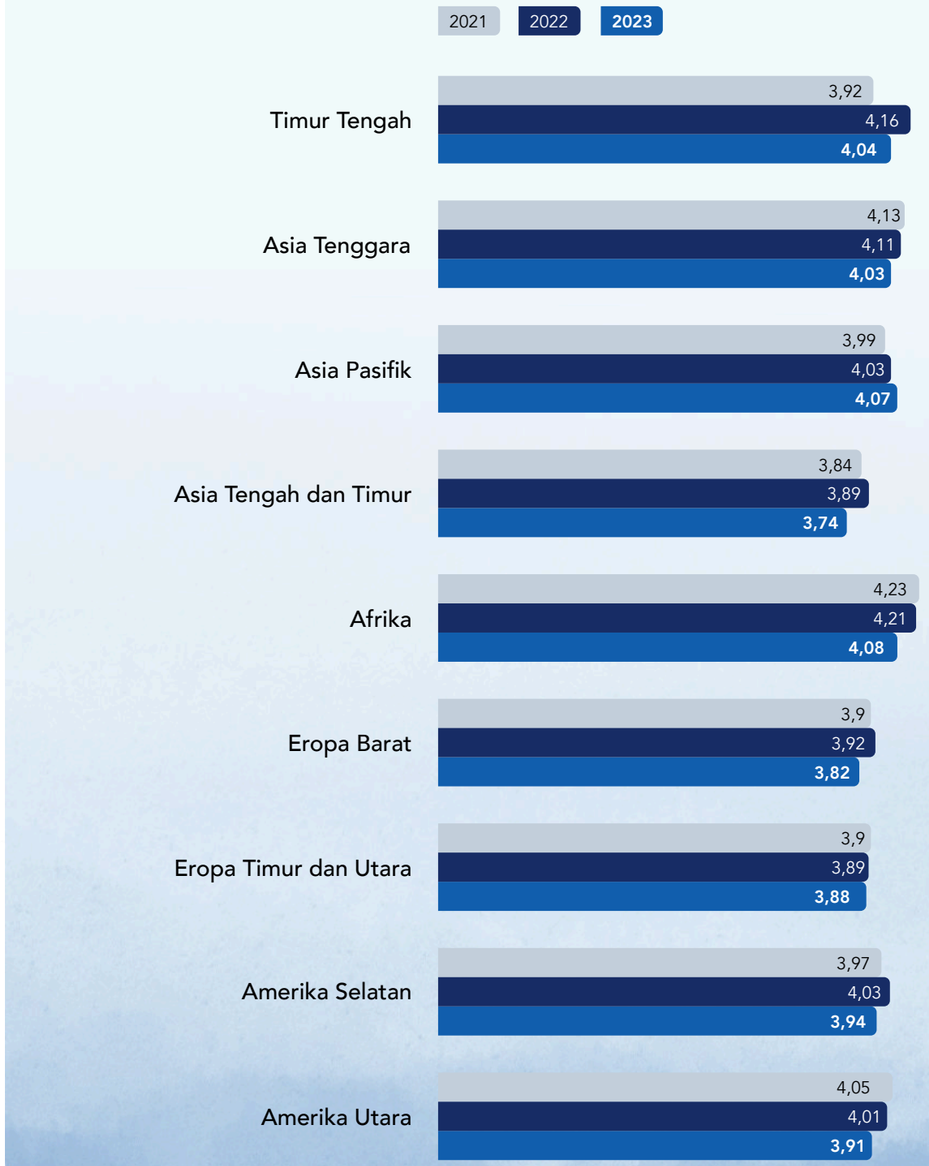

Gambar III.38
Indeks Citra per Kawasan Tahun 2021-2023

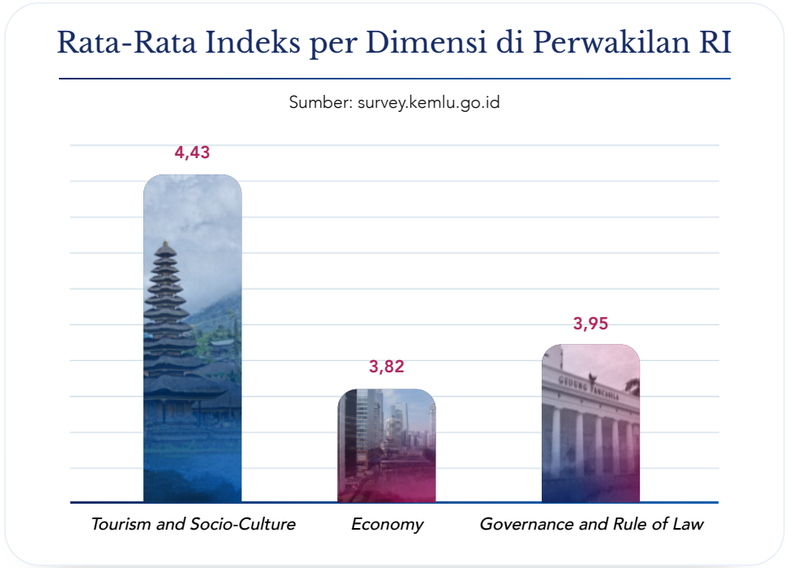

Gambar III.39
Rata-Rata Indeks per Dimensi di Perwakilan RI

Pada tahun 2023, rata-rata indeks citra tertinggi adalah pada dimensi pariwisata dan sosial budaya (*tourism and socio-culture*) dengan nilai 4,43 dan rata-rata indeks citra terendah adalah dimensi ekonomi (*economy*) dengan nilai 3,82. Selain itu, rata-rata indeks dimensi pemerintahan dan penegakan hukum (*governance and rule of law*) adalah 3,95. Raihan nilai indeks per dimensi tersebut menunjukkan bahwa kekayaan kebudayaan dan pariwisata merupakan salah satu aset terbesar Indonesia dalam peningkatan citra positif Indonesia. Sedangkan persepsi responden terhadap ekonomi Indonesia masih belum terlalu positif, khususnya dalam hal ketersediaan produk Indonesia di negara-negara akreditasi perwakilan, yang menjadi salah satu paramater dimensi ekonomi.

Responden memiliki persepsi yang lebih positif terhadap dimensi pemerintahan dan penegakan hukum dibandingkan terhadap dimensi ekonomi. Hal ini dipengaruhi oleh semakin baiknya tata kelola pemerintahan yang ditunjukkan dengan peraturan-peraturan terkait keimigrasian yang mudah dipahami oleh responden. Hal ini selaras dengan meningkatnya peringkat *Safety Perception Index* Indonesia pada tahun 2023 (82) dibandingkan dengan tahun 2022 (87) dan tahun 2021 (96), sebagaimana dikutip dari *Safety Perception Index* 2023 terbitan The Institute for Economics & Peace yang berbasis di Sydney.

Jumlah responden dan nilai indeks citra terus meningkat di setiap triwulan, terutama pada triwulan III dan IV sebagaimana diperlihatkan pada tabel III.29.

Tabel III.31
Perbandingan Total Indeks Rata-Rata Seluruh Responden, Total Responden, Kenaikan Responden, dan Indeks Citra per Triwulan

	TW I	TW II	TW III	TW IV
Total Indeks Rata-Rata Seluruh Responden	13.152,33	31.906,56	52.076,99	79.253,44
Total Responden	3.253	7.890	12.827	19.481
Jumlah Kenaikan Responden (parsial)	3.253	4.637	4.937	6.654
Nilai Indeks Citra	4,04	4,04	4,06	4,07

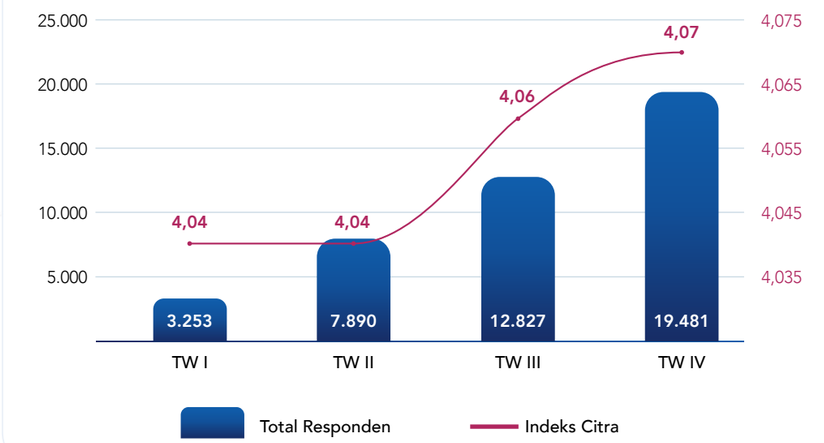

Gambar III.40
Total Indeks Rata-Rata Seluruh Responden
Dibandingkan dengan Total Responden

Jika dibandingkan dari tahun ke tahun, jumlah responden survei Citra Indonesia di Dunia Internasional mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun perbandingan jumlah responden survei pada tahun 2017–2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

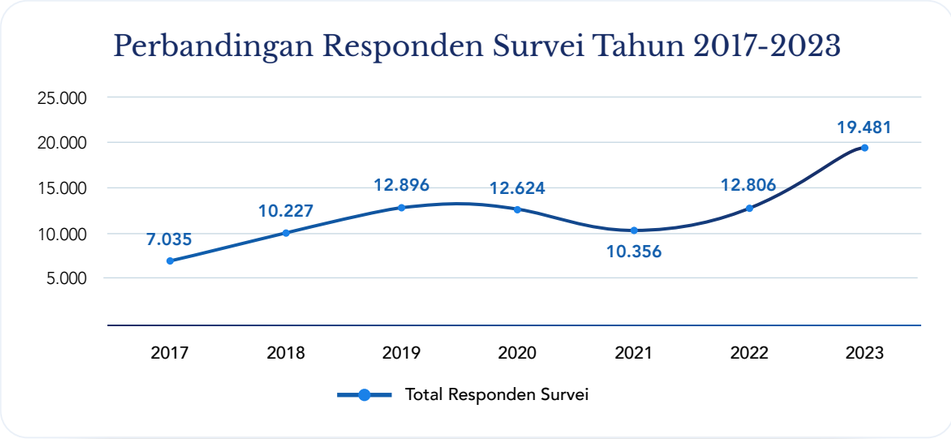

Gambar III.41
Perbandingan Responden Survei Tahun 2017-2023

Sejak tahun 2021, telah dilakukan penyederhanaan pertanyaan survei dari 6 dimensi menjadi 3 dimensi. Adapun jumlah responden tahun 2023 adalah sebesar 19.481, jauh lebih besar dibandingkan tahun 2022 dan 2021 sebanyak masing-masing 12.806 dan 10.356 responden.

Gambar III.42
Rata-Rata Indeks Citra Berdasarkan Profesi Responden

Berdasarkan data tahun 2023, responden dengan latar belakang profesi pemilik bisnis/wiraswasta dan pegawai pemerintah/militer memberikan nilai persepsi positif tertinggi terhadap citra Indonesia. Hal ini mencerminkan hubungan baik yang berhasil dibangun oleh Kemenlu dengan pemangku kepentingan terkait. Di sisi lain, diperlukan *engagement* yang lebih intensif terhadap kelompok responden yang memberikan nilai persepsi positif lebih kecil dibandingkan dengan kelompok profesi lainnya, seperti kalangan akademisi, ibu rumah tangga, dan para pensiunan.

Gambar III.43
Rata-Rata Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional Berdasarkan Riwayat Perjalanan ke Indonesia dan Tingkat Pengenalan Responden Mengenai Indonesia

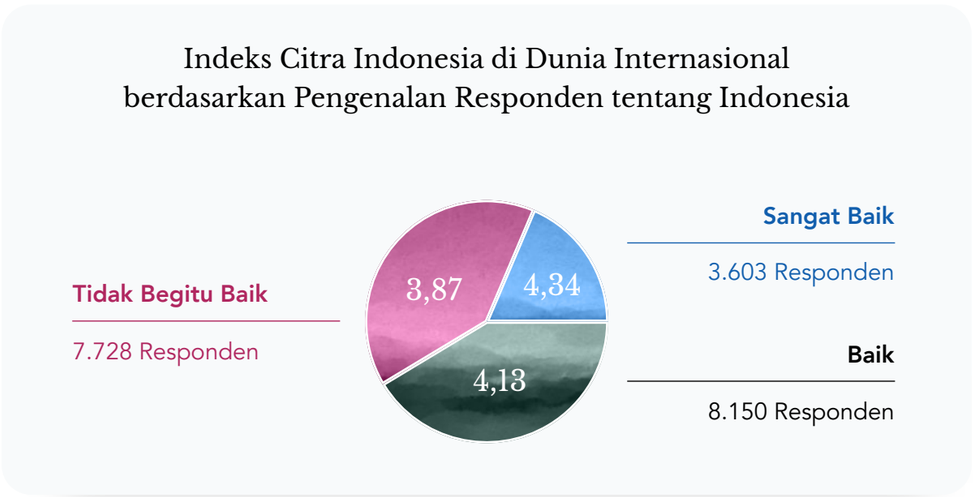

Gambar III.44
Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional berdasarkan Pengenalan Responden tentang Indonesia

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa responden yang lebih mengenal Indonesia dan pernah mengunjungi Indonesia memiliki persepsi yang lebih positif mengenai Indonesia. Dengan demikian, promosi pengenalan Indonesia yang lebih gencar akan meningkatkan Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional.

Gambar III.45
Rata-rata Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional Berdasarkan Usia Responden

Dari segi usia, responden kelompok usia 40 - 65 tahun memberikan nilai persepsi positif tertinggi terhadap citra Indonesia. Sedangkan nilai persepsi positif terendah diberikan oleh kelompok usia di bawah 18 tahun. Salah satu faktor yang memengaruhi perbedaan nilai persepsi ini adalah masih terbatasnya tingkat pengenalan kelompok usia tersebut terhadap Indonesia. Hal ini disebabkan antara lain responden belum pernah mengunjungi Indonesia, ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan promosi yang diselenggarakan oleh Perwakilan RI.

Hasil survei berdasarkan pengelompokan jenis kelamin responden menunjukkan jumlah responden perempuan lebih besar dari jumlah responden laki-laki. Namun, nilai persepsi positif citra Indonesia dari kelompok responden laki-laki lebih tinggi dari responden perempuan. Adapun, 206 responden yang memilih opsi "tidak menjawab" pada jenis kelamin yang memberikan nilai persepsi positif citra yang lebih rendah dibandingkan dengan dua kelompok responden lainnya.

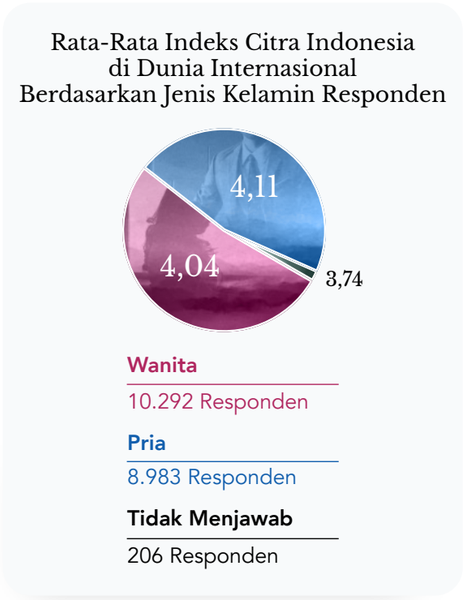

Gambar III.46
Rata-Rata Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan pencapaian target Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional adalah:

01
Mengubah Periode Pengukuran Hasil Survei Menjadi Empat Kali Setahun

Keputusan satuan kerja pengampu untuk mengubah periode pengukuran hasil survei yang sebelumnya setahun sekali menjadi empat kali setahun atau per triwulan. Perubahan tersebut berdampak positif terhadap peningkatan jumlah responden dan *awareness* Perwakilan RI dalam penyelenggaraan survei sepanjang tahun. Di samping itu, Kemenlu secara rutin menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi capaian IKU Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional kepada seluruh Perwakilan RI sebagai bahan referensi dalam penyesuaian strategi penyebaran survei yang lebih optimal.

02
Peningkatan Realisasi IKU

Peningkatan realisasi IKU nilai Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional didukung oleh berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemenlu, baik di dalam negeri, maupun di negara-negara sahabat melalui Perwakilan RI.

03
Pemberitaan Positif Media Internasional

Peningkatan nilai Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional juga dipengaruhi oleh pemberitaan positif media internasional terhadap kebijakan hubungan luar negeri (hublu) Indonesia yang berdampak pada pembentukan persepsi positif responden terhadap Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan *Digital Command Center* (DCC) yang dikelola oleh Direktorat Informasi dan Media, selama tahun 2023 terdapat 7.167 pemberitaan dan perbincangan mengenai isu hublu RI pada media internasional, dimana 6.748 diantaranya merupakan berita yang memiliki sentimen positif.

Kendala dan Tantangan

Beberapa kendala dan tantangan yang ditemui dalam mencapai target Indeks Citra di Dunia Internasional, diantaranya:

01

Keterbatasan Fasilitas Responden

Keterbatasan fasilitas internet dan gawai yang dimiliki oleh responden di beberapa negara yang menyulitkan penyebaran dan pengisian survei daring, seperti Papua New Guinea dan Solomon Island.

02

Kekhawatiran Terkait Keamanan Data

Adanya kekhawatiran dari masyarakat setempat terkait keamanan data pada saat mengisi survei secara daring, sehingga calon responden mengurungkan niat untuk mengisi survei. Sebagai contoh di Jepang dan Korea Selatan.

03

Pertanyaan Survei yang Dirasa Responden Terlalu Banyak

Jumlah pertanyaan survei yang dirasa responden terlalu banyak dengan bentuk yang majemuk (pilihan ganda, isian, dan berbasis rating) sehingga dengan keterbatasan waktu, responden tidak mengisi survei secara lengkap, seperti di Kazakhstan

Upaya Perbaikan

Dalam menghadapi kendala dan tantangan tersebut, upaya yang telah dilakukan untuk merealisasikan target pada tahun 2023, antara lain:

01

Penggunaan Fasilitas Komputer dan Gawai Perwakilan RI

Menyampaikan solusi untuk mengatasi kendala keterbatasan internet dan gawai dengan menggunakan fasilitas komputer dan gawai Perwakilan RI untuk melakukan survei.

02

Sosialisasi Keamanan Data Survei Kepada Responden

Menyarankan perwakilan untuk menjelaskan kepada calon responden bahwa tautan survei yang disebarkan aman karena dikelola dan disimpan dalam server internal Kemenlu. Selain itu, survei dilakukan dengan mengedepankan anonimitas untuk melindungi privasi responden.

03

Evaluasi Terhadap Substansi dan Jumlah Pertanyaan Survei

Melakukan evaluasi terhadap substansi dan jumlah pertanyaan survei sebelum penyelenggaraan survei periode tahun berikutnya dengan melibatkan perwakilan satker pengampu terkait.

04

Meningkatkan Komunikasi dan Koordinasi Real Time

Meningkatkan komunikasi dan koordinasi *real time* antara admin Pusat (Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik) dengan seluruh Perwakilan RI melalui WhatsApp *group* untuk pejabat dan staf pengelola Indeks Citra Indonesia di perwakilan. Di samping itu, dalam laporan hasil pemantauan dan evaluasi capaian IKU Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional kepada seluruh Perwakilan RI, pejabat atau staf yang ditunjuk untuk mengelola Survei Indeks Citra didorong secara berkala agar memanfaatkan keberadaan WhatsApp *group* dimaksud guna menjaga kesinambungan pelaksanaan survei di perwakilan.

05

Penambahan Fitur Pilihan Bahasa Asing pada Survei Daring

Penambahan fitur pilihan bahasa asing pada survei daring dari 6 bahasa pada tahun 2021 menjadi 27 bahasa pada tahun 2022, dan kembali bertambah menjadi 34 bahasa pada tahun 2023. Bahasa-bahasa yang tersedia pada tahun 2023 mencakup Bahasa Inggris, Spanyol, Perancis, Arab, Azerbaijan, Rusia, Chinese (*Simplifed*); Chinese (*Traditional*); Kroasia; Thailand, Georgia, Yunani, Ceko, Bulgaria, Ukraina, Bosnia, Denmark, Jerman, Italia, Swahili, Hungaria, Filipina; Belanda, Norwegia, Polandia, Portugis, Romania, Slovakia, Serbia, Finlandia, Turki, Vietnam, Jepang, dan Korea.

Analisis Program Pendukung Capaian

Berikut adalah beberapa *highlights* kegiatan pendukung capaian Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional:

01 Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM)

Hybrid, 11 Januari 2023

Kemenlu telah menyelenggarakan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI (PPTM) Tahun 2023 pada tanggal 11 Januari 2023 secara *hybrid*. Jumlah tamu yang hadir secara fisik pada PPTM 2023 adalah 185 orang, termasuk yang mencakup Menlu dan Wamenlu periode sebelumnya, Duta Besar Perwakilan Negara Sahabat, perwakilan Organisasi Internasional, dan perwakilan dari Media.

PPTM 2023 juga disiarkan secara *live streaming* di YouTube Kemenlu dan delapan *media partners*, yaitu Kompas TV, TVRI, TVRI World, Metro TV, CNN Indonesia, BTV, SEA Today dan Detik.com. Hal ini meningkatkan jumlah audiens yang menyaksikan acara tersebut, yang terdiri dari staf Kemenlu di Pusat dan Perwakilan RI di luar negeri beserta mitra kerjanya di negara akreditasi, kalangan diplomatik, organisasi internasional, *stakeholders* mitra kerja Kemenlu, media nasional dan koresponden asing di Indonesia, akademisi, *think tank*, pelajar dan mahasiswa, hingga masyarakat umum, termasuk diaspora Indonesia. Tidak kurang dari 24 perguruan tinggi yang menjadikan siaran PPTM 2023 ini sebagai mata kuliah wajib bagi siswanya. Di samping itu, *website* PPTM 2023 juga memuat foto-foto capaian diplomasi Kemenlu selama tahun 2022 berupa kegiatan-kegiatan prioritas dan kegiatan internasional.

> Tidak kurang dari 24 perguruan tinggi yang menjadikan siaran PPTM 2023 ini sebagai mata kuliah wajib bagi siswanya

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab publik serta diseminasi informasi mengenai berbagai kegiatan Kemenlu dalam bentuk visual, maka dalam *website* PPTM 2023 dimuat juga pameran virtual capaian diplomasi selama tahun 2022, mencakup beberapa isu utama diplomasi, yaitu pelindungan terhadap WNI, diplomasi ekonomi, Indonesia untuk dunia, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, penguatan infrastruktur diplomasi, ditambah berbagai foto kegiatan penting lainnya dalam folder Jurnal Diplomasi serta galeri diplomasi tahun 2020 dan 2021.

Seluruh rangkaian kegiatan di atas merupakan bentuk diseminasi informasi yang masif mengenai capaian diplomasi Indonesia, yang diharapkan berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan Citra Indonesia di Dunia Internasional.

02 Beasiswa Seni Budaya Indonesia (BSBI)

Kegiatan promosi seni dan budaya Indonesia telah dilaksanakan melalui program Beasiswa Seni Budaya Indonesia/Indonesian Arts and Culture Scholarship (BSBI/IACS) pada tahun 2023. Penyelenggaraan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mempromosikan dan memperkenalkan seni dan budaya Indonesia kepada pemuda internasional dan pemuda Indonesia.

Untuk pertama kalinya setelah terhenti karena pandemi sejak tahun 2020, Kemenlu kembali menyelenggarakan BSBI 2023 secara luring yang berlangsung dari tanggal 5 Juni – 5 Agustus 2023. Pada tahun 2020, program BSBI tidak dapat dilaksanakan namun pada tahun 2021 dan 2022 telah dilaksanakan secara daring.

Sejak tahun 2003 hingga tahun 2023, BSBI telah diberikan kepada 1069 alumni dari 84 negara. Pada tahun 2023, kegiatan BSBI diikuti oleh 45 orang peserta dari 32 negara dengan bekerja sama dengan sanggar mitra kerja sama Kemenlu di 5 kota yaitu Bali, Padang, Kutai Kartanegara, Banyuwangi dan DKI Jakarta. Materi pelatihan mencakup seni tari, musik, dan kriya yang telah ditampilkan dalam kegiatan puncak dan sekaligus penutupan program BSBI 2023 yaitu Indonesia Channel dengan tema "*Indonesia, Home of Diversity*" yang berhasil menarik 2500 orang penonton.

03 Development Leaders Conference 2023

Oslo, 24-25 Oktober 2023

Pengakuan internasional atas peran dan kontribusi Indonesia dalam memajukan kerja sama pembangunan internasional semakin menguat, tercermin dari kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia sebagai *co-host* Development Leaders Conference (DLC) ke-6, bersama Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) dan Center for Global Development (CGD), di Oslo, tanggal 24-25 Oktober 2023.

Partisipasi pada DLC dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat posturing Indonesia sebagai *new emerging* donor dan southern provider dalam kerja sama pembangunan internasional. DLC menjadi forum diskursus tahunan pembahasan upaya kolektif dari seluruh aktor pembangunan internasional dalam merespon tantangan-tantangan global yang merupakan kepentingan bersama.

Konferensi tahunan tersebut diinisiasi sejak tahun 2018 dan dihadiri oleh perwakilan badan kerja sama pembangunan (*traditional and emerging donors*), lembaga pendanaan internasional, organisasi internasional, NGOs, dan think tank. Konferensi dilaksanakan dengan *Chatham House Rule*, untuk mendorong keterbukaan peran dan kontribusi setiap pihak dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai *co-host* yang merepresentasikan *new emerging donors* dan *Global South*, Indonesia menyoroti pentingnya intensifikasi dialog konstruktif antar negara, penguatan kemitraan global, serta perlunya inovasi pendanaan pembangunan. Indonesia juga memandang perlunya penguatan partisipasi *emerging donors* serta negara berkembang penerima hibah untuk memberikan perspektif dari sudut pandang penerima ODA, serta agenda yang berimbang dalam pembahasan tatanan kerja sama pembangunan internasional.

Dalam DLC ke-6, Indonesia mendorong untuk meningkatkan keterlibatan *new emerging donor* dan *emerging market* untuk memperkaya diskusi dari sudut pandang negara berkembang. Selanjutnya, sebagai *co-host*, Indonesia akan menjadi tuan rumah DLC ke-7 yang rencananya akan diselenggarakan di Bali, tanggal 12-13 Juni 2024. Pada pertemuan tersebut, Indonesia akan mendorong diskusi tematik yang lebih seimbang dengan mengusung kepentingan negara-negara berkembang atau *Global South*.

04 Kerja Sama dan Perumusan Rekomendasi terkait Pengelolaan Keamanan Sidang/ Konferensi Internasional di Indonesia

Peran Indonesia di tataran regional dan global dewasa ini semakin meningkat dan menunjukkan eksistensi, peranan dan kontribusi Indonesia dalam mencari solusi atas berbagai isu internasional. Hal ini menjadikan Indonesia semakin dipercaya sebagai penyelenggara dan tuan rumah berbagai pertemuan/konferensi internasional, seperti rangkaian kegiatan/pertemuan terkait keketuaan Indonesia pada berbagai forum/pertemuan internasional, khususnya Forum ASEAN.

Pengamanan pelaksanaan sidang/konferensi internasional yang diselenggarakan di Indonesia merupakan faktor penting yang dapat mendukung keberhasilan dan misi pertemuan. Untuk itu, diperlukan koordinasi, komunikasi dan kerja sama yang baik antara Kemenlu dengan seluruh aparat keamanan (apkam) dan instansi-instansi terkait baik di pusat maupun di daerah, serta panitia penyelenggara, guna menyamakan persepsi mengenai tugas dan tanggung jawab dalam mendukung kelancaran pengamanan sidang/ konferensi dimaksud. Kelancaran pelaksanaan kegiatan internasional yang diselenggarakan di Indonesia secara tidak langsung akan memberikan kesan positif kepada publik Internasional. Hal ini dapat mendukung peningkatan citra positif Indonesia di mata masyarakat dan dunia internasional.

Pada Tahun 2023, Kemenlu telah menghasilkan rekomendasi terkait pengelolaan keamanan sidang/konferensi internasional di Indonesia, diantaranya yakni: rangkaian sidang/pertemuan terkait keketuaan Indonesia pada ASEAN Foreign Ministers' retreat, C-24 Pacific Regional Seminar, the 56th ASEAN Foreign Ministers' Meeting, The 43rd ASEAN Summit dan Related meetings, The Archipelagic and Island States (AIS) Forum Summit, Indonesia-Latin America and the Caribbean (INA-LAC) Business Forum, Pengamanan kunjungan kerja Presiden Iran, Menteri Luar Negeri Timor Leste, Menteri Luar Negeri Tanzania, Menteri Luar Negeri Portugal, Menteri Luar Negeri Lithuania, Pengamanan aksi unjuk rasa di Kedutaan Besar Swedia, Denmark, Belanda, Myanmar, Vietnam, dan Amerika Serikat, dan pengamanan gelombang aksi unjuk rasa menentang rencana pelaksanaan FIFA U-20 di Indonesia.

Sedangkan, *highlights* kegiatan pendukung capaian Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional yang dilaksanakan oleh beberapa Perwakilan RI, sebagai berikut:

Sepanjang tahun 2023 KBRI Tokyo telah melaksanakan survei citra dengan jumlah responden sebanyak 922 orang, terdiri dari 421 responden secara daring dan 500 responden secara luring. Raihan nilai Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional tahun 2023 adalah sebesar 3,91. Dengan rincian nilai sebagai berikut: dimensi pariwisata dan sosial budaya (4,57), dimensi ekonomi (3,56) dan dimensi pemerintahan dan penegakan hukum (3,59).

4,57	4,57	4,57
Dimensi Pariwisata dan Sosial Budaya	Dimensi Ekonomi	Dimensi Pemerintahan dan Penegakan Hukum

Sepanjang tahun 2023, KBRI Tokyo telah menyelenggarakan 11 (sebelas) kegiatan Indonesia-Japan Friendship Day (IJFD). Selain itu, terdapat 2 kegiatan promosi budaya dan seni lainnya, yaitu Indonesia Night dan International Friendship Day. Beberapa faktor pendukung peningkatan indeks citra adalah:

a. Telah dibuka rute penerbangan langsung Tokyo – Manado yang diharapkan dapat membuka akses wisatawan asing asal Jepang dan membantu promosi Likupang (Sulawesi Utara) sebagai salah satu destinasi super prioritas.

b. Promosi kuliner Indonesia Spice Up the World: Indonesia Fair di Hotel Imperial, Tokyo pada 1-30 April 2023. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkenalkan kekayaan kuliner dan rempah Indonesia di Jepang.

c. Promosi dan pameran seni, budaya dan pariwisata Indonesia bertajuk "Exploring the Beauty of Indonesia" bekerja sama dengan Galeri Hideo Tokyo pada 21 Agustus – 1 September 2023

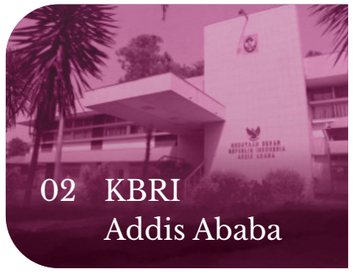

Survei Citra Indonesia di Dunia Internasional tahun 2023 dilaksanakan secara *online* kepada 85 responden yang berada di Ethiopia, dengan menyasar masyarakat Ethiopia dan asing non-WNI, terutama pelaku usaha delegasi TEI, pemuda, akademisi, media, parlemen, serta *counterpart* terkait lainnya. Raihan nilai Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional di KBRI Addis Ababa tahun 2023 adalah sebesar 4,32. Dengan rincian nilai sebagai berikut: dimensi pariwisata dan sosial budaya (4,64), dimensi ekonomi (4,10) dan dimensi pemerintahan dan penegakan hukum (4,22).

4,64	4,10	4,22
Dimensi Pariwisata dan Sosial Budaya	Dimensi Ekonomi	Dimensi Pemerintahan dan Penegakan Hukum

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan sebagai salah satu upaya peningkatan indeks citra adalah:

a. Program Indonesia-Ethiopia Youth Exchange Program 2023 dan partisipasi delegasi bisnis Ethiopia pada Trade Expo Indonesia (TEI) ke-38 serta Halal Expo Indonesia (HEI).

b. Penyelenggaraan Indonesia-Ethiopia Business Meeting di Kota Arba Minch. Selain *business meeting*, juga diselenggarakan sosialisasi Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) untuk tahun 2023.

c. Penyelenggaraan Indonesian Culinary and Cultural Bazaar 2023, Kegiatan ini menghadirkan pameran budaya dan makanan Indonesia. Peserta yang hadir pada kegiatan ini yaitu lebih dari 600 orang dan terdiri dari warga Ethiopia dan warga asing yang bermukim di Addis Ababa.

03 KJRI Jeddah

Pada tahun 2023 KJRI Jeddah berhasil menjaring 125 responden, dengan total pengisi formulir survei secara *online* sebanyak 27 orang dan survei *offline* sebanyak 98 orang. Raihan nilai Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional di KJRI Jeddah tahun 2023 adalah sebesar 4,74. Dengan rincian nilai sebagai berikut: dimensi pariwisata dan sosial budaya (4,88), dimensi ekonomi (4,58) dan dimensi pemerintahan dan penegakan hukum (4,75).

4,88	4,58	4,75
Dimensi Pariwisata dan Sosial Budaya	Dimensi Ekonomi	Dimensi Pemerintahan dan Penegakan Hukum

Dalam upaya meningkatkan nilai Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi, KJRI Jeddah telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan promosi citra Indonesia baik dalam bidang ekonomi dan perdagangan, sosial, dan budaya, antara lain:

a. Pameran Indonesian Hajj Expo di wisma Konjen Jeddah, 1-2 Februari 2023. Kegiatan dihadiri oleh para pemilik catering di wilayah Jeddah, Makkah dan Madinah.

b. Promosi kopi Indonesia kepada pemilik kafe di Khamis Mushait, 3 November 2023. Salah satu produk unggulan Indonesia yang mampu bersaing di Arab Saudi adalah produk Kopi. Terkait dengan hal tersebut KJRI Jeddah terus mempromosikan produk kopi kepada para pemilik dan pengelola kafe mengingat saat ini pertumbuhan kafe di Arab Saudi sangat pesat.

c. Indonesia Week Festival 2023, 27 Juli - 17 Agustus 2023. Kegiatan promosi produk-produk Indonesia di Sarawat Supermarket Jeddah. Kegiatan ini didukung oleh para importir produk Indonesia. Selain produk, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk promosi budaya seperti penampilan tari dan lainnya.

04 KBRI Brussel

Pada tahun 2023 KBRI Brussel berhasil menjaring 122 responden. Raihan nilai Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional di KBRI Brussel tahun 2023 adalah sebesar 4,13. Dengan rincian nilai sebagai berikut: dimensi pariwisata dan sosial budaya (4,62), dimensi ekonomi (3,70) dan dimensi pemerintahan dan penegakan hukum (4,14).

4,62	3,70	4,14
Dimensi Pariwisata dan Sosial Budaya	Dimensi Ekonomi	Dimensi Pemerintahan dan Penegakan Hukum

Dalam upaya meningkatkan Nilai Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional, KBRI Brussel telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan promosi baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, antara lain:

a. Pada tanggal 18 Maret 2023, KBRI Brussel mengundang sejumlah jurnalis dan pelaku media Belgia, untuk berpartisipasi pada kegiatan *Pop Up Dining* bertajuk Tresor d'Indonesie: Cuisine Magnifique. Pemilihan jurnalis dan pelaku media sebagai *target audience* bertujuan untuk membangun kembali jejaring yang sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.

b. Bekerja sama dengan kelompok Griya Seni Ekalaya yang sedang melaksanakan tur Eropa, KBRI Brussel menyelenggarakan pertunjukan wayang kulit pada Bulan Mei 2023 di dua kota di Belgia, yaitu Brussel dan Tournai bertajuk Tresor d'Indonesie: Nuit d'ombre et de Lumiere. Kegiatan promosi seni dan budaya yang dilakukan oleh seniman profesional akan menyajikan pertunjukan seni budaya yang berkualitas sehingga berdampak positif terhadap upaya peningkatan Citra Indonesia di Negara Akreditasi.

05 KBRI Ottawa

Selama kurun waktu tahun 2023, KBRI Ottawa telah berhasil menjaring 116 responden dengan nilai indeks citra sebesar 3,92. Dengan rincian nilai sebagai berikut: dimensi pariwisata dan sosial budaya (4,34), dimensi ekonomi (3,58) dan dimensi pemerintahan dan penegakan hukum (3,84).

4,88	4,58	4,75
Dimensi Pariwisata dan Sosial Budaya	Dimensi Ekonomi	Dimensi Pemerintahan dan Penegakan Hukum

KBRI Ottawa telah melaksanakan berbagai kegiatan engagement untuk mempromosikan Indonesia dan meningkatkan citra Indonesia. Diseminasi maupun promosi yang telah dilakukan selama kurun waktu tahun 2023 telah sedikit banyak memperkenalkan budaya, pariwisata dan potensi produk Indonesia di tengah masyarakat Kanada. Destinasi pariwisata Indonesia yang diperkenalkan, beyond Bali, terus menjadi proyeksi utama di dalam meningkatkan wisatawan asal Kanada ke Indonesia maupun kesadaran mengenai budaya Indonesia.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh KBRI Ottawa, diantaranya adalah:

a. Kolaborasi KBRI Ottawa dan Indonesian Canadian Congress (ICC) dalam rangkaian Asian Heritage Month (AHM) pada 7 Mei 2023 melalui pemutaran film dan mempromosikan Indonesia melalui penampilan tarian Rantak asal Sumatra.

b. Pada tanggal 24 Oktober 2023, KBRI Ottawa telah berpartisipasi pada Young Men's Christian Association (YMCA) Embassy Chef Showcase (YECS) yang berlangsung di John G. Diefenbaker, Ottawa. Bentuk partisipasi KBRI Ottawa meliputi pembukaan *booth* pameran, Pavillion Indonesia serta promosi kuliner Indonesia dan lainnya.

Proyeksi Ke Depan

Kemenlu berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas, validitas, dan keandalan data survei Citra Indonesia di Dunia Internasional dalam membantu proses pengambilan kebijakan strategis luar negeri serta penyusunan program dan kegiatan, baik di pusat maupun Perwakilan RI sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan strategis. Sebagai wujud dari komitmen ini, penyempurnaan substansi dan metodologi survei secara berkala akan terus dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan diplomasi Indonesia dan arah kebijakan pemerintah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis.

Beberapa hal yang akan dilakukan pada tahun 2024, untuk memastikan pencapaian target Indeks Citra berdasarkan target RPJMN, diantaranya:

01. Penyempurnaan Indikator Indeks Citra dan Aplikasi Indeks Citra

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan survei, Kemenlu secara rutin akan terus menyelenggarakan kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk mengukur ketercapaian IKU Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional. Dalam proses evaluasi tersebut juga dilakukan penyempurnaan substansi kuesioner survei agar semakin relevan dengan tujuan diplomasi Indonesia. Pengembangan aplikasi terbaru juga akan dilakukan untuk mempermudah proses verifikasi dan kurasi data untuk meningkatkan validitas hasil survei.

02. Rencana Penyelenggaraan Upaya Promosi yang Dilakukan oleh Pusat dan Perwakilan RI

Kemenlu akan mendorong penggunaan data hasil survei sebagai acuan dalam menentukan agenda atau fokus program yang akan dilaksanakan di Pusat dan Perwakilan RI pada tahun selanjutnya. Sebagai langkah awal, Perwakilan RI telah diminta untuk melakukan pendataan terkait kegiatan-kegiatan promosi Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi yang akan dilakukan.

03. Penyelenggaraan Social Media Award (SMA)

Penyelenggaraan SMA merupakan salah satu bentuk apresiasi atas upaya Perwakilan RI dalam meningkatkan jangkauan diseminasi informasi kepada publik melalui *platform* media sosial. Perwakilan RI diharapkan dapat menjangkau publik secara luas melalui konten media sosial yang bersifat kreatif, inovatif, dan sejalan dengan tujuan diplomasi Indonesia, termasuk penyebaran materi promosi Perwakilan RI.

Dengan berbagai konten yang disebarluaskan melalui media sosial, dapat membantu meningkatkan persepsi WNA di negara akreditasi terhadap Indonesia, sehingga diharapkan hasil survei citra dapat menghasilkan respon yang positif.

Dokumentasi Program Pendukung Capaian IKU S3.2 : Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional

Gambar III.47
Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM)
(*Hybrid*, 11 Januari 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.48
Beasiswa Seni Budaya Indonesia (BSBI) - Indonesia Channel
(Jakarta, 5 Juni - 5 Agustus 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.49
Development Leaders Conference 2023
(Oslo, 24-25 Oktober 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.50
Spice Up The World: Indonesia Fair
(KBRI Tokyo, 4 April 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.51
Indonesia-Ethiopia *Business Meeting*
(Arba Minch, Januari 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.52
Indonesian Culinary and Cultural Bazaar 2023
(KBRI Addis Abba, 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.53
Kunjungan ke Sekolah di Pedalaman dalam rangka Pemberian Bantuan Alat Tulis dan Kegiatan Promosi Indonesia (KBRI Addis Abba, 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.54
Indonesia Hajj Expo
(KJRI Jeddah, Februari 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.55
Promosi Kopi Indonesia
(KJRI Jeddah, November 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.56
Indonesia Week Festival 2023
(KJRI Jeddah, Juli-Agustus 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.57
Tresor d Indonesie: Cuisine Magnifique
(KBRI Brussel, 18 Maret 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.58
Tresor d'Indonesie: Nuit de Ombre et de Lumiere
(KBRI Brussel, Mei 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.59
Asian Heritage Month
(KBRI Ottawa, 7 Mei 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.60
YMCA Embassy Chef Showcase
(KJRI Jeddah, Februari 2023)

Sumber: Kemenlu

Customer Perspective C

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* (pengguna layanan) merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi. Pihak *stakeholders* dan pihak *customer* dapat dimungkinkan sama pada beberapa unit.

Customer Perspective (C) terdiri dari satu Sasaran Strategis (SS) yaitu:

C1

Pelindungan WNI di luar negeri dan pelayanan publik yang prima

Sasaran Strategis (SS) C1 :

Pelindungan WNI di luar negeri dan pelayanan publik yang prima

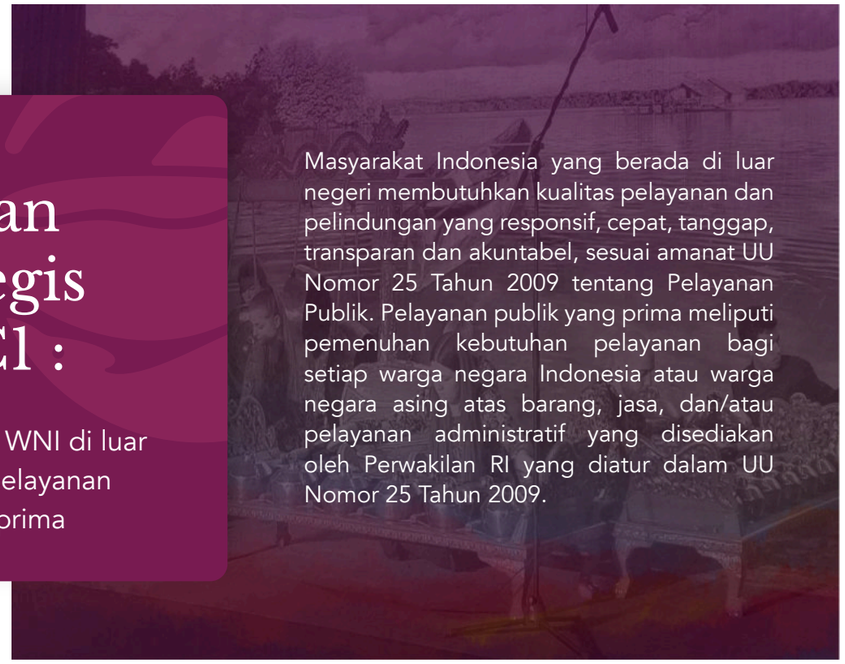

Masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri membutuhkan kualitas pelayanan dan pelindungan yang responsif, cepat, tanggap, transparan dan akuntabel, sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik yang prima meliputi pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Perwakilan RI yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009.

Dalam sasaran strategis pelindungan WNI di Luar Negeri dan pelayanan publik yang prima bertujuan memastikan pencapaian kinerja dalam upaya yang dilakukan oleh Kemenlu RI untuk melindungi warga negara yang berada di Luar Negeri sesuai dengan Hukum Internasional dan kualitas pelayanan publik terkait keprotokolan, kekonsuleran, fasilitas diplomatik dan pelindungan WNI.

Pelindungan terhadap WNI di Luar Negeri mencakup penyediaan bantuan informasi, hukum dan/atau sosial. Prinsip yang diterapkan dalam upaya pelindungan WNI sesuai Permenlu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan WNI di luar negeri, yaitu :

1. Mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata WNI.
3. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hukum negara setempat serta hukum dan kebiasaan internasional.

Sasaran Strategis (SS) C1 diukur berdasarkan capaian pada 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

IKU C1.1
Persentase kasus WNI di luar negeri yang diselesaikan.

IKU C1.2
Nilai persepsi kepuasan pelayanan publik, yang capaiannya merupakan agregat capaian SUB IKU:

a. Nilai persepsi kepuasan pelayanan keprotokolan.
b. Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran.
c. Nilai persepsi kepuasan pelayanan fasilitas diplomatik.
d. Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI.

IKU C1.1

Persentase kasus WNI di luar negeri yang diselesaikan

- Nilai capaian IKU diperoleh dari perhitungan persentase kasus khusus dan kasus umum yang diselesaikan

IKU C1.2

Nilai persepsi kepuasan pelayanan publik

- **Sub IKU 1**
  Nilai persepsi kepuasan pelayanan keprotokolan
- **Sub IKU 2**
  Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran
- **Sub IKU 3**
  Nilai persepsi kepuasan pelayanan fasilitas diplomatik
- **Sub IKU 4**
  Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI

> Pelayanan publik yang prima meliputi pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Perwakilan RI

Analisis IKU C1.1

Persentase Kasus WNI di Luar Negeri yang Diselesaikan

Deskripsi IKU

Penyelesaian kasus WNI di Luar Negeri mencakup kasus khusus dan kasus umum yang sudah ditangani oleh Perwakilan RI di Luar Negeri dengan pihak-pihak terkait, seperti: pihak Kepolisian, Keimigrasian, Kemenlu di Indonesia dan negara setempat. Penanganan kasus WNI di luar negeri sesuai dengan prosedur/SOP, peraturan nasional, peraturan negara setempat dan internasional yang target penyelesaian setiap kasus berbeda.

Kasus WNI di luar negeri adalah kasus-kasus yang menimpa WNI di luar negeri dan memerlukan penanganan Perwakilan RI menurut hukum nasional, hukum negara setempat, hukum dan kebiasaan internasional. Berdasarkan tingkat komplikasinya, kasus dibagi ke dalam dua kategori yaitu Kasus Khusus dan Kasus Umum.

Kasus Khusus termasuk *high profile case*, seperti hukuman mati, pelaku atau korban pembunuhan, korban penyiksaan fisik berat, korban TPPO, kasus narkoba, evakuasi WNI (perang, bencana alam, kecelakaan pesawat/kapal laut, amnesti) serta kasus yang bersifat insidentil dan/atau masif yang memiliki ramifikasi yang cukup luas secara politis, ketertiban masyarakat, dan keselamatan jiwa WNI.

Kasus Umum antara lain kasus perdata, keimigrasian, ketenagakerjaan, klaim asuransi, meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, pencurian, pencucian uang, pemerkosaan dan pelanggaran hukum. Penanganan kasus WNI di Luar Negeri dilaksanakan sesuai dengan prosedur/SOP, peraturan nasional, peraturan negera setempat dan ketentuan internasional.

Pembobotan Kasus WNI di Luar Negeri terdiri dari persentase kasus khusus yang diselesaikan dengan bobot 55% dan persentase kasus umum yang diselesaikan dengan bobot 45%. Pertimbangan pembobotan didasarkan pada tingkat urgensi, kompleksitas, dan sumber daya dalam penanganan dalam penyelesaian kasus WNI di luar negeri.

> Berdasarkan tingkat komplikasinya, kasus dibagi ke dalam dua kategori yaitu Kasus Khusus dan Kasus Umum

Kasus yang ditangani adalah kasus yang dihadapi oleh WNI di luar negeri sesuai dengan pengaduan, laporan, ataupun pemberitaan serta informasi yang diterima dari berbagai pihak, yang termasuk dalam lingkup pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri.

Kasus yang diselesaikan adalah kasus yang telah ditangani sesuai dengan ketentuan hukum nasional, hukum negara setempat dan/atau hukum dan kebiasaan internasional yang berlaku terkait pemenuhan hak-hak WNI di luar negeri.

IKU C1.1

Persentase Kasus WNI di Luar Negeri yang Diselesaikan

Digunakan untuk

mengukur Penyelesaian Kasus WNI di Luar Negeri mencakup kasus khusus dan kasus umum yang sudah ditangani oleh Perwakilan RI di Luar Negeri

Realisasi IKU

diperoleh dari kasus khusus dan umum yang diselesaikan terhadap kasus khusus dan umum yang ditangani

Perhitungan IKU Indeks Persentase Kasus WNI di Luar Negeri yang Diselesaikan, menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks IKU} = \frac{55\% \times \left(\frac{\text{Jumlah kasus khusus WNI yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus khusus WNI yang ditangani}} \right) \times 100\%}{45\% \times \left(\frac{\text{Jumlah kasus umum WNI yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus umum WNI yang ditangani}} \right) \times 100\%}$$

Informasi Kinerja

Tabel III.32
Capaian IKU C1.1 Persentase Kasus WNI di Luar Negeri yang Diselesaikan

Sumber: AKSI Kemenlu

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Persentase
Persentase Kasus WNI di Luar Negeri yang Diselesaikan	Persentase Kasus Khusus yang Diselesaikan (55%)	**49,52%**
	Persentase Kasus Umum yang Diselesaikan (45%)	**42,50%**

Target	Realisasi	Capaian
83%	92,02%	110,87%

Penyelesaian kasus WNI di luar negeri yang tepat dan terukur adalah segala upaya penanganan kasus-kasus WNI di luar negeri yang cepat dan komprehensif sesuai peraturan perundang-undangan nasional, hukum dan kebiasaan internasional dan tercatat dalam Portal Peduli WNI.

Pada tahun 2023, Kemenlu menyelesaikan sebanyak 5.507 kasus khusus (90,04%) dari 6.116 kasus khusus WNI di luar negeri yang ditangani dan menyelesaikan sebanyak 44.842 kasus umum (94,44%) dari 47.482 kasus umum WNI di luar negeri yang ditangani. Berdasarkan realisasi penyelesaian kasus khusus (55%) dan umum (45%) WNI di luar negeri yang diselesaikan maka realisasi IKU C1.1 Persentase kasus WNI di luar negeri yang diselesaikan sebesar 92,02% dari target sebesar 83% sehingga capaian IKU sebesar 110,87%.

Adapun jenis kasus-kasus WNI di luar negeri yang ditangani, antara lain mencakup isu keimigrasian, ketenagakerjaan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyanderaan WNI, evakuasi dari daerah konflik, WNI terancam hukuman mati, WNI sakit dan meninggal dunia, serta pidana dan perdata pada umumnya. PMI sektor domestik dan ABK kapal ikan menjadi golongan PMI dengan jumlah permasalahan di luar negeri terbesar. Sementara jumlah kasus terbanyak adalah keimigrasian, ketenagakerjaan dan pidana.

Beberapa *highlights* kasus-kasus yang ditangani selama tahun 2023, diantaranya, kasus khusus yaitu kasus TPPO dan kasus umum yaitu kasus keimigrasian. Adapun kasus yang ditangani terkait TPPO sebanyak 798 kasus dan seluruhnya berhasil diselesaikan (100%), kasus TPPO terbanyak terjadi pada kawasan Asia Tenggara. Sementara kasus keimigrasian yang ditangani sebanyak 28.801 kasus dan berhasil diselesaikan sebanyak 28.342 kasus.

1.119 WNI
Dievakuasi dari berbagai keadaan darurat (Sudan, Turki, Palestina, Tepi Barat)

408 WNI/ABK
Kasus dari 97 kapal (perikanan & niaga) telah ditangani

760
Kasus TPO

3.837
Kasus *online scam*

Rp2,5 M
Anggaran penanganan

Tabel III.33
Realisasi Komponen Pendukung IKU C1.1 Persentase Kasus WNI di Luar Negeri yang Diselesaikan

Komponen	Kasus yang Ditangani	Kasus yang Diselesaikan	Realisasi	Realisasi Terbobot
Kasus Khusus (55%)	6.116	5.507	90,04%	**49,52%**
Kasus Umum (45%)	47.482	44.842	94,44%	**42,50%**

Perhitungan jumlah kasus didasarkan pada jumlah kasus/persoalan yang dihadapi WNI, dimana seorang WNI dapat mengalami lebih dari satu kasus. Lama waktu penanganan masing-masing kasus yang dialami pun sangat tergantung pada prosedur SOP penanganan kasus di negara setempat dan pihak-pihak terkait di negara setempat maupun di Indonesia seperti pihak Kepolisian, Keimigrasian dan Kemenlu.

Kasus yang ditangani pada tahun berjalan adalah sisa kasus dari tahun sebelumnya. Apabila ada kasus yang tidak selesai pada tahun berjalan, kasus yang tidak selesai tersebut akan dihitung pada tahun berikutnya.

> Lama waktu penanganan masing-masing kasus yang dialami pun sangat tergantung pada prosedur SOP penanganan kasus di negara setempat dan pihak-pihak terkait

Perbandingan Kinerja

Tabel III.34
Target, Realisasi dan Capaian IKU Persentase Kasus WNI di Luar Negeri yang Diselesaikan

Kode IKU		2020	2021	2022	2023
C1.1 Persentase kasus WNI di luar negeri yang diselesaikan	Target	73,00%	74,00% ↑	80,00% ↑	**83,00%** ↑
	Realisasi	83,31%	90,29% ↑	91,50% ↑	**92,02%** ↑
	Capaian	114,11%	122,01% ↑	114,38% ↓	**110,87%** ↓
Komponen 1 Persentase Kasus Khusus yang diselesaikan	Target	62,60%	64,30% ↑	71,85% ↑	**82,00%** ↑
	Realisasi	94,06%	92,07% ↓	95,46% ↑	**90,04%** ↓
	Capaian	150,25%	114,16% ↓	132,86% ↑	**109,80%** ↓
Komponen 2 Persentase Kasus Umum yang diselesaikan	Target	85,70%	85,85% ↑	89,95% ↑	**85,00%** ↓
	Realisasi	70,17%	87,35% ↑	86,67% ↓	**94,44** ↑
	Capaian	81,88%	101,75% ↑	96,35% ↓	**111,11%** ↑

Pada tahun 2023 capaian IKU C1.1 Persentase Kasus WNI di Luar Negeri yang Diselesaikan telah mencapai target dengan capaian sebesar 110,87% atau telah terealisasi sebesar 92,02% dari target 83,00%, yang terdiri dari realisasi :

i. Kasus Khusus yang diselesaikan sebesar 90,04% dari target 82,00% dengan capaian sebesar 109,80%.

ii. Kasus Umum yang diselesaikan sebesar 94,44% dari target 85,00% dengan capaian sebesar 111,11%.

Berdasarkan perbandingan dengan tahun sebelumnya, realisasi kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,52% meskipun terdapat kenaikan target kinerja dari 80% menjadi 83%. Capaian kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 110,87% dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3,51%. Meskipun demikian, capaian di tahun 2023 tersebut tergolong ideal karena telah melebihi 100% dan masih di bawah batas toleransi 120%.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Faktor penentu keberhasilan penanganan kasus WNI di luar negeri tidak terlepas dari dari upaya Kemenlu dalam hal sebagai berikut:

01
Data dan Informasi yang Akurat

Data dan informasi merupakan langkah awal penentu keberhasilan penanganan kasus WNI di luar negeri. Dalam kaitan ini, data dan informasi yang akurat akan menjadi tolak ukur dan pegangan bagi para pemangku kepentingan untuk menanganan kasus-kasus yang ada.

02
Kebijakan Penanganan dan Pelindungan WNI yang Baik

Kebijakan penanganan dan pelindungan WNI yang baik akan menciptakan jalur migrasi yang aman dan mempermudah proses penanganan dan pelindungan kasus WNI di luar negeri.

03
Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga untuk Pencegahan dan Penanganan Kasus

Adapun koordinasi dan kerja sama antara Kemenlu dengan para pemangku kepentingan dilakukan untuk menciptakan inklusifitas dan memperluas peran serta pihak ketiga dalam upaya penanganan kasus WNI di luar negeri.

04
Tingginya Kapasitas Kemenlu dan K/L/I Lain dalam Upaya Pelindungan WNI

Dengan kapasitas yang mumpuni dari seluruh pemangku kepentingan terhadap kasus WNI di luar negeri dapat menyelesaikan kasus secara efektif dan efisien.

05
Kondisi politik dan keamanan dunia di tahun 2023

Dengan kembali dibukanya jalur migrasi internasional dan munculnya modus operandi kejahatan baru di dunia menjadi faktor pendorong meningkatnya kasus WNI di luar negeri. Kondisi ini antara lain dipengaruhi konflik di Sudan dan Palestina, serta bencana alam yang terjadi di beberapa negara yang mempengaruhi WNI yang tinggal di negara tersebut. Kemenlu perlu mempersiapkan sumber daya untuk menangani dampak konflik terutama yang dirasakan oleh WNI di wilayah tersebut.

Selain konflik keamanan, tingkat migrasi penduduk dunia juga meningkat seiring kelonggaran protokol kesehatan di pasca pandemi Covid-19. Modus baru kejahatan internasional juga muncul seiring dengan perubahan pola kehidupan masyarakat yang mengandalkan internet dan sosial media. Rekrutmen Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural masih terus terjadi. Sebagian bahkan menjadi korban sindikat tindak pidana perdagangan orang di perusahaan *online scam* dan judi *online*. Kasus-kasus tradisional seperti keimigrasian dan ketenagakerjaan pun meningkat seiring dengan tingkat migrasi.

Kendala dan Tantangan

Walaupun tingkat penanganan kasus WNI di luar negeri secara menyeluruh meningkat, namun demikian masih terdapat kendala dan tantangan dalam penyelesaian kasus. Terlihat penyelesaian kasus umum lebih baik dari tahun 2022, namun penyelesaian kaus khusus menurun dari tahun sebelumnya. Berikut kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Kemenlu dalam upaya pencapaian IKU Persentase Kasus WNI di Luar Negeri yang Diselesaikan:

01
Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Awam Tentang Prosedur Migrasi yang Aman

Sebagian besar permasalahan WNI di luar negeri muncul akibat migrasi yang tidak sesuai prosedur. Sebagai contoh, WNI yang ingin bekerja ke luar negeri tanpa pelatihan dan keterampilan yang memadai serta menggunakan dokumen yang dipalsukan. WNI dimaksud telah melakukan pelanggaran keimigrasian dan pidana serta rentan untuk dimanfaatkan oleh pelaku kriminal. Yang bersangkutan juga akan rentan terhadap perlakuan kasar dari pemberi kerja.

02

Kapasitas Kemenlu dalam Menangani Kasus

Dari sisi internal Kemenlu, perlu adanya dukungan SDM yang memadai melalui peningkatan kapasitas SDM serta sistem yang mumpuni melalui peningkatan keamanan sistem informasi teknologi.

03

Faktor-Faktor Eksternal

Hal-hal yang mempengaruhi penyelesaian kasus diantaranya yaitu kebijakan pemerintah setempat, ketersediaan alat bukti, saksi, dokumen baik di negara setempat atau di Indonesia; lamanya proses koordinasi di dalam negeri dalam menindaklanjuti penanganan kasus; dan semakin kompleks dan berkembangnya modus kejahatan lintas negara dewasa ini.

Upaya Perbaikan

Untuk mengatasi kendala dan tantangan tersebut, Kementerian Luar Negeri berupaya melakukan perbaikan sebagai berikut:

01

Program Kampanye Penyadaran Publik

Melaksanakan program kampanye penyadaran publik untuk menyampaikan proses migrasi aman.

02

Kolaborasi dengan K/L Terkait

Berkolaborasi dengan K/L terkait dalam menyelenggarakan program penyiapan keberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia.

03

Memperkuat Koordinasi dan Kerja Sama untuk Pelayanan dan Pelindungan WNI

Memperkuat koordinasi dan kerja sama antar lembaga untuk melakukan pelayanan dan pelindungan WNI, khususnya dalam menghadapi kasus menonjol seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang, WNI terancam hukuman mati, Foreign Terrorist Fighters, WNI yang disekap/disandera, dan proses evakuasi WNI dari wilayah konflik.

04

Intensifikasi Diplomasi Pelindungan

Mengintensifkan diplomasi pelindungan baik dalam level bilateral, regional, dan multilateral.

05

Advokasi dan Bantuan Hukum Kasus /khusus

Menyediakan fasilitas advokasi dan bantuan hukum untuk kasus khusus.

06

Meningkatkan Kapasitas SDM di Pusat dan Perwakilan RI

Meningkatkan kapasitas SDM di Pusat dan Perwakilan RI, serta pemangku kepentingan lainnya untuk isu terkini dalam pelayanan dan pelindungan WNI dan dalam pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pelayanan dan pelindungan WNI.

07

Perbaikan Sistem Keamanan Perangkat dan Jaringan

Memperbaiki sistem keamanan pada perangkat dan jaringan pada sistem informasi pelayanan dan pelindungan WNI.

08

Memperkuat Monev Pelayanan dan pelindungan WNI

Memperkuat monev pelayanan dan pelindungan WNI sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan.

Analisis Program Pendukung Capaian

Berikut *highlights* beberapa program yang mendukung upaya penyelesaian kasus WNI di luar negeri:
Internasional:

01 Penerbitan Nomor Induk Tunggal

Jeddah, Februari 2023

Pemerintah RI terbitkan Nomor Induk Tunggal bagi WNI di Arab Saudi untuk memutus rantai masalah *overstaying* dan memberikan harapan kehidupan yang lebih baik di Indonesia. Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan kegiatan penerbitan Nomor Induk Tunggal (NIT) bagi murid Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ) dan Sekolah Indonesia Mekkah (SIM) pada tanggal 21-28 Februari 2023. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan akses bagi murid SIJ dan SIM terhadap pendidikan tinggi dan/atau kegiatan akademik berskala nasional di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan rantai masalah *overstaying* di Arab Saudi dapat dihentikan. Sebagai hasil dari kegiatan tersebut, telah diterbitkan 284 NIT dan 21 Identitas Kependudukan Digital serta melakukan perekaman biometrik terhadap 86 WNI.

02 Upaya Pendampingan hukum bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia di Malaysia atas Nama AL, yang Meninggal Dunia Diduga Karena *Mistreatment* oleh Majikan.

Malaysia, Maret 2023

Pada bulan Maret 2023, telah difasilitasi pendampingan terhadap Sdr. YB selaku Ahli Waris dan Ibu Kandung AL untuk menghadiri Sidang Penetapan Ahli Waris mendiang AL yang bertempat di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang. Sidang ini merupakan langkah awal untuk dapat melakukan tuntutan perdata kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kematian AL.

Dengan telah ditetapkannya Sdr. YB sebagai ahli waris, maka selanjutnya pihak kuasa hukum akan menyusun langkah-langkah hukum untuk mengajukan tuntutan perdata atas kematian AL. Pemerintah Republik Indonesia akan terus berupaya membantu agar mendiang AL mendapatkan keadilan.

03 Evakuasi WNI dari Sudan

Sudan, April-Mei 2023

Pemerintah RI sikapi eskalasi situasi keamanan akibat konflik militer yang bersifat horizontal di Sudan dengan mengevakuasi 1.015 jiwa dari Sudan ke wilayah aman.

Dalam rangka menyikapi konflik militer antara Sudan Armed Forces dan Rapid Support Forces di Sudan yang pecah pada tanggal 15 April 2023, Kementerian Luar Negeri telah mengevakuasi sejumlah 998 WNI dan 17 WNA (Bangladesh, Filipina, Australia, Djibouti, dan Sudan) dari Sudan. Rangkaian upaya evakuasi tersebut merupakan hasil dari kerja sama lintas K/L di Pusat dan lintas Perwakilan RI.

Proses evakuasi dilakukan secara bertahap melalui jalur darat, laut dan udara. Proses tersebut diawali dengan pemindahan WNI dari wilayah konflik di kota Khartoum, Omdurman, dan Madani menuju Port Sudan. Para WNI kemudian dipindahkan dari kota Port Sudan ke kota Jeddah (Arab Saudi) dengan kapal ferry berbendera Arab Saudi "Amanah" dan pesawat TNI-Angkatan Udara (AU) dalam beberapa tahap sebelum selanjutnya direpatriasi ke Indonesia menggunakan pesawat komersial maupun pesawat TNI-AU.

> Rangkaian upaya evakuasi tersebut merupakan hasil dari kerja sama lintas K/L di Pusat dan lintas Perwakilan RI

Pada proses ketibaan di Indonesia, Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan K/L terkait di Indonesia untuk membantu proses administrasi ketibaan, pemeriksaan kesehatan, serta pemulangan ke daerah asal. Proses pemulangan para WNI ke daerah asal selanjutnya ditangani oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dikoordinasikan dengan beberapa Pemerintah Daerah di mana para WNI berasal.

04 Pemulangan Anak Tidak Terdokumentasi dan Terlantar dari Taiwan

Taiwan,
Juli dan Desember 2023

Kemenlu bekerja sama dengan Kementerian Sosial telah 2 kali melakukan pemulangan anak tidak terdokumentasi dan terlantar (ATT) dari Taiwan, yaitu pada bulan Juli dan Desember 2023. Anak-anak tersebut ditinggalkan begitu saja oleh ibunya di panti-panti Taiwan. Setelah dilakukan *family tracing* di daerah oleh Kementerian Sosial, Kemenlu mengupayakan pemulangan anak-anak tersebut. Pada bulan Juli 2023 dilakukan pemulangan terhadap 7anak, kemudian pada bulan Desember 2023 dilakukan pemulangan terhadap 6 anak. Saat ini tercatat masih terdapat 110 anak Indonesia yang berada di panti-panti di Taiwan.

Urgensi pemulangan anak-anak tersebut adalah agar mereka dapat memperoleh hak pendidikan yang layak, karena tanpa dokumentasi, anak-anak tersebut tidak dapat memperoleh pendidikan formal yang layak di Taiwan.

05 Penyelesaian Kasus 7 ABK Hilang

Mauritius,
17-21 September 2023

Pada tanggal 17-21 September 2023, Kemenlu telah memfasilitasi 2 wakil dari keluarga 7 ABK WNI untuk datang ke Mauritius guna mendapatkan informasi secara langsung dari aparat di Mauritius terkait kasus hilangnya 7 ABK WNI di Port Luis, Mauritius di tahun 2021. Seluruh keluarga 7 ABK WNI telah menerima pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan para ABK termasuk pencairan santunan asuransi dan uang duka dari perusahaan kapal asal Taiwan di tahun 2022. Namun, saat ini keluarga masih menanti kejelasan hasil penyelidikan kasus hilangnya para ABK.

Pada kunjungan ke Mauritius, keluarga telah menerima informasi oleh aparat, kasus dinyatakan ditutup hingga terdapat bukti baru. Dengan demikian, kasus 7 ABK Hilang di Mauritius dinyatakan selesai. Dalam kunjungan tersebut, juga menyertakan penyidik dari Bareskrim dan Div. Hubinter Polri guna memberikan pemahaman terkait penanganan kasus yang dilakukan oleh aparat Mauritius bagi keluarga WNI.

06 Repatriasi WNI *Overstayer* dan Anak-Anak Tidak Terdokumentasi dari Persatuan Emirat Arab

Persatuan Emirat Arab (PEA),
Juni & November 2023

Dalam rangka menangani kasus WNI overstayer dan anak-anak tidak terdokumentasi di Persatuan Emirat Arab (PEA), Kemenlu bekerja sama dengan Kepolisian RI dan Perhimpunan Dokter Indonesia di Timur Tengah menyelenggarakan pengambilan sampel tes Deoxyribonucleic Acid (DNA) terhadap 230 WNI *overstayer* yang terdiri dari 103 ibu, 1 ayah, dan 126 ATT pada tanggal 15-16 Juni 2023. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membuktikan hubungan kekerabatan antara orang tua dan anak yang merupakan salah satu syarat bagi para WNI untuk memohon Surat Kenal Lahir bagi para ATT, serta memperoleh *exit permit* agar dapat kembali ke Indonesia.

Pemerintah PEA selanjutnya memfasilitasi repatriasi 156 WNI yang ketibaannya difasilitasi oleh Kemenlu pada tanggal13 dan 19 November 2023. Sementara itu, 74 WNI lainnya (33 ibu dan 41 ATT) masih menunggu proses repatriasi berikutnya dan/atau mengurungkan niat untuk pulang ke Indonesia. Dalam hal ini, Kemenlu kemudian berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan BP2MI untuk penanganan lebih lanjut serta pemulangan para WNI ke daerah asalnya di Indonesia. Para WNI merupakan warga asal Banten, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat.

07 Penanganan Kasus WNI Terasosiasi Foreign Terrorist Fighter (FTF)

Pada tahun 2023, Kemlu mencatat dan memfasilitasi deportasi terhadap 13 orang WNI yang terasosiasi FTF, 3 orang dari Kawasan Asia Tenggara, 4 orang dari Afghanistan (seorang bapak bersama 3 orang anak usia 8, 5, dan 1 tahun), dan 6 orang dari Turki (termasuk seorang anak usia 5 tahun). Pemulangan ini merupakan arahan langsung dari Menkopolhukam dan dilakukan bekerja sama dengan K/L terkait di dalam negeri, diantaranya BNPT, Densus 88, dan Kementerian Sosial.

08 Respons Pemerintah RI terhadap Konflik di Jalur Gaza

Jalur Gaza, Oktober 2023

Menanggapi situasi keamanan di Jalur Gaza dan sekitarnya, Pemerintah RI siapkan Rencana Kontingensi dan evakuasi sejumlah WNI sebagai bentuk pelindungan di luar negeri.

Konflik antara kelompok Hamas dan Israel Defense Forces (IDF) yang berlangsung sejak tanggal 7 Oktober 2023 telah mengakibatkan kerusakan besar di Jalur Gaza dan memakan lebih dari 20.000 korban jiwa. Selain itu, konflik tersebut juga memicu keterlibatan aktor-aktor lain, seperti kelompok Hizbullah (Libanon) serta kelompok Houthi (Yaman). Sebagai respons dari konflik tersebut, Kementerian Luar Negeri mengantisipasi eskalasi situasi keamanan di Jalur Gaza dengan menyusun Rencana Kontingensi dan menetapkan status siaga pada wilayah tersebut.

a. Evakuasi WNI dari Jalur Gaza dan Yerusalem

Pemerintah RI mengevakuasi 8 WNI dari Jalur Gaza menuju Kairo (Mesir) dan 4 WNI dari Yerusalem menuju Amman (Yordania). Evakuasi dari Jalur Gaza dilakukan dalam 3 gelombang, yaitu pada tanggal 2 November 2023, 12 November 2023, dan 9 Desember.

Sedangkan, evakuasi dari Yerusalem dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2023. Meskipun demikian, terdapat 2 orang WNI yang merupakan relawan Medical Emergency Rescue Committee memutuskan untuk menetap di Khan Younis, wilayah selatan Jalur Gaza demi misi kemanusiaan.

> “Total berat bantuan kemanusiaan tersebut adalah 51.5 ton dan terdiri dari bahan makanan, peralatan medis, selimut, tenda dan barang-barang logistik lainnya

b. Pemberian Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Palestina

Menyikapi situasi krisis yang terjadi di Jalur Gaza, Kementerian Luar Negeri bersama dengan Kementerian Pertahanan, TNI-AU, dan Kepolisian RI mengirimkan bantuan kemanusiaan dari masyarakat dan dunia usaha Indonesia yang disalurkan melalui lembaga kemanusiaan untuk warga Palestina dengan menggunakan 2 pesawat TNI-AU dan 1 pesawat komersial. Total berat bantuan kemanusiaan tersebut adalah 51.5 ton dan terdiri dari bahan makanan, peralatan medis, selimut, tenda dan barang-barang logistik lainnya. Bantuan kemanusiaan tersebut diturunkan di El Arish (Mesir) dan diserahterimakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri kepada Egyptian Red Crescent untuk kemudian disalurkan kepada warga Palestina di Jalur Gaza melalui the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees dan International Committee of the Red Cross.

c. Persiapan dan Penjajakan Evakuasi WNI dari Libanon dan Suriah

Sebagai implikasi dari konflik antara kelompok Hamas dan IDF, terjadi aksi saling serang antara kelompok Hizbullah yang berbasis di Libanon dan IDF di wilayah selatan Libanon sejak tanggal 8 Oktober 2023. Selain itu, IDF juga kerap melancarkan serangan menuju Damaskus (Suriah) yang diyakini untuk menginterupsi pengiriman senjata dari Iran kepada sekutunya di Suriah dan Libanon, termasuk kelompok Hizbullah. Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenlu menjajaki evakuasi WNI dari Libanon dan Suriah melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait di Libanon, Suriah, dan Siprus. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk melindungi 217 WNI di Libanon dan 2.235 WNI di Suriah. Sebagai hasil dari penjajakan tersebut, Pemerintah RI mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai langkah-langkah yang dapat diambil serta komitmen pemangku kepentingan terkait untuk mengevakuasi WNI di Libanon maupun Suriah apabila terjadi eskalasi situasi keamanan di kedua negara.

09 Penanganan WNI Korban Penipuan Lowongan Pekerjaan Perusahaan Online Scam

Pada tahun 2023, setidaknya Kementerian Luar Negeri telah mengeluarkan anggaran sejumlah Rp2.500.000.000 (dua setengah Miliar rupiah) untuk penanganan kasus *online scam* termasuk pembiayaan tiket pemulangan bagi WNI yang telah teridentifikasi sebagai korban TPPO. Sekitar 1.132 orang dinyatakan terindikasi sebagai korban TPPO dan sekitar 677 orang dipulangkan dengan biaya negara. Setibanya di Indonesia, Kemenlu telah menggunakan proses rujukan nasional dalam penanganan korban TPPO dengan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan Kementerian Sosial.

> Sekitar 1.132 orang dinyatakan terindikasi sebagai korban TPPO dan sekitar 677 orang dipulangkan dengan biaya negara

Tercatat masih banyak masyarakat yang lalai untuk mengecek/memverifikasi kebenaran tawaran pekerjaan. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan *Public Awareness Campaign*, antara lain:

a. Bekerjasama dengan Kemenkopolhukam, Kemenko PMK dan BP2MI melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan edukasi publik di kota-kota yang menjadi kantong-kantong PMI unprosedural.

b. Bersama Kemkominfo membuat Iklan Layanan Masyarakat untuk waspada penipuan lowongan kerja.

c. Bersama IOM memproduksi film edukasi berjudul Through The Screen yang diharapkan dapat menjangkau masyarakat luas.

10 Pembebasan WNI dari Hukuman Mati

Selama periode Januari-Desember 2023, Pemerintah Indonesia berhasil memfasilitasi pembebasan 19 orang WNI dari ancaman hukuman mati (hukti). Pada tahun 2023 total jumlah kasus WNI terancam hukti yang masih ditangani di seluruh dunia berjumlah 166 orang, dimana 133 orang di antaranya adalah laki-laki dan 33 orang di antaranya adalah perempuan.

Salah satu kasus yang menyita perhatian publik di tahun 2023 adalah kasus LS, seorang WNI asal Trenggalek, Jawa Timur, yang terancam hukti di Malaysia karena diduga telah melakukan pembunuhan terhadap bayinya. Pada bulan Agustus 2023 lalu, Kemenlu telah memfasilitasi *family reunion* keluarga LS di Johor Bahru, Malaysia. Pada kesempatan tersebut, Ibu Kandung LS juga telah memberikan keterangan pembelaan sesuai dengan materi yang diberikan oleh *retainer lawyer.* Pada tanggal 12 Oktober 2023, hakim telah memutuskan bahwa LS divonis hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dihitung dari tanggal penangkapan. Sesuai dengan ketentuan hukum di Malaysia, LS hanya akan menjalani masa 2/3 dari total hukuman dan diperkirakan dapat bebas di bulan Mei tahun 2024.

> Pada tahun 2023 total jumlah kasus WNI terancam hukti yang masih ditangani di seluruh dunia berjumlah 166 orang

11 Pendampingan Hukum WNI Terpidana Hukti Seumur Hidup di Malaysia

Sejak akhir tahun 2023, Kemenlu berupaya melakukan pendampingan hukum bagi para WNI terpidana hukti dan seumur hidup yang berhak mengajukan review atau Peninjauan Kembali (PK). Hal ini berkaitan dengan diundangkannya UU Penghapusan Mandatory Death Penalty oleh Pemerintah Malaysia, yang mana memberikan kewenangan sementara kepada Mahkamah Federal untuk menerima permohonan PK dari narapidana yang telah dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Pada tanggal 20 September 2023, telah diselenggarakan Konsinyering untuk melakukan review kasus WNI terancam hukuman mati di seluruh Malaysia. Berdasarkan hasil sinkronisasi data seluruh Perwakilan RI di Malaysia serta konfirmasi daftar WNI yang akan mengikuti *review* dari Jabatan Penjara Malaysia, tercatat total 79 (tujuh puluh sembilan) kasus WNI yang akan mengikuti proses *review* atau PK di seluruh Malaysia, di mana 70 (tujuh puluh) kasus di antaranya adalah kasus hukuman mati dan 9 (sembilan) kasus hukuman seumur hidup. Proses review akan berjalan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak 12 September 2023. Saat ini proses pengajuan *review* telah dilakukan serta masih menunggu keluarnya jadwal sidang para WNI dari Mahkamah Federal.

12 Repatriasi Kelompok Rentan

Pemulangan kelompok rentan menjadi keperluan prioritas karena kelompok inilah yang paling rawan dan berbahaya keselamatan jiwanya di Depo Tahanan Imigrasi (DTI) Malaysia. Kemampuan bertahan hidup kelompok ini sangat bergantung kepada kualitas hidup yang baik, sementara kehidupan di dalam DTI sangat tidak memenuhi standar kualitas hidup mereka. Berbagai bencana atau kemalangan dapat dengan mudah menimpa mereka di dalam DTI, baik penyakit, kekurangan gizi/nutrisi, hingga tekanan mental. Sementara, sangatlah kecil kemungkinan mereka dapat pulang atas biaya mandiri atau menunggu inisiatif baik Pemerintah Malaysia membiayai pemulangannya. Sehingga, pemulangan atas biaya Pemri dalam satu kelompok pemulangan menjadi salah satu cara yang ditempuh.

Adapun dalam tahun 2023 terdapat 2 (dua) gelombang pemulangan WNI/PMI Kelompok Rentan yaitu pada 13 April 2023 sebanyak 153 orang dengan menggunakan penerbangan *charter* dan pada 12 Desember 2023 sebanyak 120 orang dibagi dalam beberapa penerbangan komersial.

13 Isu WNI Nelayan Lintas Batas

Sebagian besar pelanggaran yang dikenakan terhadap nelayan Indonesia di perairan asing adalah melakukan penangkapan ikan secara komersial tanpa izin dengan menggunakan kapal tanpa identitas. Selain itu, banyak ditemukan peralatan tangkap yang tidak dibenarkan penggunaannya di negara setempat, sehingga para WNI Nelayan Lintas Batas dikenai hukuman yang berat. Kemenlu juga mencermati para WNI Nelayan Lintas Batas yang tertangkap di wilayah Asia Tenggara banyak berasal dari daerah yang sama, yaitu Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kemenlu dalam menangani kasus WNI Nelayan Lintas Batas adalah:

- Berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk mendapatkan akses kekonsuleran.
- Memfasilitasi akses komunikasi.
- Melakukan pendampingan pada proses hukum kepada setiap WNI Nelayan Lintas Batas.
- Berkoordinasi dengan pemilik kapal, keluarga, dan pemerintah daerah untuk biaya pemulangan.
- Memberikan bantuan logistik berupa makanan dan kebutuhan pribadi.
- Pengurusan dan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).

14 **Bantuan Pemerintah Indonesia kepada WNI Korban Gempa Turki**

Turki, Februari 2023

Pada bulan Februari 2023 telah terjadi bencana gempa bumi di Turki dan Suriah yang memakan ribuan nyawa termasuk diantaranya WNI dan WNI yang terdampak. Dari total 314 WNI yang berdomisili di 10 provinsi terdampak gempa, terkonfirmasi 310 selamat, dan 4 meninggal dunia. Pada tanggal 21 Februari – 3 Maret 2023, Kemenlu telah melaksanakan rangkaian kegiatan pelindungan terhadap WNI yang terdampak gempa di Turki, termasuk di antaranya pencarian dan pemantauan WNI terdampak, distribusi logistik, perbantuan dan dukungan anggaran PWNI, serta asistensi pelaksanaan penugasan Emergency Medical Team (EMT) Indonesia di Turki.

Pemantauan dan kunjungan terdampak difokuskan ke daerah Hatay, di mana terdata sejumlah 76 WNI. Dari jumlah tersebut, 26 WNI (ibu dan anak) masih berada di Hatay. Sementara itu, 50 WNI lainnya telah mengungsi ke kota lain di Turki atau pulang ke Indonesia. Paket bantuan yang diberikan berupa selimut, kantung tidur, dan makanan Indonesia. Seorang WNI yang berada di Kota Nurdagi diberikan bantuan berupa generator listrik karena wilayah yang ditinggalinya sudah tidak lagi teraliri listrik dan masih harus melakukan terapi penguapan bagi anaknya yang mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat suhu dingin selama berada di tenda tanpa pemanas.

15 **Fasilitasi Pemulangan Jenazah JPC, Korban Pembunuhan di Jepang**

Jepang, 19 Oktober 2023

Pada 19 Oktober 2023, Kemenlu telah melakukan fasilitasi ketibaan jenazah Almh. JPC di Bandara Minangkabau, mendampingi pemulangan jenazah hingga menghadiri pemakaman Almh. di Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Almarhum adalah WNI pelajar yang sempat menempuh sekolah di Jepang sebelum ditemukan meninggal dunia pada 22 Agustus 2023 di sebuah apartemen milik WN Jepang. Hasil otopsi Kepolisian setempat menyebutkan penyebab kematian tidak diketahui, dan WN Jepang pemilik apartmen ditahan atas tuduhan penelantaran jenazah dan pengambilan uang Almarhum.

Proyeksi Ke Depan

Salah satu proyeksi penting di tahun 2024 adalah prediksi akan terjadinya resesi ekonomi global dan situasi global yang tidak stabil. Situasi global yang tidak stabil dapat mempengaruhi bahkan meningkatkan kasus-kasus WNI di luar negeri. Inflasi global dan krisis ekonomi dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja sehingga muncul kasus ketenagakerjaan.

Konflik-konflik di berbagai kawasan juga memerlukan kewaspadaan khususnya untuk mengantisipasi misi evakuasi yang diperlukan guna menyelamatkan WNI dari wilayah konflik, termasuk krisis di Palestina. Sebagai upaya dalam menangani kasus WNI di luar negeri Kemenlu anatara lain melalui upaya sebagai berikut:

01. Menyusun Strategi dan Program Pelayanan dan Pelindungan WNI

Menyusun strategi dan program pelayanan dan pelindungan WNI dalam mengatasi berbagai tantangan dalam penyelesaian kasus. Strategi ini tentu perlu dukungan sumber daya yang memadai baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia untuk memenuhi target IKU persentase penyelesaian kasus WNI di luar negeri sebesar 84% di tahun 2024.

02. Rencana penyelenggaraan upaya promosi yang dilakukan oleh Pusat dan Perwakilan RI

Bekerja sama dengan instansi terkait guna menyusun strategi pencegahan kasus dengan melaksanakan kampanye penyadaran publik. Hal ini merupakan langkah edukasi kepada masyarakat agar dapat melakukan proses migrasi yang aman sehingga terhindar dari masalah di luar negeri.

03. Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Penguatan kapasitas kelembagaan pelayanan pelindungan, melaksanakan diplomasi pelindungan, serta mengoptimalksan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan dan pelindungan.

Dokumentasi Program Pendukung Capaian IKU C1.1: Persentase Kasus WNI di Luar Negeri yang Diselesaikan

Gambar III.61
Bantuan Pemerintah Indonesia kepada WNI Korban Gempa Turki, Maret 2023 (Turki, Maret 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.62
Penanganan evakuasi WNI dari Sudan (Sudan, April 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.63
Pemulangan 7 Anak WNI terlantar dari Taiwan (Taiwan, Juli 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.64
Fasilitasi Pemulangan Jenazah JPC, Korban Pembunuhan di Jepang (Sumatera Barat, 19 Oktober 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.65
Penyambutan WNI Evacuee dari Palestina di Bandara Soekarno-Hatta (Tangerang, November 2023)
Sumber: Kemenlu

Analisis IKU C1.2

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik

Deskripsi IKU

Pelayanan publik adalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik merepresentasikan penilaian persepsi terhadap kepuasan atas kualitas pelayanan publik Kementerian Luar Negeri yang diberikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.

Adapun perhitungan realisasi dan capaian IKU didapatkan dari penjumlahan realisasi dan capaian dari 4 Sub IKU sesuai dengan bobotnya. Realisasi IKU menghasilkan Nilai Interval (NI) yang kemudian dikonversi menjadi Nilai Persepsi dengan satuan indeks yang menunjukkan predikat mutu pelayanan, sesuai dengan Tabel Nilai Interval dalam Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

IKU C1.2
Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik

Merepresentasikan penilaian persepsi terhadap kepuasan atas kualitas pelayanan publik Kementerian Luar Negeri yang diberikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.

Sub IKU 1 Nilai persepsi kepuasan pelayanan keprotokolan	Bobot 10%
Sub IKU 2 Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran	Bobot 40%
Sub IKU 3 Nilai persepsi kepuasan pelayanan fasilitas diplomatik	Bobot 10%
Sub IKU 4 Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI	Bobot 40%

Realisasi dihitung melalui survei menghasilkan Nilai Interval yang kemudian dikonversi menjadi Nilai Persepsi dengan satuan indeks.

4 Sub IKU pada IKU-2: Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik terdiri dari:

SUB IKU 1

Nilai persepsi kepuasan pelayanan keprotokolan

Bobot 10%

Sub IKU ini mengukur persepsi publik mengenai layanan dalam lingkup keprotokolan berkaitan dengan aturan acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

Adapun Layanan keprotokolan yang disurvei meliputi layanan keprotokolan pada VVIP, layanan keprotokolan VIP dan Pelayanan Keprotokolan untuk Pelaku Layanan Keprotokolan.

Layanan keprotokolan VVIP dan VIP meliputi pelayanan keprotokolan pada kunjungan Presiden/Wakil Presiden ke luar negeri, kunjungan tamu negara/pemerintah asing ke Indonesia, pelaksanaan pertemuan internasional di Indonesia, pelaksanaan upacara kredensial atau penyerahan surat kepercayaan duta besar asing kepada Presiden RI, bantuan keprotokolan pada kegiatan Kementerian/Lembaga yang menghadirkan pejabat asing, proses surat kepercayaan/ *Agrément* duta besar negara asing dan proses pemberian rekomendasi *VIP room* di bandara internasional di Indonesia.

Sementara Pelayanan Keprotokolan untuk Pelaku Layanan Keprotokolan merupakan kegiatan peningkatan kapasitas bidang protokol dimana kepada peserta dilakukan survei mengenai pemahaman tentang keprotokolan negara yang disampaikan pada kegiatan tersebut.

SUB IKU 2

Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran

Bobot 40%

Sub IKU ini mengukur persepsi publik mengenai layanan kekonsuleran yang mencakup pelayanan penerbitan paspor diplomatik dan dinas, *exit permit* dan rekomendasi visa; visa diplomatik dan dinas; perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali WNA pemegang izin tinggal diplomatik dan dinas; perizinan penerbangan, pelayaran, legalisasi dan jasa konsuler warga negara asing. Dengan cara melakukan survei secara berkala di loket pelayanan kekonsuleran untuk mengukur Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Sub IKU ini memiliki bobot yang lebih tinggi dikarenakan secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat dari berbagai lini sehingga dapat mengadopsi masukan dari publik/umum atas pelayanan yang diberikan.

SUB IKU 3

Nilai persepsi kepuasan pelayanan fasilitas diplomatik

Bobot 10%

Sub IKU ini mengukur persepsi publik mengenai layanan fasilitas diplomatik mencakup layanan dalam pemberian fasilitas kepada perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang meliputi: fasilitas kendaraan bermotor, fasilitas perpajakan dan prasarana, fasilitas pendaftaran, kunjungan daerah dan akreditasi, fasilitas perizinan, bangunan, dan *monitoring*, serta fasilitas importasi atau eksportasi barang.

SUB IKU 4

Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI

Bobot 40%

Sub IKU ini mengukur persepsi publik mengenai layanan pelindungan WNI mencakup pemberian layanan dalam penanganan kasus, pemberian informasi melalui kampanye penyadaran publik, bimbingan teknis dan FGD.

Perhitungan IKU Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik, menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU} = (10\% \times \text{Realisasi Sub IKU 1}) + (40\% \times \text{Realisasi Sub IKU 2}) + (10\% \times \text{Realisasi Sub IKU 3}) + (40\% \times \text{Realisasi Sub IKU 4})$$

Dalam penentuan Indeks Kepuasan Pelayanan Perlindungan WNI melalui survei menggunakan kuesioner (manual dan/atau elektronik) kepada responden terkait kegiatan pelayanan dan pelindungan WNI. Penentuan Nilai Persepsi Pelayanan Pelindungan WNI sesuai dengan Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei dilakukan dengan responden yaitu orang/penerima jasa pelayanan Pelindungan WNI. Sub IKU ini juga memiliki bobot yang tinggi karena menjadi proyek Prioritas Nasional (ProPN) penguatan pelindungan WNI di tingkat bilateral, regional, dan multilateral.

Tabel III.35
Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik

Nilai Persepsi	Nilai Interval Indeks	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

> Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik merepresentasikan penilaian persepsi terhadap kepuasan atas kualitas pelayanan publik Kementerian Luar Negeri yang diberikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan

Informasi Kinerja

Tabel III.36
Capaian IKU C1.2 Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Nilai Realisasi SUB IKU	Nilai Bobot
Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik	Realisasi SUB IKU 1 Nilai persepsi kepuasan pelayanan keprotokolan (10%)	4	0,4
	Realisasi SUB IKU 2 Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran (40%)	4	1,6
	Realisasi SUB IKU 3 Nilai persepsi kepuasan pelayanan fasilitas diplomatik (10%)	4	0,4
	Realisasi SUB IKU 4 Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI (40%)	4	1,6

Target	Realisasi	Capaian
4	4	100%

5.206
Responden

Mendukung IKU Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik

359
Responden Pelayanan Keprotokolan

4.035
Responden Pelayanan Kekonsuleran

413
Responden Pelayanan Fasilitas Diplomatik

399
Responden Pelayanan Pelindungan WNI

Pada tahun 2023, realisasi IKU C1.2 Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik adalah sebesar 4 dari target sebesar 4 Hal ini dicapai dari jumlah responden yang mengisi survei atas pelayanan publik yang dilakukan oleh Kemenlu. Adapun informasi kinerja dari masing-masing Sub IKU pada Nilai Persepsi Kepauasan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

01. Nilai Persepsi Kepuasan — Pelayanan Keprotokolan

Mendapatkan nilai 4 atau sangat baik. Pencapaian target nilai persepsi tersebut diperoleh dari 359 responden dari penerima pelayanan keprotokolan untuk VVIP dan VIP serta peserta kegiatan peningkatan kapasitas bidang protokol yang mengisi survei pelayanan keprotokolan sepanjang tahun 2023.

Pada responden survei layanan keprotokolan pada VVIP dan VIP memiliki 4 pertanyaan kuesioner yang sama, dimana unsur pertanyaannya adalah perihal prosedur, kompetensi pelaksana dan sistem pelayanan keseluruhan. Dari 132 responden penerima layanan keprotokolan pada VVIP merespon 80,49% sangat baik, 17,42% baik, 1,14% kurang baik dan 0,95% tidak baik. Sementara dari 119 responden penerima layanan keprotokolan VIP merespon 76,05% sangat baik, 23,11% baik dan 0,84% kurang baik.

Sementara pada survei Layanan keprotokolan untuk pelaku layanan keprotokolan berupa kegiatan peningkatan kapasitas bidang protokol, unsur pertanyaan pada survei mencakup Mekanisme, tingkat pemahaman dan kompetensi pelaksana. Dari 108 resonden merespon sangat baik sebanyak 77,08%, baik sebanyak 20,83%, kurang baik sebanyak 1,39% dan tidak baik sebanyak 0,69%.

Tabel III.37
Jumlah Responden Survei Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Keprotokolan

No.	Responden Survei	Jumlah Responden	Nilai Persepsi
1	Layanan keprotokolan pada VVIP	132	4
2	Layanan keprotokolan pada VIP	119	4
3	Pelayanan Keprotokolan untuk Pelaku Layanan Keprotokolan	108	4

02. Nilai Persepsi Kepuasan — Pelayanan Kekonsuleran

Mendapatkan nilai 4 atau sangat baik. Pada tahun 2023 jumlah pelayanan kekonsuleran sebesar 223.475 layanan dan mendapatkan responden sebanyak 4.035 dari survei yang disampaikan kepada pengguna layanan.

Unsur-unsur yang ditanyakan dalam survei kepada penerima layanan kekonsuleran mencakup kesesuaian persyaratan, kemudahan prosedur, ketepatan waktu, produk pelayanan, kompetensi pelaksana pelayanan, perilaku pelaksana pelayanan, penanganan pengaduan, kualitas sarana dan prasarana serta pemanfaatan aplikasi teknologi. Dari 4.035 responden merespon 89,93% sangat baik, 9,58% baik, 0,48% kurang baik dan 0,01% tidak baik.

03. Pelayanan Fasilitas Diplomatik

Nilai Persepsi Kepuasan

Mendapatkan nilai 4 atau sangat baik. Pada tahun 2023 jumlah pelayanan fasilitas diplomatik mendapatkan responden sebanyak 413 dari survei yang disampaikan kepada pengguna layanan.

Adapun unsur pertanyaan pada survei kepada responden pelayanan fasilitas diplomatik mencakup ksesuaian prosedur, kemudahan prosedur, kecepatan waktu, tarif, kualitas produk, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, kualitas sarana dan prasaran serta penanganan pengaduan. Dari 413 responden merespon sangat baik sebanyak 95,37%, baik sebanyak 4,36% dan kurang baik sebanyak 0,27%.

04. Pelayanan Pelindungan WNI

Nilai Persepsi Kepuasan

Mendapatkan nilai 4 atau sangat baik. Pada tahun 2023 jumlah pelayanan pelindungan WNI mendapatkan responden sebanyak 399 dari survei yang disampaikan kepada pengguna layanan pada pengaduan langsung.

Unsur-unsur pertanyaan pada survei kepada responden penerima layanan pelindungan WNI mencakup prosedur, kecepatan waktu, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, kemudahan dan pengananan pengaduan, sarana dan prasarana. Dari 399 responden merespon sangat baik sebanyak 61,20%, baik 37,17%, kurang baik sebanyak 1,40% dan tidak baik sebanyak 0,05% serta terdapat jawaban responden yang tidak valid sebanyak 0,18%.

Realisasi IKU C1.2 diperoleh dari penjumlahan bobot atas capaian SUB IKU 1 sampai dengan SUB IKU 4. Pada tahun 2023, seluruh realisasi SUB IKU adalah sebesar 4 dari target sebesar 4, sehingga capaian IKU sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan tingginya komitmen Kemenlu dalam upaya memberikan pelayanan publik yang optimal.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.38
Target, Realisasi dan Capaian IKU Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik

Kode IKU		2020	2021		2022		2023	
S2.1	Target	4	4	↔	4	↔	**4**	↔
	Realisasi	3,87	4	↑	4	↔	**4**	↔
	Capaian	96,80%	100%	↑	100%	↔	**100%**	↔
SUB IKU 1	Target	4	4	↔	4	↔	**4**	↔
	Realisasi	3,76	4	↑	4	↔	**4**	↔
	Capaian	94,00%	100%	↑	100%	↔	**100%**	↔
SUB IKU 2	Target	4	4	↔	4	↔	**4**	↔
	Realisasi	4	4	↔	4	↔	**4**	↔
	Capaian	100%	100%	↔	100%	↔	**100%**	↔
SUB IKU 3	Target	4	4	↔	4	↔	**4**	↔
	Realisasi	4	4	↔	4	↔	**4**	↔
	Capaian	100%	100%	↔	100%	↔	**100%**	↔
SUB IKU 4	Target	4	4	↔	4	↔	**4**	↔
	Realisasi	3,74	4	↑	4	↔	**4**	↔
	Capaian	93,50%	100%	↑	100%	↔	**100%**	↔

Sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 capaian IKU C1.2 Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik, cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan capaian IKU sebesar 100% atau berhasil mencapai target yang ditetapkan. Adapun *highlights* perbandingan kinerja selama 4 tahun terakhir (2020 – 2023) pada setiap IKU adalah sebagai berikut:

01. Nilai persepsi kepuasan pelayanan keprotokolan

Selama 4 tahun terakhir, cenderung meningkat dengan capaian 100%. Tingginya realisasi diantaranya dihasilkan dari semakin banyaknya jumlah layanan keprotokolan selama Keketuaan ASEAN, dimana telah terlaksana KTT ASEAN ke 42 dan 43.

02. Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran

Selama 4 tahun berturut-turut mencapai nilai indeks 4. Pada tahun 2023 Kemenlu berhasil meraih penghargaan bidang pelayanan publik yaitu Penganugerahan Kepatuhan Tinggi untuk Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) oleh Ombudsman RI.

03. Nilai persepsi kepuasan pelayanan fasilitas diplomatik

Selama 4 tahun berturut-turut mencapai nilai indeks 4, namun terdapat peningkatan signifikan pada tahun 2023 yang mana tidak terdapat Perwakilan Negara Asing yang menyatakan tidak puas dengan pelayanan fasilitas diplomatik.

04. Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI

Selama 4 tahun terakhir, cenderung meningkat dengan capaian 100%. Pada tahun 2023 Kemenlu telah memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM) yang diperoleh dari KemenPAN-RB. Selain itu, pelayanan pelindungan WNI telah menerapkan ISO 37001:2016 - Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO 9001:2015 - Sistem Manajemen Mutu.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Penyebab keberhasilan pencapaian IKU Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik, tidak lepas dari Sub IKU pendukungnya, adapun analisis dari setiap Sub IKU pendukung IKU Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

01

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Keprotokolan

Dikarenakan terdapat peningkatan capaian kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke luar negeri, yang pada perencanaan awal ditargetkan 30 kunjungan, lalu pada bulan Oktober 2023 dilakukan revisi target menjadi 35 Kunjungan Luar Negeri. Namun demikian pada tahun 2023 tercatat realisasi Kunjungan Luar Negeri Presiden dan Wakil Presiden ke Luar Negeri adalah 29 kunjungan dan kunjungan setingkat kepala negara ke Indonesia sebanyak 16 kunjungan, sehingga tercatat 45 pelayanan keprotokolan atau sekitar 130% dari revisi target.

Hal ini selaras dengan upaya peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional diantaranya dengan mempromosikan upaya penyelesaian kasus kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel terhadap Bangsa Palestina dalam berbagai rangkaian kunjungan bilateral dan konferensi tingkat tinggi (KTT).

02

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dari pencapaian target di antaranya:

a. SDM yang kompeten, berintegritas dan berdedikasi tinggi, komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik di Kemenlu serta pemangku kepentingan eksternal.

b. Dukungan dari pengguna layanan yang mengapresiasi pelayanan publik dengan memberikan nilai terbaik pada Survei Kepuasan Masyarakat.

c. Terbangunnya infrastruktur sistem informasi pelayanan publik yang baik sehingga membuat kinerja pelayanan efektif dan efisien.

03

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Fasilitas Diplomatik

a. Pada tahun 2023 dalam tahapan the 11th Joint Diplomatic Facility and Consular Consultation, berhasil disepakati solusi atas permasalahan pembangunan dengan salah satu negara sahabat yang sudah tertunda beberapa tahun.

b. Tersusunnya Handbook of Policies and Guidelines for Foreign Missions in Indonesia sebagai rujukan kepada Perwakilan Negara Asing terkait pemberian fasilitas diplomatik, memberikan panduan dan kemudahan bagi para staf setempat Perwakilan Negara Asing untuk menindaklanjuti kendala teknis di lapangan.

04

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI

a. Menyelenggarakan berbagai bimbingan teknis dan pelatihan yang diikuti oleh staf Kemenlu, Perwakilan RI, dan Kementerian/Lembaga terkait.

b. Menjadi objek pemeriksaan Audit Kinerja Terinci oleh Badan Pemeriksa Keuangan khusus untuk tema Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

c. Evakuasi WNI dari Sudan.

d. Menyelenggarakan kampanye penyadaran publik dan mendukung penyelenggaraan kegiatan serupa yang diselenggarakan oleh K/L lainnya.

e. Berbagai kegiatan repatriasi yang difasilitasi oleh Kemlu.

Kendala dan Tantangan

Walaupun capaian IKU Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik telah tercapai sesuai target, namun demikian pencapaian tersebut tercapai bukan tanpa kendala dan tantangan. Adapun kendala dan tantangan dari setiap Sub IKU pendukung IKU Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik antara lain sebagai berikut:

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Keprotokolan

Terdapat beberapa hal yang penting untuk menjadi perhatian utama dalam pencapaian sasaran strategis persepsi kepuasan pelayanan keprotokolan, antara lain:

01

Memastikan Pelaksanaan Pengisian Survei Pelayanan Keprotokolan

Metode hasil survei merupakan metode yang digunakan dalam penilaian nilai persepsi kepuasan pelayanan keprotokolan. Oleh karena itu, pelaksana layanan keprotokolan harus mampu memastikan bahwa penerima layanan keprotokolan dapat mengisi survei atas pelayanan keprotokolan yang telah diterima. Dalam pelaksanaan survei, terkadang petugas protokol dihadapkan pada kesulitan untuk melakukan survei terhadap subjek yang merupakan pejabat setingkat Menteri (VIP) atau Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan (VVIP). Sehubungan dengan hal tersebut, survei dilaksanakan melalui bantuan perangkat melekat terkait (asisten, sekretaris dan pengamanan) yang terlibat dalam kegiatan dimaksud.

02

Kesiapan Layanan Akibat Jumlah Kunjungan yang Jauh Melebihi Target

Keketuaan Indonesia pada KTT ASEAN ke 42 dan 43 merupakan tema utama pelayanan keprotokolan sepanjang tahun 2023. Sepanjang tahun ini, jumlah pelayanan keprotokolan untuk kunjungan VVIP, VIP serta pertemuan internasional mencapai jumlah yang jauh melebihi target di awal tahun. Hal ini kemudian berdampak terhadap kesiapan pemberian pelayanan keprotokolan.

03

Kesiapan Layanan Akibat Jumlah Kunjungan yang Jauh Melebihi Target

Pelaksanaan KTT ASEAN ke 42 di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tantangan dalam penyesuaian pengaturan keprotokolan. Keprotokolan KTT ASEAN ke 42 dan 43 didasarkan pada ASEAN Protocol Guidelines dan disesuaikan dengan standar pelayanan keprotokolan negara *host*. Dimana dalam pelaksanaan KTT ASEAN di Labuan Bajo, terdapat banyak tantangan yang umumnya tidak ditemukan saat pelaksanaan di Jakarta dan daerah lainnya seperti Bali diantaranya keterbatasan akomodasi, aksesibilitas dan kesiapan daerah. Hal ini kemudian berdampak terhadap optimalisasi pelayanan keprotokolan yang diterima oleh masing-masing negara saat menghadiri rangkaian KTT ASEAN ke 42.

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran

Terdapat beberapa tantangan yang sering dihadapi di lapangan seperti:

01

Kurangnya Pemahaman Pemohon Mengenai SLA

Kurangnya pemahaman dari pihak pemohon mengenai *Service Level Agreement* (SLA) dan prosedur dari masing-masing layanan kekonsuleran sehingga seringkali penyelesaian permohonan diharapkan untuk diselesaikan tidak sesuai dengan SLA.

02

Semakin Tingginya Ekspektasi Penerima Layanan Melebihi SLA

Semakin tingginya ekspektasi penerima layanan untuk menyelesaikan permohonan lebih cepat dari SLA dikarenakan keberangkatan perjalanan dinas yang sudah dekat. Sementara dalam situasi tertentu, terdapat urgensi untuk menyelesaikan terlebih dahulu dokumen perjalanan dinas yang menyangkut VVIP maupun yang mendesak sehingga membuat pelayanan bagi pemohon lain melebihi SLA.

03

Pemberian Layanan Berdasarkan Asas Resiprositas

Pemberian layanan berdasarkan asas resiprositas dan proses pemberian otorisasi visa diplomatik dan dinas terkadang melebihi SLA untuk beberapa permohonan tertentu, khususnya yang membutuhkan persetujuan dan/atau pertimbangan khusus dari pimpinan, unit internal Kemlu, atau K/L terkait.

04

Kendala pada Aplikasi Terkait

Kendala pada aplikasi terkait belum terkoneksi antara data Izin Tinggal dan data penerbitan Visa yang menyebabkan terjadinya perbedaan data dalam memberikan visa masuk yang berdampak terhadap pemberian izin tinggal yang tertunda; dan belum adanya fitur *Exit Permit Only* (EPO) dengan fitur Izin Tinggal.

05

Gangguan Teknis Infrastruktur Pelayanan

Dukungan infrastruktur pelayanan seperti printer dan komputer yang terkadang mengalami gangguan teknis akibat banyaknya memproses permohonan. Selain itu, mobilitas staf yang tinggi membutuhkan laptop dalam menerbitkan notifikasi kekonsuleran yang timbul saat di luar jam kerja kantor. Sementara kebutuhan laptop dalam menghasilkan produk-produk pelayanan kekonsuleran dengan intensitas yang tinggi perlu dipastikan ketersediaan tinta khusus paspor serta *exit permit.*

06

Gangguan Teknis Aplikasi Terkait

Gangguan teknis pada aplikasi baik pada aplikasi Kemlu maupun sistem yang terkoneksi dengan mitra seperti Bank Mandiri dalam pembayaran PNBP Legalisasi oleh pemohon, serta aplikasi dari K/L lain yang terkait dan merupakan bagian dari rangkaian dengan pemrosesan dokumen kekonsuleran di Kemlu.

07

Penentuan Rute Penerbangan Tamu VVIP dan VIP

Dalam hal rute penerbangan tamu VVIP dan VIP, perlu ditentukan rute yang aman dan cepat. Sehngga menjadi tantangan tersendiri apabila terdapat beberapa kali penyesuaian rute, serta banyaknya wilayah udara negara asing yang dilalui dengan waktu yang tersisa untuk memperoleh *flight clearance* sangat sempit.

08

Kurangnya Pemahaman *Stakeholders* di Luar Kemlu Mengenai Peraturan

Kurangnya pemahaman para *stakeholders* di luar Kemlu seperti PNA/OI mengenai peraturan-peraturan maupun *update* peraturan sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan seperti PNA/OI yang tidak memperhatikan masa berlaku izin tinggalnya sehingga kemudian mengalami permasalahan di Imigrasi saat akan meninggalkan Indonesia; penggunaan Bebas Visa Kedatangan (BVK) atau *Visa on Arrival* (VoA) oleh PNA/OI saat masuk ke Indonesia yang membuat tidak dapat diberikan izin tinggal; dan petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang belum memahami daftar negara Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas (PBVDD) yang mengakibatkan WNA pemegang paspor diplomatik/dinas masih terkendala saat ingin memanfaatkan fasilitas PBVDD.

09

Kegiatan/Program yang Belum Direncanakan Sebelumnya

Kegiatan/program yang belum direncanakan sebelumnya misalnya ketidakpastian jumlah permohonan paspor dinas pada tahun berjalan dari beberapa K/L merupakan tantangan tersendiri terhadap ketersediaan anggaran serta alokasi ketersediaan blangko paspor dinas. Selain itu, munculnya perjalanan dinas yang mendesak serta tidak terencana, karena sifat kejadian yang disebabkan oleh kecelakaan, bencana alam, dan perkembangan kasus-kasus sensitif di media sosial yang memerlukan penanganan dan perhatian khusus.

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Fasilitas Diplomatik

Terdapat tantangan dalam pemberian fasilitas diplomatik dikarenakan sebagai berikut:

01

Meningkatnya Permintaan Fasilitas Diplomatik

Semakin tingginya permintaan fasilitas diplomatik dari Perwakilan Negara Asing (PNA).

02

Perubahan Kebijakan Dalam Negeri

Perubahan kebijakan dalam negeri bagi bagi PNA.

03

Kurangnya Pemahaman Mitra Kerja Kemenlu

Kurangnya pemahaman mitra kerja Kemenlu perihal hak-hak istimewa dan kekebalan hukum yang dimiliki PNA dan/atau korps diplomatik.

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI

Terdapat beberapa tantangan yang umumnya dihadapi dalam pelaksanaannya pelayanan pelindungan WNI, antara lain:

01

Rendahnya Pemahaman Publik tentang Prosedur Migrasi

Rendahnya pemahaman publik tentang prosedur migrasi aman, sehingga tidak memahami alur proses penanganan kasus WNI di luar negeri.

02

Ekspektasi Penerima Layanan terhadap Kecepatan Penanganan Kasus WNI

Tingginya ekspektasi penerima layanan terhadap kecepatan penanganan kasus WNI di luar negeri tidak berbanding lurus dengan banyaknya permohonan penanganan kasus yang diterima oleh Kemlu dan Perwakilan RI.

03

Rendahnya Tingkat Penggunaan Portal Peduli WNI

Minimnya penggunaan Portal Peduli WNI oleh masyarakat yang seyogianya merupakan *one stop application* untuk pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri. Rendahnya tingkat penggunaan Portal peduli WNI menyebabkan inefisiensi penanganan kasus WNI di luar negeri.

Upaya Perbaikan

Untuk mengatasi kendala-kendala yang disampaikan sebelumnya, Kemenlu perlu mengambil langkah upaya perbaikan dalam rangka mencapai target IKU Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik, antara lain sebagai berikut:

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Keprotokolan

01

Komitmen Pengisian Survei dan Metode Alternatif Survei

Pelaksana layanan keprotokolan harus mampu memberikan komitmen dengan penerima layanan keprotokolan untuk dapat mengisi kuesioner terkait persepsi kepuasan pelayanan keprotokolan. Metode survei secara elektronik secara teknis sudah mampu menjawab tantangan perbedaan jarak antara pelaksana dan penerima layanan keprotokolan. Namun, kedepannya perlu dipertimbangkan lagi untuk mencari alternatif lain selain survei persepsi kepuasan pelayanan keprotokolan.

Hal ini dikarenakan, dalam pelaksanaan hubungan luar negeri terdapat asas timbal balik (resiprositas) yang menjadi landasan pelayanan dan fasilitas yang diberikan. Sebagai contoh, saat melakukan Kunjungan ke Inggris, Pejabat Setingkat Kepala Negara Indonesia (saat itu Wakil Presiden RI), harus tetap dikenakan biaya oleh Pihak Inggris saat menggunakan Ruang VIP Bandara.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia juga membatasi layanan dan akses Ruang VIP Bandara terhadap Pemerintah Inggris. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyarankan agar dapat dilakukan metode penilaian persepsi kepuasan pelayanan keprotokolan selain survei, diantaranya dengan metode tabulasi indikator keberhasilan kunjungan seperti tercapainya rencana kegiatan yang disusun saat pelaksanaan kunjungan.

02

Aktif dalam Koordinasi Persiapan sebagai Tuan Rumah pada Pertemuan Internasional

Pada tahun 2024, Indonesia akan menjadi tuan rumah pada pertemuan internasional seperti World Water Forum (WWF). Pengalaman pemberian layanan keprotokolan pada KTT ASEAN dan KTT AIS di tahun 2023 serta Presidensi Indonesia G20 di tahun 2022 akan sangat penting, dimana dengan WWF 2024, Indonesia akan menjadi tuan rumah dari rangkaian pertemuan internasional di berbagai wilayah di Indonesia yang melibatkan partisipasi lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Guna mendukung kelancaran kegiatan ini, Kemenlu sangat aktif dalam koordinasi persiapan melalui rapat dan kunjungan lapangan guna memantau kesiapan berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

03

Diseminasi Berkala Informasi Standar Layanan Keprotokolan

Kemenlu secara berkala telah melakukan diseminasi informasi mengenai standar layanan keprotokolan untuk pertemuan internasional dan kunjungan tamu asing kepada Kementerian/ Lembaga serta instansi terkait lainnya. Hal ini mampu mendukung dalam pemberian layanan keprotokolan serta secara langsung maupun tidak berdampak terhadap persepsi kepuasan pelayanan keprotokolan. Guna mendukung kelancaran kegiatan ini, Kemenlu sangat aktif dalam menjalin kerja sama dan melakukan sosialisasi keprotokolan di daerah-daerah yang melibatkan Pemerintah Daerah serta Kementerian dan Lembaga terkait.

04

Aktif Berkoordinasi dengan Berbagai Pihak Terkait Pemberian Layanan Keprotokolan

Kemenlu juga aktif berkoordinasi dan berkonsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam pemberian layanan keprotokolan. Pemangku kepentingan tersebut antara lain Komunitas Bandara di pusat maupun di daerah, Aparat Keamanan, Forkopimda dan termasuk panitia pelaksana pertemuan internasional di masing-masing Kementerian/ Lembaga.

05

Koordinasi Terkait Agenda Kunjungan

Koordinasi juga penting untuk dilakukan dengan Sekretariat Presiden/Wakil Presiden RI, Paspampres, Sekretaris Militer dan Sekretariat Negara terkait agenda kunjungan Tamu VVIP Asing ke Indonesia maupun Kunjungan Kerja Presiden/Wakil Presiden RI ke luar negeri. Hal ini sangat penting guna memastikan kenyamanan dan keamanan yang diberikan dapat berjalan bersama secara harmonis.

06

Pertimbangan Sensitivitas Hubungan antar Negara dalam Pemberian Layanan Keprotokolan

Kondisi kemananan global yang sangat dinamis pada tahun 2023 menjadi salah satu tantangan dalam pelayanan keprotokolan. Pertimbangan sensitivitas hubungan antar negara menjadi salah satu faktor penting dalam pemberian layanan keprotokolan. Sebagai contoh, saat menempatkan Negara-Negara yang sedang bergesekan seperti Rusia dan Pihak Barat (Amerika dan Beberapa Negara Persatuan Eropa) dalam suatu konferensi agar tidak terlalu berdekatan, sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan pertemuan dan hasilnya dapat sesuai dengan harapan Indonesia sebagai negara *host*.

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran

01

Manajemen Ekspektasi kepada Penerima Layanan

Melakukan manajemen ekspektasi kepada penerima layanan dengan menjelaskan batasan-batasan layanan yang dapat diberikan, serta memberikan informasi lebih awal sekiranya terdapat mundurnya penerbitan dokumen sesuai SLA.

02

Manajemen Ekspektasi kepada Penerima Layanan

Melaksanakan diseminasi informasi atau sosialisasi mengenai pelayanan kekonsuleran melalui kanal media sosial terhadap peraturan terbaru maupun *update* dari aplikasi pelayanan kekonsuleran kepada pengguna layanan.

03

Peninjauan Kembali Format Kegiatan dan Layanan

Peninjauan kembali terhadap berbagai format kegiatan dan layanan untuk meningkatkan kepuasan para penerima layanan kekonsuleran.

04

Perbaikan Aplikasi Pelayanan Kekonsuleran

Koordinasi internal dan *stakeholders* terkait untuk mengatasi gangguan-gangguan teknis pada aplikasi pelayanan kekonsuleran dan melakukan perbaikan/*upgrade* aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan masukan dari pengguna layanan.

05

Koordinasi antar Pemangku kepentingan

Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara Kementerian/Lembaga/pemangku kepentingan lain dalam mengatasi segala tantangan/kendala yang ditemukan di lapangan.

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Fasilitas Diplomatik

01

Sosialisasi terkait Pemberian Fasilitas Diplomatik

Menyelenggarakan sosialisasi terkait pemberian fasilitas diplomatik, hak-hak istimewa dan kekebalan hukum kepada para Perwakilan Negara Asing/ Organisasi Internasional, dan mengikutsertakan Kementerian/Lembaga terkait.

02

Melakukan Forum Diskusi Rutin

Melakukan forum diskusi rutin Kementerian/ Lembaga yang terlibat dalam pemberian fasilitas diplomatik untuk penyelesaian isu-isu di level teknis maupun menyamakan persepsi dalam kebijakan pemberian fasilitas diplomatik.

03

Terobosan dengan Survei Secara *Online*

Membuat terobosan dengan survei secara *online* dengan menggunakan aplikasi Gform, serta selalu memberikan *reminder* kepada PNA/OI untuk mengisi dan menyampaikan survei kepuasan.

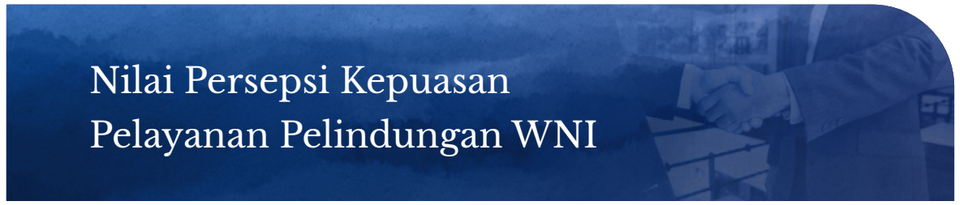

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI

01

Peninjauan Format Kegiatan

Peninjauan kembali terhadap bebagai format kegiatan dan layanan untuk meningkatkan kepuasan para penerima layanan.

02

Penambahan dukungan SDM

Pengajuan penambahan dukungan SDM sesuai dengan Analisa Jabatan.

03

Pelatihan *Customer Service Excellence*

Memberikan pelatihan kepada SDM terkait *customer service excellence*.

04

Optimalisasi Diplomasi Pelindungan

Optimalisasi diplomasi pelindungan dengan melibatkan *highly eminent person*.

05

Penyediaan Jasa Pengacara

Penyediaan pengadaan jasa pengacara untuk pemberian advokasi dan bantuan hukum.

06

Dukungan Anggaran Situasi Khusus

Penyediaan dukungan anggaran dan SDM untuk penanganan kasus-kasus/situasi khusus.

07

Melakukan Manajemen Ekspektasi

Melakukan manajemen ekspektasi kepada calon penerima layanan dengan menjelaskan batasan-batasan layanan yang dapat diberikan.

Analisis Program Pendukung Capaian

Sejumlah program strategis telah dilakukan Kemenlu sepanjang tahun 2023 untuk mendukung realisai IKU Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik, antara lain sebagai berikut:

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Keprotokolan

01 Terlaksananya Kunjungan VVIP yang Sesuai SOP

Terlaksananya pelaksanaan pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan SOP pada Kunjungan VVIP (Presiden dan Wakil Presiden) ke luar negeri sebanyak 29 kunjungan serta pelayanan keprotokolan kunjungan setingkat kepala negara ke Indonesia sebanyak 16 kunjungan.

02 Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan pada Keketuaan Indonesia

Terlaksananya pelaksanaan pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan SOP pada Keketuaan Indonesia pada KTT ASEAN ke 42 dan 43 serta KTT AIS, dimana tercatat lebih kurang 120 rangkaian pertemuan ASEAN dan AIS.

03 Terlaksananya Sosialisasi Keprotokolan di Daerah Pelaksanaan KTT

Terlaksananya sosialisasi keprotokolan di daerah-daerah lokasi pelaksanaan KTT dengan melibatkan Pemerintah Daerah serta Kementerian dan Lembaga terkait.

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Keprotokolan

01 *Launching* Paspor Diplomatik dan Dinas Elektronik RI Sebagai Bagian dari Implementasi Paspor Elektronik Diplomatik dan Dinas RI

Peluncuran Paspor Diplomatik dan Dinas Elektronik RI diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2023. Peluncuran Paspor Diplomatik dan Dinas Elektronik RI merupakan tahap akhir dari upaya pengembangan dan perbaikan standar dokumen perjalanan RI yang diterbitkan oleh Kemenlu, sesuai dengan standar dokumen perjalanan yang ditetapkan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO). Paspor Diplomatik Elektronik RI telah berhasil dipergunakan pada sistem keimigrasian di Bandara Singapura, Abu Dhabi, Dubai, Amsterdam dan Addis Ababa serta berhasil digunakan pada *autogate* bandara Singapura dan Dubai.

Selanjutnya, Paspor Diplomatik dan Dinas Elektronik akan mulai diimplementasikan secara bertahap pada tahun 2024. Kemenlu secara bertahap akan terus memperkuat proses layanan penerbitan paspor diplomatik dan dinas melalui:

i. Pengadaan tambahan blangko paspor diplomatik dan dinas elektronik.
ii. Penguatan aspek teknologi dan penyediaan perangkat pendukung.
iii. Penguatan sumber daya manusia.
iv. Implementasi Perjanjian Kerjasama dengan Ditjen Imigrasi terkait layanan pengumpulan data biometrik bagi pemegang Paspor Dinas elektronik di kantor imigrasi di seluruh provinsi di Indonesia.
v. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya.

02 Perluasan Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas (PBVDD)

Saat ini Indonesia telah memiliki PBVDD dengan 97 negara Mitra. Catatan perkembangan daftar PBVDD selama tahun 2023 antara lain penambahan negara: Burundi, Solomon Islands, Denmark, Papua Nugini, Swedia, dan Tanzania. Penangguhan sementara PBVDD dengan Ethiopia.

Serta pada tahun 2024 akan dijajaki PBVDD dengan negara Jerman (untuk e-paspor), Lebanon, Rwanda, dan Mikronesia. Selain itu, telah dilakukan pengaturan resiprokal antara RI – Amerika Serikat terkait pemberian fasilitas visa diplomatik dan dinas jangka panjang selama paling lama 5 tahun yang akan segera diimplementasikan, dan mulai berlaku terhitung tanggal 1 Desember 2023.

Gambar III.66
Update Daftar Negara-negara Sahabat yang menjalin Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas (PBVDD) dengan Republik Indonesia

03 Penyelenggaraan Consular and Diplomatic Facilities Management Dialogue

Telah diselenggarakan 2 (dua) kegiatan Dialog Kekonsuleran yaitu:

1. RI-USA Consular and Diplomatic Facilities Management Dialogue pada 2-9 Juni 2023 di Washington DC, Amerika Serikat.

   Hasil konkret pertemuan:

   i. Penandatanganan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America regarding Consular Priveleges and Immunities.

   ii. Pembahasan dan Penyelesaian isu-isu kekonsuleran.

   iii. Kunjungan Kerja ke Washington Passport Agency, Bandara Internasional Dulles, dan Diskusi terbatas mengenai isu penculikan dan adopsi anak.

2. The 11th Joint Diplomatic Facility and Consular Consular Consultation between RI-Australia di Bali pada 30 Oktober–2 November 2023.

   Hasil konkret pertemuan:

   i. Usulan untuk menerapkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam implementasi *Mandatory Consular Notification* (MCN).

   ii. Pembahasan dan Penyelesaian isu-isu kekonsuleran.

   iii. Kunjungan Kerja ke Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Denpasar.

04 Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kekonsuleran

Telah diselenggarakan *upgrade* dan *soft launching* aplikasi Sistem Informasi Terpadu Protokol dan Konsuler (Sitprotkons) Versi Terbaru, Sistem Aplikasi Izin Terbang (Flight Clearance Application System / FCAS) dan Sistem Pelayanan Legalisasi Kementerian Luar Negeri Secara Elektronik (STEMPEL ASLI) Berbasis *Web*. Pemutakhiran aplikasi dilakukan berdasarkan masukan dan saran dari pengguna layanan maupun upaya membuat aplikasi lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna (*user-friendy*). Selain itu, telah dilakukan *upgrade* aplikasi *Dashboard* Jasa Kekonsuleran WNA dengan menambahkan fitur Rogatori yang merupakan Tupoksi baru dari Direktorat Konsuler.

05 Dukungan Pengiriman Bantuan Kemanusiaan dan Evakuasi WNI

Kemenlu telah memfasilitasi pengurusan f*light clearance* dan *landing permit* pada negara-negara yang dilalui oleh pesawat yang mengirimkan bantuan kemanusiaan dari Pemri dan Evakuasi WNI termasuk penerbitan paspor diplomatik/dinas, rekomendasi visa serta *exit permit* bagi personil Indonesia, yaitu:

1. Bantuan kemanusiaan Pemri ke Turki penanganan bencana gempa (10-13 Februari 2023).
2. Operasi evakuasi WNI di Sudan (24-27 April 2023).
3. Bantuan kemanusiaan Pemri ke Palestina (November 2023).

06 Dukungan Fasilitasi Kekonsuleran untuk Pelaksanaan Konferensi Internasional

Kemenlu telah memberikan dukungan fasilitasi kekonsuleran yaitu otorisasi visa diplomatik dan dinas bagi pejabat, narasumber, moderator, dan delegasi; Pelayanan perizinan terbang (flight clearance); dan Pemantauan ketibaan para pejabat, narasumber, moderator, dan delegasi pada bandara internasional RI untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul pada saat ketibaan di RI melalui pintu Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), pada sejumlah konferensi internasional di RI selama tahun 2023, di antaranya:

1. Rangkaian pelaksanaan KTT ASEAN ke-42, Labuan Bajo, 10-11 Mei 2023.
2. Rangkaian pelaksanaan KTT ASEAN ke-43, Jakarta, 4-7 September 2023.
3. Archipelagic and Island State (AIS) Forum, Bali, 6-11 Oktober 2023.

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Fasilitas Diplomatik

01 Penerbitan 15.428 Dokumen Pelayanan Fasilitas Diplomatik

Selama tahun 2023 telah diterbitkan 15.428 dokumen terkait pelayanan fasilitas diplomatik dari total target sebanyak 12.100.

02 Terlaksananya *Bilateral Consultation*

Terlaksananya *Bilateral Consultation* dengan Amerika Serikat dan Australia, serta berhasil menyusun Handbook of Policies and Guidelines for Foreign Missions in Indonesia sebagai rujukan kepada Perwakilan Negara Asing terkait pemberian fasilitas diplomatik selama Keketuaan Indonesia pada ASEAN di tahun 2023.

03 pelayanan Fasilitas Diplomatik Selain Layanan Rutin

Selain pemberian layanan rutin, pelayanan Fasilitas Diplomatik juga meliputi pemberian pendampingan perizinan senjata api, alat komunikasi, pemasukan barang diplomatik, penerbitan pas bandara, dan impor sementara kendaraan bermotor.

04 pelayanan Fasilitas Diplomatik Selain Layanan Rutin

Beberapa program yang dilaksanakan antara lain:

i. Rapat koordinasi untuk membahas perubahan kebijakan dalam pemberian fasilitas barang diplomatik yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementarian Perdagangan dan Kementerian Sekretariat Negara.

ii. Koordinasi rencana perpindahan layanan ke IKN.

iii. *Monitoring* dan evaluasi pemberian fasilitas diplomatik dengan negara sahabat untuk memastikan adanya keselarasan dalam pemberian dan penerimaan fasilitas di dalam dan luar negeri.

iv. Pemberian fasilitas pendampingan pada kunjungan tamu negara VVIP/VIP a.l rangkaian kegiatan saat keketuaan Indonesia pada ASEAN, Pertemuan Tingkat Tinggi Archipelagic Island States dan kunjungan bilateral lainnya.

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI

01 Evakuasi WNI dari Sudan

Dalam rangka menyikapi konflik militer antara Sudan Armed Forces dan Rapid Support Forces di Sudan yang pecah pada tanggal 15 April 2023, Kementerian Luar Negeri telah mengevakuasi sejumlah 998 WNI dan 17 WNA (Bangladesh, Filipina, Australia, Djibouti, dan Sudan) dari Sudan.

02 Penanganan Kasus WNI Korban Terindikasi TPPO di Kawasan Asia Tenggara

Sejak awal tahun 2021, Kemenlu telah menangani modus baru kasus WNI/PMI yang direkrut untuk dipekerjakan secara non-prosedural untuk melakukan penipuan secara daring (*online scamming*). Para WNI/PMI direkrut oleh sindikat untuk bekerja sebagai *online scammers*, dengan modus penipuan investasi/cryptocurrency, *love scam*, penipuan berkedok *money laundering* dan lain-lain. Dalam catatan Kementerian Luar Negeri, periode 2021 – November 2023 tercatat total 3.428 kasus terkait *online scam*, di mana 3.424 kasus di antaranya ditangani oleh Perwakilan-Perwakilan RI di Kawasan Asia Tenggara, dan yang terakhir 4 kasus di Persatuan Emirat Arab.

03 Evakuasi WNI dari Gaza dan Yerussalem

Pemerintah RI mengevakuasi 8 WNI dari Jalur Gaza menuju Kairo (Mesir) dan 4 WNI dari Yerusalem menuju Amman (Yordania). Evakuasi dari Jalur Gaza dilakukan dalam 3 gelombang, yaitu pada tanggal 2 November 2023, 12 November 2023, dan 9 Desember. Sedangkan, evakuasi dari Yerusalem dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2023. Meskipun demikian, terdapat 2 orang WNI yang merupakan relawan Medical Emergency Rescue Committee memutuskan untuk menetap di Khan Younis, wilayah selatan Jalur Gaza demi misi kemanusiaan.

04 Pemanfaatan Perangkat Lunak Aplikasi Pelindungan WNI

Program yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023 yang berhasil mendukung capaian kinerja pelayanan pelindungan WNI diantaranya adalah Portal Peduli WNI dan Safe Travel, yang dirasakan bukan saja oleh pengguna dari masyarakat awam, tapi juga oleh Perwakilan RI dalam rangka mencapai tujuan Perwakilan RI menyediakan pelayanan dan pelindungan.

Proyeksi Ke Depan

Beberpa proyeksi ke depan untuk mempertahankan capaian IKU Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik di tahun mendatang, antara lain sebagai berikut:

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Keprotokolan

01. Aktif Melakukan Sosialisasi, Pelatihan Keprotokolan, dan Diseminasi Terkait World Water Forum 2024

Pada tahun 2024, Indonesia akan menjadi tuan rumah World Water Forum (WWF), rangkaian pertemuan telah direncanakan untuk dilaksanakan di Indonesia mulai dari level *working group* sampai dengan tingkat Kepala Negara. Target nilai persepsi kepuasan pelayanan keprotokolan akan dapat diperoleh apabila Kemenlu secara aktif melakukan sosialisasi, pelatihan keprotokolan, dan diseminasi kepada Kementerian / Lembaga terkait yang menjadi *focal point* pertemuan WWF. Dengan demikian diharapkan akan dapat membangun komunikasi dan sinergi antara penerima layanan keprotokolan dengan pelaksana layanan keprotokolan. Selain itu perlu meningkatkan hubungan baik dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan keprotokolan baik di daerah maupun di pusat.

02. Pelayanan Keprotokolan Kunjungan VVIP dan Kunjungan VIP Tahun 2024 Diproyeksikan Meningkat

Mengingat tahun 2024 merupakan tahun politik, maka pelayanan keprotokolan kunjungan VVIP dan kunjungan VIP tahun 2024 diproyeksikan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023. Pemerintahan yang baru juga menjadi momentum peningkatan kunjungan tamu negara ke Indonesia maupun Kunjungan Presiden/Wakil Presiden ke Luar Negeri akan bersifat sangat dinamis. Hal tersebut terkait dengan kebiasaan *farewell visit* yang umumnya dilakukan oleh Kepala negara/pemerintahan menjelang masa berakhirnya masa kepemimpinan mereka, dan dilanjutkan dengan kunjungan kenegaraan oleh Kepala negara RI yang baru saja terpilih untuk periode 2024-2029. Namun demikian, Kemenlu akan tetap memberikan pelayanan keprotokolan sesuai dengan standar layanan acara dan standar layanan keprotokolan.

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran

01. Meningkatkan Frekuensi Sosialisasi Mengenai *Service Level Agreement* (SLA)

Meningkatkan frekuensi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, diseminasi informasi serta mengkomunikasikan kepada pengguna layanan secara rutin mengenai *Service Level Agreement* (SLA) dan prosedur pelayanan kekonsuleran.

02. Meningkatkan Alokasi Anggaran Belanja Persediaan Barang

Meningkatkan alokasi anggaran belanja persediaan barang khususnya untuk pengadaan blangko paspor dinas, mengingat perjalanan dinas luar negeri telah kembali berjalan dengan normal. Serta semakin banyak kerja sama K/L maupun Pemda dengan instansi mitra di luar negeri, serta pengiriman misi pasukan perdamaian PBB.

03. Pemenuhan Perangkat Pendukung Maupun Sarana dan Prasarana

Pemenuhan perangkat pendukung pemrosesan permohonan pelayanan kekonsuleran maupun sarana dan prasarana di Ruang Pelayanan Publik.

04. Peningkatan kapasitas SDM pelayanan publik

Peningkatan kapasitas SDM pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja maupun mengatasi tekanan dari penerima layanan dalam memberikan pelayanan publik.

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Fasilitas Diplomatik

01. Survei Tingkat Kepuasan Terus Dilaksanakan Secara *Online*

Revisi sejumlah aturan dalam negeri telah dilakukan yang mengakibatkan percepatan proses bisnis pemberian fasilitas diplomatik. Untuk itu, survei tingkat kepuasan akan terus dilaksanakan secara *online* dan penyerahan dokumen surat rekomendasi dilakukan melalui kurir ekspedisi untuk jenis layanan tertentu seperti pajak, rekomendasi pas bandara, dan lain sebagainya.

Nilai Persepsi Pelayanan Pelindungan WNI

01. Akselerasi Pencapaian Target

Untuk mempertahankan capaian di tahun 2024, akselerasi pencapaian target dapat dilakukan sepanjang terpenuhinya kondisi-kondisi antara lain:

a. Jumlah SDM sesuai kebutuhan.
b. Peningkatan kapasitas SDM terus dilakukan.
c. Inovasi yang telah dilakukan di tahun 2022 berkesinambungan.
d. Penyempurnaan aplikasi Portal Peduli WNI dan Safe Travel, khususnya pada aspek keamanan, terus dilakukan.
e. Proses edukasi masyarakat mengenai penggunaan Portal Peduli WNI dan Safe Travel terus dilakukan.
f. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung di Ruang Pelayanan Publik.

Dokumentasi Program Pendukung Capaian IKU C1.2 : Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik

Gambar III.67
The 11th Joint Diplomatic Facility and Consular Consultation Indonesia (Australia, Bali, 30 Oktober – 2 November 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.68
Bilateral Consultation Indonesia
(Amerika, Washington D.C., 2-9 Juni 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.69
Pendampingan Pemeriksaan
Senjata Api saat KTT ASEAN ke 43
(Jakarta, 4–7 September 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.70
Rapat Koordinasi Pemberian Fasilitas Diplomatik
Sumber: Kemenlu

Gambar III.71
Penerimaan penghargaan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani
(Bali, 6 Desember 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.72
Peluncuran E-Paspor Diplomatik dan Dinas
(Jakarta, 7 Desember 2023)
Sumber: Kemenlu

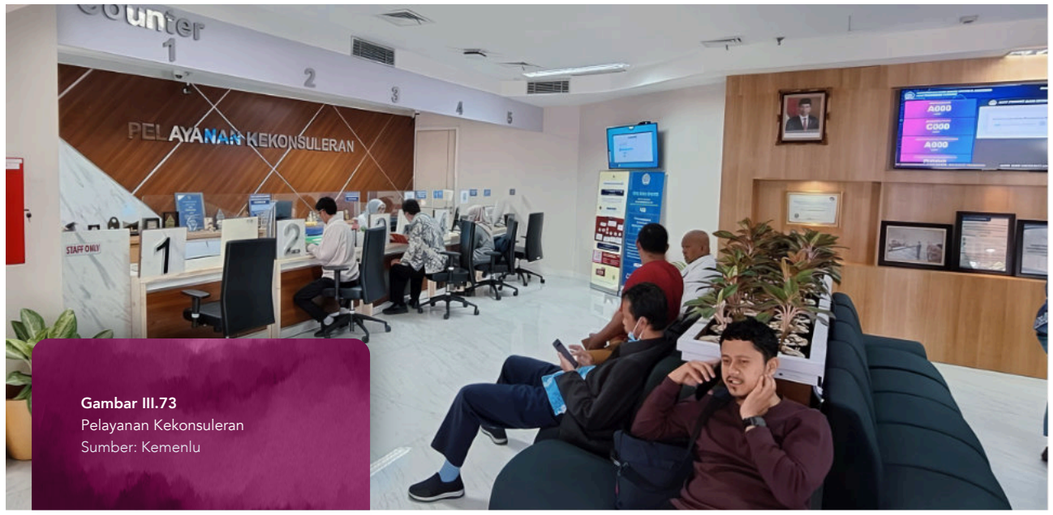

Gambar III.73
Pelayanan Kekonsuleran
Sumber: Kemenlu

Gambar III.74
Penganugerahaan Predikat Penilaian Kepatuhan Tinggi untuk Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023 oleh Ombudsman RI
(Jakarta, 14 Desember 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.75
Consular and Diplomatic Facilities Management Dialogue RI-AS
(Washington DC, Amerika Serikat, 2–9 Juni 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.76
Pertemuan dengan Imigrasi UAE terkait implementasi e-paspor diplomatik dan dinas
(Abu Dhabi, 15 November 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.77
Kegiatan *Soft Launching* Sistem Aplikasi Izin Terbang (Flight Clearance Application System) 5.0 dan Sistem Pelayanan Legalisasi Kementerian Luar Negeri Secara Elektronik (STEMPEL ASLI) Berbasis *Web*
(Bogor, Jawa Barat, 19–22 November 2023)
Sumber: Kemenlu

Sasaran Strategis (SS) C2 :

Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi kepada Kementerian atau Lembaga yang menjadi *focal point* di tingkat nasional untuk mengimplementasikan atau menindaklanjuti kesepakatan bilateral, regional, dan multilateral. Fungsi utama Kemenlu adalah memastikan bahwa kesepakatan-kesepakatan tersebut terimplementasi dengan baik.

Pelaksanaan kebijakan luar negeri pada berbagai tingkatan memiliki urgensi yang sama pada tercapainya kepentingan Indonesia. Berbagai upaya diplomasi Indonesia terus dorong untuk mencapai kesepakatan bersama antara Indonesia dengan negara mitra lainnya, yang berlandaskan kepentingan nasional dan berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi.

Kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral perlu diimplementasikan agar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Kesepakatan internasional tersebut berisi komitmen dan misi Indonesia yang perlu mendapatkan dukungan seluruh pemangku kepentingan pada tingkat nasional. Sebagai koordinator hubungan luar negeri, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berkewajiban untuk memberikan rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk mengimplementasikan atau menindaklanjuti kesepakatan dari forum internasional sesuai mandat yang tertuang dalam dokumen perjanjian.

Guna memastikan bahwa kesepakatan tersebut terimplementasi dengan baik dan optimal, Kemenlu menetapkan Sasaran Strategis yang mampu menguatkan komitmen nasional atas upaya diplomasi yang dilakukan, yaitu SS C2 Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi. Pencapaian target pada SS C2 mempertimbangkan hasil dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan bobot masing-masing IKU sebesar 50%.

> “Berbagai upaya diplomasi Indonesia terus dorong untuk mencapai kesepakatan bersama antara Indonesia dengan negara mitra lainnya

IKU C1.2

Persentase Tindak Lanjut/Implementasi Kesepakatan Internasional oleh Pemangku Kepentingan di Dalam Negeri

Digunakan untuk mengukur implementasi kesepakatan kerja sama di tingkat nasional serta memonitor *progress* tindak lanjut dengan pemangku kepentingan terkait.

Sub IKU 1
Persentase Kesepakatan Kerja Sama Bilateral yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholders* di Dalam Negeri
Bobot 40%

Sub IKU 2
Persentase Prakarsa/Rekomendasi Pada Forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholders* di Dalam Negeri
Bobot 20%

Sub IKU 3
Persentase Saran Kebijakan atas Kesepakatan ASEAN yang Ditindaklanjuti di Dalam Negeri
Bobot 20%

Sub IKU 4
Persentase Rekomendasi dari Forum Multilateral yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Nasional
Bobot 20%

Realisasi dihitung melalui bobot penjumlahan dari 4 SUB IKU

IKU C2.2

Indeks Pengaruh Rekomendasi Strategi Kebijakan Luar Negeri Terhadap Kebijakan Pemangku Kepentingan

Digunakan untuk mengukur pengaruh rekomendasi strategi kebijakan pemangku kepentingan, sehingga memberikan nilai manfaat rekomendasi yang berkualitas dalam mendukung hubungan dan kebijakan luar negeri.

Realisasi IKU diperoleh dari perhitungan hasil survei

Capaian IKU C2.1 dihitung dari proporsi kesepakatan internasional yang ditindaklanjuti mencakup tindak lanjut kesepakatan bilateral di berbagai bidang, prakarsa dan rekomendasi yang disepakati dari forum kerja sama intra/antar kawasan dan multilateral, serta saran kebijakan dari kesepakatan di kawasan ASEAN.

Sementara itu, capaian IKU C2.2 diukur berdasarkan pada persepsi pemangku kepentingan terkait atas saran kebijakan luar negeri yang dihasilkan sepanjang tahun 2023. IKU C2.2 diukur melalui survei ‘Persepsi pemangku kepentingan terhadap manfaat kebijakan luar negeri’. Survei dilakukan secara *online* selama 1 tahun dengan menargetkan unsur pimpinan perwakilan K/L sebagai responden.

Analisis IKU C2.1

Persentase Tindak Lanjut/Implementasi Kesepakatan Internasional oleh Pemangku Kepentingan di Dalam Negeri

Deskripsi IKU

Berbagai Perjanjian internasional yang dihasilkan bersifat mengikat Indonesia dan negara mitra yang terlibat untuk memenuhi hak dan kewajiban sesuai kesepakatan. Upaya tindak lanjut atas kesepakatan internasional sangat penting untuk mengetahui pencapaian kualitas hubungan antarnegara, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai mitra kerja sama internasional yang kredibel. Kesepakatan internasional mencakup perjanjian/kesepakatan bilateral tertulis antara Indonesia dengan negara mitra, prakarsa dan rekomendasi diterima/diadopsi dalam dari forum regional kawasan dan multilateral, serta saran kebijakan dari forum kerja sama ASEAN, yang mengikat Indonesia dan negara mitra ASEAN untuk diimplementasikan di dalam negeri masing-masing.

Pihak-pihak terkait di dalam negeri perlu mengambil tindakan progresif untuk mengimplementasikan hasil kesepakatan bilateral serta prakarsa/rekomendasi dari berbagai forum regional/multilateral dan saran kebijakan implementasi kesepakatan ASEAN. Terkait ini, IKU C2.1 digunakan Kemenlu untuk memastikan pihak di dalam negeri yang terlibat dalam kesepakatan internasional dapat menjalankan rekomendasi yang telah dimandatkan, sekaligus secara berkala memonitor progress tindak lanjut yang sudah dilakukan.

Dalam mengidentifikasi capaian kinerja, Kemenlu memperhatikan definisi, cakupan, dan pemangku kepentingan dari masing-masing komponen/Sub IKU.

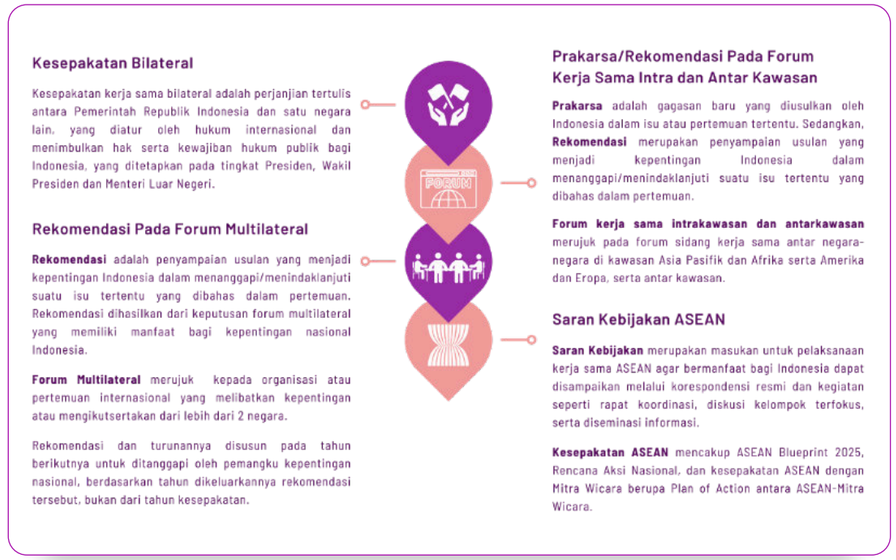

Gambar III.78
Definisi, Cakupan dan Pemangku Kepentingan SUB IKU Pendukung

Realisasi IKU C2.1 ditandai dengan berhasil ditindaklanjutinya rencana kesepakatan internasional yang akan ditindaklanjuti berupa adanya langkah konkret dari rencana aksi hasil kesepakatan pemangku kepentingan dalam negeri meliputi K/L terkait, Pemerintah Daerah (Pemprov dan Pemda), universitas/akademisi, lembaga *think tank*, filantropi, organisasi bisnis, organisasi internasional, badan usaha asing, pelaku usaha (kadin), lembaga peneliti, serta civitas akademika yang memiliki kepentingan berkaitan dengan isu-isu hubungan luar negeri.

Pemangku kepentingan di dalam negeri meliputi entitas yang memiliki kepentingan dan keterkaitan dengan isu-isu hubungan luar negeri yaitu K/L terkait, Pemerintah Daerah (Pemprov dan Pemda), universitas/akademisi, lembaga *think tank*, filantropi, organisasi bisnis, organisasi internasional, badan usaha asing, pelaku usaha (kadin), lembaga peneliti, serta civitas akademika.

Rencana kesepakatan bilateral/prakarsa/rekomendasi/saran kebijakan ASEAN yang akan ditindaklanjuti terdapat dalam Dokumen Pemetaan, yang merupakan rekapitulasi rencana kesepakatan yang disusun di awal tahun. Jika terdapat kesepakatan internasional yang berhasil ditindaklanjuti diluar dokumen pemetaan pada tahun berjalan, maka realisasi tidak akan menjadi *pop-up*, melainkan juga akan tetap dihitung sebagai rencana kesepakatan yang akan ditindaklanjuti serta realisasinya.

Penghitungan IKU ini merujuk pada tindak lanjut oleh pemangku kepentingan di dalam negeri pada kurun waktu satu tahun anggaran (Januari-Desember). Realisasi IKU C2.1 dihitung diukur dari penjumlahan sesuai bobot persentase 4 Sub Indikator Kinerja Utama (Sub IKU) sebagai berikut:

Realisasi IKU C2.1 Persentase Tindak Lanjut/Implementasi Kesepakatan Internasional oleh Pemangku Kepentingan di Dalam Negeri, menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU} = (40\% \times \text{Realisasi Sub IKU 1}) + (20\% \times \text{Realisasi Sub IKU 2}) + (20\% \times \text{Realisasi Sub IKU 3}) + (20\% \times \text{Realisasi Sub IKU 4})$$

Sub IKU 1 (Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di dalam negeri) memiliki bobot yang lebih tinggi dibanding 3 Sub IKU lainnya. Penetapan bobot Sub IKU didasarkan pada penilaian terhadap dampak langsung terhadap kepentingan nasional. Tindak lanjut atas kesepakatan bilateral dipandang lebih cepat memberikan manfaat secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, karena melibatkan pemangku kepentingan yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan implementasi kesepakatan yang dihasilkan dari forum regional dan multilateral.

Informasi Kinerja

Tabel III.39
Capaian IKU C2.1 Persentase Tindak Lanjut/Implementasi Kesepakatan Internasional oleh Pemangku Kepentingan di Dalam Negeri

Sumber: AKSI Kemenlu

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Nilai Realisasi SUB IKU	Nilai Bobot
Persentase Tindak Lanjut/ Implementasi Kesepakatan Internasional oleh Pemangku Kepentingan di Dalam Negeri	Realisasi SUB IKU 1 Persentase Kesepakatan Kerja Sama Bilateral yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholders* di Dalam Negeri (40%)	100%	40%
	Realisasi SUB IKU 2 Persentase Prakarsa/Rekomendasi Pada Forum Kerja Sama Intrakawasan Dan Antarkawasan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholders* di Dalam Negeri (20%)	100%	20%
	Realisasi SUB IKU 3 Persentase Saran Kebijakan atas Kesepakatan ASEAN yang Ditindaklanjuti di Dalam Negeri (20%)	100%	20%
	Realisasi SUB IKU 4 Persentase Rekomendasi dari Forum Multilateral yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Nasional (20%)	100%	20%

Target	Realisasi	Capaian
93,49%	100%	106,69%

Pada tahun 2023, realisasi IKU C2.1 Persentase Tindak Lanjut/Implementasi Kesepakatan Internasional oleh Pemangku Kepentingan di Dalam Negeri adalah sebesar 100% dari target 93,49%, sehingga capaian IKU sebesar 106,69%.

Jika dibandingkan dengan target pada tiap Sub IKU, realisasi seluruh Sub IKU telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, Kemenlu telah berhasil mendorong komitmen yang tinggi dari pemangku kepentingan di dalam negeri untuk mengimplementasikan hasil dari kesepakatan internasional, utamanya tindak lanjut atas kesepakatan yang dihasilkan dari forum regional, saran kebijakan ASEAN dan rekomendasi dari forum multilateral. Pemetaan realisasi kesepakatan, prakarsa, rekomendasi, dan saran kebijakan dapat dilihat pada infografis di bawah ini:

SUB IKU 1
118 dari target 125
Kesepakatan Bilateral

SUB IKU 2
19 dari target 19
Prakarsa & Rekomendasi Forum Regional

SUB IKU 3
22 dari target 22
Saran Kebijakan ASEAN

SUB IKU 4
97 dari target 97
Rekomendasi Forum Multilateral

Berbagai langkah konkret telah diambil oleh pemangku kepentingan dalam negeri untuk mendukung implementasi kesepakatan internasional. Kemenlu telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk memonitor *progress* tindak lanjut yang dilakukan di dalam negeri melalui rapat koordinasi, pembentukan tim koordinasi teknis, sosialisasi, hingga rapat dengar pendapat dengan DPR RI untuk menerjemahkan kesepakatan internasional ke dalam regulasi nasional dan kegiatan lainnya yang mendukung implementasi kesepatan. Dari sisi hubungan antarnegara, Kemenlu juga telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan saling kunjung dan pertemuan pejabat tinggi untuk mengikat komitmen tindak lanjut kesepakatan dengan negara mitra.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.40
Target, Realisasi dan Capaian IKU C2.1 Persentase Tindak Lanjut/ Implementasi Kesepakatan Internasional oleh Pemangku Kepentingan di Dalam Negeri

Kode IKU		2020	2021	2022	2023
C2.1	Target	76,65%	89% ↑	87,84% ↓	**93,49%** ↑
	Realisasi	89,7%	102,60% ↑	100% ↓	**100%** ↔
	Capaian	116,97%	115,28% ↑	113,84% ↓	**106,69%** ↓
SUB IKU 1	Target	71%	88,75% ↑	82,35% ↓	**93,74%** ↑
	Realisasi	95,92%	100% ↑	100% ↔	**100%** ↔
	Capaian	135%	112,68% ↑	121,43% ↑	**106,67%** ↓
SUB IKU 2	Target	80%	95% ↑	100% ↑	**100%** ↔
	Realisasi	86,67%	100% ↑	100% ↔	**100%** ↔
	Capaian	108,33%	105,26% ↓	100% ↓	**100%** ↔
SUB IKU 3	Target	75%	80% ↑	82% ↑	**85%** ↑
	Realisasi	76,47%	95% ↑	100% ↑	**100%** ↔
	Capaian	101,96%	118,75% ↑	121,95% ↑	**117,64%** ↓
SUB IKU 4	Target	92,50%	92,50% ↔	92,50% ↔	**95%** ↑
	Realisasi	100%	117,98% ↑	100% ↓	**100%** ↔
	Capaian	108,11%	127,55% ↑	108,11% ↓	**105,26%** ↑

Tabel di atas menunjukkan perbandingan target, realisasi, dan capaian IKU C2.1 dan Sub IKU selama periode 2020-2023. Dalam rentang waktu tersebut, Kemenlu terus menetapkan target IKU yang meningkat dengan realisasi yang mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada level IKU, peningkatan secara gradual terlihat pada target indikator dari tahun 2020 sampai dengan 2023, kecuali di tahun 2022 yang mengalami penurunan target karena turunnya target Sub IKU 1 yang berkontribusi paling tinggi (40%) dibandingkan 3 Sub IKU lainnya (20%) terhadap penetapan target IKU. Penurunan target tersebut berbanding terbalik dengan realisasi kinerja IKU C2.1 yang meningkat dari tahun 2020–2021, namun menurun di tahun 2022-2023. Turunnya realisasi dan capaian di tahun 2023 dipengaruhi oleh kenaikan target yang cukup signifikan dari 87,84% (2022) menjadi 93,49% (2023), meningkat 5,65%. Pada level IKU, terjadi peningkatan bertahap pada target IKU dari tahun 2020 hingga 2023, kecuali pada tahun 2022 yang mengalami penurunan target merujuk realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan target yang signifikan dari 87,84% pada tahun 2022 menjadi 93,49% pada tahun 2023, atau meningkat sebesar 5,65%. Dengan target yang menantang dari tahun ke tahun, realisasi IKU C2.1 juga terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2021, namun menurun pada tahun 2022 hingga 2023 meskipun tetap mencapai target.

Pada tahun 2021, target seluruh Sub IKU meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 kecuali pada Sub IKU 4 dimana target indikatornya stagnan tetap dari tahun 2020 hingga 2022, peningkatan target baru dilakukan di tahun 2023. Naiknya target indikator tersebut mendorong kinerja yang lebih optimal, terlihat dari naiknya angka realisasi pada mayoritas Sub IKU selama 4 tahun berturut-turut. Pada tahun 2021, target seluruh Sub IKU meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020, kecuali pada bagian Sub IKU 4 yang memiliki target tetap dari tahun 2020 hingga 2022, peningkatan target baru dilakukan di tahun 2023. Peningkatan target ini mendorong kinerja yang lebih baik, ditunjukkan dengan meningkatnya realisasi pada sebagian besar Sub IKU selama 4 tahun berturut-turut.

Jika dibandingkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kemenlu periode 2020-2024, penetapan target indikator untuk tahun 2023 mayoritas lebih tinggi daripada target renstra mengingat Kemenlu dalam menetapkan target senantiasa mempertimbangkan realisasi kinerja di tahun sebelumnya. Realisasi kinerja yang tetap mencapai target menandai pencapaian kinerja IKU masih masih *on the track* dengan target yang ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja 5 tahunan tersebut.

> Kemenlu terus menetapkan target IKU yang meningkat dengan realisasi yang mencapai target yang telah ditetapkan

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Keberhasilan capaian IKU C2.1 terlihat tingginya jumlah kesepakatan internasional yang berhasil ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan atas rekomendasi dan koordinasi Kemenlu. Di sepanjang tahun 2023, Indonesia menjalankan strategi kepemimpinannya melalui ASEAN dan MIKTA dimana hal ini menjadi dorongan yang kuat bagi pemangku kepentingan terkait di dalam negeri untuk berkontribusi secara optimal. Beberapa strategi Kemenlu dan faktor pendukung yang mampu mendorong tindak lanjut/implementasi di dalam negeri adalah sebagai berikut:

Kesepakatan Bilateral

01
Forum Khusus dengan Pemangku Kepentingan

Forum khusus antara Kementerian Luar Negeri dan para pemangku kepentingan merupakan wadah yang efektif untuk distribusi dan pemutakhiran informasi mengenai hasil kesepakatan baik secara bilateral maupun regional.

02
Kesadaran dan Antusiasme dalam Meningkatkan Kredibilitas Indonesia

Kesadaran dan antusiasme atas pentingnya peran Kementerian dalam mengawal kepentingan Indonesia dan dalam meningkatkan kredibilitas Indonesia sebagai mitra kerja sama yang andal dan berorientasi pada hasil.

03
Kepemimpinan Indonesia melalui Keketuaan Indonesia

Kepemimpinan Indonesia melalui Keketuaan Indonesia di MIKTA, serta pelaksanaan berbagai promosi besar yang melibatkan pemangku kepentingan dalam negeri, seperti INALAC (Indonesia-Latin America and the Caribbean Business Forum) dan IEBF (Indonesia-Europe Business Forum), digunakan untuk memantau kesepakatan dan meningkatkan keterlibatan pihak terkait di Indonesia serta negara mitra.

Prakarsa/Rekomendasi pada Forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan

04
Pemetaan Isu Prioritas Nasional terkait Agenda Utama Pemangku Kepentingan

Pemetaan isu prioritas nasional yang sejalan dengan agenda utama pemangku kepentingan, sehingga usulan kegiatan tindak lanjut dapat diikuti oleh pihak yang terlibat, baik internal maupun eksternal. Selain itu, evaluasi rutin bersama K/L yang terkait dengan hasil kesepakatan/prakarsa dan rekomendasi/saran kebijakan dari forum internasional berjalan dengan efektif dibawah koordinasi Kemenlu.

05
Dukungan dari Berbagai Sektor di Dalam Negeri

Dukungan dari berbagai sektor di dalam negeri, termasuk pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat, dan bisnis, memiliki peran kunci dalam kesuksesan implementasi hasil kesepakatan internasional. Salah satunya melalui Komitmen yang tinggi dari pemangku kepentingan terlihat dari:

1. Penyusunan regulasi domestik dan penguatan kelembagaan antar K/L sehingga program/ rencana tindak lanjut atau implementasi memiliki payung hukum yang kuat.
2. Penunjukan penanggung jawab dan *person in charge* di K/L yang terlibat untuk fasilitasi kerja sama bilateral/regional.

Saran Kebijakan ASEAN

06
Kepemimpinan Indonesia dalam Berbagai Badan Sektoral

Suksesnya kepemimpinan Indonesia dalam berbagai badan sektoral dimana Indonesia bertindak sebagai Ketua/*Chair*. Kepemimpinan Indonesia melalui Keketuaan Indonesia di ASEAN digunakan untuk memantau kesepakatan dan meningkatkan keterlibatan pihak terkait di Indonesia serta negara mitra.

07
Kesamaan Pandangan dan Komitmen

Adanya kesamaan pandangan dan komitmen dari negara anggota ASEAN dalam menjaga relevansi ASEAN, serta bersama-sama ingin berupaya mendorong kawasan sebagai *epicentrum of growth* sesuai dengan tema keketuaan Indonesia.

08

Peran dalam Mengkoordinasikan dan Meningkatkan Sinergi

Peran besar Kemenlu dan Sekretariat Nasional (Setnas) ASEAN dalam mengkoordinasikan dan meningkatkan sinergitas, didukung dengan antusiasme tinggi kementerian/lembaga teknis sebagai *focal point* di berbagai badan sektor kerja sama ASEAN, dalam memformulasikan dan mengajukan prakarsa dan rekomendasi, serta menghasilkan capaian *outcome documents* yang bermanfaat bagi kawasan dalam berbagai pertemuan ASEAN.

Rekomendasi pada Forum Multilateral

09

Pembentukan *Concept Note* Rekomendasi

Kemenlu senantiasa berkoordinasi erat dengan seluruh K/L terkait dalam pembentukan *concept note* rekomendasi yang akan disampaikan di forum multilateral, sehingga setiap rekomendasi yang kemudian disetujui dalam forum multilateral tersebut dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh pemangku kepentingan nasional, karena substansi dan urgensi tindak lanjut telah dipahami dengan baik sebelumnya.

10

Diplomasi Indonesia Mengawal Rekomendasi

Diplomasi Indonesia senantiasa berupaya mengawal agar rekomendasi pada forum multilateral dapat selaras dengan kepentingan nasional sehingga tindak lanjut di dalam negeri tidak mengalami banyak hambatan dan dapat diterima oleh pemangku kepentingan di Indonesia.

Kendala dan Tantangan

Dalam mencapai target implementasi/tindak lanjut kesepakatan internasional, Kemenlu menghadapi beberapa kendala dan tantangan, diantaranya:

01

Adanya Perubahan Prioritas di K/L

Adanya perubahan prioritas di K/L yang terlibat atau pergeseran kebijakan karena pergantian kepemimpinan atau ketidaksiapan teknis oleh pemangku kepentingan di dalam negeri.

02

Perbedaan Prioritas Tindak Lanjut antar K/L

Perbedaan prioritas tindak lanjut antar K/L sulit menghasilkan kesepakatan kolaborasi program untuk implementasi kesepakatan internasional lintas-sektoral.

03

Kurangnya Pemahaman Pemangku Kepentingan

Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap urgensi untuk mengambil langkah konkret atas kerja sama strategis yang telah disepakati Indonesia dengan negara mitra, yang berdampak pada minimnya komunikasi antar lembaga.

04

Manajemen Pengetahuan yang Tidak Memadai

Pergantian *person in charge* dan *focal point* di K/L tanpa manajemen pengetahuan yang memadai tentang kesepakatan yang telah dihasilkan menyebabkan koordinasi melambat atau bahkan terhenti. Selain itu, terdapat kegiatan tindak lanjut yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan yang memadai, sehingga persiapannya tidak dapat optimal.

05

Mekanisme *Monitoring* dan Evaluasi Belum Optimal

Mekanisme *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut hasil kesepakatan internasional belum berjalan optimal.

Upaya Perbaikan

Dalam mengatasi berbagai kendala dan tantangan selama tahun berjalan, Kemenlu mendorong berbagai upaya perbaikan untuk pencapaian target kinerja, meliputi:

01

Melakukan Pendekatan Informal

Melakukan pendekatan informal kepada pihak yang terlibat untuk antisipasi kemungkinan perubahan di masa depan sehingga dapat mengantisipasi dengan alternatif program implementasi jika terdapat kebijakan dan prioritas baru.

02

Pembentukan Mekanisme Komunikasi yang Efektif

Pembentukan mekanisme komunikasi yang efektif, seperti forum rutin atau rapat lintas-sektoral, serta pembentukan tim kerja khusus. Pertemuan rutin tim khusus tersebut fokus kepada penyusunan Rencana Aksi bersama yang dapat mengakomodir prioritas semua pihak yang terlibat.

03

Membangun Tanggung Jawab terhadap Isu Strategis

Mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait dari tahap penjajakan hingga penandatanganan kesepakatan, sehingga memiliki tanggung jawab terhadap isu strategis bersama yang disepakati untuk dikerjakan.

04

Fleksibilitas dalam Perencanaan dan Pelaksanaan

Fleksibilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan termasuk persiapan alternatif penjadwalan, seperti rencana cadangan untuk pertemuan dan inisiatif yang mungkin ditunda atau diubah. Selain itu, Kemenlu memastikan dokumentasi yang lengkap tentang kesepakatan, prosedur, dan kegiatan, sehingga dapat dirujuk oleh pejabat/staf pengganti.

05

Menyusun Rencana *Monitoring* dan Evaluasi Tindak Lanjut Kesepakatan

Menyusun rencana *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut kesepakatan secara reguler dengan penetapan indikator kinerja yang terukur dan relevan dengan tugas dan fungsi setiap lembaga yang terlibat, serta melibatkan unsur pimpinan sehingga ada komitmen dan tanggung jawab bersama.

Analisis Program Pendukung Capaian

Kemenlu berhasil mendorong komitmen tinggi para pemangku kepentingan melalui berbagai kegiatan, seperti pertemuan tingkat Menteri dan *high level*, rapat koordinasi teknis, sosialisasi, program saling kunjung, korespondensi intensif, dan drafting rencana aksi bersama dalam kerja sama internasional. Di sepanjang tahun 2023, pertemuan pada level teknis dan rapat koordinasi antar K/L yang berkepentingan mendominasi kegiatan tindak lanjut. Berikut beberapa program/kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian kinerja IKU C2.1, di antaranya:

Kesepakatan Bilateral

01 **Pembukaan Jalur Penerbangan Langsung Jakarta-Phnom Penh dan Denpasar-Port Moresby**

10 April 2023

Pada 10 April 2023, Indonesia AirAsia meresmikan penerbangan langsung dari Jakarta ke Phnom Penh di KBRI Phnom Penh, Kamboja. Acara peresmian tersebut dihadiri oleh CEO AirAsia, Veranita Yosephine, State Secretary Kementerian Pariwisata Kamboja, Thong Rathasak, dan Permanent Secretary of State Secretariat of Civil Aviation (SSCA) Kamboja, Chea Aun.

Penerbangan langsung ini adalah hasil dari kesepakatan antara Indonesia dan Kamboja yang tertuang dalam Air Transport Service Agreement yang ditandatangani sejak 1969 dan MOU on the Implementation of Bilateral Air Services Agreement pada 2006. Rute baru ini mendukung kebijakan *Open Sky Policy* Pemerintah Kamboja dan diharapkan memperkuat hubungan ekonomi, terutama dalam perdagangan dan pariwisata.

Selain itu, Citilink juga membuat sejarah dengan membuka rute internasional pertama dari Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Indonesia, menuju Bandar Udara Internasional Jacksons, Port Moresby, Papua Nugini, mulai 2 Juli 2023. Keputusan ini merupakan salah satu dari empat kebijakan baru yang disepakati oleh Indonesia dan Papua Nugini untuk memperkuat konektivitas dan kerja sama lintas batas. Dengan inovasi ini diharapkan kedua negara dapat memperdalam hubungan ekonomi dan memperluas peluang kerja sama di masa depan.

02 Kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri RI ke Kamboja Menindaklanjuti Kesepakatan Kerja Sama Bidang Pertanian

Phnom Penh, Kamboja, 15-16 Agustus 2023

Wakil Menteri Luar Negeri RI, Bapak Pahala N. Mansury, memimpin delegasi RI ke Phnom Penh, Kamboja, pada 15-16 Agustus 2023. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan via telepon antara Presiden RI dengan PM Kamboja Hun Sen pada 11 Agustus 2023 sebagai tindak lanjut pertemuan bilateral Presiden RI dengan PM Kamboja di sela-sela KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, NTT, 9 Mei 2023.

Delegasi terdiri atas Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) serta perwakilan dari 3 (tiga) BUMN, yaitu Bulog, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Dalam kunjungan, dilakukan pertemuan dengan Menteri dan pejabat tinggi di Kamboja antara lain Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Menteri Perdagangan, Secretary of State Kementerian Luar Negeri, Sekretaris Jenderal Council for the Development of Cambodia dan Presiden Cambodia Rice Federation (CRF).

Beberapa bentuk kerja sama yang dibahas termasuk rencana suplai beras dari Kamboja ke Indonesia, pupuk dari Indonesia ke Kamboja, investasi di sektor pertanian dan infrastruktur, serta penawaran beasiswa dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM pertanian Kamboja. Kamboja menyatakan siap untuk menyuplai hingga 250.000 ton beras per tahun guna memperkuat cadangan pangan Indonesia. Selain itu, Kamboja juga mengundang Indonesia untuk berinvestasi dalam pembangunan penggilingan beras dan pergudangan untuk mendukung rantai pasok pangan kedua negara.

03 Leaders' Retreat RI-Singapura Tahun 2023

Singapura, 16 Maret 2023

Sebagai implementasi kesepakatan untuk menyelenggarakan Pertemuan Konsultatif Tahunan sejak tahun 2010, Presiden RI telah bertemu dengan PM Singapura pada rangkaian kegiatan Leaders' Retreat di Singapura pada tanggal 16 Maret 2023. Pada pertemuan tersebut, kedua Kepala Negara sepakat untuk mendorong implementasi tiga perjanjian yang telah disepakati pada tahun 2022, yaitu perjanjian Flight Information Region (FIR), Defense Cooperation Agreement (DCA), dan perjanjian ekstradisi. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas upaya mendorong peningkatan kerjasama perdagangan, peternakan, energi baru terbarukan, dan investasi di Ibu Kota Nusantara, melalui penandatanganan 7 perjanjian antar pemerintah, 9 perjanjian antar pelaku bisnis, dan 24 *Letter of Intent* investasi IKN.

04 Pelaksanaan Konsultasi Bilateral RI-Mesir ke-7

Jakarta, 20 Juli 2023

Pertemuan ke-7 konsultasi bilateral RI-Mesir telah diselenggarakan pada 20 Juli 2023 di Jakarta. Pertemuan ini terlaksana untuk menindaklanjuti 2 kesepakatan bilateral RI-Mesir, yaitu *Letter of Intent* kerjasama penanggulangan terorisme tahun 2019 dan kerja sama pertahanan tahun 2020. Konsultasi ini juga ditutup dengan penandatangan *Minutes of Meeting* yang merekam pembahasan yang mencakup pengembangan kerja sama bilateral, dan pertukaran pandangan mengenai isu regional maupun internasional.

05 Penyiapan Operasionalisasi Perwakilan RI Baru di Yaounde, Republik Kamerun

Sepanjang tahun 2023, Kemenlu telah menyelenggarakan berbagai kegiatan tindak lanjut untuk mempersiapkan operasionalisasi Perwakilan RI Yaounde, di antaranya rapat koordinasi, kunjungan kerja ke premis Perwakilan, dan kegiatan pembekalan bagi pejabat penugasan ke KBRI Yaounde. Rangkaian kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pembukaan Kedutaan Besar RI untuk Negara Kamerun. Susunan organisasi dan tata kerja KBRI Yaounde sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2004.

> Kemenlu telah menyelenggarakan berbagai kegiatan tindak lanjut untuk mempersiapkan operasionalisasi Perwakilan RI Yaounde

Menteri Luar Negeri memberikan arahan untuk memulai tahapan pengisian *home staff* secara terbatas di KBRI Yaounde. Langkah-langkah koordinatif dilakukan untuk memastikan operasionalisasi KBRI sesuai jadwal. Pembahasan dengan Kamerun juga dilakukan untuk menyusun panduan bagi Tim Esensial yang terdiri dari satu Diplomat Madya, satu Diplomat Pertama, dan satu Penata Kanselerai. Tim tersebut telah ditugaskan pada Desember 2023 untuk memulai operasionalisasi KBRI Yaounde.

06 Penyelenggaraan Dialog HAM RI-Norwegia Ke-17

Jakarta, Desember 2023

Menindaklanjuti hasil kesepakatan Dialog HAM RI-Norwegia ke-16 tahun 2022, Indonesia dan Norwegia telah menyelenggarakan Dialog HAM Bilateral ke-17 di Jakarta secara *in-person* pada 6 Desember 2023, dengan didahului oleh rapat persiapan posisi Delegasi RI (Delri) pada 5 Desember 2023. Direktur HAMK bertindak sebagai Ketua Delri, dengan anggota Delri terdiri atas pejabat Kementerian Hukum dan HAM dan K/L terkait dan Perwakilan dari National Human Rights Institutions (NHRIs). Sedangkan Delegasi Norwegia dipimpin oleh Duta Besar Gunn Jorid Roset, Deputy Director General Department for UN and Humanitarian Affairs, Kementerian Luar Negeri Norwegia dengan didampingi Dubes Norwegia di Jakarta.

Dialog HAM RI – Norwegia ke-17 membahas 2 (dua) agenda utama yaitu:

i. *National Developments of Human Rights*.

ii. *Regional and Multilateral Issues*. Delri secara spesifik mengangkat situasi masyarakat Palestina di Gaza dan meminta Norwegia mendukung upaya gencatan senjata secara permanen, memastikan akses bantuan kemanusiaan dengan segera dan tercapainya *two-state solution*. Delegasi Norwegia secara khusus menyampaikan program pemberian beasiswa bagi perempuan Afghanistan untuk melanjutkan studi di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), sebagai tindak lanjut partisipasi Norwegia pada International Conference on Afghan Women's Education (ICAWE) 2022.

Program Tindak Lanjut Prakarsa/Rekomendasi Forum Intra/Antar Kawasan Regional

01 Rapat Konsinyering Kerja Sama Pembangunan Kawasan Pasifik

15-18 Februari 2023

Kemenlu telah menyelenggarakan konsinyering kerja sama pembangunan kawasan Pasifik sebagai tindak lanjut Indonesia-Pacific Forum for Development (IPFD) pada 15-18 Februari 2023 bersama K/L dan Perwakilan RI terkait. Penyelenggaraan konsinyering dilatarbelakangi oleh visi *Pacific Elevation* dalam membangun komitmen kerja sama yang lebih intensif dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Tujuan dari Konsinyering adalah untuk mengidentifikasi potensi kerja sama yang dapat dilakukan dalam kerangka IPFD sesuai dengan Bali Message for Development in the Pacific. Identifikasi dilakukan dengan melibatkan Kementerian/ Lembaga yang relevan, unit kerja di Kemenlu serta Perwakilan RI terkait. Pertemuan ini telah menyusun konsep awal *blueprint* kerja sama pembangunan yang memuat program kerja yang akan dilakukan dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan *engagement* Indonesia di Kawasan Pasifik ke depannya.

02 Sarasehan Jaring Masukan Rekomendasi, Inisiatif, dan Prioritas Nasional sebagai Ketua IORA Working Group on Blue Economy Periode 2024-2026

11-13 Desember 2023

Indonesia terpilih sebagai Ketua Indian Ocean Rim Association (IORA) Working Group on Blue Economy periode 2024-2026 yang disepakati pada IORA 23rd Council of Ministers (COM 23) di Kolombo, Sri Lanka. Memegang peranan strategis, Indonesia akan bekerja sama dengan Prancis untuk mendorong penyusunan pedoman pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing) di bawah kerangka IORA. Dalam mengedepankan kepentingan nasional di kawasan, Kemenlu perlu mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan terkait di dalam negeri dalam menyusun posisi, rekomendasi, inisiatif dan prioritas Indonesia dalam membentuk kerangka strategis kerja sama di kawasan Samudera Hindia. Untuk itu, pada tanggal 11-13 Desember 2023 Kemenlu menyelenggarakan rangkaian kegiatan Sarasehan Jaring Masukan Rekomendasi, Inisiatif, dan Prioritas Nasional yang perlu didorong melalui IORA Working Group on Blue Economy.

03 APEC Workshop on Promoting Creative Economy in the Aftermath of COVID-19

Bali, 16-17 Oktober 2023

Sebagai implementasi *Aotearoa Plan of Action* pada Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2021 terkait masukan Indonesia mengenai *creative economy,* Kemenlu menyelenggarakan APEC Workshop on Promoting Creative Economy in the Aftermath of COVID-19 di Bali pada tanggal 16-17 Oktober 2023. Diskusi mengenai kontribusi industri kreatif terhadap ekonomi nasional dan global dibahas secara mendalam. Dihadiri oleh beberapa anggota APEC seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Peru, Jepang, Tiongkok, Vietnam, Hong Kong, dan Amerika Serikat, serta pemangku kepentingan industri kreatif dan akademisi, *workshop* tersebut membahas pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi dalam mengembangkan potensi industri kreatif.

> *Workshop* tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi digital untuk pengembangan industri kreatif di wilayah APEC

Beberapa pembicara dari berbagai ekonomi APEC, serta perwakilan The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dan sektor swasta seperti Google Indonesia, Tokopedia, Traveloka, dan lainnya, membagikan pengalaman dan informasi mengenai peluang yang diperoleh dari inovasi digital dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19. *Workshop* tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi digital untuk pengembangan industri kreatif di wilayah APEC.

04 Pelaksanaan FEALAC Journalists' Visit Program (JVP) 2023

Jakarta, 28-31 Oktober 2023

The Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC) Journalists' Visit Program (JVP) 2023 *Post-Event Program* telah dilaksanakan di Jakarta, 28-31 Oktober 2023, sebagai tindak lanjut atas inisiatif Indonesia untuk memperkenalkan kawasan Asia kepada publik Amerika Latin melalui kolaborasi program sosial budaya (*second track diplomacy*) yang disepakati bersama dengan Singapura. Inisiatif tersebut diadopsi pada 19th FEALAC Senior Officials' Meeting 2018 di Laos.

Program tersebut diikuti oleh 5 jurnalis dari negara-negara anggota FEALAC dan 1 pegiat kerja sama Indonesia-Amerika Latin. Kegiatan meliputi *Focus Group Discussion* tentang media dan transformasi digital, kunjungan ke ANTARA dan Jakarta Post untuk membahas isu-isu media, serta kunjungan ke pabrik baterai mobil listrik Hyundai LG Industry Green Power untuk mengenalkan upaya Indonesia dalam transisi energi.

Selain kunjungan, peserta juga menikmati tur wisata di Jakarta yang mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan modern, seperti Kota Tua dan Monumen Nasional, dengan menggunakan transportasi umum Jakarta (MRT dan Bis Trans-Jakarta). Tur wisata diakhiri dengan kunjungan ke Sarinah Mall untuk melihat seni kriya Indonesia. Para jurnalis juga berpartisipasi di program RRI Voice of Indonesia dan TVRI Live Focus Today sebagai bagian dari diseminasi program dalam kerja sama Indonesia dan Amerika Latin.

Program Tindak Lanjut Saran Kebijakan ASEAN

01 ASEAN Goes to School and Campus (AGTS)

Memperkuat Narasi Identitas ASEAN, Kemenlu menyelenggarakan program ASEAN Goes to School and Campus di 4 kota di Indonesia, yaitu Labuan Bajo (15-18 Februari 2023), Yogyakarta (20 Maret 2023), DKI Jakarta (8 Agustus 2023), dan Ambon (21 Agustus 2023). Kemenlu bekerjasama dengan beberapa sekolah dan perguruan tinggi, diantaranya SMA Katolik St. Ignatius Loyola, SMP Katolik Arnoldus, SMP Negeri 1 Komodo, Politeknik eL Bajo Commodus, SMP Negeri 5 Yogyakarta, Sekolah Kinderfield, Universitas Andalas. Kegiatan AGTS pada umumnya memperkenalkan manfaat, tujuan, sejarah ASEAN serta upaya-upaya yang dilakukan ASEAN untuk menciptakan Kawasan yang damai dan sejahtera.

Narrative of ASEAN Identity (NAI) diadopsi pada KTT ASEAN ke-37 tahun 2020 di Laos. Dokumen NAI ini merupakan inisiatif Indonesia yang diusung pertama kalinya pada Keketuaan Indonesia di ASEAN Senior Officials' Meeting for Culture and Arts (SOMCA)/ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts (AMCA) periode 2018-2020.

02 *Focus Group Discussion* (FGD) Diplomasi Kesehatan

Yogyakarta, 19-22 Mei 2023

Dalam KTT ASEAN Plus Three (APT) Tahun 2020 Presiden RI mengusulkan Pembentukan APT *Pharmaceutical Industries Network*. Usulan ini kemudian diadopsi dan dibahas lebih lanjut pada the 15th ASEAN Health Ministers Meeting di Bali tanggal 14 Mei 2022. Pertemuan tersebut menghasilkan *joint statement* yang menyepakati penguatan akses *Vaccines, Therapeutics, and Diagnostics* (VTD) dan suplai kebutuhan medis penting lainnya untuk kesiapan dan respons pandemi, menjajaki pembentukan jaringan kemitraan pemerintah-swasta dalam produk farmasi dan pasokan medis lainnya untuk meningkatkan kapasitas dan kecukupan produksi di negara-negara Anggota ASEAN.

Dari kesepakatan di atas, Kemenlu menindaklanjuti dengan menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) Diplomasi Kesehatan di Yogyakarta, tanggal 19-22 Mei 2023, bekerjasama dengan Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan, Kemenkes, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, Direktur Operasional Bio Farma. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang persepsi dan pengalaman penggiat sektor kesehatan agar terbentuk prioritas nasional yang akan menjadi rujukan dalam peningkatan kerja sama kesehatan yang strategis dengan negara di kawasan ASEAN.

03 ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF): Implementation of the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)

Jakarta, 5-6 September 2023

Sebagai tindak lanjut kesepakatan pada the 29th ASEAN Economic Ministers' (AEM) Retreat and Related Meetings di Magelang bulan Maret 2023, Indonesia menyelenggarakan ASEAN Indo-Pacific Forum: Implementation of the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific di Jakarta pada tanggal 5-6 September 2023. AIPF tersebut terselenggara di sela-sela rangkaian kegiatan KTT ke-43 ASEAN 2023. Indonesia menggagas AIPF dengan fokus pada pembahasan tiga agenda utama, yaitu (i) *Green Infrastructure and Resilient Supply Chain*; (ii) *Sustainable and Innovative Financing*; dan (iii) *Inclusive Digital Transformation and Creative Economy.*

> Gagasan ini menghasilkan 93 proyek kerja sama senilai lebih dari USD 38,2 miliar

AIPF berhasil menghadirkan lebih dari 2.500 peserta dari 51 negara yang terdiri atas Kepala Negara/ Pemerintahan, CEO/pemimpin perusahaan, dan *renowned expert* di berbagai bidang. Gagasan ini menghasilkan 93 proyek kerja sama senilai lebih dari USD 38,2 miliar, dimana USD 13,5 miliar diantaranya di bidang kesehatan, pengolahan mineral, dan keuangan milik swasta Indonesia.

04 *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan *Strategic Plan* ASEAN Community Vision 2045

Padang, Sumatera Barat, 30 November – 1 Desember 2023

Ha Noi Declaration on the ASEAN Community's Post-2025 Vision telah menyepakati pengembangan Visi ASEAN Post-2025 yang dilakukan di sela sela rangkaian KTT ASEAN ke-37 Tahun 2022. Penyusunan visi jangka panjang ASEAN ini juga menjadi salah satu fokus Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.

Agar dapat membentuk dan memproyeksikan rencana strategis yang komprehensif tentang Visi Komunikasi ASEAN 2045, Kemenlu bersama dengan Sekretariat ASEAN telah menyelenggarakan FGD Penyusunan Strategic Plans ASEAN Community Vision 2045 Pilar Sosial Budaya di Padang, Sumatera Barat pada 30 November – 1 Desember 2023. Dibuka oleh Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN dan dihadiri oleh Staf Khusus Penguatan Program-Program Prioritas Kemlu, Staf Khusus Menko PMK bidang Hukum dan Kerja Sama Internasional, Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional Bappenas, dan Kepala Divisi Monitoring ASCC Sekretariat ASEAN sebagai narasumber. FGD membahas elemen Visi ASEAN 2045 dan keterkaitannya dengan visi Indonesia Emas 2045.

Program Tindak Lanjut Rekomendasi Forum Multilateral

01 Ratifikasi Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW)

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi TPNW dari United Nations (UN) yang bertujuan untuk pemusnahan total senjata nuklir, Kemenlu telah mengawal berbagai proses menuju ratifikasi TPNW di Indonesia seperti rapat koordinasi, sosialisasi dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi I DPR RI. Pada Rapat Paripurna DPR RI telah disepakati pengesahan RUU TPNW dan telah disahkan menjadi UU Nomor 22 Tahun 2023 oleh Presiden RI pada 20 Desember 2023.

02 Peluncuran Buku Kajian "Tinjauan Empiris Potensi Dampak Pemberlakuan Regulasi EUDR terhadap Komoditas Strategis Indonesia"

Batam, 12-15 Juni 2023

Menindaklanjuti hasil UPR Indonesia dari Dewan HAM, Kemenlu telah mengadakan kegiatan Sosialisasi Hasil UPR dan Jarmasda Isu Strategis terkait Diplomasi HAM pada tanggal 12-15 Juni 2023 di Batam. Kegiatan menghadirkan narasumber dari Kemenlu, Komnas Perempuan, dan Akademisi Universitas Internasional Batam. Kegiatan merupakan bentuk transparansi dan pertanggungjawaban Pemerintah RI atas hasil dari rangkaian proses UPR agar masyarakat dapat mendukung dan mengawal tindak lanjut Pemerintah RI atas rekomendasi yang didukung. Ditegaskan pula bahwa UPR merupakan mekanisme Dewan HAM yang kooperatif, berbasis data dan argumentasi valid, serta non-politisasi.

03 Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Posisi Pemerintah RI dan Sosialisasi Hasil Pertemuan the Third Session of the Intergovernmental Negotiating Committee (INC-3) on Plastic Pollution

Bogor, 29 November – 3 Desember 2023

Sebagai tindak lanjut dari hasil sidang INC-3 on Plastic Pollution, Kemenlu telah mengadakan rapat koordinasi, konsolidasi posisi Pemerintah RI serta sosialisasi hasil pertemuan INC-3 on Plastic Pollution pada tanggal 29 November – 3 Desember 2023 di Bogor. Rakor terlaksana atas koordinasi Kemenlu dengan Kemenko Marves, Kementerian LHK, Kemenperin, BRIN dan Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN-PSL). Kegiatan bertujuan untuk memetakan kondisi dan kemampuan industri terkait plastik, termasuk pengelolaan limbah. Indonesia juga mengatur strategi untuk menggalang dukungan (finansial dan teknis) dari negara maju untuk negara berkembang dalam rangka implementasi instrumen baru tersebut.

Proyeksi Ke Depan

Ke depannya, Kemenlu akan terus mendorong pemangku kepentingan di dalam negeri untuk mengambil langkah konkret atas berbagai kesepakatan Indonesia dengan negara mitra. Pendekatan dengan pemangku kepentingan di dalam negeri dilakukan dengan strategi kolaboratif, informatif dan fleksibel. Dalam menindaklanjuti hasil kesepakatan internasional, Kemenlu akan melibatkan kerja sama, penyediaan informasi dan komunikasi yang baik, serta penyusunan program yang dapat disesuaikan sewaktu-waktu, jika terdapat perubahan situasi/kebijakan yang cepat.

Pada tahun 2023, masih terdapat beberapa kesepakatan internasional yang tindak lanjutnya akan didorong Kemenlu pada tahun mendatang, di antaranya:

01. Proyeksi Tindak Lanjut Kerja Sama Bilateral

1. Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Presiden RI ke Negara di Kawasan Asia, Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa di Tahun 2023.
2. Sosialisasi Mekanisme Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Mozambique dan Mauritius Kepada Eksportir Nasional.
3. Percepatan perundingan dan implementasi FTA / CEPA, antara lain dengan UE, Kanada, Chile, Peru, Turki, EFTA, EAEU, IPEF, dan MERCOSUR.
4. Pelaksanaan Forum Konsultasi Bilateral dan Sidang Komisi Bersama untuk penguatan dan evaluasi kerja sama bilateral jangka panjang.

02. Proyeksi Tindak Lanjut Prakarsa/Rekomendasi dari Forum Intra/Antar Kawasan

1. Tindak Lanjut atas Prakarsa Indonesia dalam IORA Council of Minister dan APEC Meeting Tahun 2023.
2. Rekomendasi dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2023, Aoteaora Plan of Action, Bahrain Declaration, dan the 1st International Mini Conference on IUU Fishing.

03. Proyeksi Tindak Lanjut Saran Kebijakan ASEAN

1. Implementasi saran kebijakan yang dihasilkan dalam pertemuan ASEAN selama Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.
2. Tindak lanjut kebijakan untuk mendorong Narrative of ASEAN Identity melalui *public engagement and awareness*.
3. Tindak lanjut Permenlu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rapat dan Mekanisme Koordinasi Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (The Association of Southeast Asian Nations).
4. Implementasi Rencana Aksi Nasional Implementasi Cetak Biru ASEAN Tahun 2022-2025.

03. Proyeksi Tindak Lanjut Rekomendasi dari Forum Multilateral

1. Menindaklanjuti rekomendasi pada forum OKI terkait penyelesaian konflik Israel-Palestina Peran Indonesia dalam OKI semakin strategis, terutama dalam menangani peningkatan konflik Israel-Palestina. Pada 2024, Indonesia direncanakan hadir pada berbagai forum seperti SOM, KTM, Komisi Anggaran, serta mempersiapkan pertemuan sains dan teknologi OKI.
2. Tindak Lanjut atas Prakarsa Indonesia untuk Mempertahankan posisi Indonesia di jajaran 10 besar negara pengirim Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB. Kemenlu akan mempertahankan posisi Indonesia di jajaran 10 besar negara pengirim Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB, meningkatkan partisipasi personel perempuan dan sipil dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, melalui partisipasi di Sidang C-34 pada Februari-Maret 2024, kegiatan pembekalan pasukan, dan memperkuat sinergi antar Kementerian dan Lembaga melalui rapat rutin Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP).
3. Tindak lanjut Prakarsa Indonesia untuk mendorong finalisasi berbagai isu yang menjadi kepentingan nasional melalui Sidang World Trade Organization (WTO), yaitu 1) Agreement on Agriculture, 2) Agreement on Fish Subsidies, dan 3) Dispute Settlement System Reform. Kemenlu akan melaksanakan beragam pertemuan pendahuluan bersama Kementerian dan Lembaga teknis untuk memantapkan posisi Indonesia, yang kemudian akan disampaikan dalam kesempatan mengikuti pertemuan-pertemuan WTO sebelum pelaksanaan KTM WTO ke-13 pada tahun 2024.

Dokumentasi Program Pendukung Capaian IKU C2.1 : Persentase Tindak Lanjut/Implementasi Kesepakatan Internasional oleh Pemangku Kepentingan di Dalam Negeri

Gambar III.79
KUAI RI Phnom Penh dan Perwakilan Pemerintah Kamboja serta Air Asia dalam acara peluncuran jalur penerbangan langsung CGK-PNH
(Phnom Penh, 10 April 2023)
Sumber: KBRI Phnom Penh

Gambar III.80
Delegasi RI (kiri) dan delegasi Phnom Penh (kanan), pada pertemuan bilateral menindaklanjuti kesepakatan kerja sama pertanian RI-Kamboja
(Phnom Penh, 15-16 Agustus 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.81
Pelaksanaan Konsultasi Bilateral ke-7 RI-Mesir membahas tindak lanjut kesepakatan kerja sama penanggulangan terorisme dan pertahanan
(Jakarta, 20 juli 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.82
Pertemuan Kemenlu RI dengan Kemenlu Republik Kamerun menindaklanjuti persiapan operasionalisasi Perwakilan RI yang baru berkedudukan di Yaounde, Kamerun
(Kamerun, 10-15 Juni 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.83
Leaders' Retreat RI-Singapura Tahun 2023 sebagai implementasi kesepakatan untuk menyelenggarakan Pertemuan Konsultatif Tahunan sejak tahun 2010
(Singapura, 16 Maret 2023)
Sumber: Singapore Prime Minister Office Website

Gambar III.84
Pelaksanaan Dialog HAM RI-Norwegia sebagai tindak lanjut kesepakatan Dialog HAM tahun sebelumnya (Jakarta, 6 Desember 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.85
Suasana Diskusi Panel pada APEC Workshop on Promoting Creative Industries in the aftermath COVID-19 sebagai tindak lanjut Aoteaora Plan of Actions (Bali, 16-17 Oktober 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.86
Tim Kemenlu bersama dengan Perwakilan Timor Leste di Jakarta pada kegiatan ASEAN Goes to School menindaklanjuti saran kebijakan ASEAN tentang Narrative of ASEAN Identity (Jakarta, 8 Agustus 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.87
Partisipasi Jurnalis negara anggota FEALAC pada program RRI Voice of Indonesia dan TVRI Live Focus Today, dalam rangka kegiatan FEALAC Journalists' Visit Program (JVP) 2023 (Jakarta, 28-31 Oktober 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.88
Menlu RI bersama dengan Anggota Komisi I DPR RI pada rapat dengar pendapat di Komisi I DPR membahas rancangan undang-undang ratifikasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW)
(Jakarta, 2 Oktober 2023)

Sumber: kompas.id

Gambar III.89
Rapat koordinasi Kemenlu dengan Kemenko Marves, Kementerian LHK, Kemebperin, BRIN dan Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN-PSL), membahas tindak lanjut INC-3 on Plastic Pollution (Bogor, 28 November - 3 Desember 2023)

Sumber: Kemenlu

Analisis IKU C2.2

Indeks Pengaruh Rekomendasi Strategi Kebijakan Luar Negeri Terhadap Kebijakan Pemangku Kepentingan

Deskripsi IKU

Kebijakan luar negeri dibentuk dari analisis mendalam terhadap kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, yang dilakukan melalui riset dan menghasilkan kebijakan yang efektif demi kepentingan nasional dan perdamaian global. Sikap dan langkah Pemerintah Indonesia dalam hubungan internasional berdampak pada kebijakan pemangku kepentingan domestik serta membentuk posisi Indonesia dalam kerja sama global. Untuk itu, selain menyelenggarakan hubungan luar negeri, Kemenlu juga merumuskan saran kebijakan strategis bagi pemangku kepentingan di dalam negeri agar sejalan dengan kebijakan luar negeri yang berfokus pada kepentingan nasional.

Rekomendasi strategi kebijakan luar negeri merupakan saran kebijakan dan sasaran yang ditetapkan menyangkut sikap dan langkah negara dalam berinteraksi dengan negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lainnya yang menyangkut aspek bilateral, regional dan internasional guna mencapai kepentingan nasional yang dilakukan oleh negara.

Rekomendasi strategi kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan pengaruh yang dilihat dari adanya dampak yang timbul dari diseminasi rekomendasi strategi kebijakan luar negeri. Dampak ini tidak hanya mempengaruhi, tetapi juga membentuk keputusan yang diambil oleh pemangku kepentingan terkait. Rekomendasi dihasilkan dari kajian analitis dan observasional atas temuan, kebijakan baru, dan data yang didapatkan dari pola interaksi dan dinamika antar negara/kawasan.

Pengaruh saran kebijakan luar negeri yang dihasilkan diukur melalui survei yang ditujukan bagi unsur pimpinan yang mewakili K/L terkait di luar Kementerian Luar Negeri, lembaga penelitian, lembaga pendidikan tinggi, asosiasi/ himpunan/Kadin, atau lembaga lainnya yang diidentifikasi sebagai penerima manfaat.

IKU C2.2 "Indeks Pengaruh Rekomendasi Strategi Kebijakan Luar Negeri Terhadap Pemangku Kepentingan" digunakan Kemenlu untuk mengukur pengaruh rekomendasi strategi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap kebijakan pemangku kepentingan, sehingga memberikan nilai manfaat rekomendasi yang berkualitas dalam mendukung hubungan dan kebijakan luar negeri.

> Sikap dan langkah Pemerintah Indonesia dalam hubungan internasional berdampak pada kebijakan pemangku kepentingan di dalam negeri

Realisasi IKU C2.2 Indeks Pengaruh Rekomendasi Strategi Kebijakan Luar Negeri Terhadap Kebijakan Pemangku Kepentingan diperoleh dari:

Hasil Survei Kepada Pemangku Kepentingan

Atas kajian yang dilakukan per isu di kawasan Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf), Amerika dan Eropa (Amerop), dan isu multilateral dengan metode perhitungan indeks akhir sebagai berikut:

$$\text{Total Indeks Akhir} = \frac{\text{(Indeks Akhir Kajian Isu Kawasan Aspasaf + Indeks Akhir Kajian Isu Kawasan Amerop + Indeks Akhir Kajian Isu Multilateral)}}{3}$$

**Catatan: Penghitungan menggunakan 2 digit setelah koma*

Kajian dilakukan melalui reviu kebijakan mandiri dan reviu kebijakan kemitraan yang menghasilkan rekomendasi dan didiseminasikan di tahun 2023. Dalam proses diseminasi saran kebijakan, Kemenlu melakukan survei untuk mengukur pengaruh. Rekomendasi yang akan disurvei ditentukan di awal tahun dan ditetapkan melalui Surat Keputusan.

Pada tahun 2023, terdapat 6 rekomendasi kebijakan yang disosialisasikan terkait dengan pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas, strategi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), diplomasi kesehatan, pembangunan ekonomi hijau berkelanjutan, Kerjasama Selatan-Selatan, dan aksesi Indonesia ke Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Survei dilakukan selama satu tahun anggaran (Januari-Desember) atas Reviu Kebijakan Mandiri dan Reviu Kebijakan Kemitraan yang telah disusun pada tahun 2022. Survei menyasar unsur pimpinan pemerintah dan nonpemerintah/swasta untuk menjawab pertanyaan secara *online* melalui tautan: https://kem.lu/IndeksPengaruh. Data survei kemudian diolah yang menghasilkan nilai interval dan dikonversi menjadi indeks dengan kategori skala sebagai berikut:

Keterangan Indeks dan Predikat		Nilai Interval Skala Likert	
Skala 1	Tidak Berpengaruh	**1,00 - 2,59**	Tidak Berpengaruh
Skala 2	Kurang Berpengaruh	**2,60 - 3,06**	Kurang Berpengaruh
Skala 3	Berpengaruh	**3,07 - 3,53**	Berpengaruh
Skala 4	Sangat Berpengaruh	**3,54 - 4,00**	Sangat Berpengaruh

Informasi Kinerja

Tabel III.41
Capaian IKU C2.2 Indeks Pengaruh Rekomendasi Strategi Kebijakan Luar Negeri Terhadap Kebijakan Pemangku Kepentingan

Sumber: AKSI Kemenlu

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Indeks Pengaruh Rekomendasi Strategi Kebijakan Luar Negeri Terhadap Kebijakan Pemangku Kepentingan	Hasil Survei Kepada Pemangku Kepentingan	**3,32**

Target	Realisasi	Capaian
3,20	3,32	103,75%

Di tahun 2023, realisasi IKU C2.2 Indeks Pengaruh Rekomendasi Strategi Kebijakan Luar Negeri Terhadap Kebijakan Pemangku Kepentingan adalah 3,32 dengan predikat 'Berpengaruh' dari target 3,20 sehingga memperoleh capaian sebesar 103,75% atau IKU ini tercapai melampaui target. Capaian ini diperoleh dari perbandingan target dan realisasi yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Hal ini menujukkan adanya pengaruh positif rekomendasi strategi kebijakan luar negeri terhadap pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan di dalam negeri.

Rekomendasi yang Disurvei

Pemanfaatan RCEP untuk Peningkatan Perdagangan dengan 5 Negara Non-ASEAN	3,37
Pengembangan KEK agar Lebih *Attractive* bagi Investasi Asing dan Mendukung Diplomasi Ekonomi	3,23
Diplomasi Kesehatan Indonesia di Kawasan Amerika dan Eropa: Amerika Serikat, Belanda, Jerman, dan Swiss	3,31
Pembangunan Hijau Berkelanjutan Indonesia	3,29
Perjalanan Satu Dekade KSS di Indonesia: Kontribusi bagi Tercapainya Pembangunan Berkelanjutan	3,52
Aksesi Indonesia ke OECD: Reviu Strategis Geopolitik, Geoekonomi, dan Implikasinya	3,24

01.

Policy Review Kemitraan "Pemanfaatan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) untuk Peningkatan Perdagangan Dengan 5 Negara Non-ASEAN"

Nilai Indeks Akhir

3,37/4

Predikat

Berpengaruh

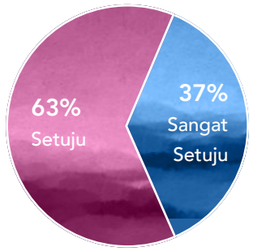

Persepsi Responden

Rata-rata 63% Setuju

dengan pertanyaan survei rekomendasi terkait pemanfaatan RECP

Policy review ini merumuskan rekomendasi kebijakan luar negeri tentang strategi peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan 5 negara RCEP non-ASEAN yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Reviu dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif.

Secara lebih lanjut, *policy review* ini menggunakan metode *Focus Group Discussion*/Diskusi Terbatas/wawancara, Analisis data sekunder/studi kepustakaan, Penggunaan berbagai aplikasi untuk analisa ekonomi. Dalam penyusunan kajiannya, Kemenlu bekerja sama dengan International Trade Analysis and Policy Studies, serta Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor (ITAPS FEM IPB).

02.

Reviu Kebijakan Strategi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) agar Lebih *Attractive* bagi Investasi Asing dan Mendukung Diplomasi Ekonomi

Nilai Indeks Akhir

3,23/4

Predikat

Berpengaruh

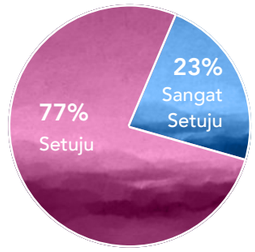

Persepsi Responden

Rata-rata 77% Setuju

dengan pertanyaan survei rekomendasi terkait pengembangan KEK

Reviu kebijakan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai macam faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan investasi para investor asing di Indonesia dan menyusun strategi promosi untuk menarik minat para investor asing untuk melakukan penanaman modal di Indonesia pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Tujuan dari studi Strategi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah 1) Mengidentifikasi berbagai macam faktor yang berkaitan pengambilan keputusan investasi oleh investor asing (PMA) di Indonesia, dan 2) Menyusun analisis perilaku investor asing dalam pengambilan keputusan investasi di Indonesia.

03.

Reviu Kebijakan Mandiri (RKM) "Diplomasi Kesehatan Indonesia di Kawasan Amerika dan Eropa: Amerika Serikat, Belanda, Jerman, dan Swiss"

Nilai Indeks Akhir

3,31/4

Predikat

Berpengaruh

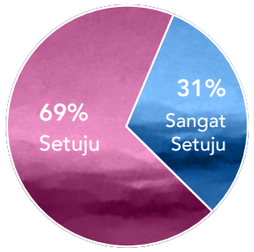

Persepsi Responden

Rata-rata 69% Setuju

dengan pertanyaan survei rekomendasi terkait diplomasi kesehatan kawasan Amerop

RKM menganalisis potensi mitra Indonesia (AS, Belanda, Jerman, Swiss) dalam kerja sama kesehatan, mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta merumuskan strategi diplomasi kesehatan. RKM mendukung upaya penguatan diplomasi kesehatan sebagai prioritas diplomasi Indonesia dan kinerja Kementerian Luar Negeri. Ini penting untuk memberikan panduan strategis bagi kebijakan nasional, bilateral, regional, dan multilateral dalam konteks kesehatan, mendukung kemandirian kesehatan nasional melalui kerja sama internasional sesuai kepentingan nasional.

Secara umum, alur diskusi RKM terdiri dari 4 tahapan: identifikasi mitra potensial, penentuan bentuk kerja sama, analisis peluang dan tantangan, serta merumuskan strategi kebijakan luar negeri Indonesia. Identifikasi mitra potensial menggunakan tiga kategori potensi kerja sama: *least likely*, *moderate*, dan *most likely*. RKM menggunakan metode analisis SWOT dan PESTLE untuk menghasilkan rekomendasi strategi kebijakan. Data primer dikumpulkan melalui *Focus Group Discussion* (FGD), Diskusi Terbatas (Distas), dan Pertemuan Kelompok Ahli (PKA).

04.

Reviu Kebijakan Mandiri 2022 "Pembangunan Ekonomi Hijau Berkelanjutan Indonesia"

Nilai Indeks Akhir

3,23/4

Predikat

Berpengaruh

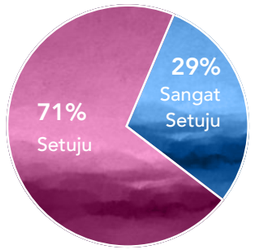

Persepsi Responden

Rata-rata 71% Setuju

dengan pertanyaan survei rekomendasi terkait pembangunan ekonomi hijau berkelanjutan

Reviu Kebijakan ini disusun untuk menanggapi kebutuhan yang mendesak akan evaluasi yang komprehensif dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan di Indonesia. Dokumen ini mencakup konsep pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan, strategi pemberdayaan komoditas unggulan yang berkelanjutan di Indonesia, serta strategi pembangunan infrastruktur hijau dengan penekanan pada strategi rendah karbon beserta dukungannya, dan rencana diplomasi Indonesia ke depannya.

Harapannya, Reviu Kebijakan ini dapat menjadi landasan bagi upaya pemberdayaan komoditas berkelanjutan dan analisis awal untuk menginisiasi transformasi dan transisi menuju infrastruktur hijau dalam pencapaian Pembangunan Rendah Karbon (PRK) di Indonesia.

05.

Reviu Kebijakan Kemitraan 2022 "Perjalanan Satu Dekade KSS di Indonesia: Kontribusi Bagi Tercapainya Pembangunan Berkelanjutan"

Nilai Indeks Akhir

3,52/4

Predikat

Berpengaruh

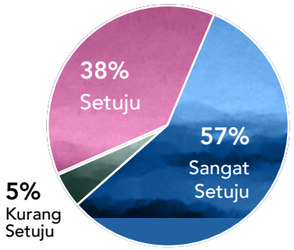

Persepsi Responden

Rata-rata 57% Sangat Setuju

dengan pertanyaan survei rekomendasi terkait KSS dan kontribusinya bagi pembangunan berkelanjutan

Review Kebijakan Kolaborasi untuk Perjalanan Sepuluh Tahun KSS Indonesia: Kontribusi terhadap Pembangunan Berkelanjutan mengevaluasi pencapaian KSS Indonesia selama satu dekade (2011-2021), khususnya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Selama periode tersebut, lebih dari seribu program telah dijalankan dengan partisipasi dari lebih dari 13 ribu peserta yang berasal dari berbagai negara.

Tinjauan ini, hasil dari kemitraan antara Kemenlu dan Center for International Relations Studies, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (CIReS LPPSP) – FISIP Universitas Indonesia. KSS tetap dianggap sebagai instrumen strategis dalam mencapai TPB melalui peningkatan institusi, sumber daya manusia, anggaran, dan program KSS Indonesia. Peningkatan peran sektor non-pemerintah dan swasta juga penting, bersama dengan memperkuat dan memperluas kemitraan untuk kerjasama triangular. Program KSS juga dapat membantu dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19.

06.

Reviu Kebijakan Mandiri 2023 "Aksesi Indonesia ke OECD: Reviu Strategis Geopolitik, Geoekonomi, dan Implikasinya"

Nilai Indeks Akhir

3,24/4

Predikat

Berpengaruh

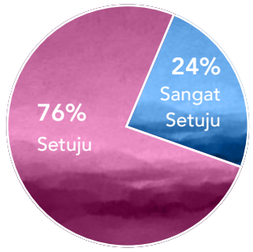

Persepsi Responden

Rata-rata 76% Setuju

dengan pertanyaan survei rekomendasi terkait aksesi Indonesia ke OECD

Reviu kebijakan ini dilakukan untuk memberikan sebuah kajian awal untuk meninjau kesiapan Indonesia bergabung dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). RKM memuat informasi, analisis, serta tinjauan mengenai profil OECD dan perluasan keanggotaannya, proses dan kriteria aksesi ke OECD, pelajaran dan praktik terbaik dari Kosta Rika, Kolombia, dan Lithuania (negara anggota OECD) serta Argentina dan Brazil (negara kandidat OECD), serta analisis kebijakan strategis aksesi Indonesia ke OECD.

Reviu kebijakan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi *stakeholder* yang terlibat langsung dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan aksesi Indonesia ke OECD.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.42
Target, Realisasi, dan Capaian IKU C2.2 Indeks Pengaruh Rekomendasi Strategi Kebijakan Luar Negeri Terhadap Kebijakan Pemangku Kepentingan

Kode IKU/ SUB IKU		2020	2021		2022		2023	
C2.2	Target	3	3	↔	3	↔	**3,20**	↑
	Realisasi	3,36	3,44	↑	3,26	↓	**3,32**	↑
	Capaian	111,89%	114,80%	↑	108,67%	↓	**103,75%**	↓

Data diatas menunjukkan perbandingan target, realisasi, dan capaian kinerja untuk IKU C2.2 selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2020 dan 2021, realisasi indeks berhasil melebihi target, menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian masing-masing sebesar 111,89% dan 114,80%. Terdapat penurunan realisasi kinerja pada tahun 2022. Meskipun demikian, realisasi tersebut tetap mencapai target yang ditetapkan.

Tahun 2023 target ditetapkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan diikuti pula dengan realisasi IKU yang meningkat jika dibandingkan dengan 2022. Peningkatan ini dapat diperhatikan dari perbandingan antara target dan realisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan atau perbaikan dalam pencapaian kinerja dengan target yang menantang.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Realisasi IKU C2.2 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dan menghasilkan capaian di atas 100%. Keberhasilan tersebut disebabkan adanya konsistensi Kemenlu untuk terus menghasilkan rekomendasi strategi kebijakan luar negeri yang berkualitas dan sesuai dengan prioritas kepentingan nasional. Selain itu, juga terus dilakukan pengelolaan survei yang tepat sasaran. Keberhasilan pencapaian target pada IKU C2.2. ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

01

Rekomendasi Strategi Kebijakan Memiliki Relevansi dengan Kebutuhan

Rekomendasi strategi kebijakan luar negeri yang dihasilkan Kemenlu memiliki relevansi dengan kebutuhan pemangku kepentingan dan memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kebijakan K/L dan pemangku kepentingan. Hal ini tercermin melalui hasil survei dari pemangku kepentingan eksternal Kemenlu dengan nilai indeks 3,32 (berpengaruh).

02

Penyusunan Rekomendasi Berbasis Data

Penyusunan rekomendasi strategi kebijakan luar negeri yang berbasis data, sehingga menghasilkan *evidence-based policy recommendation*.

03

***Engagement* Tinggi Pemangku kepentingan**

Pemangku kepentingan memiliki tingkat *engagement* yang tinggi karena dilibatkan dalam penyusunan rekomendasi strategi kebijakan luar negeri sejak proses awal hingga pembahasan akhir.

04

Survei Mudah Dipahami

Survei yang diberikan kepada responden dibuat dengan pertanyaan yang sederhana dan berkaitan dengan tujuan survei agar lebih mudah dipahami oleh pengguna sehingga partisipasi responden meningkat.

05

Kegiatan Diseminasi Hasil Pendekatan Strategis

Kegiatan diseminasi hasil kajian yang telah disusun kepada pemangku kepentingan dan publik melalui pendekatan strategis, seperti *courtesy call*, diskusi terbatas, FGD, dan *Webinar*, maupun melalui media sosial dan portal Kemenlu.

Kendala dan Tantangan

Kendala dan tantangan dalam penyusunan kajian dan pelaksanaan survei terkait rekomendasi strategi kebijakan luar negeri antara lain:

01

Mekanisme Pelaksanaan Survei *Online* yang Kurang *User Friendly*

Sebagian responden tidak terbiasa dengan survei *online* menggunakan situs *web*, sehingga mengalami kesulitan teknis dalam mengisi kuesioner. *Interface* kuesioner yang kurang ramah membatasi partisipasi pengguna/pemangku kepentingan terkait, utamanya unsur pimpinan yang terbiasa dengan survei manual/konvensional.

02

Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Survei

Survei dilakukan selama satu tahun anggaran (Januari-Desember). Selama periode tersebut, Kemenlu berkoordinasi secara resmi dengan pemangku kepentingan untuk menyampaikan kuesioner *online*, namun demikian, tidak semua memberikan respons sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Hal ini mengakibatkan Kemenlu perlu melakukan pendekatan informal kepada *focal point* di Lembaga di akhir tahun dimana periode pelaksanaan survei sudah harus ditutup.

03

Rekomendasi yang Berpengaruh Rendah

Beberapa responden mencatat bahwa rekomendasi kebijakan belum sepenuhnya mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan, meskipun jumlah yang menyatakan hal ini sedikit. Informasi dalam kajian masih belum memberikan pemahaman baru tentang isu tertentu. Oleh karena itu, Kemenlu perlu mengkaji ulang data yang digunakan dan menyusun analisis yang lebih spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai koordinator hubungan luar negeri. Ini menjadi tantangan bagi Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan kualitas rekomendasi yang dihasilkan.

Upaya Perbaikan

Dalam menghadapi kendala dan tantangan yang ada, telah dilakukan upaya perbaikan sebagai berikut:

01

Pemutakhiran Survei

Melakukan pemutakhiran dan penguatan tautan survei online yang digunakan dalam pelaksanaan survei kepada para responden.

02

Pendekatan dan Pendampingan Responden

Melakukan pendekatan dan pendampingan kepada responden dalam melakukan pengisian survei *online* berbasis *website*, serta internalisasi rekomendasi strategi kebijakan luar negeri kepada para pemangku kepentingan agar diperoleh pemahaman komprehensif serta mendorong upaya penjajakan dengan pemangku kepentingan.

03

Pemantauan Rutin

Melakukan pemantauan secara rutin pelaksanaan survei untuk melakukan identifikasi respon dari para pemangku kepentingan (responden).

04

Kolaborasi dengan Satker Maupun K/L lainnya untuk Penyusunan Reviu

Melakukan berbagi pendanaan dengan Satker maupun K/L lainnya dalam merancang kontrak untuk penyusunan reviu kebijakan dan mengakomodir masukan dari berbagai pihak guna mempertajam analisis dalam reviu kebijakan. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas rekomendasi strategi kebijakan yang disusun oleh Kemenlu.

Analisis Program Pendukung Capaian

Dalam pencapaian IKU C2.2, Kemenlu menyelenggarakan beberapa program yang mendukung terealisasinya IKU C2.2. *Highlights* program pendukung capaian IKU C2.2 sebagai berikut:

01 Sosialisasi Reviu Kebijakan

Sosialisasi Reviu Kebijakan yang dilakukan Kemenlu pada tahun 2023, antara lain:

a. FGD Sosialisasi Reviu Kebijakan "Pemanfaatan RCEP untuk Peningkatan Perdagangan Indonesia dengan Lima Negara RCEP Non-ASEAN" pada 30 Maret 2023.

b. FGD Sosialisasi Reviu Kebijakan "Strategi Pengembangan KEK untuk Lebih *Attractive* bagi Investasi Asing dan Mendukung Diplomasi Ekonomi" pada 9 Juni 2023.

c. Forum Reviu Kebijakan Luar Negeri (FRKLN) "Diplomasi Kesehatan Indonesia di Kawasan Amerika dan Eropa: Amerika Serikat, Belanda, Jerman, dan Swiss" pada 16 Maret 2023.

Sosialisasi yang dihadiri oleh Perwakilan K/L dan pemangku kepentingan terkait yang dilaksanakan dalam rangka diseminasi hasil Reviu Kebijakan sekaligus sebagai penyempurnaan lebih lanjut Reviu Kebijakan yang telah disusun.

02 Pelaksanaan dan Pengelolaan Survei

Pelaksanaan dan pengelolaan survei kepada para pemangku kepentingan berdasarkan pedoman survei yang terus dimutakhirkan dan disempurnakan sesuai dengan Surat Keputusan. Keputusan tersebut mengatur metodologi survei dan penetapan populasi, sampel, responden, waktu pelaksanaan survei, metode pengolahan data, metode pengukuran data, dan target yang ingin dicapai.

03 Pengembangan *Tools* Internal Untuk Pengumpulan dan Analisis Data

Di sepanjang tahun 2023, Kemenlu mengembangkan 'Investolink', aplikasi berbasis *web* yang berfungsi sebagai *dashboard* pencatatan investasi *inbound* dan *outbound* Indonesia. *Dashboard* Investolink yang ditujukan untuk mengawal proses pengumpulan semua informasi serta data terkait Investasi dari dan ke Indonesia, sesuai dengan amanat Permenlu Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pelindungan, Fasilitasi, dan Pencatatan Penanaman Modal Asing Indonesia di Luar Negeri. *Dashboard* Investolink dibangun pada tahun 2021 dan telah mulai digunakan secara internal hingga tahun 2022. Mempertimbangkan manfaat yang didapatkan dari investolink, pada tahun 2023 dilakukan revitalisasi dan pengembangan lanjutan untuk meningkatkan *interoperability dashboard* Investolink. Untuk mendukung teknis operasional aplikasi, tengah disusun peraturan teknis pedoman pengelolaan *dashboard* investolink secara internal.

04 Penyelenggaraan Foreign Policy Data Talk/Diskusi Terbatas dan Analytic Dialogue

Untuk menyusun satu rekomendasi atau policy brief, Kemenlu menyelenggarakan pertemuan formal dengan akademisi/para ahli/Lembaga yang terkait dengan kebijakan luar negeri untuk *sharing notes* dan data serta mendapatkan masukan substansi untuk berbagai isu regional dan global. Di tahun 2023, Kemenlu menyelenggarakan beberapa kegiatan dengan Lembaga eksternal untuk meningkatkan kualitas rekomendasi yang dihasilkan, diantaranya:

a. Stadium General dan Foreign Data Policy Talk (FPDT): "Prospek Kalimantan sebagai Episentrum Pertumbuhan di Kawasan Timur ASEAN: Peran Analisis Data dalam Penguatan Diplomasi Ekonomi", pada tanggal 14 September 2023 di Universitas Mulawarman, Samarinda. Kegiatan dihadiri oleh Sivitas Akademika dari Pusat Studi ASEAN Universitas Mulawarman (UNMUL), Program Studi Hubungan Internasional UNMUL, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), dan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur (UNU-KT).

b. *Data Analytics Dialogue* antara Kemenlu RI dengan Kemlu Belanda (ESA dan DataLab). Kegiatan bertujuan untuk melaksanakan *case study* pemanfaatan analisis data dalam menanggapi isu Diplomasi ekonomi (*Economic Intelligence*), tren dinamika global, dan pertumbuhan Asia-Pasifik. Kegiatan diselenggarakan pada tanggal 19-23 September 2023 di Belanda. Selain pertemuan dengan Kemlu Belanda, delegasi RI juga mengadakan pertemuan dengan Clingendael Institute, Leiden Asia Centre (LAC), dan The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS).

05 *Policy Planning Dialogue* (PPD)

Di tahun 2023, Kemenlu menyelenggarakan 3 *policy planning dialogue* dengan negara mitra, yaitu Tehran (12 Februari 2023), Jepang (17 Oktober 2023). PPD dilaksanakan sebagai media untuk pertukaran perspektif/pandangan dengan lembaga *think tank* Kementerian Luar Negeri negara sahabat dan pemangku kepentingan lainnya yang relevan guna menghimpun perspektif dan hasil telaahan mengenai berbagai isu pada tingkat bilateral, regional dan global yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.

Proyeksi Ke Depan

Sebagai upaya melakukan perencanaan dengan lebih baik, Kemenlu telah melakukan proyeksi kegiatan terkait IKU C2.2, sebagai berikut:

01. Keterlibatan K/L dan Pemangku Kepentingan sejak Awal Proses Penyusunan Reviu

Dengan adanya rencana kenaikan target Indeks Pengaruh Pengaruh Rekomendasi Strategi Kebijakan Luar Negeri terhadap Kebijakan Pemangku Kepentingan menjadi 3,30 (skala 4) pada tahun 2024, keterlibatan K/L dan pemangku kepentingan dari sejak awal proses penyusunan reviu kebijakan hingga terselesaikannya produk akhir sangat penting.

02. Menggali Masukan dalam Penyusunan Prioritas Analisis Strategi Kebijakan Tahun 2024

Menggali masukan dalam penyusunan prioritas analisis strategi kebijakan tahun 2024 dari para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal Kemenlu diperlukan agar Kemenlu dapat menghadirkan reviu kebijakan yang dapat dijadikan referensi dan memiliki daya pengaruh terhadap kebijakan pemangku kepentingan sesuai dengan prioritas kepentingan nasional.

03. Perbaikan Infrastruktur Pendukung Pelaksanaan Survei

Pengembangan survei *online* berbasis *website* perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kendala teknis dalam pelaksanaan survei. Pengelolaan survei secara lebih terencana dan matang terutama dalam hal penyusunan *timeline* pelaksanaan survei.

04. Meninjau Kembali Target Survei

Meninjau kembali target survei agar dapat mengidentifikasi kemungkinan untuk menyebarkan rekomendasi kebijakan Kemenlu kepada pemangku kepentingan yang lebih luas lagi, sehingga jumlah responden terus meningkat.

05. Pengembangan Lanjutan *Dashboard* Investolink

Pengembangan lanjutan *dashboard* Investolink sesuai dengan masukan dari Perwakilan dan unit organisasi terkait di Kemenlu yang diperoleh pada tahun 2023. Selain itu, pembentukan *help desk* untuk menangani kendala dalam penginputan/*updating* data oleh unit organisasi terkait.

Dokumentasi Program Pendukung Capaian IKU C2.2 : Indeks Pengaruh Rekomendasi Strategi Kebijakan Luar Negeri Terhadap Kebijakan Pemangku Kepentingan

Gambar III.90
Pelaksanaan FPDT dan Stadium General untuk penguatan diplomasi ekonomi di Universitas Mulawarman
(Kalimantan Timur, 14 September 2023)
Sumber: BSKLN

Gambar III.91
Delegasi Kemenlu yang dipimpin oleh Kepala BSKLN menyampaikan paparan tentang rivalitas Indo-Pasifik di Clingendael Institute
(Belanda, 19-23 September 2023)
Sumber: BSKLN

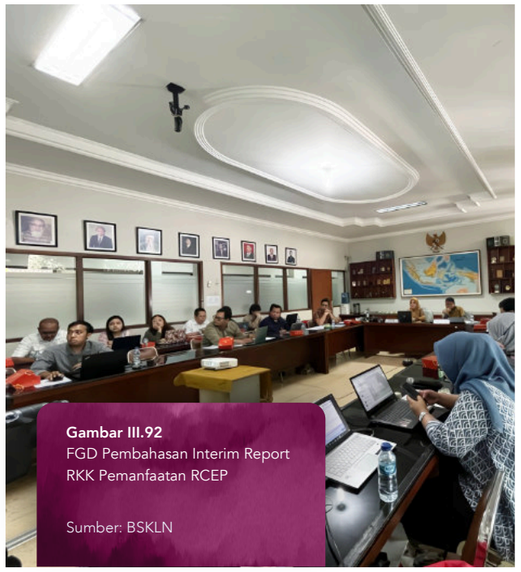

Gambar III.92
FGD Pembahasan Interim Report RKK Pemanfaatan RCEP

Sumber: BSKLN

Gambar III.93
Sosialisasi Reviu Kebijakan "Strategi Pengembangan KEK untuk Lebih *Attractive* dan Mendukung Diplomasi Ekonomi" (Bandung, 9 Juni 2023)
Sumber: BSKLN

Gambar III.83
Kepala Pusat Kajian Amerop Kemenlu (tengah) bersama dengan peserta kegiatan FRKLN: Diplomasi Kesehatan Indonesia di Kawasan Amerop
(Yogyakarta, 16 Maret 2023)
Sumber: BSKLN

Internal Business Perspective (IBP) B

Perspektif IBP merupakan sudut pandang organisasi yang berfokus pada proses bisnis utama di dalam organisasi. Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*). Perspektif IBP didukung oleh dua Sasaran Strategis (SS) yaitu SS Diplomasi Bilateral yang Kuat dan SS Diplomasi Multilateral yang Kuat.

B1
Diplomasi Bilateral yang Kuat

B2
Diplomasi Multilateral yang Kuat

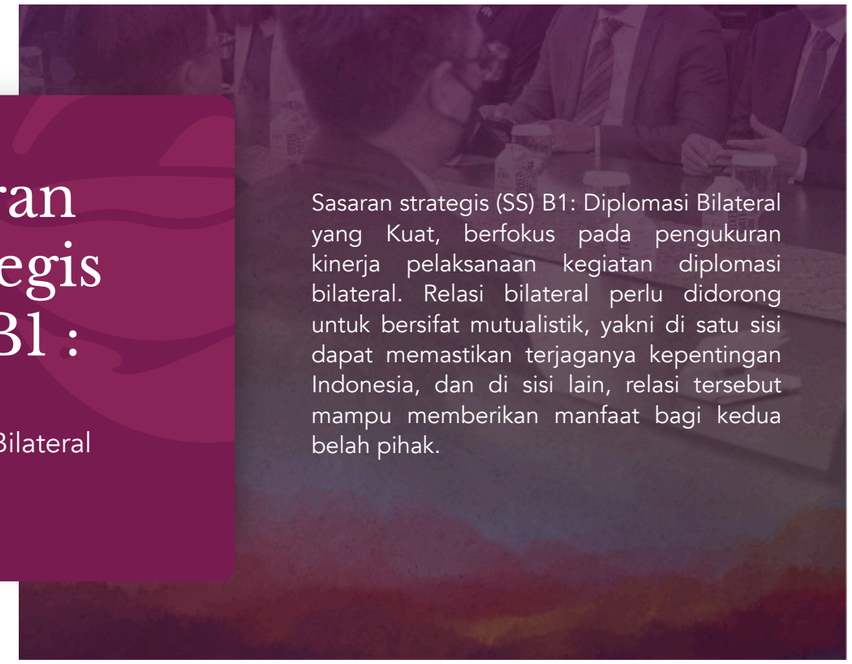

Sasaran Strategis (SS) B1 :

Diplomasi Bilateral yang Kuat

Sasaran strategis (SS) B1: Diplomasi Bilateral yang Kuat, berfokus pada pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan diplomasi bilateral. Relasi bilateral perlu didorong untuk bersifat mutualistik, yakni di satu sisi dapat memastikan terjaganya kepentingan Indonesia, dan di sisi lain, relasi tersebut mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Hubungan bilateral mencakup sejumlah bidang, yakni ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan, serta maritim. Kinerja terkait sasaran strategis ini adalah keberhasilan mencapai kesepakatan yang memberikan kepastian terhadap terjaganya kepentingan Indonesia dalam hubungan antarnegara.

Dalam hubungan antarnegara, Indonesia berupaya untuk mewujudkan kepentingannya di sektor ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, dan maritim melalui jalur diplomasi bilateral. Berbagai aspek yang terkait dengan kepentingan Indonesia dapat diajukan dan kemudian dibicarakan melalui tahap negosiasi dan perundingan.

Adanya Sasaran Strategis B1 pada proses bisnis utama Kemenlu diharapkan dapat lebih mengakomodir pencapaian kinerja Kemenlu dalam menjalankan diplomasi bilateral, serta menjadi bagian dari pengukuran kinerja internal Kemenlu yang lebih sinergis.

Keberhasilan Sasaran Strategis ini diukur berdasarkan capaian dua IKU untuk mengukur *output* kinerja diplomasi bilateral Kemenlu-*wide* sejak tahun 2022 guna lebih mengoptimalkan pengukuran kontribusi riil Kemenlu pada pelaksanaan diplomasi bilateral. IKU tersebut adalah: IKU B1.1 Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya dan IKU B1.2 Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim yang bersumber dari *joint statement*, *report of the meeting*, *summary of discussion*, *summary record, joint communique, agreed minutes, declaration, agreements, memorandum of understanding, agreed plan of action/work plan, treaty, charter, joint press statement, exchange of notes, implementing arrangements*, dan kesepakatan tertulis lainnya.

Analisis IKU B1.1

Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

Deskripsi IKU

IKU B1.1 merupakan IKU yang menghitung jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Tujuan IKU ini untuk mengetahui kapabilitas diplomasi di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam hubungan bilateral.

Ruang lingkup kesepakatan bidang ekonomi merupakan kesepakatan yang disepakati dalam negosiasi atau perundingan juga melalui diskusi, pertemuan, dan komunikasi yang bersifat landasan/payung hukum, dan tidak dapat dinilai dengan uang (*monetary value*). Kesepakatan ini meliputi bidang perdagangan, investasi, energi, perhubungan, pariwisata, pertanian, perikanan, perindustrian, keuangan, perpajakan dan kerja sama ekonomi teknik. Ruang lingkup kesepakatan bidang sosial meliputi namun tidak terbatas pada kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan. Ruang lingkup kesepakatan bidang budaya meliputi namun tidak terbatas pada seni, budaya, pelestarian aset-aset budaya, bahasa dan informasi.

Pentingnya kesepakatan bilateral di bidang ekonomi, sosial dan budaya bagi Indonesia dimaksudkan untuk terus memajukan potensi bidang tersebut dalam mendukung kemajuan ekonomi Indonesia dan meningkatkan citra positif Indonesia. Hal ini sesuai dengan komitmen Kemenlu seperti yang tercantum dalam Renstra 2020-2024 diantaranya mengoptimalkan diplomasi untuk menjaga kepentingan strategis ekonomi Indonesia dan meningkatkan pengetahuan masyarakat dunia terhadap potensi sosial dan budaya Indonesia

> Tujuan IKU ini untuk mengetahui kapabilitas diplomasi di bidang ekonomi, sosial dan budaya

Perhitungan IKU B1.1 Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya diukur dengan formula sebagai berikut:

Jumlah Kesepakatan di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

Informasi Kinerja

Tabel III.43
Capaian IKU B1.1 Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
Sumber: AKSI Kemenlu

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	**123**

Target	Realisasi	Capaian	Batas Toleransi
90	123	136,67%	120%

Pada Tahun 2023, realisasi IKU B1.1 "Jumlah Kesepakatan di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya" sebanyak 123 dari target sebanyak 90. Realisasi tersebut melampaui target yang ditetapkan dengan capaian hingga 136,67% dengan toleransi capaian 120%. Keberhasilan IKU ini menggambarkan pelaksanaan dan mendukung peningkatan diplomasi bilateral Kemenlu di sektor ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga berhasil mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Perolehan kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya tahun 2023 dicapai dari kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf) sebanyak 88 kesepakatan dan kawasan Amerika dan Eropa (Amerop) sebanyak 35 kesepakatan. Bidang kerja sama antara lain kesepakatan terkait perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, layanan publik, dan kerja sama teknis.

Berikut *highlights* capaian utama untuk IKU B1.1 "Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya"

Highlights Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 2023

(Sumber: Kemenlu Data Per Jan-Des 2023)

123 Total Kesepakatan

88 ASPASAF

35 AMEROP

Afrika

Letter of Intent between the Government of Indonesia & the Government of Kenya on Investment and Facilitation

Asia

MoU on Cooperation for Electric Vehicle Ecosystem antara RI-Korea

Pasifik & Oseania

MoU on Higher Education RI-Papua New Guinea

Eropa

Joint Declaration of Intent Pembentukan Joint Economic and Investment Committee antara RI-Jerman

Amerika

Mutual Recognition of Halal Certificate antara RI-Chile

Perbandingan Kinerja

Tabel III.44
Target, Realisasi, dan Capaian IKU Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sumber: AKSI Kemenlu

Kode IKU/ SUB IKU		2022	2023	
B1.1	Target	75	**90**	↑
	Realisasi	96	**123**	↑
	Capaian	128%	**136,7**	↑

IKU B1.1 merupakan IKU yang baru ditetapkan pada level Kemenlu-*wide* pada tahun 2022 untuk mengukur capaian diplomasi bilateral lebih optimal. Dengan demikian, capaian IKU di tahun 2023 hanya dapat dibandingkan dengan capaian IKU di tahun 2022.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, target IKU B1.1 mengalami peningkatan target menjadi 90 dari 75 kesepakatan pada tahun 2022. Peningkatan target ini mempertimbangkan realisasi yang melampaui target pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada tahun ini dirasa *feasible* untuk tercapai memandang solidnya koordinasi Kemenlu baik di pusat dan di perwakilan RI dengan *stakeholders* terkait pembahasan kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Sedangkan, untuk realisasi dan capaian IKU B1.1 juga mengalami peningkatan menjadi 123 dari 96 kesepakatan serta 136,67% dari 128% pada tahun 2022. Peningkatan realisasi dan capaian ini disebabkan beberapa faktor antara lain karena pada tahun 2023 telah terselenggara berbagai kunjungan tingkat Kepala Negara maupun Menteri Luar Negeri, yang mendorong peningkatan jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang disepakati dan dihasilkan dari pertemuan maupun pada *side event* kegiatan kunjungan.

> Target yang ditetapkan pada tahun ini dirasa *feasible* untuk tercapai memandang solidnya koordinasi Kemenlu baik di pusat dan di perwakilan RI

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Selama tahun 2023, Kemenlu telah berhasil menyepakati 123 kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Keberhasilan pencapaian target ini tidak lepas dari komitmen Kemenlu menjalankan diplomasi bilateral dengan baik. Secara keseluruhan, keberhasilan IKU didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

01

Tingginya Kunjungan Pejabat Tinggi

Tingginya kunjungan pejabat tinggi, khususnya di level kepala negara/kepala pemerintahan. Hal ini turut mendorong disetujuinya berbagai kesepakatan yang tertunda maupun kesepakatan baru di bidang ekonomi, sosial dan budaya Indonesia dengan negara mitra, seperti pada saat kunjungan Presiden Iran, Presiden Korea Selatan, PM Kanada ke Indonesia, serta kunjungan Presiden Indonesia, Joko Widodo, ke Kenya, RRT dan Amerika Serikat.

02

Penguatan Koordinasi dan Konsolidasi Internal

Penguatan koordinasi dan konsolidasi internal dengan *stakeholders* dalam negeri untuk menetapkan posisi Pemri dan memastikan substansi perjanjian internasional sesuai dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan.

03

Menjadikan Opsi Penandatanganan Kesepakatan secara Sirkular sebagai Alternatif

Menjadikan opsi penandatanganan kesepakatan secara sirkular (mengedarkan atau mengirimkan kesepakatan tersebut kepada pihak-pihak terkait) sebagai alternatif ketika pertemuan tatap muka tidak dapat dilakukan sehingga pengesahan kesepakatan tidak bergantung pada periode kunjungan ke/dari negara mitra.

Kendala dan Tantangan

Meskipun telah berhasil mencapai target di tahun 2023, masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain:

01

Fluktuasi Politik di Negara Mitra

Fluktuasi politik yang mengakibatkan gangguan stabilitas ekonomi dan keamanan di negara mitra, sehingga mengakibatkan tertundanya pelaksanaan forum bilateral dan negosiasi yang telah diagendakan.

02

Pergantian Kepemimpinan di Negara Mitra

Pergantian kepemimpinan di negara mitra yang menyebabkan adanya perubahan, baik pada penandatangan yang menyebabkan tertundanya negosiasi hingga perubahan prioritas dari negara mitra.

03

Draf Kesepakatan Bilateral yang Memerlukan Waktu Cukup Panjang

Terdapat sejumlah draf kesepakatan bilateral yang memerlukan waktu cukup panjang untuk dibahas/dinegosiasi, sehingga memerlukan pelaksanaan beberapa pertemuan lanjutan.

04

Rendahnya *Exposure* terhadap Budaya Indonesia

Masih rendahnya *exposure* terhadap budaya Indonesia di negara-negara mitra non-tradisional Indonesia di kawasan yang jauh seperti Amerika Selatan sehingga menurunkan minat untuk melakukan kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya dengan Indonesia.

Upaya Perbaikan

Beberapa upaya perbaikan yang telah diambil untuk memitigasi kendala dan tantangan, sebagai berikut:

01

Kurasi Bidang Kerja Sama Prioritas

Melakukan kurasi mengenai bidang-bidang kerja sama prioritas yang perlu dituangkan dalam kesepakatan dengan negara mitra. Dengan menjaring masukan *stakeholders*, Kemenlu Pusat dan Perwakilan RI bersinergi untuk mendeteksi secara selektif potensi bidang dan lokasi kerjasama yang prospektif sehingga dapat meminimalisir penundaan negosiasi.

02

Mengintensifkan Pelaksanaan Negosiasi dan Pertemuan Terkait

Mengintensifkan pelaksanaan negosiasi bilateral dan pertemuan terkait lainnya dengan negara mitra, termasuk dengan memanfaatkan momen kunjungan pejabat tinggi untuk mempercepat proses finalisasi kesepakatan.

03

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penyelenggaraan pertemuan secara virtual maupun *hybrid* memanfaatkan teknologi informasi untuk mengatasi jarak yang jauh serta memaksimalkan peran Perwakilan RI di kawasan Amerika Selatan untuk menjajaki potensi kerja sama dalam bidang ekososbud dengan negara mitra.

04

Memperluas Skema Kerja Sama

Memperluas skema kerja sama yang dimiliki dengan mengembangkan jejaring kerja dengan para akademisi, *think tanks*, maupun konsul kehormatan dari negara akreditasi untuk meningkatkan kerja sama bilateral di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Analisis Program Pendukung Capaian

Capaian pada IKU B1.1 juga didukung oleh terselenggaranya rangkaian pertemuan bilateral tingkat tinggi Indonesia dengan negara mitra, kunjungan Presiden RI ke negara mitra dan sebaliknya, pertemuan bilateral di sela-sela forum regional, dan/atau forum multilateral, Forum Konsultasi Bilateral (FKB), dan pertemuan teknis dengan negara mitra serta K/L teknis terkait lainnya *Highlights* program/ kegiatan tersebut, antara lain:

Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

01 **Rangkaian Kunjungan Presiden RI, Joko Widodo, ke Afrika**

Afrika, 20-24 Agustus 2023

Pada pertengahan semester kedua, Presiden RI telah melakukan kunjungan ke empat negara di kawasan Afrika, yaitu Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan. Kunjungan ini menghasilkan sejumlah kerja sama investasi, perdagangan, energi dan kesehatan dengan para *stakeholders* di kawasan, antara lain:

1. Letter of Intent (LoI) between the Government of Indonesia and the Government of Kenya on Investment Promotion and Facilitation.
2. Memorandum of Understanding (MoU) between Biofarma dan BioVax.
3. MoU between Pertamina Geothermal Energy dan Geothermal Development Company (GDC).
4. MoU antara PLN dan Tanesco tentang Kerja Sama di Bidang Kelistrikan.

02 **Kunjungan Presiden Bangladesh dan Menteri Luar Negeri Bangladesh ke Jakarta**

Jakarta, 4-5 September 2023

Pada kunjungan ini, Presiden Bangladesh dan Menteri Luar Negeri Bangladesh melakukan kunjungan sebagai sebagai *Guest of Chair* KTT ke-43 ASEAN. Dalam kunjungan ini juga dilakukan pertemuan bilateral dan ditandatangani 3 (tiga) MoU, antara lain:

1. MoU kerja sama Energi RI-Bangladesh.
2. MoU Kerja Sama Kesehatan RI-Bangladesh.
3. MoU Kerja Sama Pertanian RI -Bangladesh.

03 Kunjungan kerja Presiden Korea ke Indonesia dan Pertemuan Bilateral dengan Presiden RI

Jakarta, 8 September 2023

Pertemuan menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang ekonomi dan sosial-budaya antara lain:

1. Technical Partnership Arrangement on Cooperation in the field of Agriculture Mechanization and Infrastructure between Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Agriculture, Food and Rural of the Republic of Korea on Cooperation in the field of Halal Food.
2. MoU between the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia and the Ministry of Trade, Industry, and Energy of the Republic of Korea on Industrial Cooperation.

Kesepakatan ini bertujuan untuk mempercepat realisasi kerjasama sertifikasi halal dan investasi di sektor industri.

Kawasan Amerika dan Eropa

01 Pertemuan Bilateral Presiden RI – PM Kanada di Sela-sela KTT ASEAN ke-43

Jakarta, 5 September 2023

Pada pertemuan telah disepakati bahwa perundingan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) akan diselesaikan pada tahun 2024.

Penyelesaian Indonesia - Canada CEPA dapat meningkatkan kemudahan akses ke pasar barang dan jasa, diversifikasi pasar tujuan ekspor, serta memastikan pertumbuhan jangka panjang.

02 Kegiatan Hannover Messe

Hannover, 11 April 2023

Kegiatan menghasilkan *Joint Declaration of Intent* Pembentukan *Joint Economic and Investment Committee* (JEIC) RI-Jerman. Perjanjian ditandatangani oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian RI dengan Menteri Aksi Iklim dan Ekonomi / Wakil Kanselir Jerman Joint Commision on Trade, Economic and Technical Cooperation. JEIC mencakup sektor yang cukup luas, yakni:

i. Perdagangan.
ii. Industri.
iii. Investasi.
iv. Lingkungan hidup dan sumber daya alam.
v. Energi.
vi. Maritim.
vii. Pariwisata.
viii. Kesehatan.
ix. Pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja.
x. Penelitian dan inovasi.
xi. Ekosistem bisnis rintisan/*start up*.
xii. Pengembangan UMKM.

02 Kunjungan Presiden RI, Joko Widodo, ke Amerika Serikat

Amerika Serikat,
17 November 2023

Pada rangkaian kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat, Presiden RI menghadiri penandatangan Heads of Agreements: PTVI Divestment Commitment (HoA) yang ditandatangani oleh Direktur Utama BUMN Holding Industri Pertambangan, PT Mineral Industri Indonesia, CEO Vale Canada Limited, Senior Managing Executive Officer Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., serta CEO PT Vale Indonesia Tbk. ("PTVI") serta disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Wakil Menteri BUMN yang diselenggarakan di San Fransisco pada 17 November 2023 waktu setempat. HoA (Perjanjian Induk) ini merupakan langkah awal dalam pemenuhan komitmen divestasi PTVI dalam rangka pemenuhan persyaratan konversi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), mengingat akan berakhirnya masa berlaku Kontrak Karya PTVI pada akhir tahun 2025.

Proyeksi Ke Depan

Beberapa proyeksi ke depan untuk mempertahankan capaian IKU B1.1 di tahun mendatang, antara lain:

01. Melakukan Pembahasan Lanjutan dan Finalisasi Kesepakatan dan Perjanjian Ekonomi Khusus

Melakukan pembahasan lanjutan dan finalisasi, sejumlah kesepakatan dan perjanjian ekonomi khusus dengan negara mitra sebagai berikut:

1. Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement - (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dengan negara mitra, diantaranya:
    - PTA Indonesia – Kenya.
    - PTA Indonesia – Bangladesh.
    - PTA Indonesia – Mesir.
    - PTA Indonesia – Sri Lanka.
    - FTA Indonesia – Rwanda.
    - CEPA Indonesia – Kanada.
    - CEPA Indonesia – Chile untuk *Investment.*
    - CEPA Indonesia – Peru untuk *Trade in Goods.*
    - CEPA Indonesia – MERCOSUR.
    - FTA Indonesia – EAEU.
    - Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF).

2. Memorandum of Understanding (MoU)
    - MoU Kerja sama Energi Indonesia-Filipina.
    - MoU Kerja Sama Kesehatan Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Kamboja.
    - MoU PBVDD Indonesia-Aljazair.
    - Air Service Agreement Indonesia-Luxemburg.
    - MoU Kerja Sama Pendidikan Indonesia-Inggris.
    - MoU Kerja Sama Teknologi Lingkungan Indonesia-Austria.
    - MoU Kerja Sama Drug Demand Reduction Indonesia-Portugal.

02. Melakukan Pembahasan Lanjutan dan Finalisasi Kesepakatan dan Perjanjian Ekonomi Khusus

Melaksanakan berbagai kegiatan penguatan kerja sama di bidang ekonomi, sosial dan budaya diantaranya Indonesia – Africa Forum ke-2 dan Indonesia – South and Central Asia (INASCA) Business Forum 2024 untuk mendorong peningkatan transaksi dagang dan investasi bersama negara-negara di Kawasan Afrika dan Asia Selatan dan Tengah; Pelaksanaan Forum Konsultasi Bilateral (FKB) ke-VII RI-Kanada di Jakarta, Indonesia-Kanada Economic Roadshow 2023 dan pelaksanaan Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-VII antara Indonesia dan Suriname

03. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi secara Berkala terhadap Kesepakatan

Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kesepakatan yang telah ditandatangani sebelum tahun 2023, termasuk masa berlaku, pelaksanaan maupun dampak implementasi kesepakatan tersebut. Hasil pemantauan dan evaluasi dalam digunakan untuk mengoptimalkan kerjasama ekososbud antara Indonesia dengan negara-negara mitra.

Dokumentasi Program Pendukung Capaian IKU B1.1 : Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

Gambar III.94
Rangkaian Kunjungan Presiden RI, Joko Widodo, ke Afrika, menghasilkan kesepakatan, antara lain: Letter of Intent (LoI) between the Government of Indonesia and the Government of Kenya on Investment Promotion and Facilitation dan MoU antara PLN dan Tanesco tentang Kerja Sama di Bidang Kelistrikan (Afrika, 20-24 Agustus 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.95
Kunjungan Presiden Bangladesh dan Menteri Luar Negeri Bangladesh ke Jakarta, menghasilkan MoU kerja sama Energi RI-Bangladesh; MoU Kerja Sama Kesehatan RI – Bangladesh dan MoU Kerja Sama Pertanian RI – Bangladesh (Jakarta, 4-5 September 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.96
Kunjungan Presiden Korea Selatan ke Jakarta, menghasilkan sejumlah kesepakatan: Technical Partnership Arrangement on Cooperation in the field of Agriculture Mechanization and Infrastructure dan MoU on Industrial Cooperation (Jakarta, 8 September 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.97
Kegiatan Hannover Messe, menghasilkan Joint Declaration of Intent Pembentukan Joint Economic and Investment Committee (JEIC) RI-Jerman (Hannover, 11 April 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.98
Pertemuan Bilateral Presiden Jokowi dan PM Kanada menghasilkan Statement on Advancing Negotiations toward a Canada-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (Jakarta, 5 September 2023)

Sumber: kompas.id

Gambar III.99
Kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat, menghasilkan *Head of Agreement* (Perjanjian Induk) Divestasi PT Vale Indonesia Tbk (San Francisco, 17 November 2023)

Sumber: Kemenlu

Analisis IKU B1.2

Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim

Deskripsi IKU

IKU B1.2 merupakan IKU yang menghitung jumlah kesepakatan di bidang politik, keamanan dan maritim. Tujuan IKU ini untuk mengetahui kapabilitas diplomasi di bidang politik, keamanan dan maritim yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam hubungan bilateral.

Diplomasi politik dan keamanan adalah negosiasi atau perundingan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih mengenai hubungan politik antara dua negara atau lebih, juga mengenai keamanan pada masing-masing negara.

Diplomasi maritim adalah pelaksanaan politik luar negeri (polugri) yang berhubungan dengan penyelenggaraan hubungan antar negara di bidang kelautan dalam rangka mewujudkan keselamatan pelayaran, keamanan maritim, perlindungan lingkungan laut dan pengelolaan sumber daya kelautan serta pembangunan infrastruktur kemaritiman.

Pentingnya kesepakatan bilateral di bidang politik, keamanan dan maritim bagi Indonesia selaras dengan strategi Kemenlu dalam memperkuat integritas NKRI dan diplomasi politik, keamanan dan maritim seperti yang tercantum dalam Renstra 2020-2024 diantaranya mendukung kerja sama pertahanan di lingkup bilateral pada aspek hukum dalam rangka penguatan integritas NKRI dan peningkatan kemampuan industri pertahanan Indonesia; dan meningkatkan upaya-upaya diplomasi dalam mewujudkan kerangka kerja sama maritim yang mendukung perwujudan konektivitas maritim dan mengedepankan jati diri Indonesia sebagai negara maritim melalui mekanisme regional dan/atau mekanisme lainnya.

Perhitungan IKU B1.2 Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim diukur dengan formula sebagai berikut:

Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim

Informasi Kinerja

Tabel III.45
Capaian IKU B1.2 Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim

Sumber: AKSI Kemenlu

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim	Jumlah Kesepakatan di Politik, Keamanan dan Maritim	**86**

Target	Realisasi	Capaian
75	86	114,67%

Pada Tahun 2023, realisasi IKU B1.2 "Jumlah Kesepakatan di bidang Politik, Keamanan dan Maritim" sebanyak 86 dari target sebanyak 75 kesepakatan. Realisasi tersebut melampaui target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 114,67%.

Jumlah kesepakatan bilateral di bidang politik, keamanan dan maritim pada tahun 2023 terdiri dari 54 kesepakatan di kawasan Aspasaf, dan 32 kesepakatan di kawasan Amerop. Kesepakatan bilateral tersebut mencakup penanggulangan terorisme serta penguatan mekanisme bilateral.

Berikut *highlights* capaian utama untuk IKU Jumlah Kesepakatan di bidang Politik, Keamanan dan Maritim.

> "Kesepakatan bilateral tersebut mencakup penanggulangan terorisme serta penguatan mekanisme bilateral

Highlights Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim Tahun 2023

(Sumber: Kemenlu Data Per Jan-Des 2023)

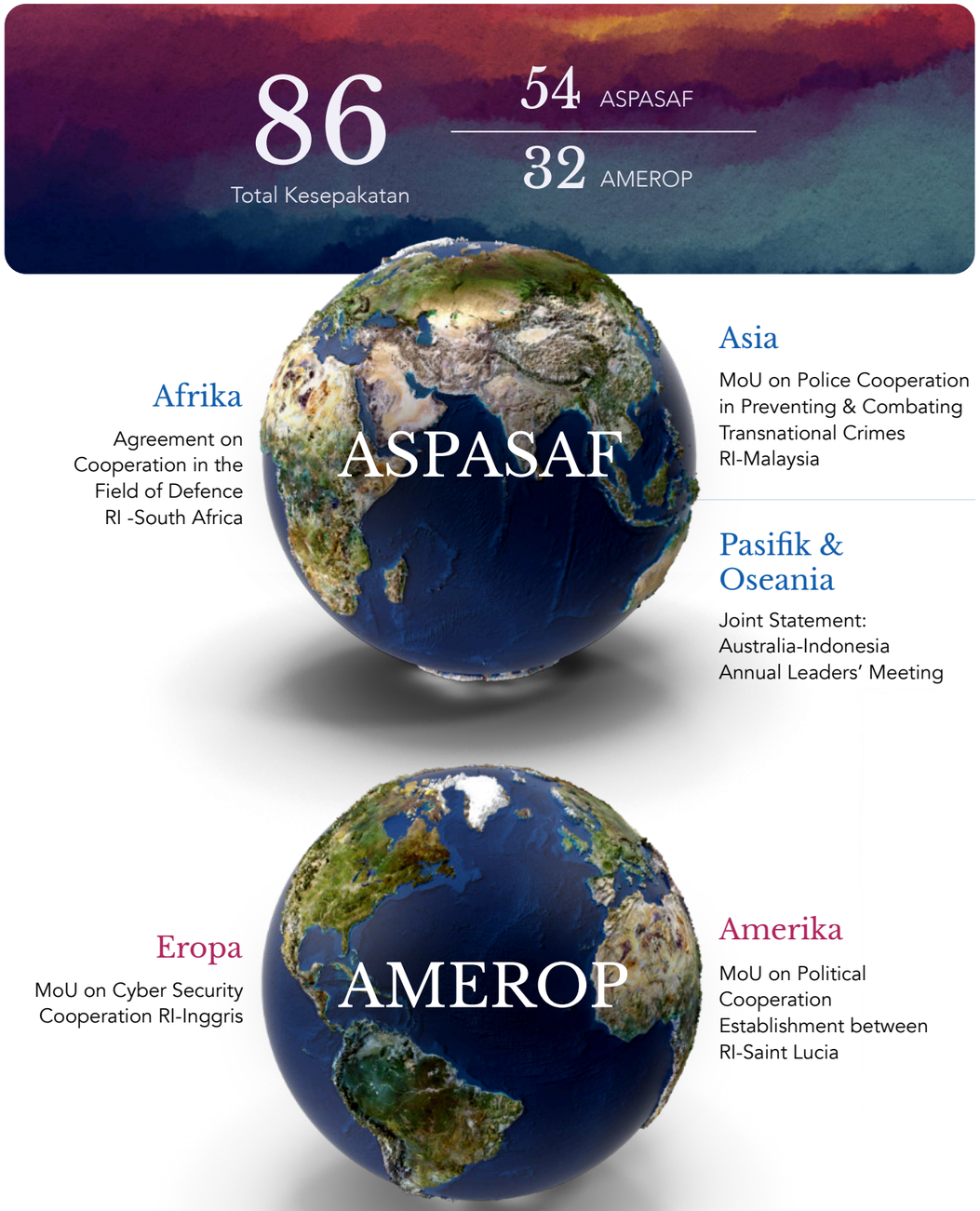

Afrika

Agreement on Cooperation in the Field of Defence RI -South Africa

Asia

MoU on Police Cooperation in Preventing & Combating Transnational Crimes RI-Malaysia

Pasifik & Oseania

Joint Statement: Australia-Indonesia Annual Leaders' Meeting

Eropa

MoU on Cyber Security Cooperation RI-Inggris

Amerika

MoU on Political Cooperation Establishment between RI-Saint Lucia

Perbandingan Kinerja

Tabel III.46
Target, Realisasi, dan Capaian IKU Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim

Sumber: AKSI Kemenlu

Kode IKU/SUB IKU		2022	2023	
B1.2	Target	62	**75**	↑
	Realisasi	73	**86**	↑
	Capaian	117,74%	**114,67%**	↓

IKU B1.2 merupakan IKU yang ditetapkan pada level Kemenlu-*wide* pada tahun 2022. Terdapat kenaikan realisasi dari Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, target IKU B1.2 mengalami peningkatan target menjadi 75 dari 62 kesepakatan pada tahun 2022. Peningkatan target ini mempertimbangkan realisasi yang berhasil melampaui target pada tahun 2022. Realisasi pada tahun 2023 untuk IKU B1.2 juga mengalami peningkatan menjadi 86 dari 73 kesepakatan.

Sedangkan untuk capaian IKU B1.2 terdapat penurunan dari tahun 2022 sebesar 3,07% dari 117,74% menjadi 114,67%. Penurunan capaian tersebut disebabkan adanya kenaikan target sebanyak 13 kesepakatan atau 20,97% pada tahun 2023.

> "Peningkatan target ini mempertimbangkan realisasi yang berhasil melampaui target pada tahun 2022

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Capaian atas IKU ini merupakan keberhasilan Kemenlu dalam melaksanakan diplomasi politik, keamanan dan maritim sesuai visi dan misi yang diembannya. Walaupun di tengah situasi geopolitik yang bergejolak di beberapa kawasan, Indonesia tetap dapat menyepakati berbagai kesepakatan bilateral di bidang politik, keamanan dan maritim. Secara khusus, faktor penyebab keberhasilan kinerja IKU B1.2, sebagai berikut:

01

Adanya Urgensi Penyelesaian Sejumlah Isu yang Menjadi Kepentingan Strategis Indonesia

Adanya urgensi penyelesaian sejumlah isu yang menjadi kepentingan strategis Indonesia dengan negara-negara mitra. Langkah-langkah konkret perlu diambil guna mencapai solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak, sehingga Indonesia dapat tampil sebagai pemimpin regional yang stabil dan berpengaruh. Selain itu, penanganan proaktif terhadap isu-isu strategis ini juga akan mencerminkan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan keamanan di tingkat internasional, memberikan dampak positif bagi stabilitas global secara keseluruhan.

02

Keberlanjutan atas proyeksi tindak lanjut pembahasan kesepakatan yang masih ditangguhkan

Keberlanjutan atas proyeksi tindak lanjut pembahasan kesepakatan yang masih ditangguhkan dan ditunda sehingga menghasilkan berbagai kesepakatan. Dengan memastikan bahwa setiap kesepakatan yang dicapai dijalankan secara efektif, Indonesia dapat membangun dasar kerja sama yang berkelanjutan. Kesinambungan ini juga mencerminkan kematangan diplomasi Indonesia dalam memastikan bahwa kerjasama dengan negara-negara mitra juga terwujud dalam keberlanjutan kerjasama lintas sektor yang nyata.

03

Dinamika Politik di Negara Mitra

Dinamika politik di negara mitra seperti pergantian kepemimpinan dan stabilitas kawasan, dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk mencapai kesepakatan baru di bidang politik, kemananan dan maritim, termasuk misalnya melalui pertemuan tingkat tinggi.

Kendala dan Tantangan

Dalam pencapaian IKU B1.2, meskipun telah berhasil mencapai target di tahun 2023, terdapat beberapa kendala dan tantangan, sebagai berikut:

01

Sejumlah Konsep Kesepakatan Memerlukan Waktu Cukup Panjang

Terdapat sejumlah konsep kesepakatan bilateral, khususnya di bidang perbatasan dan maritim yang memerlukan waktu cukup panjang dan sensitif untuk dibahas/dinegosiasi, sehingga memerlukan pelaksanaan beberapa pertemuan lanjutan.

02

Perbedaan Perspektif dan Kepentingan

Adanya perbedaan perspektif dan kepentingan dari negara mitra yang menyebabkan belum dapat disepakatinya dokumen hasil pertemuan.

03

Konflik antara Hukum dan Regulasi

Ketidaksesuaian atau konflik antara hukum dan regulasi antar negara dapat memperlambat atau menghentikan proses finalisasi kesepakatan bilateral.

04

Perubahan Kondisi Politik dan Keamanan

Perubahan kondisi politik dan keamanan seperti gangguan stabilitas keamanan di Timur Tengah, mengakibatkan tertundanya pelaksanaan forum bilateral dan negosiasi yang telah diagendakan.

Upaya Perbaikan

Sebagai upaya untuk memitigasi kendala dan tantangan yang muncul dalam pencapaian IKU B1.2, beberapa upaya perbaikan yang telah diambil diantaranya sebagai berikut:

01

Mendorong Komitmen di Level Teknis hingga Level Tertinggi

Mendorong komitmen baik di level teknis hingga level tertinggi di kedua negara untuk penyelesaian kesepakatan politik, keamanan dan maritim serta penjadwalan ulang pelaksanaan pertemuan/ perundingan bilateral secara luring untuk kesepakatan yang memiliki sensitivitas dan kerahasiaan isu.

02

Penyesuaian Strategi, Perencanaan dan Jadwal

Melakukan penyesuaian strategi, perencanaan dan penyesuaian jadwal dengan lebih matang, termasuk dengan meminta masukan posisi Indonesia lebih awal kepada satuan kerja atau institusi terkait, koordinasi yang intensif melalui Perwakilan RI dan Kedubes negara mitra terkait.

03

Melakukan Pemetaan Kesepakatan

Melakukan pemetaan kesepakatan terhadap sejumlah proses perundingan Indonesia dengan negara mitra serta butir-butir rencana kerja sama bilateral berdasarkan kepentingan yang tertuang dalam Rencana Aksi Kemitraan yang telah dimiliki dengan mitra di Kawasan.

04

Meningkatkan Koordinasi antara Pemerintah dan Stakeholders

Meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan *stakeholders* negara mitra untuk memastikan pemahaman dan implementasi yang tepat terkait dengan hukum dan regulasi yang terkait dengan kesepakatan bilateral.

05

Memanfaatkan Momentum Kunjungan Pejabat Tinggi

Memanfaatkan momentum kunjungan pejabat tinggi level Kepala Negara dan Menteri untuk memastikan komitmen dan prioritas atas rencana yang telah disepakati dengan negara mitra dapat tetap terlaksana baik melalui pertemuan/ perundingan secara luring ataupun daring.

Analisis Program Pendukung Capaian

Capaian IKU B1.2 juga didukung oleh terselenggaranya rangkaian pertemuan bilateral tingkat tinggi Indonesia dengan negara mitra, kunjungan Presiden RI ke negara mitra dan sebaliknya, pertemuan bilateral di sela-sela forum regional, dan/atau forum multilateral, dan pertemuan teknis dengan negara mitra dan K/L teknis terkait. *Highlights* program/kegiatan tersebut, antara lain:

Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

01 **Pertemuan Bilateral RI-RRT di Sela-sela Kunjungan Kenegaraan Presiden RI ke Beijing**

Beijing, 17-18 Oktober 2023

Pada kunjungan tersebut terdapat penandatangan sejumlah kerja sama di bidang politik, keamanan, dan maritim yaitu: MoU tentang Dialog Bersama Tingkat Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan serta MoU tentang Kerja Sama dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

02 **Penyelenggaraan Sidang Komisi Bersama (SKB) RI-UEA**

Abu Dhabi, 9 November 2023

Kesepakatan yang tercapai pada SKB adalah *Agreed Minutes* SKB Pertama RI-UEA yang diantaranya membahas mengenai isu Palestina serta harapan agar bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Gaza dan menyepakati beberapa usulan kerja sama yang meliputi bidang, kesehatan, tenaga kerja, dan lainnya.

03 **Special Senior Officials' Consultation Perbatasan Darat RI-RDTL**

Dili, 29-30 November 2023

Pada pertemuan ini, telah dihasilkan kesepakatan yaitu Record of Discussion Special Meeting of the Senior Officials' Consultation mengenai Penetapan Perbatasan Darat RI-Timor-Leste. Selanjutnya, kesepakatan akan dituangkan dalam perjanjian batas darat kedua negara oleh kedua tim perunding. Pertemuan SOC ditutup dengan malam persahabatan yg juga dihadiri oleh Perdana Menteri Xanana Gusmao.

Kawasan Amerika dan Eropa

01 Dialog Politik RI-Swiss

Balikpapan,
7-8 Februari 2023

Pada pertemuan dimaksud, Indonesia dan Swiss mencatat sejumlah capaian penting hubungan bilateral dalam beberapa tahun terakhir, antara lain kemajuan kerja sama Indonesia-Swiss di bidang lain antara lagi mitigasi dan penanganan bencana alam, pendidikan vokasi, HAM, dan pembangunan berkelanjutan. Pertemuan bilateral tersebut dilanjutkan dengan kunjungan ke Ibu Kota Negara di Nusantara (IKN) dalam rangka menindaklanjuti *engagement* Kepala Otorita IKN dengan mitra internasional di sela World Economic Forum di Davos, Swiss, pada Januari 2023.

02 Forum Konsultasi Bilateral ke-VIII antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Brasil

Balikpapan, 4 Mei 2023

Kegiatan menghasilkan *Agreed Minutes* yang memuat kesepakatan kedua belah pihak untuk menguatkan tujuan strategis, meningkatkan kerja sama dan pertukaran promosi inovasi berbasis ekonomi serta pengalaman dan pengetahuan terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara; meninjau kembali perkembangan Rencana Aksi 2023-2026; pentingnya peran hubungan ASEAN – Brasil dan rencana adopsi ASEAN – Brazil Practical Cooperation Areas 2023 – 2027; menguatkan kerja sama antara ASEAN dan MERCOSUR; serta merencanakan pelaksanaan Forum Konsultasi Bilateral ke-IX yang akan disepakati lebih lanjut.

03 Pertemuan Bilateral RI-AS

Washington, D.C.,
13 November 2023

Pada pertemuan dilakukan peningkatan kemitraan Indonesia-AS menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif. Peningkatan status hubungan Indonesia-AS dari Kemitraan Strategis menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif disepakati dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, pada 13 November 2023. Naiknya status hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat dari *strategic partnership* menjadi *comprehensive strategic partnership* merupakan pondasi untuk memperkuat kerja sama kedua negara, terutama di bidang ekonomi.

Proyeksi Ke Depan

Beberapa proyeksi ke depan untuk mempertahankan capaian IKU B1.2 di tahun mendatang, antara lain:

01. Mengidentifikasi Tindak Lanjut Kesepakatan

Mengidentifikasi tindak lanjut kesepakatan melalui penyusunan rencana aksi (*action plan*) atas kesepakatan yang telah dihasilkan. Rencana aksi atas kesepakatan merupakan kesepakatan baru yang dapat memperkuat kerja sama bilateral Indonesia dengan negara mitra.

02. Meningkatkan frekuensi Dialog Koordinasi

Meningkatkan frekuensi Dialog Koordinasi agar dapat saling mengeksplorasi posisi dan *red lines* masing-masing sehingga kedua pihak dapat menyusun materi perundingan yang dapat diterima.

03. Memperkuat Diseminasi Informasi kepada Pemangku Kepentingan

Memperkuat diseminasi informasi kepada pemangku kepentingan mengenai posisi dan prioritas Indonesia khususnya pada isu politik, keamanan dan maritim dengan negara mitra di kawasan.

04. Memanfaatkan Konsultasi Politik untuk Meningkatkan Komitmen Penyelesaian Perjanjian

Memanfaatkan konsultasi politik untuk meningkatkan komitmen penyelesaian perjanjian antara Indonesia dengan negara mitra. Beberapa rencana penyelenggaraan konsultasi bilateral di tahun 2024, antara lain Pertemuan Komisi Bersama Kerja Sama Bilateral (KBKSB) ke-2 RI-Uzbekistan, Foreign Office Consultation (FOC) ke-8 RI-India, Komite Konsultasi Bilateral (KKB) ke-11 RI-Iran, Forum Konsultasi Politik (FKP) ke-I dan Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-IV antara RI dan Venezuela, SKB RI-Kenya, Forum Konsultasi Bilateral (FKB) RI-Guatemala, FKB ke-II RI-Kosta Rika, FKB ke-VII RI-Kanada, FKB ke-VI RI-Chile, FKB) ke-V dan SKB ke-IV RI-Ekuador, FKP ke-I dan SKB ke-IV RI-Venezuela, FKB RI-Meksiko, FKB RI-Irlandia, FKB RI-Inggris, FKB RI-Yunani, FKB RI-Austria.

05. Memanfaatkan Momentum Perayaan Hubungan Diplomatik dengan Negara Mitra

Memanfaatkan momentum perayaan hubungan diplomatik dengan negara mitra, seperti 75 tahun RI-India dan 50 Tahun RI-Maladewa sebagai pemantik untuk melanjutkan pembahasan kesepakatan yang masih tertunda atau menginisiasi kesepakatan baru.

06. Memanfaatkan Momentum Perayaan Hubungan Diplomatik dengan Negara Mitra

Melaksanakan berbagai forum dan dialog diantaranya Bilateral Maritime Forum RI–Belanda, pelaksanaan Indonesia-Latin America and the Caribbean Policy Dialogue dan peresmian KBRI Yaounde untuk lebih meningkatkan hubungan bilateral dan potensi kerja sama antar RI – Kamerun

Dokumentasi Program Pendukung Capaian IKU B1.2 : Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim

Gambar III.100
Pertemuan bilateral RI-RRT, menghasilkan MoU tentang Dialog Bersama Tingkat Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan serta MoU tentang Kerja Sama dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Beijing, 17-18 Oktober 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.101
Penyelenggaraan Sidang Komisi Bersama (SKB) RI-UEA, menghasilkan *Agreed Minutes* SKB Pertama RI-UEA (Abu Dhabi, 9 November 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.102
Special Senior Officials' Consultation Perbatasan Darat RI-RDTL, menghasilkan Record of Discussion Special Meeting of the Senior Officials' Consultation mengenai Penetapan Perbatasan Darat RI-Timor-Leste (Jakarta, 8 September 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.103
Dialog Politik RI-Swiss, membahas kemajuan kerja sama Indonesia-Swiss di berbagai bidang, diantaranya mitigasi dan penanganan bencana alam, pendidikan vokasi, HAM, dan pembangunan berkelanjutan menghasilkan *record of the meeting* .
(Balikpapan, 7-8 Februari 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.104
Pertemuan Bilateral RI-AS, menyepakati Peningkatan kemitraan Indonesia-AS menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif (CSP)
(Washington, D.C., 13 November 2023)

Sumber: Kemenlu

Sasaran Strategis (SS) B2 :

Diplomasi Multilateral yang Kuat

Sasaran Strategis ini dirancang untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan diplomasi multilateral. Dalam konteks ini, penting untuk mendorong relasi multilateral yang bersifat saling menguntungkan, dimana kepentingan Indonesia terjamin dan sekaligus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Aspek-aspek yang menjadi fokus dalam hubungan multilateral mencakup ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan, serta sektor maritim.

Kepentingan Indonesia di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan maritim dapat diperjuangkan melalui diplomasi multilateral yang dapat dicapai diantaranya melalui pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB dan terpilihnya Indonesia menjadi Pemimpin/Anggota Dewan pada berbagai Forum Internasional. Sejumlah hal menyangkut kepentingan Indonesia dapat diusulkan, dan selanjutnya dibahas melalui forum kerja sama di tingkat multilateral. Kinerja terkait sasaran strategis ini adalah keberhasilan mencapai kesepakatan yang memberikan *assurance* terhadap terjaganya kepentingan Indonesia dalam hubungan multilateral.

Sebagaimana tercantum di Renstra 2020-2024, dalam pembahasan dan penyelesaian isu-isu multilateral, terdapat ekspektasi masyarakat internasional terhadap peningkatan peran Indonesia di forum multilateral. Kinerja diplomasi multilateral Indonesia sepanjang tahun 2023 menunjukkan performa optimal antara lain:

- Berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas dunia, yang dilaksanakan antara lain melalui *track* regional dan multilateral.
- Melalui keketuaan Indonesia di tahun 2023, ASEAN telah berhasil menjadi organisasi kawasan yang inklusif dan kolaboratif ditengah dinamika rivalitas geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.
- Mendorong adopsi berbagai Resolusi PBB dan pengiriman personel *peacekeepers* untuk memperkuat arsitektur perdamaian dunia dengan menjadi kontributor pengirim *peacekeepers* terbesar nomor 6 di dunia dengan jumlah personel sebanyak 2.835 orang dengan 131 orang merupakan personel perempuan.
- Menyuarakan penguatan sistem multilateral guna menjamin sistem tatanan dunia yang inklusif dan representatif terhadap semua kepentingan negara, khususnya negara *global-south*.

Sasaran Strategis B2 merupakan Sasaran Strategis yang ditetapkan Kemenlu pada level Kemenlu-*Wide* tahun 2022, bersama dengan Perspektif *Internal Business Process* (IBP) ke dalam Peta Strategi level Kemenlu. Adanya Perspektif IBP dan Sasaran Strategis B2 pada proses bisnis utama Kemenlu tersebut diharapkan lebih mengakomodir pencapaian kinerja Kemenlu dalam menjalankan diplomasi multilateral, serta menjadi bagian dari pengukuran kinerja internal Kemenlu yang lebih sinergis.

Pencapaian Sasaran Strategis B2 diukur melalui 2 (dua) IKU yaitu IKU "B2.1 Persentase Prakarsa/ Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya" dan IKU "B2.2 Persentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di bidang Politik, Keamanan dan Maritim" yang bersumber dari yang bersumber dari Laporan Delegasi RI (Delri), *Presidential/Chairman Statement*, *statement* Delri, *joint statement, report of the meeting, summary of discussion, summary record, joint communique, agreed minutes, declaration, agreements, Memorandum of Understanding (MoU), plan of action, work plan, treaty, charter, media release, joint press statement, Terms of References, rules of procedures, blueprint, policy recommendation, non paper/note* dan *concept paper/note, framework, element of working document, pledge dan concord*.

Pada Tahun 2023, capaian IKU B2.1 "Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral di bidang ekonomi, sosial, dan budaya" ditargetkan sebesar 98,25%, realisasi sebesar 100% sehingga nilai capaian IKU B2.1 sebesar 101,78%, Sedangkan capaian IKU B2.2 "Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral di bidang politik, keamanan, dan maritim" ditargetkan 98,25%, realisasi sebesar 100% sehingga nilai capaian IKU B2.2 sebesar 101,78%.

> Kinerja terkait sasaran strategis ini adalah keberhasilan mencapai kesepakatan yang memberikan *assurance* terhadap terjaganya kepentingan Indonesia dalam hubungan multilateral

Kode SS	Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2023		
				Target	Realisasi	Capaian
B2	Diplomasi Multilateral yang Kuat	IKU B2.1	Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral di bidang ekonomi, sosial, dan budaya	98,25%	100%	101,78%
		IKU B2.2	Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral di bidang politik, keamanan, dan maritim	98,25%	100%	101,78%

Analisis IKU B2.1

Persentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Deskripsi IKU

IKU B2.1 digunakan untuk mengetahui kapabilitas diplomasi di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam hubungan kerja sama Multilateral.

Ruang lingkup prakarsa/rekomendasi bidang ekonomi meliputi bidang perdagangan, investasi, energi, perhubungan, pariwisata, pertanian, perikanan, perindustrian, keuangan, perpajakan, kerja sama ekonomi teknik. Ruang lingkup prakarsa/rekomendasi bidang sosial diantaranya kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan. Ruang lingkup prakarsa/rekomendasi bidang budaya meliputi seni dan budaya, serta pelestarian aset-aset budaya.

> IKU B2.1 digunakan untuk mengetahui kapabilitas diplomasi di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang telah dilakukan oleh Indonesia

Perhitungan realisasi IKU B1.2 Presentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU} = \frac{\text{Jumlah prakarsa / rekomendasi Indonesia dan prakarsa yang diterima di bidang ekonomi, sosial dan budaya}}{\text{Jumlah prakarsa / rekomendasi Indonesia yang diusulkan di bidang ekonomi, sosial dan budaya}} \times 100\%$$

Informasi Kinerja

Tabel III.47
Capaian IKU B2.1: Persentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase Prakarsa/ Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	**239**
	Jumlah Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diusulkan pada Forum Multilateral di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	**239**

Target	Realisasi	Capaian
98,25%	100%	101,78%

Pada tahun 2023, realisasi IKU B2.1 "Persentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya" adalah sebesar 100% dari target sebesar 98,25%, sehingga diperoleh capaian sebesar 101,78%.

Lebih rinci, realisasi Persentase Prakarsa/ Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dari masing-masing lingkup forum adalah sebagai berikut:

- Kawasan Asia Pasifik dan Afrika dari 13 prakarsa/rekomendasi yang diusulkan oleh Indonesia, terdapat 13 prakarsa/ rekomendasi yang diterima sehingga menghasilkan realisasi 100%
- Kawasan Amerika dan Eropa dari 5 prakarsa/ rekomendasi yang diusulkan oleh Indonesia, terdapat 5 prakarsa/ rekomendasi yang diterima sehingga menghasilkan realisasi 100%.
- Lingkup ASEAN, dari 67 prakarsa/ rekomendasi yang diusulkan oleh Indonesia, terdapat 67 prakarsa/ rekomendasi yang diterima sehingga menghasilkan realisasi 100%.
- Lingkup Multilateral, dari 154 prakarsa/ rekomendasi yang diusulkan oleh Indonesia, terdapat 154 prakarsa rekomendasi yang diterima sehingga menghasilkan realisasi 100%.

Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kawasan Amerop

5/5

5 prakarsa/rekomendasi yang diterima dari 5 prakarsa/ rekomendasi yang diusulkan, mayoritas disampaikan dalam forum EFTA dan Mercosur

Kawasan Aspasaf

13/13

13 prakarsa/rekomendasi yang diterima dari 13 prakarsa/ rekomendasi yang diusulkan, mayoritas disampaikan dalam forum APEC

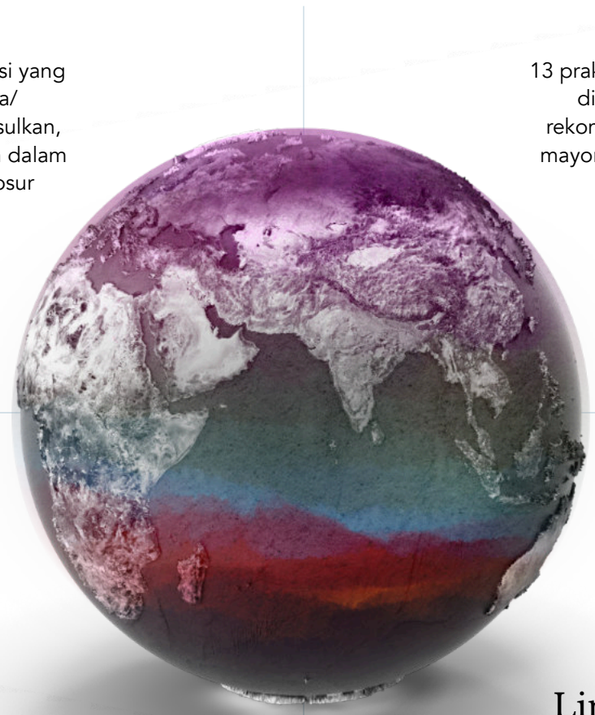

Lingkup Multilateral

67/67

67 prakarsa/rekomendasi yang diterima dari 67 prakarsa/rekomendasi yang diusulkan, mayoritas disampaikan di pertemuan ASEAN SOM dan WG dalam sektor eksosbud

Lingkup ASEAN

67/67

67 prakarsa/rekomendasi yang diterima dari 67 prakarsa/rekomendasi yang diusulkan, mayoritas disampaikan di pertemuan ASEAN SOM dan WG dalam sektor eksosbud

Perbandingan Kinerja

Tabel III.48
Target, Realisasi, dan Capaian IKU Persentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sumber: AKSI Kemenlu

Kode IKU/SUB IKU		2022	2023	
B2.1	Target	97,25%	**98,25%**	↑
	Realisasi	99,18%	**100%**	↑
	Capaian	101,98%	**101,78%**	↓

IKU B2.1 merupakan IKU yang ditetapkan pada level Kemenlu *Wide* pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, terdapat peningkatan dari tahun 2022 sebesar 0,82% dari 99,18% menjadi 100%. Peningkatan realisasi pada tahun 2023 diantaranya didapatkan dari koordinasi yang semakin solid baik dengan seluruh *stakeholders* nasional terkait guna penyusunan prakarsa dan rekomendasi, serta peran aktifnya Indonesia dalam menggalang dukungan sehingga dapat diterimanya usulan Prakarsa serta rekomendasi Indonesia dalam forum ASEAN dan multilateral.

> Peningkatan realisasi pada tahun 2023 diantaranya didapatkan dari koordinasi yang semakin solid

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Dalam upaya pencapaian target, Kemenlu menggunakan strategi yaitu dengan melakukan pendekatan strategis kepada negara/anggota forum regional baik melalui korespondensi langsung maupun melalui perwakilan RI agar Indonesia dapat memperoleh dukungan akan Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang akan disampaikan pada forum.

Capaian pada IKU ini telah melampaui target, faktor-faktor keberhasilan yang berkontribusi terhadap pencapaian target adalah:

01

Keberhasilan Kepimpimpinan Indonesia dan Pengoordinasian Formulasi Prakarsa dan Rekomendasi

Keberhasilan kepimpimpinan Indonesia dan pengoordinasian formulasi prakarsa dan rekomendasi Indonesia dalam badan sektoral ASEAN. Selain itu, keberhasilan juga karena faktor dukungan negara anggota ASEAN yang memiliki komitmen untuk bersama-sama berupaya memastikan relevansi ASEAN, serta mendorong penguatan posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh untuk menciptakan kawasan yang siap menghadapi tantangan masa depan.

02

Mengembangkan Inisiatif Baru

Mengembangkan inisiatif baru untuk melanjutkan pembahasan dari agenda-agenda periode sebelumnya sehingga forum kerjasama tetap relevan dalam merespon isu yang menjadi kepentingan Kawasan.

03

Hubungan Bilateral dan Diplomasi yang Baik

Tercapainya target juga dipengaruhi oleh hubungan bilateral dan diplomasi yang baik tercermin dari adanya dukungan yang diterima Indonesia pada proses pencalonan atau pemilihan Pimpinan forum pada berbagai pertemuan regional dan multilateral. Pada forum multilateral, salah satu parameter keberhasilan pencalonan lainnya adalah dengan banyaknya kesepakatan saling dukung antar pencalonan RI dengan pencalonan negara lainnya.

Kendala dan Tantangan

Dalam pelaksanaan IKU B2.1 meskipun telah berhasil mencapai target di tahun 2023, beberapa terdapat kendala dan tantangan yang muncul diantaranya sebagai berikut:

01

Perbedaan Posisi dan Dinamika Geopolitik antara Anggota Forum

Perbedaan posisi dan dinamika geopolitik antara anggota forum, terutama terkait konflik di Kawasan Timur Tengah. Konflik ini mewarnai seluruh pembahasan pada agenda forum terkait, dan pada beberapa pertemuan konsensus menjadi sangat sulit tercapai.

02

Isu atau Prakarsa Banyak Bersifat Lintas Sektor dan Lintas Pilar

Isu atau prakarsa yang diangkat banyak yang bersifat lintas sektor dan lintas pilar yang membutuhkan koordinasi intensif baik dengan pilar di dalam negeri maupun dengan negara ASEAN lainnya dan membutuhkan waktu negosiasi yang cukup panjang.

03

Perbedaan Kepentingan antar Negara

Adanya perbedaan kepentingan antar negara menjadi tantangan untuk Indonesia dalam merumuskan rekomendasi/prakarsa yang paling tepat dalam mengakomodir kepentingan nasional di kancah forum multilateral.

04

Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan

Koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam negeri perlu ditingkatkan guna memastikan optimalnya proses dan hasil atas perumusan rekomendasi/prakarsa Indonesia.

Upaya Perbaikan

Sebagai upaya untuk memitigasi kendala dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan IKU B2.1, beberapa upaya perbaikan yang telah diambil diantaranya sebagai berikut:

01

Menonjolkan Peran Indonesia sebagai Peacemaker dalam Menyampaikan Setiap Inisiatif

Menonjolkan peran Indonesia sebagai *peacemaker* dalam menyampaikan setiap inisiatif Indonesia di berbagai pertemuan agar inisiatif tersebut dapat memberikan manfaat yang bersifat kolektif dan mengedepankan semangat multilateralisme. Komunikasi dengan negara mitra dan pemangku kepentingan nasional juga dilakukan secara intensif guna menyusun substansi posisi dan melakukan penggalangan dukungan secara lebih aktif dan efektif dari pihak-pihak tersebut terhadap posisi Indonesia.

02

Pembahasan Isu-isu pada Pilar Ekonomi dan Sosial Budaya ASEAN

Pembahasan isu-isu pada pilar ekonomi dan sosial budaya ASEAN dengan beberapa K/L teknis terus ditingkatkan agar tercipta koordinasi yang lebih efektif dalam memperjuangkan kepentingan RI di forum ekonomi dan sosial budaya ASEAN.

03

Dialog dengan Pemangku Kepentingan Nasional dan K/L Pengampu

Dialog formal maupun informal dengan pemangku kepentingan nasional dan K/L pengampu terus dilakukan pada seluruh tahapan. Utamanya, dialog yang komprehensif dan mendalam dilakukan pada proses perumusan untuk memastikan seluruh kepentingan nasional telah terakomodir tanpa ada yang tertinggal.

04

Membawa Alternatif Rekomendasi/Prakarsa Sesuai Dinamika Diplomasi

Pada proses perumusan dan penyampaian, Indonesia juga selalu membawa alternatif rekomendasi/prakarsa yang dapat disampaikan menyesuaikan dinamika proses diplomasi pada forum maupun di luar forum yang terjadi. Perubahan situasi global yang cepat perlu dihadapi dengan fleksibilitas yang tetap memastikan tercapainya kepentingan nasional.

Analisis Program Pendukung Capaian

Pencapaian target IKU B2.1 didukung oleh berbagai rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang disampaikan pada forum multilateral diantaranya APEC, Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF), I-EFTA CEPA, MIKTA, ASEAN SOM and Related Meetings, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Trade Organization (WTO), dll.

Adapun capaian lengkap dapat dilihat pada lampiran matriks informasi kinerja. Berikut *highlights* capaian utama untuk rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang berhasil disampaikan dan diterima pada forum multilateral

Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

01 Pertemuan Economic Committee di Palm Springs

California, AS,
23-24 Februari 2023

Indonesia sebagai *Convenor* dari Corporate Law and Governance (CLG) menyampaikan prakarsa Indonesia untuk berperan aktif sebagai *Core Team* penyusunan APEC Economic Policy Report (AEPR) 2023. Indonesia juga menyampaikan Prakarsa *Self-Funded Project Proposal* untuk mendorong *aspirational target* "advancing concrete initiatives on responsible business conduct, environment, social and governance (ESG) industry practices".

02 Rangkaian Pertemuan Second APEC Senior Officials Meeting (SOM 2) and Ministers Responsible for Trade (MRT), dan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) Ministerial Meeting

Detroit, Michigan, Amerika Serikat, 14-27 Mei 2023

Indonesia menyampaikan Prakarsa pada isu terkait *free flow of data*, penyesuaian pada komitmen penyusunan Reference List on Environmental Goods, serta referensi terhadap *Indigenous People* yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing anggota APEC. Indonesia juga menyampaikan pentingnya agar pembahasan terkait isu digital dilakukan secara berimbang, dan mempertimbangkan kesiapan dari ekonomi berkembang di APEC.

03 Pertemuan Concluding Senior Officials Meeting (CSOM) dalam Rangkaian Pertemuan pada APEC Economic Leaders Week

California, AS,
23-24 Februari 2023

Indonesia merekomendasikan dukungan pada penyusunan *framework* pada Reference List APEC Environmental Goods dan CTI-DESG Joint Statement terkait pembahasan *customs duties on electronic commerce*. Pertemuan juga membahas berbagai capaian kerja APEC di berbagai APEC Fora dan sub-fora di bawah keketuaan APEC AS dan persiapan APEC Economic Leaders Week

Kawasan Amerika dan Eropa

04 Sosialisasi Pemberlakuan Indonesia European Free Trade Agreement Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EFTA CEPA): Fasilitasi Perdagangan dan Kepabeanan dalam Rangka Peningkatan Akses Pasar Produk Indonesia ke Kawasan EFTA

Balikpapan, 7 Februari 2023

Pada kegiatan tersebut, Indonesia menyampaikan prakarsa terkait pentingnya sosialisasi dan bimbingan teknis ekspor dan impor dalam kerangka I-EFTA CEPA perlu terus dilakukan di berbagai daerah dan dengan berbagai *angle*. Selain Deklarasi Asal Barang (DAB), fasilitas *Tariff Rate Quota* (TRQ) juga dapat menjadi topik yang perlu disosialisasikan agar dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis.

05 Pertemuan Tindak Lanjut I-EFTA CEPA

24 Maret 2023

Pertemuan membahas tindak lanjut dengan EFTA terkait Proposal *Roadmap* Usulan Program Implementasi Cooperation and Capacity Building (CCB) I – EFTA CEPA. Prakarsa dan rekomendasi yang diterima adalah program-program yang diusulkan RI-EFTA dalam memenuhi kepentingan bersama, diantaranya peningkatan kapasitas pengolahan makanan laut daya saing produk perikanan dan akses pasar dalam kerangka I-EFTA CEPA dan penguatan SDGS Indonesia melalui *platform* nasional mengenai standar keberlanjutan sukarela (*voluntary sustainability standards* / VSS)

06 Pertemuan dengan Perwakilan Kedutaan Besar Brasil dan Usulan Butir Wicara Menlu RI saat Kunjungan Menlu Brasil ke Indonesia

Jakarta, 22 September 2023

Indonesia merekomendasikan beberapa usulan dan pertanyaan yang menjadi *concern* Indonesia terutama terkait pelaksanaan putaran pertama negosiasi Indonesia-Mercosur CEPA yang akan dilaksanakan pada Maret 2024 secara *hybrid*. Rekomendasi tersebut akan diteruskan ke MERCOSUR Pusat.

ASEAN

07 Pertemuan East Asia Summit Senior Officials' Meeting

Jakarta, 7 Maret 2023

Indonesia telah menyampaikan 2 prakarsa yaitu rencana pelaksanaan ASEAN-Indo-Pacific Forum: Implementation of the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang memfokuskan pada infrastruktur dan ekonomi, serta mendorong kolaborasi yang inklusif di kawasan Indo-Pasifik dan Indonesia sampaikan rencana pelaksanaan EAS Workshop on Developing Coastal Economy sebagai implementasi nyata AOIP.

08 Pertemuan the 35th ASEAN-US Dialogue di ASEAN Secretariat

Jakarta, 7 Maret 2023

Indonesia telah menyampaikan prakarsa untuk kerja sama *Electric Vehicle Ecosystem* (EV) antara ASEAN dan Amerika Serikat telah berjalan dan tahun ini direncanakan akan dihasilkan Policy Recommendation to Improve Electric Vehicle Infrastructure and Charging Stations in ASEAN serta membentuk ASEAN-US Center di Amerika Serikat.

09 Pertemuan ASEAN Conference on Strengthening Food Security Integration

Jakarta, 17 April 2023

Pertemuan yang digagas Indonesia ini telah mengkonsolidasikan dukungan terhadap c*ore elements* deklarasi yang terkait penguatan ketahanan pangan baik dalam hal *rapid response* saat krisis maupun membangun ketahanan jangka panjang. Prakarsa Indonesia telah dikorporasikan dalam *core elements draft* ASEAN Leaders' Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in Time of Crises.

Kawasan Amerika dan Eropa

10 Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216

Paris, Prancis,
10-24 Mei 2023

Telah menetapkan: 4 (empat) Geopark Indonesia berhasil ditetapkkan sebagai UNESCO Global Geopark, yaitu Geopark ijen, Geopark Maros Pangkep, Geopark Merangin, dan Geopark Raja Ampat; dan 3 (tiga) Arsip Dokumenter Indonesia berhasil ditetapkan sebagai *Memory of the World*, yaitu Pidato Soekarno 'To Build the World Anew', Arsip Pertemuan Pertama Gerakan Non-Blok, dan Hikajat Aceh. Dengan ditetapkannya 4 (empat) Geopark baru ini, terdapat 10 Geopark Indonesia yang telah diakui UNESCO dan menjadi bagian dari UGGN, dari total 195 UGGN di seluruh dunia.

11 Perundingan Putaran ke-15 Indonesia-EU CEPA

Yogyakarta, 9-15 Juli 2023

Perundingan berhasil menyepakati usulan Indonesia, yaitu: Diakuinya prinsip *Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities* (CBDR RC) pada teks dan Pengakuan atas pentingnya Convention on Biodiversity (CBD) dan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework pada pengaturan provisi tentang *Trade and Biodiversity.*

12 Partisipasi Indonesia pada rangkaian WTO Public Forum

Jenewa, Swiss,
12-15 September 2023

Indonesia menyampaikan rekomendasi terkait penerapan prinsip *Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities* (CBDR-RC), *mutual recognition* atas standar keberlanjutan antar negara, perlunya sikap proaktif dalam menyikapi kebijakan perdagangan hijau yang berpotensi berdampak negatif bagi negara berkembang, serta pentingnya *access to financing* bagi *smallholders*.

Proyeksi Ke Depan

Beberapa proyeksi ke depan untuk mempertahankan capaian IKU B2.1 di tahun mendatang, diantaranya sebagai berikut:

01. Berperan Aktif dalam Isu-isu Global yang Relevan

Berperan aktif dalam isu-isu global yang relevan dengan mitra, seperti perubahan iklim, kesehatan global, perdamaian, dan keamanan untuk membantu menciptakan kemitraan yang kuat dalam penyelesaian isu-isu tersebut.

02. Memainkan Peran Aktif dalam Forum Kerja Sama

Terus memainkan peran aktif dalam forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan, yang memiliki dampak signifikan dalam kerja sama ekonomi, sosial dan budaya. Kerja sama regional dapat memperkuat pengaruh Indonesia di tingkat global.

03. Menyampaikan Berbagai Rekomendasi pada Berbagai Forum

Adapun proyeksi untuk tahun 2024, Indonesia akan menyampaikan berbagai rekomendasi pada berbagai forum di bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, antara lain melalui: Dialog Konstruktif dengan Komite Badan Traktat HAM PBB - Komite Hak Ekososbud dan Komite Hak Anak; Forum on Business and Human Rights; G20 Development Working Group di ke Brasil; UNCTAD Intergovernmental Group of Experts (IGE) on E-commerce and the Digital Economy; IORA Working Group on the Blue Economy (WGBE); APEC Senior Officials Meeting I, II, III di Peru; CTI-CFF Senior Officials Meeting/Financial Resources Working Group di Indonesia; Bandung Spirit Reborn-Road to Platinum Jubilee Asian African Conference; dan pertemuan ASEAN Working Group dan Senior Official Meeting di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

04. Finalisasi dan Penandatanganan I-EU CEPA dan Perundingan Putaran Pertama Perjanjian Perdagangan Indonesia – MERCOSUR

Selain itu pada tahun 2024 juga akan dilakukan finalisasi dan Penandatanganan I-EU CEPA serta Perundingan Putaran Pertama Perjanjian Perdagangan Indonesia – MERCOSUR, penyelenggaraan 8th RI–EU Joint Committee, serta melakukan tindak lanjut kesepakatan *Capacity Building* untuk negara-negara Amerika Latin.

Dokumentasi Program Pendukung Capaian IKU B2.1 : Persentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Gambar III.105
Pertemuan Economic Committee di Palm Springs (California, AS, 23-24 Februari 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.106
Pertemuan Concluding Senior Officials Meeting (CSOM) dalam Rangkaian Pertemuan pada APEC Economic Leaders Week (San Fransisco, 11-17 November 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.107
Pertemuan the 35th ASEAN-US Dialogue (Jakarta, 7 Maret 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.108
Pertemuan ASEAN Conference on Strengthening Food Security Integration (Jakarta, 17 April 2023)
Sumber: Kemenlu

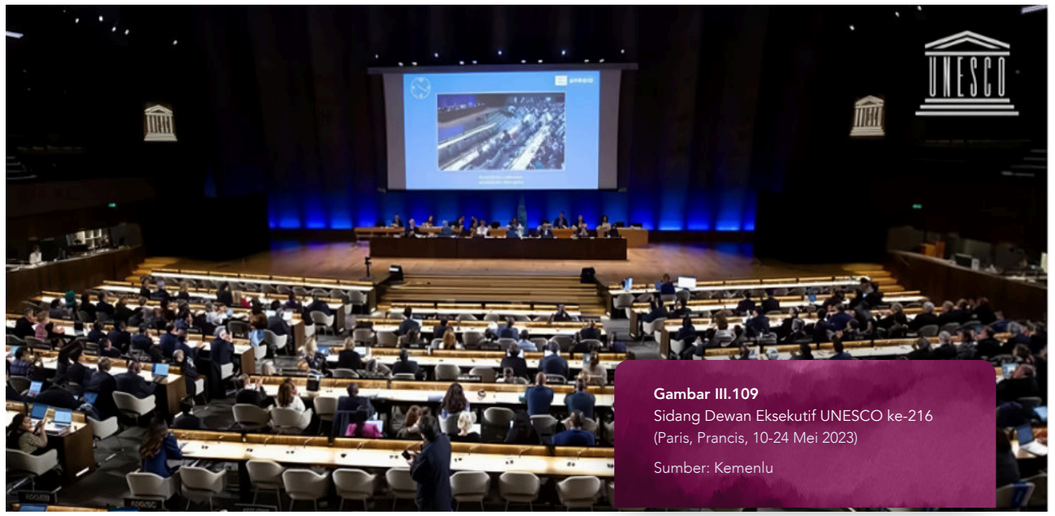

Gambar III.109
Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 (Paris, Prancis, 10-24 Mei 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.110
Perundingan Putaran ke-15 Indonesia-EU CEPA (Yogyakarta, 9-15 Juli 2023)
Sumber: Kemenlu

Analisis IKU B2.2

Persentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim

Deskripsi IKU

IKU B2.2 digunakan untuk mengetahui kapabilitas diplomasi di bidang politik, keamanan dan maritim yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam hubungan kerja sama Multilateral.

Ruang lingkup prakarsa/rekomendasi bidang politik dan keamanan meliputi, namun tidak terbatas pada isu perdamaian dan keamanan internasional, perlucutan senjata, terorisme, kejahatan lintas negara, keamanan siber, hak asasi manusia, migrasi, dan pengungsi.

Ruang lingkup prakarsa/rekomendasi bidang maritim meliputi, namun tidak terbatas pada keselamatan pelayaran, keamanan maritim, perlindungan lingkungan laut dan pengelolaan sumber daya kelautan serta pembangunan infrastruktur kemaritiman.

> IKU B2.2 digunakan untuk mengetahui kapabilitas diplomasi di bidang politik, keamanan dan maritim yang telah dilakukan oleh Indonesia

Perhitungan realisasi IKU B1.2 Persentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU} = \frac{\text{Jumlah prakarsa / rekomendasi Indonesia dan prakarsa yang diterima di bidang politik, keamanan dan maritim}}{\text{Jumlah prakarsa / rekomendasi Indonesia yang diusulkan di bidang politik, keamanan dan maritim}} \times 100\%$$

Informasi Kinerja

Tabel III.49
Capaian IKU B2.2: Persentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim

Sumber: Aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase Prakarsa/ Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim	Jumlah Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di Bidang Politik, Keamanan, dan Maritim	**180**
	Jumlah Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diusulkan pada Forum Multilateral di Bidang Politik, Keamanan, dan Maritim	**180**

Target	Realisasi	Capaian
98,25%	100%	101,78%

Pada tahun 2023, realisasi IKU B2.2 "Presentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di bidang Politik, Keamanan dan Maritim" adalah sebesar 100% dari target sebesar 98,25%. Realisasi tersebut melampaui target yang ditetapkan hingga 1,75%.

Lebih rinci, realisasi Persentase Prakarsa/ Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim dari masing-masing lingkup forum adalah sebagai berikut:

- Kawasan Asia Pasifik dan Afrika dari 12 prakarsa/rekomendasi yang diusulkan oleh Indonesia, terdapat 12 prakarsa/ rekomendasi yang diterima sehingga menghasilkan realisasi 100%
- Kawasan Amerika dan Eropa dari 5 prakarsa/ rekomendasi yang diusulkan oleh Indonesia, terdapat 5 prakarsa/ rekomendasi yang diterima sehingga menghasilkan realisasi 100%.
- Lingkup ASEAN, dari 81 prakarsa/ rekomendasi yang diusulkan oleh Indonesia, terdapat 81 prakarsa/ rekomendasi yang diterima sehingga menghasilkan realisasi 100%.
- Lingkup Multilateral, dari 82 prakarsa/ rekomendasi yang diusulkan oleh Indonesia, terdapat 82 prakarsa rekomendasi yang diterima sehingga menghasilkan realisasi 100%.

Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim

Kawasan Amerop

5/5

5 prakarsa/rekomendasi yang diterima dari 5 prakarsa/ rekomendasi yang diusulkan, mayoritas disampaikan dalam forum ASEM dan FEALAC

Kawasan Aspasaf

12/12

12 prakarsa/rekomendasi yang diterima dari 12 prakarsa/ rekomendasi yang diusulkan, mayoritas disampaikan dalam forum IORA

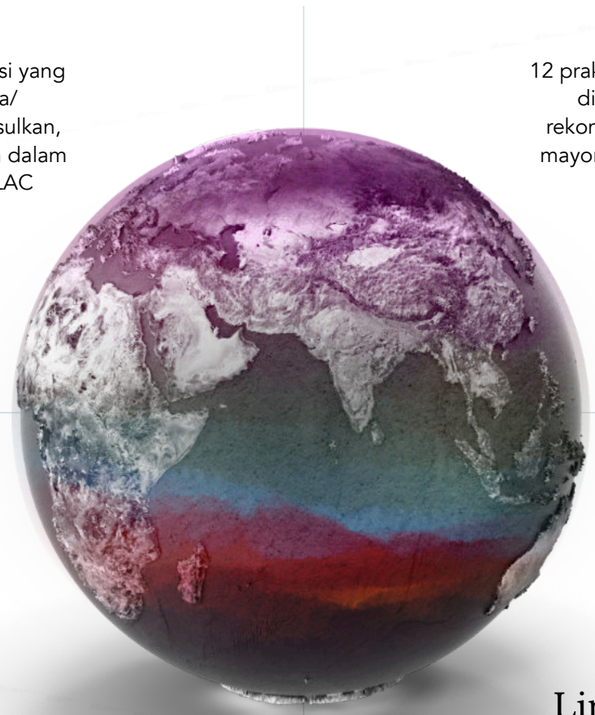

Lingkup Multilateral

82/82

82 prakarsa/rekomendasi yang diterima dari 82 prakarsa/ rekomendasi yang diusulkan, mayoritas disampaikan dalam forum IMO dan Fish Week Meeting

Lingkup ASEAN

81/81

81 prakarsa/rekomendasi yang diterima dari 81 prakarsa/rekomendasi yang diusulkan, mayoritas disampaikan di pertemuan ASEAN SOM, *Working Group*, dan Pertemuan ASEAN dengan Mitra Wicara

Perbandingan Kinerja

Tabel III.50
Target, Realisasi, dan Capaian IKU Persentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim

Sumber: AKSI Kemenlu

Kode IKU/SUB IKU		2022	2023	
B2.2	Target	97,25%	**98,25%**	↑
	Realisasi	99,13%	**100%**	↑
	Capaian	101,93%	**101,78%**	↓

IKU B2.2 merupakan IKU yang ditetapkan pada level Kemenlu *Wide* pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, terdapat peningkatan dari tahun 2022 sebesar 0,87% dari 99,13% menjadi 100%.

Berbagai prakarsa/rekomendasi yang disampaikan diharapkan dapat memberi manfaat terhadap kepentingan Indonesia dalam berbagai isu yang saat ini tengah berkembang, antara lain termasuk isu kemanusiaan dan perdamaian, serta keamanan atas isu kejahatan siber dan maritim.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Dalam upaya pencapaian target IKU B2.2, Kemenlu secara umum berusaha melakukan pendekatan strategis kepada negara/anggota forum regional agar dapat memperoleh dukungan akan Prakarsa/Rekomendasi Indonesia di bidang politik, keamanan dan maritim yang akan disampaikan pada forum tersebut. Adapun faktor-faktor keberhasilan yang berkontribusi terhadap pencapaian target B2.2 adalah sebagai berikut:

01
Kejelasan Posisi Nasional Indonesia terkait Isu-isu dalam Kemaritiman

Adanya kejelasan posisi nasional Indonesia terkait isu-isu dalam kemaritiman serta rujukan yang jelas dalam arah kebijakan kemaritiman Indonesia, yang memberikan sekaligus rambu-rambu bagi delegasi RI yang hadir dan menyampaikan seluruh prakarsa dan/atau rekomendasi dalam sidang-sidang atau pertemuan ASEAN di berbagai jenis dan tingkatan yang berbeda.

02
Memastikan Rumusan Rekomendasi/Prakarsa Berkualitas dan Solutif

Memastikan rumusan rekomendasi/prakarsa yang disampaikan pada setiap forum multilateral berkualitas dan solutif dalam mendukung terjaganya perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan sehingga dapat diterima saat diusulkan pada forum multilateral.

03
Dukungan Kuat dari Pemerintah dan Berbagai Pemangku Kepentingan di Dalam Negeri

Dukungan kuat dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan di dalam negeri, termasuk parlemen, masyarakat sipil, dan sektor swasta, telah memberikan legitimasi kepada prakarsa/rekomendasi tersebut. Selain itu, diplomasi Indonesia yang aktif dan berkelanjutan telah memungkinkan Indonesia untuk membangun dukungan internasional bagi inisiatifnya. Ini mencakup kerja sama aktif dengan negara-negara mitra yang memiliki kepentingan serupa.

Kendala dan Tantangan

Dalam pelaksanaan IKU B2.2 meskipun telah berhasil mencapai target di tahun 2023, beberapa terdapat kendala dan tantangan yang muncul diantaranya sebagai berikut:

01
Belum Optimalnya Koordinasi Pemerintah Pusat dengan Perwakilan RI

Belum optimalnya koordinasi pemerintah pusat dengan Perwakilan RI terkait keterwakilan Indonesia di beberapa sidang-sidang atau forum multilateral yang strategis.

02

Perubahan Prioritas, Geopolitik dan Pergantian Pemerintahan

Adanya perubahan prioritas, geopolitik dan pergantian pemerintahan dari negara-negara anggota forum regional yang menyebabkan tidak adanya konsensus.

03

Divergensi Kepentingan dan Posisi Negara Anggota ASEAN

Adanya divergensi kepentingan dan posisi Negara Anggota ASEAN dalam isu-isu sensitif yang berakibat pada kompleksitas perundingan.

Upaya Perbaikan

Sebagai upaya untuk memitigasi kendala dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan IKU B2.2, beberapa upaya perbaikan yang telah diambil diantaranya sebagai berikut:

01

Koordinasi antara Kemenlu dengan Perwakilan RI

Koordinasi antara Kemenlu dengan Perwakilan RI agar dapat turut mengawal berbagai perkembangan pembahasan pada forum multilateral yang tidak dapat dihadiri oleh Pusat.

02

Upaya Mempercepat Proses Finalisasi Kesepakatan

Mengintensifkan pelaksanaan negosiasi regional dan pertemuan dengan negara mitra terkait dalam upaya mempercepat proses finalisasi kesepakatan.

03

Menjaga Kesatuan dan Sentralitas ASEAN

Menjaga kesatuan dan sentralitas ASEAN, terutama dalam isu-isu yang krusial, sensitif dan melibatkan pihak eksternal dengan melakukan pendekatan dan menjadi penengah antara pihak-pihak yang berbeda pandangan, serta menyesuaikan dengan kepentingan domestik Indonesia agar dapat menyusun posisi bersama dengan tujuan mencapai konsensus.

Analisis Program Pendukung Capaian

Program pendukung capaian IKU B2.2 diantaranya terkait diterimanya prakarsa dan rekomendasi yang disampaikan pada forum multilateral diantaranya Pertemuan ASEAN SOM dalam berbagai sektor, IORA, FEALAC dan IMO. Adapun daftar capaian lengkap terlampir dalam matriks informasi kinerja.

Berikut *highlights* capaian utama untuk IKU Rekomendasi dan Prakarsa Indonesia yang Berhasil Disampaikan dan Diterima pada forum Multilateral:

Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

01 **Pertemuan 13th Asian Parliamentary Assembly (APA-13)**

Antalya, Turki,
8-10 Januari 2023

Pada pertemuan ini, Indonesia senantiasa mendorong dukungan pada isu kemerdekaan Palestina dan mendukung kerja sama multilateral sebagai upaya menghadapi dinamika global. Pada pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan rekomendasi yang telah diterima pada Deklarasi Antalya, antara lain: Rujukan pada 1951 Refugee Convention and its Protocol pada klausa penanganan pengungsi; mendukung agar APA tidak hanya fokus pada organisasi teroris yang tertulis pada Deklarasi, namun juga bagi seluruh organisasi teroris dan mengusulkan agar isu terkait demokrasi juga dicantumkan pada Deklarasi.

02 **5th Regional Security Strategy Working Group MSG**

Suva, 23-24 Mei 2023

Pada pertemuan ini, Indonesia menyampaikan berbagai prakarsa dan rekomendasi dalam *outcome document* 'Regional Security Strategy Framework' untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan, serta mengelola rivalitas kekuatan besar global. Seluruh usulan Indonesia terhadap amandemen beberapa paragraf *outcome document* diterima dan diadopsi oleh seluruh negara anggota.

03 **Pertemuan the 13th Bi-Annual Meeting of the IORA Committee of Senior Officials (CSO)**

Sylhet, Bangladesh, 13–14 Juni 2023

Pada pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan menyampaikan prakarsa agar satu negara anggota hanya menjadi koordinator untuk satu Mitra Wicara saja, guna memastikan partisipasi aktif dari negara anggota. Indonesia juga membahas rencana penandatanganan dokumen kerja sama IORA-ASEAN dan undangan kepada Bangladesh sebagai chair IORA pada KTT East Asia Summit (EAS) ke-18.

Kawasan Amerika dan Eropa

04 **Penyelenggaraan the 7th Indonesia – European Union Security Policy Dialogue (SPD)**

Brussel, 10 Mei 2023

Dalam SPD ke-7 Indonesia merekomendasikan penguatan kerja sama di berbagai bidang, di antaranya penanggulangan terorisme dan radikalisme, keamanan maritim, dan penanggulangan bencana.

Dalam pertemuan, Indonesia dan UE saling bertukar pandangan terkait perkembangan geostrategis di kawasan dan global serta mendiskusikan upaya bersama ikut mendorong terciptanya kawasan yang aman, stabil, dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

05 **Rangkaian the 13th FEALAC Cyber Secretariat Workshop dan FEALAC Troika SOM and Interim Coordination Meeting**

Seoul, Korea Selatan, 15-16 Juni 2023

Pembahasan utama dalam pertemuan adalah bagaimana merevitalisasi dan memperkuat kerja sama kawasan Asia Timur dan Latin Amerika-Karibia di tengah tantangan deglobalisasi serta mekanisme rotasi keketuaan Koordinator Kawasan dengan system *voluntary alphabetical order.* Pada kesempatan tersebut, prakarsa yang diterima Indonesia terkait dengan rencana kegiatan FEALAC Youth Summit 2023 yang merupakan inisiatif baru Indonesia sebagai *co-chair* Working Group on Culture, Youth, Gender and Sports.

06 **Pertemuan ASEAN Senior Officials' Meeting (SOM)**

Jakarta, 6 Maret 2023

Indonesia telah menyampaikan prakarsa kerja sama antar Sekretariat antara ASEAN dengan Indian Ocean Rim Association (IORA) dan Pacific Island Forum (PIF) dalam rangka implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

07 **Pertemuan ASEAN SOM dan Pertemuan Terkait Lainnya**

Bali, 31 Juli – 4 Agustus 2023

Indonesia menyampaikan rekomendasi *streamlining* mekanisme di ASEAN Regional Forum (ARF) yang tidak efektif serta memperkuat mekanisme yang sudah ada, termasuk penguatan isu-isu *maritime security* serta *preventive diplomacy.*

08 **Pertemuan ke-23 ASEAN Senior Officials' Meeting on Transnational Crime (SOMTC)**

Yogyakarta, 20-23 Juni 2023

Indonesia menyampaikan rekomendasi agar *workplan* kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicara, seperti pada SOMTC-New Zealand Workplan, dapat sejalan dengan hasil KTT ke-42 ASEAN khususnya mengenai TPPO terkait *abuse of technology.*

09 **Pertemuan ke-8 High Level Task Force (HLTF) on ASEAN Community's Post-2025 Vision**

Jakarta, 26-27 Juni 2023

Indonesia menyampaikan rekomendasi terkait format konsep Visi ASEAN 2045 mencakup Introduction, Challenge, Our Future ASEAN serta menyampaikan konsep ASEAN sebagai *epicentrum of growth* dan AOIP dalam Visi ASEAN 2045.

Multilateral

10	**Pertemuan Asia Dialogue on Forced Migration (ADFM) ke-12** Jakarta, 16-17 Mei 2023	Pada pertemuan tersebut Indonesia menyampaikan 4 (empat) rekomendasi terkait migrasi paksa, *consultation mechanism* untuk *update* isu-isu migrasik spesifik di Kawasan, penjajakan Regional Rohingya Support Platform, serta penjajakan minimum Mental Health Psychosocial Support (MHPSS) di negara Kawasan.
11	**Sidang Sesi ke-66 Commission of Narcotic Drugs** Wina, Austria, 13-17 Maret 2023	Rekomendasi Indonesia pada forum tersebut berpokok pada komimen kuat Indonesia untuk menanggulangi narkoba yang dituangkan dalam Prioritas Nasional 2023, serta perlunya memperkuat upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba
12	**Sidang IMO Forty-seventh session of the Facilitation Committee (FAL)** London, 13-17 Maret 2023	Sidang menyelesaikan versi baru IMO Compendium on Facilitation and Electronic Business, dan the Guidelines for Harmonized Communication and Electronic Exchange of Operational Data for Port Calls; serta mengakselerasi percepatan implementasi Maritime Single Window (MSW), Laporan WG on MASS serta Perdebatan konflik Rusia-Ukraina. Di kesempatan Sidang FAL ke-47, Indonesia mensubmisi dokumen terkait implementasi MSW di Indonesia dan menyampaikan presentasi INSW di sela sidang tanggal 15 Maret 2023.

Proyeksi Ke Depan

Beberapa proyeksi ke depan untuk mempertahankan capaian IKU B2.2 di tahun mendatang, diantaranya sebagai berikut:

01. Terus Mendorong Isu-isu yang Menjadi Kepentingan Indonesia di Tingkat ASEAN

Indonesia akan terus mendorong isu-isu yang menjadi kepentingan Indonesia di tingkat ASEAN termasuk melalui pendekatan di tingkat badan sektoral ASEAN yang menangani isu terkait.

02. Melakukan Pembahasan Lanjutan dan Finalisasi Kesepakatan dan Perjanjian Ekonomi Khusus

Penguatan dalam pertemuan multilateral dan kerja sama internasional di tahun 2024 dengan menyampaikam berbagai rekomendasi dan prakarsa di bidang politik, keamanan dan maritim diantaranya pada forum sebagai berikut:

- 13th IORA Bi-Annual Committee of Senior Officials (CSO).
- IORA International Conference on IUU Fishing.
- Sidang Siber Ad Hoc Committee (Concluding Session).
- G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG).
- 8th Security Policy Dialogue dan Political Dialogue RI – UE.
- Rangkaian Kegiatan Komunikasi Publik Luar Negeri Isu Kedaulatan di Uni Eropa.
- Pertemuan ASEM (SOM/FMM) dan Pertemuan FEALAC Workshop/SOM/FMM.
- 6th Cooperation Forum of The Pacific Alliance.
- Rangkaian pertemuan ASEAN SOM dan *Working Group* pada sektor politik, keamanan dan maritim.

Dokumentasi Program Pendukung Capaian IKU B2.2 : Persentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim

Gambar III.111
Pertemuan the 13th Bi-Annual Meeting of the IORA Committee of Senior Officials (CSO)
(Sylhet, Bangladesh, 13 – 14 Juni 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.112
Pertemuan 13th Asian Parliamentary Assembly (APA-13)
(Antalya, Turki, 8-10 Januari 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.113
Rangkaian the 13th FEALAC Cyber Secretariat Workshop dan FEALAC Troika SOM and Interim Coordination Meeting
(Seoul, Korea Selatan, 15-16 Juni 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.114
Pertemuan the 7th Indonesia – European Union Security Policy Dialogue (SPD)
(Brussel, Belgia, 10 Mei 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.115
Pertemuan ASEAN Senior Officials' Meeting (SOM)
(Jakarta, 6 Maret 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.116
Pertemuan ke-8 High Level Task Force (HLTF) on ASEAN Community's Post-2025 Vision
(Jakarta, 26-27 Juni 2023)
Sumber: Kemenlu

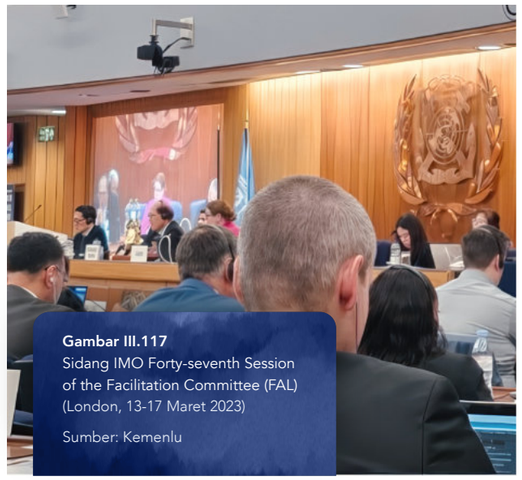

Gambar III.117
Sidang IMO Forty-seventh Session of the Facilitation Committee (FAL)
(London, 13-17 Maret 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.118
Sidang Sesi ke-66 Commission of Narcotic Drugs
(Wina, 13-17 Maret 2023)
Sumber: Kemenlu

Learning and Growth Perspective

L

Perspektif L*earning and Growth Perspective* didukung Sasaran Strategis (SS) SS Infrastruktur Diplomasi yang Kuat, didukung dengan keberadaan SS Pendukung:

L1.1
Pengelolaan SDM Kemenlu Berbasis Merit yang Optimal

L1.2
Tata Kelola Organisasi Kemenlu yang Baik

L1.3
Pengelolaan Aset Kemenlu yang Optimal

L1.4
Pengelolaan Anggaran Kemenlu yang Optimal dan Akuntabel

Sasaran Strategis (SS) L1 :

Infrastruktur Diplomasi yang Kuat

Kemenlu perlu melakukan penguatan infrastruktur diplomasi untuk memastikan berjalannya dukungan seluruh sumber daya, sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan diplomasi dan hubungan luar negeri. Upaya penguatan tersebut dilakukan melalui berbagai penyesuaian untuk merespon realitas arsitektur global yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga Kemenlu mampu memetakan potensi dan peluang yang tercipta dari kondisi global yang bersifat dinamis tersebut.

Upaya mencapai tujuan penguatan infrastruktur diplomasi Kemenlu dirumuskan secara jelas dan terukur menjadi SS "Infrastruktur Diplomasi yang Kuat", yang ditetapkan berdasarkan tugas fungsi, dan *Stakeholders/Customer Expectation*.

Penguatan infrastruktur diplomasi bertujuan agar organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan. Organisasi diharapkan menata kelembagaan kementerian menuju pencapaian misi dan visi prioritas diplomasi Indonesia yang mampu memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Penguatan infrastruktur diplomasi dilaksanakan melalui dukungan penguatan sejumlah bidang, meliputi pengelolaan SDM organisasi, tata kelola organisasi untuk mewujudkan *good governance*, aset dan anggaran. Sehingga dipandang perlu untuk merumuskan secara jelas dan terukur SS Pendukung pada bidang-bidang dimaksud yang memiliki hubungan sebab-akibat secara logis dengan SS "Infrastruktur Diplomasi yang Kuat".

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tupoksinya masing-masing agar berhasil melaksanakan strategi diplomasi RI di luar negeri. Oleh karena itu Kemenlu menetapkan "Pengelolaan SDM berbasis merit yang optimal" sebagai SS Pendukung. Sistem merit merupakan manajemen SDM berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Perlu dipastikan berjalannya identifikasi potensi, pengembangan kompetensi melalui *coaching*, *mentoring*, pendidikan dan pelatihan (diklat), penetapan pola karier, pemetaan talenta, dan memastikan pemberian *reward and punishment* yang tepat dan objektif berdasarkan kinerja.

Kemenlu bertujuan mewujudkan level *world class bureaucracy* melalui penataan organisasi secara berkesinambungan untuk memperkuat pelaksanaan tugas Prioritas Politik Luar Negeri. Perumusan SS Pendukung "Tata Kelola Organisasi Kemenlu yang Baik" sebagai bentuk komitmen untuk senantiasa melaksanakan kemajuan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga tercipta pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata kelola organisasi dimaksud termasuk didalamnya manajemen kinerja pada implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan diplomasi sangat bergantung pada ketersediaan dan kehandalan sarana serta prasarana. Oleh karena itu, perlu pengelolaan BMN yang terdaftar di Kemenlu dengan baik, sehingga tercipta ketertiban pengelolaan BMN. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan Sasaran Strategis (SS) Pendukung yang disebut "Pengelolaan Aset Kemenlu yang Optimal." Sistem pengelolaan BMN turut memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diimplementasikan, dengan penetapan kebijakan tata kelola TIK sebagai bagian integral dari dukungan pelaksanaan diplomasi. Pemanfaatan TIK juga menjadi komponen utama dalam perencanaan kerja BMN yang lebih modern dan akuntabel.

Kualitas pengelolaan keuangan yang baik menjadi bagian penting dari perkuatan infrastruktur diplomasi. Kemenlu terus berupaya melaksanakan program-program yang mendukung manajemen layanan dan tugas teknis lainnya. Komitmen ini tercermin dalam SS Pendukung "Pengelolaan Anggaran Kemenlu yang Optimal dan Akuntabel," yang mengukur kualitas pengelolaan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kemenlu.

Keberadaan SS Pendukung pada SS "Infrastruktur Diplomasi yang Kuat" dirumuskan sebagai berikut:

L1.1
Pengelolaan SDM Kemenlu Berbasis Merit yang Optimal

L1.2
Tata Kelola Organisasi Kemenlu yang Baik

L1.3
Pengelolaan Aset Kemenlu yang Optimal

L1.4
Pengelolaan Anggaran Kemenlu yang Optimal dan Akuntabel

Berikut disampaikan penjelasan upaya Kemenlu untuk mencapai target kinerja sepanjang 2023 pada IKU SS "Infrastruktur Diplomasi yang Kuat" dan setiap SS Pendukung.

> Kemenlu bertujuan mewujudkan level *world class bureaucracy* melalui penataan organisasi secara berkesinambungan

Sasaran Strategis Pendukung L1.1 :

Pengelolaan SDM Kemenlu Berbasis Merit yang Optimal

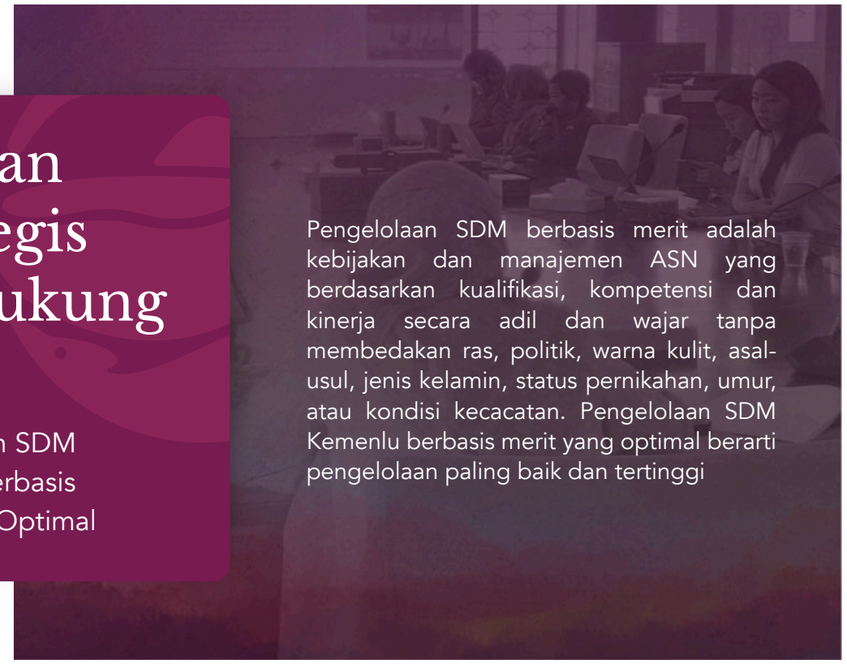

Pengelolaan SDM berbasis merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan ras, politik, warna kulit, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Pengelolaan SDM Kemenlu berbasis merit yang optimal berarti pengelolaan paling baik dan tertinggi

Keberadaan infrastruktur diplomasi penting untuk mendukung prioritas-prioritas Indonesia di luar negeri. Infrastruktur diplomasi meliputi reformasi birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur fisik diplomasi, penguatan pemanfaatan teknologi dan informatika, serta transformasi digital.

Pengelolaan SDM berbasis merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan ras, politik, warna kulit, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Pengelolaan SDM Kemenlu berbasis merit yang optimal berarti pengelolaan paling baik dan tertinggi.

> Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar

Analisis IKU L1.1.1

Nilai Sistem Merit Kemenlu

Deskripsi IKU

Sesuai dengan Peraturan Komisi ASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Nilai Sistem Merit adalah nilai yang didapatkan berdasarkan penilaian mandiri atas penerapan sistem merit di Kemenlu yang diverifikasi oleh Komisi ASN. Penilaian mandiri tersebut dilakukan setiap tahun melalui aplikasi Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit (SIPINTER).

Perhitungan IKU Nilai Sistem Merit Kemenlu menggunakan formula sebagai berikut:

Nilai Penerapan Sistem Merit Kemenlu yang ditetapkan oleh Komisi ASN

Penilaian implementasi sistem merit diawasi dan dilakukan oleh Komisi ASN. Kategori hasil penilaian:

Tabel III.51
Kategori Nilai Sistem Merit

Sumber: Peraturan Komisi ASN

Kategori	I (Buruk)	II (Kurang)	III (Baik)	IV (Sangat Baik)
NIlai	100-174	175-249	250-324	325-400
Indeks	0,2-0,4	0,41-0,6	0,61-0,8	0,81-1

Penilaian Sistem Merit menggunakan sistem skor dan bobot. Terdapat 8 aspek manajemen ASN berbasis sistem merit dengan masing-masing aspek terdiri dari sejumlah sub-aspek. Setiap sub-aspek terdiri dari 4 tingkatan skor, dari 1 yang terendah (belum sesuai ketentuan) hingga 4 yang tertinggi. Hasil penilaian menentukan tingkat penerapan sistem merit pada instansi yang dinilai serta rekomendasi dalam rangka perbaikan serta rekomendasi Komisi ASN.

Nilai Sistem Merit Kemenlu adalah penjumlahan skor dari setiap aspek/sub aspek dalam penilaian atas penerapan sistem merit di lingkungan Kemenlu dengan bobot tertimbang dari setiap aspek.

Gambar III.119
Aspek Sistem Merit
(Sumber: Peraturan Komisi ASN)

Informasi Kinerja

Tabel III.52
Capaian IKU L1.1.1 Nilai Sistem Merit Kemenlu

Sumber: AKSI Kemenlu

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Nilai Sistem Merit Kemenlu	Nilai Sistem Merit Kemenlu dari Komisi ASN	**343,50** (skala 400)

Target	Realisasi	Capaian
300 (skala 400)	343,50 (skala 400)	114,50%

Sesuai dengan Keputusan Komisi ASN Nomor 165/KEP.KASN/C/XI//2023 tanggal 30 November 2023, Kemenlu mendapatkan Nilai Sistem Merit sebesar 343,50 dari nilai maksimal 400 atau berada pada Kategori IV (Sangat Baik) dengan Indeks 0,84.

Dari realisasi tersebut, dengan demikian jika dibandingkan dengan target IKU sebesar 300 (skala 400), maka capaian kinerja IKU L1.1.1 Nilai Sistem Merit Kemenlu tahun 2023 ini adalah sebesar 114,50%.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.53
Target, Realisasi, dan Capaian IKU Nilai Sistem Merit Kemenlu

Sumber: AKSI Kemenlu

Kode IKU/SUB IKU		2021	2022		2023	
L1.1.1	Target	250	300	↑	**300**	↔
	Realisasi	276	277	↑	**343,50**	↑
	Capaian	110,40%	92,33%	↓	**114,50%**	↑

IKU L1.1.1 Nilai Sistem Merit Kemenlu merupakan indikator kinerja yang pertama kali digunakan pada Tahun 2021. Hal ini merupakan cerminan prioritas politik luar negeri "Penguatan Infrastruktur Diplomasi" yang tercantum pada Rencana Strategis Kemenlu 2020-2024. Nilai Sistem Merit Kemenlu ditetapkan sebagai indikator kinerja utama sebagai bentuk komitmen Kemenlu untuk meningkatkan kualitas manajemen SDM berbasis merit sesuai dengan amanat UU Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan turunannya.

Pada tahun 2023, Kemenlu berhasil mendapatkan Nilai Sistem Merit sebesar 343,5. Hampir seluruh Aspek Penilaian Sistem Merit mengalami kenaikan, kecuali aspek Pengadaan yang mendapat nilai tetap dan Aspek Sistem Informasi. Nilai Sistem Merit diperoleh dari Surat Keputusan Komisi ASN Nomor 165/KEP.KASN/C/XI//2023 tanggal 30 November 2023.

Target IKU Nilai Sistem Merit 2023 adalah 300 (skala 400) sama dengan target tahun 2022, namun naik 50 poin dari target tahun 2021. Penetapan target 2023 mempertimbangkan realisasi tahun 2021. Realisasi IKU Nilai Sistem Merit Kemenlu tahun 2023 sebesar 343,50, naik 66,5 poin dari tahun sebelumnya sebesar 277 dengan kenaikan 1 poin dari 276.

Capaian IKU ini pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 22,17% dari capaian 2023 sebesar 114,50% dibandingkan capaian 2022 sebesar 92,33%. Perbandingan nilai sistem merit dilakukan sejak IKU diadopsi oleh Kemenlu pada tahun 2021.

Perbandingan Kinerja dengan Realisasi Nasional

Tabel III.54
Perbandingan IKU L1.1.1 Nilai Sistem Merit Kemenlu dengan Rata-Rata Nasional

Sumber: Komisi ASN, data diolah Kemenlu

Kode IKU/SUB IKU		2021	2022	2023
L1.1.1	Kemenlu	**0,67** ↑	**0,68** ↑	**0,84** ↑
	Rata-rata Nasional	0,46	0,50	0,54

Sebagaimana digambarkan pada tabel, periode tahun 2021 hingga 2023 indeks sistem merit Kemenlu selalu berada di atas rata-rata nasional yaitu 0,67 dari 0,46 (tahun 2021), 0,68 dari 0,50 (tahun 2022) dan 0,84 pada tahun 2023.

Realisasi IKU L1.1.1 Nilai Sistem Merit Kemenlu dibandingkan dengan rata-rata nasional K/L tahun 2020-2023. Terlihat pada tabel menunjukkan bahwa nilai sistem merit sudah mencapai target dan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai pada rata-rata nasional. Tabel menunjukkan bahwa nilai sistem merit Kemenlu selalu berada di atas rata-rata nasional. Tabel perbandingan dengan rata-rata nasional menggunakan konversi satuan dari nilai menjadi indeks.

> Nilai sistem merit sudah mencapai target dan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai pada rata-rata nasional

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Beberapa komponen penentu dalam peningkatan nilai sistem merit Kemenlu berdasarkan hasil evaluasi Komisi ASN, yaitu:

01
Aspek Perencanaan Kebutuhan

Pada aspek ini terjadi **kenaikan sebesar 5 poin** dibandingkan pencapaian tahun 2022. Sumbangsih atas kenaikan hasil penilaian ini diperoleh dari selesainya pengundangan Permenlu Nomor 15 Tahun 2022 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di lingkungan Kemenlu pada tanggal 14 November 2023. Aturan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kebutuhan dan pemenuhan ASN Kemenlu untuk jangka menengah (5 tahun).

Kemenlu telah menetapkan peta jabatan tahun 2022 dan rencana kebutuhan pegawai (2024-2028) yang disesuaikan dengan analisa jabatan dan Analisa beban kerja tahun 2023 dan telah menyampaikan kelengkapan data dukung dari seluruh sub aspek perencanaan kebutuhan sehingga mendapatkan nilai maksimal pada aspek tersebut.

02
Aspek Pengadaan

Hasil penilaian pada aspek Pengadaan tahun 2023 **tidak terdapat kenaikan**. Aspek Pengadaan terdiri dari 5 sub Aspek. Pada **sub aspek Ketersediaan rencana pengadaan ASN** terdapat kenaikan nilai karena Kemenlu telah menyusun rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan sesuai dengan Permenlu Nomor 15 Tahun 2022 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri. Selain itu pada **sub aspek Persentase CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar** terdapat penurunan dikarenakan tidak terdapat pengangkatan CPNS menjadi PNS pada tahun 2023.

Untuk mempertahankan kualitas pengadaan ASN Kemenlu pedoman pelaksanaan proses rekrutmen dan seleksi ASN Kemenlu menggunakan sertifikasi Quality Management System ISO 9001:2015 yang setiap tahunnya dilakukan pemantauan oleh British Standard Institution (BSI) selaku pemegang lisensi sertifikat ISO 9001:2015.

03
Aspek Pengembangan Karir

Secara akumulasi adanya **kenaikan 25 poin** pada Aspek Pengembangan Karir. Terdapat 8 sub aspek dari total 10 sub aspek Pengembangan Karir dengan **kenaikan 30 poin**. Peningkatan tersebut diperoleh atas upaya-upaya Kemenlu melakukan perbaikan pada berbagai hal diantara sebagai berikut:

- Telah diperolehnya persetujuan Kemen PANRB atas Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di lingkungan Kemenlu.
- Terselesaikannya Kepmenlu Nomor 01/B/KP/PDM/10/2023/01 Tahun 2023 tentang Pedoman Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri.
- Telah dilakukan pemetaan talenta untuk menyusun rencana suksesi melalui aplikasi manajemen talenta.
- Telah dilakukan peningkatan kualitas asesor, pengelolaan *database* dan pemanfaatan hasil UKOM teknis sebagai masukan untuk pengembangan karir pegawai.
- Telah menyusun analisis kesenjangan kompetensi, kualifikasi pendidikan dan kinerja.
- Telah menyusun Human Capital Development Plan (HCDP) berdasarkan analisis kesenjangan yang telah dibuat.
- Telah melakukan praktek pertukaran pegawai dengan negara mitra dalam konteks keketuaan ASEAN.
- Telah melakukan *coaching* dan *mentoring* pada beberapa kegiatan pengembangan kompetensi pegawai seperti Latsar CPNS, Sekdilu, Sesdilu dan Sesparlu serta melaksanakan *coaching* dalam rangka penyelesaian masalah kinerja pegawai.

Sub aspek **Ketersediaan *Talent Pool* yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja** mengalami **penurunan 5 poin**. Hal ini dikarenakan Kemenlu belum secara penuh memasukkan kriteria penilaian kinerja dan potensi ke dalam perhitungan *talent pool*. Pada penilaian kinerja pegawai 2023 yang berlangsung pada 2024 Kemenlu mencoba menerapkan distribusi kinerja pegawai sesuai dengan SE Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 sehingga nilai kinerja pegawai dapat dimanfaatkan secara optimal pada *talent pool*. Akan tetapi secara keseluruhan nilai aspek Pengembangan Karir mengalami peningkatan.

04
Aspek Promosi dan Mutasi

Kenaikan sebesar 12,5 poin pada aspek Promosi dan Mutasi berasal dari terselesaikannya Kepmenlu Nomor 01/B/KP/PDM/10/2023/01 Tahun 2023 tentang Pedoman Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri. Kepmenlu tersebut menjadi acuan pelaksanaan promosi dan mutasi serta manajemen talenta di lingkungan Kemenlu .

05
Aspek Manajemen Kinerja

Pada aspek Promosi dan Mutasi terdapat **kenaikan sebesar 20 poin** atas upaya Kemenlu dalam mengelola *database* penilaian kinerja pegawai, melakukan sosialisasi dan mengawal proses *cascading* kinerja organisasi ke pegawai, serta membuat analisis kesenjangan kinerja pegawai untuk penilaian kinerja pegawai tahun 2022.

06
Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin

Kenaikan sebesar 5 poin pada aspek ini diperoleh atas upaya Kemlu di beberapa unit organisasinya untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan pemberian penghargaan terhadap pegawai berprestasi, diantaranya adalah penghargaan: Hasan Wirayudha Award bagi Pegawai Kemenlu dan Perwakilan RI berkontribusi dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri; penghargaan bagi Tim Audit terbaik sesuai dengan kriteria penilaian merujuk pada Kepirjen Nomor 01441/SK/PW/12/2018/11 sejak tahun 2018.

Faktor lain adalah Kemenlu telah melaksanakan sosialisasi Permenlu Nomor 11 Tahun 2022 tentang 11 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Luar Negeri secara masif.

07
Perlindungan dan Pelayanan

Pada aspek ini, terjadi **peningkatan sebesar 2 poin** pada Sub aspek **Kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional)**. Kenaikan ini diperoleh melalui upaya Kemlu dalam memberikan program pelatihan pra-Pensiun bagi Pegawai Kemenlu dan pengelolaan *database* dokumen perlindungan dan pelayanan yang diberikan kepada pegawai.

Selain itu Kemenlu senantiasa melakukan upaya perbaikan perlindungan dan pelayanan pegawai, termasuk diantaranya membuat kebijakan perlindungan pegawai melalui Permenlu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Fasilitas Sewa Rumah Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, kebijakan ini mengatur mengenai standar minimal fasilitas sewa rumah yang diberikan.

08
Sistem Informasi

Pada aspek ini terjadi **penurunan perolehan nilai sebanyak 3 poin**. Hal ini dikarenakan proses integrasi aplikasi kepegawaian di Kemenlu dan Aplikasi Kepegawaian Nasional belum terlaksana secara menyeluruh. Namun demikian, upaya integrasi ini masih terus berlangsung meskipun baru terlaksana pada beberapa modul kepegawaian.

Pada tahun 2023, Kemenlu berhasil mendapatkan Nilai Sistem Merit sebesar 343,5 dari sebelumnya hanya 277 yaitu meningkat 66,5 poin. Hampir seluruh Aspek Penilaian Sistem Merit mengalami kenaikan, kecuali aspek Pengadaan yang mendapat nilai tetap dan Aspek Sistem Informasi mengalami penurunan sebesar 3 poin. Secara keseluruhan Kemenlu berhasil melakukan peningkatan Nilai Sistem Merit pada beberapa Aspek Penilaian. Rincian peningkatan/penurunan Nilai pada beberapa Aspek Sistem Merit dapat dilihat pada gambar berikut:

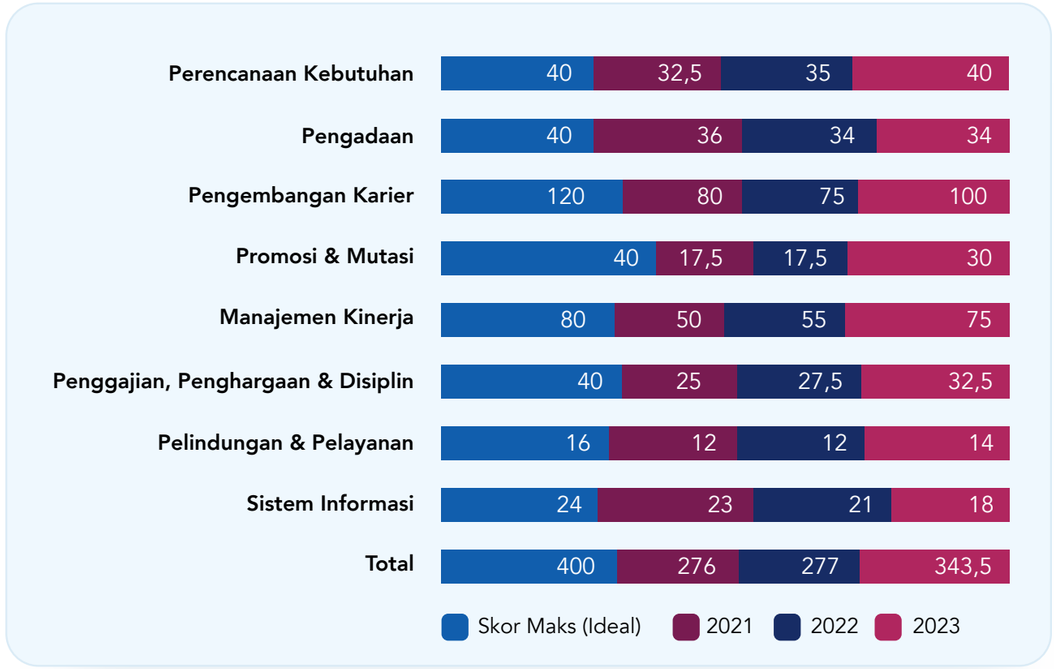

Gambar III.120
Aspek Penilaian Nilai Sistem Merit
(Sumber: Surat Keputusan Komisi ASN tentang Nilai Sistem Merit Kemenlu, data diolah Kemenlu)

Berikut ini disajikan diagram *fishbone* sub-aspek yang memengaruhi capaian kinerja Nilai Sistem Merit Kemenlu Tahun 2023:

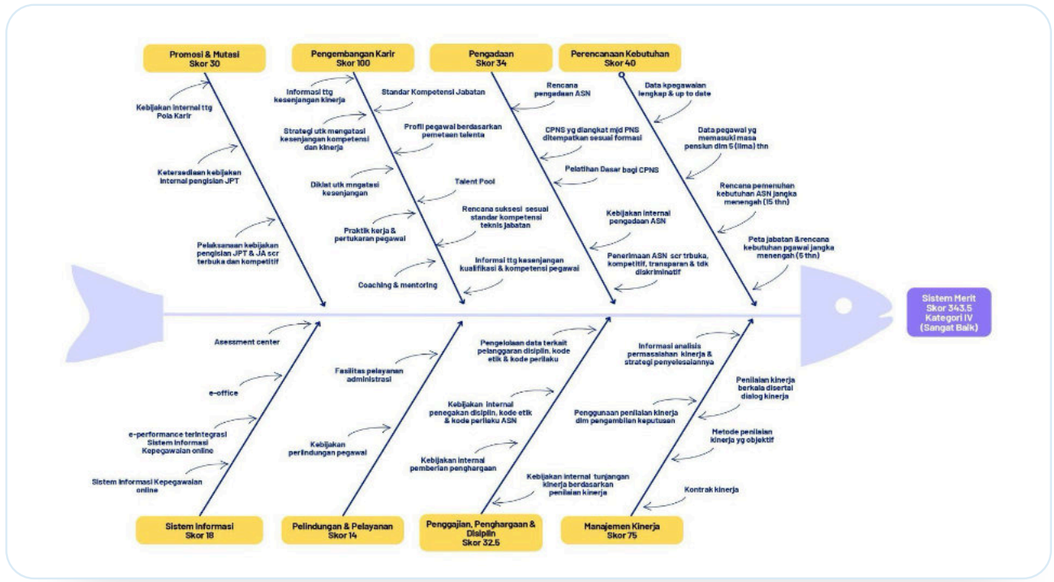

Gambar III.121
Diagram *fishbone* Sub-Aspek Capaian Kinerja Nilai Sistem Merit Kemenlu Tahun 2023
(Sumber: Surat Keputusan Komisi ASN tentang Nilai Sistem Merit Kemenlu, data diolah Kemenlu)

Kemenlu mendapatkan 3 (tiga) penghargaan dari Komisi ASN pada tanggal 6 Desember 2023 di Yogyakarta, yang terdiri atas:

Nilai Sistem Merit 343,5

Kategori "Sangat Baik"

Indeks Kualitas Pengisian JPT

Nilai 88,8 Kategori "Baik"

Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Norma Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku

Nilai 348 Kategori "Patuh"

Selain itu, sepanjang tahun 2023 Kemenlu mendapatkan beberapa penghargaan Kepegawaian, salah satunya adalah 2 (dua) penghargaan dari BKN atau BKN Award pada 30 Mei 2023 berupa:

Peringkat 1

Kementerian Tipe Kecil Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian

Peringkat 2

Kementerian Tipe Kecil Kategori Penerapan Pemanfaatan Data-Sistem Informasi dan CAT

Kendala dan Tantangan

Di balik keberhasilan Kemenlu dalam memperoleh penghargaan-penghargaan tersebut, terdapat kendala dan tantangan yang dihadapi yaitu Kemenlu belum dapat meningkatkan nilai pada Aspek Pengadaan dan Aspek Sistem Informasi, bahkan nilai pada Aspek Sistem Informasi mengalami penurunan. Kendala dan tantangan utama yaitu:

01

Data Dukung sistem Merit Masih Terpisah

Data dukung terkait dengan penerapan sistem Merit di Kemenlu masih terpisah.

02

Belum Ada Koordinasi Intensif

Belum ada koordinasi intensif antar unit kerja yang mengawal terkait dengan sistem merit.

Upaya Perbaikan

Upaya yang telah dilakukan Kemenlu untuk mengatasi kendala dan tantangan yaitu:

01

Menetapkan Sistem Merit sebagai Indikator Kinerja

Menetapkan Sistem Merit sebagai indikator kinerja yang dituangkan pada PK Unit kerja terkait. Hal ini menjadi komitmen bersama untuk memenuhi seluruh persyaratan aspek penilaian sistem merit.

02

Rapat Koordinasi dengan Unit Kerja Terkait

Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan unit kerja terkait secara intensif dan berkonsultasi kepada Komisi ASN serta diperkuat oleh Tim Penilaian Sistem Merit Kemenlu.

Selain kendala dan upaya perbaikan yang telah disebutkan di atas, Kemenlu juga melakukan analisis risiko berupa identifikasi dan mitigasi risiko atas penerapan sistem merit, sebagai berikut:

Tabel III.55
Risiko dan Mitigasi Risiko Manajemen ASN Berbasis Merit Kemenlu

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
01.	Data dukung tidak tersaji secara maksimal meskipun secara praktek, proses bisnis sudah dilakukan di institusi Kemenlu secara benar sesuai kaidah pada aspek tertentu sistem merit.	Penggunaan metode *check list* mengenai data dukung yang diperlukan sehingga siap disajikan pada saat penilaian. Koordinasi erat seluruh satuan kerja di Kemenlu secara periodik untuk mensinkronkan data-data dukung yang diperlukan dalam penerapan sistem merit.
02.	Kebijakan institusi yang berjalan namun belum memiliki dasar hukum/aturan internal dari institusi tersebut.	Perlu dibuat aturan internal Kemenlu yang mendasari kebijakan seperti pedoman manajemen karir, Human Capital Development Plan dan standar kompetensi teknis Jabatan Pimpinan Tinggi serta pedoman magang/ pertukaran pegawai antar instansi.
03.	Belum terintegrasinya sistem manajemen SDM di Kemenlu dengan sistem nasional.	Perlu dilakukan koordinasi secara intensif antara Kemenlu dengan institusi Badan Kepegawaian Negara untuk mengintegrasikan sistem internal Kemenlu dengan sistem nasional seperti aplikasi penilaian kinerja (e-Kinerja), SIASN, aplikasi pangkat, disiplin, dll.

Analisis Program Pendukung Capaian

Penyelenggaraan program kegiatan untuk meningkatkan Nilai Sistem Merit Kemenlu sepanjang tahun 2023, meliputi:

01 **Monitoring dan Evaluasi Triwulanan dan Semesteran**

Kemenlu meningkatkan intensitas konsultasi dan pendampingan dari Komisi ASN secara berkala untuk melakukan evaluasi atas kemajuan penyempurnaan penerapan sistem merit di Kemenlu melalui kegiatan *monitoring* dan evaluasi triwulanan dan semesteran.

02 **_Benchmarking_ ke Institusi Pemerintahan Terkait**

Melakukan *benchmarking* ke institusi pemerintahan terkait di Australia, Selandia Baru, Korea Selatan dan Jepang untuk peningkatan pemahaman terkait pengelolaan ASN berbasis merit.

03 **Percepatan Finalisasi Kebijakan Terkait dengan Pengelolaan ASN Berbasis Sistem Merit**

Kemenlu mendorong percepatan finalisasi beberapa kebijakan terkait dengan pengelolaan ASN berbasis sistem merit diantaranya yakni Permenlu Nomor 15 Tahun 2022 tentang Jabatan, Kelas Jabatan dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri; Kepmenlu Nomor 01/B/KP/PDM/10/2023/01 Tahun 2023 tentang Pedoman Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri; Kamus dan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di lingkungan Kemenlu; dan Human Capital Development Plan (HCDP).

04 **Pelaksanaan Continuing Assessment Visit (CAV) Audit**

Melalui pelaksanaan Continuing Assessment Visit (CAV) Audit sebagai rangkaian dari sertifikasi ISO 9001:2015 untuk diklat Sekdilu, Sesdilu, Sesparlu dan diklat Penerjemah Bahasa Asing (*Interpreter*) Kemenlu juga terus menjaga komitmen untuk menjadi *Center of Excellence*. Selain itu sertifikasi ISO 9001:2015 juga diperoleh Kemenlu untuk menjaga kualitas pelaksanaan rekrutmen dan seleksi ASN Kemenlu.

05 **Optimalisasi Pemanfaatan Data Kepegawaian**

Melakukan optimalisasi pemanfaatan data kepegawaian dalam rangka penyusunan analisis kesenjangan kompetensi, kualifikasi dan kinerja sebagai bahan untuk penyusunan rekomendasi pengembangan pegawai.

06 **Uji Kompetensi secara Berkala**

Melaksanakan uji kompetensi secara berkala untuk pengisian jabatan dan pemetaan talenta pegawai.

07 **Bimtek untuk Meningkatkan Kualitas Asesor**

Meningkatkan kualitas asesor uji kompetensi teknis untuk JFD, JFPK dan JF PID melalui bimbingan dan pelatihan teknis.

08 ***Review* terkait Kamus dan Standar Kompetensi Teknis**

Melakukan *review* terkait kamus dan standar kompetensi teknis bagi JF Diplomat guna menyesuaikan dengan tuntutan terkini dalam bidang hubungan luar negeri.

09 **Memperoleh Sertifikat Akreditasi**

Kemenlu memperoleh sertifikat akreditasi dari LAN Bintang 1 (satu) dan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi untuk menyelenggarakan Program Pelatihan Dasar Calon PNS.

10 **Pelaksanaan Diklat JF Diplomatik**

Pelaksanaan Diklat JF Diplomatik sepanjang tahun 2023 meliputi Diklat Sesparlu angkatan ke-72 dan ke-73 JF Diplomat Ahli Madya, Diklat Sesdilu angkatan ke-74 dan ke 75 JF Diplomat Ahli Muda secara hybrid dengan peserta dari Satker Pusat maupun Perwakilan, Diklat Sekdilu 43 JF Diplomat Ahli Pertama.

11 **Pelaksanaan Diklat maupun Pelatihan Teknis Non Diplomatik**

Pelaksanaan diklat maupun pelatihan teknis non diplomatik meliputi Diklat JF Penata Kanselerai (PK) dan JF Pranata Informasi Diplomatik (PID) Ahli Pertama, maupun pelatihan teknis bagi PK dan PID hingga Pelaksanaan Diklat JF Auditor.

12 **Pelaksanaan Diklat JF yang Bukan Diampu Kemenlu**

Pelaksanaan Diklat JF yang bukan diampu Kemenlu seperti: Arsiparis, Auditor dan Perencana yang dilaksanakan pada tahun 2023.

13 **Sesdilu Internasional–MIKTA Young Diplomat Programme**

Partisipasi peserta Sesdilu Internasional–MIKTA Young Diplomat Programme baik dalam kegiatan yang berlangsung di kelas maupun dalam kegiatan kunjungan lapangan.

14 **Sosialisasi dan Bimbingan Teknis**

Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis secara intensif terkait penerapan kode etik dan kode perilaku pegawai Kemenlu serta penerapan penilaian kinerja ASN sesuai dengan standar Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022.

Proyeksi Ke Depan

Nilai Sistem Merit tahun 2023 sebesar 343,50 telah masuk kategori "Sangat Baik", ke depan penilaian akan dilakukan kembali oleh Komisi ASN pada 2025. Diproyeksikan untuk tahun 2024 Kemenlu akan menetapkan indikator kinerja baru untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi ASN atas nilai sistem merit Kemenlu 2023, yaitu "Persentase tindak lanjut rekomendasi penguatan sistem merit Kemenlu sebesar 75%", iku baru ini belum tertuang dalam Renstra Tahun 2020-2024.

Walau pada Tahun 2023, Kemenlu telah mencapai bahkan melampaui target Nilai Sistem Merit Tahun 2023, namun Nilai Sistem Merit yang diperoleh Kemenlu Tahun 2023 belum merupakan skor ideal yang dapat diraih. Untuk mencapai skor ideal Sistem Merit, Kemenlu perlu menerapkan langkah-langkah perbaikan yang direkomendasikan oleh Komisi ASN sehingga Nilai Sistem Merit Kemenlu dapat mencapai nilai tertinggi pada masa mendatang.

01. Perencanaan Kebutuhan

Memuktahirkan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan anjab abk dan prioritas pembangunan nasional; tetap mengelola data kepegawaian dalam SIMPEG yang memuat data kepegawaian dengan perbaruan secara mandiri dan berkala.

1. Melakukan pembaharuan secara berkala terkait dengan rencana kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan anjab abk dan prioritas pembangunan nasional.
2. Melakukan pengelolaan data kepegawaian secara lengkap dan *up-to-date* melalui sistem informasi kepegawaian.

02. Pengadaan

1. Melaksanakan evaluasi pasca Latsar CPNS.
2. Mengangkat ASN 100% sesuai dengan unit kerja dan formasi yang dilamar.

03. Pengadaan

1. Menetapkan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) JPT dan JA.
2. Mereviu SKJ dan Kamus Kompetensi Teknis dari ketiga JF yang diampu Kemenlu yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
3. Melaksanakan pemetaan kompetensi secara berkala.
4. Mengelola profil individu pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja termasuk analisis kesenjangan dan area pengembangan dengan memanfaatkan sistem informasi dan diperbarui secara *real time*.
5. Melaksanakan pemetaan talenta untuk seluruh pegawai di setiap level jabatan.
6. Menyusun rencana suksesi yang disesuaikan dengan pola karier instansi, jabatan target, dan kompetensi teknis pegawai.
7. Menyusun dan melaksanakan program pengembangan kompetensi jangka menengah sesuai dengan kebutuhan individu pegawai dan organisasi.
8. Menjadikan Perpustakaan Diplomasi sebagai *one-stop service* dengan menyediakan layanan referensi literatur cetak, digital maupun audio visual yang relevan bagi pengembangan kompetensi seluruh pegawai Kemenlu Pusat maupun Perwakilan. Perpustakaan Diplomasi mendukung upaya Kemenlu untuk menjadi *learning institute/corporate university* dalam pembelajaran diplomasi luar negeri Indonesia bagi seluruh kalangan.
9. Pemanfaatan *Learning Management System* (LMS) internal untuk memantau rekam pembelajaran setiap pegawai Kemenlu dengan pembangunan koneksi LMS dengan SIMSDM dan SIMUKOM yang selanjutnya akan dimanfaatkan untuk penyusunan dokumen HCDP periode berikutnya dan untuk memetakan kompetensi dan talenta pegawai pada aplikasi e-talenta dan e-kinerja Pemanfaatan LMS untuk menjamin pemenuhan hak pegawai ASN Kemlu untuk memperoleh kesempatan pengembangan tiap pegawai per tahun sesuai peraturan dan ketentuan nasional. Terintegrasinya portal LMS dengan portal SIMSDM Kemenlu untuk keperluan manajemen kinerja dan manajemen talenta pegawai Kemenlu.
10. Melaksanakan program pertukaran pegawai serta praktik kerja secara terjadwal dan dievaluasi.
11. Melaksanakan *coaching* dan *mentoring* secara terjadwal dan dievaluasi sesuai kebutuhan individu di unit kerja.
12. Memberikan pelatihan kepada para asesor teknis secara reguler bekerjasama dengan konsultan pihak ketiga maupun dengan instansi terkait.
13. Mengintegrasikan *database* hasil UKOM agar dengan SIMSDM, sehingga dapat diakses oleh unit kerja yang berkepentingan.

04. Promosi dan Mutasi

Pemanfaatan manajemen talenta pada mekanisme seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

05. Manajemen Kinerja

1. Melaksanakan penilaian dan pengayaan kinerja secara periodik triwulanan sesuai dengan perencanaan kinerja secara berjenjang disertai dialog kinerja.
2. Menyusun analisis permasalahan kinerja dan melaksanakan strategi untuk mengatasi permasalahan untuk individu pegawai.
3. Menggunakan hasil penilaian kinerja sebagai salah satu pertimbangan utama dalam pembinaan dan pengembangan karir serta penetapan *talent pool*.

06. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin

1. Menyusun kebijakan internal terkait pemberian tunjangan kinerja pegawai dengan aspek kinerja menjadi aspek utama di samping disiplin kerja.
2. Memprakarsai penyusunan kebijakan pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi secara regular berlaku untuk seluruh pegawai di seluruh unit kerja.
3. Melaksanakan sosialisasi kebijakan internal terkait disiplin dan kode etik kode perilaku pegawai secara berkala serta pembentukan Majelis Kode Etik dan Tim Penegakan Disiplin Instansi.
4. Mengintegrasi pengelolaan data disiplin dan kode etik kode perilaku pegawai dengan SAPK BKN/SIASN.

07. Pelindungan dan Pelayanan

Menyediakan fasilitas pelayanan administrasi kepegawaian dengan seluruhnya memanfaatkan sistem informasi.

08. Sistem Informasi

1. Mengintegrasi secara dua arah sistem informasi data kepegawaian dengan sistem informasi kepegawaian internal maupun eksternal.
2. Menjajaki integrasi e-kinerja BKN dengan sistem informasi pemberian tunjangan kinerja dan pengembangan karier.
3. Memanfaatkan metode *assessment center* atau metode lainnya melalui sistem informasi untuk pemetaan kompetensi seluruh pegawai.
4. Kenaikan Gaji Berkala 2 tahunan secara otomatis dari sistem.

> Untuk mencapai skor ideal Sistem Merit, Kemenlu perlu menerapkan langkah-langkah perbaikan yang direkomendasikan oleh Komisi ASN

Dokumentasi Program Pendukung Capaian IKU L1.1 : Infrastruktur Diplomasi yang Kuat

Gambar III.122
Pendampingan Komisi ASN Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Merit Kemenlu Semester I Tahun 2023 (Jakarta, 31 Juli 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.123
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian BKN Tahun 2023 (Bandung, 30 Mei 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.124
Penerimaan Penghargaan BKN Awards (Jakarta, 4 September 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.125
Piagam Penghargaan atas Penerapan Sistem Merit Kemenlu Tahun 2023

Sumber: Kemenlu

Gambar III.126
Pemberian Piagam Penghargaan atas Penerapan Sistem Merit Kemenlu Tahun 2023 (Yogyakarta, 7 Desember 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.127
Sesdilu Internasional sebagai bagian Program MIKTA Youth Diplomats (Jakarta, 4-11 November 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.128
Magang peserta Diklat Sekdilu 43 pada pertemuan dengan murid Sekolah Indonesia (Kinabalu, 9 Mei 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.129
Sertifikat Akreditasi dari LAN sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi

Sumber: Kemenlu

Gambar III.130
Sertifikat Akreditasi dari LAN sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi Penyelenggara Latsar CPNS

Sumber: Kemenlu

bsi.

Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that: Kementerian Luar Negeri
Biro Sumber Daya Manusia
Jl. Taman Pejambon No. 6,
Jakarta Pusat
Indonesia

Holds Certificate No: FS 664742

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the following scope:

The provision of civil servant recruitment for foreign ministry

For and on behalf of BSI:
Michael Lam - Managing Director Assurance, APAC

Original Registration Date: 2016-12-23
Latest Revision Date: 2022-12-08
Effective Date: 2022-12-23
Expiry Date: 2025-12-22
Page: 1 of 1

...making excellence a habit.

Gambar III.131
Sertifikat ISO 9001:2015 Rekrutmen dan Seleksi ASN Kemenlu

Sumber: Kemenlu

bsi.

Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that: PUSDIKLAT KEMENLU (UPT SESPARLU)
Jl. Sisingamangaraja No. 73
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Indonesia 12120

Holds Certificate No: FS 674421

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the following scope:

The provision of education and training for senior diplomat

For and on behalf of BSI:
Chris Cheung, Head of Compliance & Risk - Asia Pacific

Original Registration Date: 2017-06-20
Latest Revision Date: 2017-06-20
Effective Date: 2017-06-20
Expiry Date: 2020-06-19
Page: 1 of 2

...making excellence a habit.

bsi.

Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that: PUSDIKLAT KEMENLU
(Bidang Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan)
Jl. Sisingamangaraja No.73
RT.2/RW.6, Gunung, Kby. Baru
Kota Jakarta Selatan
Indonesia 12120

Holds Certificate No: FS 674424

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the following scope:

The Provision of training services on introduction/promotion to Indonesian language and culture for foreign diplomats

For and on behalf of BSI:
Chris Cheung, Head of Compliance & Risk - Asia Pacific

Original Registration Date: 2017-08-01
Latest Revision Date: 2017-08-01
Effective Date: 2017-08-01
Expiry Date: 2020-07-31

Gambar III.132
Sertifikat ISO 9001:2005

Sumber: Kemenlu

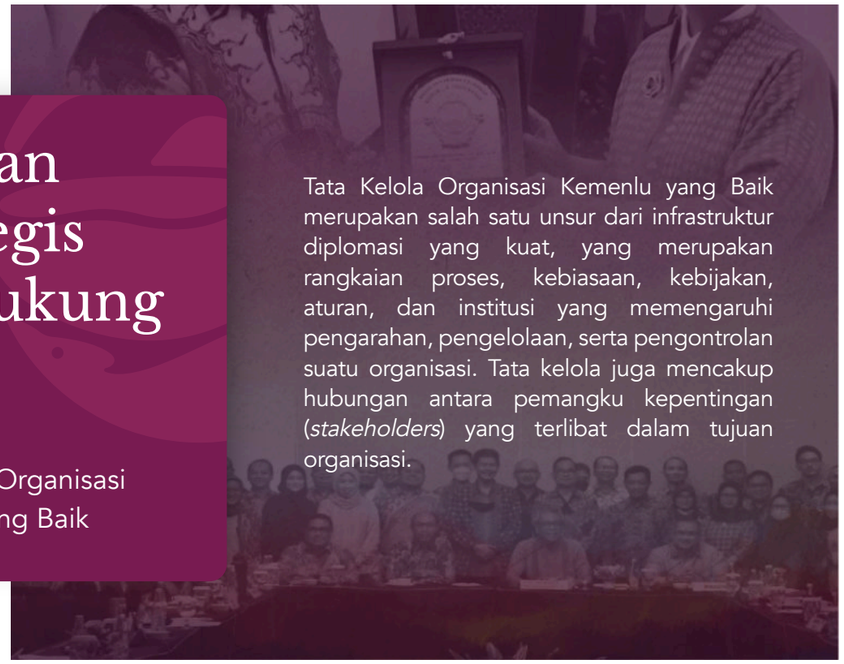

Sasaran Strategis Pendukung L1.2 :

Tata Kelola Organisasi Kemenlu yang Baik

Tata Kelola Organisasi Kemenlu yang Baik merupakan salah satu unsur dari infrastruktur diplomasi yang kuat, yang merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat dalam tujuan organisasi.

Sasaran Strategis (SS) Pendukung "Tata Kelola Organisasi Kemenlu yang Baik" merupakan pernyataan kondisi yang akan dicapai terkait pengelolaan organisasi Kemenlu pada periode 1 (satu) tahun. Tata Kelola Organisasi Kemenlu yang baik merupakan salah satu unsur dari infrastruktur diplomasi yang kuat yang merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi.

SS Pendukung "Tata Kelola Organisasi Kemenlu yang Baik" diukur tingkat keberhasilan pencapaian melalui 2 (dua) IKU:

IKU 1:
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenlu

IKU ini mengukur sejauh mana Kemenlu telah melakukan perubahan penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

IKU 2:
Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu

IKU ini mengukur sejauh mana Kemenlu telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Analisis IKU L1.2.1

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenlu

Deskripsi IKU

IKU ini mengukur sejauh mana Kemenlu telah melakukan perubahan penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB. Di tahun 2023, guna memastikan terwujudnya birokrasi yang berkelas dunia sesuai dengan Grand Design RB Tahun 2010-2025, serta berdasarkan evaluasi Kemen PANRB atas pelaksanaan peta jalan (*Road Map*) RB 2020-2024, pemerintah Indonesia melakukan penajaman peta jalan RB 2020-2024. Penajaman ini dilakukan guna meningkatkan sinergitas dalam pencapaian tujuan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya ditetapkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Terdapat perbedaan dalam Road Map sebelum dan sesudah adanya penajaman. Tujuan yang terdapat pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman adalah 'Pemerintahan yang baik dan bersih', sedangkan tujuan dari Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman adalah 'Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik'. Pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman, penilaian yang dilakukan mencakup hasil evaluasi capaian 8 (delapan) program area perubahan RB baik pada komponen proses maupun hasil berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB.

Setelah penajaman, area penilaian diperluas tidak hanya berfokus pada 8 (delapan) area tersebut namun pada pelaksanaan kegiatan percepatan, yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

Penajaman Road Map RB 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25/2020 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi 2020-2024 juga memperkenalkan istilah '*double track*' fokus RB. Fokus penyelesaian isu hulu disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir disebut dengan RB Tematik. "*Double track*' fokus RB ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, dan juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas pembangunan nasional.

> Penajaman ini dilakukan guna meningkatkan sinergitas dalam pencapaian tujuan Pembangunan Nasional

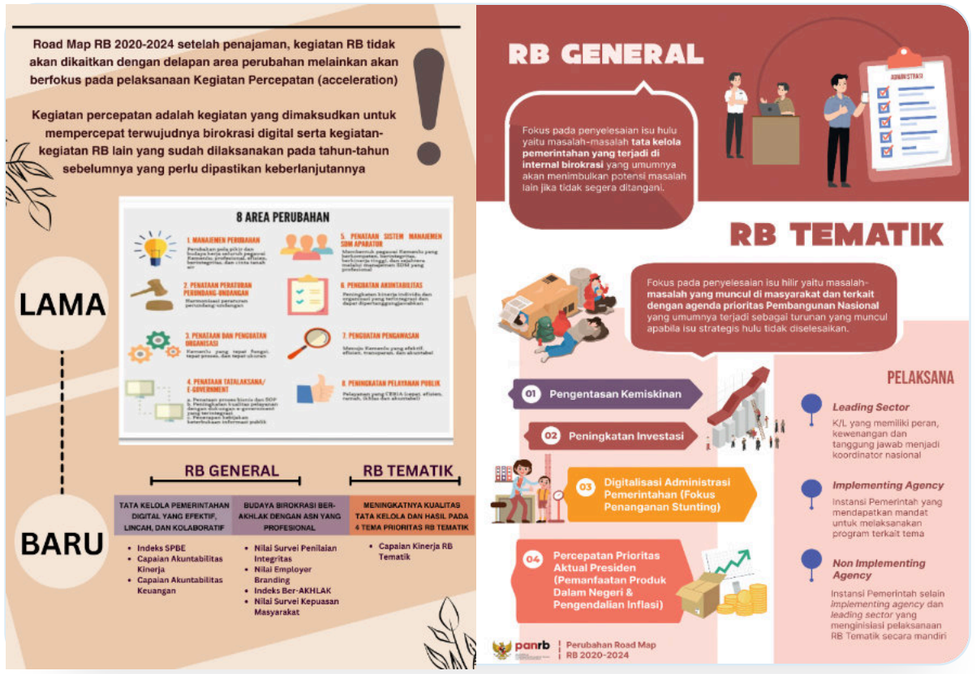

Gambar III.133
Perubahan Road Map RB 2020-2024

Nilai Reformasi Birokrasi mencakup penilaian yang tercantum di dalam Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 terkait penetapan RB General yang diselaraskan dengan Sasaran Strategis Instansi 2023-2024 dituangkan dalam bentuk Peta Jalan RB kedalam Rencana Aksi, Rencana Kegiatan Utama (Tema Kegiatan, Indikator Kinerja, Capaian dan Target) dan penetapan RB Tematik yang selanjutnya klaim capaian tersebut ditandai dengan peningkatan investasi berdasarkan tindak lanjut hasil dari Presidensi Indonesia di Forum G20 dan Keketuaan Indonesia pada KTT ASEAN. Klaim tersebut dituangkan dalam bentuk Road Map RB Tematik (Rencana Aksi, Target Rencana Aksi, Realisasi dan Capaian *Output*).

Tahun 2023 adalah tahapan ketiga (2 tahun terakhir) dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) nasional periode 2020-2024, yang mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010–2025. Sasaran pelaksanaan RB dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) adalah ditujukan untuk peningkatan secara terus menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan RB dari lima tahun kedua sebelumnya (2015-2019), untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Pada tahapan akhir ini, pelaksanaan RB diharapkan menghasilkan level *world class bureaucracy* yang dicirikan antara lain pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan memiliki *outcome* yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pada periode terakhir Grand Design RB 2020-2025 diharapkan mampu melakukan percepatan pembangunan RB sehingga visi RB dalam *Grand Design*-nya terealisasi sesuai tujuan dan sasaran.

Gambar III.134
Sembilan Kebijakan Birokrasi Digital

Perhitungan IKU Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenlu menggunakan formula sebagai berikut:

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenlu oleh Kemen PANRB

Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi adalah nilai yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas upaya suatu organisasi pemerintah untuk melakukan pembaharuan, pelaksanaan dan kedalaman terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mencapai sasaran RB yang berkualitas yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Birokrasi yang kapabel.
3. Pelayanan publik yang prima.

Disamping itu, evaluasi tersebut juga untuk memberikan saran perbaikan, menilai kualitas implementasi kebijakan reformasi birokrasi dan dampaknya dalam menganalisis dan menetapkan tujuan-tujuan dari indikator penilaian RB General dan Tematik, yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan upaya-upaya konkrit dari setiap organisasi pemerintah/ instansi dalam mempercepat kontribusi nyata dari pelaksanaan RB.

Nilai evaluasi RB Kemenlu diperoleh dari Laporan Kinerja Evaluasi (LKE) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kemen PANRB. Terdapat perubahan interpretasi/predikat pada penilaian evaluasi RB oleh Kemen PANRB yang ditetapkan dalam beberapa Kategori mulai dari AA hingga D pada tabel III.56.

> “pelaksanaan RB diharapkan menghasilkan level world class bureaucracy yang dicirikan antara lain pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi

Tabel III.56
Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

Sumber: Kemen PANRB

Kategori	Permen PANRB 30 Tahun 2018		Permen PANRB 26 Tahun 2020		Permen PANRB No 9 Tahun 2023		
	Nilai/Angka	Interpretasi	Nilai/Angka	Interpretasi	Kategori	Nilai/Angka	Interpretasi
AA	>90-100	Istimewa	>90-100	Istimewa	AA	>100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan	>80-90	Sangat Baik	A	>80-100	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik	>70-80	Baik	A-	>80-100	Memuaskan dengan Catatan
B	>60-70	Baik, perlu sedikit perbaikan	>60-70	Cukup Baik	BB	>70-80	Sangat Baik
CC	>50-60	Cukup (memadai)	>50-60	Cukup	B	>60-70	Baik
C	>30-50	Kurang	>30-50	Buruk	CC	>50-60	Cukup
D	>0-30	Sangat Kurang	>0-30	Sangat Buruk	C	>30-50	Kurang
					D	0-30	Sangat Kurang

Informasi Kinerja

Tabel III.57
Capaian IKU L1.2.1 Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenlu

Sumber: AKSI Kemenlu

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenlu	Nilai Evaluasi RB dinilai oleh Kemen PANRB	**79,46***

Target	Realisasi	Capaian
81	79,46*	98,09%

*) *menggunakan penilaian hasil evaluasi RB tahun 2022.*

Informasi Nilai Hasil Evaluasi RB Kemenlu tahun 2023 belum diperoleh hingga batas waktu penyampaian LKj Kemenlu kepada Kemen PANRB pada 29 Februari 2024

Pada tahun 2023, target IKU "Nilai Evaluasi RB Kemenlu" ditargetkan mencapai nilai 81 dengan realisasi kinerja sebesar 79,46 atau Sangat Baik (BB). Berdasarkan realisasi tersebut, capaian IKU Nilai Evaluasi RB Kemenlu tahun 2023 adalah sebesar 98,09%.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kemenlu telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan *reform*.

Rincian hasil evaluasi RB Kemenlu adalah sebagai berikut:

Tabel III.58
Capaian Komponen RB Kemenlu Tahun 2019-2023

Sumber: LHE RB Kemen PANRB Nomor B/677/RB.06/2022

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2021	Nilai 2022
A. Komponen Pengungkit				
1.	Pemenuhan	20,00	15,87	16,29
2.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,43	6,76
3.	*Reform*	30,00	21,73	21,81
	Total Komponen Pengungkit (A)	**60,00**	**44,03**	**44,86**
B. Komponen Hasil				
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,45	8,52
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,28	9,48
3.	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,84	8,51
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,28	8,09
	Total Komponen Hasil (B)	**40,00**	**33,85**	**34,59**
	Indeks RB (A+B)	**100,00**	**77,88**	**79,46**

Untuk Hasil Antara, penilaian didasarkan pada pengukuran oleh instansi *leading sector,* dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.59
Penilaian Hasil Antara RB Kemenlu

Sumber: LHE Kemen PANRB

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022
Komponen Pengungkit				
1.	Sistem Merit	0-400	276	277
2.	Profesionalitas ASN	0-100	38,16	73,38
3.	Kualitas Kebijakan	0-100	-	51,72
4.	Kualitas Pengelolaan Aset	0-4	2,86	2,91
5.	Implementasi SPBE	0-5	2,87	2,87
6.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	15,20	28
7.	Kinerja Pelaksanaan Anggaran	0-100	95,64	89,62
8.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	4,18	4,51
9.	Kapabilitas APIP	0-5	3	3
10.	Maturitas SPIP	0-5	3	3
11.	Kepatuhan terhadap standar Pelayanan Publik	0-100	-	78,92
12.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	78,19	73,34
13.	Reformasi Hukum	0-100	-	82,65

Sementara pada komponen hasil, menunjukkan bahwa Kemenlu memperoleh nilai yang Baik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.60
Penilaian Komponen Hasil RB Kemenlu

Sumber: LHE Kemen PANRB

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Opini BPK	Opini	WTP	BPK
2.	Opini BPK	0-100	78,81	Kemen PANRB
3.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	0-100	94,80	Kemen PANRB
4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	85,07	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh KPK
5.	Survei Internal Organisasi	0-100	86,31	2,87
6.	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data

Dalam mencapai target IKU, Kemenlu telah menindaklanjuti rekomendasi Kemen PANRB atas hasil evaluasi RB Kemenlu antara lain:

- Rencana kerja reformasi birokrasi level lembaga diikuti seluruh unit kerja sehingga dapat diketahui capaian target dan tindakan perbaikan selanjutnya serta melakukan internalisasi reformasi birokrasi secara menyeluruh.
- Melaksanakan *assessment* kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi selanjutnya menerapkan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam PermenPANRB Nomor 40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Audit dalam Manajemen ASN.
- Melakukan reviu kembali dan menyempurnakan peta identifikasi risiko serta rencana tindak pengendalian khususnya pada hal yang bersifat strategis sampai ke tingkat unit kerja.
- Meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas sehingga dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui berbagai inovasi sistem pengawasan dan sistem integritas di tingkat unit kerja.
- Melakukan pengamatan dan analisis terhadap inovasi yang telah dikembangkan untuk dapat mengetahui dampak yang diberikan terhadap kualitas layanan publik.
- Melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik dan penerapan integritas serta memperbaiki strategi komunikasi dan penyebaran informasi yang lebih efektif agar masyarakat dan *stakeholders* terkait mengetahui dan merasakan upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Kemenlu dalam meningkatkan integritas.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.61
Target, Realisasi, dan Capaian IKU Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenlu

Kode IKU/ SUB IKU		2020	2021	2022	2023
L1.2.1	Target	85%	81% ↓	81% ↔	**81%** ↔
	Realisasi	76,81%	77,88% ↑	79,46% ↑	**79,46%** ↔
	Capaian	90,36%	96,15% ↑	98,09% ↓	**98,09%** ↔

**menggunakan nilai LHE RB Tahun 2022*

Kemajuan pelaksanaan RB di Kemenlu dapat dilihat dari konsistensi kenaikan hasil nilai evaluasi RB Kemenlu dengan predikat BB (sangat baik) dalam periode Renstra 2020-2024, yaitu dengan nilai 76,81 (2020); 77,88 (2021); dan 79,46 (2022).

Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenlu berada di atas rata-rata nasional Kementerian/ Lembaga tahun 2020-022 sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Pada penilaian RB tahun 2022 yang digunakan sebagai realisasi IKU tahun 2023, Kemen PANRB menetapkan nilai evaluasi RB Kemenlu sebesar 79,46. Nilai ini meningkat 1,58 poin dibandingkan tahun 2021 sebesar 77,88, atau berada pada kategori Baik (BB).

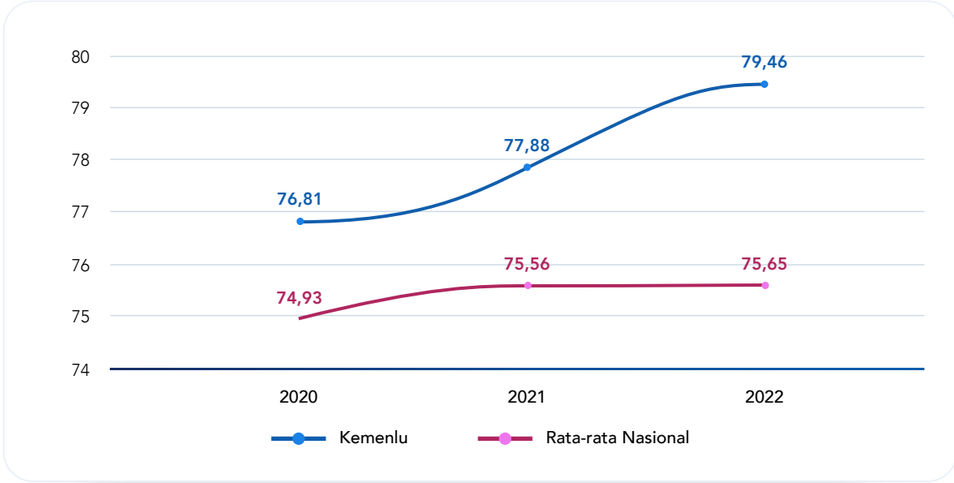

Gambar III.135
Nilai RB Kemenlu dibandingkan dengan Rata-rata Nasional Tahun 2020-2022

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Keberhasilan capaian IKU L1.2.1 didukung dengan komitmen pimpinan pada berbagai tingkatan organisasi yang memicu berbagai inovasi manajemen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin membaik ditambah usaha dan kerja keras seluruh pegawai Kemenlu dalam mewujudkan birokrasi yang lincah, cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan publik.

Hal tersebut juga mendukung pelaksanaan birokrasi Kemenlu sehingga dapat mengendalikan gratifikasi, benturan kepentingan dan pengaduan masyarakat secara lebih baik guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Kendati belum mencapai target yang ditetapkan, realiasi iKU adalah lebih tinggi dari tahun sebelumnya, beberapa faktor penyebab kenaikan nilai RB Kemenlu sebagai berikut:

01

Peningkatan pada Beberapa Indikator Berdasarkan Peta Jalan RB 2020-2024

Peningkatan pada beberapa indikator berdasarkan Peta Jalan RB 2020-2024 sesuai dengan Permen PANRB 3 tahun 2023, meliputi antara lain Indeks SPBE, Indeks Reformasi Hukum, Indeks Kualitas Kebijakan, Indeks Nilai Sistem Merit, Kualitas Pengelolaan Aset, Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dan Indeks Pengelolaan Publik.

02

Menindaklanjuti Rekomendasi atas Evaluasi RB

Kemenlu terus berupaya untuk meningkatkan capaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dengan menindaklanjuti rekomendasi atas Evaluasi RB oleh Kemen PANRB, dengan detil sebagai berikut:

- Tim Pengelola RB Internal aktif dalam menyusun dan memperbarui Peta Jalan dan Rencana Aksi RB General Kemenlu Tahun 2023-2024. Selain itu, Kemenlu bersama Satker Pengampu telah bekerja sama dalam mempersiapkan parameter dan proses evaluasi 28 indikator RB General di Kemenlu. Kemenlu aktif mengikuti pelaksanaan diseminasi informasi teknis terkait mekanisme evaluasi RB, informasi praktik baik dan mekanisme evaluasi AKIP dan menindaklanjuti dengan kegiatan pembahasan penyusunan narasi "praktik baik" RB Kemenlu tahun 2023 bersama seluruh unit di Kemenlu.

- Penyederhanaan organisasi melalui perampingan struktur dan penguatan jabatan fungsional. Pada tahun 2023 juga akan dilakukan penyesuaian organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemetaan terhadap seluruh produk hukum untuk mengidentifikasi peraturan yang memiliki potensi tumpang tindih atau menghambat proses layanan utama Kemenlu
- Optimalisasi penerapan *e-government* yang terintegrasi dengan menyusun perencanaan *e-government* yang terintegrasi dengan pengembangan SPBE melalui penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), meningkatkan keamanan informasi di lingkungan Kemenlu serta optiimalisasi anggaran TIK yang efisien dan akuntabel.
- Evaluasi berkala peta proses bisnis digital secara menyeluruh sehingga proses kerja di Kemenlu menjadi lebih efektif dan efisien untuk mencapai kinerja yang diharapkan.
- Penyusunan implementasi pengembangan potensi pegawai atau *Human Capital Development Plan* (HCDP), Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi untuk JPT dan JA di Kemenlu, serta pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Talenta hingga integrasi sistem untuk pengembangan karir, penghargaan dan disiplin.
- Revisi Permenlu Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kemenlu dan Perwakilan RI dengan mempertajam aturan terkait perencanaan kinerja hingga evaluasi kinerja pada perwakilan RI.
- Penilaian mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemenlu yang lebih efektif dengan penajaman penerapan Manajemen Risiko (MR) sehingga dapat mengendalikan gratifikasi, benturan kepentingan dan pengaduan masyarakat secara lebih baik guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.

- Senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik yang meningkat yang didukung dengan proses monev, program inovatif serta *platform* informasi terintegrasi sehingga dapat memastikan perbaikan yang berdampak maksimal dan berkelanjutan.
- Peningkatan implementasi Sistem Merit diantaranya Nilai Sitem Merit dengan kategori Sangat Baik, penghargaan terkait dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang berkualitas baik, serta diraihnya 2 (dua) penghargaan dari BKN Award untuk Pengelolaan Manajemen ASN Terbaik.
- Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang semakin meluas dengan 2 unit kerja dan Perwakilan mendapatkan predikat WBK/WBBM.
- Meningkatnya kualitas pengawasan Itjen selaku APIP Kemenlu yang mampu menjadi peringatan dini (*Early Warning System*) adanya praktik penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

Kendala dan Tantangan

Di balik keberhasilan Kemenlu dalam memperoleh penghargaan-penghargaan tersebut, terdapat kendala dan tantangan yang dihadapi yaitu Kemenlu belum dapat meningkatkan nilai pada Aspek Pengadaan dan Aspek Sistem Informasi, bahkan nilai pada Aspek Sistem Informasi mengalami penurunan. Kendala dan tantangan utama yaitu:

01

Belum Optimalnya Pengukuran Renaksi

Belum optimalnya pengukuran Rencana Aksi pada tingkat Pusat maupun Unit Kerja.

02

Kurang Intensifnya Koordinasi kerja

Kurang intensifnya koordinasi kerja Tim Pengelola RB atas perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi RB General dan RB Tematik

03

Belum Berjalannya Strategi Inventarisasi Kebijakan

Belum berjalannya strategi inventarisasi kebijakan dan identifikasi produk-produk hukum serta menyusun strategi untuk mengatur pengelolaannya baik pada tingkat Pusat dan Unit secara maksimal.

04

Belum Sempurnanya Peta Proses Bisnis

Belum sempurnanya Peta Proses Bisnis yang baru untuk dimasukkan pada *Enterprise Architecture* (EA) guna mendukung kinerja organisasi sekaligus pengintegrasian aplikasi-aplikasi untuk mendukung pelayanan yang lebih cepat dan efisien

05

Belum Sempurnanya Peta Proses Bisnis

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) ke Satker Perwakilan RI yang masih belum merata. Perluasan UPG perlu dilakukan guna memastikan terlindunginya hak-hak pelapor terkait tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan *Whistleblowing System* (WBS), menjadikan LHKASN dan LHKPN sebagai bagian dari *know your employee*, membangun forum *sharing knowledge* untuk mengatasi permasalahan intensitas mutasi pegawai

06

Kurang Intensifnya Koordinasi kerja

Rendahnya minat dan komitmen unit/satuan kerja terhadap Pembangunan ZI karena belum sepenuhnya menjadi proiritas kinerja bagi unit kerja di Kemenlu.

07

Kurang Intensifnya Koordinasi kerja

Belum seragamnya format SKM untuk penilaian ZI dan penilaian pelayanan publik sehingga memberikan tantangan Unit Lokus Evaluasi (ULE) pelayanan publik untuk membuat format yang berbeda untuk dua penilaian dari Kementerian PAN RB.

08

Adanya Indikator Penilaian Baru

Adanya indikator penilaian baru yang tidak ada pada indikator penilaian tahun sebelumnya. Hal ini mengakibatkan perlunya improvisasi ULE dalam menyiapkan data dukung dalam memenuhi parameter penilaian evaluator.

Upaya Perbaikan

Untuk menyelesaikan berbagai tantangan dalam upaya pencapaian RB Kemenlu, hal-hal yang telah dilakukan, antara lain:

01

Reminder ke Seluruh Unit pada Awal Tahun

Menyampaikan *reminder* ke seluruh Unit (Satker Eselon I) Kemenlu setiap awal tahun.

02

Rapat Koordinasi Tim Pengelola RB Internal Kemenlu

Melakukan peningkatan melalui rapat koordinasi Tim Pengelola RB Internal Kemenlu serta penyelenggaraaan bimbingan/rapat teknis serta koordinasi terkait pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RB General dan Tematik.

03

Harmonisasi dan Reviu Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kemenlu

Melakukan harmonisasi dan reviu peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemenlu yang telah ditetapkan dan masih berlaku serta mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang perlu dicabut, diubah, atau dibentuk baru

04

Meningkatkan Pemahaman Tentang Penerapan SPB

Meningkatkan pemahaman tentang penerapan SPBE khususnya pada domain arsitektur bisnis, data dan informasi, arsitektur layanan untuk menuju layanan Pemerintahan yang terintegrasi

05

Reminder ke Satker Perwakilan RI terkait pembentukan UPG

Menyampaikan *reminder* ke Satker Perwakilan RI terkait pembentukan UPG serta melakukan koordinasi pemantauan peningkatan penguatan pengawasan pada unit organisasi di Kemenlu (pengelolaan gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, WBS, penanganan benturan kepentingan, pembangunan ZI, serta pelaporan LHKPN dan LHKASN)

06

Pendampingan Unit Kerja WBK/WBM

Melakukan bimbingan teknis, sosialisasi dan pendampingan kepada unit kerja yang mengikuti pengusulan WBK/WBBM.

07

Rapat Koordinasi Tim Pengelola RB Internal Kemenlu

Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan Pelayanan Publik (YanLik) dan Forum Kebijakan Publik (FKP) dan pengolahan data SKM khususnya terkait keikutsertaan dalam evaluasi Pelayanan Publik.

08

Koordinasi untuk Memenuhi Komponen Penilaian RB

Mengkoordinasikan dengan seluruh satker Kemenlu untuk memenuhi komponen penilaian RB sesuai dengan indikator terbaru.

Analisis Program Pendukung Capaian

Program pendukung capaian IKU L1.2.1 terdiri dari berbagai kegiatan dan capaian, baik yang berasal dari Komponen Pengungkit (Proses) maupun Komponen Hasil, sebagai berikut:

01 Penyusunan dan *Updating* Peta Jalan RB 2020-2024

Menindaklanjuti pembentukan Tim RB Kemenlu, Kemenlu berinisiasi aktif untuk melaksanakan internalisasi RB General dan RB Tematik dengan menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) Reformasi Birokrasi (RB) Tematik dan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 pada 13 Maret 2023 di Hotel Le Meridien, dengan Asdep Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I sebagai Narasumber.

Telah dilakukan juga Internalisasi dan penguatan terkait PermenPAN RB Nomor 3 terkait perubahan Peta Jalan RB 2020-2024 dan PermenPAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi RB terus dilakukan bersamaan dengan penyusunan penyesuaian Peta Jalan RB dan Rencana Aksi RB Kemenlu Tahun 2023-2024 serta pembentukan KepSekjen terkait Tim Pengelola RB Internal dan pembentukan Tim Penilai Internal Kemenlu.

02 Deregulasi Kebijakan

Pada aspek deregulasi kebijakan, Kemenlu telah melakukan penyederhanaan regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat. Upaya yang dilakukan melalui penyusunan pedoman tata cara pengelolaan peraturan perundang-undangan, penguatan koordinasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan pembangunan sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2023, Kemenlu memperoleh peningkatan untuk nilai untuk Indeks Kualitas Kebijakan sebesar 65 dengan kategori B (Baik) serta Indeks Reformasi Hukum sebesar 87,22 dengan kategori A (Sangat Baik). Kedua indeks mengalami peningkatan dibandingkan dengan perolehan nilai sebelumnya di tahun 2022.

03 Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kelola

Dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dan tata kelola secara proporsional sesuai kebutuhan tugas guna tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, Kemenlu telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- **Perancangan SOP, Proses Bisnis dan Mekanisme Penyimpanan DEI**

  Dalam memenuhi upaya penyempurnaan organisasi dan tata kelola yang baik, Kemenlu telah melakukan perancangan Standar Operasional Prosedur (SOP), Proses Bisnis dan Mekanisme Penyimpanan Data Economic Intelligence (DEI) Kemenlu. SOP yang disusun meliputi: SOP Aksesibilitas Data DEI, Proses Bisnis, dan Sistematika Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan dan Pengelolaan DEI bersama dengan Satker yang terkait dengan siklus penyusunan dan pengelolaan DEI di Kemenlu, serta SOP Aksesibilitas Publik terhadap Data Hasil Olahan DEI.

- **Peningkatan Digitalisasi Arsip**

  Kemenlu telah melakukan upaya peningkatan kualitas pengelolaan arsip menuju digitalisasi arsip merujuk Keputusan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 392 Tahun 2023. Hal ini didukung dengan keberhasilan Kemenlu dalam memperoleh nilai digitalisasi arsip A dengan kategori memuaskan.

- **Peningkatan Nilai Indeks SPBE**

  Kemenlu dalam meningkatkan Nilai Indeks SPBE telah melakukan penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), meningkatkan keamanan informasi di lingkungan Kemenlu serta optimalisasi anggaran TIK yang efisien dan akuntabel.

  Sedangkan dalam mendukung terlaksananya Evaluasi SPBE, Kemenlu secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan TIK, seperti sosialisasi kebijakan tata kelola SPBE, pembinaan dan pembekalan untuk pegawai Kemenlu yang akan ditugaskan di Perwakilan RI hingga melaksanakan rapat koordinasi serta *monitoring* penerapan SPBE

Di tahun 2023, Kemenlu memperoleh nilai Indeks sebesar 3.26 dengan kenaikan sebesar 0,39 poin dibandingkan Tahun 2021 yaitu sebesar 2,87 dengan predikat "Baik". Nilai tersebut diperoleh dari hasil evaluasi SPBE yang dilakukan dua tahun sekali oleh Kemen PANRB. Penilaian terdiri dari tahapan-tahapan berupa Penilaian Mandiri oleh masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD), Penilaian Eksternal melalui Penilaian Dokumen, Penilaian Interview dan Penilaian Visitasi. Hasil akhir penilaian berupa nilai Indeks SPBE beserta predikatnya diterbitkan melalui Surat Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Kenaikan Nilai Indeks pada 2023

+0,39 Poin

Kemudian, sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional, setiap instansi pemerintah harus menyusun arsitektur SPBE yang mengacu pada kerangka kerja (format dan *software*) yang berlaku secara nasional. Kesamaan kerangka kerja dalam rangka mempermudah pemerintah membangun layanan digital yang terintegrasi baik secara nasional maupun di lingkup instansi masing-masing.

Sesuai kerangka kerja nasional, penyusunan Arsitektur SPBE terdiri atas 2 tahapan utama yaitu penyusunan Arsitektur SPBE *as is* (kondisi saat ini) dan Arsitektur SPBE *to-be* (kondisi masa depan/ perubahan yang diinginkan). Saat ini Kemenlu telah menyelesaikan penyusunan konsep Arsitektur SPBE *as is* Kemenlu dan telah meraih Nilai 4 dari skala nilai 1-5 dari KemenPAN RB.

- **Penerapan Keterbukaan Informasi Publik**

  Kemenlu senantiasa bertekad untuk memberikan informasi publik yang terbaik dan terpercaya melalui portal Kemenlu dan media sosial serta secara aktif melakukan sosialisasi mengenai pelayanan informasi publik sesuai dengan UU KIP. Dalam penerapannya, Kemenlu kembali meraih penghargaan Klasifikasi Badan Publik Informatif (klasifikasi tertinggi) dari hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023. Dengan perolehan nilai 91,96, Kemlu menduduki peringkat ke-18 dari 29 Kementerian yang memperoleh klasifikasi Informatif.

- **Peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)**

  Pada tahun 2023, Kemenlu memperoleh nilai ITKP sebesar 56,01. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 28 poin dibandingkan tahun 2022 (28). Peningkatan tersebut berdasarkan hasil upaya dari Kementerian Luar Negeri yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan upaya peningkatan tingkat maturitas UKPBJ, Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, dan Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ.

04 Percepatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Peningkatan kualitas manajemen SDM Aparatur Kemenlu merupakan prioritas yang penerapannya dilakukan dengan diupayakannya berbagai perbaikan sehingga perkembangannya tercermin pada hasil indeks komponen pengungkit Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Kemenlu yang terus meningkat. Salah satunya dibuktikan melalui penerapan sistem merit dalam manajemen ASN Kemenlu berhasil mendapatkan 3 (tiga) kategori penghargaan, yaitu:

1. Indeks Nilai sistem Merit sebesar 343,5 atau 0,84 dengan predikat "Sangat Baik"
2. Indeks Kualitas Pengisian JPT sebesar 88,8 dengan predikat "Baik"
3. Tingkat Kepatuhan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku dengan nilai 343,5 atau 0,87 dengan predikat "Patuh".

Dengan mendapatkan predikat Sistem Merit "Sangat Baik", maka Kemenlu diberikan kesempatan untuk melakukan pengisian JPT melalui *Talent Pool* dan melalui pedoman Manajemen Karir PNS Kemenlu sesuai Kepmenlu Nomor 01/B/KP/PDM/ 10/2023/01 Tahun 2023. Kemenlu menyempurnakan Sistem Informasi Manajemen SDM dan Sistem Informasi Manajemen Talenta.

Adapun capaiannya yaitu selama tahun 2023, Kemenlu telah mendapatkan 2 (dua) penghargaaan dari BKN atau BKN Award pada 30 Mei 2023 yaitu Peringkat 1 untuk Kementerian Tipe Kecil kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian serta Peringkat 2 Kementerian Tipe Kecil untuk Kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT.

Gambar III.136
Penerimaan Penghargaan BKN Awards, 4 September 2023
(Sumber: Kemenlu)

05 Penguatan Akuntabilitas

Penguatan akuntabilitas meliputi komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Aktivitas penguatan akuntabilitas di Kemenlu antara lain mencakup mekanisme perencanaan kinerja, pengukuran hingga pelaporan kinerja melalui *Balanced Scorecard*.

Pada tahun 2023, Kemenlu memperoleh nilai IKPA sebesar 93,19. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 3,57 poin dibandingkan tahun 2022 (89,62). Dalam tingkat Nasional, Kemenlu berhasil mendapatkan peringkat ke-10 dengan kategori "Sangat Baik". Selain itu di level unit kerja, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Provinsi DKI Jakarta memberikan penghargaan kepada KBRI Singapura sebagai peringkat 1 dengan capaian IKPA nilai 100 untuk Satker dengan Pagu hingga 1 Triliun Klaster Kementerian/Lembaga. Nilai serupa juga didapatkan oleh KBRI Baghdad, KBRI Brussels, KBRI Panama City, KBRI Praha, dan KBRI Paramaribo.

Peningkatan tersebut merupakan komitmen dan usaha dari Kemenlu untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dari tahun 2022 dengan melaksanakan asistensi dan bimbingan teknis nilai IKPA Pusat dan Perwakilan RI. Selain itu Kemenlu telah mengoptimalkan anggaran yang dimiliki dengan melaksanakan pertanggungjawaban akhir tahun sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Melalui upaya tersebut, capaian Penyerapan Anggaran Seluruh Unit Organisasi Eselon I pada tahun 2023 telah mencapai nilai optimal dengan rentang 97,96-100.

Secara detil, upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan akuntabilitas di Kemenlu pada tahun 2022, antara lain:

- Penerapan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022 sampai dengan level Eselon II telah dilakukan sepanjang tahun dan secara keseluruhan diturunkan ke dalam indikator kinerja individu hingga level Eselon III, Eselon IV, fungsional, dan pelaksana.

- Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan anggaran secara periodik dengan sistem informasi berbasis teknologi informasi dilakukan secara triwulanan dengan sistem aplikasi SMART DJA, e-Monev Bappenas dan e-Kinerja Kemenlu. E-kinerja Kemenlu sedang dalam proses penyempurnaan pada tahun 2022, dan akan aktif kembali pada tahun 2023.

- Bimbingan Teknis (Bimtek) ke seluruh unit kerja Pusat dan Perwakilan RI untuk memantau dan memberikan panduan terkait penginputan aplikasi *monitoring* dan pelaporan kinerja. Selain itu, untuk memberikan panduan penyusunan kinerja dan anggaran dilaksanakan Bimtek Penyusunan RKA-K/L dan Renja K/L TA 2023 Perwakilan RI.

- Pemberian himbauan berupa Brafaks ke seluruh Perwakilan terkait dengan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran seperti penyesuaian rencana kegiatan dengan alokasi dana, revisi anggaran, pengisian data capaian *output*, serta pembukuan transaksi yang akurat dan sesuai ketentuan berlaku.

06 Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan sebagai komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran. Program Penguatan Pengawasan yang dicanangkan dalam kerangka RB, menjadi salah satu faktor penentu pencapaian sasaran peningkatan kapasitas dan akuntabilitas Kemenlu, kualitas pelayanan publik dan pada akhirnya berkontribusi terhadap capaian pada komponen hasil "Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN".

Penguatan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, sebagai bagian dari fungsi pengawasan dilakukan melalui:

- **Pembangunan Zona Integritas**

  Dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan pembangunan Zona Integritas (ZI) pada tahun 2023, Kemenlu telah berhasil mendorong perluasan pembangunan ZI dengan keikutsertaan 18 unit kerja/satker Pusat-Perwakilan RI. Dari hasil seleksi di Kemenlu terpilih 9 (Sembilan) unit organisasi yang diusulkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yakni Ditjen Amerop, KBRI Bandar Seri Begawan, KBRI Dar es Salaam, KBRI Kuala Lumpur, KBRI Singapura, KBRI Windhoek, KJRI Dubai, KJRI Johor Bahru, KJRI Vancouver dan terpilihnya 2 (dua) unit yang diusulkan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) yaitu Direktorat PWNI dan KBRI Bangkok. Dari 11 (sebelas) unit kerja tersebut, KJRI Vancouver memperoleh penghargaan WBK dan Dit PWNI memperoleh penghargaan WBBM. Berikut perolehan predikat WBK/WBBM tahun 2019-2023 di lingkungan Kemenlu:

Tabel III.62
Perolehan Predikat WBK/WBBM Tahun 2019-2023

Pembangunan ZI di Satker Pusat dan Perwakilan RI	2019	2020	2021	2022	2023
Satker/Perwakilan yang diusulkan	18	12	15	8	**11**
Satker/Perwakilan penerima WBK	5	2	3	1	**1**
Satker/Perwakilan penerima WBBM	3	0	1	0	**1**
Total Satker/Perwakilan penerima predikat WBK/WBBM	8	2	4	1	**2**

- **Pengelolaan Sistem Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan *Whistle Blowing System*.**

  Untuk penanganan pengelolaan pengaduan dan WBS, Kemenlu melakukan pembentukan *Liaison Officer* (LO) atau Satgas, baik di Unit Organisasi Pusat maupun Perwakilan RI, serta memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut terhadap pelaporan yang diterima dari berbagai kanal pengaduan/ pelaporan. Dari 759 pengaduan yang terverifikasi, 753 pengaduan telah selesai dan 6 masih dalam proses penyelesaian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 284 Permintaan Informasi dan 38 penyampaian Aspirasi.

Penyelesaian Tindak Lanjut terhadap Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat yang Diterima dari Berbagai Kanal Pengaduan/Pelaporan Tahun 2023

Peringkat 1

Kemenlu Meraih Peringkat 1 Penganugerahan Predikat Penilaian Publik Tingkat Kementerian Tahun 2023

5 Kanal pengaduan

	LAPOR	Telepon	WhatsApp	Gmail	WBS	Total
Total pengaduan terverifikasi	104	50	421	184	0	**759**
Selesai ditindaklanjuti	103	50	417	183	0	**753**
Dalam proses	1	0	4	1	0	**6**
Belum dapat ditindaklanjuti	0	0	0	0	0	**0**

Pengelolaan Pengaduan 2022

Total pengaduan : 530
Dalam proses : 527
Selesai ditindaklanjuti : 3
Tidak dapat ditindaklanjuti : 0

Pengelolaan Pengaduan 2023

759 : Total pengaduan
6 : Dalam proses
753 : Selesai ditindaklanjuti
0 : Tidak dapat ditindaklanjuti

Gambar III.137
Data Pengaduan yang Terselesaikan Tahun 2022-2023

Melalui Laporan Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi, Kemenlu di tahun 2023 mendapatkan hasil penilaian *monitoring* dan evaluasi sebesar 93,14, menempatkan Kemenlu pada peringkat ke-5 di tingkat Kementerian.

Berdasarkan data dari Gratifikasi Online KPK RI (https://gol.kpk.go.id) pada Pada tahun 2023 secara keseluruhan terdapat 29 pelaporan gratifikasi, dengan rincian:

i. **Inspektorat Jenderal**
   (10 laporan — 8 dikelola instansi, 1 tidak wajib lapor, 1 milik negara).
ii. **KBRI Seoul**
   (5 laporan — 4 milik negara, 1 dikelola instansi).
iii. **KRI Songkhla**
   (13 laporan —5 dikelola instansi, 8 *negative list*).
iv. **KBRI Canberra**
   (1 laporan — *negative list*).

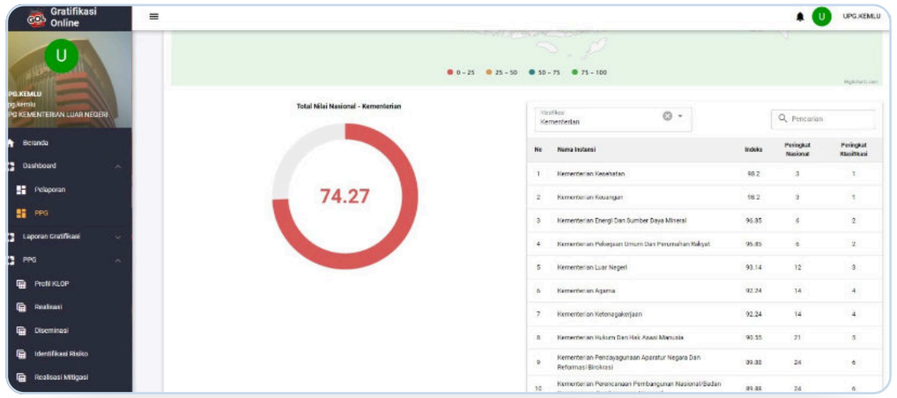

Gambar III.138
Penilaian Monev Gratifikasi Tahun 2023

Terkait Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi, Kemenlu telah melakukan beragam kegiatan seperti Sosialisasi kepada Internal Kemenlu melalui kegiatan "KPK Mendengar" pada 7 Februari 2023, Pembahasan Rancangan Perubahan Permenlu Nomor 1 Tahun 2015 terkait Unit Pengendalian Gratifikasi di Kemenlu hingga menyampaikan materi Pencegahan Gratifikasi dalam kurikulum Diklat Jabatan Fungsional Kemenlu sebagai dasar penugasan pegawai di Perwakilan RI.

- **Keikutsertaan dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) – KPK sejak tahun 2021**

  Sejak tahun 2021, SPI ditetapkan menjadi prioritas Nasional dan menjadi salah satu indikator untuk mengukur pelaksanaan pencegahan korupsi pada lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Kegiatan SPI bersifat *mandatory* dan dilakukan di semua K/L/D dan berada di bawah koordinasi Inspektorat atau Satuan Pengawas Internal dengan didampingi KPK. Nilai SPI Kemenlu pada 2023 adalah 80,53 (peringkat ke-3 dari 33 kementerian), dan berada di atas rata-rata nasional yaitu 70,97. Nilai SPI tahun 2023 mengalami penurunan dibanding Nilai SPI 2022 yang sebesar 81,76.

Gambar III.139
Hasil Survei Penilaian Integritas Kemenlu Tahun 2023

Berdasarkan catatan KPK, hasil indeks SPI tahun 2023 tidak dapat dibandingkan secara linier dengan hasil SPI tahun sebelumnya karena terdapat penyesuaian metode dalam perhitungan hasil. Namun secara umum hasil SPI tahun 2023 tetap mengindikasikan peningkatan risiko korupsi yang cukup signifikan. Responden terdiri dari responden internal (ASN Kemenlu di Pusat), responden eksternal (pengguna layanan) dan responden *expert* (narasumber ahli yang memiliki pengetahuan komprehensif terkait integritas dan korupsi di lokus survei).

- **Pengelolaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

  Kemenlu terus mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang lebih efektif dengan penajaman penerapan Manajemen Risiko (MR) sehingga dapat mengendalikan gratifikasi, benturan kepentingan dan pengaduan masyarakat secara lebih baik guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Berdasarkan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kemenlu Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,20 atau memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi). Kegiatan terkait pengelolaan maturitas SPIP terintegrasi sepanjang tahun 2023 terdiri dari pelaksanaan SPIP dan MR Kemenlu dan Perwakilan RI, Penilaian Mandiri (PM) Maturitas SPIP Terintegrasi Kemenlu 2023 Penjaminan Kualitas atas PM Maturitas SPIP Terintegrasi.

07 Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Kemenlu senantiasa berupaya meningkatkan Pelayanan Publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penerapan standar pelayanan yang tinggi telah ditetapkan ke seluruh satuan kerja di Pusat dan Perwakilan RI untuk menerapkan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaannya, Kemenlu mendapatkan penilaian yang baik di beberapa aspek yang termasuk dalam penerapan strategi pelaksanaan dan kebijakan Reformasi Birokrasi General, yaitu terkait Tingkat Implementasi Renaksi RB General (85,62), Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi (4 dari skala 5), dan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan (3 dari skala 5).

Kemen PANRB menghargai dedikasi serta komitmen Kemenlu dalam memberikan pelayanan masyarakat di luar negeri. Melalui layanan yang profesional dan efisien, Kemenlu telah berhasil memfasilitasi berbagai kepentingan dan keperluan WNI di luar negeri, serta menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai negara mitra. Diharapkan Kemenlu dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publiknya demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di kancah internasional hal ini disampaikan pada saat Menteri PANRB melakukan kunjungan ke Perwakilan RI di Doha.

Gambar III.140
Kunjungan Menteri PANRB pada fasilitas pelayanan publik Kemenlu, Doha (Sumber: Kemen PANRB)

Apresiasi untuk Kemenlu tersebut didukung dengan berhasil diraihnya kembali penghargaan bidang pelayanan publik yaitu Penganugerahan Kepatuhan Tinggi untuk Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023 oleh Ombudsman RI. Penilaian terhadap Kemlu dilakukan pada 29 September 2023 dan 2 Oktober 2023 dengan lokus penilaian Direktorat Konsuler. Dalam hal ini, Kemenlu berhasil meraih Peringkat 1 untuk Tingkat Kementerian, dengan nilai 94,85 (Zona Hijau) Kategori A (Kualitas Tertinggi). Guna memastikan standar pelayanan publik yang tepat guna Kemenlu senantiasa melakukan pembenahan pada Portal Kemlu, memperkuat Sistem Portal Peduli WNI serta perkembangan terkini dengan dilaksanakannya *soft launching* aplikasi Sistem Informasi Terpadu Protokol dan Konsuler (Sitprotkons) Versi Terbaru, Sistem Aplikasi Izin Terbang (Flight Clearance Application System / FCAS) dan Sistem Pelayanan Legalisasi Kementerian Luar Negeri Secara Elektronik (STEMPEL ASLI) Berbasis *Web*.

Gambar III.141
Daftar 97 Negara Mitra dengan Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas (Sumber: Kemenlu)

Kemenlu juga telah melakukan peluncuran Paspor Diplomatik dan Dinas Elektronik RI pada tanggal 7 Desember 2023. Peluncuran Paspor Diplomatik dan Dinas Elektronik RI merupakan tahap akhir dari upaya pengembangan dan perbaikan standar dokumen perjalanan RI yang diterbitkan oleh Kemenlu, sesuai dengan standar dokumen perjalanan yang ditetapkan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO). Paspor Diplomatik Elektronik RI telah berhasil dipergunakan pada sistem keimigrasian di Bandara Singapura, Abu Dhabi, Dubai, Amsterdam dan Addis Ababa dan berhasil digunakan pada *autogate* bandara Singapura dan Dubai.

Selanjutnya, Paspor Diplomatik dan Dinas Elektronik akan mulai diimplementasikan secara bertahap pada tahun 2024. Kemudian saat ini, Indonesia tercatat telah memiliki Perluasan Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas (PBVDD) dengan 97 negara Mitra serta telah melakukan pengaturan resiprokal dengan Amerika Serikat terkait pemberian fasilitas *visa diplomatic* dan dinas jangka Panjang paling lama 5 (lima) tahun yang akan diimplementasikan tanggal 1 Desember.

Selain capaian-capaian tersebut, berdasarkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN Tahun 2023 oleh KemenPAN RB, Kemenlu diwakili oleh Direktorat PWNI terpilih menjadi Unit Lokus Evaluasi (ULE) di bidang pelayanan jasa dengan nilai 4,15 (A-). Sementara itu, penilaian pada kriteria Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan dimana Direktorat Konsuler menjadi ULE oleh Ombudsman RI, Kemenlu menduduki peringkat pertama dengan nilai 94,85.

Terkait upaya peningkatan kualitas pelayanan yang didukung sarana prasarana yang lebih baik, Kemenlu juga melakukan renovasi pada Gedung Utama untuk meningkatkan standar sarana dan prasarana pelayanan publik, yang memiliki aspek fasilitas ruang tunggu, fasilitas pengguna layanan berkebutuhan khusus dan sarana penunjang lainnya. Dalam penerapannya Kemenlu menerima penghargaan atas fasilitas *daycare* yang memenuhi standarisasi *Daycare* Ramah Anak/Taman Asuh Ceria (TARA) dengan peringkat TARA Nindya pada 20 November 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA). Fasilitas *Daycare* Kementerian Luar Negeri memenuhi peringkat TARA Nindya yang merupakan level ketiga terbaik dalam pemenuhan standar *daycare* ramah anak pada tingkat nasional.

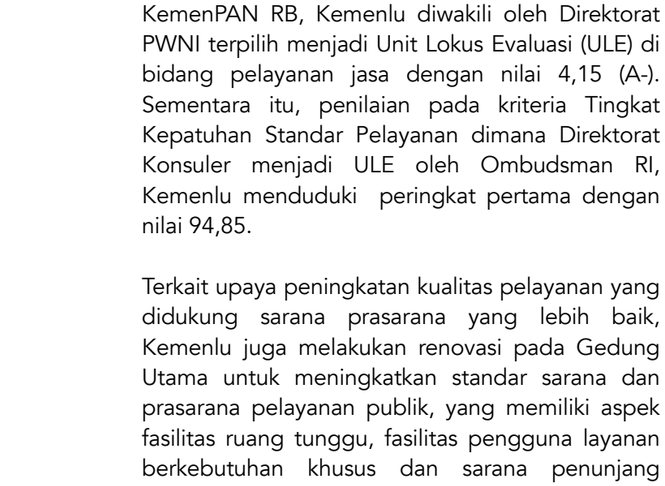

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

Nomor : 2406 /Men/KP.06.07/11/2023

Diberikan kepada:

***Daycare* Kementerian Luar Negeri RI**

Memenuhi Standardisasi *Daycare* Ramah Anak/ Taman Asuh Ceria (TARA) dengan peringkat TARA Nindya

Jakarta, 20 November 2023

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si.

Gambar III.142
Daycare Kemenlu Memenuhi Standaridisasi *Daycare* Ramah Anak/Taman Asuh Ceria (TARA) dengan Predikat TARA Nindya (Sumber: Kemenlu)

08 Kerja sama dengan Kementerian/Lembaga RI saat Presidensi Indonesia di G20

Selain dari capaian-capaian diatas, Kemenlu juga telah melakukan Kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga RI terkait saat Presidensi Indonesia untuk G20. Kerjasama yang telah dilakukan dapat dilihat pada infografis berikut:

Gambar III.143
Kolaborasi Kemenlu dengan K/L terkait pada Presidensi G20 (Sumber: Kemenlu)

Proyeksi Ke Depan

Sebagai langkah ke depan, Kemenlu akan melakukan sejumlah upaya agar implementasi RB dapat terus ditingkatkan:

01. Internalisasi dan Diseminasi Informasi secara Rutin

Melaksanakan internalisasi dan diseminasi informasi secara rutin kepada Tim Pengelola RB Internal Kemenlu Tahun 2023-2024 yang mencakup wakil/ penanggung jawab RB dari tiap indikator penilaian. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi dan implementasi RB terlaksana secara menyeluruh.

02. Melanjutkan Internalisasi Road Map RB Kemenlu

Melanjutkan internalisasi Road Map RB Kemenlu 2023-2024 pada RB General dan RB Tematik yang menjadi ampuan tiap unit kerja dan memiliki dampak kepada percepatan prioritas pembangunan.

03. Meneruskan dan Memperkuat Reformasi Administrasi

Meneruskan dan memperkuat reformasi administrasi yang selaras dengan prinsip-prinsip *good governance*.

04. Memastikan Terselenggaranya Praktik Administrasi Publik

Memastikan terselenggaranya praktik administrasi publik yang transparan, akuntabel, efisien, efektif, tidak diskriminatif, profesional, dan berbasis pada warga (*paradigma governance* – rakyat ambil bagian di dalam penyelenggaraan pemerintahan) dan memberikan dampak kepada masyarakat.

05. Mendorong Inovasi pada Satker-Satker Kemenlu

Mendorong inovasi pada satker-satker Kemenlu, khususnya pada inovasi pemberian pelayanan publik yang memberikan dampak kepada masyarakat serta mengoptimalkan dampak dan masukan dari SKM dan FKP untuk mendorong inovasi pada sistem pelayanan publik dan pengadaan kegiatan kompetisi inovasi internal pelayanan publik pusat dan unit kerja di Perwakilan RI.

06. Menyusun Kebijakan Khusus Terkait Pelaksanaan SPBE di Kemenlu

Menyusun kebijakan khusus terkait pelaksanaan SPBE di Kemenlu serta membentuk Tim Penyusunan dan Percepatan pelaksanaan SPBE.

07. Mengupayakan Lebih Lanjut Perolehan Predikat WBK dan WBBM

Mengupayakan lebih lanjut perolehan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang baru dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang baru kedepannya dari yang telah diperoleh sebanyak 13 satuan kerja Pusat dan Perwakilan RI.

08. Mengimplementasikan Pelaksanaan Kegiatan Utama dan Rencana Aksi

Mengimplementasikan pelaksanaan kegiatan utama dan rencana aksi khususnya terkait 28 indikator penilaian RB dengan menyesuaikan dengan parameter dan standar yang telah ditetapkan oleh instansi meso.

Dokumentasi Program Pendukung Capaian IKU L1.2.1 : Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenlu

Gambar III.144
Focus Group Discussion RB Tematik dan Perubahan Road Map RB 2020-2024 (13 Maret 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.145
Pemberian Penghargaan WBK dan WBBM (Bali, 6 Desember 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.146
ASEAN Foreign Ministers' Retreat (Jakarta, 4 Februari 2023)
Sumber: Kemenlu

Analisis IKU L1.2.2

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemenlu

Deskripsi IKU

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan Kemen PANRB melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja. Kemen PANRB melaksanakan evaluasi Implementasi SAKIP Kemenlu yang berpedoman pada Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Nilai evaluasi AKIP merupakan nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan guna mencapai misi organisasi. Akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dituangkan secara rinci dalam laporan kinerja yang disusun secara periodik.

> Kemen PANRB melaksanakan evaluasi Implementasi SAKIP Kemenlu

Perhitungan IKU Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemenlu menggunakan formula sebagai berikut:

Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu oleh Kemen PANRB

IKU bertujuan untuk mengukur sejauh mana Kemenlu telah melakukan perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang menciptakan kondisi *good governance*. Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenlu diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kemen PANRB. Evaluasi yang dilakukan meliputi 4 (empat) komponen dengan bobot sebagai berikut:

Tabel III.63
Komponen Nilai Evaluasi AKIP
Sumber: PermenPANRB

No.	Permen PANRB No. 88 Tahun 2021	
	Komponen	Bobot
1.	**Perencanaan Kinerja** • Keberadaan 6% • Kualitas 9% • Pemanfaatan 15%	30%
2.	**Pengukuran Kinerja** • Keberadaan 6% • Kualitas 9% • Pemanfaatan 15%	30%
3.	**Pelaporan Kinerja** • Keberadaan 3% • Kualitas 4,5% • Pemanfaatan 7,5%	15%
4.	**Evaluasi Kinerja** • Keberadaan 5% • Kualitas 7,5% • Pemanfaatan 12,5%	25%
	Total	100%

Hasil perhitungan dari komponen tersebut kemudian menghasilkan nilai akhir yang diklasifikasikan dalam kategori pada tabel berikut:

Tabel III.64
Klasifikasi Nilai Evaluasi AKIP
Sumber: PermenPANRB

Predikat	AA	A	BB	B	CC	C	D
	>90-100	>80-90	>70-80	>60-70	>50-60	>30-50	0-30
Interpretasi	Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang

Informasi Kinerja

Tabel III.65
Capaian IKU Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu
Sumber: Kemenlu

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemenlu	Nilai evaluasi AKIP yang ditetapkan oleh Kemen PANRB	**79.15**

Target	Realisasi	Capaian
79,80	79,15	99,18%

Tabel di atas menunjukkan realisasi untuk nilai evaluasi AKIP Kemenlu tahun 2023 yaitu sebesar 79,15, nilai ini belum mencapai target tahun 2023 yaitu 79,80. Dengan demikian, capaian AKIP Kemenlu tahun 2023 yaitu sebesar 99,18%. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kemenlu memperoleh nilai 79,15 atau predikat "BB" (Sangat Baik) melalui surat Menteri PANRB No. B/53/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kemenlu Tahun 2023.

Hasil evaluasi AKIP Kemenlu menunjukkan implementasi SAKIP yang sudah baik pada Kementerian/Lembaga dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Nilai evaluasi AKIP Kemenlu didukung oleh nilai masing-masing komponen. Rincian nilai per komponen yang mendukung peningkatan nilai evaluasi AKIP Kemenlu tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.66
Rincian Hasil Evaluasi Nilai AKIP Kemenlu Tahun 2022-2023

Sumber: Kemen PANRB

No.	Komponen yang Dinilai	Nilai Evaluasi SAKIP		
		Bobot	2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,69	25,79
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,94	21,98
3.	Pelaporan Kinerja	15	13,32	13,39
4.	Evaluasi Akuntabilitas Internal	25	17,86	17,99
	Nilai Hasil Evaluasi		**78,81**	**79,15**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**BB**	**BB**

Perbandingan Kinerja

Tabel III.67
Target, Realisasi, dan Capaian Perbandingan Capaian Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu

Sumber: AKSI Kemenlu

Kode IKU/ SUB IKU		2020	2021	2022	2023
L1.2.2	Target	78%	79% ↑	79,50% ↑	**79,80%** ↑
	Realisasi	77,83%	78,50% ↑	78,80% ↑	**79,15%** ↑
	Capaian	99,70%	99,48% ↓	99,13% ↓	**99,10%** ↓

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai evaluasi AKIP Kemenlu ditargetkan meningkat setiap tahun pada periode Renstra 2020-2024, tergambar perolehan nilai evaluasi AKIP tersebut terus meningkat, meski masih belum dapat mencapai target capaian nilai evaluasi AKIP Kemenlu.

Juga terlihat bahwa capaian mengalami penurunan yaitu sebesar 99,78% (2020), 99,48% (2021), 99,13% (2022) dan 99,10% (2023). Terdapat perubahan komponen penilaian evaluasi AKIP tahun 2022 dengan menggunakan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021.

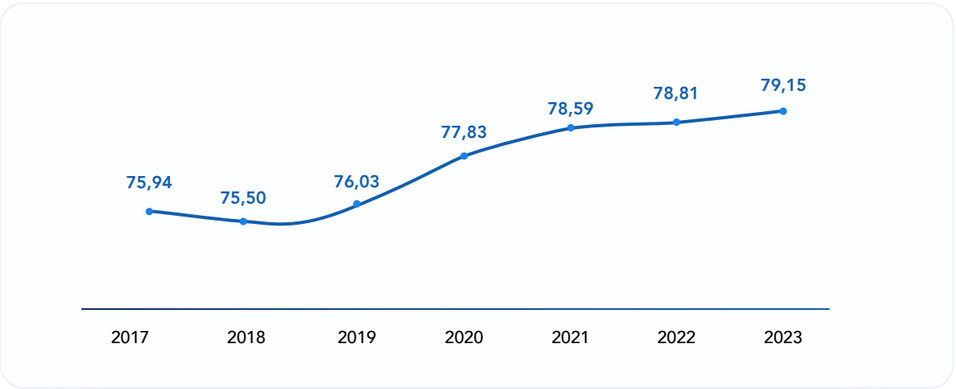

Gambar III.147
Perkembangan Nilai AKIP Kemenlu 2017-2023

Meskipun realisasi yang diperoleh belum mencapai target, realisasi atas Nilai evaluasi AKIP Kemenlu terus meningkat dari tahun ke tahun. Kemenlu selalu menetapkan target nilai AKIP yang tinggi untuk mendorong upaya perbaikan dan inovasi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI.

> Kemenlu selalu menetapkan target nilai AKIP yang tinggi

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai evaluasi AKIP Kemenlu ditargetkan meningkat setiap tahun pada periode Renstra 2020-2024, tergambar perolehan nilai evaluasi AKIP tersebut terus meningkat, meski masih belum dapat mencapai target capaian nilai evaluasi AKIP Kemenlu. Selain itu, terlihat bahwa capaian mengalami penurunan selama periode 2020-2023, hal ini disebabkan seiring peningkatan realisasi AKIP, Kemenlu terus berupaya menaikkan target capaian di tiap tahunnya. Perlu diketahui juga bahwa penilaian komponen penilaian evaluasi AKIP di tahun 2023 mengalami perubahan yang semula menggunakan penilaian komponen pada Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2015 menjadi Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021.

Tabel III.68
Perbandingan IKU L1.2.2 Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu dengan Rata-Rata Nasional

Sumber: Komisi ASN, data diolah Kemenlu

Kode IKU/SUB IKU		2020	2021	2022	2023
L1.1.1	Kemenlu	**77,83** ↑	**78,59** ↑	**78,81** ↑	**79,15** ↑
	Rata-rata Nasional	67,15	67,93	67,93	67,93

Tabel diatas menunjukkan tren nilai evaluasi AKIP Kemenlu dari 2020 hingga 2022 bahwa nilai evaluasi AKIP Kemenlu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai pada rata-rata nasional meskipun belum mencapai target Kemenlu tiap tahun. Berdasarkan tabel dimaksud, dapat dilihat bahwa nilai evaluasi AKIP Kemenlu selalu berada diatas rata-rata nasional sebesar 67,15 (2020), 67,93 (2021), untuk 2022 dan 2023 menggunakan data rata-rata nasional 2021.. Nilai tersebut diperoleh dari Laporan Kinerja Kemen PANRB tahun 2022.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Nilai evaluasi AKIP Kemenlu senantiasa mengalami peningkatan, kenaikan nilai setiap tahun dapat terlihat mulai dari periode awal renstra tahun 2020 hingga tahun 2023. Kemenlu terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan AKIP pada tahun 2023. Peningkatan *awareness* dan perbaikan implementasi AKIP di lingkungan Kemenlu dapat terlihat dari peningkatan kualitas dokumen AKIP yang disusun hingga pemanfaatan capaian kinerja tahun lalu sebagai pertimbangan penyusunan indikator dan target kinerja 2023. AKIP Kemenlu tidak terlepas dari peranan setiap Unit Organisasi dan Perwakilan RI dalam peningkatan implementasikan AKIP pada masing-masing entitas. Perbaikan implementasi AKIP terlihat dari kenaikan jumlah Unit Organisasi Eselon I dan Perwakilan RI yang memperoleh nilai evaluasi AKIP dengan Predikat minimal "Sangat Baik" (BB) pada tabel berikut:

Tabel III.69
Jumlah Unit Eselon I dan Perwakilan RI yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP dengan predikat minimal "Sangat Baik" (BB)

2020	2021	2022	2023
126	128	133	133*)

*) *tahun 2023 menggunakan jumlah 2022, nilai 2023 akan terbit pada pertengahan tahun 2024*

Peningkatan dari tahun ke tahun kualitas AKIP pada Unit Organisasi Pusat dan Perwakilan RI terlihat dari peningkatan jumlah Unit Organisasi dengan Nilai Evaluasi AKIP berdasarkan Predikat dari tahun 2020-2022, sebagai berikut:

Gambar III.148
Progress Peningkatan Nilai AKIP Unit Organisasi Kemenlu (Sumber: Kemenlu)

Keberhasilan atas kenaikan nilai evaluasi AKIP Kemenlu disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

01
Perencanaan Kinerja

- Kemenlu telah melakukan reviu dan menyempurnakan penjabaran kinerja sesuai PermenPAN RB No. 89 tahun 2021 untuk menyelaraskan perencanaan kinerja organisasi dengan sasaran strategis dalam penjenjangan kinerja melalui penyusunan pohon kinerja pada tingkat Pusat dan Perwakilan RI. Upaya tersebut dilakukan melalui Kegiatan Penyusunan Pohon Kinerja pada Seluruh Unit Organisasi di Kemenlu, adapun konsep pohon kinerja telah dikonsultasikan kepada Kemen PANRB.

- Kemenlu melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja sehingga terdapat sinkronisasi target kinerja Pusat dan Perwakilan RI di tahun 2023. Namun beberapa indikator kinerja Kemenlu dianggap masih relevan dengan pelaksanaan tusi pada tahun 2023, seperti indikator kinerja C2.1 Sub IKU 3 "Persentase Saran Kebijakan atas Kesepakatan ASEAN yang ditindaklanjuti di dalam negeri". Indikator kinerja ini mendukung sasaran dukungan dan komitmen yang tinggi dalam kerja sama ASEAN pada Ditjen Kerja Sama ASEAN, dipandang masih mendukung kemajuan diplomasi regional ASEAN yang dilakukan oleh Kemenlu sehingga bersifat progresif. Penetapan target tersebut mempertimbangkan bahwa fokus tahun 2023 adalah pada kesuksesan pelaksanaan keketuaan ASEAN 2023 dan agenda Keketuaan dengan tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang stabil dan damai; sebagai jangkar stabilitas dunia.

02
Pengukuran Kinerja

- Kemenlu secara berkala memantau perkembangan capaian dan rencana program kerja termasuk pemantauan pelaksanaan diplomasi ekonomi. Kemenlu juga kerap melakukan kegiatan Dialog Kinerja Level Wamenlu dengan Ditjen Regional untuk mendukung pelaksanaan Diplomasi Ekonomi, Dialog Kinerja antara Sekjen dengan Ditjen Aspasaf dan Amerop serta Perwakilan RI di wilayah masing-masing Selanjutnya, telah dilakukan juga penajaman struktur Renja Perwakilan RI pada level RO sampai dengan Komponen) dengan memperhatikan keselarasan kinerja, serta telah dilakukan penyesuaian pada aplikasi KRISNA dan SAKTI, untuk diimplementasikan pada tahun 2024.

- Seiring dengan mulai ditingkatkannya upaya dialog kinerja pada unit kerja internal Kemenlu, saat ini tengah dilakukan revisi Permenlu Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja untuk mengakomodasi ketentuan nasional terkini terkait pengelolaan kinerja organisasi dan pegawai. Untuk semakin meningkatkan pemahaman tentang manajemen kinerja, telah disusun pedoman Manajemen Kinerja 101 yang menerjemahkan berbagai peraturan terkait manajemen kinerja dalam satu panduan.

- Dalam upaya meningkatkan capaian kinerja satker, monev secara internal juga dilakukan, diantaranya Dialog Kinerja Organisasi Satker dan Dialog Kinerja Organisasi Perwakilan RI dan *sharing best practices* mengenai manajemen kinerja organisasi.

- Sebagai salah satu upaya menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP Kemenlu, penyempurnaan aplikasi monev kinerja dan anggaran merupakan *stepping stone* dalam perbaikan pengelolaan SAKIP di lingkungan Kemenlu secara keseluruhan. Tersedianya aplikasi monev yang baik akan mendukung aspek pengelolaan kinerja lainnya, salah satunya yakni dengan menjadi *database* bagi nilai kinerja, capaian, target, indikator penilaian, dan pengukuran kinerja organisasi. Aplikasi monev kinerja juga mendukung terwujudnya keselarasan data dan informasi dari hulu ke hilir pada sistem pengelolaan kinerja, dari penetapan PK, monev triwulanan, hingga pelaporan tahunan. Sebagaimana diketahui, keselarasan data menjadi salah satu catatan utama evaluator eksternal maupun internal, sehingga penting kiranya memastikan keselarasan data dan informasi yang disajikan guna memvalidasi capaian kinerja.

- Dalam upaya perbaikan pengelolaan SAKIP, Kemenlu telah melakukan perbaikan aplikasi Aplikasi Kinerja Organisasi (AKSI) sejak April tahun 2022 guna penyederhanaan *user interface* (UI) dan pengoptimalan performa dari aplikasi e-kinerja versi awal. Uji coba fitur dan pengkalibrasian aliran data aplikasi telah beberapa kali dilakukan sepanjang tahun 2022 dan 2023, dan *soft launching* untuk Unit Organisasi Pusat telah berhasil dilaksanakan pada 5 Juni 2023 guna pemanfaatan penginputan realisasi kinerja secara semesteran, triwulanan, maupun tahunan. Nilai Capaian Kinerja Organisasi unit kerja yang tertuang pada aplikasi AKSI Kemenlu akan menjadi dasar dan pertimbangan bagi Pimpinan unit kerja dalam menentukan predikat capaian kinerja individu yang tertuang dalam SKP Pegawai.

- Kemenlu tengah dalam proses interkoneksi antara aplikasi AKSI dengan monSAKTI Kemenkeu. Telah dilakukan pembahasan progres interkoneksi dan *supply* data dari aplikasi monSAKTI. Kemenlu sudah mendapatkan token akses ke data realisasi anggaran berbasis Renja dari aplikasi monSAKTI Kemenkeu, hingga saat ini proses input dan penyesuaian dengan matriks Renaksi terbaru untuk tahun 2024 dalam progres penyempurnaan sekitar 80%.

03
Pelaporan Kinerja

Kemenlu telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja melalui penyempurnaan sistematika penyusunan Laporan Kinerja secara berkala di lingkungan Kemenlu dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Selain itu, Bimbingan Teknis Perencanaan, *Monitoring*, dan Evaluasi Kinerja Pusat dan Perwakilan RI juga telah diselenggarakan pada tanggal 15-18 Maret 2023, untuk melakukan sosialisasi penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. Pemanfaatan Laporan Kinerja tahun 2022 telah dilakukan untuk perbaikan perencanaan dan kinerja terutama pada unit Perwakilan RI di tahun 2023 melalui kegiatan sinkronisasi target IKU tahun 2023, dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 sesuai dengan matriks mapping sinkronisasi target Pusat dan Perwakilan RI.

Kemenlu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, dalam mendukung pembangunan nasional kinerja Kemenlu tertuang pada Rencana Aksi Nasional (RAN) tematik dengan berbagai Kementerian/ Lembaga selaku Koordinator RAN. Pelaporan kinerja pada aplikasi monev nasional maupun AKSI Kemenlu bermanfaat sebagai bahan rekonsiliasi dan konsolidasi data internal Kemenlu guna identifikasi indikator kinerja dan capaian kinerja yang mendukung RAN tematik. Sepanjang tahun 2023, capaian kinerja Kemenlu pada 14 RAN tematik sebagai berikut:

01
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek)
Koordinator Kemenko PMK

02
Jaminan Sosial Kesehatan (JKN)
Koordinator Kemenko PMK

03
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Koordinator BNN

04
Hak Asasi Manusia (HAM)
Koordinator Kemenkumham

05
Renaksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP)
Koordinator BNPP

06
Kelapa Sawit Berkelanjutan (KSB)
Koordinator Kementan

07
Kesepakatan Global untuk Migrasi yang Aman, Tertib dan Teratur (KGM/GCM)
Koordinator Kemenlu

08
Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK)
Koordinator Kemenko PMK

09
Renaksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI)
Koordinator Kemenko Marvest

10
Program Prioritas Nasional Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Koordinator Kemen PPN/Bappenas

11
Pengembangan Geopark Indonesia 2021-2025
Koordinator Kemen PPN/Bappenas

12
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)
Koordinator KemenkopUKM

13
Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (PE)
Koordinator BNPT

14
Pembinaan Ideologi Pancasila
Koordinator BPIP

04
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Kemenlu telah melakukan berbagai upaya evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar penyusunan dokumen AKIP mulai dari perencanaan hingga pelaporan berorientasi hasil dan dimanfaatkan sebagai pertimbangan Pimpinan untuk menentukan indikator kinerja maupun menetapkan target untuk mendukung Pembangunan nasional. Upaya evaluasi untuk perbaikan kinerja meliputi:

- Penyampaian himbauan baik secara tertulis maupun imbauan yang disampaikan dalam forum Bimtek Kinerja, Monev Kinerja, dan forum koordinasi lainnya, mengenai publikasi dokumen AKIP pada portal masing-masing Perwakilan RI.
- Secara legal, implementasi Permenlu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Kinerja juga terus diperkuat melalui sosialisasi/penyampaian pada berbagai pertemuan dengan Perwakilan RI. Peraturan tersebut mengatur penyampaian dokumen AKIP secara tepat waktu (3 bulan setelah pengesahan dokumen).
- Kemenlu juga telah memberikan asistensi melalui kegiatan Monev sesi khusus bagi 12 (dua belas) Perwakilan dengan nilai AKIP di bawah BB dan 8 Perwakilan RI yang terlambat menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2022.
- Mendorong Unit Kerja Pusat dan Perwakilan RI untuk mempublikasikan dokumen AKIP secara tepat waktu pada media yang dimiliki oleh Unit Kerja Pusat dan Perwakilan RI (Portal Kemenlu).
- Menginisiasi Dialog Kinerja Organisasi dengan melakukan pembahasan rencana kinerja tahun 2023 dengan mempertimbangkan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
- Pelaksanaan monev kinerja komprehensif per triwulan. Kegiatan monev ini dilakukan secara rutin untuk memantau kendala yang dihadapi dan melakukan upaya perbaikan agar target kinerja dan anggaran *on-track* di sepanjang tahun.
- Kemenlu menyusun pedoman penyusunan pelaporan kinerja dan panduan untuk publikasinya sebagai rujukan bagi unit kerja sehingga pelaksanaan kinerja akuntabel dan dapat diakses oleh publik.

- Melalui upaya-upaya yang telah dilakukan diatas tersebut, data kinerja yang dihasilkan dari aplikasi monev kinerja (SMART Kemenkeu) dan nilai evaluasi AKIP menjadi dasar pemberian piagam penghargaan dari Menlu dan insentif anggaran kepada unit organisasi dan Perwakilan RI dengan nilai AKIP dan NKA tertinggi. Bagi Satker dengan nilai AKIP terendah mendapatkan teguran secara tertulis dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- Pelaksanaan evaluasi AKIP oleh APIP Kemenlu kepada seluruh unit organisasi pusat dan perwakilan secara berkala dengan mengacu pada pedoman evaluasi AKIP internal yang telah disesuaikan dengan PermenpanRB No. 88 Tahun 2021.

Kendala dan Tantangan

Nilai evaluasi AKIP Kemenlu senantiasa mengalami kenaikan, namun belum optimal. Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan AKIP di lingkungan Kemenlu, antara lain:

01

Perencanaan Kinerja

Unit Organisasi Kemenlu belum menyampaikan PK ke situs *web* e-SAKIP Reviu milik Kemen PANRB, selanjutnya penjenjangan kinerja yang sudah disusun masih belum menggambarkan dengan baik kerangka logis dalam mencapai kinerja, serta menjelaskan hubungan lintas fungsi antar unit kerja yang dibutuhkan. Selain itu, penetapan program dan kegiatan yang belum sepenuhnya berfokus pada pencapaian sasaran strategis.

02

Pengukuran Kinerja

Dalam melakukan pengukuran kinerja, baik unit kerja pusat maupun Perwakilan RI belum menggunakan pengukuran atas capaian kinerja sebagai dasar pemberian *rewards* dan *punishment*. Aplikasi *monitoring* yang digunakan untuk mengukur evaluasi kinerja juga belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem manajemen kinerja.

03

Pelaporan Kinerja

Selain belum seluruhnya unit organisasi menampilkan laporan kinerja tahun 2022, laporan tersebut belum secara komprehensif menggambarkan analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan dalam mencapai target kinerja dan strategi kedepan dalam mencapai sasaran organisasi. Kemudian informasi yang sudah disampaikan dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja di tahun berikutnya.

04

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pedoman evaluasi internal yang dilakukan Kemenlu belum disesuaikan dengan PermenPANRB No. 88 tahun 2021. Kemudian, Kualitas evaluasi serta tindak lanjut perbaikan unit kinerja belum dapat diketahui karena hasil evaluasi internal unit Perwakilan RI belum seluruhnya disampaikan.

Upaya Perbaikan

Untuk mengatasi kendala dan tantangan tersebut, Kemenlu melakukan berbagai upaya dan kegiatan sebagai berikut:

01

Perencanaan Kinerja

Untuk pelaporan dokumen di situs *web* e-SAKIP Kemen PANRB, pengunggahan konten telah dilakukan oleh unit kerja Kemenlu. Kedepannya Kemenlu akan terus memantau pelaporan dokumen perencanaan melalui himbauan berkala. Kemudian pada penyusunan target 2023, sebagian besar unit organisasi telah menyusun dokumen dengan memperhatikan realisasi dan capaian tahun sebelumnya.

02

Pengukuran Kinerja

Unit kerja Kemenlu saat ini telah aktif menggunakan aplikasi e-Kinerja/AKSI Kemenlu untuk melaporkan capaian kinerja. Dalam pelaksanaannya, unit organisasi secara berkala diberikan bimbingan teknis baik secara *one-on-one* maupun kolektif guna memastikan penginputan capaian kinerja yang sesuai. Capaian kinerja dari aplikasi AKSI dalam bentuk Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) kemudian akan digunakan sebagai tolak ukur capaian unit kerja hingga ke tingkat individual.

03 Pelaporan Kinerja

Untuk mengatasi hal ini, Kemenlu secara berkala menyampaikan himbauan untuk:

- Peningkatan publikasi dokumen AKIP oleh Perwakilan RI pada portal resmi Perwakilan RI dan laman e-SAKIP reviu Kementerian PANRB.
- Peningkatan kualitas dokumen pelaporan AKIP sehingga pelaporan kinerja tahun sebelumnya menjadi rujukan dan pertimbangan Pimpinan dalam menetapkan indikator kinerja dan target berorientasi hasil.

04 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Selain melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis dengan Manajemen Kinerja Organisasi dan Perwakilan RI (MKOP), Kemenlu juga melaksanakan kegiatan bilik khusus Perwakilan RI terkait penyusunan dokumen pelaporan kinerja sebagai bentuk keterlibatan APIP. Kemudian pedoman teknis tentang petunjuk teknis evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian Luar Negeri juga ditetapkan. Pedoman ini merujuk pada Permenpan No 88 Tahun 2021 dan melakukan penyesuaian kriteria LKE evaluasi SAKIP di Kemenlu dan Perwakilan RI sesuai dengan kondisi organisasi dan ketentuan yang berlaku.

> Kedepannya Kemenlu akan terus memantau pelaporan dokumen perencanaan melalui himbauan berkala

Analisis Program Pendukung Capaian

Nilai evaluasi AKIP Kemenlu senantiasa mengalami kenaikan, namun belum optimal. Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan AKIP di lingkungan Kemenlu, antara lain:

01 Perencanaan Kinerja

Dalam menindaklanjuti peningkatan nilai evaluasi AKIP pada perencaan kinerja, Kemenlu telah melakukan kegiatan berikut:

- Dialog Kinerja Organisasi pada level Kemenlu-*wide* yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri maupun Wakil Menteri Luar Negeri
- Penetapan target kinerja Kemenlu-*wide* yang dituangkan melalui dokumen Perjanjian Kinerja Menlu yang selanjutnya *cascading* ke level Kemenlu-*one* (Unit Organisasi Eselon I dan Perwakilan RI) serta level Kemenlu-*two* (Unit Organisasi Eselon II). Penetapan target kinerja organisasi menjadi acuan dalam penetapan target kinerja di level individu.
- Penyelarasan perencanaan kinerja organisasi dengan sasaran strategis dalam penjenjangan kinerja melalui penyusunan pohon kinerja pada tingkat Pusat dan Perwakilan RI.
- Penyelarasan target kinerja melalui revisi informasi kinerja yang tertuang pada aplikasi nasional Kemenkeu dan Bappenas, sehingga target kinerja dan pelaksanaannya lebih riil sesuai kondisi di lapangan dan terukur.
- Penyelarasan predikat capaian kinerja dengan peraturan nasional yang selanjutnya ditetapkan melalui Kepmenlu Nomor 07/B/RO/I/2023/01 Tahun 2023.

02 Pengukuran Kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan Kemenlu terkait pengukuran kinerja sebagai berikut:

- Revisi ketentuan sistem manajemen kinerja Kemenlu sesuai ketentuan terkini
- Reviu struktur informasi kinerja pada RO-KRO guna penyesuaian Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)
- Peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam jumlah dan kapasitas SDM Evaluator APIP, termasuk bimtek evaluasi implementasi SAKIP
- Pemanfaatan aplikasi AKSI untuk pelaporan dan pengukuran capaian kinerja organisasi.

03 Pelaporan Kinerja

Upaya-upaya yang telah dilakukan Kemenlu dalam meningkatkan kualitas pelaporan kinerja, antara lain:

- Penguatan kapasitas pemahaman pengelolaan kinerja dan anggaran serta penginputan aplikasi perencanaan, pelaporan dan monev kinerja secara rutin-berkala kepada SDM Pengelola Kinerja (a.l. operator, MKO/SMKO, MKP Satker Pusat/ Perwakilan RI)
- Kemenlu juga telah memberikan asistensi khusus *one-on-one* bagi Perwakilan RI guna meningkatkan kualitas pelaporan kinerja. Hasilnya, peningkatan jumlah Unit Organisasi Pusat dan Perwakilan RI dengan kategori nilai AKIP A dan BB, 10-12 Mei 2023.
- *Sharing knowledge* mengenai pedoman penyusunan LKj Kemenlu bagi K/L lain. Kemenlu telah hadir pada kegiatan *Kick-Off Meeting* Penyusunan LKj LKPP untuk *sharing knowledge* mengenai langkah-langkah dan proses penyusunan laporan kinerja yang dapat dijadikan *benchmark* bagi LKPP.
- Bimtek Renja dan RKA K/L untuk menyelaraskan program kegiatan seluruh unit organisasi Pusat dan Perwakilan RI pada Juni 2023.

- Bimtek perencanaan dan monev kinerja melibatkan seluruh unsur pengelola kinerja di Pusat dan Perwakilan RI, 15-18 Maret 2023.
- Pemberian panduan mengenai pelaporan capaian kinerja/anggaran pada aplikasi monev kinerja AKSI, SMART, e-monev.
- Penyusunan Panduan Manajemen Kinerja 101 sebagai rujukan bagi Manajer Kinerja dalam melaksanakan tugas manajemen kinerja.
- Penyempurnaan Aplikasi Manajemen Kinerja Organisasi (AKSI) Kemenlu.

04 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Pelaksanaan evaluasi AKIP untuk seluruh Unit Organisasi, Unit Kerja dan Perwakilan RI yang memadai, merujuk pada Keputusan Inspektur Jenderal (Kepirjen) Nomor No. 00651/B/PW/05/2023/67/11 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI dan Permenpan RB No. 88 Tahun 2021.
- Kemenlu pada tahun 2023 telah memberikan penghargaan kepada Unit Organisasi/Unit Kerja Pusat dan Perwakilan dengan nilai AKIP tertinggi berdasarkan hasil evaluasi sistem AKIP di tahun 2022. Sementara implementasi sanksi berupa teguran tertulis diberikan kepada 1 Perwakilan RI yang berdasarkan hasil evaluasi sistem AKIP di tahun 2022 memiliki nilai CC ke bawah dan 1 Perwakilan yang memperoleh predikat B selama 3 tahun terakhir.

Proyeksi Ke Depan

Kedepannya Kemenlu berupaya untuk terus meningkatkan nilai AKIP Kemenlu setiap tahunnya dan berkomitmen untuk meraih nilai minimal A (memuaskan). Selain itu, upaya perbaikan akan terus dilakukan untuk menyempurnakan sistem manajemen kinerja. Salah satunya antara lain dengan melakukan revisi Permenlu 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kemenlu dan Perwakilan RI agar selaras dengan peraturan perundang-undangan paling mutakhir mengenai kinerja organisasi dan kinerja pegawai.

Kemenlu memedomani hasil evaluasi Kemen PANRB atas implementasi AKIP Kemenlu sebagai langkah upaya perbaikan ke depan. Untuk itu, upaya yang akan dilakukan Kemenlu meningkatkan kualitas implementasi AKIP yaitu:

01. Menyempurnakan Peraturan Terkait Penjenjangan Kinerja dan Penilaian Kinerja Individu

Kemenlu telah menyusun penjenjangan kinerja sesuai rekomendasi Kemen PANRB sebagai acuan dalam penilaian kinerja individu. Kemenlu akan terus menyempurnakan peraturan terkait penjenjangan kinerja dan penilaian kinerja individu. Dalam hal ini, Kemenlu akan merevisi dan menyelaraskan Permenlu 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Kinerja dengan Permenlu 7 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Luar Negeri. IKU pada level Unit Organisasi Eselon II menjadi rujukan penjabaran kinerja pegawai/Indikator Kinerja Individu (IKI) melalui penyusunan peran hasil dan periodisasi penilaian kinerja pegawai. NCKO triwulan digunakan sebagai pembanding kinerja individu triwulanan.

02. Mengupayakan Unit Kinerja untuk Dapat Menyampaikan Dokumen AKIP di Seluruh Portal Media yang Dimiliki

Dalam pelaksanaan perencanaan kinerja, Kemenlu akan terus mengupayakan unit kinerja untuk dapat menyampaikan dokumen AKIP di seluruh portal media yang dimiliki. Selain itu agar setiap penjabaran kinerja yang disampaikan merupakan data yang sudah direviu dan disempurnakan sesuai dengan PermenPAN RB No. 89 tahun 2021.

03. Penyesuaian Target pada Perjanjian Kinerja

Terkait Pengukuran Kinerja, penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja akan ditingkatkan, khususnya untuk target-target yang telah melebihi capaian dalam realisasi Laporan Kinerja tahun sebelumnya. Reviu juga akan lebih difokuskan terhadap program dan kegiatan agar seluruhnya mendukung tercapainya sasaran strategis dan sasaran program di dalam Kemenlu.

04. Mengupayakan Unit Kinerja untuk Dapat Menyampaikan Dokumen AKIP di Seluruh Portal Media yang Dimiliki

Pengoptimalan pelaporan kinerja pada aplikasi *monitoring* dan evaluasi dengan sistem manajemen kinerja lainnya guna digunakan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*. Dalam penyampaian capaian pada Laporan Kinerja merujuk pada PermenPANRB No. 53 tahun 2014, dan memanfaatkan perbaikan yang diberikan untuk peningkatan capaian di tahun kedepan, terutama pada unit perwakilan RI.

05. Mendorong Seluruh Unit Kerja secara Berkala Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Menindaklanjuti aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, Kemenlu akan terus mendorong seluruh unit kerja secara berkala melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja di dalam unit internal masing-masing. Hasil pembahasan tersebut kemudian dijadikan dasar pemberian rewards dan punishment di internal unit kerja.

> “ Kemenlu setiap tahunnya dan berkomitmen untuk meraih nilai minimal A (memuaskan)

Dokumentasi Program Pendukung Capaian IKU L1.2.2 : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemenlu

Gambar III.149
Dialog Kinerja Organisasi Menlu dan Eselon I (Januari 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.150
Penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja Dialog Kinerja Organisasi - Rapat Pimpinan Menteri Luar Negeri (Januari 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.151
Dialog Kinerja Organisasi Ditjen Aspasaf (13 Januari 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.152
Dialog Kinerja Organisasi Ditjen Protokol dan Konsuler (23 Januari 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.153
Dialog Kinerja Organisasi Ditjen KSM (13 Maret 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.154
Dialog Kinerja Organisasi Inspektorat Jenderal (1 Desember 2023)

Sumber: Kemenlu

Gambar III.155
Dialog Kinerja Organisasi Sekretariat Jenderal
(16 September 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.156
Dialog Kinerja Organisasi Ditjen IDP
(10 Desember 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.157
Sharing Knowledge Penyusunan Lkj Kemenlu kepada LKPP
(1 Desember 2023)
Sumber: Kemenlu

Sasaran Strategis Pendukung L1.3 :

Pengelolaan Aset Kemenlu yang Optimal

Analisis IKU L1.3.1

Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu

Deskripsi IKU

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) adalah alat ukur kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai salah satu pendukung tata kelola pemerintah yang baik. IPA menjadi satu bagian pengukuran dari area perubahan reformasi pada penatalaksanaan yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, proses dan prosedur kerja masing-masing K/L.

Perhitungan IKU Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu menggunakan formula sebagai berikut:

Nilai Pengelolaan Aset yang ditetapkan oleh Kemenkeu

Merujuk Kepmenkeu Nomor 127 Tahun 2022, terdapat 4 parameter dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Aset, yaitu:

Gambar III.158
Parameter Indeks Pengelolaan Aset (Sumber: Kepmenkeu)

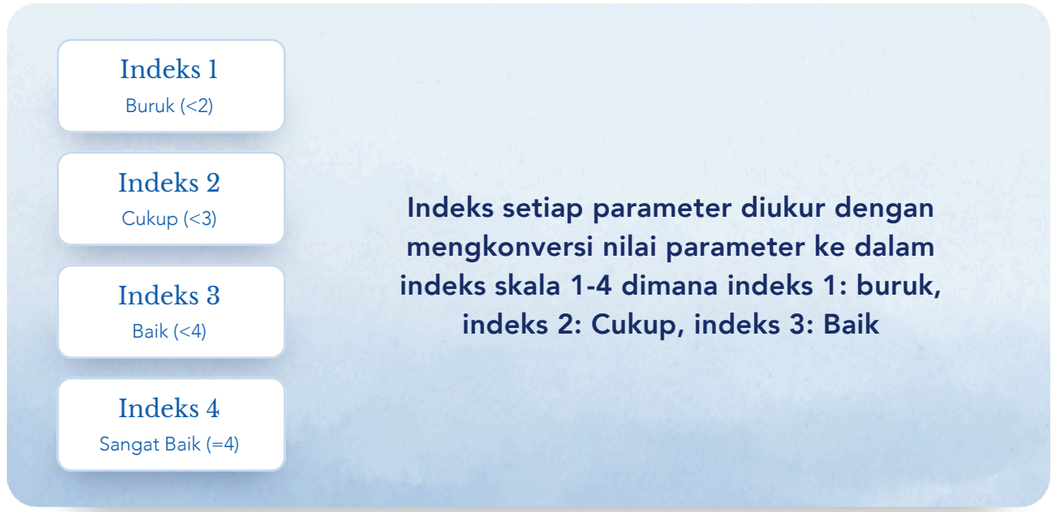

Gambar III.159
Kategori Indeks Pengelolaan Aset (Sumber: Kepmenkeu)

Penilaian Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Kemenlu dinilai berdasarkan data/laporan T-1 dari tahun berjalan. IPA tersebut menggunakan prinsip-prinsip umum antara lain dilakukan secara mandiri, menggunakan sumber data yang terbuka, Pengguna Barang, Pengelola Barang dan APIP K/L dengan periode yang telah ditentukan.

SS dan IKU ini menjadi IKU Kemenlu sejak tahun 2022. Hal ini dikarenakan Indeks Pengelolaan Aset mengukur tata kelola aset lancar lebih komprehensif dari IKU tahun 2021 "Persentase Sarana dan Prasarana Kementerian Luar Negeri yang dipenuhi sesuai dengan rencana".

Pengelolaan aset merupakan elemen yang penting dalam penguatan infrastruktur diplomasi sesuai yang digariskan di dalam Renstra 2020-2024 dan prioritas Polugri 4+1, disamping IPA merupakan salah satu aspek antara reformasi birokrasi sesuai Permen PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Hasil dari IPA tersebut dapat digunakan sebagai bahan *monitoring* dan evaluasi baik bagi Pengelola Barang maupun Pengguna Barang dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan terkait tata Kelola BMN serta sebagai upaya-upaya perbaikan dalam penatausahaan dan pengelolaan BMN yang berkelanjutan. Pada tahun 2023, Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu ini dilakukan secara terpusat dan dinilai oleh Kemenkeu.

Penilaian atas IKU Indeks Pengelolaan Aset tahun 2023 dilakukan oleh DJKN Kemenkeu atas laporan tahun 2022 berdasarkan Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor S-21/KN/KN.2/2023 disampaikan tertanggal 31 Januari 2023, raihan Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu Tahun 2022 sebesar 2,91.

Informasi Kinerja

Tabel III.69
Capaian Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu

Sumber: Kemenlu

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu	Hasil Penilaian Pengelolaan Aset Kemenlu yang dilakukan oleh Kemenkeu	**2,91** (skala 4)

Target	Realisasi	Capaian
2,90 (skala 4)	2,91 (skala 4)	100,34%

Secara umum output dari kegiatan-kegiatan dalam IKU ini telah terlaksana dengan baik. Realisasi IKU L1.3.1 Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu yang diperoleh tahun 2022 yaitu sebesar 2,91 dimana Kemenlu merencanakan nilai IPA dengan target 2,90 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 2,91 atau 100,34%.

Data capaian IKU ini diperoleh dari hasil capaian secara terpusat, yaitu di level Kemenlu (sesuai dengan target nilai IPA yang tertera di dalam PK Kemenlu Tahun 2023. Nilai IPA menggunakan perhitungan tahun 2022, yang diterima pada bulan Januari 2023. Umumnya, hasil penilaian dikeluarkan pada akhir triwulan pertama tahun berikutnya.

Secara detail Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu diperhitungkan dari parameter penilaian sebagaimana matriks hasil perhitungan IPA Kemenlu tahun 2023 per parameter berikut:

Tabel III.70
Capaian IKU L1.3.1 Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu Tahun 2023 per Parameter

Sumber: Hasil Penilaian dari DJKN, Kemenkeu

No.	Parameter	Indeks
1. Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif		
1.1.	**Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP terkait BMN pada K/L**	**0,17**
1.1.1.	Materialitas temuan BPK LKPP terkait BMN pada K/L	**2,80**
1.1.2.	Temuan BPK atas LKPP terkait BMN pada K/L	**0,60**
1.2.	**Realisasi PNBP dari pengelolaan aset**	**0,38**
1.2.1.	Realisasi PNBP dari Pengelolaan BMN	**2,00**
1.2.2.	Realisasi PNBP berdasarkan Objek Pemanfaatan	**0,50**
2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-Undangan		
2.1.	**Ketepatan waktu penyampaian Laporan dan RKBMN**	**0,28**
2.1.1.	Ketepatan waktu penyampaian RKBMN	**0,30**
2.1.2.	Ketepatan waktu penyampaian LBP	**0,90**
2.1.3.	Ketepatan waktu penyampaiaan Laporan Wasdal	**1,60**
2.2.	**Asuransi BMN**	**0,60**
3. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif		
3.1.	**Tindak lanjut pengelolaan BMN**	**0,38**
3.1.1.	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN	**2,25**
3.1.2.	Tindak Lanjut terhadap BMN rusak berat	**0,25**
3.2.	**Persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN**	**0,45**
4. Administrasi BMN yang Andal		
4.1.	**Persentase BMN yang memiliki dokumen kepemilikan**	**0,26**
4.1.1.	Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan	**0,75**
4.1.2.	Penuntasan Target Sertipikasi BMN	**1,00**
4.2.	**Penggunaan BMN sesuai ketentuan**	**0,40**
4.2.1.	Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	**2,80**
4.2.2.	BMN yang sudah ditetapkan status penggunaan	**1,20**

Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif

Pengelolaan BMN yang sesuai dengan peraturan perundangan dapat dipertanggungjawabkan dan berdaya guna dalam mendukung APBN, terdiri dari 2 (dua) parameter sebagai berikut:

1. Tindak lanjut temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kemenlu terkait BMN.

2. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pengelolaan Aset. Parameter ini untuk mengukur tingkat optimalisasi penggunaan dan pendayagunaan BMN yang mendukung penerimaan negara dari hasil pengelolaan BMN sesuai UU Nomor 9 Tahun 2019 tentang PNBP. Kemenlu menyewakan beberapa lahan kepada pihak ketiga untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset. Proses dilakukan pihak ketiga kepada Kemenlu selaku pengguna barang, selanjutnya Kemenlu mengajukan pemanfaatan aset kepada Kemenkeu untuk dilakukan penelaahan dan mengeluarkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan Kemenkeu, disusun kontrak antara Kemenlu dan Pihak Ketiga selaku penyewa yang memuat nilai PNBP ke kas negara dari pengelolaan aset Kemenlu.

Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan semakin baiknya kualitas SDM Kemenlu yang memahami dan mematuhi siklus pengelolaan BMN baik di Pusat maupun di Perwakilan RI sesuai PP Nomor 27 Tahun 2014 j.o PP Nomor 28 Tahun 2020. APIP Kemenlu melakukan reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk memastikan dokumen RKBMN Kemenlu disusun telah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan, baik di Pusat maupun di Perwakilan RI.

Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) yg efektif

Pengawasan dan pengendalian (wasdal) yang efektif dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan peningkatan kualitas SDM Kemenlu yang memahami ketentuan terkait Wasdal yang efektif baik di Pusat maupun di Perwakilan RI. Wasdal disusun Satker atas penatausahaan BMN yang telah dilakukan. Pelaporan wasdal per semester disampaikan ke tingkat Kemenlu untuk ditelaah dan dimonitor. Wasdal tingkat Kemenlu disampaikan ke Kemenkeu.

Administrasi BMN yang andal

Pengadministrasian BMN Kemenlu yang andal terlaksana dengan baik di Pusat maupun di Perwakilan RI. Pengadministrasian BMN Kemenlu dilakukan dengan pendaftaran dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dan bangunan di Pusat maupun di Perwakilan RI. Selain itu Kemenlu mendorong untuk Satker mengajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai dengan kewenangannya.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.71
Target, Realisasi, dan Capaian IKU Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu

Sumber: AKSI Kemenlu

Kode IKU/SUB IKU		2022	2023	
L1.3.1	Target	2,7	**2,90**	↑
	Realisasi	2,86	**2,91**	↑
	Capaian	105,93%	**100,34%**	↓

Kemenlu baru menetapkan Indeks Pengelolaan Aset sebagai indikator kinerja sejak tahun 2022, sehingga IKU di tahun 2023 hanya dibandingkan dengan tahun 2022. Terdapat kenaikan target 2022 sebesar 2,7 pada 2023 menjadi 2,90, pada realisasi mengalami peningkatan dari 2022 sebesar 2,86 pada 2023 menjadi 2,91, namun capaian IKU mengalami penurunan dari 2022 sebesar 105,93% pada 2023 menjadi 100,34%.

> Terdapat kenaikan target 2022 sebesar 2,7 pada 2023 menjadi 2,90

Perbandingan Kinerja dengan Realisasi Nasional

Tabel III.72
Perbandingan Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu dengan Rata-rata Nasional

Sumber: Laporan Tahunan Kemenkeu

Kode IKU/SUB IKU		2022	2023
L1.3.1	Kemenlu	**2,7** ↑	**2,91** ↑
	Rata-rata Nasional	2,87	2,77

Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu tercatat di atas rata-rata nasional K/L tahun 2022. Pada tabel di atas menunjukkan tren IKU L1.3.1 Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu tahun 2022 dan 2023 berada di atas rata-rata nasional.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

IKU L1.3.1 Indeks Pengelolaan Aset merupakan IKU baru yang hendak dicapai oleh Kemenlu sebagai salah satu bagian pencapaian reformasi birokrasi yang optimal. Untuk mencapai hal tersebut, Kemenlu perlu memperhatikan parameter penilaian indeks pengelolaan aset berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Akuntabel dan Produktif
2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan
3. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif
4. Administrasi BMN yang Handal

Faktor penyebab keberhasilan kenaikan indeks pengelolaan aset Kemenlu adalah dengan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan koordinasi internal dan rekonsiliasi tindak lanjut yang dilakukan dengan BPK.
2. Bimtek RKBMN, pengawasan dan pengendalian, dan Bimtek Laporan Keuangan termasuk melakukan Asistensi terhadap pengelolaan BMN bagi satker Pusat dan Perwakilan.
3. Penyampaian berita terkait ijin PSP dan penghapusan untuk satker Pusat dan Perwakilan RI, setelah verifikasi data dilakukan proses PSP dan penghapusan sesuai dengan kewenangan dalam hal ini pengguna barang/ pengelola barang.
4. Rapat koordinasi dengan instansi terkait dan pengajuan sertipikasi untuk tanah yang belum bersertipikat.

Realisasi atas pengelolaan aset tersebut di tahun 2023 adalah 2,91 yang didapat dari penilaian IPA oleh Kemenlu pada tahun 2022. Dengan demikian Kemenlu telah berhasil mencapai target IKU Indeks Pengelolaan Aset yang ditentukan di tahun 2023 sebesar > 2,9 atau 100,34% dari target.

Keberhasilan pencapaian target IKU Indeks Pengelolaan Aset sebagai berikut:

1. Nilai temuan atas pemeriksaan LKPP oleh BPK yang menurun dibanding nilai BMN yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
2. Jumlah temuan atas pemeriksaan LKPP oleh BPK yang menurun dibanding jumlah total temuan yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
3. Jumlah temuan atas pemeriksaan LKPP oleh BPK yang dapat diselesaikan meningkat.
4. Peningkatan nilai pada parameter tindak lanjut pengelolaan BMN yang menunjukan kemampuan Kemenlu menindaklanjuti persetujuan atas pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN.
5. Pendampingan dan Bimbingan Teknis dalam penyusunan Laporan BMN, baik LBKP, Wasdal maupun RKBMN.
6. Peningkatan atas dokumen kepemilikan BMN berupa tanah. Keberhasilan Kemenlu dalam mencatatkan sertipikasi tanah atas nama Pemerintah RI.
7. Formulasi penilaian parameter yang lebih mudah dinilai dan dipahami, sehingga Satker lebih paham untuk memenuhi pelaporan pengelolaan aset.
8. Pemindahtanganan/penghapusan BMN dengan status Rusak Berat (RB) untuk menunjang efisiensi anggaran pemeliharaan Peralatan dan Mesin baik berupa barang inventaris maupun kendaraan dinas.

Kendala dan Tantangan

Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu mengalami kenaikan, namun masih terdapat beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi, antara lain:

01

Kurangnya Pemahaman SDM Pengelola Aset

Kurangnya pemahaman SDM pengelola aset di Kemenlu Pusat maupun di Perwakilan RI atas parameter penilaian IPA.

02

Masih Terdapat Temuan Berulang

Masih terdapat temuan berulang yang perlu diantisipasi dan diselesaikan di tingkat Satker.

03

Tidak Semua Parameter Penilaian dapat Diterapkan di Satker

Tidak semua parameter penilaian dapat diterapkan di satker masing-masing baik Pusat maupun Perwakilan RI.

04

Kendala Teknis Penatausahaan BMN Berbasis Aplikasi

Kendala teknis penatausahaan BMN berbasis aplikasi belum dapat diterapkan pada negara tertentu, sehingga belum seluruh Perwakilan RI melakukan penatausahaan BMN secara optimal.

05

Tidak Mengirimkan Wasdal Tepat Waktu

Terdapat Perwakilan RI yang tidak mengirimkan wasdal tepat waktu berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan wasdal.

Upaya Perbaikan

Kemenlu melakukan upaya perbaikan untuk peningkatan pengelolaan aset meliputi:

01

Perubahan Parameter Penilaian IPA

Perubahan parameter penilaian IPA dari Kemenkeu maka dilakukan sosialisasi/bimtek untuk peningkatan kapasitas pejabat perbendaharaan dan pengelola BMN di lingkungan Kemenlu secara rutin dan berkesinambungan telah dilakukan dengan melibatkan DJKN dan DJPb Kemenkeu.

02

Sosialisasi/Bimtek dan Pendampingan Secara Intensif

Pelaksanaan sosialisasi/bimtek dan pendampingan secara intensif dilakukan sebagai upaya meminimalisir temuan berulang pada Satker.

03

Penyusunan Parameter IPA secara Khusus

Penyusunan parameter IPA secara khusus untuk dapat diterapkan pada satker Pusat dan Perwakilan RI dengan kriteria Indikator Kinerja SMART-C (*Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded*, dan *Continuously-improved*).

04

Pendampingan Intensif kepada Perwakilan RI

Pendampingan intensif kepada Perwakilan RI yang mengalami kendala teknis penatausahaan BMN berbasis aplikasi.

05

Monitoring secara Berkala

Melakukan *monitoring* secara berkala dan melakukan pendampingan bagi Perwakilan yang mengalami penyusunan wasdal agar disusun tepat waktu.

Analisis Program Pendukung Capaian

Upaya peningkatan Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

01 Koordinasi Rutin dengan Kemenkeu

Kemenlu secara rutin melakukan koordinasi erat dengan Kemenkeu untuk mendapatkan masukan terkait pengelolaan aset.

02 Diseminasi Melalui *Workshop*, Bimtek dan Pelatihan Pengelolaan Aset

Kemenlu melakukan diseminasi melalui *workshop*, bimtek dan pelatihan pengelolaan aset kepada Satker Pusat dan Perwakilan guna memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai pengelolaan BMN di lingkungan Kemenlu. Hal ini sebagai upaya pencapaian nilai IPA yang optimal di tingkat Satker.

03 Menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Setiap Periode Pelaporan

Kemenlu menyusun laporan barang kuasa pengguna setiap periode pelaporan (semesteran, triwulan III, tahunan) yang juga merupakan parameter evaluasi pengelolaan aset.

04 Upaya Pengamanan BMN Secara Administrasi, Fisik, dan Hukum

Kemenlu melakukan upaya pengamanan BMN secara administrasi, fisik, dan hukum untuk aset yang dikelolanya melalui pemasangan plang, pengusiran penghuni liar, penerbitan sertifikat, dan revitalisasi aset.

05 Tindak Lanjut atas Temuan-Temuan BPK

Secara aktif melakukan tindak lanjut atas temuan-temuan BPK untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset Kemenlu.

06 Pelaksanaan Reviu RKBMN

Pelaksanaan reviu RKBMN bertujuan agar dokumen RKBMN Kemenlu yang disusun sesuai dengan kebutuhan, baik di Pusat maupun di Perwakilan RI, pada tanggal 20-24 November 2023.

07 Koordinasi Rutin dengan Kemenkeu

Renovasi dan pengadaan gedung Kemenlu:

a. Pelaksanaan konstruksi pemugaran Gedung Pancasila yang merupakan cagar budaya sampai dengan Desember 2023 progres fisik pelaksanaan pemugaran mencapai 43,35% dan masih akan berlanjut sampai dengan bulan Juni 2024.

b. Melanjutkan pengadaan gedung kantor baru KBRI Berlin yang masih berlangsung dan akan diselesaikan di tahun 2024 (dimulai dari tahun 2021).

c. Penyelesaian pengadaan gedung kantor baru KBRI Tokyo yang dimulai di tahun 2021 dan selesai pada tahun 2023.

08 Diseminasi Melalui *Workshop*, Bimtek dan Pelatihan Pengelolaan Aset

Pendaftaran Sertipikat Hak Pakai (SHP) tanah dengan total luas 76.659 m^2 dilakukan tahun 2023, terdiri dari:

a. SHP Nomor 44, Jalan Pejambon, luas 7.513 m^2.

b. SHP Nomor 4, Komplek Deplu Kreo, luas 22.800 m^2.

c. SHP Nomor 2, Transit House III, luas 5.780 m^2.

d. SHP Nomor 3, Jalan Adam Malik, luas 11.104 m^2.

e. SHP Nomor 1, Komplek Deplu Cipadu, luas 29.462 m^2.

09 Pemisahan Nilai Tanah dan Bangunan Perwakilan RI

Pemisahan nilai tanah dan bangunan Perwakilan RI yang dilaksanakan oleh tim penilai Kemenlu bekerja sama dengan Kemenkeu pada:

a. KBRI Bangkok

Pemisahan pencatatan aset berupa tanah dan bangunan KBRI Bangkok, dengan rincian pemisahan atas tanah, bangunan gedung kantor, bangunan gudang, bangunan tempat ibadah, bangunan gedung olahraga tertutup, bangunan gedung olahraga terbuka, bangunan gedung pertemuan, bangunan gedung pendidikan, bangunan gedung perpustakaan, bangunan kolam, mess tempat peristirahatan, bangunan gedung tertutup semi permanen, gedung pos jaga dan pagar pengamanan.

b. KBRI Warsawa

Pemisahan pencatatan aset berupa tanah, bangunan dan pagar Wisma KBRI Warsawa dengan rincian pemisahan tanah, bangunan wisma dan pagar permanen.

c. KJRI Johor Bahru

Pemisahan pencatatan aset berupa tanah, gedung kantor, gedung pelayanan dan pagar pengamanan.

Proyeksi Ke Depan

Pengelolaan BMN yang baik sangat berperan penting, yang tercermin dari penilaian IPA masuk dalam salah satu parameter reformasi birokrasi. Kualitas pengelolaan BMN diupayakan akan ditingkatkan dari level Satker hingga tercermin pencapaiannya di level Kementerian. Guna peningkatan pengelolaan aset di lingkungan Kemenlu, proyeksi Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu tahun 2024 target menjadi 3,1 dengan naik dari target 2023 sebesar 2,91.

Persiapan penilaian IPA Kemenlu yang akan dilakukan di tahun mendatang untuk mencapai Indeks Pengelolaan Aset yang optimal diantaranya sebagai berikut:

01. Parameter IPA Secara Khusus akan Diterapkan Tahun 2024

Parameter IPA secara khusus akan diterapkan tahun 2024 pada satker Pusat dan Perwakilan RI dengan kriteria Indikator Kinerja SMART-C (*Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded*, dan *Continuously-improved*).

02. Melakukan penilaian IPA terhadap seluruh satker

Melakukan penilaian IPA terhadap seluruh satker baik Pusat maupun Perwakilan RI, sebagai salah satu bentuk pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN Kemenlu sebagai bentuk koordinasi dan pembinaan pengelolaan BMN Kemenlu.

03. Melakukan Penilaian IPA terhadap Seluruh Satker

Membentuk tim/satuan tugas untuk menilai IPA merujuk parameter yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan menyesuaikan dengan karakteristik/kondisi satuan kerja Pusat dan Perwakilan.

04. Meningkatkan Kualitas Data

Meningkatkan kualitas data yang dibutuhkan dalam penilaian IPA dalam bentuk penguatan kualitas database BMN Kemenlu.

05. Diseminasi kepada Satker Pusat dan Perwakilan

Melakukan diseminasi melalui *workshop*, Bimtek dan pelatihan pengelolaan BMN kepada Satker Pusat dan perwakilan sebagai salah satu upaya pencapaian nilai IPA yang optimal di tingkat Satker.

Upaya ke depan untuk peningkatan pengelolaan aset di lingkungan Kemenlu telah menyusun **pedoman pengisian *self-assessment* pengelolaan aset Perwakilan sebagai langkah perbaikan pengelolaan aset Kemenlu**, dengan menetapkan parameter pengelolaan aset Perwakilan menggunakan skala 1-4 untuk kemudian diaplikasikan pada tahun 2024 dengan mengacu pada KMK Nomor 228/KM.6/2023 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2023.

Dokumentasi Program Pendukung Capaian IKU L1.3.1 : Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu

Gambar III.160
Menlu Resmikan Gedung KBRI Abu Dhabi Bersama Menteri Energi dan Infrastruktur (PEA, Abu Dhabi, 9 November 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.161
Menlu Resmikan Gedung KBRI Tokyo Bersama Menteri Luar Negeri Jepang (Tokyo, 15 Desember 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.162
Rapat dengan DJKN terkait IPA (Jakarta, 8 Agustus 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.163
Bimtek RKBMN (Jakarta, 2 November 2023)
Sumber: Kemenlu

Sasaran Strategis Pendukung L1.4 :

Pengelolaan Anggaran Kemenlu yang Optimal dan Akuntabel

Dalam upaya mendukung tercapainya Visi dan Misi yang tertuang dalam dokumen Renstra Kemenlu 2020-2024, Kemenlu telah menetapkan Prioritas Polugri 2020-2024 yang bertumpu pada Prioritas 4+1, salah satu diantaranya adalah Memperkuat Infrastruktur Diplomasi.

Keberadaan infrastruktur diplomasi yang kuat ditopang oleh pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel. Lebih lanjut, pengelolaan anggaran adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari penyusunan rencana kerja, yang dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah, dan penyusunan Laporan Keuangan.Optimal adalah paling baik dan tertinggi.

Anggaran yang Optimal dicapai dengan penyerapan anggaran yang maksimal serta terpenuhinya target-target kinerja yang telah ditetapkan dan Akuntabel. Kemenlu berkomitmen untuk dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang baik dan transparan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Keberhasilan Sasaran Strategis ini diukur berdasarkan capaian 2 (dua) IKU sebagai berikut:

IKU L1.4.1:
Nilai Kinerja Anggaran Kemenlu

IKU L1.4.2:
Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu

Analisis IKU L1.4.1

Nilai Kinerja Anggaran Kemenlu

Deskripsi IKU

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan salah satu instrumen akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran berbasis kinerja yang dikelola Kemenlu. Penilaian NKA dimaksud dilaksanakan oleh Kemenkeu dengan konsolidasi perhitungan dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penilaian dan hasil kinerja atas perencanaan anggaran yang selanjutnya disebut sebagai nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA), merujuk nilai kinerja pada Aplikasi Monev Anggaran (SMART). Sedangkan penilaian dan hasil kinerja atas pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut sebagai nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), merujuk nilai pada aplikasi OMSPAN Kemenkeu.

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai EKA merupakan proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

Penilaian EKA merujuk pada evaluasi atas aspek implementasi, aspek manfaat, aspek konteks yang merujuk pada PMK Nomor 22/ PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Nilai EKA diukur dari komponen-komponen sebagai berikut:

1. Aspek implementasi:

a. Capaian keluaran (program dan kegiatan)
b. Penyerapan anggaran
c. Efisiensi
d. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

2. Aspek Manfaat:

a. Capaian Sasaran Strategis Kementerian
b. Capaian Sasaran Program Tingkat Eselon I/ program

3. Aspek konteks:

Kualitas informasi kinerja anggaran pada dokumen RKA K/L, termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah

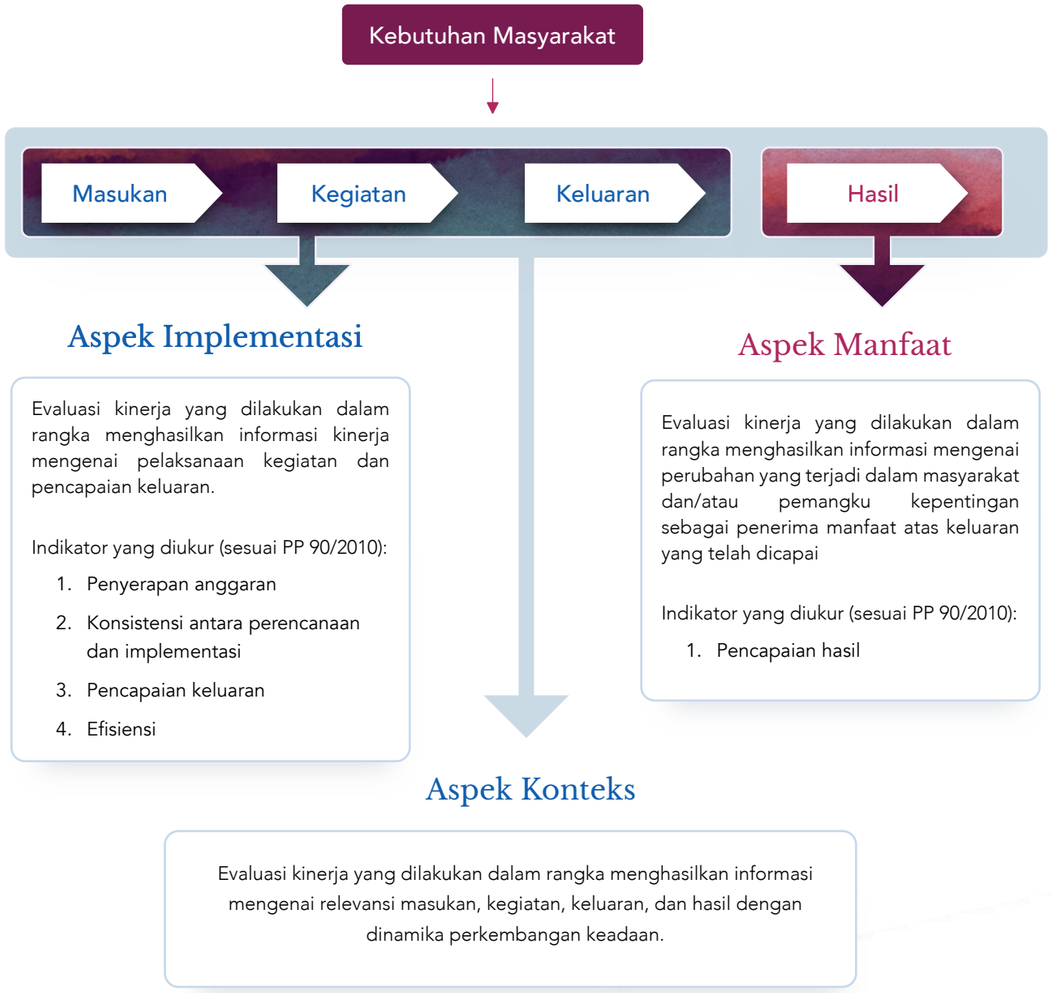

Gambar III.164
Variabel yang Diukur dalam EKA SMART
(Sumber: Permenkeu)

EKA untuk level Kementerian diperoleh dengan memperhitungkan 50% aspek nilai manfaat (Sasaran Strategis) dan 50% rata-rata nilai kinerja Eselon I.

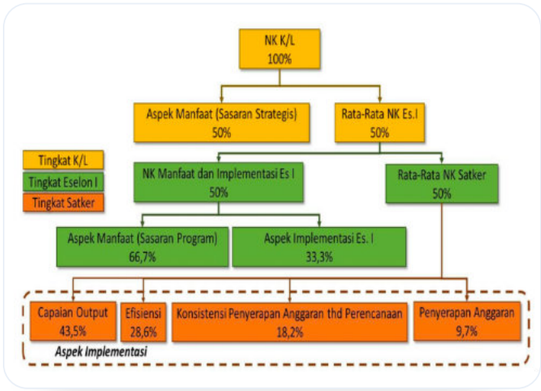

Gambar III.165
Formulasi Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran SMART (Sumber: Paparan Kemenkeu)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Penilaian IKPA merujuk pada PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja K/L untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Terdapat 8 Indikator Penilaian IKPA, sebagai berikut:

1. **Revisi DIPA (10 %)**
2. **Deviasi Halaman III DIPA (10 %)**
3. **Penyerapan Anggaran (20%)**
4. **Data Kontrak (10%)**
5. **Penyelesaian Tagihan (10%)**
6. **Pengelolaan UP/TUP (10%)**
7. **Dispensasi SPM (5%)**
8. **Capaian *Output* (25%)**

Pengukuran capaian IKU L1.4.1 Nilai Kinerja Anggaran Kemenlu mengacu pada PMK No. 62/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Penilaian dilakukan dengan menggabungkan nilai EKA dan nilai IKPA.

Pada tahun 2023, terdapat penyesuaian formulasi perhitungan NKA terdiri dari nilai EKA dan IKPA dengan bobot masing-masing 50% dari perhitungan sebelumnya pada tahun 2022 NKA diperoleh dari 60% Nilai EKA ditambah 40% Nilai IKPA.

Perhitungan IKU Nilai Kinerja Anggaran Kemenlu menggunakan formula sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Informasi Kinerja

Tabel III.73
Capaian IKU L1.4.1 Nilai Kinerja Anggaran Kemenlu

Sumber: Aplikasi SMART dan Aplikasi OM SPAN

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Nilai Kinerja Anggaran Kemenlu	Nilai EKA (Bobot 50%)	**96,40**
	Nilai IKPA (Bobot 50%)	**93,19**

**nilai EKA SMART dan IKPA per tanggal 24 Januari 2024*

Target	Realisasi	Capaian
93	94,80	101,94%

Data yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini adalah data final EKA (SMART) yang diperoleh dari Direktorat Sistem Penganggaran, Ditjen Anggaran, Kemenkeu, serta data IKPA yang diperoleh dari KPPN Jakarta I per 24 Januari 2024.

Pada tahun 2023, realisasi IKU L1.4.1 Nilai Kinerja Anggaran Kemenlu adalah sebesar 94,80 dari target sebesar 93, sehingga capaian IKU sebesar 101,94%.

> NKA Kemenlu didukung oleh realisasi seluruh Eselon I

NKA 94,80
Nilai Kinerja Anggaran Kemenlu
50% EKA SMART + 50% IKPA

EKA 96,40

EKA SMART terdiri dari komponen:
1. Capaian Sasaran Strategis : **100** (Bobot 50%)
2. Rata-rata Eselon I : **92,80** (Bobot 50%)

IKPA 93,19

IKPA terdiri dari komponen:
1. Kualitas perencanaan anggaran: **79,17** (Bobot 20%)
2. Kualitas pelaksanaan anggaran: **91,28** (Bobot 55%)
3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran: **98,22** (Bobot 25%)

NKA Kemenlu didukung oleh realisasi seluruh Eselon I (untuk Eselon I Setjen, termasuk Perwakilan RI). Berdasarkan data berikut ini terlihat bahwa belum seluruhnya mampu mencapai target NKA 92. Hal ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap NKA Kemenlu.

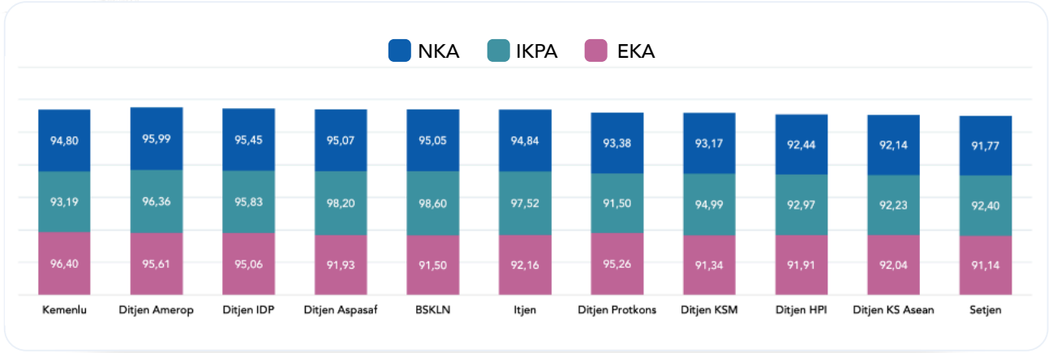

Gambar III.166
Nilai Kinerja Anggaran Eselon I
(Sumber: Data Aplikasi SMART dan OMSPAN Kemenkeu yang disampaikan oleh DSP DJA Kemenkeu dan KPPN I Jakarta, 24 Januari 2024)

Perbandingan Kinerja

Tabel III.74
Target, Realisasi, dan Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran Kemenlu

Sumber: AKSI Kemenlu

Kode IKU/SUB IKU		2021	2022		2023	
L1.4.1	Target	91	92	↑	**93**	↑
	Realisasi	96,22	93,27	↓	**94,80**	↑
	Capaian	105,74%	101,87%	↓	**101,94%**	↑

Pada tahun 2023, terdapat penyesuaian formula perhitungan IKU L1.4.1 Nilai Kinerja Anggaran Kemenlu, sehingga capaian maupun realisasi kinerjanya tidak dapat secara mutlak diperbandingkan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021, target IKU ini mengalami peningkatan target menjadi 93 pada tahun 2023 dari 92 pada tahun 2022 dan 91 pada tahun 2021. Peningkatan target ini merujuk pada target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Kemenlu 2020-2024.

Realisasi IKU Nilai Kinerja Anggaran Kemenlu pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 94,80 dari 93,27 pada tahun 2022. Peningkatan realisasi ini tidak terlepas dari sinergi dan komitmen seluruh entitas organisasi di lingkungan Kemenlu untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan kinerja anggaran yang andal dan akuntabel.

Capaian IKU ini mengalami peningkatan di tahun 2023 yang sebesar 101,943% dari tahun sebelumnya sebesar 101,87%. Peningkatan target, realisasi dan capaian IKU ini menunjukkan bahwa dari segi kualitas kinerja, Kemenlu meningkat dari tahun sebelumnya.

> “Peningkatan realisasi ini tidak terlepas dari sinergi dan komitmen seluruh entitas organisasi di lingkungan Kemenlu untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan kinerja anggaran

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Keberhasilan pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Kemenlu secara umum dipengaruhi oleh meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pengelolaan anggaran di lingkungan Kemenlu. Peningkatan tersebut utamanya didorong hal-hal sebagai berikut:

01
Bimbingan Teknis Penginputan Data Kinerja pada Aplikasi Perencanaan dan Monev Kinerja

Bimbingan teknis penginputan data kinerja pada aplikasi perencanaan dan monev kinerja memberikan pemahaman bagi para Manajer Kinerja dan operator aplikasi untuk memastikan pelaporan dilakukan secara tepat waktu, andal. Pada tahun 2023 terdapat perubahan cara penginputan capaian *output* yang semula dilakukan di SMART ke SAKTI. Kemenlu terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan pemahaman para operator aplikasi dalam melaporkan data kinerjanya.

02
Komitmen Kemenlu Beserta Seluruh Unit Organisasi Dibawahnya untuk Bersinergi

Komitmen Kemenlu beserta seluruh Unit Organisasi dibawahnya untuk bersinergi dalam memantau pengukuran, penilaian, dan analisis atas nilai NKA tahun anggaran berjalan sebagai rujukan rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Hal tersebut tercermin melalui rata-rata Unit Eselon I sudah mencapai nilai 94,01 dengan rentang capaian 91,77 - 95,99.

03
Inisiatif Kemenlu Melakukan Revisi Informasi Kinerja

Inisiatif Kemenlu untuk melakukan revisi informasi kinerja dengan mengidentifikasi informasi yang tidak tersedia dan/atau tidak sesuai pada aplikasi monev dengan aplikasi perencanaan KRISNA. Melalui upaya tersebut, capaian CSP Seluruh Unit Organisasi Eselon I pada tahun 2023 telah mencapai nilai optimal yaitu 100.

04
Melaksanakan Pertanggungjawaban Akhir Tahun

Komitmen Kemenlu dan seluruh Unit Organisasi di bawahnya untuk mengoptimalkan anggaran yang dimiliki dengan melaksanakan pertanggungjawaban akhir tahun sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Melalui upaya tersebut, capaian Penyerapan Anggaran Seluruh Unit Organisasi Eselon I pada tahun 2023 telah mencapai nilai optimal dengan rentang 97,97-100,00.

05
Monitoring dan Evaluasi secara Rutin dan Komprehensif

Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi secara rutin dan komprehensif melalui pemantauan realisasi *output* dan anggarannya. Dialog mengenai capaian *output* dan kendala yang dihadapi membantu Satker mengambil langkah-langkah korektif untuk peningkatan kinerja di tahun berjalan

06
Pengawalan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Rencana

Pengawalan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana agar pelaksanaan kegiatan konsisten dengan rencana yang telah ditetapkan.

07
Koordinasi Erat dan Rutin dengan Bappenas dan Kemenkeu

Koordinasi erat dan rutin dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk memastikan pelaksanaan kerja sesuai dengan rencana kerja yang mendukung capaian pembangunan nasional.

08
Koordinasi Erat dan Rutin dengan Satker, terkait Kebutuhan Anggaran serta Potensi SIAR

Koordinasi erat dan rutin dengan Satker, terkait dengan kebutuhan anggaran serta potensi SIAR, sehingga dapat dialihkan ke Satker yang membutuhkan anggaran tambahan.

09
Mengingatkan Seluruh Satker Melalui Nota Dinas dan Berita

Kemenlu selalu mengingatkan seluruh Satker melalui nota dinas dan berita kepada seluruh Satker untuk melakukan efisiensi belanja

10
Revisi RPD Triwulan guna Menjaga Konsistensi RPD

Kemenlu rutin menyampaikan kepada Satker, terkait dengan revisi RPD triwulan guna menjaga konsistensi RPD agar sesuai antara penarikan anggaran dengan kegiatan dan anggaran yang telah direncanakan.

11
Berita dan Nota ke Seluruh Satker terkait Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran

Dalam rangka upaya meningkatkan IKPA Kemenlu, Kemenlu menyampaikan berita dan nota ke seluruh Satker terkait dengan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran diantaranya:

a. Menyesuaikan rencana kegiatan dengan alokasi dana pada DIPA dan RPD pada Halaman III DIPA.

b. Melakukan percepatan proses pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan termasuk percepatan pengadaan barang/jasa.

c. Melakukan revisi anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Penyesuaian RPD terhadap kegiatan triwulanan melalui revisi pemutakhiran sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

e. Pengisian data capaian *output* yang akurat dengan menghitung tingkat kemajuan capaian beserta penyerapan anggaran.

f. Melakukan pembukuan transaksi keuangan dan melakukan *revolving* atas penggunaan dana Uang Persediaan (UP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kendala dan Tantangan

Kemenlu telah melakukan berbagai upaya positif dalam meningkatkan kinerja dan anggaran, namun masih terdapat *room for improvement* yang kedepannya dapat mendorong peningkatan Nilai Kinerja Anggaran Kemenlu. Terdapat beberapa faktor yang diidentifikasi mempengaruhi kinerja, diantaranya:

01

Perubahan Tata Cara Perhitungan pada IKPA

Perubahan tata cara perhitungan pada IKPA dari semula 12 indikator menjadi 8 indikator.

02

Kurang Intensifnya Koordinasi kerja

Perubahan tata cara penginputan dan koreksi capaian *output* yang sebelumnya dapat dilakukan melalui aplikasi SMART, namun pada tahun 2023 koreksi capaian *output* hanya dapat dilakukan melalui modul komitmen SAKTI dengan pembatasan periode penginputan.

03

Informasi Kinerja Belum Terintegrasi dengan Baik pada Aplikasi

Informasi kinerja belum terintegrasi dengan baik pada aplikasi perencanaan dan monev kinerja nasional sehingga menyebabkan perbedaan pada nomenklatur, target, volume dan satuan pada DIPA, e-Monev Bappenas, dan SMART Kemenkeu, yang berdampak pelaporan dan pengukuran capaian kinerja kurang optimal.

04

Belum Terintegrasinya Aplikasi Pengelolaan Kinerja secara Nasional

Masih belum terintegrasinya aplikasi pengelolaan kinerja secara nasional berdampak pada kerumitan penginputan dan pelaporan pada aplikasi, panjangnya prosedur penyesuaian data sehingga mempengaruhi kualitas pengelolaan kinerja khususnya pelaporan/*input* data informasi kinerja pada aplikasi.

05

Terdapat Deviasi yang Cukup Tinggi antara Penyerapan Anggaran dan Rencana Penarikan Dana

Secara teknis, terdapat deviasi yang cukup tinggi antara penyerapan anggaran dan rencana penarikan dana di tahun 2023, yang diantaranya dipengaruhi oleh realisasi belanja modal di Perwakilan RI yang bersumber pada PNBP dan tergantung pada jadwal Maksimum Pencairan (MP) dan juga sangat tergantung pada prosedur belanja serta situasi di lapangan/negara akreditasi.

06

Dinamika Kurs yang Tidak Menentu

Dinamika Kurs yang tidak menentu yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.

07

Mutasi Pegawai yang Tinggi pada Kemenlu

Mutasi pegawai yang tinggi pada Kemenlu, menyebabkan perlunya menjaga *institutional memory* pada tiap Unit Organisasi sehingga dituntut cepat beradaptasi dalam berbagai perubahan sistem pengelolaan kinerja nasional.

Upaya Perbaikan

Guna mengatasi berbagai tantangan yang ada, Kemenlu telah menerapkan berbagai solusi untuk memperbaiki pengelolaan kinerja anggaran, diantaranya:

01

Mengatasi *Gap* Pemahaman Pengelola Kinerja Karena Mutasi Pegawai yang Tinggi

Sosialisasi/bimtek pengelolaan kinerja (perencanaan, pelaksanaan, monev) secara berkala dan intensif serta komprehensif untuk Satker Pusat dan Perwakilan RI guna mengatasi *gap* pemahaman pengelola kinerja karena mutasi pegawai yang tinggi. Selain itu disediakan pula videografis tutorial pengoperasian aplikasi monev kinerja SMART dan e-Monev untuk internal Kemenlu sehingga dapat memberikan panduan serta sarana *sharing* dan *transfer of knowledge* bagi pengelola kinerja yang baru. Sebagai contoh, telah dilakukan sosialisasi kepada Satker Pusat dan Perwakilan untuk meningkatkan pemahaman tentang komponen dan penginputan IKPA yang direformulasi di TA 2023, bimtek aplikasi SMART dan e-monev serta perhitungan Nilai Capaian Kinerja Organisasi melalui AKSI TA 2023.

02

Kegiatan Koordinasi Sekaligus Asistensi dalam Rangka Pengisian IKPA

Guna memperoleh nilai IKPA yang maksimal, Kemenlu telah melaksanakan 4 (empat) kali kegiatan koordinasi *one on one meeting* sekaligus asistensi dalam rangka pengisian IKPA pada satker perwakilan RI di Luar Negeri yaitu pada bulan Mei 2023, Juni 2023, Agustus 2023, dan September 2023. Kegiatan asistensi dan bimbingan teknis dilakukan dalam bentuk *one-on-one meeting* dengan menghadirkan narasumber dari KPPN Jakarta I dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Kemenkeu. Kegiatan dihadiri juga oleh Biro Keuangan, Biro Perencanaan dan Organisasi, Satker Pusat, dan Satker Perwaklan RI.

03

Memetakan Seluruh Informasi Kinerja pada Nomenklatur, Target, Volume dan Satuan pada DIPA

Koordinasi intensif dengan seluruh Unit Organisasi dan K/L terkait untuk memetakan seluruh informasi kinerja pada nomenklatur, target, volume dan satuan pada DIPA, serta aplikasi pengelolaan kinerja nasional (KRISNA, SAKTI, OMSPAN, e-Monev dan SMART) telah selaras sehingga pengukuran realisasi dan pelaporan kinerja anggaran akurat.

04

Kegiatan Monev Komprehensif EKA dan IKPA Setiap Triwulan

Kegiatan Monev Komprehensif EKA dan IKPA dalam bentuk dialog kinerja seluruh Satker Eselon I Pusat dan Perwakilan RI dilakukan rutin setiap Triwulan sebagai upaya mengoptimalkan capaian target kinerja dan anggaran. Dilakukan evaluasi dan identifikasi kendala serta proyeksi capaian target untuk menentukan langkah penyesuaian/revisi guna mendukung capaian Kemenlu yang optimal.

05

Revisi DIPA secara Selektif

Melakukan revisi DIPA secara selektif, terutama yang bersifat pergeseran anggaran. Dalam hal ini Perwakilan telah melakukan revisi pemotongan anggaran untuk optimalisasi kinerja pelaksanaan anggaran.

06

Strategi Koordinasi Percepatan Pencairan UP/TUP dan Penihilan UP/TUP

Strategi koordinasi percepatan pencairan UP/TUP dan penihilan UP/TUP sehingga serapan anggaran lebih optimal, serta koordinasi yang erat terkait dengan potensi kebutuhan dan kelebihan anggaran antara Perwakilan RI dengan Pusat sehingga potensi SIAR dapat dialihkan ke Pusat/ Perwakilan RI yang membutuhkan.

07

Pemantapan dan Pembekalan Substansi

Melakukan pemantapan dan pembekalan substansi serta proses *transfer knowledge* kepada pegawai yang akan mutasi.

Analisis Program Pendukung Capaian

Berbagai program kegiatan yang dilakukan untuk mendorong peningkatan IKU L1.4.1 Nilai Kinerja Anggaran Kemenlu sepanjang tahun 2023 yaitu:

01 Penyusunan Program Bimtek Renja-RKAKL Tahun 2023

Tangerang, 13–27 Juni 2023

Sinergi penyusunan program dan kegiatan pada Bimtek Renja-RKAKL tahun 2023, hal ini dilakukan untuk kesepahaman penyusunan target kinerja seluruh Satker Kemenlu Pusat dan Perwakilan, pelaksanaan di Tangerang pada tanggal 13 – 27 Juni 2023.

02 *Training of Trainers* (TOT)

Jakarta, 14 Maret 2023
dan 15 September 2023

Training of Trainers (TOT) diberikan dari narasumber Kemenkeu kepada pemegang *desk* di Kemenlu Pusat, agar dapat meningkatkan kapabilitas dan pendampingan dalam rangka mengoptimalkan nilai kinerja anggaran Kemenlu, pelaksanaan di Jakarta, pada tanggal 14 Maret 2023 dan 15 September 2023.

03 Monev Tw IV 2022 dan Bimtek Aplikasi Monev Tw I 2023

Jakarta, 9–12 Mei 2023

Monev Tw IV 2022 dan Bimtek Aplikasi Monev Tw I 2023 dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja dan mengidentifikasi nilai komponen rendah pada nilai kinerja anggaran, pelaksanaan diikuti seluruh peserta kurang Satker Kemenlu Pusat dan Perwakilan, pelaksanaan di Jakarta pada tanggal 9–12 Mei 2023.

04 Monev Tw II, III dan IV 2023

Jakarta,
12–24 Juli 2023
16–20 Oktober 2023
12–15 Desember 2023

Monev Tw II, III dan IV 2023 dilakukan berkala untuk menggali dan berkomunikasi dengan seluruh Satker Kemenlu Pusat dan Perwakilan guna meningkatkan nilai kinerja anggaran Kemenlu, pelaksanaan di Jakarta pada tanggal 12–24 Juli 2023, 16–20 Oktober 2023, dan 12–15 Desember 2023.

05 Bimtek dari KPPN Jakarta I

Jakarta ,
2-4 Agustus 2023,
20-22, 25 September 2023,
2-3 Oktober 2023

Bimtek dari KPPN Jakarta I kepada satker yang memiliki nilai IKPA bulanan yang rendah, pelaksanaan di Jakarta pada tanggal 2-4 Agustus 2023, 20-22, 25 September 2023, dan 2-3 Oktober 2023.

Proyeksi Ke Depan

Peningkatan nilai kinerja anggaran Kemenlu berkelanjutan ditargetkan Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 sebesar 94 sebagaimana tertuang pada Renstra Kemenlu 2020-2024. Upaya ke depan yang akan dilakukan untuk pengelolaan anggaran yang akuntabel dan efisien serta memastikan target pada tahun berikutnya dapat tercapai, beberapa inisiasi yang dilakukan ke depan diantaranya:

01. Meninjau Kembali Struktur Informasi Kinerja

Dalam menghadapi perubahan cara pelaporan pada aplikasi SMART dan SAKTI, Kemenlu akan meninjau kembali struktur informasi kinerja dengan melaksanakan *assessment* RO yang diadopsi di lingkungan Kemenlu.

02. Meningkatkan Kompetensi SDM terkait Pengelolaan Kinerja dan Aplikasinya

Terus meningkatkan kompetensi SDM melalui bimbingan teknis untuk memberikan pemahaman terkait pengelolaan kinerja dan aplikasinya kepada operator maupun Manajer Kinerja (MKO/SMKO/MKP) yang berada di lingkungan satuan kerja Kemenlu.

03. Menyusun Perencanaan Program dan Penganggaran yang Lebih Akurat

Menyusun perencanaan program dan penganggaran yang lebih akurat sehingga dapat meminimalkan/melakukan revisi DIPA secara selektif, terutama yang bersifat pergeseran anggaran.

04. Mengeksekusi Anggaran Secara Proporsional

Mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai dengan target penyerapan anggaran tanpa mengabaikan capaian RO kegiatan.

05. Mendorong Integrasi Data pada Aplikasi Pengelolaan Kinerja Nasional

Terus mendorong upaya integrasi data pada aplikasi pengelolaan kinerja nasional serta melakukan pengembangan aplikasi pengelolaan kinerja Kemenlu yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

06. Menyusun Perencanaan Program dan Penganggaran yang Lebih Akurat

Memberikan pendampingan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Satker Pusat dan Perwakilan serta memberikan berbagai bimbingan teknis/sosialisasi kepada para pemegang *desk* di Pusat maupun para pengelola keuangan di Perwakilan RI.

04. Mengeksekusi Anggaran Secara Proporsional

Mengembangkan dan mensosialisasikan penerapan aplikasi kartu kendali *online* untuk meminimalisir kesalahan dalam pertanggungjawaban keuangan.

> Upaya ke depan yang akan dilakukan untuk pengelolaan anggaran yang akuntabel dan efisien serta memastikan target pada tahun berikutnya dapat tercapai

Dokumentasi Program Pendukung Capaian IKU L1.4.1 : Nilai Kinerja Anggaran Kemenlu

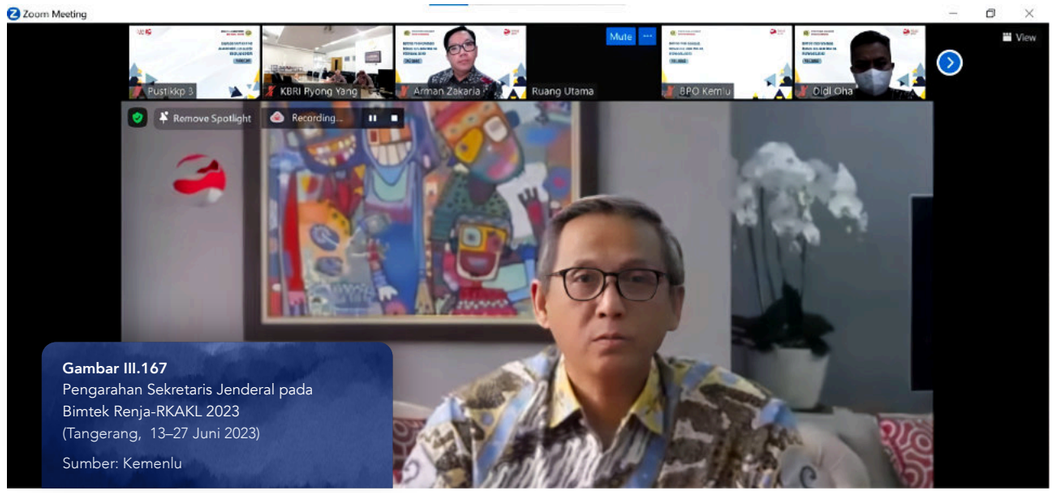

Gambar III.167
Pengarahan Sekretaris Jenderal pada Bimtek Renja-RKAKL 2023
(Tangerang, 13–27 Juni 2023)
Sumber: Kemenlu

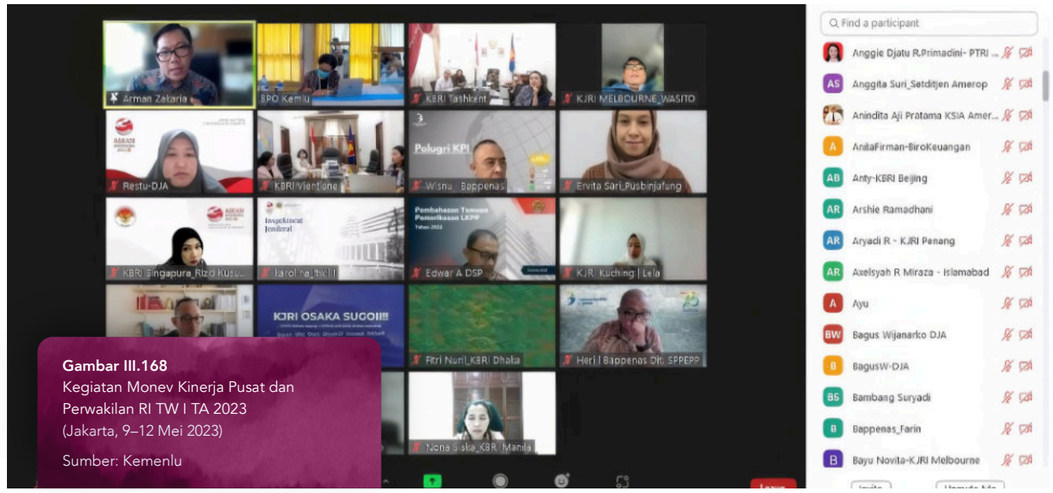

Gambar III.168
Kegiatan Monev Kinerja Pusat dan Perwakilan RI TW I TA 2023
(Jakarta, 9–12 Mei 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.169
One-on-One Meeting dan Asistensi dalam rangka Bimbingan Pengisian IKPA Satker Perwakilan RI di Luar Negeri
(Jakarta, 8 Agustus 2023)
Sumber: Kemenlu

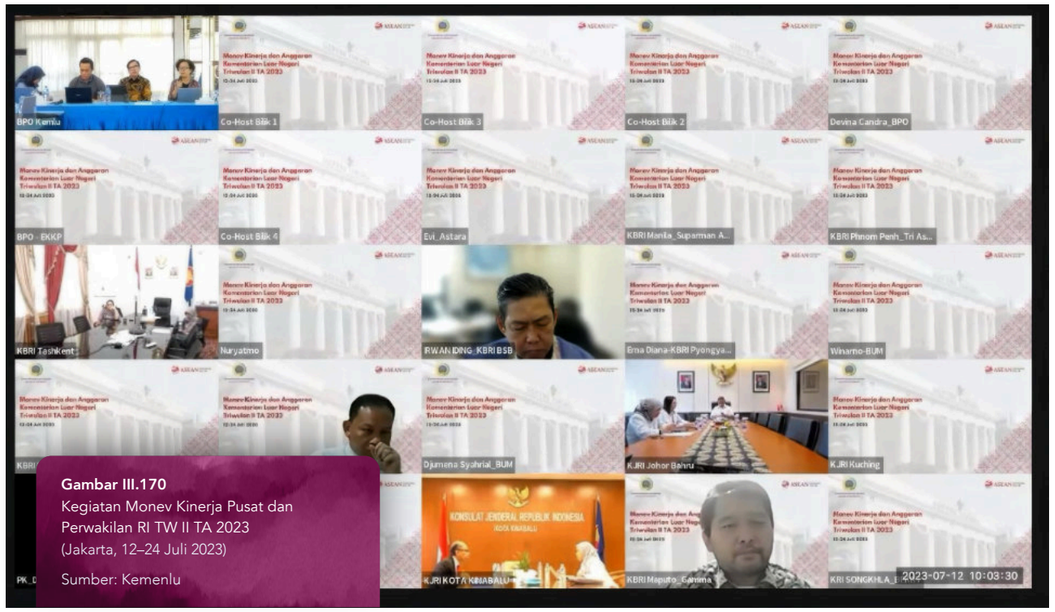

Gambar III.170
Kegiatan Monev Kinerja Pusat dan Perwakilan RI TW II TA 2023
(Jakarta, 12–24 Juli 2023)
Sumber: Kemenlu

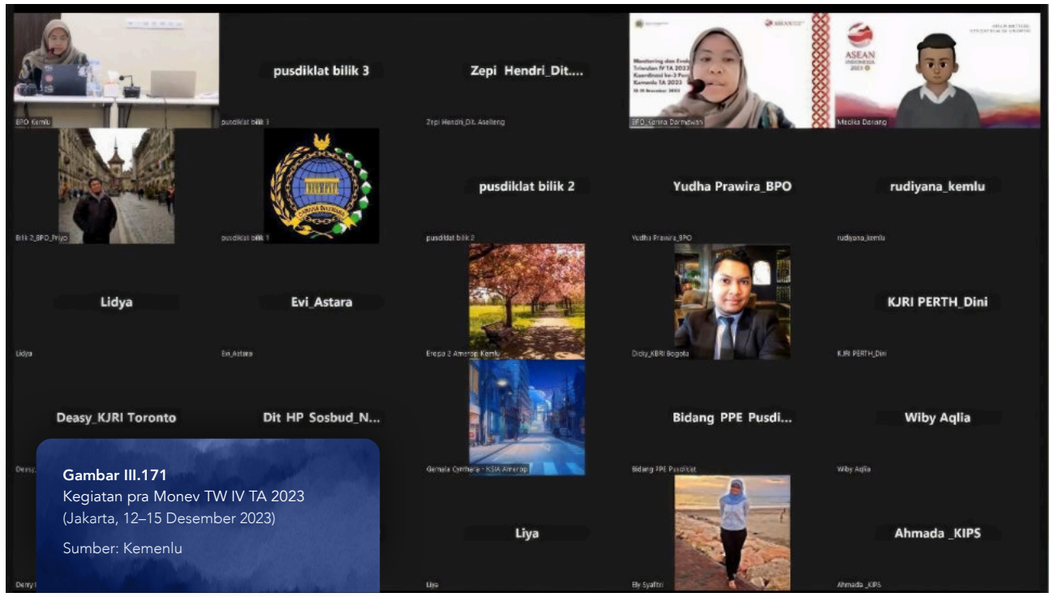

Gambar III.171
Kegiatan pra Monev TW IV TA 2023
(Jakarta, 12–15 Desember 2023)
Sumber: Kemenlu

Analisis IKU L1.4.2

Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu

Deskripsi IKU

Opini BPK adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektifitas sistem pengendalian intern (SPI).

Laporan Keuangan (LK) Kemenlu adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola Kemenlu yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). LK Kemenlu disusun merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait penyusunan LK, dan merupakan suatu kesatuan/konsolidasi dari 144 Satuan Kerja (Satker), yang terdiri dari 13 Satker Pusat dan 131 Satker Perwakilan RI. Keakuratan data dari 144 Satker tersebut akan sangat mendukung pada kualitas LK Kemenlu.

Laporan Keuangan Kemenlu disusun sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

> LK Kemenlu disusun merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait penyusunan LK, dan merupakan suatu kesatuan/ konsolidasi dari 144 Satuan Kerja

Opini Badan Pemeriksa Keuangan

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat tipe opini atas laporan keuangan, yaitu:

Skala 4

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian memuat pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi keuangan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan SAP, Opini WTP hanya dapat diberikan bila pemeriksa berpendapat bahwa berdasarkan audit yang sesuai dengan standar, penyajian LK telah sesuai SAP, lengkap, konsisten, dan mengandung penjelasan atau pengungkapan yang memadai, sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan.

Skala 3

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Opini WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Kondisi-kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini WDP adalah adanya salah saji sebagai berikut:

1 WDP karena adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji)

Pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa salah saji yang terjadi baik secara individual maupun agregat, adalah material, tapi tidak *pervasive*, terhadap laporan keuangan.

2 WDP karena adanya pembatasan lingkup (ketidakcukupan bukti)

Pemeriksa, tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai untuk dijadikan dasar opini, tetapi pemeriksa menyimpulkan bahwa dampak yang mungkin terjadi (*possible effects*) pada laporan keuangan atas salah saji yang tidak terdeteksi, apabila ada, adalah material tetapi tidak *pervasive*.

Skala 2

Opini Tidak Wajar (TW)

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TW adalah ketika pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah sangat material dan *pervasive*. Sifat *pervasive* (berpengaruh secara keseluruhan) di antaranya dapat dilihat dari kompleksitas, proporsinya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, dan persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental.

Skala 1

Opini Tidak Memberikan Pendapat

Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat menyatakan bahwa Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas LK. Opini ini dapat diterbitkan apabila Pemeriksa tidak yakin atau ragu akan kewajaran LK karena Pemeriksa tidak dapat melaksanakan audit sesuai standar sebagai akibat pembatasan ruang lingkup audit, Pemeriksa berkedudukan tidak independen terhadap pihak yang diauditnya dan adanya ketidakpastian luar biasa yang sangat mempengaruhi kewajaran LK.

Gambar III.172
Opini BPK atas Laporan Keuangan (Sumber: UU Nomor 15 Tahun 2004)

Indeks opini BPK = Kesesuaian SAP + Kecukupan Pengungkapan + Kepatuhan Peraturan + Efektivitas SPI

IKU L1.4.2 ditujukan untuk mengukur seberapa jauh tingkat kewajaran penyajian LK Kemenlu dengan menggunakan formula:

Indeks opini BPK

Jika ditetapkan target tertinggi (WTP) yang mengakibatkan realisasi tidak dapat melebihi dari target, maka capaian atas IKU dengan realisasi sesuai target tertinggi dikonversi menjadi 120% (penerapan polarisasi *maximize*).

Data yang disampaikan merupakan hasil Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan tahun sebelumnya yang diperoleh pada Triwulan II tahun berjalan.

> capaian atas IKU dengan realisasi sesuai target tertinggi dikonversi menjadi 120%

Informasi Kinerja

Tabel III.75
Indeks opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu

Sumber: AKSI Kemenlu

Indikator Kinerja Utama	Informasi Kinerja	Jumlah
Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu	Indeks opini BPK atas laporan keuangan Kemenlu	**4** (WTP)

Target	Realisasi	Capaian
4 (WTP)	4 (WTP)	120,00%

Laporan Keuangan Kemenlu Tahun 2022 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK diterima tanggal 3 Agustus 2023. Opini WTP yang merupakan pencapaian opini audit terbaik atas suatu laporan keuangan merupakan prestasi yang diraih oleh Kemenlu selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut sejak tahun 2016.

Opini yang diraih tersebut merupakan wujud dari komitmen pimpinan beserta seluruh jajaran di lingkungan Kemenlu untuk selalu menindaklanjuti seluruh rekomendasi pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang andal, akuntabel dan transparan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

> Opini WTP yang merupakan pencapaian opini audit terbaik atas suatu laporan keuangan merupakan prestasi yang diraih oleh Kemenlu selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dengan Opini WTP diserahkan secara simbolis oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara Anggota I BPK kepada Menteri Luar Negeri pada 3 Agustus 2023. BPK mengharapkan agar beberapa kelemahan mendapat perhatian dari segenap pimpinan Kemenlu untuk segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku sehingga di tahun mendatang opini atas laporan keuangan Kemenlu dapat dipertahankan. Rekomendasi yang dihasilkan dari pemeriksaan BPK merupakan bagian yang penting dari pemeriksaan itu sendiri sehingga perlu dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Berdasarkan ketentuan ayat (1) Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Selain itu, Kemenlu juga diharapkan dapat secara konsisten melakukan perbaikan, diantaranya melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas Inspektorat Jenderal selaku APIP, evaluasi atas proses perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan pemahaman dan kemampuan atas tata kelola keuangan.

Gambar III.173
Kriteria Opini BPK
(Sumber: UU nomor 15 Tahun 2004)

Perbandingan Kinerja

Tabel III.76
Target, Realisasi dan Capaian IKU L1.4.2 Indeks opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu

Sumber: AKSI Kemenlu

Kode IKU/ SUB IKU		2020	2021	2022	2023
L1.4.2	Target	4	4 ↔	4 ↔	**4** ↔
	Realisasi	4	4 ↔	4 ↔	**4** ↔
	Capaian	120%	120% ↔	120% ↔	**120%** ↔

Realisasi IKU L1.4.2 Indeks opini BPK atas laporan keuangan Kemenlu bertahan pada raihan tertinggi dengan realisasi 4 (WTP). Perhitungan capaian IKU L1.4.2 berbeda dengan IKU pada umumnya, jika realisasi IKU mencapai indeks tertinggi sebesar 4 (WTP), maka capaian atas IKU L1.4.2 dikonversi menjadi 120%.

Perbandingan Kinerja dengan Realisasi Nasional

Tabel III.77
Perbandingan Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Sumber: Laporan Tahunan Kemenkeu data diolah Kemenlu

Kode IKU/SUB IKU		2020	2021	2022	2023
L1.4.2	Kemenlu	**4**	**4** ↔	**4** ↔	**4** ↔
	LKPP	4	4	4	4

**menggunakan nilai 2022, nilai 2023 dirilis pada pertengahan tahun 2024*

Realisasi IKU L1.4.2 Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu tercatat sama dengan raihan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Tren indeks opini BPK atas LK Kemenlu tahun 2020-2023 terlihat pada tabel menunjukkan bahwa telah mencapai target. Berdasarkan tabel dimaksud, dapat dilihat bahwa IKU L1.4.2 Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu telah mendukung capaian LKPP secara nasional. Indeks Opini BPK atas LK Kemenlu maupun LKPP tahun 2023 baru akan dikeluarkan setelah dilakukan audit atas laporan keuangan pada tahun 2024.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

Raihan Opini WTP merupakan kerja keras dan komitmen Pimpinan beserta seluruh jajaran di lingkungan Kemenlu untuk melakukan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta pelaksanaan pencatatan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan akuntabel.

Secara bersamaan, Kemenlu juga selalu berkoordinasi secara aktif dengan BPK RI, Kemenkeu, APIP dan satker di Kemenlu dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu, di mana hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian atas kewajaran laporan keuangan. Adapun wujud koordinasi aktif dengan *stakeholders* tercermin pada:

01
BPK RI

Koordinasi aktif dengan BPK RI untuk mencapai opini WTP atas laporan keuangan meliputi kegiatan konsultasi atas penyajian riil akun Kas di Bendahara Pengeluaran Kemenlu RI, perumusan jurnal koreksi hasil pemeriksaan BPK RI, serta penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK RI.

02
Kemenkeu

Koordinasi aktif dengan Kemenkeu untuk mencapai opini WTP atas laporan keuangan yaitu konsultasi terkait permasalahan keuangan atau akuntansi atas praktik yang terjadi di Kemenlu RI pada proses rekonsiliasi hingga pelaporan keuangan secara periodik.

03
APIP

Koordinasi aktif dengan APIP Kemenlu untuk mencapai opini WTP atas laporan keuangan meliputi koordinasi secara kontinyu atas penyajian laporan keuangan periodik Kemenlu baik pada saat proses penyusunan hingga pada tahapan evaluasi serta penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK RI.

APIP memastikan adanya peningkatan kualitas pelaporan keuangan melalui kegiatan reviu laporan keuangan terhadap seluruh unit organisasi/unit kerja dan Perwakilan. Pelaksanaan reviu terhadap dokumen LK dengan menelaah ulang bukti-bukti suatu kegiatan yang dilaporkan, sehingga dapat memastikan bahwa kegiatan yang dilaporkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. Selain menjamin pelaporan keuangan Kemenlu terlaksana dengan baik, guna meraih opini BPK WTP, APIP Kemenlu senantiasa melakukan pemantauan tindak lanjut temuan dan rekomendasi BPK, serta melaksanakan berbagai perbaikan dalam pelaporan keuangan.

04
Satker Kemenlu

Koordinasi aktif dengan satker pada Kemenlu untuk mencapai opini WTP atas laporan keuangan meliputi koordinasi terkait penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Kemenlu.

Dalam upaya untuk selalu konsisten menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, satuan kerja pada Kemenlu secara rutin mengadakan kegiatan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan bagi para pejabat penyusun laporan keuangan pada seluruh satker Kemenlu. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara khusus maupun berbarengan dengan kegiatan penyusunan laporan keuangan secara periodik. Selain itu, secara periodik dilakukan evaluasi data dukung penyusunan laporan keuangan dari seluruh satker dan diberikan saran tindak perbaikan sebelum dilakukan konsolidasi penyusunan laporan keuangan.

> Raihan Opini WTP merupakan kerja keras dan komitmen Pimpinan beserta seluruh jajaran di lingkungan Kemenlu

Kendala dan Tantangan

Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan opini WTP dari BPK RI untuk tahun 2023, antara lain:

01	Integrasi Aplikasi SAKTI dengan Aplikasi Internal Kemenlu	Integrasi Aplikasi SAKTI dengan aplikasi internal Kemenlu untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan keuangan.
02	Peningkatan Kompetensi Pengelola Keuangan di Pusat dan Perwakilan	Peningkatan kompetensi pengelola keuangan di Pusat dan Perwakilan serta kompetensi SDM pada Biro Keuangan.
03	Pengawasan terhadap Ketertiban Pengelolaan Keuangan	*Monitoring* dan pengawasan terhadap ketertiban pengelolaan keuangan di Pusat dan Perwakilan.
04	Pemutakhiran Peraturan dan Kebijakan	Pemutakhiran peraturan dan/atau kebijakan terkait pengelolaan keuangan.
05	Penyelesaian Permasalahan Keuangan	Penyelesaian permasalahan keuangan yang berlarut-larut.
06	Penyelesaian Rekomendasi Temuan BPK	Penyelesaian rekomendasi tindak lanjut temuan BPK tahun-tahun sebelumnya.

Upaya Perbaikan

Upaya mempertahankan opini WTP di tahun 2023 dilakukan melalui:

01

Digitalisasi Pengelolaan Anggaran

Mengikuti kemajuan perkembangan Informasi dan teknologi (IT) yang begitu pesat, adapun salah satu upaya pengelolaan anggaran di lingkungan Kemenlu adalah melalui, "Digitalisasi Pengelolaan Anggaran" yang meliputi 3 (tiga) hal:

a. Perubahan pola kerja yang berorientasi pada inovasi teknologi sesuai dengan perkembangan zaman yang sangat cepat.

b. Perubahan dari sistem manual (*paper-based*) menjadi sistem digital.

c. Meninggalkan metode pembayaran tunai menjadi *cashless* di seluruh Satuan Kerja di Pusat dan Perwakilan RI.

02

Peningkatan Kompetensi Pengelola keuangan

Melaksanakan peningkatan kompetensi pengelola keuangan melalui:

a. Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada K/L.

b. Memberikan berbagai bimbingan teknis/sosialisasi Aplikasi SAKTI dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyusun Laporan Keuangan di Satker Pusat dan Perwakilan RI.

c. Memberikan berbagai bimbingan teknis/sosialisasi kepada calon BPKRT dan pegawai setempat yang akan ditempatkan di Perwakilan RI dalam rangka meningkatkan kualitas SDM penyusun Laporan Keuangan di Perwakilan RI.

03

Monitoring dan Pengawasan terhadap Ketertiban Pengelolaan Keuangan

Melaksanakan *monitoring* dan pengawasan terhadap ketertiban pengelolaan keuangan melalui:

a. *Monitoring* dan evaluasi rekonsiliasi eksternal antara Satker Pusat dan Perwakilan RI dengan KPPN Jakarta I Kemenkeu dalam rangka meningkatkan kualitas data laporan keuangan, rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan.

b. Pendampingan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Pusat dan Perwakilan, serta pendampingan pemeriksaan BPK terhadap Satker-satker yang dijadikan sampling.

c. Koordinasi yang intensif dengan Satker Pusat dan Perwakilan RI dalam rangka menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan.

d. Pendampingan dalam pengelolaan keuangan serta penyusunan Laporan Keuangan Satker Pusat dan Perwakilan RI sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

e. Melakukan analisis data dukung laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

f. Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya, mencakup Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PITE), Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK), dan Pengendalian Aplikasi kinerja keuangan, serta menilai Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian.

04

Pemutakhiran Peraturan dan/atau Kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan

Melakukan pemutakhiran peraturan dan/atau kebijakan terkait pengelolaan keuangan melalui:

a. Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Petunjuk Teknis Akuntansi pada Kemenlu untuk melakukan penyusunan, perubahan dan penyesuaian pada pedoman akuntansi yang ada sesuai dengan ketentuan dan perkembangan kebijakan akuntansi yang berlaku.

b. Melakukan koordinasi yang intensif dengan Kemenkeu dalam rangka penyusunan kebijakan akuntansi di Kemenlu dan penyelesaian kendala-kendala yang dihadapi terkait Aplikasi SAKTI.

05

Penyelesaian Permasalahan Keuangan yang Berlarut-larut

Melakukan upaya penyelesaian permasalahan keuangan yang berlarut-larut dengan membentuk Tim Percepatan Penyelesaian PK Minus dan Selisih Kas pada Satker Perwakilan RI.

06

Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan BPK Tahun-Tahun Sebelumnya

Melakukan tindak lanjut rekomendasi atas temuan BPK di tahun-tahun sebelumnya. APIP Kemenlu melakukan koordinasi terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK melalui aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) setiap semester.

Analisis Program Pendukung Capaian

Penyelenggaraan program kegiatan untuk untuk mempertahankan Indeks Opini BPK atas LK Kemenlu tahun 2023, meliputi:

01

Penyusunan Kertas Kerja Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan Tahun 2023

Penyusunan Kertas Kerja Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan tahun 2023, kertas kerja tersebut merupakan media pendukung yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa Pelaporan Keuangan telah disusun dengan pengendalian intern yang memadai.

02

Interkoneksi SIMKEU dengan SAKTI

Interkoneksi SIMKEU dengan SAKTI yang memenuhi kebutuhan satker Perwakilan RI secara bertahap. Implementasi ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan sistem pembukuan riil transaksi, khususnya dalam *local currency* (mata uang setempat) pada satker Perwakilan RI di luar negeri sejak awal TA 2023. Implementasi pengembangan SIMKEU untuk interkoneksi SIMKEU-SAKTI dimulai dengan sinkronisasi pagu pada tanggal 10 Januari 2023.

> Diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan sistem pembukuan riil transaksi, khususnya dalam *local currency*

Selanjutnya, dilakukan pengembangan SIMKEU untuk dapat mengakomodasi kebutuhan satker kementerian teknis pengguna SIMKEU sesuai amanat PMK Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

03 Reviu oleh APIP Internal

Reviu oleh APIP internal untuk memitigasi potensi kesalahan dalam pengelolaan angggaran Kemenlu dan Perwakilan serta dalam penyusunan LK. Pelaksanaan reviu sepanjang tahun 2023 dapat digambarkan melalui *timeline* berikut:

Gambar III.174
Timeline Kegiatan Reviu LK Kemenlu (Sumber Kemenlu)

Proyeksi Ke Depan

Guna terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan, Indeks Opini BPK tahun 2024 ditargetkan 4 (WTP) sebagaimana telah tertuang pada Renstra Kemenlu 2020-2024. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai berikut:

01. Meningkatkan Koordinasi Internal

Meningkatkan koordinasi internal dengan Satker Pusat maupun Perwakilan untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi.

02. Meningkatkan Kerja Sama dengan Kemenkeu

Meningkatkan kerja sama dengan Kemenkeu untuk memberikan panduan maupun bimbingan terkait pertanggungjawaban keuangan dan penyusunan laporan keuangan bagi Satker Pusat dan Perwakilan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Penyusun Laporan Keuangan tingkat Satker dan Kementerian.

03. Koordinasi dengan Kemenkeu terkait Kendala Aplikasi maupun Perkembangan Kebijakan Akuntansi

Meningkatkan koordinasi dengan Kemenkeu terkait kendala aplikasi maupun perkembangan kebijakan akuntansi atas transaksi yang terjadi di Satker-satker Kemenlu.

04. Koordinasi dan Komunikasi yang Efektif dengan APIP dan BPK RI

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan BPK RI dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan dan akuntabel.

Dokumentasi Program Pendukung Capaian IKU L1.3.1 : Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu

Gambar III.175
Penyerahan LHP BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu TA 2022
(Jakarta, 3 Agustus 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.176
Penyusunan Laporan Keuangan Kemenlu TA 2022 *Unaudited*
(Hotel Hermitage, Jakarta, 31 Januari 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.177
Penyusunan Laporan Keuangan Kemenlu TA 2022 *Audited*
(Gedung Arsip, Jakarta, 13 April 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.178
Evaluasi Kartu Pengawas Satker Perwakilan Semester I TA 2023
(Gedung Arsip, Jakarta, 10 Juli 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.179
Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023
(Gedung Arsip, Jakarta, 15 Juli 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.180
Evaluasi Kartu Pengawas Satker Perwakilan Triwulan III TA 2023
(Gedung Communication Center Puskom Portal, Jakarta, 9 Oktober 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.181
Entry Briefing Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan dan *Exit Briefing* Pemeriksaan atas Laporan BMN pada Kemenlu Tahun 2023
(Jakarta, 9 Oktober 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.182
Penyusunan Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
(Gedung Museum KAA, Bandung 5-7 Desember 2023)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.183
Entry Briefing Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan 2023 dan *Exit Briefing* Pemeriksaan atas Laporan BMN pada Kemenlu Tahun 2023
(Ruang Nusantara, Jakarta, 15 Januari 2024)
Sumber: Kemenlu

Gambar III.184
Penyusunan Kertas Kerja Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan TA 2023
(Ruang Nusantara, Jakarta, 15 Januari 2024)
Sumber: Kemenlu

III.2

Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Kemenlu pada tahun 2023 adalah sebesar Rp8.689.044.504.000,00 (delapan triliun enam ratus delapan puluh sembilan miliar empat puluh empat juta lima ratus empat ribu rupiah) berdasarkan DIPA Induk Kemenlu TA 2023 tanggal 24 November 2022.

Sepanjang tahun 2023, terdapat penyesuaian pagu anggaran dengan perincian sebagai berikut:

01

Kebijakan *Automatic Adjustment*

Kemenlu mendapatkan kebijakan *automatic adjustment* yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu pada Juli 2023 dan Oktober 2023. Jumlah anggaran Kemenlu yang diblokir oleh Kemenkeu melalui *automatic adjustment* tahap 1 sebesar Rp70.126.241.000,00 (tujuh puluh miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) berdasarkan instruksi Menteri Keuangan melalui Surat No. S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023. Hal ini menyebabkan perubahan Pagu Anggaran Kemenlu berkurang menjadi Rp8.618.918.263.000,00 (delapan triliun enam ratus delapan belas miliar sembilan ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Selanjutnya, Kemenkeu menetapkan *automatic adjustment* tahap 2 dengan jumlah anggaran Kemenlu yang diblokir sebesar Rp5.637.594.000,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), berdasarkan instruksi Menteri Keuangan melalui Surat No. S-371/MK.02/2023 tanggal 10 Oktober 2023. Hal ini menyebabkan perubahan Pagu Anggaran Kemenlu berkurang menjadi Rp8.613.280.669.000,00 (delapan triliun enam ratus tiga belas miliar dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

02

Anggaran Bersumber Dana PNBP pada Kemenlu Mendapatkan Penyesuaian Anggaran

Kemenlu melalui surat Nomor 03091/PR/11/2023/03 tanggal 23 November 2023, dengan mempertimbangkan sisa cicilan Gedung Perwakilan RI serta Realisasi PNBP yang di atas target, maka sesuai dengan persetujuan Kementerian Keuangan melalui surat Nomor S-443/PB.2/2023 tanggal 29 November 2023, anggaran bersumber dana PNBP pada Kemenlu mendapatkan penyesuaian anggaran sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Sehingga anggaran Kemenlu menjadi Rp8.638.280.669.000,00 (delapan triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

03

Mengajukan Anggaran Belanja Tambahan untuk Belanja Pegawai

Kemenlu melalui surat nomor 457/PR/10/2023/03/01 tanggal 2 Oktober 2023 mengajukan Anggaran Belanja Tambahan untuk Belanja Pegawai yang disetujui oleh Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-448/MK.2/2023 tanggal 28 November 2023 sebesar Rp200.077.656.000,00 (dua ratus miliar tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Sehingga anggaran Kemlu TA 2023 menjadi Rp8.838.358.325.000,00 (delapan triliun delapan ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Total pagu Kemenlu setelah penyesuaian *Automatic Adjustment* dan perubahan pagu PNBP menjadi

Rp8.838.358.325.000,00

(delapan triliun delapan ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Pagu anggaran tersebut menjadi total pagu akhir Kemenlu TA 2023.

Realisasi anggaran Kemenlu TA 2023 adalah sebesar Rp8.681.663.406.576,00 (delapan triliun enam ratus delapan puluh satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sebesar 98,23% dari pagu anggaran sebesar Rp8.838.358.325.000,00 (delapan triliun delapan ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Persentase realisasi tersebut meningkat jika dibandingkan persentase realisasi anggaran pada tahun 2022 yaitu sebesar 97,18%.

Pada periode RPJMN 2014-2019 yang merupakan periode sebelum pandemi Covid-19, terdapat tren kenaikan nilai pagu Kemenlu sebesar Rp5.731.138.190.000,00 (tahun 2014) menjadi Rp8.035.132.666.000,00 (tahun 2019). Pada tahun 2020, akibat pandemi Covid-19 pagu Kemenlu turun menjadi sebesar Rp7.49T, namun kemudian berangsur meningkat dari tahun ke tahun disesuaikan dengan kemampuan pemerintah mengatasi pandemi Covid-19 dan stabilnya kondisi perekonomian di dalam negeri.

Dari segi realisasi, serapan anggaran Kemenlu pada tahun 2014-2019 cukup fluktuatif, sementara pada periode tahun 2020-2023 tren realisasi semakin baik hingga mencapai titik tertinggi 98,23% pada tahun 2023. Tren peningkatan realisasi anggaran ini diharapkan berjalan lurus dengan peningkatan anggaran Kemenlu kedepannya karena menjadi bukti kinerja penyerapan anggaran yang diharapkan dari anggaran yang telah dipercayakan kepada Kemenlu.

> Periode tahun 2020-2023 tren realisasi semakin baik hingga mencapai titik tertinggi 98,23% pada tahun 2023

DIPA dan Realisasi Anggaran Kemenlu 2014-2024

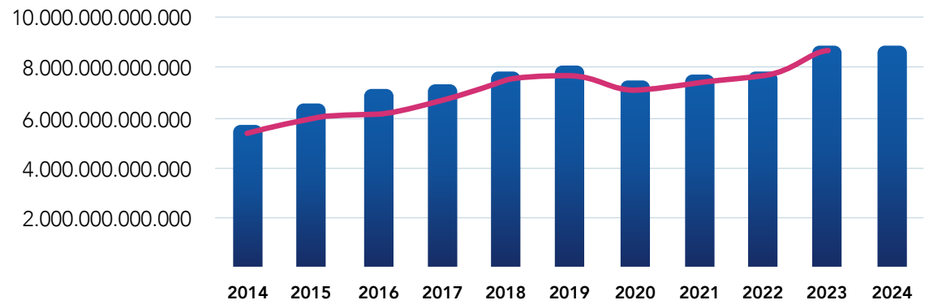

Gambar III.185
Data Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Kemenlu Periode TA 2014-2024
(Sumber: Kemenlu)

Tabel III.78
Pagu dan Realisasi Anggaran Kemenlu TA 2023 per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Sumber Pendanaan
Belanja Pegawai	Rp3.826.175.497.000,00	Rp3.770.705.511.386,00	98,55%	RM
Belanja Barang	Rp3.700.151.406.000,00	Rp3.622.575.004.153,00	97,90%	RM dan PNBP
Belanja Modal	Rp1.312.031.422.000,00	Rp1.288.382.891.037,00	98,20%	RM dan PNBP
Total	Rp8.838.358.325.000,00	Rp8.681.663.406.576,00	98,23%	RM dan PNBP

Tabel III.79
Pagu dan Realisasi Anggaran Kemenlu TA 2023 per Eselon I

Satker Eselon I	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
Sekretariat Jenderal	Rp7.636.683.117.000,00	Rp7.481.872.850.470,00	97,97%
Ditjen Asia Pasifik dan Afrika	Rp26.133.969.000,00	Rp25.930.922.969,00	99,22%
Ditjen Amerika dan Eropa	Rp22.339.528.000,00	Rp22.339.522.859,00	100,00%
Ditjen Kerja Sama Asean	Rp112.026.031.000,00	Rp112.024.170.957,00	100,00%
Ditjen Kerjasama Multilateral	Rp887.947.086.000,00	Rp886.671.389.134,00	99,86%
Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik	Rp29.480.453.000,00	Rp29.462.632.392,00	99,94%
Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional	Rp18.866.084.000,00	Rp18.865.287.360,00	100,00%
Ditjen Protokol dan Konsuler	Rp79.674.567.000,00	Rp79.292.570.160,00	99,52%
Inspektorat Jenderal	Rp13.007.664.000,00	Rp13.007.568.485,00	100,00%
Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri	Rp12.199.826.000,00	Rp12.196.491.790,00	99,97%
Total	Rp8.838.358.325.000,00	Rp8.681.663.406.576,00	98,23%

Tabel III.80
Pagu dan Realisasi Anggaran Pro PN Kemenlu TA 2023

Satker Eselon I	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
Perundingan Penetapan Batas Maritim (Malaysia, Filipina, Palau, Vietnam), Konsultasi Pemberlakuan Persetujuan *Realignment* FIR, dan Pemutakhiran Data Batas Darat dan Maritim dalam Mendukung Kebijakan Satu Peta	Rp2.775.000.000,00	Rp2.774.934.627,00	100,00%
Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (Pusat)	Rp42.413.735.000,00	Rp42.081.846.574,00	99,22%
Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (Perwakilan RI)	Rp139.024.766.000,00	Rp131.790.656.062,00	94,80%
Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023	Rp87.610.935.000,00	Rp87.614.878.716,00	100,00%
Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB	Rp2.683.782.000,00	Rp2.679.122.892,00	99,83%
Diplomasi Komoditas Berkelanjutan	Rp1.925.825.000,00	Rp1.916.497.932,0	99,52%
Keketuaan Indonesia pada MIKTA 2023	Rp1.925.825.000,00	Rp4.016.732.975,00	99,29%
Total	Rp280.479.667.000,00	Rp272.874.669.778,00	97,29%

Realisasi anggaran merupakan salah satu dari lima variabel dalam pengukuran NKA. NKA K/L diperoleh dari pengukuran variabel-variabel yaitu Capaian *Output*, Efisiensi, Konsistensi Rencana Penarikan Data, Rata-rata nilai Satker dan Realisasi Anggaran.

Pada Tahun 2023, berdasarkan data per 24 Januari 2024, NKA Kemenlu TA 2023 yaitu sebesar 94,80 dengan kategori predikat Sangat Baik. Nilai tersebut merupakan penjumlahan nilai EKA sebesar 96,25 (bobot 50%) dan nilai IKPA sebesar 93,19 (bobot 50%).

Salah satu faktor NKA yang belum optimal terdapat pada variabel deviasi halaman III DIPA sebagai salah satu komponen pembentuk nilai IKPA. Perlunya peningkatan kualitas Perencanaan Anggaran sehingga deviasi antara RPD triwulanan terhadap Realisasi Anggaran dapat diminimalisir. Hal ini menjadi catatan penting bagi Kemenlu untuk melakukan *corrective action* di tahun 2024 sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dan optimalnya Nilai Kinerja Anggaran secara keseluruhan.

III.3

Analisis Penggunaan Sumber Daya

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Sesuai Renja Kemenlu TA 2023 dan berdasarkan metode pengelolaan anggaran berbasis kinerja, ditetapkan 5 (lima) Program untuk mendukung penggunaan anggaran atas 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama Kemenlu.

Capaian kinerja Kemenlu Tahun 2023 telah didukung oleh penyerapan anggaran sebesar 98,23%. Rincian anggaran per Program dan Sasaran Strategis berdasarkan pada DIPA Induk Kemenlu TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III.81
Rincian Anggaran per Program dan Sasaran Strategis TA 2023

Program	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian IKU	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi
Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional (AA)	Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal	Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan	110,67	386.666.637.000	375.547.048.032	97,12%
		Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi	120,00			
		Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata	115,63			
	Integritas Kedaulatan NKRI dan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional yang Meningkat	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	103,04			
	Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi	Persentase Tindak Lanjut/ Implementasi Kesepakatan Internasional oleh *Stakeholders* Dalam Negeri	120,00			
		Indeks Pengaruh Rekomendasi Strategi Kebijakan Luar Negeri terhadap Kebijakan Pemangku Kepentingan	106,88			

Program	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian IKU	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi
	Diplomasi Bilateral yang Kuat	Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	120,00			
		Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan, dan Maritim	114,67			
Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Mulltilateral (AK)	Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh di tingkat Regional dan Global	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional	100,61	987.942.789.000	986.725.973.815	99,88%
	Diplomasi Multilateral yang Kuat	Persentase Prakarsa/ Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	101,78			
		Persentase Prakarsa/ Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Multilateral di Bidang Politik, Keamanan dan Maritim	101,78			
Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional (AM)	Integritas Kedaulatan NKRI dan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional yang Meningkat	Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim	101,94	9.255.566.000	9.255.295.229	100,00%
Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik (AL)	Pelindungan WNI/ BHI di Luar Negeri dan Pelayanan Publik yang Prima	Persentase Kasus WNI di Luar Negeri yang Diselesaikan	110,87	236.645.415.000	227.601.862.761	96,18%
		Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik	100,00			
Program Dukungan Manajemen (WA)	Infrastruktur Diplomasi yang Kuat	Nilai Sistem Merit Kementerian Luar Negeri	114,50	7.217.847.918.000	7.082.533.226.739	98,13%
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri	98,10			
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri	99,19			
		Indeks pengelolaan aset Kementerian Luar Negeri	100,34			
		Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Luar Negeri	101,94			
		Indeks Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kementrian Luar Negeri	120,00			
Total				8.838.358.325.000	8.681.663.406.576	98,23%

Berdasarkan tabel realisasi anggaran per program berada pada kisaran 98% - 100% dengan realisasi kinerja pada kisaran 98% - 120%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Diplomasi dan Kerja Sama Internasional, dengan realisasi anggaran 97,12% telah tercapai rata-rata kinerja sebesar 113,86%.
2. Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Mulltilateral, dengan realisasi anggaran 99,88% telah tercapai rata-rata kinerja sebesar 101,39%.
3. Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional, dengan realisasi anggaran 100,00% telah tercapai rata-rata kinerja sebesar 101,94%.
4. Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik, dengan realisasi anggaran 96,18% telah tercapai rata-rata kinerja sebesar 105,44%.
5. Program Dukungan Manajemen, dengan realisasi anggaran 98,13% telah tercapai rata-rata kinerja sebesar 105,68%

Kemenlu secara rutin melakukan *monitoring* dan evaluasi untuk melihat capaian kinerja serta kesesuaiannya dengan realisasi anggaran. *Monitoring* atas capaian kinerja dan realisasi anggaran secara periodik memungkinkan Kemenlu untuk melakukan proyeksi terhadap Sisa Anggaran (SIAR) ataupun memantau kekurangan anggaran atas program/kegiatan yang menjadi prioritas dengan segera melakukan upaya korektif melalui revisi/realokasi anggaran di tahun berjalan sehingga pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja selaras dengan pemanfaatan anggaran sampai dengan akhir tahun.

> *Monitoring* atas capaian kinerja dan realisasi anggaran secara periodik memungkinkan Kemenlu untuk melakukan proyeksi terhadap Sisa Anggaran (SIAR)

Monev kinerja dan anggaran dilaksanakan secara komprehensif setiap triwulan dengan memanfaatkan aplikasi monev kinerja dan anggaran SMART Kemenkeu, e-Monev Bappenas dan aplikasi AKSI Kemenlu. Kemenlu juga memanfaatkan kuadran perbandingan capaian kinerja dan realisasi anggaran untuk memantau efisiensi dan efektivitas kinerja dibandingkan anggaran yang dikeluarkan. Berikut tabel kuadran panduan monev kinerja dan anggaran:

Gambar III.186
Kuadran Panduan Monev Kinerja dan Anggaran

Penilaian kategori tinggi rendahnya capaian kinerja dan anggaran per triwulan didasarkan pada batasan angka/persentase sebagai berikut:

	Rendah	Tinggi
TW I	Di bawah 25%	Di atas 25%
TW II	Di bawah 50%	Di atas 50%
TW III	Di bawah 75%	Di atas 75%
TW IV	Di bawah 90%	Di atas 90%

Gambar III.187
Kategori Tinggi Rendahnya Capaian Kinerja dan Anggaran Per Triwulan
(Sumber: Kemenlu)

Pada TW 4 Tahun 2023 realisasi anggaran dan capaian kinerja Kemenlu sama-sama telah mencapai lebih dari 90%, dimana realisasi anggaran sebesar 98,23% dan capaian kinerja sebesar 107,63% Jika dilihat pada kuadran dan kategori tersebut di atas, Kemenlu telah mencapai target capaian kinerja dan anggaran yang ideal/optimal. Persentase capaian kinerja sebesar 107,63% yang lebih besar daripada realisasi anggaran sebesar 98,23% mencerminkan efisiensi dan efektivitas Kemenlu dalam pencapaian target kinerja.

> Jika dilihat pada kuadran dan kategori, Kemenlu telah mencapai target capaian kinerja dan anggaran yang ideal/optimal

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Dalam mencapai target kinerja pada tiap-tiap Program dan Sasaran Strategis, seluruh sumber daya manusia (SDM) Kemenlu saling berkoordinasi dan bekerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan Permenlu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri. Seluruh SDM Kemenlu tersebar pada 10 Unit Eselon I Kemenlu Pusat dan 131 Satker Perwakilan RI.

Untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, seluruh SDM secara rutin melakukan pelaporan kinerja pegawai pada tiap bulan dalam bentuk Laporan Kinerja Bulanan Pegawai Bulanan (LKPB) dan tiap tahunnya dalam bentuk Laporan Realisasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Capaian kinerja individu mendukung capaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Kemenlu melakukan berbagai upaya agar pengelolaan SDM tetap efisien dan dapat menunjang kinerja dengan maksimal, melalui pemenuhan formasi SDM pengganti pegawai mutasi sesuai dengan kebutuhan Unit Organisasi dan rekrutmen pegawai sesuai dengan kebutuhan pegawai yang telah tertuang dalam Peta Jabatan Kemenlu.

> Seluruh SDM Kemenlu tersebar pada 10 Unit Eselon I Kemenlu Pusat dan 131 Satker Perwakilan RI

Tabel III.82
Jumlah Pegawai per Jabatan Fungsional
Sumber: Aplikasi DUK Kemlu per 31 Desember 2023

Jabatan Fungsional Keahlian	Jumlah Pegawai
Analis Kebijakan	4
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	30
Arsiparis	160
Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	5
Pranata Sumber Daya Manusia	22
Auditor	46
Diplomat	1.885
Dokter Gigi	2
Dokter Umum	5
Perawat	2
Pamong Budaya	3
Penata Kanselerai	438
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	4
Perancang Peraturan Perundang-Undangan	4
Perencana	36
Pranata Informasi Diplomatik	256
Pranata Komputer	17
Pustakawan	2
Sandiman	27
Total	**2.948**

Selain itu, pada tahun 2023, Kemenlu juga membuka lowongan pegawai untuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk 89 formasi, dengan detail sebagai berikut:

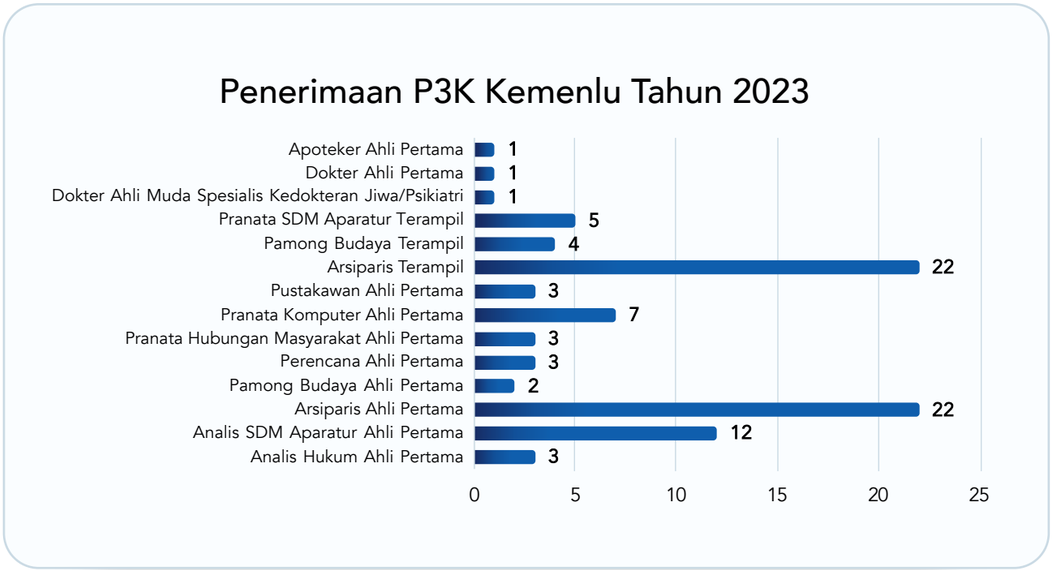

Gambar III.188
Penerimaan P3K Kemenlu Tahun 2023
(Sumber: https://e-casn.kemlu.go.id)

Upaya pengisian formasi jabatan tersebut diharapkan akan meningkatkan kinerja Kemenlu secara keseluruhan. Spesialisasi jabatan juga telah dilakukan demi meningkatkan kualitas kinerja. Pemenuhan formasi jabatan yang diduduki oleh SDM didasari oleh latar belakang pendidikan ataupun latar belakang profesional yang sesuai dengan syarat jabatannya.

Kemenlu juga berupaya meningkatkan kualitas SDM dengan cara menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan, seperti program pendidikan pelatihan berjenjang untuk jabatan fungsional, pelatihan bahasa, pelatihan untuk keahlian dan keterampilan tertentu, serta berbagai pelatihan yang dapat menunjang kinerja pegawai.

> “Spesialisasi jabatan juga telah dilakukan demi meningkatkan kualitas kinerja

Sarana dan Prasarana yang Mendukung

Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan BMN sangat penting dalam APBN, seperti yang diamanatkan pada Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 dan PP Nomor 28 Tahun 2020. *Good governance* dalam pengelolaan BMN mencakup:

a. **Transparansi**
   Pengelolaan BMN harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. **Akuntabilitas**
   Penggunaan dan pengelolaan BMN harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. **Efektivitas dan Efisiensi**
   Pengelolaan BMN harus efisien dan menghasilkan hasil yang efektif.

d. **Tepat Guna**
   Penggunaan BMN harus sesuai dengan kebutuhan dan anggaran.

Kemenlu telah melakukan pengelolaan sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan, efektif dan efisien, serta tepat guna. Hal tersebut didukung dengan peningkatan kualitas SDM yang telah memahami sistem pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif.

Selama tahun 2023, dilakukan pengadaan BMN yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penunjang tercapainya kinerja. BMN tersebut terbagi atas 2 (dua) jenis barang yaitu intrakomptabel (nilai perolehan di atas nilai kapitalisasi yaitu sama dengan Rp1.000.000,00 atau lebih) dan ekstrakomtabel (nilai perolehan di bawah Rp1.000.000,00).

Pengecualian pada gedung dan bangunan nilai kapitalisasinya adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pengadaan tersebut berasal dari Pembelian, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Perolehan Lainnya. Untuk Tahun Anggaran 2023, Laporan BMN berdasarkan nilai perolehan adalah sebagai berikut:

Tabel III.83
Laporan Pengadaan Barang Milik Negara
Menurut Nilai Perolehan Tahun Anggaran TA 2023

Kelompok Barang	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
Tanah	8.192	Rp3.190.902.035.861,00	-	0
Peralatan dan Mesin	266	Rp305.055.612.225,00	410	Rp414.359.867,00
Gedung Bangunan	8	Rp495.319.363.689,00	(1)	-Rp3.535.300,00
Jalan, Irigasi, Jaringan	(1)	-Rp4.431.580,00	-	0
Aset Tak Berwujud	339	Rp12.631.252.520,00	-	0
Aset Tetap Lainnya	(200)	Rp1.856.052.872,00	(3)	-Rp1.550.807,00
KDP	76	Rp237.896.877.215,00	-	0
Total	**Rp4.243.656.762.802,00**		**Rp409.273.760,00**	

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) digunakan sebagai alat ukur kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) guna mendukung tata kelola pemerintah yang baik. IPA menjadi satu bagian pengukuran dari area perubahan reformasi birokrasi sesuai dengan Permen PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hasil dari IPA tersebut dapat digunakan sebagai bahan *monitoring* dan evaluasi baik bagi Pengelola Barang maupun Pengguna Barang dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan terkait tata Kelola BMN serta sebagai upaya-upaya perbaikan dalam penatausahaan dan pengelolaan BMN yang berkelanjutan.

Penilaian Indeks Pengelolaan Aset tahun 2023 dilakukan oleh DJKN Kemenkeu atas laporan tahun 2022 berdasarkan Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor S-21/KN/KN.2/2023 disampaikan tertanggal 31 Januari 2023, raihan Indeks Pengelolaan Aset Kemenlu Tahun 2022 sebesar 2,91 (mengingat nilai 2023 belum diterbitkan oleh Kemenkeu).

Hasil IPA yang diperoleh menjadi bahan *monitoring* dan evaluasi baik bagi Pengelola Barang dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan terkait tata kelola BMN serta sebagai upaya perbaikan dalam penatausahaan dan pengelolaan BMN yang berkelanjutan.

Bab IV
Penutup

IV.1. Simpulan Umum Capaian Kinerja

IV.2. Kendala dan Tantangan yang Dihadapi

IV.3. Proyeksi Ke Depan

IV.1

Simpulan Umum Capaian Kinerja

Pada tahun 2023 nilai capaian kinerja Kementerian Luar Negeri sebesar 107,63 yang didapat dari nilai masing-masing perspektif.

Tabel III.84
Nilai Capaian Kinerja Organisasi per Perspektif

Perspektif	Bobot Perspektif	Skor Perspektif
Stakeholder Perspective	25%	106,16
Customer Perspective	15%	109,44
Internal Business Process Perspective	30%	109,56
Learning and Growth Perspective	30%	106,03
Total NCKO		**107,63**

Memperhatikan capaian tersebut, nilai capaian kinerja Kementerian Luar Negeri mendapatkan predikat Istimewa. Dari 20 IKU yang diampu oleh Kemenlu, seluruh IKU mencapai target yang telah ditetapkan. Nilai Capaian Kinerja Organisasi Kemenlu konstan di atas 100 pada periode 2020-2023.

Tabel III.85
Perbandingan Nilai Capaian Kinerja Kemenlu 2020-2023

Keterangan	2020	2021	2022	2023
IKU Mencapai Target	9	11	17	19
Total IKU	15	16	20	20
Total NCKO	**101,50**	**107,66**	**107,16**	**107,63**

IV.2

Kendala dan Tantangan

Selama tahun 2023, Kementerian Luar Negeri menghadapi sejumlah kendala dan tantangan dalam pencapaian target kinerja.

01

Kesiapan Diplomasi Ekonomi pada Sektor Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata

Dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi pada sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata, dari sisi internal, masih perlu peningkatan kesiapan pemangku kepentingan dalam negeri dalam menjajaki dan/atau menindaklanjuti komitmen, baik dari segi regulasi, infrastruktur, ataupun SDM. Dari sisi eksternal, dinamika geopolitik dan ekonomi global yang secara langsung dapat mempengaruhi sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata nasional sehingga berdampak pada performa diplomasi ekonomi.

02

Mengedepankan Kepentingan Nasional di Tengah Berbagai Kepentingan Negara Mitra

Dalam menjalankan peran kepemimpinan pada forum-forum Internasional, Kemenlu harus mampu mengedepankan kepentingan nasional di tengah berbagai kepentingan negara mitra lainnya. Dalam pencalonan Indonesia, Kemenlu perlu melakukan persiapan strategi secara matang untuk memperoleh hasil yang optimal. Prakarsa dan rekomendasi Indonesia dalam forum internasional perlu didukung dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi intens antar Kementerian/Lembaga terkait di level nasional.

03

Pengaruh Dinamika Kebijakan Politik dan Situasi Politik Domestik Negara Mitra dalam Penyelesaian Perundingan Perbatasan

Dalam penyelesaian perundingan perbatasan, dinamika kebijakan politik dan situasi politik domestik negara mitra memengaruhi prioritas perundingan bagi suatu negara yang menimbulkan perbedaan pendekatan dalam mencari solusi penyelesaian perundingan.

04

Peningkatan Citra Positif Indonesia

Upaya peningkatan citra positif Indonesia di luar negeri perlu dilakukan melalui upaya bersama dengan memanfaatkan teknologi terkini.

05

Kurangnya Pemahaman WNI Tentang Prosedur Migrasi dan Hukum Negara Setempat

WNI di luar negeri masih belum memahami prosedur migrasi yang benar serta belum memahami aturan hukum negara setempat secara komprehensif sehingga berdampak pada masih banyaknya kasus WNI di luar negeri.

06

Perlu Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Kemenlu masih perlu meningkatkan kualitas pelayanannya untuk meningkatkan indeks kepuasan publik terhadap pelayanan Kemenlu.

07

Implementasi Kerja Sama Strategis dengan Negara Mitra

Mekanisme pemantauan implementasi kerja sama strategis dengan negara mitra dan kesepakatan yang dihasilkan perlu diperkuat di level nasional dengan berkolaborasi dengan kemterian/lembaga terkait.

08

Hambatan dalam Pengisian Kuesioner *Online*

Dalam hal mengukur pengaruh rekomendasi kebijakan Kemenlu, pelaksanaan survei *online* yang kurang *user friendly* menjadi hambatan utama dalam mendapatkan respons yang optimal dari para responden. Hal ini disebabkan oleh *interface* kuesioner yang kurang ramah, yang mengakibatkan sebagian responden, terutama mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi, mengalami kesulitan dalam mengisi kuesioner secara *online*. Kesulitan ini lebih dirasakan oleh unsur pimpinan atau pemangku kepentingan yang lebih terbiasa dengan survei manual atau konvensional.

09

Memerlukan Waktu Cukup Panjang dan Membahas Isu Sensitif

Dalam penyusunan kesepakatan bilateral, khususnya di bidang perbatasan dan maritim yang memerlukan waktu cukup panjang dan membahas isu sensitif diperlukan berbagai pertemuan lanjutan.

10

Perbedaan Antara Anggota Forum Internasional Mengakibatkan Konsensus Sulit Tercapai

Dalam forum internasional, perbedaan posisi dan kepentingan serta dinamika geopolitik antara anggota forum, terutama terkait konflik di beberapa kawasan mengakibatkan konsensus dalam forum internasional sulit tercapai.

11

Memastikan Bahwa Infrastruktur Diplomasi Mendukung Kebijakan Luar Negeri secara Optimal

Perubahan dinamis dalam peraturan nasional menuntut langkah taktis agar segera diimplementasikan di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI. Kemenlu perlu memastikan bahwa infrastruktur diplomasi terdiri dari Sumber Daya Manusia, tata kelola organisasi, pengelolaan aset dan pengelolaan anggaran mendukung kebijakan luar negeri secara optimal.

IV.3

Proyeksi Kedepan

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pemenuhan target sasaran RPJMN 2019-2024. Kementerian/Lembaga didorong untuk menuntaskan seluruh program pembangunan yang telah ditetapkan di periode awal RPJMN. Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Kemenlu melalui kontribusinya pada Prioritas Nasional 1 dan Prioritas Nasional 7, pada tahun 2024 telah menetapkan Rencana Kerja Tahun 2024 yang merujuk pada Prioritas Polugri 4+1, dengan fokus sebagai berikut:

01 Diplomasi ekonomi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional, utamanya dengan memperkuat sektor perdagangan dan investasi yang paling terdampak disrupsi global. Kemenlu akan terus mengupayakan berbagai upaya antara lain seperti perluasan akses pasar, penguatan kerja sama komprehensif, peningkatan kegiatan promosi dan misi bisnis, serta pengoptimalan fasilitasi dan pengawalan komitmen.

02 Menyelenggarakan jaring masuk dan pertemuan internasional, memperkuat kepemimpinan Indonesia melalui berbagai prakarsa dan rekomendasi yang konstruktif serta terus berpartisipasi dalam isi-isu strategis dunia.

03 Intensitas perundingan dan koordinasi dengan negara-negara prioritas akan terus ditingkatkan pada tahun 2024.

04 Peningkatan kualitas survei indeks citra Indonesia di dunia internasional agar dapat menjadi rujukan yang valid penentuan agenda dan fokus program yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.

05 Melakukan penguatan kerja sama dan kolaborasi dengan instansi terkait serta melakukan kampanye penyadaran publik untuk mengurangi migrasi non prosedur sehingga mencegah terjadinya kasus di luar negeri sejak sebelum keberangkatan.

06 Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara kementerian/lembaga/pemangku kepentingan lain dalam upaya menyempurnakan pelayanan kepada publik serta mengatasi segala tantangan/kendala yang ditemui di lapangan.

07 Mendorong pemangku kepentingan di dalam negeri untuk mengambil langkah konkret atas berbagai kesepakatan Indonesia dengan negara mitra. Pendekatan dengan pemangku kepentingan di dalam negeri dilakukan dengan strategi kolaboratif, informatif dan fleksibel. Dalam menindaklanjuti hasil kesepakatan internasional, Kemenlu akan melibatkan kerja sama, penyediaan informasi dan komunikasi yang baik, serta penyusunan program yang sesuai.

08 Berupaya terus meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan Kemenlu di bidang polugri kepada pemangku kepentingan yang lebih luas sesuai dengan peran Kemenlu sebagai Koordinator dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri.

09 Meningkatkan frekuensi Dialog Koordinasi dengan seluruh unsur terkait dalam proses perundingan internasional yang mengedepankan kepentingan nasional RI.

10 Terus memainkan peran aktif dalam forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan, yang memiliki dampak signifikan dalam kerja sama ekonomi, sosial dan budaya. Kerja sama regional terus difokuskan untuk memperkuat pengaruh Indonesia di tingkat global.

11 Senantiasa melakukan pengembangan kapasitas SDM Kemenlu yang menjadi motor penggerak diplomasi sehingga dapat mendukung organisasi Kemenlu selalu adaptif terhadap perkembangan terkini.

> “Untuk mencapai visi Indonesia Emas, Indonesia memerlukan kemampuan beradaptasi terhadap disrupsi dan tantangan, serta kemampuan memanfaatkan peluang yang muncul dari lingkungan yang terus berubah

Retno L.P. Marsudi
Menteri Luar Negeri RI
Oktober, 2023

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ASEAN
INDONESIA
2023

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Jalan Taman Pejambon No. 6
Jakarta 10110

Tel. (+62) 21 344 1508
Email kontak-kami@kemlu.go.id